



**COMMITTING TO
GREEN
SUSTAINABILITY
INDUSTRY,
SUPPORTING NATIONAL
FOOD SECURITY**

**KOMITMEN PADA INDUSTRI HIJAU YANG BERKELANJUTAN,
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini disusun untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dokumen ini mencakup evaluasi keuangan, kinerja operasional, rencana masa depan, strategi, kebijakan, dan tujuan perusahaan. Kami ingin menyampaikan bahwa proyeksi dan pernyataan yang terkandung di dalamnya memperhitungkan risiko dan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam perkembangan sebenarnya dibandingkan dengan apa yang dilaporkan. Semua pernyataan tentang masa depan didasarkan pada asumsi tentang kondisi saat ini dan masa depan perusahaan, serta lingkungan bisnis yang mempengaruhi operasi PUSRI.

Pernyataan-pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis di mana PUSRI menjalankan kegiatan usaha. Kami tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan dan telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Pupuk Sriwidjaja Palembang", "Perusahaan", "Perseroan" dan "PUSRI" yang didefinisikan sebagai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang menjalankan kegiatan usaha dibidang produksi dan distribusi pupuk Urea, pupuk NPK dan produk sampingan lainnya.

The 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has been prepared to comply with the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), namely POJK No. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies. This document includes financial evaluations, operational performance, future plans, strategies, policies, and company goals. We would like to convey that the projections and statements contained herein take into account risks and uncertainties, which may result in significant differences between actual developments and those reported. All forward-looking statements are based on assumptions regarding the current and future conditions of the company and the business environment affecting PUSRI's operations.

These prospective statements are made based on various assumptions regarding the current conditions and predictions of future conditions in the business environment in which PUSRI operates. We do not guarantee that the referenced documents, which have been validated for their accuracy, will deliver certain results as expected.

This Annual Report includes the terms "Pupuk Sriwidjaja Palembang", "Company", "Perseroan", and "PUSRI", which are defined as PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, engaged in the production and distribution of Urea fertilizers, NPK fertilizers, and other by-products.

Konsep desain buku laporan tahunan PUSRI tahun ini mengusung pendekatan *Human Interest* sebagai narasi visual utama. Melalui lensa fotografi yang menitikberatkan pada elemen emosional dan keterhubungan manusia, laporan ini menampilkan kisah nyata kehidupan para karyawan—baik dari lingkungan kantor maupun pabrik—dalam kesehariannya.

Foto-foto yang dihadirkan menggambarkan nilai-nilai inti perusahaan seperti keberlanjutan, kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Setiap visual disusun secara autentik dan hangat, membangun harmoni antara semangat bekerja di industri hijau dan kedekatan relasi personal.

Dengan pendekatan ini, laporan tahunan tidak hanya menjadi media informasi perusahaan, tetapi juga sebuah karya visual yang inspiratif—mewakili semangat PUSRI dalam mendukung masa depan pangan Indonesia melalui praktik industri yang berkelanjutan dan berorientasi pada manusia.

This year's design concept for PUSRI's Annual Report takes a Human Interest approach as the main visual narrative. Through photography that emphasizes emotional elements and human connection, the report showcases real-life stories of employees—both from the office and the factory—depicting their daily lives.

The images presented highlight the company's core values, such as sustainability, contributions to national food security, and the importance of work-life balance. Each visual is crafted authentically and warmly, fostering harmony between the spirit of working in a green industry and the closeness of personal relationships.

With this approach, the Annual Report serves not only as a corporate information medium but also as an inspiring visual piece—representing PUSRI's commitment to supporting Indonesia's food future through sustainable industry practices and a human-centric focus.





Tema dan Arti Tema

Theme and Meaning of the Theme



COMMITTING TO GREEN SUSTAINABILITY INDUSTRY, SUPPORTING NATIONAL FOOD SECURITY

Komitmen pada industri hijau yang berkelanjutan,
untuk mendukung ketahanan pangan nasional

ARTI TEMA:

Tema ini menggarisbawahi strategis dan vitalnya peran industri pupuk dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan kelestarian alam, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, sejak beberapa tahun terakhir, PUSRI mengembangkan dan memperkuat pilar pencapaian kinerja dalam suatu kerangka strategi 4C, yang terdiri dari *cost leadership*, *competitive to market*, *competency of employee* dan *sustainability & clean industry*. Keempat strategi tersebut menunjukkan komitmen PUSRI dalam mengimplementasikan praktik industri hijau secara berkelanjutan dan konsisten untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan nasional yang selaras dengan purpose Pupuk Indonesia Grup serta Asta Cita Pemerintah..

Konsistensi dan disiplin dalam menerapkan beragam inisiatif strategis selama tahun 2024 membuat PUSRI mencatatkan perbaikan kinerja operasional maupun keuangan di tengah kondisi usaha yang semakin penuh tantangan. Realisasi kinerja tersebut diyakini akan semakin menginspirasi seluruh jajaran karyawan, pelanggan maupun pemangku kepentingan PUSRI untuk bekerja keras bersama-sama mempercepat terwujudnya ekosistem ekonomi hijau nasional yang terus tumbuh, tangguh dan berkelanjutan.

Meaning of the Theme:

This theme underscores the strategic and vital role of the fertilizer industry in supporting the achievement of national development goals while prioritizing environmental sustainability, quality, and continuity. Therefore, in recent years, PUSRI has developed and strengthened its performance achievement pillars within the 4C strategic framework, comprising cost leadership, competitiveness in the market, employee competency, and sustainability & clean industry. These four strategies reflect PUSRI's commitment to consistently and sustainably implementing green industry practices in support of achieving national food security, in alignment with the purpose of Pupuk Indonesia Group and the Government's Asta Cita vision.

The consistency and discipline in implementing various strategic initiatives throughout 2024 have led PUSRI to achieve improvements in both operational and financial performance, even in the face of increasingly challenging business conditions. The realization of this performance is expected to further inspire PUSRI's employees, customers, and stakeholders to work together to accelerate the creation of a resilient, sustainable, and growing national green economy ecosystem.

Kesinambungan Tema Continuity of the Theme



2024

Committing to Green Sustainability Industry, Supporting National Food Security **Komitmen pada industri hijau yang berkelanjutan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional**

Tema ini menggarisbawahi strategis dan vitalnya peran industri pupuk dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lestari, berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karenanya, sejak beberapa tahun terakhir, PUSRI mengembangkan dan memperkuat pilar pencapaian kinerja dalam suatu kerangka strategi 4C, yang terdiri dari *cost leadership*, *competitive to market*, *competency of employee* dan *sustainability & clean industry*. Keempat strategi tersebut menunjukkan komitmen PUSRI dalam mengimplementasikan praktik industri hijau secara berkelanjutan dan konsisten untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan nasional yang selaras dengan purpose Pupuk Indonesia Grup serta Asta Cita Pemerintah.

The theme highlights the strategic and vital role of the fertilizer industry in supporting the achievement of national development goals that are sustainable, high-quality, and continuous. Therefore, in recent years, PUSRI has developed and strengthened its performance achievement pillars within the 4C strategic framework, comprising cost leadership, competitiveness in the market, employee competency, and sustainability & clean industry. These four strategies reflect PUSRI's commitment to consistently and sustainably implementing green industry practices in support of achieving national food security, in alignment with the purpose of Pupuk Indonesia Group and the Government's Asta Cita vision.



2023

Sustain to The Next Level

Berbagai inisiatif yang dilakukan PUSRI sepanjang tahun 2023 merupakan langkah-langkah strategis dan sistemik untuk memperkuat fundamental bisnis Perusahaan dalam jangka panjang serta selaras dengan bisnis berkelanjutan.

PUSRI optimis bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dapat membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang kuat serta memberikan manfaat optimum bagi seluruh pemangku kepentingan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

The various initiatives undertaken by PUSRI throughout 2023 are strategic and systemic steps to strengthen the Company's business fundamentals in the long term, while aligning with sustainable business practices.

PUSRI is optimistic that these efforts will lead the Company toward robust growth and provide optimal benefits for all stakeholders, in line with Indonesia's sustainable development goals.



2022

Inovasi dan Digitalisasi untuk Memperkuat Daya Saing Innovation and Digitalization to Strengthen Competitiveness

Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan Agro industri unggul di Asia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) menumbuhkan semangat inovasi untuk menciptakan proses kerja yang lebih efektif dan efisien, serta solusi kreatif dalam pengendalian biaya yang baik. Upaya ini membuahkan hasil dengan pencapaian kinerja PUSRI yang terus bertumbuh dari masa ke masa.

Pada tahun 2022 PUSRI terus mengintensifkan langkah-langkah efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya dari tahun sebelumnya dengan memperkuat digitalisasi yang telah berhasil mengangkat kinerja PUSRI menjadi lebih baik, serta berhasil mendapatkan penghargaan bidang Inovasi baik dari tingkat Nasional maupun Internasional.

In order to realize its vision of becoming a leading agro-industrial company in Asia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) fosters an innovation spirit to create more effective and efficient work processes, as well as creative solutions in cost control. These efforts have borne fruit, as PUSRI's performance continues to grow over time.

In 2022, PUSRI intensified operational efficiency measures and optimized resources from the previous year by strengthening digitalization, which successfully improved PUSRI's performance and earned recognition in the field of Innovation at both the national and international levels.



2021

Transformasi Bisnis & Digitalisasi Menuju PUSRI Maju 2025 Business Transformation & Digitalization Towards Pusri Maju 2025

Tema ini menunjukkan fokus PUSRI pada upaya-upaya transformasi bisnis serta penguatan basis digital dalam upaya memperkuat bisnis. Sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia, PUSRI yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), senantiasa melaksanakan perubahan dan layanan terbaik bagi stakeholders. Untuk itu PUSRI melaksanakan serangkaian tahapan transformasi bisnis, salah satunya melalui Program Agrosolution bersama PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam Program Agrosolution, petani yang terlibat diberikan pendampingan intensif mengenai budidaya tanaman, aplikasi teknologi pertanian mutakhir, akses permodalan dan offtake hasil panen yang dilakukan oleh stakeholder. Program ini dapat membantu petani mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan petani.

This theme highlights PUSRI's focus on business transformation efforts and strengthening the digital foundation to enhance its business. As one of the strategic steps to achieve its vision of becoming a leading agro-industrial company in Asia, PUSRI a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), consistently implements changes and delivers the best services to its stakeholders. To this end, PUSRI is undertaking a series of business transformation phases, one of which is the Agrosolution Program in collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero). In the Agrosolution Program, participating farmers receive intensive guidance on crop cultivation, the application of advanced agricultural technology, access to capital, and harvest offtake facilitated by stakeholders. This program helps farmers achieve optimal results and improve their welfare.



2020

**Akselerasi Transformasi Bisnis menuju Perusahaan Agro Industri Unggul di Asia
Accelerating Business Transformation to be Asia's
Leading Agro Industry Company**

Tema ini menunjukkan upaya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mempertahankan bisnis yang berkesinambungan, di puncak mewabahnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi bisnis dan peningkatan daya saing Perusahaan agar terus mampu memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain.

Ikhtisar tersebut diterjemahkan menjadi akselerasi transformasi bisnis melalui beragam kebijakan strategis, baik dari segi operasional hingga penunjang bisnis. Selain itu, optimalisasi dalam bidang produksi agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan harga yang kompetitif, sehingga mampu bersaing di pasar. Peningkatan kualitas produksi tersebut, antara lain dilakukan melalui revitalisasi pabrik P-III dan P-IV menjadi pabrik P-III B.

This theme reflects PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's efforts to maintain a sustainable business during the peak of the COVID-19 pandemic in 2020. This commitment aligns with the company's goal of achieving business transformation and enhancing its competitiveness to continue delivering added value to shareholders and other stakeholders.

This vision was translated into accelerated business transformation through various strategic policies, covering both operational aspects and business support functions. Additionally, production optimization efforts were made to ensure the products produced are of high quality and competitively priced, enabling them to compete in the market. These improvements in production quality were achieved, in part, through the revitalization of the P-III and P-IV plants into the P-III B plant.



2019

**Meningkatkan Komitmen kepada Pelanggan melalui
Inovasi Berkelanjutan dan Solusi Agro Bisnis Terintegrasi
Increasing Commitment to Customers Through Sustainable Innovation
and Integrated Agro Business Solutions**

Tema "Meningkatkan Komitmen kepada Pelanggan melalui Inovasi Berkelanjutan dan Solusi Agro Bisnis Terintegrasi" menggambarkan mata rantai dalam proses bisnis PUSRI dengan strategi memperkuat relasi PUSRI dengan pasar dan pelanggan. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, PUSRI akan berupaya membangun Integrated Agro Industri dan menciptakan nilai tambah bagi kesinambungan bisnisnya hingga masa-masa yang akan datang.

Berbagai inovasi yang telah diiniasi di tahun-tahun sebelumnya, seperti solusi digital e-Pas dan penjualan ritel melalui PUSRI Mart menjadi fondasi bagi PUSRI untuk mewujudkan transformasi tersebut. PUSRI juga mampu mendorong proses produksi dengan rasio konsumsi Gas Bumi yang lebih efisien, yang menandakan bahwa PUSRI telah siap membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

The theme "Increasing Commitment to Customers through Sustainable Innovation and Integrated Agro Business Solutions" illustrates the chain of processes within PUSRI's business, with a strategy focused on strengthening relationships with the market and customers. Through various innovations, PUSRI strives to build an Integrated Agro Industry and create added value for the sustainability of its business in the years to come.

The innovations initiated in previous years, such as the e-Pas digital solution and retail sales through PUSRI Mart, serve as the foundation for PUSRI in realizing this transformation. PUSRI has also successfully driven production processes with a more efficient natural gas consumption ratio, signaling that PUSRI is prepared to build a sustainable business ecosystem.

Kilas Kinerja Utama 2024

2024 Key Performance Highlights



PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL UTAMA

KEY OPERATIONAL PERFORMANCE ACHIEVEMENTS



Volume Produksi Urea 2024
Urea Production Volume in 2024

ton | tons

1.857.832

Total Produksi Urea 2024 : 1.857.832 Ton

Total Urea Production in 2024: 1,857,832 Tons



Volume Penjualan Urea 2024
Urea Sales Volume in 2024

ton | tons

1.883.779 1%

Penjualan Urea 2024: 1.883.779 Ton > Naik 1 %

Urea Sales in 2024: 1,883,779 Tons > Increased by 1%



Volume Produksi NPK 2024
NPK Production Volume in 2024

ton | tons

363.384 11%

Total Produksi NPK 2024: 363.384 Ton > Naik 11%

Total NPK Production in 2024: 363,384 Tons > Increased by 11%



Volume Penjualan NPK 2024
NPK Sales Volume in 2024

ton | tons

401.211 28%

Total Penjualan NPK 2024: 401.211 Ton > Naik 28%

Total NPK Sales in 2024: 401,211 Tons > Increased by 28%



PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN UTAMA

KEY FINANCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENTS



Nilai Pendapatan
Revenue

triliun | trillion

Rp13,53 1,2%

Total Pendapatan 2024: Rp13,53 triliun > Naik 1,2%

Total Revenue in 2024: IDR 13.53 Trillion > Increased by 1.2%



Labu Bersih
Net Profit

triliun | trillion

Rp1,07

Labu Bersih 2024: Rp1,07 triliun

Net Profit in 2024: IDR 1.07 Trillion



PENCAPAIAN PENTING LAINNYA
OTHER NOTABLE ACHIEVEMENTS

Aspek Digitalisasi
Digitalization Aspect

**LIGHTHOUSE
INDUSTRI
4.0**



Mendapatkan Lighthouse Industri 4.0 dari
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Awarded the Lighthouse Industri 4.0 by
the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

Aspek Lingkungan
Environmental Aspect

**PROPER
EMAS**



Mendapatkan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup

Awarded the PROPER Gold rating by the Ministry of Environment
and Forestry

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan

Pada tahun 2024 PUSRI mendapatkan 21 (dua puluh satu) penghargaan dari pihak ketiga, baik berskala internasional, nasional maupun regional atas berbagai prestasinya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan kaidah penyelenggaraan kegiatan yang terbaik, baik pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun tata kelola, sebagai berikut.

Awards

In 2024, PUSRI received 21 (twenty one) awards from third parties at international, national, and regional levels for its various achievements in conducting business activities while consistently adhering to best practices across economic, environmental, social, and governance aspects, as detailed below.

Skala Internasional | International Scale

Nama Penghargaan | Name of Award
International Annual Report 2024

Nama Ajang | Name of Event
International Annual Report Competition

- Kategori | Category**
- Top 100 Report Worldwide
 - Gold Award, dan
 - Technical Achievement Award



Penyelenggara | Organizer
League of American Communications Professionals (LACP)

Nama Penghargaan | Name of Award
Internasional Awards for Committed To Excellence (ACE) 2024

Nama Ajang | Name of Event
29th APQO Internasional Conference 2024

- Kategori | Category**
- 3 Predikat Four Star (tertinggi)
 - 3 Four Star Predicates (highest)
 - 1 Predikat Three Star
 - 1 Three Star Predicate

Penyelenggara | Organizer
Asia Pacific Quality Organization (APQO)



Nama Penghargaan | Name of Award
Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2024

Nama Ajang | Name of Event
Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) Award 2024

- Kategori | Category**
- Predikat Gold Rank
 - Gold Rank Predicate

Penyelenggara | Organizer
NCCR



Nama Penghargaan | Name of Award

Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024

Nama Ajang | Name of Event

Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)

Kategori | Category

Social Empowerment

Penyelenggara | Organizer

Enterprise Asia



Nama Penghargaan | Name of Award

IFA Industry Stewardship Champions

Nama Ajang | Name of Event

IFA Industry Stewardship Champions

Kategori | Category

**Benchmarks for Safety, Health,
and Environment (SHE)**

Penyelenggara | Organizer

International Fertilizer Association (IFA)



Skala Nasional | National Scale

Nama Penghargaan | Name of Award
Indonesia Green Awards 2024

Nama Ajang | Name of Event
Indonesia Green Awards (IGA) 2024

11 Kategori | 11 Category
Kesemuanya mengenai Inovasi Berkelanjutan dan Peningkatan Efisiensi
All of which regarding Sustainable Innovation and Efficiency Enhancement



Penyelenggara | Organizer
The La Tofi School of Social Responsibility

Nama Penghargaan | Name of Award
PROPER Peringkat EMAS

Nama Ajang | Name of Event
PROPER

Kategori | Category
PROPER Peringkat EMAS
PROPER GOLD Rank

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ministry of Environment and Forestry



Nama Penghargaan | Name of Award
Indonesian Conference & Competition Occupational Safety & Health (ICC-OSH) Award 2024

Nama Ajang | Name of Event
Indonesian Conference & Competition Occupational Safety & Health (ICC-OSH) Award 2024

11 Kategori | 11 Category
• **2 Kategori 5 Stars | 2 5 Stars Category**
• **2 Kategori 4 Stars | 2 4 Stars Category**

Penyelenggara | Organizer
PT Wahana Kendali Mutu (WKM)



Nama Penghargaan | Name of Award
Indonesia Responsible Care Award

Nama Ajang | Name of Event
Indonesia Responsible Care Award

Kategori | Category
Gold

PUSRI Mengoptimalkan Penerapan 7 Codes Responsible Cara sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap aspek keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

PUSRI optimizes the implementation of the 7 Codes Responsible Way as a manifestation of the company's commitment to workplace safety and the sustainable preservation of the environment.



Nama Penghargaan | Name of Award
Nusantara CSR Award 2024

Nama Ajang | Name of Event
**Asia Sustainability Report
Rating (ASRRAT) Award 2024**

Kategori | Category

- **Platinum** - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Platinum - Decent Work and Economic Growth
- **Platinum** - Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Platinum - Good Health and Wellbeing

Penyelenggara | Organizer
La Tofi School of Social Responsibility



Nama Penghargaan | Name of Award
TJSL/CSR Award 2024

Nama Ajang | Name of Event
TJSL/CSR Award 2024

Kategori | Category

- 2 Platinum - bidang Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan
2 Platinum - Social Pillar and Environmental Pillar
- 1 Gold - Bidang Pilar Ekonomi
1 Gold - Economic Pillar

Penyelenggara | Organizer
BUMN Track





Nama Penghargaan | Name of Award
TOP GRC Awards 2024

Nama Ajang | Name of Event
GRC Awards 2024

Kategori | Category

- Top GRC Golden Trophy 2024
- Top GRC Awards 2024 #5 Stars
- The Most Committed GRC Leader 2024 untuk Direktur Utama Pusri, Daconi Khotob | for President Director of PUSRI, Daconi Khotob
- The High Performing Corporate Secretary on GRC untuk Sekretaris Perusahaan Pusri, Indah Irmayani | for Corporate Secretary of PUSRI, Indah Irmayani



Penyelenggara | Organizer
Majalah Top Business

Nama Penghargaan | Name of Award
Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) 2024

Nama Ajang | Name of Event
Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) 2024

Kategori | Category

Rintisan Kemandirian Industri Nasional dan Peningkatan Daya Saing

Initiatives for National Industrial Independence and Enhancing Competitiveness

Penyelenggara | Organizer

Kementerian Perindustrian RI
Ministry of Industry of the Republic of Indonesia



Nama Penghargaan | Name of Award
BUMN Branding & Marketing Award (BBMA) 2024

Nama Ajang | Name of Event
BUMN Branding & Marketing Award (BBMA)

Kategori | Category

Brand Strategy Relevance dan Excellence in Marketing Strategy and Implementation

Penyelenggara | Organizer

Kementerian BUMN
Ministry of SOEs



Nama Penghargaan | Name of Award
**Standar Nasional Indonesia (SNI)
Award 2024**

Nama Ajang | Name of Event
SNI Award 2024

Kategori | Category
**Peringkat Platinum | Platinum
Rank**

Penyelenggara | Organizer
**Badan Standardisasi Nasional
(BSN)**



Nama Penghargaan | Name of Award
**Corporate Governance Perception
Index (CGPI) 2024**

Nama Ajang | Name of Event
**Corporate Governance Perception
Index (CGPI) Award 2024**

Kategori | Category
**Indonesia Most Trusted Companies
2024**

Penyelenggara | Organizer
**The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG)
dan SWA Media Group**



Nama Penghargaan | Name of Award
Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN)

Nama Ajang | Name of Event
Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) 2024

Kategori | Category
• 4 Diamond
• 4 Platinum
• 1 Gold
• 2 Best Performance

Penyelenggara | Organizer
PT Wahana Kendali Mutu (WKM)



Nama Penghargaan | Name of Award
Sebagai Lighthouse Industri 4.0 di Indonesia

Nama Ajang | Name of Event
Lighthouse Industri 4.0

Kategori | Category
Lighthouse Industri 4.0

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Perindustrian RI
Ministry of Industry of the Republic of Indonesia



Skala Regional | Domestic Scale

Nama Penghargaan | Name of Award
Grand Champion (PKM AHPU)

Nama Ajang | Name of Event
Pupuk Indonesia Quality & Innovation (PIQI) Tahun 2024

Kategori | Category
Grand Champion

Penyelenggara | Organizer
PT Pupuk Indonesia (Persero)



Nama Penghargaan | Name of Award
SKK Migas Award 2024

Nama Ajang | Name of Event
SKK Migas Award 2024

Kategori | Category
The Best Domestic Gas Buyer

Penyelenggara | Organizer
SKK Migas



Nama Penghargaan | Name of Award
Apresiasi Wajib Pajak PBB

Nama Ajang | Name of Event
Apresiasi Wajib Pajak PBB

Kategori | Category
Pembayar Pajak Tertinggi Kota Palembang
Highest Taxpayer of Palembang City

Penyelenggara | Organizer
Pemerintah Daerah Kota Palembang
Palembang City Regional Government





PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG



Sertifikasi

Berikut adalah beberapa sertifikasi, maupun resertifikasi terbaru yang diperoleh Perseroan di tahun operasional 2024. Daftar Sertifikasi selengkapnya disampaikan pada bagian Profil Perusahaan.

Certifications

The following are several certifications and recent recertifications obtained by the Company during the 2024 operational year. A complete list of certifications is presented in the Company Profile section.



ISO 9001:2015
Quality Management System Standards

TUV Rheinland Indonesia

10 Oktober 2024 - 09 Oktober 2027
October 10, 2024 - October 09, 2027



ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System

Sucofindo International Certification Services

10 September 2021 - 10 September 2024
September 10, 2021 - September 10, 2024



ISO 14001:2015
Environmental Management System

TUV Rheinland Indonesia

10 Oktober 2024 - 09 Oktober 2027
October 10, 2024 - October 09, 2027



ISO 17025:2017
Laboratorium Kalibrasi I Calibration Laboratory

Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

23 September 2020 - 20 September 2025
September 23, 2020 - September 20, 2025



ISO 17025:2017

Laboratorium Pengujian I Testing Laboratory

Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

29 Juli 2019 - Juli 2024
July 29, 2019 - July 2024



ISO 17043:2023

Penyelenggara Uji Profisiensi I Proficiency Testing Provider

Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

20 April 2022 - 19 April 2027
April 20, 2022 - April 19, 2027



Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Management System Occupational Health and Safety)

Minister of Employment of the Republic of Indonesia

13 Mei 2022 - 13 Mei 2025
May 13, 2022 - May 13, 2025



Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Security Management System

Kepolisian Negara Republik Indonesia
National Police of the Republic of Indonesia

31 Mei 2023 - 31 Mei 2026
May 31, 2023 - May 31, 2026



Sertifikat Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)
Private Wharf Certificate

Dirjen Perhubungan Laut (HUBLA)
Directorate General of Sea Transportation

19 September 2024 – 18 Oktober 2029
September 19, 2024 – October 18, 2029



ISO 50001:2018
Sistem Manajemen Energi I Energy Management System

British Standard Institution

15 Mei 2022 – 15 Mei 2025
May 15, 2022 – May 15, 2025



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyapan (SMAP)
Anti Bribery Management System

TUV Nord Indonesia

26 Oktober 2023 – 25 Oktober 2026
October 26, 2023 – October 25, 2026



ISO 22301:2019
Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (BCMS)
Business Continuity Management System

TUV Nord Indonesia

29 Mei 2024 – 28 Mei 2027
May 29, 2024 – May 28, 2027



ISO 27001:2022

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Information Security Management System

TUV Sud Indonesia

22 Maret 2024 - 21 Maret 2027
March 22, 2024 - March 21, 2027

Daftar Isi

Table of Contents



3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability



6 Tema dan Arti Tema
Theme and Meaning of the Theme



7 Kesenambungan Tema
Continuity of the Theme

10 Kilas Kinerja Utama 2024
2024 Key Performance Highlights

12 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

24 Daftar Isi
Table of Contents



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights



30 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights



36 Ikhtisar Operasional
Operational Overview



38 Penilaian Tingkat Kesehatan, Asesmen Penerapan GCG, Skor Asesmen Kinerja Unggul Berbasis BEF dan Rating Perusahaan
Assessment of Health Level, GCG Implementation Assessment, BEF-Based Excellent Performance Assessment Score, and Company Rating



39 Informasi Saham
Share Information



40 Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

40 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Other Funding Source Information

40 Aksi Korporasi
Corporate Action

40 Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
Temporary Suspension and/or Delisting of Shares

41 Peristiwa Penting
Milestones



Laporan Manajemen

Management Report

50 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

64 Laporan Direksi
Board of Directors Report

80 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Statement by the Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

81 Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Statement by the Members of the Board of Directors concerning Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Profil Perusahaan

Company Profile

- 84** Identitas Perusahaan
Corporate Identity
- 87** Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History
- 90** Jejak Langkah
Milestones
- 92** Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values
- 96** Brand/Logo Perusahaan
Company's Brand/Logo
- 97** Kegiatan Usaha
Business Activities
- 100** Produk dan Jasa
Products and Services
- 112** Wilayah Operasi dan Pasar yang Dilayani
Areas of Operations and Markets Served
- 116** Daftar Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang, serta Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiaries, Branch Offices, and Representative Offices
- 118** Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 120** Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure
- 121** Daftar Keanggotaan Asosiasi
List of Membership In Association
- 121** Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 128** Profil Direksi
Board OF Directors Profile
- 131** Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Governance and Risk Management
- 138** Pejabat Senior Vice President dan Senior Project Manager
Senior Vice President and Senior Project Manager
- 140** Profil Karyawan
Employee Profile
- 147** Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
- 149** Daftar Entitas Anak Dan Asosiasi
List of Subsidiaries and Associate Entities
- 151** Sekilas Kinerja Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Performance of Subsidiaries and Associated Entities at a Glance
- 157** Informasi pada Website Perusahaan
Information on the Company's Website



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

- 160** Tinjauan Makro Ekonomi
Macro Economic Overview
- 166** Strategi Perseroan 2024
Company Strategy 2024
- 169** Aspek Pemasaran
Marketing Aspects
- 178** Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
Business Outlook and Forward Strategy
- 184** Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha
Performance Review by Business Segment
- 190** Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha
Business Segment Performance Review
- 206** Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review
- 218** Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income
- 244** Kebijakan Dividen
Dividend Policy



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

- 260** Sumber Daya Manusia
Human Capital
- 261** Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM
Human Capital Management Policies and Strategies
- 262** Pengelolaan SDM
Human Capital Management
- 274** Teknologi Informasi
Information Technology
- 276** Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Policies and Governance
- 278** Tata kelola IT PUSRI
PUSRI IT governance
- 279** Program Pengembangan Teknologi Informasi 2024
Information Technology Development Program 2024

- 279** Sertifikasi Teknologi Informasi
Information Technology Certification
- 280** Investasi Teknologi Informasi
Information Technology Investment
- 281** Rencana Kerja Departemen Teknologi Informasi PSP Tahun 2025
PSP Information Technology Department Work Plan for 2025



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- 284** Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
- 286** Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Objectives of Good Corporate Governance Implementation
- 286** Dasar Hukum, Landasan dan Ruang Lingkup Kebijakan GCG
Legal Basis, Foundation, and Scope of GCG Policy
- 291** Struktur Tata Kelola
Governance Structure
- 292** Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Socialization of Corporate Governance Policy
- 294** Roadmap Peningkatan Kualitas Penerapan dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan
Roadmap for Implementation and Internalization of Corporate Governance
- 295** Peningkatan Kualitas Penerapan GCG
Improvement in the Quality of GCG Implementation
- 303** Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG
Enhancing the Quality of GCG Best Practices Implementation
- 305** Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 328** Dewan Komisaris dan Komisaris Independen
Board of Commissioners and Independent Commissioners
- 344** Direksi
Board of Directors
- 375** Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
- 378** Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Directors
- 389** Organ dan Komite Di bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees Under the Board of Commissioners
- 399** Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
- 413** Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee
- 424** Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary
- 428** Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 439** Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit
- 448** Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
Company Internal Control System
- 454** Audit Eksternal
External Audit
- 460** Tata Kelola & Manajemen Risiko
Corporate Governance & Risk Management

- 480** Kepatuhan dan Perkara Hukum yang Dihadapi
Compliance and Legal Cases Faced
- 481** Kebijakan Insider Trading
Insider Trading Policy
- 482** Keterbukaan Informasi dan Akses Data Perusahaan
Information Disclosure and Access to Company Data
- 485** Kode Etik dan Pakta Integritas
Code of Ethics and Integrity Pact
- 497** Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaan
Policy on Disclosure of Shareholding Information of the Board of Commissioners and Board of Directors and Implementation
- 498** Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
- 506** Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

- 508** Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy
- 509** Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services
- 510** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Officials' Asset Report
- 513** Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia
General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia
- 525** Kesesuaian Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Compliance with the Implementation of the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI)
- 579** Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

- 592** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

SE OJK No. 16/SEOJK/04/2021 untuk Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

SE OJK No. 16/SEOJK/04/2021 for Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Indeks ARA – 2023 – 2024 – Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2024

ARA Index – 2023–2024 – PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Annual Report 2024

Laporan Keuangan

Financial Reports



01



Dalam semangat
Sawasembada Pa
bagai ent
stansi
ngga U
encermin
kan per
kan gener
in pertan





*Sinergi untuk Mewujudkan
Angan Nasional, PT Pupuk Sriwidjaya
tetas yang tidak hanya menyediakan,
tetapi juga memberi warna bagi masa
depan karena di sini bukan sekadar simbol,
akan peran aktif perusahaan dalam
sikap positif, membangun inovasi dan
penerus yang siap menghadapi
tantangan masa depan.*



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Highlights

Tabel Laporan Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif

Table of Profit/(Loss) and Comprehensive Income Statement

Rp Juta | Rp Million

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Pendapatan Penjualan Sales Revenue							
Penjualan Produk Pupuk Fertilizer Sales							
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	9.646.292	9.660.934	9.830.670	7.485.951	6.291.370	(0,15)	8,92
Pupuk Nonsubsidi Non-Subsidized Fertilizer	2.964.312	2.883.218	4.019.756	3.922.092	4.064.116	2,81	(6,12)
Subtotal Penjualan Pupuk Subtotal Fertilizer Sales	12.610.604	12.544.152	13.850.426	11.408.043	10.355.486	0,53	4,02
Penjualan Produk Non Pupuk Non-Fertilizer Sales							
Penjualan Amonia Ammonia Sales	784.773	689.041	1.810.086	989.363	253.278	13,89	25,38
Lain-lain Others	137.488	138.483	126.980	83.169	109.268	(0,72)	4,70
Subtotal Penjualan Non Pupuk Subtotal Non-Fertilizer Sales	922.261	827.524	1.937.066	1.072.532	362.546	11,45	20,53
Jumlah Pendapatan Penjualan Total Sales Revenue	13.532.865	13.371.676	15.787.492	12.480.575	10.718.032	1,21	4,77
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	(11.686.789)	(11.017.724)	(11.193.632)	(10.227.254)	(9.171.211)	6,07	4,97
Laba Bruto Gross Profit	1.846.076	2.353.952	4.593.860	2.253.321	1.546.821	(21,58)	3,60
Beban Penjualan Selling Expenses	(321.732)	(376.411)	(399.509)	(315.126)	(284.410)	(14,53)	2,50
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(299.305)	(463.318)	(458.608)	(344.339)	(350.523)	(35,40)	(3,11)
Subtotal Beban Usaha Subtotal Operating Expenses	(621.037)	(839.729)	(858.117)	(659.465)	(634.933)	(26,04)	(0,44)
Laba Usaha Operating Profit	1.225.039	1.514.223	3.735.743	1.593.856	911.888	(19,10)	6,08
Pendapatan (Beban) Keuangan Finance Income (Expenses)	(208.619)	(349.738)	(377.840)	(494.125)	(693.564)	(40,35)	(21,36)
Pendapatan (Beban) Lainnya, Neto Other Income (Expenses), Net	423.475	373.496	97.038	56.721	79.232	13,38	39,83

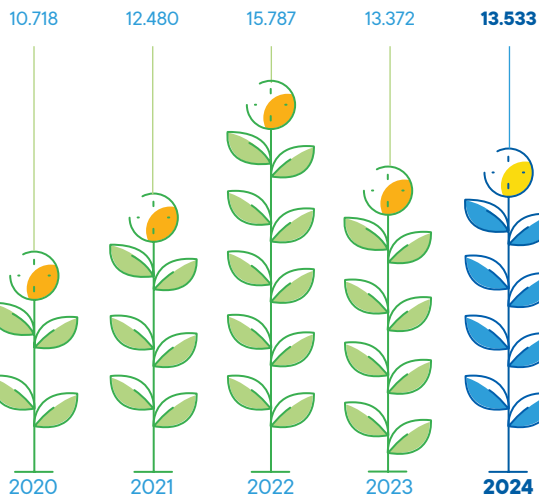
Rp Juta | Rp Million

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi Share of Profit from Associates	(40.226)	(5.307)	7.463	(6.892)	(11.827)	657,98	27,74
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.399.669	1.532.674	3.462.404	1.149.560	285.729	(8,68)	37,41
Beban Pajak Tax Expense	(331.134)	(332.815)	(807.762)	(237.228)	6.789	(0,51)	(317,59)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.068.535	1.199.859	2.654.642	912.332	292.518	(10,94)	29,58
Penghasilan Komprehensif Lain, Tahun Berjalan Other Comprehensive Income, Current Year	(356.810)	(50.036)	268.790	(91.998)	(108.877)	613,11	26,79
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Current Year	711.725	1.149.824	2.923.432	820.334	183.641	(38,10)	31,12
Laba Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit (Loss) for the Current Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	1.068.450	1.199.016	2.655.533	912.664	293.377	(10,89)	29,50
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	85	843	(891)	(332)	(859)	(89,92)	(162,96)
Jumlah Total	1.068.535	1.199.859	2.654.642	912.332	292.518	(10,94)	29,58
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada : Total Comprehensive Income for the Current Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	711.640	1.148.980	2.924.323	820.666	184.500	(38,06)	30,99
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	85	843	(891)	(332)	(859)	(89,92)	(162,96)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Current Year	711.725	1.149.823	2.923.432	820.334	183.641	(38,10)	31,12
Laba (Rugi) per Saham Earnings (Loss) Per Share	184.216	206.727	457.850	157.356	50.582	(10,89)	29,50

Pendapatan

Revenue

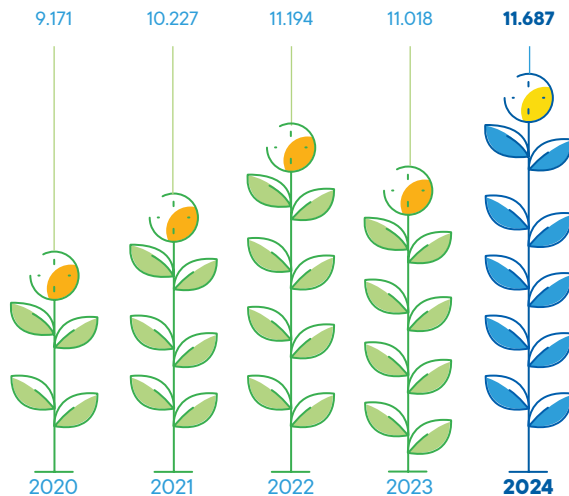
Rp miliar | Rp billion



Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Rp miliar | Rp billion



Rp **13.533** miliar billion

Total pendapatan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp13.533 miliar.

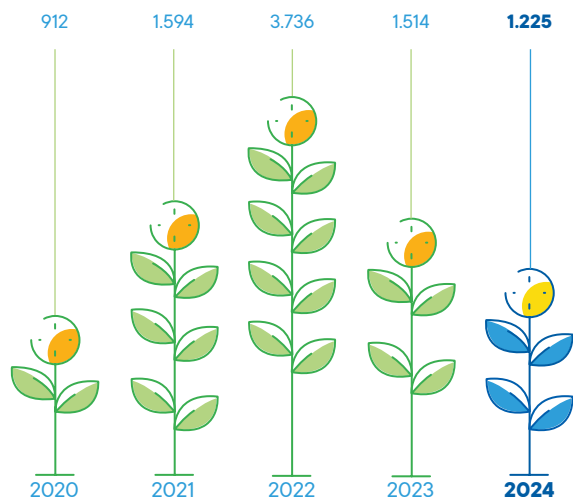
Total revenue for the financial year ending December 31, 2024, is Rp13,533 billion.



Laba Usaha

Business Profit

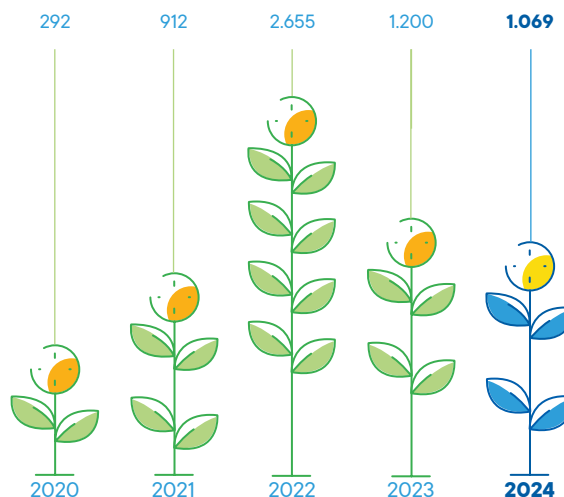
Rp miliar | Rp billion



Laba Bersih Tahun Berjalan

Net Profit for the Year

Rp miliar | Rp billion



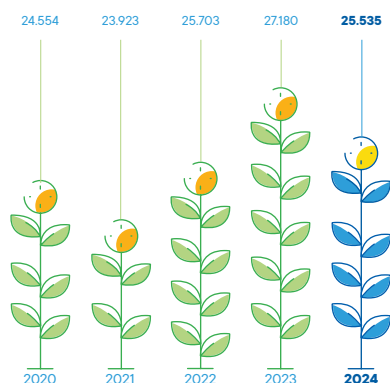
Tabel Perubahan Posisi Keuangan
Table of Changes in Financial Position

Rp juta | Rp million

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets	2.960.606	7.043.033	6.880.905	4.399.555	4.519.747	(57,96)	(8,11)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	22.574.714	20.137.197	18.822.049	19.523.201	20.033.896	12,10	2,42
Jumlah Aset Total Assets	25.535.320	27.180.230	25.702.954	23.922.756	24.553.643	(6,05)	0,79
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.796.828	6.137.642	3.375.995	2.862.031	2.263.859	(54,43)	4,32
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	4.089.805	2.762.487	4.821.681	6.341.979	8.391.372	48,05	(13,39)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	6.886.633	8.900.129	8.197.676	9.204.010	10.655.231	(22,62)	(8,36)
Ekuitas Equity							
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Equity Attributable To:							
Pemilik Entitas Induk Equity attributable to owners of the parent entity	18.626.884	18.258.383	17.484.403	14.696.980	13.876.314	2,02	6,07
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	21.803	21.718	20.875	21.766	22.098	0,39	(0,27)
Jumlah Ekuitas Total Equity	18.648.687	18.280.101	17.505.278	14.718.746	13.898.412	2,02	6,06
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	25.535.320	27.180.230	25.702.954	23.922.756	24.553.643	(6,05)	0,79

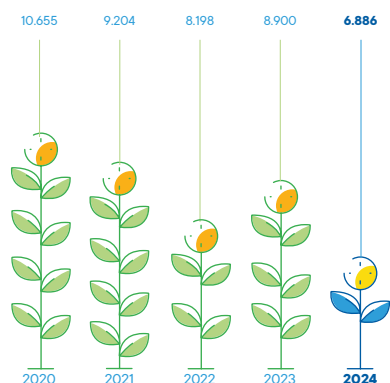
Total Aset
Total Assets

Rp miliar | Rp billion



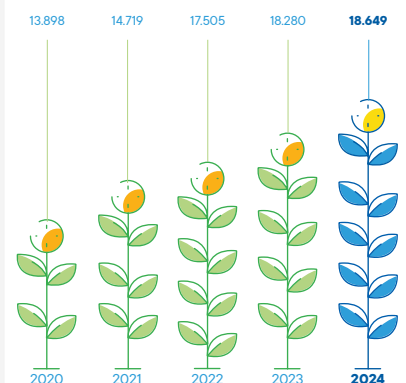
Total Liabilitas
Total Liabilities

Rp miliar | Rp billion



Total Ekuitas
Total Equity







Rp miliar | Rp billion



Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow Statement


Rp juta | Rp million

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows generated from operating activities	3.350.505	2.130.382	2.590.561	2.442.729	2.046.061	57,27	10,37
 Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(1.383.270)	(2.798.786)	(277.411)	(129.325)	(285.334)	(50,58)	37,12
 Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows (used in)/generated from financing activities	(2.712.289)	2.738	(1.645.598)	(1.889.515)	(2.758.139)	(99.160.96)	(0,33)
 Penurunan bersih kas dan setara kas Net decrease in cash and cash equivalents	(745.054)	(665.666)	667.552	423.889	(997.412)	11,93	(5,67)
 Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(5.219)	(3.986)	25.089	1.426	694	30,93	(249,71)
 Saldo kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.454.006	2.123.658	1.431.017	1.005.702	2.002.420	(31,53)	(6,20)
 Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	703.733	1.454.006	2.123.658	1.431.017	1.005.702	(51,60)	(6,89)

Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information

Rp juta | Rp million

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
 Belanja Modal Capital Expenditure	3.490.351	1.051.991	167.060	88.253	108.449	231,79	100,23
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	163.778	905.391	3.504.910	1.537.524	2.255.888	(81,91)	(40,82)

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios							
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (%) Profit to Total Assets Ratio (%)	4,18	4,41	10,33	3,81	1,19	(5,21)	28,56
Rasio Laba terhadap Pendapatan (%) Profit to Revenue Ratio (%)	7,90	8,97	16,81	7,31	2,73	(12,01)	23,67
Rasio Laba terhadap Liabilitas (%) Profit to Liabilities Ratio (%)	15,52	13,48	32,38	9,91	2,75	15,09	41,40
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%) Liabilities to Total Assets Ratio (%)	26,97	32,74	31,89	38,47	43,40	(17,64)	(9,07)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liabilities to Equity Ratio (%)	36,93	48,69	46,83	62,53	76,67	(24,15)	(13,59)
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) (%) Return on Equity (ROE) (%)	5,73	6,56	17,96	6,63	2,19	(12,71)	21,21
Imbalan Investasi (ROI) (%) Return on Investment (ROI) (%)	10,82	9,53	18,58	10,58	8,09	13,54	5,99
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	25,16	23,69	62,90	50,00	44,42	6,21	(10,74)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	105,86	114,75	203,82	153,72	199,65	(7,75)	(11,92)
Collection Period (hari) Collection Period (days)	10,36	11,86	10,30	4,56	37,48	(12,65)	(22,68)
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	47,09	70,53	33,96	38,67	51,58	(33,23)	(9,92)
Perputaran Total Aset (TATO) (%) Total Asset Turnover (TATO) (%)	63,74	51,12	62,09	52,56	44,51	24,69	7,45
Rasio Modal terhadap Total Aset (TMS) (%) Capital to Total Assets Ratio (TMS) (%)	73,03	67,26	64,34	59,91	56,38	8,59	5,31

Ikhtisar Operasional

Operational Overview


Tabel Volume Produksi dan Volume Penjualan Pupuk

Table of Volume of Production and Volume of Fertilizer Sales

ton | ton

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Pupuk Urea Production							
Produksi Production							
Pabrik Pusri- IB Pusri-IB Plant	401.122	498.087	465.635	490.760	475.349	(19,47)	(3,34)
Pabrik Pusri- IIB Pusri-IB Plant	904.612	968.362	973.830	927.347	966.868	(6,58)	(1,32)
Pabrik Pusri-III Pusri-IIB Plant	235.430	277.889	314.277	290.538	265.353	(15,28)	(2,36)
Pabrik Pusri- IV Pusri-IV Plant	316.668	265.941	239.938	356.981	344.131	19,07	(1,65)
Jumlah Produksi Urea Total Urea Production	1.857.832	2.010.279	1.993.680	2.065.626	2.051.701	(7,58)	(1,97)
Pupuk NPK NPK Fertilizer							
Produksi Production							
Pabrik NPK Fusion I NPK Fusion I Plant	181.686	142.226	151.173	120.784	89.490	27,74	15,22
Pabrik NPK Fusion II NPK Fusion II Plant	181.698	186.123	195.705	163.302	107.878	(2,38)	10,99
Jumlah Produksi NPK Total NPK Production	363.384	328.349	346.878	284.086	197.368	10,67	12,98
Total Produksi Pupuk Total Fertilizer Production	2.221.216	2.338.628	2.340.558	2.349.712	2.249.069	(5,02)	(0,25)
Penjualan Pupuk Fertilizer Sales							
Domestik - Subsidi Domestic - Subsidized	1.735.698	1.695.038	1.811.018	1.507.197	1.313.744	2,40	5,73
Domestik - Non Subsidi Domestic - Non-Subsidized	380.508	359.335	324.617	644.931	711.355	5,89	(11,76)
Ekspor Export	168.784	134.180	145.569	189.877	329.920	25,79	(12,55)
Jumlah Volume Penjualan Pupuk Total Fertilizer Production	2.284.990	2.188.553	2.281.204	2.342.005	2.355.019	4,41	(0,60)

Tabel Volume Produksi dan Volume Penjualan Amonia

Table of Volume of Ammonia Production and Sales

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	ton ton	
						YoY 2023-2024 %	CAGR 2020-2024 %
Non Pupuk - Amonia Non-Fertilizer - Ammonia							
Produksi Production							
Pabrik Pusri- IB Pusri-IB Plant	310.167	397.197	368.869	372.160	360.448	(21,91)	(2,96)
Pabrik Pusri- IIB Pusri-IIB Plant	687.182	715.154	721.401	687.638	699.191	(3,91)	(0,35)
Pabrik Pusri-III Pusri-III Plant	-	-	-	-	162.426	0,00	(100,00)
Pabrik Pusri- IV Pusri-IV Plant	287.141	221.445	270.752	312.341	63.437	29,67	35,25
Jumlah Produksi Amonia Total Ammonia Production	1.284.490	1.333.796	1.361.022	1.372.139	1.285.502	(3,70)	(0,02)
Penjualan Amonia Ammonia Sales							
Dalam Negeri Domestic	62.067	39.971	73.395	52.655	14.424	55,28	33,89
Ekspor Export	67.707	65.750	72.529	79.183	48.245	2,98	7,01
Jumlah Volume Penjualan Amonia Total Ammonia Sales Volume	129.774	105.721	145.924	131.838	62.669	22,75	15,67

Penilaian Tingkat Kesehatan, Asesmen Penerapan GCG, Skor Asesmen Kinerja Unggul Berbasis BEF dan Rating Perusahaan

Assessment of Health Level, GCG Implementation Assessment, BEF-Based Excellent Performance Assessment Score, and Company Rating



Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY SOUNDNESS RATING ASSESSMENT					
Skor Score	-*	-*	96,00	78,00	70,00
Kategori Category	"AAA" Sangat Sehat Very Healthy	"AAA" Sangat Sehat Very Healthy	"AAA" Sangat Sehat Very Healthy	"A" Sehat Healthy	"A" Sehat Healthy
ASESMEN PENERAPAN GCG ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION					
Skor Score	-**	-***	95,50%	92,50%	93,53%
Kategori Category	-	-	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good
SKOR ASESMEN KINERJA UNGGUL BERBASIS BEF EXCELLENCE PERFORMANCE ASSESSMENT SCORE BASED ON BEF					
Kategori Category	-****	"Industry Leader"	"Industry Leader"	"Emerging Industry Leader"	"Emerging Industry Leader"

* Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 81.

** Pelaksanaan Assessment GCG tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

*** Dilakukan Self Assessment dengan menindaklanjuti Area of Improvement (AoI) terhadap hasil Assessment GCG Tahun 2022.

**** Sesuai arahan dari PT Pupuk Indonesia bahwa penilaian KPKU tidak menjadi mandatory.

* Assessment based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Article 81.

** The 2024 GCG Assessment will be conducted in the second quarter of 2025.

*** A Self-Assessment was carried out by following up on the Areas of Improvement (AoI) identified in the 2022 GCG Assessment results.

**** In line with the directive from PT Pupuk Indonesia, the KPKU assessment is no longer mandatory.

Informasi Saham

Share Information

Sampai dengan 31 Desember 2024, PUSRI belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Namun demikian, untuk informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

As of December 31, 2024, PUSRI has not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information available regarding share prices, market capitalization, or share trading volume. However, the following provides information on share capital over the past two years:

2024

Rp 5.800.000

Juta | Million

Modal Saham

Modal dasar – 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor – 5.800.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 saham Seri B.

Share Capital

Authorized capital – 15,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share Issued and paid-up capital – 5,800,000 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna share and 5,799,999 Series B shares.

2023

Rp 5.800.000

Juta | Million

Modal Saham

Modal dasar – 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor – 5.800.000 saham.

Share Capital

Authorized capital – 15,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share Issued and paid-up capital – 5,800,000 shares.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds



PUSRI tidak menyajikan informasi terkait penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi karena untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan obligasi, sukuk maupun obligasi konversi.

PUSRI does not present information regarding the issuance of bonds, sukuk, or convertible bonds, as the Company did not issue or list any bonds, sukuk, or convertible bonds for the period ending December 31, 2024.



Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Other Funding Source Information



PUSRI tidak dapat menyampaikan informasi terkait sumber pendanaan lainnya, mengingat sampai periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak mencatatkan adanya sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.

PUSRI is unable to disclose information regarding other funding sources, as the Company did not record any alternative funding sources used to support operational activities during the period ending December 31, 2024.



Aksi Korporasi

Corporate Action



Mengingat PUSRI belum mendaftarkan sahamnya di bursa saham, Perseroan tidak melakukan aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, mencakup pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

As PUSRI has not yet registered its shares on the stock exchange, the Company has not undertaken any corporate actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Temporary Suspension and/or Delisting of Shares

Sampai dengan 31 Desember 2024, PUSRI belum menjadi Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta maupun bursa saham lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

As of December 31, 2024, PUSRI has not yet become a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange or any other stock exchange. Accordingly, there has been no Temporary Suspension and/or Delisting of Shares.

Peristiwa Penting Milestones



06 Januari 2024 | January 06, 2024

Jaminan Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Awal Musim Tanam

Subsidized Fertilizer Stock Secure at the Start of Planting Season

Dengan alokasi 981,938 ton urea dan 255,106 ton NPK, Pusri memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung musim tanam dan ketahanan pangan nasional.

With an allocation of 981,938 tons of urea and 255,106 tons of NPK, Pusri ensures the continued availability of subsidized fertilizers to support the planting season and national food security.



11 Januari 2024 | January 11, 2024

Tinjauan Langsung Stok Pupuk Musim Tanam

On-Site Inspection of Fertilizer Stock for Planting Season

Direktur Keuangan & Umum meninjau GPP Karanganyar dan Bulukamba, memastikan stok pupuk subsidi tersedia lebih dari cukup.

The Director of Finance & General Affairs conducted an inspection of the Karanganyar and Bulukamba Fertilizer Warehouses (GPP), ensuring that the stock of subsidized fertilizer is more than sufficient.



01 Februari 2024 | February 01, 2024

Peninjauan Stok Pupuk di Banyuasin

Fertilizer Stock Inspection in Banyuasin

Dirut Pusri pastikan stok pupuk tersedia untuk kebutuhan musim tanam di lapangan.

The President Director of Pusri ensures that fertilizer stocks are available to meet the planting season needs in the field.



27 Februari 2024 | February 27, 2024

Forum Mitigasi Korupsi Bersama Kajati Sumsel

Corruption Mitigation Forum with the South Sumatra High Prosecutor's Office

Pusri berdiskusi soal strategi pencegahan korupsi di lingkungan BUMN.

Pusri discussed strategies for corruption prevention within state-owned enterprises.



04-05 Maret 2024 | March 04-05, 2024

Plant Visit Dinas Pertanian Lampung

Plant Visit by the Lampung Agriculture Office

Kunjungan dinas dan bupati Lampung Timur disambut dengan paparan mutu dan site tour pabrik.

The visit by the East Lampung Regent and Agriculture Office was welcomed with a quality presentation and a site tour of the plant.



05 Maret 2024 | March 05, 2024

Penghargaan Annual Report Internasional

International Annual Report Award

Laporan tahunan Pusri raih penghargaan Gold dan masuk Top 100 Global.

Pusri's annual report received a Gold award and was ranked among the Top 100 Global.



21 Maret 2024 | March 21, 2024
Kerja Sama dengan Polbangtan Medan
Collaboration with Polbangtan Medan

Sinergi pendidikan dan pendampingan Program Makmur lewat penempatan 16 mahasiswa.

Educational synergy and mentorship in the Makmur Program through the placement of 16 students.



22-24 April 2024 | April 22-24, 2024
Tuan Rumah Rapat Kerja SP Pupuk Indonesia
Host of the Pupuk Indonesia Labor Union Work Meeting

Rapat kerja nasional SPPSP dan FSPPi digelar di Graha Pupuk Sriwidjaja

The national work meeting of SPPSP and FSPPi was held at Graha Pupuk Sriwidjaja.



25 April 2024 | April 25, 2024
Team Building Direktorat Operasi & Produksi
Team Building for the Directorate of Operations & Production

Kegiatan ini mempererat sinergi karyawan dalam mendukung kinerja tim.

This activity strengthened employee synergy in supporting team performance.



25-28 April 2024 | April 25-28, 2024
UMKM Binaan Tampil di Kelana Wastra Indonesia 2024

Fostered MSMEs Featured at Kelana Wastra Indonesia 2024

Pusri dorong promosi budaya lokal lewat ajang fashion nasional.

Pusri promotes local culture through a national fashion event.



02 Mei 2024 | May 02, 2024
Sosialisasi Penambahan Alokasi Pupuk di Berbagai Wilayah

Dissemination of Information on Fertilizer Allocation Increase in Various Regions

Pusri aktif edukasi petani tentang penambahan alokasi pupuk subsidi 2024 menjadi 9,55 juta ton di berbagai provinsi seperti Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jepara, Kendal, Jambi, Sragen, Malang, Bengkulu.

Pusri actively educates farmers on the increase in the 2024 subsidized fertilizer allocation to 9.55 million tons across various provinces, including Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jepara, Kendal, Jambi, Sragen, Malang, and Bengkulu.



30 Mei 2024 | May 30, 2024
Pusri Cerdas Academy Batch III

Pusri Cerdas Academy Batch III

Pemberian beasiswa dan pelatihan wirausaha untuk 113 mahasiswa dari berbagai kampus ternama.

Provision of scholarships and entrepreneurship training for 113 students from various leading universities.



21 Juni 2024 | June 21, 2024

Kunjungan Kerja Komisaris Utama

Working Visit of the President Commissioner

Tinjauan proyek Pusri IIIB dan silaturahmi mempererat sinergi internal.

Inspection of the Pusri IIIB project and a gathering to strengthen internal synergy.



24 Juni 2024 | June 24, 2024

Penandatanganan PJBG di Forum Gas Bumi 2024

Signing of the PJBG Agreement at the 2024 Natural Gas Forum

Perjanjian jaminan pasokan gas 95 BBTUD untuk mendukung produksi hingga 2028.

Gas supply guarantee agreement of 95 BBTUD to support production until 2028.



14-17 Juli 2024 | July 14-17 2024

Piling Test Pabrik Pusri III B

Piling Test for Pusri IIIB Plant

Proyek pembangunan Pabrik Pusri III B memasuki tahap pondasi penting

The construction project of the Pusri IIIB Plant has entered a critical foundation phase.



29 Juli 2024 | July 29, 2024

Pelatihan ISO 37001:2016 Anti Suap

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Training

Pusri tanamkan budaya anti penyuapan kepada seluruh insan perusahaan.

Pusri instills an anti-bribery culture in all company personnel.



05-10 Agustus 2024 | August 05-10, 2024

Manajemen Pusri Kunjungi Tiongkok untuk Pemantauan Proyek Pusri IIIB

Pusri Management Visits China to Monitor Pusri IIIB Project

Dalam kunjungan kerja ke Tiongkok, Pusri bersama Wuhan Engineering membahas progres, mitigasi risiko, dan percepatan pengadaan peralatan penting untuk proyek pembangunan Pabrik Pusri IIIB.

During the working visit to China, Pusri, together with Wuhan Engineering, discussed progress, risk mitigation, and the acceleration of procurement of critical equipment for the construction project of the Pusri IIIB Plant.



28 Agustus 2024 | August 28, 2024

Dirut Pusri Jadi Narasumber Seminar Nasional Energi

Pusri's President Director Serves as Speaker at the National Energy Seminar

Dalam seminar bertema "Transisi dan Kemandirian Energi Menuju NZE 2060", Daconi Khotob membagikan pengalaman Pusri dalam dekarbonisasi dan inovasi teknologi energi.

In the seminar themed "Energy Transition and Independence Toward NZE 2060", Daconi Khotob shared Pusri's experience in decarbonization and energy technology innovation.



29 Agustus 2024 | August 29, 2024
Sosialisasi Pupuk Bersubsidi di Bangka Tengah
 Subsidized Fertilizer Outreach in Central Bangka

Pusri menyampaikan kebijakan pupuk bersubsidi dan mendengarkan aspirasi petani serta pengecer, memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan untuk ketahanan pangan.

Pusri communicated the subsidized fertilizer policy and listened to the aspirations of farmers and retailers, strengthening cross-stakeholder synergy for food security.



30 Agustus 2024 | August 30, 2024
Sarasehan Dewan Komisaris di Bangka Belitung
 Board of Commissioners' Discussion Forum in Bangka Belitung

Dewan Komisaris Pusri turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi distribusi pupuk dan menyerap aspirasi petani guna memastikan efisiensi dan efektivitas distribusi pupuk subsidi.

As part of the Coordination Meeting of the President Directors of Pupuk Indonesia Group, Pusri provided assistance for the renovation of the Village Health Center, healthcare facilities, a waste bank, and school supplies for 250 children on Pahawang Island, Lampung.



14-17 Oktober 2024 | October 14-17, 2024
Temu Tani dan Tinjauan Aset di NTB dan Bali
 Farmer Engagement and Asset Review in NTB and Bali

Direktur Keuangan & Umum bersama Dewan Komisaris meninjau kesiapan gudang pupuk dan aset tidak terpakai di NTB dan Bali. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan musim tanam sekaligus mengkaji potensi optimalisasi aset untuk fungsi produktif lainnya.

The Director of Finance & General Affairs, together with the Board of Commissioners, reviewed the readiness of fertilizer warehouses and unused assets in NTB and Bali. This visit was conducted to prepare for the planting season while also assessing the potential for optimizing these assets for other productive uses.



16 Oktober 2024 | October 16, 2024
CEO Talk 'Self Reflection' Bersama Dirut Pusri
 CEO Talk 'Self Reflection' with Pusri President Director

Direktur Utama Pusri, Bapak Daconi Khotob, berbagi inspirasi melalui sesi CEO Talk yang mengangkat pentingnya nilai-nilai PIC'S (Persistence, Integrity, Competency, dan Spirit) untuk menghadapi tantangan kerja secara positif dan berdaya.

Pusri President Director, Mr. Daconi Khotob, shared his insights during a CEO Talk session highlighting the importance of PIC'S values (Persistence, Integrity, Competency, and Spirit) in facing workplace challenges with a positive and empowered mindset.



08 Desember 2024 | December 08, 2024

Wamentan Kunjungi Sumsel, Pusri Siap Suplai Pupuk

Deputy Minister of Agriculture Visits South Sumatra, Pusri Ready to Supply Fertilizers

Wakil Menteri Pertanian meninjau lahan rawa di Ogan Ilir dengan rencana optimasi dan cetak sawah seluas ratusan ribu hektar. Pusri memastikan kesiapan stok pupuk dua kali lipat dari kapasitas gudang demi mendukung swasembada pangan nasional.

The Deputy Minister of Agriculture inspected the swampy lands in Ogan Ilir, with plans to optimize and develop rice fields spanning hundreds of thousands of hectares. Pusri ensured readiness by doubling fertilizer stock capacity beyond warehouse limits to support national food self-sufficiency.



12 Desember 2024 | December 12, 2024

Pusri Pembayar Pajak Tertinggi di Palembang

Pusri Recognized as the Highest Taxpayer in Palembang

Dengan kontribusi PBB sebesar Rp25,8 miliar, Pusri menerima penghargaan sebagai salah satu pembayar pajak terbesar. Ini menjadi bukti nyata kontribusi Pusri terhadap pembangunan daerah.

With a property tax contribution of IDR 25.8 billion, Pusri received an award as one of the largest taxpayers. This stands as clear evidence of Pusri's contribution to regional development.



25 Desember 2024 | December 25, 2024

Ulang Tahun PUSRI ke-65 dengan mengambil tema Green for Sustainability

PUSRI's 65th Anniversary with the theme Green for Sustainability

Pusri merayakan ulang tahun ke-65 dengan semangat keberlanjutan, ditandai upacara, ziarah, peresmian Pusri Grand Ballroom, dan apresiasi bagi pekerja terbaik dan purnabakti. Momen ini menjadi refleksi untuk terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pusri celebrated its 65th anniversary with a spirit of sustainability, marked by a ceremony, a memorial visit, the inauguration of the Pusri Grand Ballroom, and recognition of outstanding and retiring employees. This milestone served as a moment of reflection to continue contributing to national food security.



30 Desember 2024 | December 30, 2024

Pengantongan Akhir 2024 dan Perdana 2025

Final Bagging of 2024 and First Bagging of 2025

Pusri mencatatkan produksi urea sebesar 1,85 juta ton, NPK 362 ribu ton, dan amonia 1,28 juta ton sepanjang 2024. Penandatanganan simbolis karung pupuk menjadi penanda transisi menuju tahun operasional 2025.

Pusri recorded a production of 1,85 million tons of urea, 362 thousand tons of NPK, and 1,28 million tons of ammonia throughout 2024. The symbolic signing of fertilizer sacks marked the transition toward the 2025 operational year.

02



Dalam semangat Sinergi untuk Swasembada Pangan Nasional, Sriwidjaja hadir sebagai entitas yang tidak hanya menyediakan solusi pangan, tetapi juga memberi warna bagi masyarakat bangsa. Warna di sini bukan sekadar estetika, tetapi mencerminkan peran aktif dalam menciptakan perubahan, membangun inovasi, dan melatih generasi penerus yang siap menghadapi tantangan pertanian masa depan.



-
-
-
-
-
-
-



Laporan Manajemen

Management Report



Ali Jamil
Komisaris
Commissioner

Siti Nurizka Puteri Jaya
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner

Prahoro Yulijanto Nurtjahyo
Komisaris
Commissioner



Sally Salamah
Komisaris
Commissioner



Fadjar Judisiawan
Komisaris
Commissioner



Bambang Supriyambodo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi beserta seluruh jajaran manajemen di bawahnya atas kerja keras dan dedikasinya sehingga berhasil mengatasi kondisi usaha di tahun 2024 yang penuh tantangan dan ketidakpastian dengan mencatatkan berbagai prestasi baik pada aspek operasional maupun keuangan, sehingga membuat fundamental PUSRI semakin kuat untuk meraih peluang pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, sekaligus mendukung keberhasilan program kemandirian pangan.

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and all levels of management for their hard work and dedication, which enabled the Company to navigate the challenging and uncertain business environment of 2024 successfully. Their efforts resulted in various achievements across both operational and financial aspects, thereby strengthening PUSRI's fundamentals to seize better growth opportunities in the coming years and supporting the success of the national food self-sufficiency program.





Siti Nurizka Puteri Jaya
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
*President Commissioner,
concurrently serving as Independent
Commissioner*

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji serta Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada kita semua sehingga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. ("PUSRI") mampu mengatasi kondisi usaha di tahun 2024 yang penuh tantangan dan ketidakpastian dengan mencatatkan kinerja usaha yang membanggakan. Kerja keras, kerja cerdas, *teamwork solid* yang diimplementasikan dengan penuh dedikasi oleh seluruh insan Perusahaan terbukti mampu menghasilkan kinerja pertumbuhan yang positif, baik pada aspek operasional maupun kinerja keuangan. Dewan Komisaris memandang upaya dan kerja keras yang dijalankan Direksi beserta seluruh jajarannya dalam mengatasi kondisi usaha dan mencatatkan kinerja yang baik tersebut layak diapresiasi dan disampaikan untuk diketahui bersama.

Untuk itu, mewakili Dewan Komisaris, izinkan saya menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

KONDISI MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global di tahun 2024 berkembang menjadi penuh tantangan dan ketidakpastian, akibat terus berkembangnya berbagai masalah utama, meliputi: berkelanjutannya konflik antara Rusia dan Ukraina, memanasnya konflik di Timur Tengah, disparitas pertumbuhan ekonomi antar negara besar dan antar wilayah, kuatnya dolar AS, inflasi global yang masih tinggi, meningkatnya risiko perang dagang, disrupsi rantai pasokan dan berkurangnya kepercayaan perusahaan serta konsumen yang pada akhirnya membuat pertumbuhan perekonomian global cenderung melambat. Merujuk pada kajian IMF - *World Economic Outlook* Januari 2025, perekonomian global diperkirakan tumbuh 3,2% pada tahun 2024, melambat dari 3,3% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian antar kawasan maupun antar negara-negara maju juga semakin bervariasi dengan disparitas yang semakin besar.

Sementara itu, mengiringi lemahnya pertumbuhan, tingkat inflasi global menurun dari kisaran 6,7% di tahun 2023 menjadi sebesar 5,7% di akhir tahun 2024. Penurunan inflasi global tersebut membuat *The Fed* pada akhir Desember 2024 kembali menurunkan suku bunga rujukan *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 *basis point* (bps) menjadi di kisaran 4,25%-4,5% dari sebesar 5,50% di akhir tahun 2023. Namun demikian, penurunan suku bunga tersebut tetap belum mampu meredam meningkatnya nilai tukar Dolar AS, dan membuat suku bunga di berbagai negara berkembang tetap bertahan tinggi, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We offer our highest praise and gratitude to Almighty God for the blessings bestowed upon us, which enabled PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") to overcome the challenging and uncertain business conditions of 2024 and to record a commendable business performance. The combination of hard work, smart strategies, and solid teamwork—implemented with full dedication by all members of the Company—has proven effective in delivering positive growth in operational and financial performance. The Board of Commissioners views the efforts and dedication demonstrated by the Board of Directors and all supporting personnel in overcoming these business challenges and achieving strong performance as truly commendable, and believes this deserves to be acknowledged and shared.

Therefore, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to present the Company's 2024 Annual Report from the perspective of the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory function.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS

Global and National Economic Conditions

The global economic landscape in 2024 evolved into one marked by significant challenges and uncertainty, driven by the continued escalation of several key issues. These include the ongoing conflict between Russia and Ukraine, rising tensions in the Middle East, disparities in economic growth among major countries and regions, a strong U.S. dollar, persistently high global inflation, increasing risks of trade wars, supply chain disruptions, and declining confidence among businesses and consumers—all of which contributed to a general slowdown in global economic growth. According to the IMF - *World Economic Outlook* (January 2025), global economic growth is estimated to have reached 3.2% in 2024, slightly down from 3.3% in the previous year. Growth disparities between regions and advanced economies have widened further, highlighting increasing imbalances.

Meanwhile, amid slowing global growth, global inflation declined from 6.7% in 2023 to 5.7% by the end of 2024. This easing of inflation prompted the U.S. Federal Reserve to lower the Federal Funds Rate (FFR) by 25 basis points at the end of December 2024, bringing it down to a range of 4.25%–4.5%, from 5.50% at the end of 2023. However, this rate cut was still insufficient to curb the appreciation of the U.S. dollar, and interest rates in many emerging markets remained elevated, putting pressure on their economic growth.

Namun demikian, perekonomian nasional tetap menunjukkan daya tahannya, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% di tahun 2024, hanya sedikit melemah dari 5,05% di tahun sebelumnya. Adapun tingkat inflasi tahun 2024 tetap terjaga dengan baik, hanya meningkat 1,57%, yang berarti lebih rendah dari inflasi 2023 yang sebesar 2,61%.

Kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha berasal dari sektor konstruksi, sektor lainnya, pertambangan & penggalian, perdagangan & reparasi dan industri pengolahan, yang masing-masing tumbuh 7,02%, 6,30%, 4,90%, 4,86% dan 4,43% di tahun 2024. Kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain adalah peningkatan permintaan domestik, terutama peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), dan konsumsi Pemerintah, selain terjalannya realisasi investasi. Merujuk pada data BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia hingga 54,04%, tumbuh sebesar 4,94%. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap relatif terjaga. Sementara (LNPRM) dan konsumsi Pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 12,48%, dan 6,61% di tahun 2024.

Neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus, dengan posisi per Desember 2024 adalah sebesar US\$31,04 miliar, membuat cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat meningkat menjadi US\$155,7 miliar. Kondisi tersebut membuat Bank Indonesia menetapkan suku bunga rujukan BI Rate pada kisaran 6,00% di akhir Desember 2024.

Kondisi Industri Pupuk Global dan Nasional

Adapun kapasitas urea global di tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 241,9 juta ton per tahun, bertambah 7,5 juta ton dari 234,4 juta ton di tahun sebelumnya. Sementara permintaan pupuk urea global di tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 183 juta ton, berkurang 1 juta ton dari 184 juta ton di tahun 2023, menunjukkan adanya pelemahan serapan produk di pasar. Namun demikian, harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2024 hanya sedikit berfluktuasi serta relatif stabil di kisaran USD350-USD361 per metric ton.

Kebutuhan pupuk nasional pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 14,5 juta ton. Kebutuhan ini dipenuhi oleh pabrik pupuk nasional melalui dua skema, yaitu *Public Service Obligation* (PSO) dan non-PSO (komersial). Dalam skema PSO, PT Pupuk Indonesia (Persero) –termasuk PUSRI di dalamnya– bertugas dalam menyalurkan pupuk subsidi untuk jenis urea dan NPK sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 9,55 juta ton dan sisa kebutuhan 4,95 juta ton dipenuhi dengan skema non-subsidi.

Despite global headwinds, Indonesia's national economy demonstrated resilience, recording a growth rate of 5.03% in 2024, a slight dip from 5.05% in the previous year. Inflation was well managed, increasing only 1.57%, which was lower than the 2.61% inflation rate in 2023.

From a sectoral perspective, the main contributors to economic growth in 2024 were the construction sector (7.02%), other services (6.30%), mining and quarrying (4.90%), trade and repair (4.86%), and manufacturing (4.43%). On the expenditure side, key drivers of economic growth included rising domestic demand, particularly increases in household consumption, consumption by Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH), and government spending, as well as steady investment realization. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), household consumption, which contributed 54.04% to Indonesia's GDP, grew by 4.94%, indicating that purchasing power remained relatively strong. NPISH and government consumption grew by 12.48% and 6.61%, respectively, in 2024.

The trade balance continued to record a surplus, reaching US\$ 31.04 billion as of December 2024, boosting Indonesia's foreign exchange reserves to US\$ 155.7 billion by year-end. In response, Bank Indonesia set the BI reference rate at 6.00% at the end of December 2024.

Global and National Fertilizer Industry Conditions

In 2024, global urea production capacity was estimated to have reached 241.9 million tons per year, marking an increase of 7.5 million tons from 234.4 million tons in the previous year. However, global demand for urea fertilizer was estimated at only 183 million tons, a decrease of 1 million tons from 184 million tons in 2023, indicating a weakening in market absorption. Despite this, global urea prices remained relatively stable throughout 2024, with only slight fluctuations in the range of US\$ 350 to US\$ 361 per metric ton.

National fertilizer demand in 2024 is estimated to reach 14.5 million tons. This demand is met by domestic fertilizer producers through two schemes: Public Service Obligation (PSO) and non-PSO (commercial). Under the PSO scheme, PT Pupuk Indonesia (Persero)—including PUSRI—is responsible for distributing subsidized fertilizers, specifically urea and NPK, in accordance with the allocation set by the Government of Indonesia, amounting to 9.55 million tons. The remaining 4.95 million tons of demand is fulfilled through the non-subsidized (commercial) scheme.



Pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi 9 (sembilan) komoditi strategis pertanian antara lain: sub sektor tanaman pangan dengan jenis tanaman padi, jagung, dan kedelai; sub sektor hortikultura dengan jenis tanaman cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan terakhir sub sektor tanaman perkebunan dengan jenis tanaman tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sedangkan pupuk non-subsidi diperuntukkan pada sektor perkebunan, seperti: kelapa sawit, kopi, dan juga komoditi hortikultura seperti buah-buahan, sayur, dan tanaman lainnya.



Proses penyaluran pupuk subsidi ke petani selama ini bisa terhambat oleh birokrasi yang rumit seperti keharusan menunggu Surat Keputusan dari pemerintah daerah dan juga melibatkan setidaknya delapan kementerian terkait. Oleh karenanya proses penyaluran tersebut sejak tahun 2024 dirubah. Instruksi penyaluran pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company yang kemudian akan menyalurkan pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani yang bertanggung jawab langsung kepada petani.



Untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran, maupun pencatatan jumlah distribusi pupuk subsidi, PUSRI bersama-sama Pupuk Indonesia Grup telah menerapkan teknologi digital, menggunakan aplikasi *Retail Management System* (Rekan) yang telah terintegrasi dengan seluruh distributor dan kios pupuk untuk mempermudah transaksi dan pencatatan penjualan pupuk. Sementara untuk platform bisnis dalam penjualan/penyaluran pupuk Non PSO, Korporasi, dan Retail, PUSRI bersama-sama Pupuk Indonesia Grup menggunakan aplikasi Andalan untuk mempermudah proses transaksi penebusan bagi distributor Non PSO, ritel, dan korporasi.



PUSRI, maupun produsen pupuk lain di lingkup Pupuk Indonesia Grup, juga menyosialisasikan program Makmur, yakni program pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi dengan berbasis konsep *triple bottom line* 3P (*people, planet, profit*) dengan tujuan untuk memakmurkan petani Indonesia. Kemudian sesuai surat no.25756/A/PJ/C72/ET/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Sentralisasi Pelaporan dan Penagihan Pupuk Subsidi serta addendum kontrak PT Pupuk Indonesia – Kementan yang disetujui per tanggal 03 Juli 2023, maka mulai bulan Juli 2023 dan seterusnya, wewenang, tanggung jawab, proses penyaluran dan penagihan piutang atas pupuk subsidi diambil alih oleh PT Pupuk Indonesia. Dengan demikian seluruh produsen pupuk di lingkup PT Pupuk Indonesia sejak bulan Juli 2023 tersebut, hanya berkonsentrasi pada operasional fasilitas produksi dan upaya meningkatkan unjuk kerja maupun merealisasikan investasi agar produksi pupuk dapat bertambah dengan efisien untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pupuk nasional, seiring dengan naiknya target kemandirian pangan.

Subsidized fertilizers are allocated solely for nine strategic agricultural commodities. These include food crops such as rice, corn, and soybeans; horticultural crops such as chili, shallots, and garlic; and plantation crops such as smallholder sugarcane, cocoa, and coffee. Non-subsidized fertilizers, in contrast, are designated for use in plantation sectors such as oil palm and coffee, as well as horticultural commodities like fruits, vegetables, and other crops.

Historically, the distribution of subsidized fertilizer to farmers has been hampered by complex bureaucracy, including the need to wait for local government decrees and the involvement of at least eight ministries. To address these issues, the distribution mechanism was revised in 2024. Under the new system, the Ministry of Agriculture issues direct instructions to Pupuk Indonesia Holding Company, which is then responsible for distributing the fertilizer to farmer group associations (Gapoktan), who interface directly with the farmers.

To improve transparency, accuracy, and traceability in the distribution and recording of subsidized fertilizer, PUSRI, together with the Pupuk Indonesia Group, has implemented digital technology through the Retail Management System (Rekan) application. This system is fully integrated with all distributors and fertilizer kiosks, making transactions and sales recording more efficient. For non-PSO, corporate, and retail fertilizer sales and distribution, PUSRI and the Pupuk Indonesia Group utilize the Andalan application, which simplifies the fertilizer redemption process for non-PSO distributors, retailers, and corporate clients.

PUSRI, along with other fertilizer producers within the Pupuk Indonesia Group, also continues to promote the Makmur Program. This initiative offers intensive assistance to farmers, promotes sustainable agriculture practices, and involves the entire supply chain supported by technology. The program is built on the Triple Bottom Line (3P) concept—People, Planet, and Profit—with the overarching goal of improving the welfare of Indonesian farmers. In line with Letter No. 25756/A/PJ/C72/ET/2022 dated December 30, 2022, regarding the implementation of centralized reporting and billing for subsidized fertilizers, and the addendum to the contract between PT Pupuk Indonesia and the Ministry of Agriculture approved on July 3, 2023, the authority, responsibility, distribution, and receivables collection for subsidized fertilizers were officially transferred to PT Pupuk Indonesia starting in July 2023. Since then, all fertilizer producers under PT Pupuk Indonesia have been able to focus solely on operating production facilities, improving performance, and realizing investment strategies to increase fertilizer production efficiently, supporting the rising fertilizer needs in line with the national food self-sufficiency targets.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan organ pendukung Dewan Komisaris terhadap kriteria, target, dan indikator kinerja utama (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal maupun individual. Penilaian terhadap pencapaian KPI dibandingkan dengan realisasi pencapaiannya. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi dalam RUPS pada Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan penilaian secara kolegal dan individu kepada Pemegang Saham secara tahunan setelah pengesahan RKAP.

Berdasarkan telaahan tersebut, Dewan Komisaris memandang Direksi beserta jajaran Manajemen telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik. Keberhasilan manajemen dalam mengaktualisasikan strategi ke dalam implementasi bisnis Perusahaan yang kemudian memberikan pencapaian positif patut disyukuri dan diapresiasi. Dewan Komisaris juga memandang perjalanan transformasi perusahaan yang dijalankan oleh Direksi telah berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kedepan, Dewan berharap kinerja yang baik ini terus dijaga dan ditingkatkan, mengingat target produksi pangan di tahun-tahun mendatang telah semakin ditingkatkan demi tercapainya tujuan kemandirian pangan, sehingga kebutuhan pupuk akan meningkat, yang juga berarti terbukanya peluang untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Mengacu pada hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, PUSRI mencatatkan total pendapatan usaha sebesar Rp13.53 triliun, meningkat 1,21% dari senilai Rp13,37 triliun di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dikonstrubisikan oleh naiknya kuantitas volume penjualan, walaupun volume produksi Perusahaan menurun.

PUSRI membukukan penurunan laba bersih 10,94% pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1,07 triliun dari sebelumnya senilai Rp1,20 triliun pada tahun 2023. Penurunan laba tahun berjalan tersebut terutama dikonstrubisikan oleh naiknya komponen beban pokok pendapatan.

Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi dapat secara konsisten dan berkelanjutan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja yang baik tersebut pada semua parameter di masa mendatang, dengan senantiasa berupaya menjalankan perbaikan dalam menerapkan pengelolaan risiko dengan cermat dan melakukan mitigasi potensial risiko dengan tepat di tengah perkembangan kondisi perekonomian dan kondisi industri yang berkembang dengan dinamis.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the reviews conducted by the supporting organs of the Board of Commissioners regarding the criteria, targets, and key performance indicators (KPIs) stipulated in the Directors' Management Contracts, both collectively and individually. The assessment is carried out by comparing the targeted KPIs with their actual realization. The Board of Commissioners report the results of this performance evaluation in the General Meeting of Shareholders (GMS) through the Supervisory Report of the Board of Commissioners and convey both collective and individual assessments to the Shareholders annually following the approval of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Based on these evaluations, the Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors and the management team have managed the Company effectively. The success of management in translating strategic initiatives into business execution that yields positive outcomes is something to be grateful for and worthy of commendation. The Board of Commissioners also view the ongoing transformation process led by the Board of Directors as being well aligned with the Company's established vision and mission. Looking ahead, the Board expects this strong performance to be maintained and further improved, particularly in light of increasing targets for food production in the coming years to achieve national food self-sufficiency. This will result in a higher demand for fertilizers, thereby creating greater opportunities to further enhance future performance.

Referring to the audited Financial Statements for the 2024 fiscal year, PUSRI recorded a total revenue of Rp13.53 trillion, marking a 1.21% increase from Rp13.37 trillion in the previous year. This increase was primarily driven by higher sales volumes, despite a decline in the Company's production volume.

PUSRI recorded a net profit decline of 10.94% in 2024, amounting to Rp1.07 trillion compared to Rp1.20 trillion in 2023. This decrease in profit was primarily driven by an increase in the cost of goods sold.

The Board of Commissioners hope the Board of Directors can continue to consistently and sustainably maintain, and even improve, these strong performance achievements across all parameters in the future. This should be pursued through continuous improvement in risk management practices and the appropriate mitigation of potential risks, especially in light of the dynamic developments in both the economic and industrial landscapes.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang dicapai sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan bahwa eksistensi PUSRI dalam industri pupuk nasional, dan terutama dalam mendukung pencapaian target kemandirian pangan memiliki peranan penting.



FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris senantiasa berupaya meningkatkan fungsi dan kualitas pengawasan terutama dalam mendorong terjadinya perbaikan kualitas kinerja Perusahaan secara keseluruhan antara lain pada aspek: keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi dan teknologi tepat guna dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan saran dan masukan konstruktif yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau Rapat Pengawasan RKAP dan KPI Korporat.



RKAP dan KPI Korporat merupakan salah satu acuan penting bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan secara berkala melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP dalam Rapat Pengawasan setiap bulan.



Dewan Komisaris juga memantau pelaksanaan sistem pengendalian internal dan perkembangan pelaksanaan Risk Based Audit. Secara berkala (triwulanan) Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern, serta mencermati temuan penting atau temuan berulang beserta monitoring tindak lanjutnya.



Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dijalankan baik secara formal melalui pelaksanaan rapat bersama dengan Direksi, maupun secara non-formal melalui berbagai acara diskusi maupun pertemuan non-formal lainnya. Agenda pembahasan dalam setiap rapat adalah pembahasan mengenai langkah-langkah strategis Perusahaan, termasuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menyelenggarakan 15 (lima belas) rapat gabungan dengan direksi yang didalamnya juga melibatkan organ pendukung Dewan Komisaris selain melakukan 12 (dua belas) rapat internal Dewan Komisaris. Sejumlah saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui rapat-rapat gabungan tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Direksi. Oleh karenanya, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komunikasi erat yang telah terjalin dan keterbukaan Direksi sebagai wujud komitmen bersama dalam rangka menjaga keberlangsungan dan meningkatnya pertumbuhan bisnis PUSRI yang semakin berkualitas.

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and the entire management team for the accomplishments throughout 2024, which reaffirm PUSRI's significant role in the national fertilizer industry and, more importantly, its contribution to supporting the achievement of national food self-sufficiency targets.

SUPERVISORY FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners continuously strives to enhance its supervisory function and quality, particularly in encouraging improvements in the overall performance of the Company. This includes oversight in areas such as occupational health, safety and environment (OHSE), human resource competency development, the utilization of appropriate information systems and technology, and the implementation of effective risk management. In addition, the Board of Commissioners consistently provides constructive suggestions and input during meetings attended by the Board of Directors, as well as during Supervision Meetings on the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Corporate Key Performance Indicators (KPI).

The RKAP and Corporate KPIs serve as important benchmarks for the Board of Commissioners in performing its supervisory duties. Through quarterly Management Reports and monthly Performance Reports, the Board regularly evaluates the achievement of targets set out in the RKAP during monthly Supervision Meetings.

The Board of Commissioners also monitors the implementation of the internal control system and the development of the Risk-Based Audit approach. Every quarter, the Audit Committee evaluates the Internal Supervision Activity Report (LKPI) and the Audit Report (LHA) from the Internal Audit Unit, while also paying close attention to significant or recurring findings and the follow-up monitoring of these findings.

Frequency and Manner of Providing Advice to the Board of Directors

The supervisory function of the Board of Commissioners is carried out both formally through joint meetings with the Board of Directors and informally through various discussion forums and other informal meetings. The agenda of each meeting generally includes discussions on the Company's strategic steps, including the establishment of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP).

Throughout 2024, the Board of Commissioners held fifteen (15) joint meetings with the Board of Directors, which also involved supporting bodies of the Board of Commissioners, in addition to conducting twelve (12) internal the Board of Commissioners meetings. A number of suggestions and recommendations from the Board of Commissioners, delivered through these joint meetings, were well implemented by the Board of Directors. Accordingly, the Board of Commissioners expresses its appreciation for the close communication that has been established and the openness demonstrated by the Board of Directors, as a reflection of shared commitment to sustaining and enhancing the quality growth of PUSRI's business.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan untuk selalu bertindak mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris berharap PUSRI senantiasa meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) untuk mencapai standar praktek terbaik, selain menyesuaikan acuan praktik dan prinsip GCG dengan perkembangan terkini.

Hal tersebut selayaknya tercermin dari upaya PUSRI dalam melakukan setiap kegiatan operasional yang senantiasa dilakukan dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya terlindungi, mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa berlandaskan *best practices* GCG.

Dewan Komisaris menilai kontinuitas perbaikan sistem GCG yang dilakukan oleh PUSRI berjalan dengan sangat baik dan berkelanjutan. Secara berkala, PUSRI melaksanakan penilaian kualitas penerapan GCG yang melibatkan institusi Independen dan kredibel. Dengan dilakukannya kualitas penerapan GCG secara intensif, diikuti pelaksanaan rekomendasi perbaikannya, kualitas penerapan GCG di PUSRI senantiasa mengalami peningkatan.

Dewan Komisaris melihat bahwa tantangan peningkatan kualitas penerapan GCG PUSRI di tahun-tahun mendatang lebih besar pada upaya internalisasi prinsip-prinsip GCG terbaru sebagaimana disampaikan KNKG dalam PUG-KI, di lingkungan Perusahaan. Namun demikian, Dewan Komisaris meyakini, PUSRI akan dapat menjaga disparitas implementasi GCG di setiap level, sehingga implementasi GCG dapat berjalan proporsional dan seimbang.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE- KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

PUSRI memiliki 3 komite di bawah Dewan Komisaris, yakni: Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga cukup membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners consistently encourages the Board of Directors and all levels of the Company to act in accordance with corporate governance principles that are implemented throughout all levels and hierarchies of the organization. The Board believes that PUSRI improve the quality of its corporate governance implementation to reach best practice standards, while also adapting its GCG practices and principles to the latest developments.

These efforts should be reflected in PUSRI's commitment to conducting all operational activities with a strong adherence to business ethics and accountability, ensuring the protection of shareholder and stakeholder interests, prioritizing compliance with all applicable laws and regulations, and remaining grounded in GCG best practices.

The Board of Commissioners observes that PUSRI's continuous improvements in its GCG system are progressing well and sustainably. PUSRI conducts regular assessments of its GCG implementation quality in collaboration with independent and credible institutions. Through these intensive evaluations and the subsequent implementation of recommended improvements, the quality of GCG implementation at PUSRI continues to improve over time.

The Board of Commissioners recognizes that the challenge for PUSRI in the coming years will lie more in the internalization of the latest GCG principles, as outlined by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), within the organization. Nonetheless, the Board is confident that PUSRI will be able to maintain consistent GCG implementation across all levels, ensuring that its application remains proportional and balanced.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

PUSRI has three committees under the Board of Commissioners: the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners evaluates that these committees have performed their duties well, thereby significantly supporting the supervisory role of the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company.

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku.



Selama tahun 2024 Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai program kerja yang direncanakan, melakukan pembahasan rencana dan hasil audit internal maupun eksternal. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR) bertanggungjawab untuk menilai dan memberi masukan terhadap penyusunan kebijakan, strategi serta mitigasi yang harus dilakukan dari hasil kajian Risiko Perusahaan, baik terkait dengan aspek risiko potensial maupun kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hasil kajian analisa risiko tersebut. Komite IMR juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan terhadap analisis risiko yang dihadapi Perusahaan baik pada kegiatan perencanaan, operasional, investasi maupun evaluasi atas penerapan prinsip *Three Lines of Defence* dan *Enterprise Risk Management* yang dijalankan di seluruh unit bisnis PUSRI.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) membantu Dewan Komisaris dalam memantau proses pencalonan kandidat anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat PUSRI di bawah Direksi. KNR juga mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dasar tinjauan RUPS dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.



Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing komite sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas hasil kerja komite-komite dan optimis kinerja Komite-komite dapat lebih ditingkatkan dan mampu lebih bersinergi dengan unit kerja terkait, sehingga komite Dewan Komisaris mampu memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi berkembangnya skala usaha PUSRI.

Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls conducted by both internal and external auditors, as well as ensuring the accuracy and reliability of financial statements and other financial information, to confirm compliance with applicable standards and regulations.

Throughout 2024, the Audit Committee has carried out its duties according to the planned work program, discussing the plans and results of internal and external audits. All findings, notes, and recommendations from the implementation, review, and analysis by the Audit Committee have been communicated and discussed with Management, the Internal Audit Unit (SPI), and the external auditors, and have been reported to the Board of Commissioners for necessary improvements and follow-up actions by the relevant parties.

Investment and Risk Management Committee

Investment and Risk Management Committee is responsible for assessing and providing input on the formulation of policies, strategies, and mitigation measures to be implemented based on the Company's risk assessments, covering both potential risks and compliance with regulations. The committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the results of risk analysis evaluations. The committee is also responsible for offering input on risk analysis that the Company must address across planning activities, operational processes, and investment decisions, as well as for evaluating the implementation of the Three Lines of Defense principle and Enterprise Risk Management across all business units within PUSRI.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) assists the Board of Commissioners in overseeing the nomination process for candidates for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and executive positions under the Directors within PUSRI. The NRC also evaluates the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors as the basis for the General Meeting of Shareholders' (GMS) review in determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Reports on the implementation of activities by the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee are submitted quarterly and annually to the Board of Commissioners as a form of accountability for each committee's duties, in accordance with the established work guidelines. The Board of Commissioners extends its appreciation for the performance of these committees and remains optimistic that their contributions will continue to improve and foster greater synergy with relevant working units, enabling the committees under the Board of Commissioners to provide even greater support in the development and expansion of PUSRI's business.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang tertuang di dalam Akta No. 03 tanggal 10 Juni 2024, pada tahun 2024, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugasnya, Sdr Setya Utama mengundurkan diri dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama diiringi ucapan terimakasih dan penghargaan atas sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjalankan tugas.

Selanjutnya RUPSLB mengangkat Sdri Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Sdr Fadjar Judisiawan sebagai Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris PUSRI pada akhir tahun 2024 adalah:

Siti Nurizka Puteri Jaya: Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen
Bambang Supriyambodo: Komisaris Independen
Ali Jamil: Komisaris
Prahoro Yulianto Nurtjahyo: Komisaris
Sally Salamah: Komisaris
Fadjar Judisiawan: Komisaris

PROSPEK USAHA

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih dihadapkan pada peningkatan risiko disparitas pertumbuhan yang semakin tajam dan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan masih tingginya tingkat inflasi yang membayangi perbaikan ekonomi di negara-negara maju, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Eropa, fragmentasi geo-ekonomi, risiko proteksi perdagangan yang semakin nyata dan tingginya nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut membuat semakin pentingnya dilakukan upaya bersama untuk mengendalikan inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF dalam *World Economic Outlook - Januari 2025*, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan sedikit meningkat menjadi 3,3% dari prediksi capaian 3,2% di 2024.

Selaras dengan perkiraan pertumbuhan perekonomian global yang cenderung membaik, pertumbuhan permintaan urea diperkirakan kembali meningkat, dengan kawasan Asia Pasific berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan tersebut, mengingat sekitar 66% dari kapasitas produksi urea global berada di kawasan tersebut. Urbanisasi yang cepat dan perubahan kebiasaan pola makan dari populasi kelas menengah yang terus meningkat, membuat wilayah Asia dan Afrika, akan terus berkontribusi signifikan terhadap permintaan urea global.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as stated in Deed No. 03 dated June 10, 2024, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners in 2024. In connection with the conclusion of his term of office, Mr. Setya Utama was honorably discharged from his position as President Commissioner, accompanied by expressions of gratitude and appreciation for his dedication and contributions during his tenure.

Subsequently, the EGMS appointed Ms. Siti Nurizka Puteri Jaya as President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner, and Mr. Fadjar Judisiawan as Commissioner. Thus, the composition of the PUSRI Board of Commissioners at the end of 2024 is as follows:

Siti Nurizka Puteri Jaya: President Commissioner,
concurrently serving as Independent Commissioner
Bambang Supriyambodo: Independent Commissioner
Ali Jamil: Commissioner
Prahoro Yulianto Nurtjahyo: Commissioner
Sally Salamah: Commissioner
Fadjar Judisiawan: Commissioner

BUSINESS PROSPECT

The global economy in 2025 is projected to continue facing heightened risks of widening growth disparity and increasing uncertainty. This situation aligns with persistently high inflation rates that continue to overshadow economic recovery in developed countries, ongoing geopolitical tensions in Europe, geo-economic fragmentation, rising trade protectionism risks, and the strong U.S. dollar. These various challenges underscore the importance of joint efforts to control inflation, pursue fiscal consolidation, coordinate monetary and fiscal policies, and communicate policy clearly in order to strengthen macroeconomic stability and support economic growth. According to the *World Economic Outlook - January 2025* by the IMF, global economic growth in 2025 is forecasted to slightly improve to 3.3% from the estimated 3.2% in 2024.

In line with this projected improvement in global economic growth, demand for urea is expected to rise again, with the Asia-Pacific region contributing the most to this growth, considering that approximately 66% of global urea production capacity is located in this region. Rapid urbanization and shifting dietary habits among the growing middle class will continue to make Asia and Africa significant contributors to global urea demand.



Negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik, seperti Tiongkok, India, dan Rusia yang merupakan kontributor utama dalam industri urea global akan semakin mempengaruhi dinamika permintaan urea global, mengingat selain memiliki jumlah penduduk yang besar, negara-negara tersebut memiliki program pertanian yang masive, fasilitas produksi yang besar dan ketersediaan bahan baku yang memadai. Tiongkok sebagai negara produsen sekaligus konsumen urea terbesar akan memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi pasokan urea maupun harga jual urea di pasar global. Berlanjutnya pembatasan ekspor urea dari Tiongkok di tahun-tahun mendatang, diperkirakan akan membuat harga urea di pasar global cenderung meningkat.

Kondisi perekonomian global dan ketersediaan urea di pasar global tersebut tentu akan mempengaruhi perekonomian maupun ketersediaan urea maupun pupuk NPK di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,20%. Dari sisi produksi, pertumbuhan perekonomian diperkirakan masih akan bertumpu pada lima lapangan usaha utama seperti pada tahun 2024, yaitu: industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) mengindikasikan sektor tersebut terus berekspansi. Sementara dari sisi pengeluaran, juga masih akan didominasi oleh pengeluaran rumah tangga, dengan porsi kontribusi diatas 50%.

Industri pupuk diyakini masih akan menjadi industri yang prospektif mengingat pupuk merupakan komoditas yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan global maupun nasional. Kebutuhan pupuk nasional di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 16 juta ton dengan mempertimbangkan tekad pemerintah baru untuk mewujudkan kemandirian pangan yang salah satunya diupayakan melalui pencetakan area sawah baru, mengoptimalkan lahan pertanian seluas 3 juta hektar selain memasukan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Isu efisiensi produksi dan lingkungan merupakan aspek yang menjadi prioritas dalam pengelolaan industri pupuk di Pupuk Indonesia grup. Efisiensi sangat erat kaitannya dengan daya saing produk dalam peta persaingan yang berujung pada laba konsolidasi sedangkan aspek lingkungan merupakan kewajiban seluruh insan di era modern dalam memelihara agar nantinya tetap dapat menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Hal ini mendorong seluruh perusahaan, tidak terkecuali PUSRI, mengembangkan berbagai inisiatif dalam menunjang perbaikan efisiensi dan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

Pusri dalam hal ini telah mengantisipasi kondisi tersebut melalui revitalisasi Pabrik Pusri III dan IV yang dilakukan dengan tujuan agar pabrik yang telah berusia lebih dari 40 tahun itu bisa lebih hemat energi dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, PUSRI juga merealisasikan pembangunan Pabrik Pusri III-B yang didesain lebih ramah lingkungan karena menerapkan teknologi teranyar seperti KBR purifier untuk memproduksi amonia. Pada saat sudah beroperasi nantinya pabrik Pusri III-B diperkirakan dapat menghemat konsumsi gas bumi sebesar 10 MMBTU per ton urea sehingga diharapkan dapat menghemat biaya gas hingga Rp 1,5 triliun per tahun dan akan memiliki kapasitas produksi sebesar 445.500 ton amonia per tahun serta 907.000 ton urea per tahun. PUSRI juga mulai menjajaki pelaksanaan program revamping pabrik PUSRI I B.

Major countries in the Asia-Pacific region—such as China, India, and Russia—which are key players in the global urea industry, will increasingly influence the dynamics of global urea demand. These countries not only have large populations but also implement massive agricultural programs, possess extensive production facilities, and have ample raw material availability. China, as both the world's largest producer and consumer of urea, will play a significant role in influencing both global supply and urea market prices. Continued export restrictions from China in the coming years are expected to contribute to an upward trend in global urea prices.

These global economic conditions and the availability of urea in the international market will undoubtedly affect the Indonesian economy and the availability of urea and NPK fertilizers domestically. National economic growth in 2025 is projected to increase to around 5.20%. From the production side, growth is still expected to be driven by the five main sectors seen in 2024: manufacturing, trade, agriculture, construction, and mining. Manufacturing activity, as reflected by the Purchasing Managers' Index (PMI), indicates continued expansion. On the expenditure side, growth will remain dominated by household consumption, contributing over 50%.

The fertilizer industry is still viewed as a promising sector, as fertilizer is a critical commodity for ensuring both global and national food security. Indonesia's fertilizer needs in the coming years are projected to surge to around 16 million tons, considering the new government's determination to achieve food self-sufficiency. This initiative includes the development of new rice fields, optimization of 3 million hectares of existing farmland, and the inclusion of cassava as a food commodity eligible for subsidized fertilizer.

Production efficiency and environmental issues are key priorities in fertilizer industry management within the Pupuk Indonesia Group. Efficiency is closely linked to product competitiveness in the market landscape, ultimately impacting consolidated profits. Meanwhile, environmental responsibility is a collective obligation in the modern era, aimed at preserving the planet for future generations. This has driven all companies, including PUSRI, to develop various initiatives that continuously improve both efficiency and environmental performance in a sustainable manner.

PUSRI has proactively addressed this by revitalizing Pusri III and IV Plants, aiming to improve energy efficiency and reduce carbon emissions, as these plants have been operating for over 40 years. In addition, PUSRI is constructing the Pusri III-B Plant, designed with environmentally friendly features and incorporating the latest technologies, such as the KBR purifier for ammonia production. Once operational, the Pusri III-B Plant is expected to reduce natural gas consumption by 10 MMBTU per ton of urea, potentially saving up to Rp1.5 trillion in gas costs per year. The plant will have an annual production capacity of 445,500 tons of ammonia and 907,000 tons of urea. PUSRI has also begun exploring the revamping of the PUSRI I B Plant.

Walaupun tengah merealisasikan peningkatan kapasitas produksi, tidak menutup kemungkinan, PUSRI maupun produsen lain di lingkup Pupuk Indonesia Grup memperhatikan dan membaca peluang pemenuhan pupuk maupun bahan baku pupuk dari negara lain, terutama untuk pupuk NPK, yang bahan bakunya di Indonesia terbatas.

Dewan Komisaris optimis bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan seluruh karyawan dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan telah berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan usaha berkualitas dalam jangka panjang, meningkatkan nilai bagi pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya, selain mendukung suksesnya program kemandirian pangan di masa mendatang.

PENUTUP

Secara umum, kami bangga dengan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2024. Oleh sebab itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen dan karyawan atas dedikasi dan loyalitasnya, mencurahkan tenaga dan pikiran demi peningkatan kinerja PUSRI selama ini. Dan tidak lupa pula, kami ucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja PUSRI atas kontribusinya membantu mewujudkan tujuan dan membantu tercapainya berbagai target Perusahaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya sehingga PUSRI dapat terus berkontribusi dalam industri pupuk nasional dengan memberi nilai tambah dan harapan baru baik untuk saat ini maupun di masa depan.

While these capacity enhancement efforts are ongoing, it is still possible that PUSRI and other producers within the Pupuk Indonesia Group will continue to explore opportunities for sourcing fertilizer or raw materials from abroad, especially for NPK fertilizers, given the limited availability of raw materials in Indonesia.

The Board of Commissioners is optimistic that the various initiatives undertaken by the Board of Directors and all employees to drive sustainable growth are on the right track to create high-quality business development in the long term, increase value for shareholders and other stakeholders, and support the success of future food self-sufficiency programs.

CLOSING

Overall, we are proud of the Company's achievements throughout 2024. Therefore, we extend our highest appreciation to the management and employees for their dedication and loyalty, for devoting their energy and thoughts toward the continued improvement of PUSRI's performance. We also wish to express our sincere gratitude to all of PUSRI's business partners for their valuable contributions in helping us realize our objectives and achieve various corporate targets.

Our heartfelt thanks also go to the shareholders and all stakeholders for their trust and support, which have enabled PUSRI to continue contributing to the national fertilizer industry by providing added value and new hope, both for today and for the future.

Palembang, 23 Mei 2025

Palembang, May 23, 2025

Atas nama Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,
On behalf of the Board of Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,



Siti Nurizka Puteri Jaya

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner



1 Daconi Khotob
Direktur Utama
President Director

2 Filius Yuliandi
Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director

3 Saifullah Lasindrang
Direktur Keuangan & Umum merangkap
Plt. Direktur Manajemen Risiko
*Director of Finance & General,
concurrently serving as Acting Director
of Risk Management*



Laporan Direksi

Board of Directors Report

Berbagai inisiatif strategis yang kami tetapkan atas arahan Dewan Komisaris dan dijalankan dengan penuh disiplin dan dedikasi oleh seluruh jajaran insan PUSRI membuat Perusahaan mampu mengatasi kondisi usaha yang penuh tantangan dan ketidakpastian dengan mencatatkan perbaikan kinerja, sehingga memperkuat fondasi untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan sekaligus mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan memungkinkan diraihinya kinerja terbaik berkelanjutan dalam jangka panjang.

The various strategic initiatives we implemented, under the guidance of the Board of Commissioners and executed with discipline and dedication by all members of the PUSRI team, have enabled the Company to navigate a highly challenging and uncertain business environment. These efforts have led to improved performance, thereby strengthening the foundation to support the success of national food security programs and the achievement of various sustainability goals, paving the way for sustainable long-term performance.

Kami mengembangkan dan memperkuat pilar-pilar kinerja, baik dari sisi operasional, rancang bangun, jaringan distribusi maupun kesatuan tata kelola dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi digital terkini agar dapat mendukung pembangunan perekonomian, mewujudkan ketahanan pangan nasional yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang.

We develop and strengthen performance pillars across operations, engineering design, distribution network, and unified governance within an integrated ecosystem based on the latest digital technology. This is aimed at supporting economic development and realizing national food security in alignment with long-term development goals.



Daoni Khotob
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2024 kembali berkembang menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi industri pupuk. Namun demikian Direksi bersama seluruh jajaran menjalankan berbagai inisiatif strategis yang telah digariskan dan berhasil mengatasi kendala yang ada serta mampu mencatatkan perbaikan kinerja di tengah kondisi yang penuh tantangan. Atas nama Direksi, perkenankan saya untuk menyampaikan ringkasan kinerja PUSRI untuk tahun buku 2024.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya PUSRI dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini. Direksi bersama-sama jajaran karyawan telah melaksanakan amanah pengelolaan Perusahaan dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis dan program kerja yang telah digariskan sebelumnya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran PUSRI yang telah ditetapkan.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi ekonomi global dan nasional

Kondisi perekonomian global di tahun 2024 masih dihadapkan pada kondisi penuh tantangan dan ketidakpastian dengan berbagai masalah utama, meliputi: disparitas pertumbuhan ekonomi antar negara besar dan antar wilayah, kuatnya dolar AS, inflasi global yang masih tinggi dan pertumbuhan perekonomian yang melambat. Merujuk pada kajian IMF – World Economic Outlook Januari 2025, perekonomian global diprakirakan tumbuh 3,2% pada tahun 2024 atau melambat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,3%, yang utamanya disebabkan oleh kebijakan moneter yang ketat, konflik geopolitik berkepanjangan dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan perekonomian antar kawasan maupun antar negara-negara maju juga bervariasi dengan disparitas yang cukup besar. Adapun prospeknya dalam jangka pendek masih cenderung ke arah negatif yang disebabkan oleh adanya peningkatan ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasokan, harga komoditas yang bergejolak, dan dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, mengiringi lemahnya pertumbuhan, tingkat inflasi global telah mulai menurun dari kisaran 6,7% di tahun 2023 menjadi sebesar 5,7% di akhir tahun 2024.

Penurunan inflasi tersebut telah membuat Bank Sentral beberapa negara besar, seperti *The Fed* Amerika Serikat pada akhir Desember 2024 kembali menurunkan suku bunga rujukan *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 *basis point* (bps) menjadi di kisaran 4,25%-4,5% dari sebesar 5,50% di akhir tahun 2023. Namun demikian, penurunan suku bunga tersebut tetap belum mampu meredam meningkatnya nilai tukar Dolar AS, mengiringi tetap kuatnya pertumbuhan perekonomian AS, dan membuat suku bunga di berbagai negara berkembang tetap bertahan tinggi, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.

Dear Shareholders and Stakeholders,

The year 2024 once again unfolded as a challenging year for the Indonesian economy in general and the fertilizer industry in particular. Nevertheless, the Board of Directors, along with the entire organization, pursued various strategic initiatives that had been outlined and successfully overcame the obstacles faced, leading to notable performance improvements despite the difficult conditions. On behalf of the Board of Directors, allow me to present a summary of PUSRI's performance for the 2024 fiscal year.

All praise and gratitude are due to God Almighty, as by His grace, PUSRI was able to overcome the many challenges and uncertainties of 2024. The Board of Directors, together with all employees, has faithfully carried out the mandate of managing the Company by executing the strategic initiatives and work programs previously outlined in pursuit of PUSRI's vision, mission, goals, and targets.

ECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS

Global and National Economic Conditions

The global economy in 2024 continued to face a challenging and uncertain environment, with several key issues dominating the landscape. These included widening disparities in economic growth across major countries and regions, a strong US dollar, persistently high global inflation, and slowing economic momentum. According to the IMF – World Economic Outlook, January 2025, the global economy is projected to grow by 3.2% in 2024, a slight slowdown from the previous year's actual growth of 3.3%. Tight monetary policies, prolonged geopolitical conflicts, and a weakening in global economic growth primarily drive this moderation. Economic growth varied significantly across regions and among developed countries, underscoring the widening growth disparities. In the short term, the outlook remains skewed toward the downside, due to heightened trade tensions, supply chain disruptions, volatile commodity prices, and more aggressive-than-expected monetary tightening. Meanwhile, despite weaker growth, global inflation began to ease—from 6.7% in 2023 to 5.7% by the end of 2024.

This decline in inflation prompted central banks in several major economies, including the U.S. Federal Reserve, to cut benchmark interest rates. By the end of December 2024, the Fed reduced the Federal Funds Rate by 25 basis points to a range of 4.25%–4.5%, down from 5.50% at the end of 2023. However, this rate cut was insufficient to weaken the U.S. dollar, which remained strong in line with the continued resilience of the U.S. economy. Consequently, interest rates in many developing countries remained high, putting pressure on their economic growth.

Di tengah perekonomian dunia yang tidak stabil, penuh tantangan dan ketidakpastian tersebut, perekonomian nasional relatif berada dalam kondisi lebih baik dan menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Merujuk pada data BPS, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% di tahun 2024, sedikit melandai dari 5,05% di tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, sebesar 54,04% dengan pertumbuhan sebesar 4,94% yoy pada periode tersebut. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap relatif terjaga, didukung oleh pengelolaan inflasi yang baik, dengan tingkat inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% yang berarti lebih rendah dari inflasi 2023 yang sebesar 2,61% dan berada di rentang sasaran 2,5% ±1%.¹

Dari sisi lapangan usaha, kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor konstruksi, sektor lainnya, pertambangan & penggalian, perdagangan & reparasi dan industri pengolahan. Sektor konstruksi tumbuh 7,02% di sepanjang tahun 2024. Sektor-sektor lainnya, yakni: sektor lainnya; pertambangan & penggalian; perdagangan & reparasi dan industri pengolahan, tercatat tumbuh masing-masing sebesar 6,30%, 4,90%, 4,86% dan 4,43% di tahun 2024. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, sebesar 18,98% yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43%.

Sementara itu, neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus, dengan posisi per Desember 2024 adalah sebesar US\$31,04 miliar. Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat meningkat menjadi US\$155,7 miliar. Dalam rangka menjaga nilai tukar dan mempertahankan momentum pertumbuhan, Bank Indonesia menetapkan suku bunga rujukan BI Rate pada kisaran 6,00% di akhir Desember 2024.

Kondisi Industri Pupuk Global dan Nasional

Merujuk pada data World Bank *Commodity Price* – Februari 2025, harga produk urea dan amoniak internasional di tahun 2024 cenderung stabil, setelah terjadinya lonjakan harga di tahun 2022 dan penurunan tajam di tahun 2023. Stabilitas harga di tahun 2024 terjadi berkat terpenuhinya pasokan bersamaan dengan relatif stabilnya harga energi sekalipun kebijakan pembatasan ekspor urea tetap diberlakukan oleh China, sebagai produsen utama urea global.

Adapun permintaan pupuk urea global di tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 183 juta ton, berkurang 1 juta ton dari 184 juta ton di tahun 2023, menunjukkan adanya pelemahan serapan produk di pasar. Hal ini terefleksikan dari harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2024 yang sekalipun sedikit berfluktuasi, namun relatif stabil di kisaran USD350–USD361 per metric ton.

Amid the global economic instability and uncertainty, Indonesia's domestic economy showed relatively stronger performance and resilience. According to data from Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy grew by 5.03% in 2024, a slight decline from 5.05% in the previous year. Household consumption remained the largest contributor to Indonesia's GDP, accounting for 54.04% and recording year-on-year growth of 4.94% during the period. This reflects relatively stable consumer purchasing power, supported by effective inflation control, with the 2024 inflation rate at 1.57%—lower than 2.61% in 2023 and within the target range of 2.5% ±1%.¹

From the perspective of economic sectors, the largest contributors to economic growth came from the construction sector, other sectors, mining and quarrying, trade and repair, and manufacturing industries. The construction sector grew by 7.02% throughout 2024. Other sectors, mining and quarrying; trade and repair; and manufacturing industries, recorded growth rates of 6.30%, 4.90%, 4.86%, and 4.43%, respectively, in 2024. Indonesia's GDP structure by economic sector in 2024 was dominated by the manufacturing industry sector, which accounted for 18.98% of GDP and recorded growth of 4.43%.

In addition, Indonesia's trade balance continued to post a surplus, amounting to US\$ 31.04 billion as of December 2024. The country's foreign exchange reserves also increased, reaching US\$ 155.7 billion by year-end. To help maintain exchange rate stability and support growth momentum, Bank Indonesia set the benchmark BI Rate at 6.00% at the end of December 2024.

Kondisi Industri Pupuk Global dan Nasional

Referring to the data from the World Bank *Commodity Price Report* (February 2025), international prices for urea and ammonia remained relatively stable throughout 2024. This follows a significant price surge in 2022 and a sharp decline in 2023. The price stabilization in 2024 was primarily due to sufficient global supply and relatively steady energy prices, despite China, one of the world's major urea producers, maintaining export restrictions on urea.

Global demand for urea fertilizer in 2024 was estimated at 183 million tons, down by 1 million tons from 184 million tons in 2023. This decrease indicates a weakening in product absorption in the global market. This trend is also reflected in the relatively stable global urea fertilizer price throughout 2024, which, despite minor fluctuations, remained in the range of USD 350–361 per metric ton.

¹ BPS

¹ BPS



Permintaan pupuk nasional dipenuhi melalui sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan non-PSO (komersial). Pada sektor PSO, Pupuk Indonesia Grup –termasuk PUSRI di dalamnya– berkewajiban dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, utamanya jenis urea dan NPK sesuai dengan alokasi serta ketentuan dari Kementerian terkait. Adapun total alokasi volume pupuk subsidi di tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton.

Disamping peruntukan pupuk subsidi di atas, PUSRI juga menyediakan pupuk untuk sektor lainnya, yaitu pupuk non PSO atau komersial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi pada komoditi Perkebunan terutama sawit, kopi, singkong dan juga komoditi hortikultura seperti buah-buahan, sayur dan tanaman lainnya. Adapun untuk sektor komersial dalam negeri terdiri dari sub sektor perkebunan, industri, dan ritel. Khusus untuk ritel, terdapat program “Makmur” dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dalam suatu wilayah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pupuk Indonesia Grup selaku penyedia pupuk nasional terbesar berhasil menjaga ketersediaan pupuk dengan mengoptimalkan kapasitas produksinya. Jumlah kapasitas pabrik urea Pupuk Indonesia Grup per tahun 2024 tercatat sebesar 9,36 juta ton atau 203% dari kebutuhan urea sektor pangan yang sebesar 4,6 juta ton. Untuk pupuk NPK, kapasitas Pabrik NPK sebesar 4,6 juta ton atau 105% dari kebutuhan nasional, yaitu 4,4 juta ton.

National fertilizer demand is met through two sectors: the Public Service Obligation (PSO) and non-PSO (commercial) sectors. Within the PSO sector, the Pupuk Indonesia Group—including PUSRI—is responsible for distributing subsidized fertilizers, primarily urea and NPK, in accordance with the allocation and regulations set by the relevant Ministry. The total allocation of subsidized fertilizer volume in 2024 amounts to 9.55 million tons.

In addition to the allocation of subsidized fertilizers mentioned above, PUSRI also supplies fertilizers for other sectors, namely Non-PSO or commercial fertilizers, aimed at meeting non-subsidized fertilizer needs for plantation commodities, particularly oil palm, coffee, and cassava, as well as horticultural commodities such as fruits, vegetables, and other crops. The domestic commercial sector comprises the plantation, industrial, and retail sub-sectors. In the retail sub-sector, the ‘Makmur’ program is implemented with the objective of improving agricultural productivity in targeted regions.

To meet national fertilizer needs, the Pupuk Indonesia Group, as the largest fertilizer provider in the country, successfully maintained fertilizer availability by optimizing its production capacity. As of 2024, the annual urea production capacity of the Pupuk Indonesia Group stood at 9.36 million tons equivalent to 203% of the urea demand in the food crop sector, which is 4.6 million tons. For NPK fertilizer, production capacity NPK plant was recorded at 4.6 million tons, representing 105% of the national demand of 4.4 million tons.

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS

Mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi industri maupun pengguna pupuk tersebut, Direksi, bersama seluruh pemangku kepentingan, berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif strategis untuk mengatasi kendala maupun tantangan yang ada agar tujuan akhir dari pengembangan industri pupuk, yakni ketahanan pangan nasional dan pelaku usaha terkait lainnya. Direksi beserta seluruh jajaran Perusahaan kemudian senantiasa berkoordinasi agar seluruh inisiatif yang telah dirumuskan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan hasil yang optimal, meningkatkan kinerja PUSRI sekaligus mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Secara umum, PUSRI menjalankan strategi utama 4C, yang terdiri dari *cost leadership*, *competitive to market*, *competency of employee* dan *clean industry & sustainability*.

Pada strategi *cost leadership*, PUSRI berupaya mengamankan penambahan pasokan gas bumi untuk operasional Perusahaan, melaksanakan revitalisasi pabrik P-III/IV menjadi pabrik Pusri IIIB, mengimplementasikan *operation & maintenance excellence* di lini produksi, memitigasi risiko kinerja Anak Perusahaan terhadap laba konsolidasi serta melaksanakan *Cost Reduction Program* (CRP) secara terstruktur dan terukur.

Pada strategi *competitive to market*, PUSRI melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku, berkoordinasi intensif dengan Pupuk Indonesia selaku operator fungsi pemasaran dan penjualan pupuk nasional dalam menangkap peluang pasar komersial (dalam negeri dan ekspor), melaksanakan tahap inkubasi dan *premarketing* produk hasil inovasi/riset yang prospektif, melakukan optimalisasi aset Perusahaan dan Jasa Pemeliharaan Pabrik secara berkelanjutan serta menyusun kajian *outbond logistic* dengan skema paling optimal untuk memitigasi pendangkalan Sungai Musi.

POLICIES AND STRATEGIC INITIATIVES

Taking into account the economic conditions, industry landscape, and fertilizer users, the Board of Directors, together with all stakeholders, actively plays a role in formulating strategic policies and initiatives to overcome existing challenges and obstacles to achieve the ultimate goal of developing the fertilizer industry, national food security and the support of related business actors. The Board of Directors and all levels of the Company consistently coordinate to ensure that all formulated initiatives are effectively implemented and yield optimal results, thereby enhancing PUSRI's performance while supporting the success of the national food security program. In general, PUSRI implements its core 4C strategy, which consists of cost leadership, competitive to market, competency of employees, and clean industry & sustainability.

Under the cost leadership strategy, PUSRI strives to secure additional natural gas supply for the Company's operations, carry out the revitalization of Plant P-III/

IV into Pusri IIIB, implement operation & maintenance excellence across the production line, mitigate the performance risks of Subsidiaries on consolidated earnings, and execute a structured and measurable Cost Reduction Program (CRP).

Under the competitive-to-market strategy, PUSRI distributes subsidized fertilizers in accordance with the allocated quotas and prevailing regulations, engages in intensive coordination with Pupuk Indonesia as the operator of national fertilizer marketing and sales functions to capture commercial market opportunities (both domestic and export), conducts incubation and pre-marketing phases for prospective innovation/research-based products, continuously optimizes the Company's assets and Plant Maintenance Services, and develops a study on outbound logistics using the most optimal scheme to mitigate the silting of the Musi River.

PUSRI menjalankan inisiatif strategis 4C

PUSRI implements the 4C strategic initiatives.



Pada strategi *competency of employee*, PUSRI berupaya secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*) dan perilaku (*Attitude*) melalui implementasi berbagai program transformasi SDM Pupuk Indonesia Group dan budaya AKHLAK untuk membentuk insan yang *high performing world-class human capital* dalam menunjang pencapaian kinerja Perusahaan.



Sejalan dengan target *net-zero emission* Indonesia di tahun 2060 dan keberlanjutan Perusahaan, PUSRI juga menerapkan strategi *clean industry & sustainability* melalui implementasi berbagai program dekarbonisasi terstruktur dan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) bernilai tambah berbasis *environmental-social-governance* (ESG), sasaran *sustainable development goals* (SDGs), dan konsep circular economic.



Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi

Direksi menetapkan target usaha, anggaran, strategi dan kebijakan strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengacu pada gambaran umum kondisi eksternal dan internal terakhir. RKAP disusun secara detail dengan mempertimbangkan analisa faktor eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi, kondisi sosial, proyeksi harga bahan baku utama serta kondisi pasar dan persaingan usaha. Sedangkan kondisi internal antara lain mencakup data kinerja historis, kesiapan sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data historis penjualan.



Kemudian Direksi melakukan pemaparan RKAP kepada Dewan Komisaris di dalam rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris guna mendapatkan pandangan, rekomendasi serta tanggapan dan arahan Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui oleh pemegang saham. Berdasarkan RKAP yang telah memperoleh tanggapan dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham tersebut, Direksi dan tim manajemen akan memastikan terlaksananya rencana kerja yang dari masing-masing divisi yang ada di PUSRI sebagai turunan dari sasaran strategis yang bertujuan untuk memenuhi target usaha yang telah ditetapkan.



KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja Operasional dan Keuangan

Mengacu pada target dan program yang telah ditetapkan dalam RKAP, PUSRI menjalankan berbagai inisiatif yang telah digariskan dengan tetap mempertimbangkan kondisi terkini yang harus diatasi, menyesuaikan strategi dengan kondisi dan melakukan evaluasi pencapaian target tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Secara keseluruhan, pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan kinerja yang positif, berbagai indikator menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, walaupun pada beberapa aspek mencatatkan capaian di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi produksi pupuk urea di tahun 2024 sebesar 1.857.832 ton, turun 7,6% dari produksi 2.010.279 ton di 2023. Adapun realisasi produksi pupuk NPK di tahun 2024 adalah sejumlah 363.384 ton,

Under the employee competency strategy, PUSRI continuously strives to enhance Knowledge, Skills, and Attitude through the implementation of various human capital transformation programs across the Pupuk Indonesia Group and the adoption of the AKHLAK core values, with the goal of developing high-performing, world-class human capital to support the achievement of the Company's performance targets.

In line with Indonesia's net-zero emission target by 2060 and the Company's sustainability goals, PUSRI also implements a clean industry & sustainability strategy through the execution of various structured decarbonization programs and value-added Social and Environmental Responsibility (TJSL) initiatives based on environmental, social, and governance (ESG) principles, aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the circular economy concept.

Role of the Board of Directors in Formulating Strategy

The Board of Directors sets business targets, budgets, strategies, and strategic policies in the form of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), referring to the latest overview of external and internal conditions. The RKAP is developed in detail, taking into account an analysis of both external and internal factors. External conditions include economic growth projections, macroeconomic indicators, social conditions, projections for key raw material prices, as well as market conditions and business competition. Internal conditions, on the other hand, cover historical performance data, human resource readiness, production capacity, and historical sales data.

The Board of Directors then presents the RKAP to the Board of Commissioners in a joint meeting with the Board of Directors to receive feedback, recommendations, responses, and directions from the Board of Commissioners, which are subsequently approved by the shareholders. Based on the RKAP, which has received input from the Board of Commissioners and approval from the shareholders, the Board of Directors and the management team will ensure the implementation of the work plans of each division at PUSRI, as a derivative of the strategic objectives aimed at meeting the established business targets.

COMPANY PERFORMANCE

Operational and Financial Performance

Referring to the targets and programs set in the Work Plan and Budget (RKAP), PUSRI has implemented various initiatives while considering the current conditions that need to be addressed, adjusting strategies to the situation, and evaluating the achievement of those targets as a basis for determining the next steps. Overall, in 2024, the company recorded a positive performance, with various indicators showing better performance than the previous year, although some aspects fell short of the set targets.

The realization of urea fertilizer production in 2024 amounted to 1,857,832 tons, a 7.6% decrease from the 2,010,279 tons produced in 2023. The realization of NPK fertilizer production in 2024 was

naik 10,7% dari 328.349 ton di tahun sebelumnya. Sehingga total produksi pupuk PUSRI di tahun 2024 adalah 2.221.216 ton, turun 5,0% dari 2.338.628 ton di tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi produksi amoniak PUSRI di tahun 2024 adalah sejumlah 1.284.490 ton, turun 3,7% dari 1.333.796 ton di 2023.

Adapun total volume penjualan pupuk PUSRI pada tahun 2024 adalah sejumlah 2.284.994 ton, terdiri dari 1.883.779 ton pupuk urea dan 401.211 ton pupuk NPK, naik 4,4% dari 2.188.553 di tahun 2023. Sementara penjualan amoniak pada tahun 2024 adalah sejumlah 129.774 ton, naik 22,8% dari 105.721 di tahun sebelumnya.

Naiknya volume penjualan, baik pupuk maupun amoniak membuat PUSRI mencatatkan total pendapatan tahun 2024 sebesar Rp13,53 triliun, meningkat 1,21% dari senilai Rp13,37 triliun di tahun sebelumnya. PUSRI berupaya mengendalikan beban pokok penjualan maupun beban operasional, namun demikian pada akhir tahun 2024 mencatatkan laba bersih tahun berjalan 2024 sebesar Rp1,06 triliun, turun 10,94% dari senilai Rp1,20 triliun di tahun sebelumnya.

Keberhasilan mencatatkan laba tersebut membuat Ekuitas PUSRI pada tahun 2024 meningkat 2,02% menjadi sebesar Rp18,65 triliun dari Rp18,28 triliun di tahun sebelumnya. Adapun Total Liabilitas PUSRI turun 22,66% menjadi sebesar Rp6,88 triliun dari Rp8,90 triliun. Sementara Total Aset pada tahun 2024 turun 6,05% menjadi senilai Rp25,53 triliun dari Rp27,18 triliun di tahun sebelumnya.

Pencapaian Target Operasional & Keuangan

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2024, kinerja Perusahaan tersebut menunjukkan hasil pengelolaan yang selaras dengan kondisi usaha 2024 yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Beberapa aspek melampaui target yang telah ditetapkan, namun sebagian menunjukkan pencapaian di bawah RKAP 2024, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Tabel Pencapaian Target RKAP 2024.

Table of 2024 RKAP Target Achievement

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Pupuk Fertilizer Production Tonnage	Ton	2.221.216	2.440.000	91,03
Tonase Produksi Non Pupuk Non-Fertilizer Production Tonnage	Ton	1.284.490	1.365.131	94,09
Tonase Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Tonnage	Ton	2.284.990	2.315.706	98,67
Tonase Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Tonnage	Ton	129.774	80.695	160,82
Nilai Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	12.610.604	12.886.732	97,86
Nilai Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	922.261	828.978	111,25
Pendapatan Revenue	Rp Juta Rp Million	13.532.865	13.715.709	98,67

363,384 tons, an increase of 10.7% from 328,349 tons in the previous year. Thus, the total fertilizer production for PUSRI in 2024 was 2,221,216 tons, a 5.0% decrease from 2,338,628 tons in the previous year. Meanwhile, the realization of PUSRI's ammonia production in 2024 was 1,284,490 tons, a decrease of 3.7% from 1,333,796 tons in 2023.

The total volume of PUSRI's fertilizer sales in 2024 amounted to 2,284,994 tons, consisting of 1,883,779 tons of urea fertilizer and 401,211 tons of NPK fertilizer, an increase of 4.4% from 2,188,553 tons in 2023. Meanwhile, ammonia sales in 2024 amounted to 129,774 tons, an increase of 22.8% from 105,721 tons in the previous year.

Increased sales volume of both fertilizers and ammonia enabled PUSRI to record total revenue of Rp13.53 trillion in 2024, up 1.21% from Rp13.37 trillion the previous year. PUSRI made efforts to control the cost of goods sold and operational expenses; however, by the end of 2024, the company recorded a net profit of Rp1.06 trillion, down 10.94% from Rp1.20 trillion in the prior year.

The successful recording of this profit led to an increase in PUSRI's equity by 2.02% in 2024, reaching Rp18.65 trillion from Rp18.28 trillion the previous year. Meanwhile, PUSRI's total liabilities decreased by 22.66% to Rp6.88 trillion from Rp8.90 trillion. Total assets in 2024 declined by 6.05%, amounting to Rp25.53 trillion compared to Rp27.18 trillion in the prior year.

Achievement of Operational & Financial Targets

Compared to the targets set in the 2024 Work Plan and Budget (RKAP), the company's performance demonstrates management results that align with the challenging and uncertain business conditions of 2024. Several aspects exceeded the targets, while some showed results below the 2024 RKAP, as outlined in the table below.

Tabel Pencapaian Target RKAP 2024.

Table of 2024 RKAP Target Achievement

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	Rp Juta Rp Million	1.068.535	687.986	155,31
Aset Assets	Rp Juta Rp Million	25.535.320	30.528.862	83,64
Liabilitas Liabilities	Rp Juta Rp Million	6.883.633	11.842.782	58,13
Ekuitas Equity	Rp Juta Rp Million	18.648.687	18.686.080	99,80



KENDALA DAN SOLUSI YANG DITEMPUH PERUSAHAAN

PUSRI menghadapi berbagai kendala di tahun 2024, yang membuat beberapa target RKAP 2024 tidak tercapai. Beberapa kendala dimaksud dan upaya yang dijalankan untuk mengatasinya, mencakup diantaranya:

1. Pada semester 1 2024, PUSRI mengalami kendala pasokan gas alam sebagai bahan baku utama produksi urea. Kendala ini berasal dari proses perbaikan pipa yang dilakukan oleh produsen pemasok gas, baik pada jaringan produksi maupun transportasi. Untuk mengatasinya Perusahaan mengatasi kendala tersebut dengan menandatangani pasokan gas alam dari produsen baru.
2. Terdapat kendala pada pemenuhan bahan baku impor khusus untuk pembuatan pupuk NPK akibat berkepanjangannya konflik Ukraina – Rusia, keduanya merupakan negara penghasil bahan baku pupuk NPK utama dunia. Kendala ini diatasi dengan mencari pemasok bahan baku dari negara lain.
3. Terdapat gangguan operasional fasilitas produksi, terutama pada aspek kelistrikan. Kendala ini diatasi dengan perbaikan dan peremajaan peralatan kritis.
4. Terdapat kendala dalam menyalurkan pupuk urea subsidi akibat adanya perubahan metode penyaluran sesuai keputusan Pergub sebagai tindak lanjut terbitnya Kepmentan No.249 yang terbit di bulan April 2024. Kendala ini diatasi melalui kemitraan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), selain penggunaan proses digitalisasi sistem e-tak untuk memastikan distribusi yang semakin transparan dan tepat sasaran.

Untuk memastikan pencapaian target-target kinerja penyaluran pupuk subsidi maupun target penjualan pupuk non subsidi, Pusri senantiasa menjalin kerja sama strategis dengan para *stakeholders*, seperti distributor, kios, pelanggan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun lembaga pemerintah (Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Perdagangan). Salah satu bentuk kerja sama strategis tersebut ialah melalui Program Makmur (“Mari Kita Majukan Usaha Rakyat”) Agrosolution.

CHALLENGES AND SOLUTIONS UNDERTAKEN BY THE COMPANY

PUSRI faced various challenges in 2024, which resulted in some targets in the 2024 RKAP not being achieved. The following are some of the challenges and the efforts made to overcome them:

1. In the first semester of 2024, PUSRI encountered difficulties in securing natural gas supply, which is a key raw material for urea production. This issue arose from pipeline repairs conducted by the gas suppliers, both in production and transportation networks. To address this, the company signed a new supply agreement with a different gas producer.
2. There was a challenge in securing imported raw materials for NPK fertilizer production due to the prolonged Ukraine–Russia conflict, as both countries are major global suppliers of key NPK raw materials. This challenge was overcome by sourcing raw materials from other countries.
3. Operational disruptions occurred in the production facilities, especially in the electrical systems. These issues were resolved through repairs and the rejuvenation of critical equipment.
4. There were challenges in distributing subsidized urea fertilizer due to changes in the distribution method following the issuance of Governor’s Regulation (Pergub) as a follow-up to the Ministry of Agriculture Decree No. 249, issued in April 2024. This issue was addressed through partnerships with Farmer Group Associations (Gapoktan), in addition to utilizing the e-ticketing digital system to ensure more transparent and targeted distribution.

To ensure the achievement of targets in subsidized fertilizer distribution and non-subsidized fertilizer sales, PUSRI continues to establish strategic collaborations with stakeholders, such as distributors, kiosks, domestic and international customers, and government agencies (Ministry of Agriculture, Regional Governments, and Ministry of Trade). One form of such strategic collaboration is through the Makmur Program (“Let’s Advance the People’s Businesses”), Agrosolution.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA

Perusahaan berkomitmen penuh untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan perkembangan terkini. Sehubungan dengan telah terbitnya "Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)" dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sejak Desember 2021, PUSRI mulai menjalankan program internalisasi dan melakukan telaahan mengenai keselarasan kelengkapan *soft structure* tata kelola yang telah tersedia dengan 4 pilar serta 8 prinsip GCG yang disampaikan dalam PUG-KI tersebut. Hal ini dilakukan, mengingat 5 prinsip GCG sebelumnya, yang disingkat dengan akronim TARIF, dijadikan rujukan penerapan praktik terbaik GCG, juga diadopsi dari pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG tersebut.

Hasil telaahan menunjukkan bahwa hampir seluruh *soft structure* GCG yang tersedia, tetap selaras dengan 8 prinsip GCG dalam PUGKI tersebut, namun terdapat beberapa hal spesifik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. PUSRI berkomitmen untuk melengkapi beberapa hal spesifik tersebut agar penerapan prinsip GCG di Perusahaan semakin selaras dengan 4 pilar dan deskripsi 8 prinsip GCG dalam PUGKI tersebut.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola, Perusahaan melakukan asesmen berkala terhadap kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Untuk tahun 2024, PUSRI tidak lagi melakukan *assessment* periodik tahunan menurut Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 seperti sebelumnya, sehubungan dengan terbitnya Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No.20589/A/MR/A21/ET/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012.

Namun demikian PUSRI tetap melakukan penilaian kualitas penerapan tata kelola merujuk pada kriteria *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan penilaian atas indeks persepsi penerapan tata kelola perusahaan dengan model penilaian yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). Untuk penilaian yang dilakukan di tahun 2024, PUSRI mendapatkan skor 86,24 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Selain CGPI, PUSRI melakukan asesmen GCG, *Risk Maturity Index*, *Indonesian Corporate Accountability Index* (ICORPAX) yang dilaksanakan oleh BPKP.

IMPROVEMENT IN THE QUALITY OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The company is fully committed to continuously improving the quality of governance principles in line with current developments. In relation to the issuance of the "General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI)" by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in December 2021, PUSRI began implementing an internalization program and conducting a review of the alignment of the available *soft structure* of governance with the 4 pillars and 8 principles of GCG outlined in the PUG-KI. This was done considering that the previous 5 GCG principles, abbreviated as TARIF, were used as a reference for implementing best GCG practices and were also adopted from the GCG guidelines published by the KNKG.

The results of the review showed that almost all of the available *soft structure* of GCG remained aligned with the 8 GCG principles in the PUG-KI, though there were specific aspects that required further elaboration. PUSRI is committed to addressing these specific aspects to ensure that the implementation of GCG principles in the company aligns more closely with the 4 pillars and the descriptions of the 8 GCG principles in the PUGKI.

Moreover, as part of its efforts to enhance governance quality, the company conducts periodic assessments of the implementation quality of GCG principles. For 2024, PUSRI no longer conducts the annual periodic assessment as stipulated by the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, due to the issuance of PT Pupuk Indonesia (Persero) Letter No. 20589/A/MR/A21/ET/2023 dated September 8, 2023, which revoked the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012.

However, PUSRI continues to evaluate the quality of governance implementation by referring to the *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) criteria. CGPI is an assessment of the perception index of corporate governance implementation using an evaluation model developed and carried out by The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). In the 2024 assessment, PUSRI received a score of 86.24 with the predicate of "Highly Trusted." In addition to CGPI, PUSRI also conducted GCG assessments, *Risk Maturity Index*, and the *Indonesian Corporate Accountability Index* (ICORPAX), which were carried out by BPKP.



Selain penilaian kualitas penerapan GCG berkala tersebut, PUSRI melakukan pemutakhiran visi-misi sebagai landasan bagi Insan Pusri yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi SK/DIR/454/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan menambahkan misi “penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan *compliance*; serta memberikan nilai tambah kepada stakeholders secara berkelanjutan”. PUSRI juga meningkatkan kualitas penerapan aspek *Governance, Risk and Compliance*, dengan menjalankan:



1. Mitigasi risiko *fraud* dan operasional dan kepatuhan yang dimonitoring secara berkala;
2. Sosialisasi dan kegiatan GRC bekerja sama dengan KPK RI dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi dan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), BPKP Sumsel untuk penerapan *Fraud Control Plan* (FCP), dan pendampingan proyek Pusri-IIIB.



3. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016; sertifikasi *Business Continuity Management System* (BCMS) SNI ISO 22301; dan penerapan pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301:2021.



PENGELOLAAN RISIKO DAN INISIATIF KEBERLANJUTAN, SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Sebagai pelaku usaha industri pupuk, PUSRI menyadari bahwa operasi dan bisnis yang dilakukan memiliki beberapa risiko, baik risiko lingkungan maupun risiko sosial, yang tentunya membutuhkan penanganan dan pendekatan strategis yang sistematis. Merespons semakin menguatnya isi keberlanjutan pada pengelolaan perusahaan, terlebih pada perusahaan yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dampak limbah maupun dampak terhadap sumber air, PUSRI telah menyiapkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ESG di dalam setiap lini bisnis yang dijalankan.



PUSRI telah membentuk Tim *Sustainability* yang bertugas mempersiapkan implementasi penerapan ESG di seluruh lini bisnis yang dijalankan. Penerapan ESG adalah menjalankan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan dan memitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. PUSRI juga mengadopsi dan memasukkan prinsip-prinsip serta agenda program keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, termasuk pengelolaan risiko sosial. PUSRI mengelola dan memitigasi risiko sosial yang berdampak terhadap beberapa pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. PUSRI juga telah menyusun dan menerapkan kebijakan operasional khusus untuk merespons isu keberlanjutan, antara lain:

1. Kebijakan *Environmental, Social & Governance* (ESG) tanggal 10 Oktober 2024.
2. Kebijakan *Community Development* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 01 Agustus 2024.

Aside from the periodic GCG implementation assessments, PUSRI also updated its vision and mission as a foundation for PUSRI employees, as outlined in the Board of Directors Decree No. SK/DIR/454/2024 dated October 3, 2024, by adding the mission of “implementing good corporate governance, risk management, and compliance; and providing sustainable value to stakeholders.” PUSRI also improved the quality of governance, risk, and compliance implementation by carrying out:

1. Mitigation of fraud and operational risks, and compliance, which are monitored periodically;
2. Socialization and GRC activities in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia in controlling gratification and International Anti-Corruption Day (HAKORDIA), BPKP South Sumatra for the implementation of the Fraud Control Plan (FCP), and support for the Pusri-IIIB project;
3. Certification of Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016; Business Continuity Management System (BCMS) SNI ISO 22301; and the implementation of the Compliance Management System guidelines SNI ISO 37301:2021.

RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY INITIATIVES, AS WELL AS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

As a player in the fertilizer industry, PUSRI acknowledges that its operations and business activities involve several risks, including environmental and social risks, which certainly require handling and a systematic strategic approach. In response to the increasing emphasis on sustainability in corporate management, particularly in companies that harm the environment, such as Greenhouse Gas (GHG) emissions, waste impact, and water source depletion, PUSRI has prepared to implement sustainable business practices aligned with ESG (Environmental, Social, and Governance) principles across every line of business it operates.

PUSRI has established a Sustainability Team tasked with preparing the implementation of ESG practices across all its business lines. The application of ESG involves conducting operations while considering and mitigating environmental, social, and governance risks. PUSRI has also adopted and incorporated sustainability principles and programs into its business strategy, including managing social risks. PUSRI manages and mitigates social risks impacting several stakeholders, including employees, customers, and the community. Additionally, PUSRI has developed and implemented operational policies to respond to sustainability issues, including:

1. Environmental, Social & Governance (ESG) Policy dated October 10, 2024.
2. Community Development Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dated August 1, 2024.

3. Kebijakan *Sustainable Development Goals* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 01 Agustus 2024.
4. Surat Keputusan Direksi Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/014/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pusri berfokus pada penerapan teknologi terkini yang mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup; penerapan tata kelola Perusahaan yang baik; serta memberikan nilai tambah kepada stakeholders secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, hal ini tertuang dalam strategi Pusri "*clean industry & sustainability*" dan menjalankan berbagai inisiatif strategis, meliputi:

1. Program Dekarbonisasi melalui *Turn Around* pabrik, *Co-Firing* Biomassa pada STG Boiler Batubara, PLTS, interkoneksi Listrik PLN, kendaraan Listrik, dan Sejuta Pohon;
2. Pengelolaan *Green Barrier* Perusahaan;
3. Program TJSL berbasis ESG, *SDGs* dan *circular economic*;
4. Pemenuhan aspek *Governance*, *Risk* dan *Compliance*, *zero fatality* dengan Sistem Manajemen terintegrasi.

Pusri menerapkan strategi keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan melaksanakan berbagai program yang berlandaskan *SDGs/TPB*. Masing-masing program pemberdayaan masyarakat di lingkungan selalu direncanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan mengedepankan isu keberlanjutan melalui FGD Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). PUSRI kemudian menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan, dimana Laporan Keberlanjutan tersebut memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan Perusahaan untuk dapat mencapai visi dan misinya, khususnya dalam mewujudkan agenda keberlanjutan.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2024, PUSRI belum memiliki Komite di bawah Direksi dalam perangkat tata kelolanya. Untuk itu, penyajian informasi tersebut belum dapat disampaikan dalam Laporan Direksi, Laporan Tahunan Perusahaan 2024.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

PUSRI terus berupaya meningkatkan kapasitas, integritas, dan kapabilitas internal karyawan sebagai salah satu aset paling berharga Perusahaan. Pengelolaan SDM yang tepat, disertai dengan organisasi yang responsif diyakini menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan PUSRI untuk mewujudkan kinerja positif yang berkelanjutan.

3. Sustainable Development Goals Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dated August 1, 2024.
4. Board of Directors Decree of Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/014/2025, dated January 14, 2025, regarding the Guidelines for Social and Environmental Responsibility of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pusri focuses on the implementation of the latest technologies that prioritize occupational safety, health, and environmental aspects; the application of good corporate governance; and providing sustainable added value to stakeholders. In its implementation, this is reflected in Pusri's strategy of "*clean industry & sustainability*," and it carries out various strategic initiatives, including:

1. Decarbonization program through plant turnaround, co-firing biomass in the Coal STG Boiler, solar power plants (PLTS), interconnection with PLN's electrical grid, electric vehicles, and One Million Trees initiative;
2. Management of the company's Green Barrier;
3. ESG-based Corporate Social Responsibility (CSR) program, aligned with *SDGs* and circular economy principles;
4. Fulfillment of Governance, Risk, and Compliance aspects, with a focus on zero fatalities through an integrated management system.

Pusri implements sustainability strategies in its operational activities by carrying out various programs based on the *SDGs* (Sustainable Development Goals). Each community empowerment program in the surrounding environment is always planned by directly involving the community and prioritizing sustainability issues through Focus Group Discussions (FGD) on the Strategic Plan (Renstra) and Work Plan (Renja). PUSRI then compiles and presents a Sustainability Report as an inseparable part of the Annual Report, where the Sustainability Report outlines the company's efforts to achieve its vision and mission, particularly in realizing the sustainability agenda.

Assessment of Committees Under the Board of Directors

As of the end of 2024, PUSRI has not yet established any Committees under the Board of Directors within its governance structure. Therefore, information regarding such Committees is not available to be presented in the Directors' Report of the 2024 Annual Report.

Sustainable Human Capital Development

PUSRI continuously strives to enhance the capacity, integrity, and internal capabilities of its employees, recognizing them as one of the Company's most valuable assets. Effective human capital management, coupled with a responsive organizational structure, is believed to be a critical factor in ensuring PUSRI's sustained positive performance.



Strategi pengelolaan dan peningkatan kompetensi SDM PUSRI dilakukan melalui model pengembangan komprehensif dengan pola: 70-20-10, yaitu 70% *experiential learning*, 20% *social learning*, dan 10% *formal learning*. Implementasi metode pembelajaran 70-20-10 tersebut dapat berupa pelatihan/sertifikasi, proses *mentoring/ coaching*, dan melalui mekanisme penugasan khusus, penugasan ke proyek-proyek, dan sebagainya. Perusahaan juga memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi dalam penerimaan tenaga kerja konstruksi. Sebagai wujud realisasi program pengembangan kompetensi, pada tahun 2024, PUSRI menyelenggarakan 6 jenis kelompok pelatihan dengan total 16.328 *Mandays*, didukung anggaran pengembangan SDM sebesar Rp25,46 miliar, naik 9,39% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,28 miliar.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Merujuk pada hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang tertuang di dalam Akta No. 03 tanggal 10 Juni 2024, pada tahun 2024, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi Perusahaan, namun terdapat perubahan nomenklatur Direksi perseroan dengan menambah jabatan Direktur Manajemen Risiko Perseroan. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, Saudara Saifullah Lasindrang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sebagai Direktur Manajemen Risiko Perusahaan disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan & Umum Perusahaan, sampai ditetapkan sebagai Direktur Manajemen Risiko Perusahaan yang definitif.

Sehingga susunan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Daconi Khotob : Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Filius Yuliandi : Direktur Operasi & Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
3. Saifullah Lasindrang : Direktur Keuangan & Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PUSRI's human capital management and competency development strategy is implemented through a comprehensive development model based on the 70-20-10 framework: 70% experiential learning, 20% social learning, and 10% formal learning. The implementation of this 70-20-10 learning model includes training/certification programs, mentoring/coaching processes, as well as special assignments and project-based tasks. The Company also prioritizes the hiring of local labor in accordance with the needs and qualifications required for construction work. As part of its competency development program, in 2024, PUSRI conducted six categories of training programs totaling 16,328 mandays, supported by a human capital development budget of Rp25.46 billion—an increase of 9.39% compared to the previous year's budget of Rp23.28 billion.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as stated in Deed No. 03 dated June 10, 2024, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors in 2024. However, there was a change in the nomenclature of the Company's Board of Directors with the addition of a new position, Director of Risk Management. In relation to this change in nomenclature, Mr. Saifullah Lasindrang was appointed to carry out the duties of the Director of Risk Management, with the same powers and authorities as a permanent Director of Risk Management, in addition to his role as Director of Finance & General Affairs, until a definitive Director of Risk Management is appointed.

Therefore, as of December 2024, the composition of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is as follows:

1. Daconi Khotob : President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Filius Yuliandi : Director of Operations & Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
3. Saifullah Lasindrang: Director of Finance & General Affairs, concurrently serving as Acting Director of Risk Management of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

Perekonomian global pada 2025 masih dihadapkan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh inflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Eropa, fragmentasi geo-ekonomi, perselisihan perdagangan yang semakin tajam dan tingginya nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut membuat makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF dalam *World Economic Outlook - Januari 2025*, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan mulai meningkat menjadi 3,3% atau sedikit meningkat dari prediksi capaian 3,2% di 2024. Mengiringi proyeksi naiknya pertumbuhan perekonomian permintaan urea diperkirakan kembali meningkat.

Namun demikian, pasokan urea Asia diproyeksikan sebesar ±114,80 juta ton, menurun dari tahun 2024 yang sebesar ±117,59 juta ton. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan urea Asia diproyeksikan sebesar ±122,55 juta ton, menurun dari tahun 2024 yang sebesar ±123,48 juta ton. Berdasarkan proyeksi pasokan dan permintaan tersebut, masih ada kekurangan pasokan yang mencapai ±7,75 juta ton.

Sementara itu, pertumbuhan perekonomian Indonesia diproyeksikan stagnan di angka 5,1%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Inflasi diperkirakan stabil di angka 2,5%. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki sasaran pembangunan berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% hingga 2029. Salah satu strategi yang dilakukan ialah mencakup peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam, dengan tantangan utama adalah produksi pangan yang mengalami stagnasi dan diwarnai dengan penurunan produksi padi.

Adapun upaya PUSRI dalam mendukung program ketahanan pangan ialah dengan melakukan penambahan pasokan gas bumi dari PHE Jambi Merang untuk operasional Perusahaan sebesar 11 Billion British Therm Unit Per Day (BBTUD) pada September 2024, meningkatkan efisiensi pabrik melalui program revitalisasi pabrik dan pengembangan pupuk spesifik tanaman untuk meningkatkan produksi pertanian. Pupuk spesifik tanaman dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi khusus dari setiap jenis tanaman, sehingga tanaman mendapat nutrisi yang tepat dan tidak berlebihan, hal ini tentunya dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kelebihan pupuk. Beberapa jenis pupuk spesifik PUSRI yang telah memasuki tahap komersialisasi adalah: NPK pupuk singkong 17-6-25, NPK Kopi 18-8-18, mikro majemuk dan pupuk hayati. PUSRI juga tengah melakukan riset pupuk NPK tebu, NPK lada dan biostimulan.

BUSINESS PROSPECT AND COMPANY PERFORMANCE PROJECTION FOR 2025

The global economy in 2025 continues to face heightened risks and uncertainties. This situation reflects the recovery of advanced economies, which remains overshadowed by inflation, ongoing geopolitical tensions in Europe, geo-economic fragmentation, escalating trade disputes, and the strong US dollar. These various challenges underscore the increasing importance of inflation control, fiscal consolidation, coordinated monetary and fiscal policy, and effective policy communication to strengthen macroeconomic stability and support economic growth. According to the *World Economic Outlook - January 2025* published by the IMF, global economic growth is projected to rise to 3.3% in 2025, slightly higher than the estimated 3.2% in 2024. Alongside this projected increase in economic growth, demand for urea is expected to rebound.

However, Asia's urea supply is projected at approximately 114.80 million tons, a decline from 117.59 million tons in 2024. Similarly, urea demand in Asia is projected to decrease to around 122.55 million tons, down from 123.48 million tons in 2024. Based on these supply and demand projections, there will remain a supply shortfall of approximately 7.75 million tons.

Meanwhile, Indonesia's economic growth in 2025 is projected to remain stable at 5.1%, which is higher than the global average. Inflation is expected to remain steady at 2.5%. In this context, the government continues to pursue sustainable development goals, targeting economic growth of 8% by 2029. One of the strategies involves improving productivity in the agricultural sector and developing resource-based industries. A key challenge in this area is stagnating food production, marked particularly by declining rice yields.

PUSRI's efforts to support the national food security program include securing an additional natural gas supply from PHE Jambi Merang for the Company's operations, amounting to 11 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) starting in September 2024, enhancing plant efficiency through plant revitalization programs, and developing crop-specific fertilizers to boost agricultural productivity. Crop-specific fertilizers are designed to meet the unique nutritional needs of each plant type, ensuring that crops receive the right amount of nutrients without excess, thereby minimizing environmental impact caused by over-fertilization. Several types of PUSRI's crop-specific fertilizers that have entered the commercialization phase include: NPK Cassava Fertilizer 17-6-25, NPK Coffee 18-8-18, compound micronutrients, and biofertilizers. PUSRI is also conducting research on NPK fertilizers for sugarcane and pepper, as well as biostimulants.

Mempertimbangkan proyeksi Pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang mencapai 5,1% dan kemudian secara bertahap diproyeksikan mencapai 8,0%, PUSRI optimis dan berkomitmen untuk berupaya keras meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. PUSRI telah menetapkan target yang realistis untuk peningkatan pendapatan dan laba bersih di tahun-tahun mendatang, didukung oleh berbagai inisiatif dan strategi yang direncanakan dengan matang, serta diselaraskan dengan target pencapaian ketahanan pangan dan proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional.



APRESIASI

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh jajaran Direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta mitra bisnis. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada Dewan Komisaris, komite-komite terkait, serta seluruh karyawan yang turut berkontribusi mendukung tumbuh kembang PUSRI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah serta masyarakat luas, atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan PUSRI. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak, PUSRI berkomitmen untuk dapat terus menjadi Perusahaan kebanggaan Indonesia.



Taking into account the Government's projection of Indonesia's economic growth reaching 5.1% in 2025 and gradually increasing to 8.0%, PUSRI remains optimistic and committed to striving for improved performance in the years ahead. The Company has set realistic targets for increasing revenue and net profit in the coming years, supported by carefully planned initiatives and strategies aligned with national food security goals and projected economic growth.

APPRECIATION

With gratitude to God Almighty, the entire Board of Directors extends its highest appreciation and sincere gratitude to the shareholders, stakeholders, and business partners. Special appreciation is also given to the Board of Commissioners, relevant committees, and all employees who have contributed to the growth and development of PUSRI. Our heartfelt gratitude also go to the government and the broader community for their continuous support in advancing PUSRI. With the unwavering support from all parties, PUSRI remains committed to continuing its journey as a company that brings pride to Indonesia.

Palembang, 23 Mei 2025

Palembang, May 23, 2025

Atas nama Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,

On behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,



Daconi Khotob

Direktur Utama

President Director



PUSRI
Keluarga Petani

DIPRODUKSI OLEH
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GR...
JALAN ...
NO ...
SURABAYA ...
T. 0800-100-800-71 1800-224

UREA

N (NITROGEN) : 46 %

PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GR...

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GR...
JALAN ...
NO ...
SURABAYA ...
T. 0800-100-800-71 1800-224

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Statement by the Members of the Board of Commissioners concerning
Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made here in all truthfulness.



Palembang, 23 Mei 2025
Palembang, May 23, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners




Siti Nurizka Puteri Jaya
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner




Ali Jamil
Komisaris
Commissioner



Fadjar Judisiawan
Komisaris
Commissioner



Bambang Supriyambodo
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Sally Salamah
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Statement by the Members of the Board of Directors concerning Responsibility for
the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2024 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made here in all truthfulness.

Palembang, 23 Mei 2025
Palembang, May 23, 2025

Direksi
Board of Directors



Daconi Khotob
Direktur Utama
President Director



Filius Yulianti
Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director



Saifullah Lasindrang
Direktur Keuangan & Umum merangkap
Plt. Direktur Manajemen Risiko
Director of Finance & General Affairs,
concurrently serving as Acting Director
of Risk Management

03



Profil Perusahaan

Company Profile



Dukung semangat Sinergi untuk Mewujudkan

PT Pupuk

yang tidak

nian, tetapi

depan

ke kadar simbol,

atif perusahaan

positif,

hirkan

menghadapi

an.



Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan
Company Name

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Nama Inisial
Initial Name

PUSRI



Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial
Date of Establishment and Commercial Operation

12 November 2010
November 12, 2010



Jumlah Karyawan
Number of Employees

1.790 Orang
People



Informasi Perubahan Nama
Name Change Information

Sejak berdiri, perusahaan belum pernah mengalami perubahan nama
Since its establishment, the company has never undergone a name change



Dasar Hukum Pembentukan
Legal Basis of Establishment

Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.

Deed Number 14 dated November 12, 2010, concerning the Establishment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, as amended several times, with the latest amendment made by Deed Number 05 dated December 4, 2024, concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, made before Lumassia, S.H., a Notary in Jakarta.



Kepemilikan Saham
Share Ownership

Negara Republik Indonesia sebanyak 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
The Republic of Indonesia: 1 Share of Series A Dwiwarna

PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 5.799.985 Lembar Saham Seri B
PT Pupuk Indonesia (Persero): 5,799,985 Shares of Series B Stock

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri sebanyak 14 Lembar Saham Seri B
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri: 14 Shares of Series B Stock

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp **15** Triliun
Rp **15** Trillion
Juta
Million

Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas 15.000.000 (lima belas juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
Rp 15,000,000,000,000 (fifteen trillion rupiah), divided into 15,000,000 (fifteen million) shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000 (one million rupiah)

Modal Ditempatkan
Issued Capital

Rp **5,8** Triliun
Rp **5,8** Trillion
Juta
Million

Rp5.800.000.000.000 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah) atau 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
Rp 5,800,000,000,000 (five trillion eight hundred billion rupiah) or 5,800,000 (five million eight hundred thousand) shares worth Rp 1,000,000 (one million rupiah) each



<p>Jaringan Usaha dan Produksi Business and Production Network</p>	<p>Pupuk dan Amonia Fertilizers and Ammonia</p>
<p>Entitas Anak dan Asosiasi Subsidiary and Associations</p>	<p>Entitas Anak / Subsidiary • PT Pusri Agro Lestari</p> <p>Entitas Asosiasi / Associate Entities • PT Pupuk Indonesia Logistik • PT Pupuk Indonesia Pangan • PT Pupuk Indonesia Utilitas • PT Puspertino</p>
<p>Kantor Pusat Head Office</p>	<p>Jl. Mayor Zen Palembang 30118, Indonesia Tel.: +62 711 712222/712111 Fax.: +62 711 712100/712020 E-mail: info@pusri.co.id</p>
<p>Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office</p>	<p>Wisma 101 Jl. Letjen S Parman Kav 101 Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta 11410, Indonesia</p>
<p>Kontak Perusahaan Company Contact</p>	<p>Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Tel.: +62 711 712222; +62 21 712111 Fax.: +62 711 712100; +62 21 712020 E-mail: sekper@pusri.co.id</p>
<p>Situs Web Website</p>	<p>www.pusri.co.id</p>
<p>Layanan Pengaduan Complaints Service</p>	<p>Hallo PUSRI 08001200011</p>



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief Company History

Pada kuartal akhir 2010 PUSRI didirikan, yang merupakan bagian dari mekanisme pemisahan tidak murni atau spin off. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang tetap disebut sebagai PUSRI, menjadi anak perusahaan dan beroperasi efektif sejak 1 Januari 2011 sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi perusahaan induk. Pendirian tersebut berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.

Setelah aksi korporasi tersebut, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kemudian secara resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebut juga sebagai PTPI sejak tanggal 5 April 2012. Setelah dilakukan *Spin Off*, PT Pupuk Indonesia (Persero) mulai melakukan restrukturisasi dengan memisahkan aktiva dan pasiva Perusahaan. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta Barat Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat. dan membawahi 10 anak usaha yang kemudian dikenal sebagai Pupuk Indonesia Grup.

Sebagai langkah menunjang kinerja operasional jangka panjang, Perusahaan membangun Pabrik Pusri-IIB. Tiang pancang (*groundbreaking*) pabrik diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Pusri- IIB merupakan pabrik yang dibangun pertama kali atas nama PUSRI dan didesain ramah lingkungan serta hemat energi. Pabrik tersebut mulai berproduksi secara *commissioning* pada akhir tahun 2016.

“

Riwayat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, selanjutnya disebut sebagai “PUSRI” atau “Perusahaan”, bermula dari pendirian Pabrik Urea pertama di Indonesia yang bernama PT Pupuk Sriwidjaja pada akhir tahun 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Entitas ini selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan PUSRI.

The history of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, hereinafter referred to as “PUSRI” or “the Company,” began with the establishment of the first Urea Factory in Indonesia named PT Pupuk Sriwidjaja at the end of 1959 in Palembang, South Sumatra. This entity is better known as PUSRI.



In the final quarter of 2010, PUSRI was established as part of a non-pure spin-off mechanism. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which continued to be called PUSRI, became a subsidiary and effectively began operations on January 1, 2011, while PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) became the parent company. This establishment was based on Deed Number 14 dated November 12, 2010, concerning the Establishment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which was made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, as amended several times, with the latest amendment made by Deed Number 05 dated December 4, 2024, concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which was made before Lumassia, S.H., a Notary in Jakarta.

After the corporate action, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) then officially changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero), which has also been known as PT Pupuk Indonesia (Persero) since April 5, 2012. After Spin Off, PTPI began to restructure by separating the company's assets and liabilities. PT Pupuk Indonesia (Persero) is domiciled in West Jakarta Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya, West Jakarta. and oversees 10 subsidiaries, which later became known as Pupuk Indonesia Group.

As a step to support long-term operational performance, the Company built the PUSRI IIB factory. The ground-breaking of the factory was inaugurated by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), which was then held by Dahlan Iskan. Pusri-IIB is a factory that was built first on behalf of PUSRI and is designed to be environmentally friendly and energy efficient. The plant began production on a commissioning basis at the end of 2016.



Sebelum spin off, PUSRI mendapatkan tugas pelaksanaan dan penunjang dari kebijakan serta program pemerintah di bidang industri pupuk dan industri kimia lainnya untuk membantu perekonomian dan pembangunan nasional. PUSRI memiliki 1 (satu) unit pabrik berkapasitas 100 ribu ton urea per tahun. Sepanjang tahun 1972 hingga 1994, Perusahaan mengalami perkembangan pesat yang tercermin dari dibangunnya beberapa pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai kapasitas terpasang 2,33 juta ton urea per tahun.

Tidak hanya melakukan pengembangan dari sisi produksi, Perusahaan juga mengubah orientasi dari produksi ke pasar. Hal ini dilakukan sebagai respons dari persaingan industri pupuk mulai ketat, yang ditandai dengan pembangunan pabrik-pabrik baru dan munculnya sejumlah pabrik pupuk lain di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, PUSRI mulai membangun jaringan distribusi dan pemasaran serta sarana dan prasarana pendukungnya hingga menjangkau segenap pelosok Nusantara. Terlebih, sejak tahun 1979, PUSRI mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan dan memasarkan pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia yang didukung dengan pembebasan tata niaga pupuk. Kemudian, pada tahun 2003, pemerintah membentuk rayonisasi wilayah pemasaran dan distribusi pupuk bersubsidi. Setelah dilakukan spin-off pada tahun 2011, PUSRI bertanggung jawab menangani produksi, distribusi, dan pemasaran pupuk dengan wilayah pemasaran Sumatera bagian Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2024 wilayah distribusi dan pemasaran pupuk urea subsidi PUSRI adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan wilayah distribusi dan pemasaran NPK subsidi PUSRI adalah Sumatera Selatan dan Lampung.

Before the spin-off, PUSRI was tasked with implementing and supporting government policies and programs in the fertilizer industry and other chemical industries to help the economy and national development. PUSRI has 1 (one) factory unit with a capacity of 100 thousand tons of urea per year. Throughout 1972–1994, the Company experienced rapid development, as reflected in the construction of several new factories to increase production capacity and reach an installed capacity of 2.33 million tons of urea per year.

Not only has the company developed its production side, but it has also shifted its orientation from production to the market. This change was made in response to the increasingly competitive fertilizer industry, marked by the establishment of new factories and the emergence of other fertilizer plants in Indonesia. In response to this situation, PUSRI began building its distribution and marketing network, along with the supporting infrastructure, to reach all corners of the archipelago. Moreover, since 1979, PUSRI has been tasked by the government to distribute and market subsidized fertilizers across Indonesia, supported by the elimination of fertilizer trade regulations. In 2003, the government established regional marketing and distribution for subsidized fertilizers. After the spin-off in 2011, PUSRI was responsible for the production, distribution, and marketing of fertilizers in the Southern Sumatra, Central Java, Special Region of Yogyakarta, Banten, and Jakarta areas. In 2024, the distribution and marketing area for subsidized urea fertilizer by PUSRI includes South Sumatra, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, part of East Java, Yogyakarta, and Bali, while the distribution and marketing area for subsidized NPK fertilizer by PUSRI includes South Sumatra and Lampung.

Sebagai pelopor perusahaan pupuk di Tanah Air, PUSRI menjadi pemasok tenaga-tenaga ahli perpupukan yang andal bagi perusahaan-perusahaan pupuk lain di Indonesia. PUSRI juga terus melakukan pembinaan sumber daya manusia agar dapat menangani pemeliharaan dan perbaikan pabrik pupuk secara mandiri. Pembinaan juga dilakukan sejalan dengan proses regenerasi sumber daya manusia sehingga PUSRI dapat melakukan alih teknologi secara berkesinambungan.

Sejalan dengan pertumbuhan industri pupuk, PUSRI mengembangkan kegiatan usaha dan produksinya agar bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan ialah teknologi proses produksi urea ACES 21 yang dikenal efisien dan hemat energi. Teknologi ini merupakan hasil riset dan pengembangan PUSRI bekerja sama dengan Toyo Engineering Corporation (TEC) dari Jepang.

Dengan diadopsinya ACES 21 yang merupakan sebuah inovasi dengan visi jauh ke depan, menjadikan PUSRI sebagai produsen pupuk yang memiliki *technical know-how* dalam pengelolaan dan pemeliharaan pabrik secara efisien. Kombinasi keunggulan di bidang produksi, distribusi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi menjadikan PUSRI sebagai perusahaan pupuk terkemuka yang diperhitungkan di industri pupuk nasional.

As a pioneer of fertilizer companies in the country, PUSRI is a reliable supplier of fertilizer experts for other fertilizer companies in Indonesia. PUSRI also continues to develop human resources to be able to handle the maintenance and repair of fertilizer plants independently. Development is also carried out in line with the process of human resource regeneration, so that PUSRI can transfer technology on an ongoing basis.

In line with the growth of the fertilizer industry, PUSRI develops its business and production activities to have high added value by utilizing technology. One of the technologies used is the ACES 21 urea production process technology, which is known to be efficient and energy efficient. This technology is the result of research and development by PUSRI in collaboration with Toyo Engineering Corporation (TEC) from Japan.

With the adoption of ACES 21, which is an innovation with a far-sighted vision, PUSRI is a fertilizer producer that has technical know-how in managing and maintaining plants efficiently. The combination of excellence in production, distribution, marketing, human resources, and technology makes PUSRI a leading fertilizer company to be reckoned with in the national fertilizer industry.



Jejak Langkah

Milestones



1959

PT Pupuk Sriwidjaja didirikan tanggal 24 Desember 1959
PT Pupuk Sriwidjaja was established on December 24, 1959

1961

14 Agustus 1961, Pembangunan pabrik Pusri-I
August 14, 1961, Construction of the Pusti-I plant

1963

Pusri-I mulai beroperasi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun
Pusri-I began operations with an installed capacity of 100,000 tons per year

1964

4 Juli 1964, pabrik Pusri-I diresmikan oleh Presiden Soekarno
July 4, 1964, the Pusri-I plant was inaugurated by President Soekarno

1974

8 Agustus 1974, Pabrik Pusri- II diresmikan oleh Presiden Soeharto, kapasitas 380.000 ton
August 8, 1974, the Pusri-II Plant was inaugurated by President Soeharto, with a capacity of 380,000 tons

1976

29 Desember 1976, Pabrik Pusri-III diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton
December 29, 1976, the Pusri-III Plant was inaugurated by President Soeharto, with a capacity of 570,000 tons

1998

Pemberlakuan Insentif Gas Domestik (Subsidi Harga Gas) Pembatasan lingkup penyaluran produsen hingga Lini II, Lini III dan Lini IV.
Implementation of Domestic Gas Incentives (Gas Price Subsidies) Limitation of producer distribution scope to Line II, Line III, and Line IV.

1998

1 Desember 1998, Penghapusan subsidi pupuk
December 1, 1998, Abolition of fertilizer subsidies.

1997

Pemerintah menetapkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagai induk perusahaan (*Holding Company*)
The government established PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) as the holding company.

1994

22 Desember 1994, Pabrik Pusri-IB diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton, PUSRI I dihentikan operasinya
December 22, 1994, the Pusri-IB Plant was inaugurated by President Soeharto. With a capacity of 570,000 tons, PUSRI I ceased operations.

1979

Penetapan PUSRI sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran seluruh jenis pupuk
Establishment of PUSRI as a company responsible for the procurement and distribution of all types of fertilizers.

1977

26 November, Pabrik Pusri-IV diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton
November 26, the Pusri-IV Plant was inaugurated by President Soeharto with a capacity of 570,000 tons

2003

Rayonisasi Pupuk
Rayonization of Fertilizers

2006

Perubahan pola subsidi harga gas menjadi subsidi harga jual ke petani
Change in gas price subsidy pattern to selling price subsidy to farmers.

2011

1 Januari, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai beroperasi
January 1, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang commenced operations

2013

Groundbreaking Pabrik Pusri-IIB
Pusri-IIB Plant Groundbreaking

2016

28 Januari 2016, Pabrik NPK Fusion I beroperasi, kapasitas 100.000 ton
January 28, 2016, the NPK Fusion I Plant commenced operations with a capacity of 100,000 tons.

2016

Pengoperasian Pabrik Pusri- IIB sebagai hasil revitalisasi Pusri-II
Operation of the Pusri-IIB Plant as a result of the revitalization of Pusri-II

2024

- **Pelaksanaan Proyek Pembangunan PUSRI III-B**
- **Pemerintah Indonesia menjadi salah satu Pemegang Saham PUSRI melalui kepemilikan 1 saham seri A Dwiwarna**
- **Implementation of the PUSRI III-B Development Project**
- **The Government of Indonesia becomes one of PUSRI's shareholders through the ownership of 1 Series A Dwiwarna share.**

2023

Groundbreaking Pabrik Pusri-III B
Pusri-III B Plant Groundbreaking

2022

Persiapan Proyek Pembangunan PUSRI III-B
Preparation of the PUSRI III-B Development Project

2021

Persiapan Proyek Pembangunan PUSRI III-B
Preparation of the PUSRI III-B Development Project

2020

28 Februari 2020, Pabrik PUSRI NPK Fusion II mulai beroperasi
February 28, 2020, the PUSRI NPK Fusion II Plant commenced operations.

2019

Performance Test Pabrik PUSRI NPK Fusion II
PUSRI NPK Fusion II Factory Performance Test

2018

Ground breaking Pabrik NPK Fusion II (2x100.000 ton)
Ground-breaking NPK Fusion II Plant (2x100,000 tons)

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values



VISI Vision

Menjadi
Produsen
Agrokimia
Unggul di Asia

To become
a Leading
Agrochemical
Producer in Asia

MISI Mission

- Menyediakan produk dan layanan yang berkualitas prima, inovatif, dan efisien sesuai kebutuhan pelanggan.
- Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup.
- Menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan *compliance*.
- Meningkatkan Keunggulan kompetensi SDM melalui nilai budaya AKHLAK.
- Memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* secara berkelanjutan.
- Providing high-quality, innovative, and efficient products and services that meet customer needs.
- Operating the business by implementing the latest technology with a focus on safety, occupational health, and environmental sustainability.
- Applying good corporate governance, risk management, and compliance practices.
- Enhancing human resources' competency excellence through the AKHLAK cultural values.
- Delivering sustainable value to stakeholders.

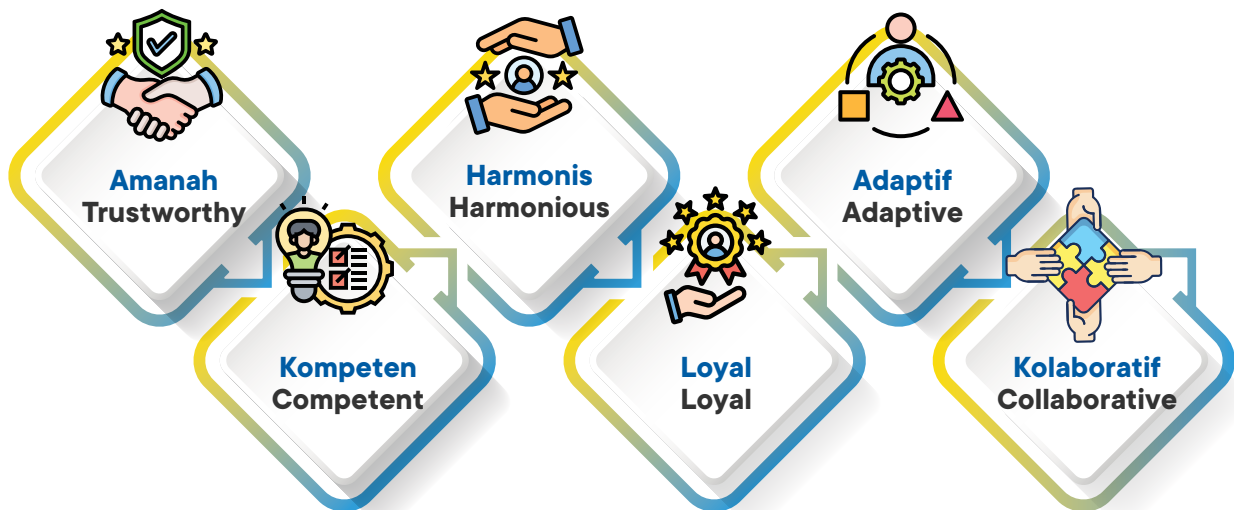


Visi dan Misi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/454/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan perubahan Visi dan Misi sebelumnya sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/391/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Dalam mengorkestrasi dan memfasilitasi fungsi pengelolaan Visi, Misi, *Core Values* dan Kompetensi Inti, PUSRI pada akhir tahun 2024 telah menetapkan Komite Visi Misi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/552/2024 tanggal 19 Desember 2024.

The Vision and Mission have been established through the Board of Directors Decree No. SK/DIR/454/2024 dated October 3, 2024, regarding the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which is an amendment to the previous Vision and Mission in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/391/2020 dated November 30, 2020, regarding the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. In orchestrating and facilitating the management functions of its Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies, PUSRI established a Vision and Mission Committee at the end of 2024 through Board of Directors Decree No. SK/DIR/552/2024 dated December 19, 2024.

NILAI UTAMA PERUSAHAAN

KEY VALUES OF THE COMPANY



Mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) SDM BUMN AKHLAK menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang dijadikan dasar pembentukan karakter SDM. PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN, yang merupakan entitas Induk PUSRI, telah menerbitkan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 08/A/ KK/S22/SE/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Implementasi Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*), Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK/DIR/391/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/454/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Berikut adalah uraian dari AKHLAK.

Referring to the Ministry of SOEs Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020, every State-Owned Enterprise (BUMN) is required to implement the core values of BUMN Human Resources, AKHLAK, as the Corporate Culture that serves as the foundation for shaping the character of its human resources. PT Pupuk Indonesia (Persero), as one of the BUMNs and the parent entity of PUSRI, has issued PT Pupuk Indonesia (Persero) Circular Letter No. 08/A/ KK/S22/SE/2020 dated August 4, 2020, regarding the Implementation of Core Values of State-Owned Enterprises Human Resources as Corporate Culture. The Board of Directors also issued Decree No. SK/DIR/391/2020 dated November 30, 2020, on the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which was later updated through the Board of Directors Decree No. SK/DIR/454/2024 dated October 3, 2024, on the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Below is an outline of AKHLAK.

SLOGAN

Tumbuh Bersama lebih Makmur

Growing Together for Greater Prosperity



AKHLAK

A

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan Perilaku:

1. Memenuhi janji dan komitmen;
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Trustworthy

Holding fast to the trust given
Code of Conduct:

1. Fulfill promises and commitments.
2. Responsible for tasks, decisions, and actions performed.
3. Adhering to moral and ethical values.

K

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan Perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT

Continue to learn and develop capabilities.
Code of Conduct:

1. Improve self-competence to respond to ever-changing challenges.
2. Help others learn.
3. Complete tasks of the highest quality

H

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan Perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

HARMONIOUS

Care for each other and respect differences.
Code of Conduct:

1. Respect everyone, regardless of background.
2. Like to help others.
3. Build a conducive work environment.

L

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Panduan Perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL

Dedicated to and prioritizing the interests of the nation and state
Code of Conduct:

1. Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the state.
2. Willing to sacrifice to achieve a greater goal.
3. Obey the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.

A

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Panduan Perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
3. Bertindak proaktif.

ADAPTIVE

Continue to innovate and be enthusiastic about driving or facing change.
Code of Conduct:

1. Quickly adjust to get better.
2. Constantly making improvements following technological developments.
3. Act proactively.

K

KOLABORATIF

Definisi: Membangun Kerjasama yang sinergis.
Panduan Perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE

Building synergistic cooperation
Code of Conduct:

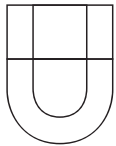
1. Provide opportunities for various parties to contribute.
2. Be open to working together to generate added value.
3. Drive the utilization of various resources for common goals.

Brand/Logo Perusahaan

Company's Brand/Logo



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



Lambang Pusri yang berbentuk huruf U melambangkan singkatan "Urea".
Lambang ini telah terdaftar sebagai merk Dagang (Paten) dengan nomor. 98659.
Pusri's logo, shaped like the letter U, symbolizes the abbreviation for "Urea".
This logo has been registered as a Trademark (Patent) with the number 98659.



Setangkai padi dengan jumlah butiran 24, melambangkan tanggal akta pendirian PT Pusri.
A stalk of rice with 24 grains, symbolizing the date of PT Pusri's deed of establishment.



Butiran-butiran urea berwarna putih sejumlah 12, melambangkan bulan Desember pendirian PT Pusri.
12 white urea grains, symbolizing the month of PT Pusri's establishment.



Setangkai kapas yang mekar dari kelopaknya. Butir kapas yang mekar berjumlah 5 buah Kelopak yang pecah berbentuk 9 retakan ini, melambangkan angka 59 sebagai tahun pendirian PT Pusri (1959).
A cotton branch blooming from its petals. There are 5 blooming cottons. The petals are split into 9 cracks, symbolizing the number 59 as the year of the PT Pusri's establishment (1959).



Perahu Kajang merupakan ciri khas kota Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi.
The Kajang Boat is a distinctive feature of Palembang city, located on the banks of the Musi River.



Kuncup teratai yang akan mekar, merupakan imajinasi pencipta akan prospek perusahaan dimasa datang.
A lotus bud that is about to bloom, represents the creator's imagination of the company's prospects in the future.



Komposisi warna lambang kuning dan biru benhur dengan dibatasi garis-garis hitam tipis (untuk lebih menjelaskan gambar) yang melambangkan keagungan, kebebasan cita-cita, serta kesuburan, ketenangan, dan ketabahan dalam mengejar dan mewujudkan cita-cita itu.

The color composition of the emblem, with yellow and benhur blue surrounded by thin black lines (to clarify the image), symbolizes grandeur, freedom of ideals, as well as fertility, tranquility, and resilience in pursuing and realizing those dreams.

Kegiatan Usaha

Business Activities



Mengacu pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan usaha Perusahaan adalah:

1. Industri Pupuk (KBLI 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20129, 20112, 20114, 20115, 20111, 20117, 20118, 20213, 20214)

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya.

2. Perdagangan (KBLI 46651, 46652, 47763, 47773, 47919, 47222, 46699, 46599, 46900, 46591)

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta kegiatan impor barang-barang yang antara lain berupa bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi, dan bahan kimia lainnya.

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business activities are as follows:

1. Fertilizer Industry (KBLI 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20129, 20112, 20114, 20115, 20111, 20117, 20118, 20213, 20214)

Processing certain raw materials into essential materials required for the production of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agroindustries, and other chemicals, as well as processing these materials into various types of fertilizers and other chemical products, along with their derivatives.

2. Trading (KBLI 46651, 46652, 47763, 47773, 47919, 47222, 46699, 46599, 46900, 46591)

Organizing distribution and trade activities, both domestically and internationally, related to the aforementioned products and other products related to fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agroindustries, and other chemicals, as well as the importation of goods, including raw materials, auxiliary materials, production equipment, and other chemicals.

3. Jasa (KBLI 01611, 01612, 01614, 01619)

Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain *engineering*, pengantongan (*bagging station*), konstruksi *managemen*, pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknik lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.



4. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (KBLI 71101, 71102, 71203, 71202, 71204, 71205, 71209, 741, 74909, 78421)

Melaksanakan kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa dilibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisher, produser dan lain-lain.



5. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (KBLI 78200, 77391, 68111, 55120, 93231, 82302, 73100, 68112)

Melakukan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.



6. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (KBLI 72105)

Melakukan usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.

7. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (KBLI 35111, 35112, 35113, 35301)

Melakukan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.

8. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi (KBLI 36001, 36002, 36003, 37011, 37012, 37021, 37022, 38120, 38220)

Melakukan usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif

3. Services (KBLI 01611, 01612, 01614, 01619)

Carrying out research studies, education, development, engineering design, bagging station operations, construction management, plant operations, repairs, maintenance, consulting (except legal consulting), and other technical services in the fertilizer, petrochemical, agrochemical, agroindustry, and other chemical industries, as well as services in the agricultural and plantation sectors.

4. Professional, Scientific, and Technical Activities (KBLI 71101, 71102, 71203, 71202, 71204, 71205, 71209, 741, 74909, 78421)

Conducting professional, scientific, and technical activities not classified elsewhere, such as agricultural consulting services (agronomists), environmental consulting, other technical consulting, and consulting activities aside from architecture, engineering, and management consulting. This also includes the salvage of valuable objects from sunken ships. This category also covers activities conducted by agents or representatives on behalf of individuals involved in film production, theater productions, or other entertainment events, sports performances, and the placement of books, plays (dramas, music, etc.), works of art, photography, etc., with publishers, producers, and others.

5. Leasing and Operating Lease without Option Rights (KBLI 78200, 77391, 68111, 55120, 93231, 82302, 73100, 68112)

Engaging in leasing and operating lease activities without option rights (*operational leasing*) for machines and industrial equipment without operators, which are generally used as capital goods by companies, such as textile machines, processing or metal and woodworking machines, printing machines, and electric welding machines. This also includes machine tools, equipment for producing measuring and testing instruments, and other scientific, commercial, and industrial machines.

6. Research and Development in Science (KBLI 72105)

Carrying out systematic research and development activities, organized by private entities, related to agricultural science, livestock, and forestry.

7. Electricity, Gas, Steam/Hot Water, and Air Conditioning Supply (KBLI 35111, 35112, 35113, 35301)

Engaging in the production of electricity through various types of energy sources. Producing and distributing steam and hot water for heating, power generation, and other uses, such as the production, collection, and distribution of steam and hot water for heating, energy, and other purposes, as well as the production and distribution of cold air.

8. Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities (KBLI 36001, 36002, 36003, 37011, 37012, 37021, 37022, 38120, 38220)

Engaging in the direct extraction of water from springs and groundwater, as well as the purification of surface water from water sources, and the direct distribution of drinking water from terminals through pipes or tank trucks (provided the tank trucks are under the same administrative management as the

dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/ lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran).

9. Pengangkutan dan pergudangan (KBLI 49300, 52101, 52222, 52221, 42914)

Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana perlengkapan guna melancarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

10. Industri pengolahan (KBLI 20211, 20212, 11051, 33111, 33119, 33121, 33122, 33141, 33149, 33190, 33200, 25120, 28113, 33131, 33142, 25920, 71206)

Melakukan kegiatan-kegiatan usaha di bidang industri pengolahan bahan aktif pemberantas hama dan formulasi, industri air kemasan, reparasi, instalasi/pemasangan, komponen/suku cadang, serta jasa industri lainnya.

11. Pertanian dan perkebunan (KBLI 01111, 01220, 01270, 01262, 01283, 01291, 01494, 02209)

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

12. Perikanan budidaya (KBLI 03221, 03226)

Menjalankan usaha dalam bidang budidaya perikanan mencakup kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya. Melakukan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar).

13. Informasi dan komunikasi (KBLI 61919, 43212, 61200)

Menjalankan kegiatan nilai tambah teleponi, pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna. Melakukan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

14. Konstruksi (KBLI 43212, 43905, 42923)

Melakukan kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, penyewaan alat konstruksi dengan operatornya dan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi dan industri lainnya.

drinking water company) for sale to consumers or clients, such as households, government institutions/organizations, social bodies, state-owned enterprises, private companies, including hotels, processing industries, and retail businesses.

Engaging in the collection and transportation of industrial wastewater or hazardous household wastewater through pipelines from wastewater disposal networks, wastewater collectors, and other transport facilities (such as waste/filth transport

9. Transportation and Warehousing (KBLI 49300, 52101, 52222, 52221, 42914)

Engaging in business activities related to transportation, expedition, warehousing, and other related services to facilitate and carry out these activities.

10. Manufacturing Industry (KBLI 20211, 20212, 11051, 33111, 33119, 33121, 33122, 33141, 33149, 33190, 33200, 25120, 28113, 33131, 33142, 25920, 71206)

Engaging in business activities in the field of manufacturing active substances for pest control and formulation, bottled water industry, repair, installation/assembly, components/ spare parts, and other industrial services.

11. Agriculture and Plantation (KBLI 01111, 01220, 01270, 01262, 01283, 01291, 01494, 02209)

Engaging in business activities in agriculture and plantations, as well as the processing industry of agricultural and plantation products.

12. Aquaculture (KBLI 03221, 03226)

Engaging in aquaculture, including the maintenance, growth, and harvesting of finfish, mollusks, crustaceans, frogs, and other freshwater biota. Also involved in breeding (production of broodstock, eggs, larvae, up to ready-to-stock seedlings).

13. Information and Communication (KBLI 61919, 43212, 61200)

Engaging in value-added telephony activities, installing telecommunications systems in buildings for both residential and non-residential purposes, such as antenna installation. Also engaged in the provision of networks supporting mobile telecommunications with cellular technology on land.

14. Construction (KBLI 43212, 43905, 42923)

Engaging in the installation of telecommunications systems in buildings, leasing construction equipment with operators, and the construction of civil works for chemical, petrochemical, pharmaceutical, and other industrial product processing facilities.

Kegiatan Usaha Dijalankan Pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Business Activities Conducted in the Fiscal Year

sThroughout 2024, the Company carried out business activities in accordance with the Company's Articles of Association.

Produk dan Jasa

Products and Services



“

Perusahaan membagi produk usahanya dalam 3 (tiga) kategori, yakni Produk Pupuk, Produk Non Pupuk, dan Produk Samping. Produk Pupuk terdiri dari Pupuk Urea dan Pupuk NPK. Produk Non Pupuk berupa Amonia. Ketiga jenis produk tersebut diproduksi oleh empat pabrik utama yakni Pusri-IB, IIB, III, dan IV. Serta Produk Samping yang merupakan hasil samping dari kegiatan produksi. Sementara yang termasuk dalam Produk Samping ialah CO₂ cair, CO₂ padat atau *Dry Ice* serta Nitrogen dan Oksigen. Selain itu, PUSRI juga memproduksi dan menjual produk-produk hasil inovasi antara lain pupuk hayati dan pupuk mikro.


The Company divides its business products into 3 (three) categories, namely Fertilizer Products, Non-Fertilizer Products and Side Products. Fertilizer products consist of Urea Fertilizer and NPK Fertilizer, Non-Fertilizer Products in the form of Ammonia. These three types of products are produced by four main factories, namely Pusri-IB, IIB, III and IV. As well as by-products which are by-products of production activities. Meanwhile, those included in by-products are liquid CO₂, solid CO₂ or Dry Ice as well as Nitrogen and Oxygen. Apart from that, PUSRI also produces and sells innovative products, including biological fertilizers and micro fertilizers.





PRODUK PUPUK DAN NON PUPUK


Pupuk Urea



PUSRI memproduksi pupuk urea yang merupakan salah satu jenis pupuk kimia yang terbentuk dari reaksi antara Amonia dengan karbon dioksida melalui proses kimia. Produk urea standar yang dihasilkan PUSRI berbentuk butiran curah (*urea prill*) berukuran 6-8 mesh dengan kandungan utama Nitrogen minimum 46%, Biuret maksimum 1% dan kandungan air maksimum 0,5%. Pupuk urea yang mengandung kadar Nitrogen tinggi sangat diperlukan tanaman sebagai penyedia zat hara. Urea bersubsidi berwarna pink dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia, sedangkan urea non subsidi yang berwarna putih dipasarkan dengan merek dagang Nitrea.




Pupuk NPK



Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara N (Nitrogen), P (Phospat), dan K (Kalium) yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. PUSRI Palembang memproduksi jenis NPK yakni NPK Fusion dengan keunggulan teknologi pabrik yang lebih fleksibel untuk dapat memproduksi berbagai macam formula pupuk NPK dengan biaya investasi yang rendah. Di sektor subsidi, Produk pupuk NPK produksi PUSRI adalah NPK Formula 15-10-12 sedangkan di sektor non subsidi formula yang diproduksi adalah formula 15-15-15 yang dipasarkan secara umum, dan formula lainnya sesuai dengan permintaan pasar.



Amonia



Amonia merupakan bahan baku utama dalam pembuatan pupuk urea. Untuk keperluan komersial, jenis Amonia yang diproduksi dan dijual adalah Amonia anhidrat yang tidak mengandung air. PUSRI memproduksi Amonia anhidrat dalam bentuk cair pada temperatur -330°C Amonia tersebut memiliki kandungan Nitrogen minimum 99,5%, kadar air maksimum 0,5%, dan kandungan minyak maksimum 5 ppm.



PRODUK SAMPING

CO₂ cair dan CO₂ Padat

PUSRI memproduksi CO₂ cair dan CO₂ padat atau es kering sejak tahun 1983, dengan kapasitas masing-masing sebanyak 55 ton CO₂ per hari dan 4,8 ton CO₂ padat per hari. Bahan baku produksi CO₂ cair dan es kering diperoleh dari kelebihan produksi CO₂ gas di Pabrik Amonia. Produk CO₂ cair umumnya digunakan oleh industri minuman dan *blanket*. Sementara itu, produk es kering yang dijual PUSRI memiliki manfaat dalam pengawetan hasil pertanian dan perikanan untuk mengurangi persentase kerusakan produk.

Oksigen (O₂) dan Nitrogen (N₂)

Oksigen dan Nitrogen dapat digunakan untuk keperluan pabrik, maupun dijual sebagai Oksigen cair, Oksigen gas, Nitrogen cair, dan Nitrogen gas. PUSRI memproduksi Oksigen dan Nitrogen dari udara menggunakan prinsip fraksinasi. Proses tersebut dilakukan dalam unit Air Separation di pabrik dengan teknologi dari *Process System Incorporated*.

FERTILIZER AND NON FERTILIZER PRODUCTS

Urea Fertilizer

PUSRI produces urea fertilizer, which is a type of chemical fertilizer formed from the reaction between Ammonia and carbon dioxide through a chemical process. The standard urea products produced by PUSRI are in the form of bulk granules (*urea prill*) measuring 6–8 mesh with a minimum nitrogen content of 46%, a maximum biuret content of 1%, and a maximum water content of 0.5%. Urea fertilizer containing high Nitrogen levels is needed by plants as a source of nutrients. Pink subsidized urea is marketed under the trademark Pupuk Indonesia, while white non subsidized urea is marketed under the trademark Nitrea.

NPK Fertilizers

NPK fertilizer is a compound fertilizer that contains the nutrients N (nitrogen), P (phosphate), and K (potassium), which are needed by plants. PUSRI Palembang produces a type of NPK, namely NPK Fusion, with the advantage of more flexible factory technology to be able to produce various kinds of NPK fertilizer formulas with low investment costs. In the subsidy sector, NPK fertilizer products produced by PUSRI are NPK formula 15-10-12, meanwhile in the non subsidy sector NPK that been sold widely across the country are NPK formula 15-15-15, and other various formulas as per market demand.

Ammonia

Ammonia is the main raw material in the manufacture of urea fertilizer. For commercial purposes, the type of ammonia produced and sold is anhydrous ammonia that does not contain water. PUSRI produces anhydrous ammonia in liquid form at -330°C. The Ammonia has a minimum nitrogen content of 99.5%, a maximum moisture content of 0.5%, and a maximum oil content of 5 ppm.

SIDE PRODUCTS

Liquid CO₂ and Solid CO₂

PUSRI has been producing liquid CO₂ and solid CO₂ or dry ice since 1983, with capacities of 55 tons of CO₂ per day and 4.8 tons of solid CO₂ per day, respectively. Raw materials for the production of liquid CO₂ and dry ice are obtained from the excess production of gaseous CO₂ at the ammonia plant. Liquid CO₂ products are commonly used by the beverage and blanket industries. Meanwhile, dry ice products sold by PUSRI have benefits in preserving agricultural and fishery products to reduce the percentage of product damage.

Oxygen (O₂) dan Nitrogen (N₂)

Oxygen and Nitrogen can be used for factory purposes or sold as liquid Oxygen, gaseous Oxygen, liquid Nitrogen, or gaseous Nitrogen. PUSRI produces Oxygen and Nitrogen from the air using the principle of fractionation. The process is carried out in the Air Separation unit at the factory with technology from *Process System Incorporated*.

Demineralized Water (Air Demineral)

Air Demineral (Air Demin) merupakan air yang hampir seluruh ion mineralnya telah dihilangkan melalui proses yang demineralisasi. Selain digunakan untuk keperluan pabrik, Air demineral sangat penting dalam berbagai aplikasi industri dan rumah sakit dimana dibutuhkan air dengan kemurnian tinggi.

Demineralized Water

Demineralized Water is water that has had almost all of its mineral ions removed through a demineralization process. In addition to its use in factory operations, demineralized water is crucial for various industrial applications and in hospitals where high purity water is required.



RAGAM MEREK DAN PRODUK PUSRI

VARIOUS PUSRI BRANDS AND PRODUCTS

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	<ul style="list-style-type: none"> • Urea Pupuk Indonesia Holding Company (untuk produk subsidi) • Nitrea Pupuk Indonesia (untuk produk non subsidi) • Urea Pupuk Indonesia Holding Company (for subsidized products) • Nitrea Pupuk Indonesia (for non-subsidized products) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandung 46% N. • Mendukung pertumbuhan yang optimal pada titik – titik apikal tanaman, seperti akar, batang dan daun (tanaman akan lebih tinggi, muncul tunas baru dan warna daun lebih hijau). • Memperkuat akar dan batang tanaman (menjadi lebih kokoh). • Meningkatkan kandungan protein dalam tanaman. • Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. • Contains 46% N. • Supports optimal growth at plant apical points, such as roots, stems, and leaves (the plant will be taller, new shoots will appear, and the leaf color will be greener). • Strengthens the roots and stems of the plant (becomes more kook). • Increases the protein content in plants. • Can be used for all types of plants.
	<ul style="list-style-type: none"> • Phonska Pupuk Indonesia Holding Company (untuk produk subsidi) • NPK 15-15-15 PUSRI (untuk produk non subsidi) • Phonska Pupuk Indonesia Holding Company (for subsidized products) • NPK 15-15-15 PUSRI (for non-subsidized products) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk majemuk dengan komposisi 15% N, 10% P₂O₅ dan 12% K₂O (untuk subsidi). • Pupuk majemuk dengan komposisi 15% N, 15% P₂O₅ dan 15% K₂O (untuk non subsidi). • Pemupukan lebih efektif. • Mempercepat pembentukan bunga dan pematangan biji. • Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. • Mengefisiensikan penggunaan pupuk. • Disarankan untuk tanaman hortikultura dan pangan. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah. • Compound fertilizers with a composition of 15% N, 10% P₂O₅, and 12% K₂O (for subsidies). • Compound fertilizers with a composition of 15% N, 15% P₂O₅, and 15% K₂O (for non-subsidized). • Fertilizing is more effective. • Accelerates flower formation and seed ripening. • Increases plant resistance to pests and diseases. • Efficient use of fertilizers. • It is recommended for horticultural and food crops. • The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis.

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
   	Phonska Plus	<ul style="list-style-type: none"> Pupuk majemuk dengan komposisi 16% N, 16% P₂O₅ dan 16% K₂O. Pemupukan lebih efektif. Mempercepat pembentukan bunga dan pematangan biji. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Mengefisiensikan penggunaan pupuk. Disarankan untuk tanaman buah, hias dan obat. Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	Phonska Plus	<ul style="list-style-type: none"> Compound fertilizer with a composition of 16% N, 16% P₂O₅, and 16% K₂O. Fertilization is more effective. Accelerates flower formation and seed ripening. Increases plant resistance to pests and diseases. Efficient use of fertilizer. It is recommended for fruity, ornamental, and medicinal crops. The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis
   	Pupuk Hayati Bioripah	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat perkecambahan pada biji Memperkuat vigor bibit tanaman muda Mendukung pertumbuhan bulu akar dan memperkuat perakaran. Meningkatkan ketersediaan hara N,P, K dalam tanah. Meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit. Mengandung bakteri bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Aplikasi mudah.
	Bioripah Biofertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Accelerates germination in seeds Strengthens the vigor of young plant seedlings Supports the growth of root feathers and strengthens rooting. Increase the availability of nutrients N, P, and K in the soil. Increases plant resistance to pests and diseases. Contains beneficial bacteria for soil and plants. Easy application.
 	Pupuk Mikro Nutremag	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pada hasil panen tanaman. Bersifat <i>slow release</i>. Cocok digunakan pada tanah masam. Dosis rendah. Aplikasi mudah. Pupuk Mikro Nutremag mengandung 17% Zinc (Zn), 3% Copper (Cu), 0,7% Boron (B), 0,6% Manganese (Mn), 0,01% Molybdenum (Mo)
	Microfertilizer Nutremag	<ul style="list-style-type: none"> Improve the quality of crop yields. Slow release. Suitable for use on acidic soils. Low dose. Easy application. Nutremag Micro Fertilizer contains 17% Zinc (Zn), 3% Copper (Cu), 0.7% Boron (B), 0.6% Manganese (Mn), 0.01% Molybdenum (Mo)

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	<p>NPK PUSRI Kopi TBM (Tanaman Belum Menghasilkan)</p> <p>NPK PUSRI Coffee TBM (Immature Plants)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandung 18% N, 8% P₂O₅ dan 8% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman kopi belum menghasilkan (usia 0-3 tahun). • Mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman kopi. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	<p>NPK PUSRI Kopi TM (Tanaman Menghasilkan)</p> <p>NPK PUSRI Coffee TM (Mature Plants)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandung 18% N, 8% P₂O₅ dan 18% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman kopi menghasilkan (usia >3 tahun). • Mendukung pertumbuhan generatif tanaman kopi (mampu meningkatkan produktivitas dan menyeragamkan petik merah). • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	<p>NPK PUSRI Singkong</p> <p>NPK PUSRI Cassava</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandung 17% N, 6% P₂O₅ dan 25% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman umbi umbian, khususnya singkong • Mendukung perkembangan dan kualitas umbi. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	NPK PUSRI 12-12-17-2	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk majemuk dengan komposisi 12%N, 12% P₂O₅, 17% K₂O, dan 2% MgO. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Digunakan untuk tanaman kelapa sawit TBM. • Memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, meningkatkan tinggi batang dan merangsang pembentukan akar dan daun.
	NPK PUSRI 13-6-27-4+0.65B	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk majemuk dengan komposisi 13%N, 6% P₂O₅, 27% K₂O, 4% MgO dan 0,65% B. • Digunakan untuk tanaman kelapa sawit TM. • Merangsang perkembangan generatif tanaman, memacu pembentukan bunga dan buah. • Meningkatkan rasio minyak kelapa sawit terhadap tandan • Mengefisienkan penggunaan pupuk serta memudahkan aplikasi pemupukan

SINGLE BRANDING PUPUK INDONESIA

UREA UREA



SINGLE BRANDING

Sebagai upaya memberikan kemudahan akses bagi pelanggan khususnya petani untuk mendapatkan produk retail di seluruh wilayah Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) memberlakukan *single branding* pada pupuk urea putih non subsidi menjadi Nitrea.

In an effort to provide easy access for customers, especially farmers, to obtain retail products throughout Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) implemented *single branding* on non-subsidized white urea fertilizer to become Nitrea.

PROFIL PRODUK NPK 16-16-16 NPK PRODUCT PROFILE 16-16-16



SINGLE BRANDING

Sebagai upaya penyeragaman produk dalam rangka memudahkan akses pelanggan khususnya petani untuk mendapatkan produk retail, PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan *single branding* pada pupuk NPK 16-16-16 menjadi pupuk NPK Phonska Plus.

As an effort to standardize products in order to facilitate access for customers, especially farmers, to obtain retail products, PT Pupuk Indonesia (Persero) carried out *single branding* on NPK 16-16-16 fertilizer to become NPK Phonska Plus fertilizer.

PRODUK INOVASI PUSRI

PUSRI Product Innovations



PROFIL PRODUK UREA COATING INHIBITOR

PRODUCT PROFILE UREA COATING INHIBITOR

Pupuk berwarna biru muda dan berbentuk prill yang dilapisi dengan urease inhibitor dan nitrification inhibitor yang dapat menghambat laju rilis pupuk urea hingga 30 hari. Pupuk ini mengandung 46% nitrogen dan inhibitor pelapis max 5000 ppm.

Pupuk ini diformulasikan khusus untuk komoditas perkebunan yang memiliki fase tumbuh yang relatif lebih lama seperti kelapa sawit. Pupuk ini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman perkebunan secara berkala dan terus menerus. Lapisan inhibitor membuat urea tidak mudah menguap dan tidak mudah *leaching*.

The light blue, prill-shaped fertilizer is coated with urease inhibitor and nitrification inhibitor which can inhibit the rate of urea fertilizer release for up to 30 days. This fertilizer contains 46% Nitrogen and a max coating inhibitor of 5000 ppm.

This fertilizer is specially formulated for plantation commodities that have a relatively longer growth phase, such as oil palm. This fertilizer is able to meet the nutritional needs of plantation plants periodically and continuously. The inhibitor layer makes the urea not volatile and not easy to leach.

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Pupuk Urea Coating Inhibitor ini mampu mengurangi emisi CO₂ di udara dan juga mampu meningkatkan efisiensi pemupukan karena pupuk bersifat lebih banyak terserap tanaman dan tidak terbuang ke lingkungan.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

This Urea Coating Inhibitor fertilizer is able to reduce CO₂ emissions in the air and is also able to increase fertilizer efficiency because the slow release fertilizer is more absorbed by plants and is not wasted into the environment.



PROFIL PRODUK UREA COATING HUMIC ACID PRODUCT PROFILE UREA COATING HUMIC ACID

Pupuk berwarna coklat kehitaman dan berbentuk prill ini dilapisi dengan *coating agent* yang ditambah humic acid berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah. Pupuk ini mengandung 46% nitrogen dan asam humat 4000 ppm.

Pupuk diciptakan dalam upaya pemenuhan nutrisi tanaman dengan prinsip pemupukan berimbang (pupuk organik dan pupuk anorganik) yang memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan tanah namun juga menjaga produktivitas tanaman tetap meningkat. Pupuk ini dikomersialkan untuk sektor urban farming, hortikultura, dan perkebunan.

This blackish brown, prill-shaped fertilizer is coated with a coating agent which is added with humic acid which functions to improve soil quality. This fertilizer contains 46% nitrogen and 4000 ppm humic acid.

This fertilizer was created in an effort to fulfill plant nutrition using the principle of balanced fertilization (organic fertilizer and inorganic fertilizer) which takes into account the importance of maintaining soil health but also keeping plant productivity increasing. This fertilizer is commercialized for the urban farming, horticulture and plantation sectors.

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Urea humat merupakan pupuk urea yang dilapisi oleh asam humat. Asam humat memiliki manfaat positif bagi kesehatan tanah diantaranya :

- Peningkatan kualitas tanah seperti agregasi dan struktur tanah,
- Penyediaan nutrisi bagi tanaman,
- Mampu meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air,
- Mampu merangsang pertumbuhan akar,
- Membantu memulihkan tanah yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk kimia berlebih.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

Urea Humate is a urea fertilizer coated with humic acid. Humic acid has positive benefits for soil health including:

- Improved soil quality such as soil aggregation and structure,
- Providing nutrients for plants,
- Able to increase the capacity of the soil to hold water,
- Able to stimulate root growth,
- Helps restore soil degraded due to excessive use of chemical fertilizers.



PROFIL PRODUK PUPUK PUSRI HYDRO

PUSRI HYDRO FERTILIZER PRODUCT PROFILE

- Merupakan formula nutrisi lengkap yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik di media air atau sistem hidroponik
- Memasok semua unsur penting baik unsur makro maupun mikro
- Larut seluruhnya dalam air

Pupuk PUSRI HYDRO merupakan pupuk majemuk yang cocok digunakan untuk budidaya tanaman hidroponik terutama untuk sayuran daun. Pupuk ini mengandung hara makro dan mikro esensial yang mudah larut dan diserap oleh tanaman seperti N total $\geq 10\%$, $P_2O_5 \geq 6\%$, $K_2O \geq 20\%$ dan dilengkapi hara mikro yaitu Cu, Zn, Mn, B, dan Fe. Pupuk berbentuk butiran padat berwarna merah, coklat kekuningan, dan putih ini dipasarkan dalam bentuk kemasan 1,9 kg.

Meningkatnya tren *urban farming* dan juga tantangan keterbatasan lahan membuat masyarakat mencari alternatif budidaya tanaman. Budidaya hidroponik merupakan salah satu kegiatan yang dapat dikembangkan. Masih terbatasnya ketersediaan pupuk paket lengkap khusus untuk hidroponik di pasar mendorong PUSRI untuk mengembangkan pupuk khusus hidroponik ini.

- It is a complete nutritional formula required by plants to grow well in water media or hydroponic systems.
- It supplies all essential elements, including both macro and micro nutrients.
- It fully dissolves in water.

PUSRI HYDRO fertilizer is a compound fertilizer that is suitable for cultivating hydroponic plants, especially leaf vegetables. This fertilizer contains essential macro and micro nutrients that are easily soluble and absorbed by plants such as total N $\geq 10\%$, $P_2O_5 \geq 6\%$, $K_2O \geq 20\%$ and is equipped with micro nutrients, namely Cu, Zn, Mn, B and Fe. This fertilizer in the form of solid granules in red, yellowish brown and white is marketed in 1.9 kg packages.

The increasing trend of urban farming and the challenge of limited land have made people look for alternative crop cultivation. Hydroponic cultivation is one activity that can be developed. The limited availability of complete fertilizer packages specifically for hydroponics on the market has encouraged PUSRI to develop this special hydroponic fertilizer.

PROFIL PRODUK PUPUK PUSRI DEF

PUSRI DEF FERTILIZER PRODUCT PROFILE

Diesel Exhaust Fluid (DEF), juga dikenal sebagai AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), adalah cairan larutan urea yang digunakan untuk mengurangi polusi udara dari mesin diesel yang terletak pada SCR (*Selective Catalytic Reduction*) sesuai dengan regulasi EURO 6. Larutan ini juga dikenal sebagai merek dagang AdBlue dari VDA Jerman.

DEF dikonsumsi sebanyak 3-7% dari penggunaan bahan bakar diesel. Produk ini juga tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari botol 1 liter. Di Eropa, regulasi EURO 6 telah diadopsi secara luas dengan produk yang dijual oleh perusahaan pupuk, seperti YARA, sementara di Indonesia kita baru mulai mengadopsi regulasi EURO 4.

KOMPOSISI:

Berdasarkan ISO 22241-2:2019, DEF terdiri dari 32,5% urea dan 67,5% larutan air demineralisasi. Di PUSRI, kami mengembangkan DEF menggunakan urea berkualitas rendah biuret dan air demineralisasi (untuk mencegah pertumbuhan bakteri mikro) dari fasilitas pabrik pemeliharaan. Dua komponen utama tersebut diproduksi oleh pabrik yang memangkas biaya dan memberi kami kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar lokal dalam hal harga. Selain itu, terdapat juga ISO 18611 (Agen reduksi NOx untuk Kelautan AUS 40) dan agen reduksi NOx untuk Industri DEF/AUS 50 (contoh: Boiler, dll).

Diesel Exhaust Fluid (DEF), also known as AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), is a urea solution used to reduce air pollution from diesel engines through SCR (Selective Catalytic Reduction) technology, in compliance with EURO 6 regulations. This solution is also marketed under the trademark AdBlue by the German VDA.

DEF is consumed at a rate of 3-7% of diesel fuel usage. The product is available in various packaging sizes, starting from 1 liter bottles. In Europe, the EURO 6 regulations have been widely adopted, with products sold by fertilizer companies such as YARA. In Indonesia, however, the adoption of EURO 4 regulations is just beginning.

COMPOSITION:

According to ISO 22241-2:2019, DEF consists of 32.5% urea and 67.5% demineralized water solution. At PUSRI, DEF development uses low-quality biuret urea and demineralized water (to prevent bacterial growth) sourced from maintenance plant facilities. These two main components are produced by the factory, reducing costs and providing us with an opportunity to become a local market leader in terms of price. Additionally, there is ISO 18611 (NOx Reduction Agent for Marine AUS 40) and NOx reduction agents for DEF/AUS 50 in industrial applications (e.g., Boilers, etc.).



Wilayah Operasi dan Pasar yang Dilayani

Areas of Operations and Markets Served



Cakupan wilayah operasi dan pasar yang dilayani oleh PUSRI terbagi menjadi domestik dan internasional melalui ekspor. Penjualan produk PUSRI di pasar domestik ditetapkan oleh entitas induk, PT Pupuk Indonesia (Persero). Rayon Subsidi Pupuk Urea mencakup Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kep Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Pada bulan Maret 2024, terdapat perubahan, Rayon Subsidi Pupuk Urea adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kep Bangka Belitung, Lampung, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan Rayon Subsidi Produk NPK mencakup wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Pada bulan Agustus 2024 Rayon Subsidi Produk NPK PUSRI mencakup wilayah Sumatera Selatan dan sebagian Lampung.

The coverage of PUSRI's operational areas and markets served is divided into domestic and international through exports. PUSRI's product sales in the domestic market are determined by its parent entity, PT Pupuk Indonesia (Persero). The Urea Fertilizer Subsidy Rayon covers South Sumatra, Bengkulu, Jambi, the Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, parts of East Java, DI Yogyakarta, and Bali. In March 2024, changes were made, and the Urea Fertilizer Subsidy Rayon now includes South Sumatra, Bengkulu, Jambi, the Bangka Belitung Islands, Lampung, parts of Central Java, parts of East Java, DI Yogyakarta, and Bali. Meanwhile, the NPK Fertilizer Subsidy Rayon covers South Sumatra and Lampung. In August 2024, the NPK Fertilizer Subsidy Rayon of PUSRI covers South Sumatra and parts of Lampung.

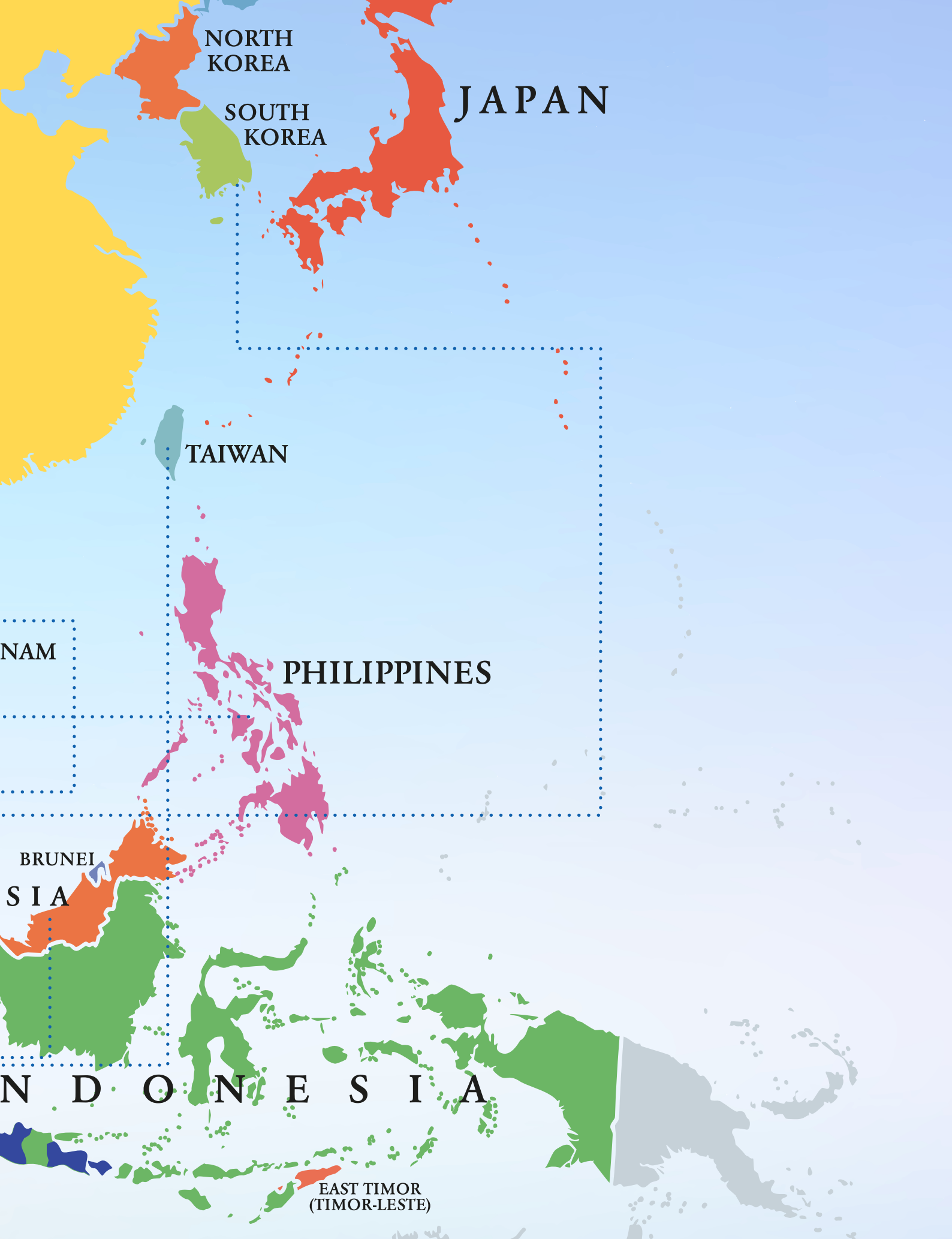
PT Pupuk Indonesia (Persero) dan kelompok usahanya, termasuk PUSRI mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Penugasan penyaluran Pupuk Bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO) ini mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
2. Prosedur Operasional Baku (POB) Penyaluran Pupuk PSO PT Pusri Palembang nomor SK/DIR/465/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tanggal 06 Juli 2022.
4. Permentan No. 1 tahun 2024 tentang perubahan atas permentan No. 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tanggal 05 april 2024.
5. Kepmentan No. 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2024.
6. Kepmentan No. 487/KPTS/SR.320/M/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023.
7. Kepmentan No. 286/KPTS/SR.320/M/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.
8. Perjanjian antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 026A/SP/DIR/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2024.
9. Kepmentan No. 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tanggal 22 April 2024 tentang penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2024.
10. Kepmentan No. 51/KPTS/RC.210/B/09/2024 tanggal 25 September 2024 tentang realokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2024.
11. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 07060/A/HM/C31/ET/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Rayonisasi Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
12. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 17676/A/HM/C0101/ET/2024 tanggal 26 Juni 2024 Perihal Rayonisasi Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
13. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 25134/A/HM/C0101/ET/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Rayonisasi Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its business groups, including the PUSRI, received an assignment from the Indonesian Government to be responsible for fulfilling the need for subsidized fertilizer throughout Indonesia. The assignment of distribution of Subsidized Fertilizer or Public Service Obligation (PSO) refers to:

1. Minister of Trade Regulation Number 04 of 2023 dated January 2, 2023 concerning Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector.
2. Standard Operational Procedures (POB) for Distribution of PSO Fertilizer PT Pusri Palembang number SK/DIR/465/2023 dated December 13, 2023.
3. Minister of Agriculture Regulation number 10 of 2022 concerning Procedures for Determining Allocations and Highest Retail Prices for Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector dated July 6, 2022.
4. Minister of Agriculture Regulation No. 1 of 2024 concerning the amendment to Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 on the procedures for determining allocation and maximum retail price (HET) of subsidized fertilizers for the agricultural sector, dated April 05, 2024.
5. Minister of Agriculture Decree No. 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 dated December 20, 2023 on the Allocation and Maximum Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the 2024 Fiscal Year.
6. Minister of Agriculture Decree No. 487/KPTS/SR.320/M/08/2023 dated August 22, 2023 on the Provisional Determination of Cost of Goods Sold of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the 2023 Fiscal Year.
7. Minister of Agriculture Decree No. 286/KPTS/SR.320/M/07/2024 dated July 15, 2024 on the Provisional Determination of Cost of Goods Sold of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the 2024 Fiscal Year.
8. Agreement between PT Pupuk Indonesia (Persero) and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 026A/SP/DIR/2024 dated January 12, 2024 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers in the 2024 Fiscal Year.
9. Minister of Agriculture Decree No. 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 dated April 22, 2024 on the Determination of Allocation and Maximum Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the 2024 Fiscal Year.
10. Minister of Agriculture Decree No. 51/KPTS/RC.210/B/09/2024 dated September 25, 2024 on the Reallocation of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the 2024 Fiscal Year.
11. Letter from PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 07060/A/HM/C31/ET/2024 dated March 14, 2024, Regarding the Rayonization of Subsidized Fertilizer Procurement for the Agricultural Sector.
12. Letter from PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 17676/A/HM/C0101/ET/2024 dated June 26, 2024, Regarding the Rayonization of Subsidized Fertilizer Procurement for the Agricultural Sector.
13. Letter from PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 25134/A/HM/C0101/ET/2024 dated August 14, 2024, Regarding the Rayonization of Subsidized Fertilizer Procurement for the Agricultural Sector.





Daftar Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang, serta Kantor Perwakilan

Address List of Subsidiaries, Branch Offices, and Representative Offices



KANTOR PUSAT DAN KANTOR PERWAKILAN HEADQUARTERS AND REPRESENTATIVE OFFICE

Kantor Pusat Pusri Pusri Headquarters

Jl. Mayor Zen Palembang 30118
E-mail: humas@pusri.co.id
Web: <http://www.pusri.co.id>
Tel.: 0711 – 712 111; 712 222
Fax: 0711 – 712 100; 712 020

Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office

Wisma 101
Jl. Letjen S Parman Kav 101
Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta
11410, Indonesia

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

PT Pusri Agro Lestari

Kawasan Industri
Karawang Sukses Makmur
Dusun Sukamaju, Desa Telukjambe
Kec. Telukjambe Timur
Kab. Karawang, Jawa Barat 41361
E-mail : pusriagrolestari@gmail.com
Web : www.pusriagro.co.id

ENTITAS ASOSIASI ASSOCIATED ENTITIES

PT Pupuk Indonesia Logistik

Gedung PUSRI 101, lantai 2 & 3
Jl. LetJend S. Parman Kav. 101
Jakarta Barat 11440
E-mail : info@pi-logistik.com
Tel. : 021 – 2263 1881; 2263 1882; 22631883
Web : www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Utilitas

Alamanda Tower Lt 26
Jl. T.B. Simatupang No 22-26
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
E-mail : info@pi-utilitas.com
Tel. : 021 – 2966 1630
Web : www.pi-utilitas.com

PT Pupuk Indonesia Pangan

Jl. Raya Rawamerta, Dusun Sukamanah
RT/RW 06/03, Desa Kutawargi
Rawamerta, Karawang Jawa Barat 41382
E-mail : info@pi-pangan.com
Web : www.pi-pangan.com


PT Puspेतindo

Desa Roomo
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Jawa Timur 61151, PO Box 172
Tel. : 031-99103048
E-mail : info@puspetindo.com
Web : www.puspetindo.com

Kantor Penjualan PUSRI Daerah (PPD) PUSRI Regional Sales Office (PPD)	
PPD Jambi	Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jambi 36122 E-mail : jambi@pusri.co.id Tel. : 0741 – 444 145 Fax. : 0741 – 441 46
PPD Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirdja No.93A Bengkulu 38225 E-mail : Bengkulu@pusri.co.id Tel. : 0736 – 213 97 Fax. : 0736 – 213 26
PPD Sumatera Selatan	Jl. Naskah Km 7 Palembang 30152 E-mail : ppdsmsel@pusri.co.id Tel. : 0711 – 417 530; 411 079; 417 876 Fax. : 0711 – 410 185
PPD Bangka Belitung	Jl. Raden Abdullah No. 188, RT/RW 004/001 Desa OpasIndah Kec. Taman Sari, Pangkal Pinang E-mail : ppd-babel@pusri.co.id Tel. : 0717 – 424 942 Fax. : 0717 – 433 448
PPD Lampung	Jl. Dr. Susilo No. 57 Bandar Lampung 35214 E-mail : lampung@pusri.co.id Tel. : 0721 – 262 166; 262 786 Fax. : 0721 – 250 444; 261 112
PPD D.I Yogyakarta	Jl. Arteri Ringroad Maguwoharjo Sleman Yogyakarta 55282 E-mail : yogya@pusri.co.id Tel. : 0274 – 489 063 Fax. : 0274 – 488 4376
PPD Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 208 Semarang 50132 E-mail : jateng@pusri.co.id Tel. : 024 – 354 7702; 356 5071; 351 8208; 354 5810 Fax. : 024 – 354 4150
PPD Jawa Timur	Jl. Genteng Kali No. 55-57 Surabaya 60275 E-mail : jatim@pusri.co.id Tel. : 031 – 532 2567; 532 2568; 534 0281 Fax. : 031 – 5346 240; 547 1608
PPD Bali	Jl. Bypass Ngurah Rai, Denpasar Bali E-mail : ppdbali@pusri.co.id
Unit Pengantongan Pupuk (UPP) TRL: Fertilizer Packaging Unit (UPP)	
UPP Cilacap	Jl. DI Panjaitan No. 58, Cilacap 53213 E-mail : upp_cilacap@pusri.co.id Tel. : 0282 – 534 505; 533 768 Fax. : 0282 – 536 327
UPP Meneng	Jl. Raya Situbondo, Lkr.Kp.Baru, Ketapang Kec. Kalipuro, Banyuwangi E-mail : upp_meneng@pusri.co.id Tel. : 0333 – 510011 Fax. : 0333 – 510014


Struktur Organisasi

Organizational Structure

Direktorat Utama
Main Directorate

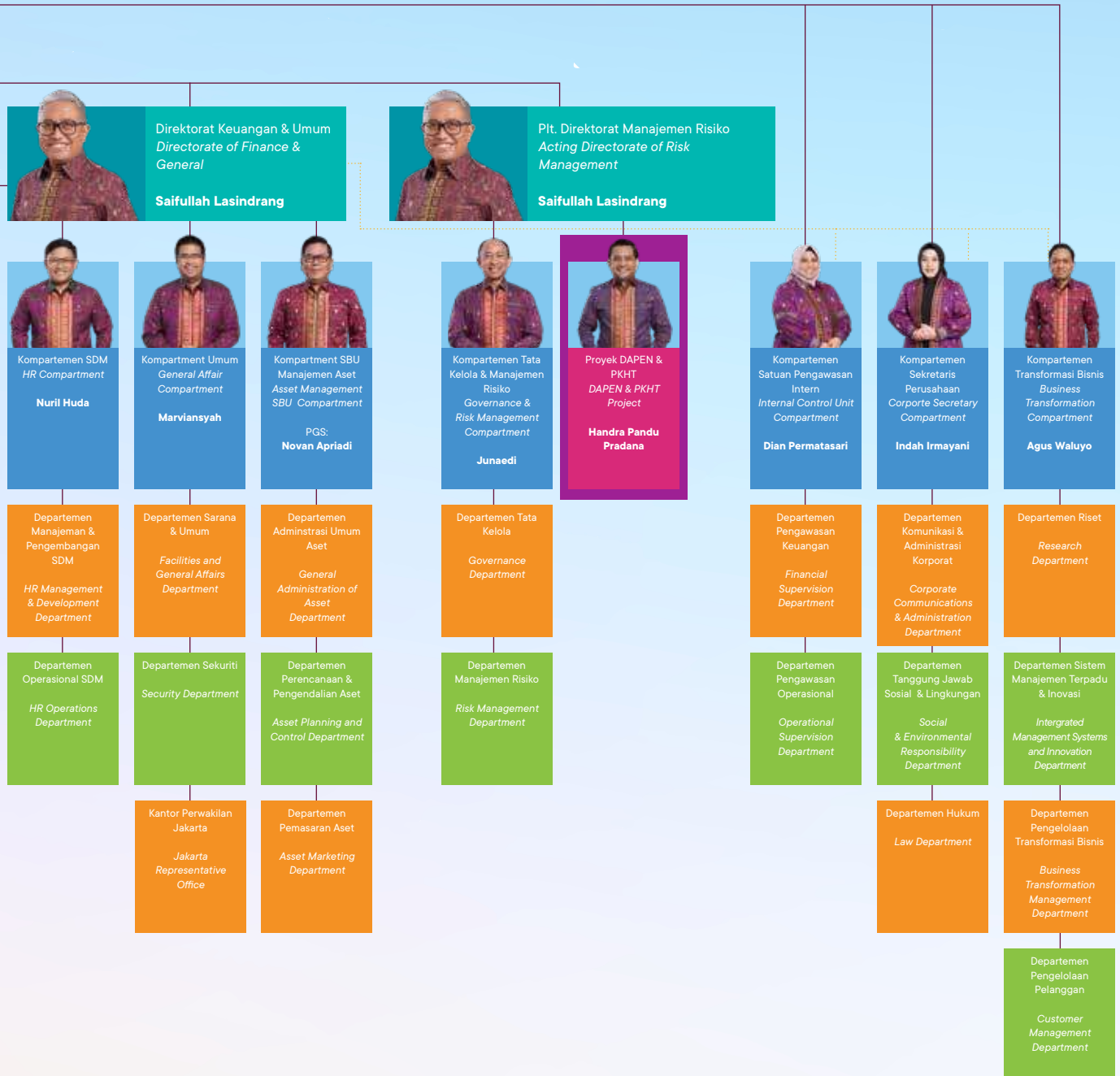
Daconi Khotob



Direktorat Operasi & Produksi
Directorate of Operation & Production

Filius Yulandi





Keterangan / Description

Garis putus-putus sebagai garis koordinasi
Dotted lines as coordination lines

■
Proyek
Project

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure




Negara Republik Indonesia

Saham Seri A Dwiwarna

0,00002%



PT Pupuk Indonesia (Persero)

Saham Seri B

99,99974%



Yayasan Kesejahteraan Karyawan PUSRI

Saham Seri B

0,00024%



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



PT Pusri Agro Lestari

51,00%



PT Pupuk Indonesia Logistik

44,23%



PT Pupuk Indonesia Pangan

10,00%



PT Pupuk Indonesia Utilitas

7,14%



PT PUSPETINDO

2,31%

— Pemegang Saham Utama Pengendali
Mayor Controlling Shareholder

— Pemegang Saham
Shareholder

— Entitas Anak
Subsidiary

— Entitas Asosiasi
Associate

Daftar Keanggotaan Asosiasi

List of Membership In Association

Pada tahun 2024, PUSRI bergabung dalam asosiasi berikut:

In 2024, PUSRI joined in the following associations:

No	No Asosiasi/Perhimpunan Association	Skala Scale	Posisi Position
1	Responsible Care Indonesia (RCI)	Nasional National	Pendiri Founder
2	International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Member
3	Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)	Nasional National	Anggota Member

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2024, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugasnya, Sdr. Setya Utama, Komisaris Utama mengundurkan diri dari jabatannya. Pada bulan Februari 2024, Sdr. K.H. Amiruddin Nahrawi meninggal dunia. Oleh karenanya melalui mekanisme RUPSLB, PUSRI kemudian mengangkat Sdri Siti Nurizka Puteri Jaya dan Sdr. Fadjar Judisiawan masing-masing sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS FOR THE CHANGES

In 2024, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners. Following the completion of his term, Mr. Setya Utama, the President Commissioner, resigned from his position. In February 2024, Mr. KH Amiruddin Nahrawi passed away. Consequently, through the mechanism of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), PUSRI appointed Ms. Siti Nurizka Puteri Jaya and Mr. Fadjar Judisiawan as the new President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner and Commissioner.




Siti Nurizka Puteri Jaya

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Serving as Independent
Commissioner

Kelahiran Birth	Usia Age
Jakarta, 6 Desember 1987 Jakarta, December 6, 1987	37 Tahun Years old
Kewarganegaraan Nationality	Domisili Domicile
Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen	Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	Periode Jabatan 10 Juni 2024-sekarang <i>Term of Office June 10, 2024 - present</i>
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 10 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 10, 2024, as formalized in Deed No. 10 dated June 10, 2024, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Magister Hukum, Universitas Gajah Mada (2009 - 2011) Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (2005 - 2009) Master of Law, Gajah Mada University (2009 - 2011) Bachelor of Law, Universitas Trisakti (2005 - 2009)
Keahlian Skill	Hukum <i>Law</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> PT Medco Power Indonesia PT Indonesia Comnets Plus di Divisi Hukum Direktur Pelaksana Kantor Hukum ABRAZQA (2015) Ketua Asosiasi Street Soccer Indonesia di Sumatera Selatan yang berafiliasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia (2015) Kepala Bagian Hukum II di Ikatan Keluarga Akademi Militer (IKAM) Jogja (2016) Dewan Pembina Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Sumatera Selatan 2022 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi 3 (Hukum, HAM & Keamanan) (2019 - 2024) PT Medco Power Indonesia PT Indonesia Comnets Plus, Legal Division Managing Director, ABRAZQA Law Office (2015) Chairperson of the Indonesian Street Soccer Association in South Sumatra, affiliated with the Ministry of Youth and Sports of Indonesia (2015) Head of Legal Division II, Military Academy Family Association (IKAM) Yogyakarta (2016) Board of Trustees, Forum for Communication of Sons and Daughters of Retired Military and Police Officers (FKPPI) South Sumatra 2022 Member, House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), Commission 3 (Law, Human Rights & Security) (2019 - 2024)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (10 Juni 2024-sekarang) President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (June 10, 2024 - present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada <i>None</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak Ada <i>None</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada <i>None</i>



Ali Jamil

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Birth
30 Agustus 1965
August 30, 1965

Usia | Age
59 Tahun 1 Years old

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile
Bogor

Periode Jabatan Term of Office	27 Desember 2021-sekarang December 27, 2021-present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Desember 2021 yang dikuatkan dengan Akta No. 13 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. <i>He first served as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated December 27, 2021, which was strengthened by Deed No. 13 dated December 27, 2021, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Doktoral, University of the Philippines at Los Banos (UPLB), Philippines (2006) Magister Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1995) Sarjana Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1989) Doctoral, University of the Philippines at Los Baños (UPLB), Philippines (2006) Master of Agriculture, Islamic University of North Sumatra, Medan (1995) Bachelor of Agriculture, Islamic University of North Sumatra, Medan (1989)
Keahlian Skill	Pertanian Agriculture
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (2024-sekarang) Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian di Kementerian Pertanian (2021 - sekarang) Kepala Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian (2019-2021) Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan (2018-2019) Direktur Serealia, Ditjen Tanaman Pangan (2017-2018) Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan (2016-2017) Secretary General of the Ministry of Agriculture (2024-present) Director General of Agricultural Facilities and Infrastructure at the Ministry of Agriculture (2021-present) Head of the Agricultural Quarantine Agency, Agricultural Quarantine Agency (2019-2021) Director of Various Nuts and Tubers, Directorate General of Food Crops (2018-2019) Director of Cereals, Directorate General of Food Crops (2017-2018) Director of Annual Crops and Refreshments, Directorate General of Plantations (2016-2017)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2021-sekarang) Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2021-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Secretary General of the Ministry of Agriculture
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Pertanian sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. <i>Has an affiliate relationship with the major/controlling shareholder through a position in the Ministry of Agriculture as the final owner entity of the company. This concurrent position is part of the managerial representation in the Pupuk Indonesia Group. In addition, it has no affiliation with other Boards of Commissioners or Boards of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Prahoro Yulijanto Nurtjahyo

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Birth

Kediri, 30 Juli 1970
July 30, 1970

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

54 Tahun | Years old

Domisili | Domicile

Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	14 April 2020–13 April 2025 <i>April 14, 2020–April 13, 2025</i>
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 20 April 2020 yang dikuatkan dengan Akta No. 01 tanggal 20 April 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. <i>He first served as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated April 20, 2020, which was strengthened by Deed No. 01 dated April 20, 2020, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor Ocean Engineering Texas A&M University, College Station (2003) • Magister Ocean Engineering Texas A&M University, College Station (1998) • Sarjana Matematika Terapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1994) • Doctor of Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station (2003) • Master of Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station (1998) • Bachelor of Applied Mathematics Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1994)
Keahlian Skill	Engineering <i>Engineering</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Principal Lead Engineer SBM Offshore, Inc., Houston, Texas (2006-2013) • VP Operations and Managing Consultant Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013- 2016) • Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Struktur Kementerian ESDM (2017-2020) • Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM (2020 - sekarang) • Principal Lead Engineer SBM Offshore, Inc., Houston, Texas (2006-2013) • VP Operations and Managing Consultant Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013- 2016) • Expert Staff for Investment and Structure Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2017-2020) • Head of the HR Development Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2020 - present)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2017- 2020) • Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020-sekarang) • Commissioners of PT Pertamina Hulu Energi (2017-2020) • Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM <i>Head of the Human Resources Development Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. <i>Has an affiliate relationship with the Main/Controlling Shareholder through his position at the Ministry of Energy and Mineral Resources as the final owner of the Company. This dual position is part of the managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Apart from that, it has no affiliation with other Board of Commissioners or Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada <i>None</i>



Bambang Supriyambodo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kelahiran | Birth

Klaten, 12 Januari 1961
Klaten, January 12, 1961

Usia | Age

64 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Yogyakarta

Periode Jabatan Term of Office	25 Agustus 2020-sekarang August 25, 2020-present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. <i>He first served as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 25, 2020, which was strengthened by Deed No. 08 dated August 25, 2020, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987) Bachelor of Forestry from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987)
Keahlian Skill	Kehutanan Forestry
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Manager Rehabilitasi Hutan dan Nursery PT ITCIKU (1999-2004) Ka Unit Pengelolaan Hutan PT ITCIKU (2004- 2005) Manajer Pengurusan Hutan PT ITCIKU (2005- 2006) Direktur Operasional PT ITCIKU (2008- 2009) Komisaris Utama PT Rakabu Sejahtera (2016-sekarang) Forest and Nursery Rehabilitation Manager PT ITCIKU (1999-2004) Head of PT ITCIKU Forest Management Unit (2004-2005) PT ITCIKU Forest Management Manager (2005-2006) Operational Director PT ITCIKU (2008-2009) President Commissioner of PT Rakabu Sejahtera (2016-present)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2016- 2020) Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020-sekarang) Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020) Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Utama PT Rakabu Sejahtera President Commissioner of PT Rakabu Sejahtera
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Sally Salamah

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Birth
Cirebon, 20 April 1967
Cirebon, April 20, 1967

Usia | Age
58 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile
Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	12 Juni 2021-sekarang June 12, 2021-present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 12 Juni 2021 yang dikuatkan dengan Akta No.11 tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta <i>She first served as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 12, 2021, which was strengthened by Deed No. 11 dated June 12, 2021, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none">• Doktor Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung (2020)• Magister di Bidang Akuntansi Profesional, University of Queensland (1999)• Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994)• Doctor of Development Economics, Universitas Lampung (2020)• Master in Professional Accounting, University of Queensland (1999)• Bachelor of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994)
Keahlian Skill	Akuntansi, Audit Keuangan dan Manajemen Risiko Accounting, Financial Audit, and Risk Management
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2016-2018)• Kepala Biro Keuangan BPKP (2018-2019)• Kepala Biro SDM BPKP (2019)• Kepala Pusdiklatwas BPKP (2019-2020)• Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2020-sekarang)• Head of BPKP Lampung Province Representative (2016-2018)• Head of Finance Bureau of BPKP (2018-2019)• Head of HR Bureau, BPKP (2019)• Head of Pusdiklatwas BPKP (2019-2020)• Deputy Head of BPKP for State Accountant (2020-present)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2021-sekarang)• Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2021-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan <i>Deputy Head of BPKP for State Accountant, Financial and Development Supervision Agency</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada BPKP. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. <i>Has an affiliate relationship with the major/controlling shareholder through a position at BPKP. This concurrent position is part of the managerial representation in the Pupuk Indonesia Group. In addition, it has no affiliation with other Boards of Commissioners or Boards of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Fadjar Judisiawan

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Birth

Surabaya, 9 Mei 1971
Surabaya, May 9, 1971

Usia | Age

54 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	4 Maret 2024-sekarang March 4, 2024-present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 4 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated March 4, 2024 as formalized in Deed No. 02 dated March 4, 2024, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none">Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2002)Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1995)Master of Management, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2002)Bachelor of Industrial Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) (1995)
Keahlian Skill	Proses Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan Business Processes and Corporate Governance
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">Asisten Deputi Industri Kesehatan, KBUMN (Januari 2024 – sekarang)Direktur Keuangan & Umum, PT Patra Jasa (Maret 2022 – Januari 2024)Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Mei 2018 – Desember 2021)Direktur Keuangan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Sept 2017 – Mei 2018)Plt Deputi Konstruksi, Sarana dan Prasarana, KBUMN (Juni 2017 – Sept 2017)Asisten Deputi Konstruksi, Sarana dan Prasarana 1, KBUMN (2015-2017)Asisten Deputi Usaha Jasa Konstruksi, KBUMN (2014-2015)Asisten Deputi Riset & Penyajian Informasi, KBUMN (2013-2014)Assistant Deputy for Health Industry, Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) (January 2024 – present)Finance & General Director, PT Patra Jasa (March 2022 – January 2024)Business Strategy & Business Development Director, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (May 2018 – December 2021)Finance Director, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (September 2017 – May 2018)Acting Deputy for Construction, Facilities, and Infrastructure, Ministry of State-Owned Enterprises (June 2017 – September 2017)Assistant Deputy for Construction, Facilities, and Infrastructure 1, Ministry of State-Owned Enterprises (2015 – 2017)Assistant Deputy for Construction Services, Ministry of State-Owned Enterprises (2014 – 2015)Assistant Deputy for Research & Information Presentation, Ministry of State-Owned Enterprises (2013 – 2014)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (4 Maret 2024 - sekarang) Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (March 4, 2024 – present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none">Asisten Deputi Industri Kesehatan - Kementerian BUMNAssistant Deputy for Health Industry - Ministry of State-Owned Enterprises (SOE)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None

Profil Direksi

Board of Directors Profile

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2024 tidak ada perubahan komposisi Anggota Direksi namun terdapat perubahan nomenklatur Direksi perseroan dengan menambah jabatan Direktur Manajemen Risiko, dengan Sdr. Saifullah Lasindrang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS AND REASON FOR CHANGE

In 2024, there were no changes in the composition of the Board of Directors; however, the Company made a nomenclature adjustment by introducing the position of Director of Risk Management. Mr. Saifullah Lasindrang was appointed to assume the role of Director of Risk Management.




Daconi Khotob

Direktur Utama
President Director

<p>Kelahiran Birth Tanjung Karang, 14 Juni 1971 Tanjung Karang, June 14, 1971</p> <p>Kewarganegaraan Nationality Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen</p>	<p>Usia Age 53 Tahun Years old</p> <p>Domisili Domicile Bandar Lampung</p>
--	--

Periode Jabatan Term of Office	13 November 2023 - sekarang November 13, 2023 - present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 13 November 2023 yang dikuatkan dengan Akta No. 03 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta <i>He first served as President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the decision Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 13, 2023 which was confirmed by Deed No. 03 dated November 13, 2023 made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • S3 Manajemen SDM di Universitas Brawijaya pada tahun 2023. • Magister Manajemen dari Universitas Andalas pada tahun 2009. • Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. • S3 in HR Management from Universitas Brawijaya in 2023. • Master's degree in Management from Universitas Andalas in 2009 • Bachelor's degree in Chemical Engineering from Universitas Gadjah Mada in 1995
Keahlian Skill	Manajemen Produksi dan Strategis <i>Production and Strategic Management</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Semen Baturaja (2022-2023) • Direktur Produksi & Pengembangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017-2022) • Komisaris PT Baturaja Multi Usaha (2019) • Direktur Utama PT Kabau Sirah SP (Klub Sepak Bola) (2014) • GM Produksi V PT Semen Padang (2016-2017) • GM Produksi IV PT Semen Padang (2015-2016) • GM Produksi II / III PT Semen Padang (2013-2015) • <i>President Director of PT Semen Baturaja (2022-2023)</i> • <i>Director of Production & Development PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017-2022)</i> • <i>Commissioner of PT Baturaja Multi Usaha (2019)</i> • <i>President Director of PT Kabau Sirah SP (Football Club) (2014)</i> • <i>GM Production V PT Semen Padang (2016-2017)</i> • <i>GM Production IV PT Semen Padang (2015-2016)</i> • <i>GM Production II / III PT Semen Padang (2013-2015)</i>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan <i>Does not have concurrent positions</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Kepemilikan Saham PUSRI Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen <i>PUSRI Shared Ownership Does not exist. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a shareholding program by management.</i>



Filius Yuliandi

Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director

Kelahiran | Birth

Palembang, 5 Juli 1967
Palembang, July 5, 1967

Usia | Age

57 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Palembang, Sumatera Selatan

Periode Jabatan Term of Office	13 Januari 2021–Sekarang January 13, 2021–Present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Kedua kali menjabat sebagai Direktur Operasi & Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terhitung sejak tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tentang Pengangkatan Anggota Direksi yang dikuatkan dengan Akta No. 5 tanggal 25 Februari 2021 <i>The second time served as Director of Operations & Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang from January 13, 2021 based on the Decree of the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang regarding the appointment of members of the Board of Directors which was strengthened by Deed No. 5 dated February 25, 2021</i>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen Universitas Tridinanti, Palembang, tahun 2004 • Insinyur Teknik Elektro Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 1992 • Master of Management Tridinanti University, Palembang (2004) • Electrical Engineering Engineer Universitas Sriwijaya, Palembang (1992)
Keahlian Skill	Manajemen Strategis dan Logistik <i>Strategic Management and Logistics</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasi PUSRI (2016–2020) • General Manager Pemeliharaan PUSRI (2013–2016) • Departemen Produksi PUSRI sejak 1993 • Director of Operations of PUSRI (2016–2020) • General Manager of Maintenance at PUSRI (2013–2016) • PUSRI Production Department since 1993
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>None. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a shareholding program by management.</i>



Saifullah Lasindrang

Direktur Keuangan & Umum
merangkap Direktur Manajemen Risiko
Finance & General Director concurrently serving as Risk
Management Director

Kelahiran | Birth
 Usia | Age
 Domisili | Domicile

Gorontalo, 13 Februari 1965
 58 Tahun | Years old
 Gorontalo, February 13, 1965
 Palembang, Sumatera Selatan

Kewarganegaraan | Nationality
 Warga Negara Indonesia
 Indonesian Citizen

Periode Jabatan Term of Office	<ul style="list-style-type: none"> Jabatan 25 Agustus 2020-sekarang (sebagai Direktur Keuangan & Umum) Jabatan 10 Juni 2024-sekarang (sebagai Plt. Direktur Manajemen Risiko) Position held since August 25, 2020 – present (as Director of Finance & General Affairs) Position held since June 10, 2024 – present (as Interim Director of Risk Management)
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pupuk Indonesia Grup tanggal 25 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan Akta No. 9 Tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Menjabat sebagai Plt. Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 03 Tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p><i>He first served as Finance and General Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Pupuk Indonesia Group dated August 25, 2020, which was strengthened by Deed No. 9 dated August 25, 2020, made before Lumassia, SH, Notary in Jakarta.</i></p> <p><i>Appointed as Interim Director of Risk Management at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) decision dated June 10, 2024, confirmed by Deed No. 03 dated June 10, 2024, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i></p>
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Magister Ilmu dan Teknik Material Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2001 Sarjana Teknik Tambang (Metalurgi) Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1990 Master of Material Science and Engineering, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2001) Bachelor of Mining Engineering (Metallurgy), Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990)
Keahlian Skill	Manajemen Keuangan, Risiko dan Strategis <i>Financial, Risk, and Strategic Management</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> General Manager SDM PT Pupuk Kaltim (2018) Ka. Pembelajaran dan Management PT Pupuk Indonesia (2019) Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (2019- 2020) General Manager HR, PT Pupuk Kaltim (2018) Head of Learning and Management of PT Pupuk Indonesia (2019) Corporate Secretary of PT Pupuk Indonesia (2019-2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Plt Direktur Manajemen Risiko PT PUSRI Palembang <i>Acting Director of Risk Management, PT PUSRI Palembang</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen <i>None. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a shareholding program by management.</i>

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Governance and Risk Management

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris diatur melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/201/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Pedoman Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) pasal 6.1a terkait pendidikan dan pelatihan untuk bukan karyawan. Sementara itu, untuk pelatihan dan pendidikan bagi SVP Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan diatur melalui Surat Keputusan yang sama, pasal 3 tentang pendidikan untuk *talent* dan karyawan.

The policy on education and training of the Board of Directors and the Board of Commissioners is regulated through the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/201/2015 dated June 4, 2015 concerning Guidelines for the Competency-Based Training System, Article 6.1a, related to education and training for non-employees. Meanwhile, training and education for the Head of Internal Control Unit and Corporate Secretary are regulated through the same Decree, Article 3, concerning education for talents and employees.

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan SDM, termasuk dalam hal penganggaran dan pembiayaan. Seluruh karyawan, tidak terkecuali Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, SVP Satuan Pengawasan Intern, dan karyawan lainnya yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan, wajib menyusun laporan dan membagi pengetahuan kepada insan PUSRI lainnya.

The Company is fully responsible for education and training in HR management, including in terms of budgeting and financing. All employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners, Corporate Secretary, Head of Internal Control Unit, and other employees who receive education and training facilities, are required to compile reports and share knowledge with other PUSRI personnel.

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPETENCY DEVELOPMENT LIST OF THE BOARD OF DIRECTORS'

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama President Commissioner	Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
			Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	8 Oktober 2024 October 8, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
			Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
2	Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Workshop & Seminar Implementasi GRC & ESG mendukung Business Judgement Rule UU BUMN & UU PT Workshop & Seminar on the Implementation of GRC & ESG Supporting the Business Judgment Rule under the State-Owned Enterprises Law and the Company Law	19 September 2024 September 19, 2024	FMR BUMN
			Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
3	Sally Salamah	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
4	Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
			Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
5	Ali Jamil	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
6	Prahero Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Risk Beyond 2024 Sustainable Symphony: Echoes of Change	04 Desember 2024 December 4, 2024	ERM Academy & IRMAPA

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

COMPETENCY DEVELOPMENT

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Daconi Khotob	Direktur Utama President Director	Pelatihan Training	Workshop Kementerian BUMN : Strategic Approach to Risk Management Towards SOE's Business Sustainability	19 Januari 2024 January 19, 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN)
			Pelatihan Training	The 2nd International & Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Indonesia CCS Center
			Pelatihan Training	Sharing Session Bersama Panglima Kodam II / Sriwijaya Sharing Session with Commander of Kodam II/Sriwijaya	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Panglima Kodam II / Sriwijaya Commander of Kodam II/Sriwijaya
			Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
2	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko Director of Finance and General Affairs concurrently Acting Director of Risk Management	Pelatihan Training	Workshop Kementerian BUMN : Strategic Approach to Risk Management Towards SOE's Business Sustainability Workshop by the Ministry of SOEs: Strategic Approach to Risk Management Towards SOE's Business Sustainability	19 Januari 2024 January 19, 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN)
			Pelatihan Training	Inhouse Training Persiapan Ujian CAFB Akuntansi Keuangan In-house Training on CAFB Financial Accounting Exam Preparation	19 Februari 2024 February 19, 2024	PPA FEB Universitas Indonesia PPA FEB University of Indonesia
			Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
			Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Certificate in Accounting Finance and Business (CAFB) Certification Examination for Certificate in Accounting, Finance, and Business (CAFB)	14 Mei 2024 May 14, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
			Pelatihan Training	Post Test Penyetaraan Kompetensi Jalur Direktur PPCA Competency Equalization Post-Test for PPCA Director Pathway	31 Juli 2024 July 31, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
			Pelatihan Training	Program Peningkatan Profesionalisme CA CA Professionalism Enhancement Program	22 Juli 2024 July 22, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
			Pelatihan Training	The 2nd International & Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Indonesia CCS Center
			Pelatihan Training	Sharing Session Bersama Panglima Kodam II / Sriwidjaya Sharing Session with Commander of Kodam II/Sriwijaya	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Panglima Kodam II / Sriwijaya Commander of Kodam II/Sriwijaya
			Pelatihan Training	GRC Summit "Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"	22 Agustus 2024 August 22, 2024	CRMS INDONESIA
			Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Level Profesional Audit Asuransi Professional Level Assurance Audit Certification Exam	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia			

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
3	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
			Pelatihan Training	The 2nd International & Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024	31 juli 2024 July 31, 2024	Indonesia CCS Center
			Pelatihan Training	Sharing Session Bersama Panglima Kodam II / Sriwidjaya Sharing Session with Commander of Kodam II/Sriwidjaya	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Panglima Kodam II / Sriwidjaya Commander of Kodam II/Sriwidjaya

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Neneng Suryatiningsih	Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners' Secretary	Pelatihan Training	Risk Beyond 2024 Sustainable Symphony: Echoes of Change	06 Desember 2024 December 6, 2024	ERM Academy & IRMAPA

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Bambang Supriyambodo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Member	Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
				Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
2	Sally Salamah	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Member	Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
3	Fadjar Judisiawan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Member	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Ceritification CREL (Certified Risk Executive Leader)	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) RI
				Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training	28 Oktober 2024 October 28, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
4	Ali Jamil	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Member	Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CREL (Certified Risk Executive Leader) Graduation of Competent Participants in the CREL (Certified Risk Executive Leader) Training & Certification	12 Februari 2024 February 12, 2024	PT Olah Karsa Inovasi Indonesia
5	Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Member	Pelatihan Training	Risk Beyond 2024 Sustainable Symphony: Echoes of Change	04 Desember 2024 December 04, 2024	ERM Academy & IRMAPA

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR THE AUDIT COMMITTEE

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Bagas Putranto	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan Training	Risk Beyond 2024 Sustainable Symphony: Echoes of Change	04 Desember 2024 December 4, 2024	ERM Academy & IRMAPA

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO (IMR)

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE (IMR)

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
2	Ida Zuraida	Anggota Komite IMR IMR Committee Member	Pelatihan Training	Workshop & Seminar Implementasi GRC & ESG mendukung Business Judgement Rule UU BUMN & UU PT Workshop & Seminar on the Implementation of GRC & ESG in Support of the Business Judgment Rule under the SOE Law and Company Law	19 September 2024 September 19, 2024	FMR BUMN
3	Sara Dewi	Anggota Komite IMR IMR Committee Member	Pelatihan Training	Risk Beyond 2024 Sustainable Symphony: Echoes of Change	04 Desember 2024 December 4, 2024	ERM Academy & IRMAPA

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN, SPI DAN TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT UNIT, AND GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

No.	Jabatan Department	Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Training Title
1	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Training	Workshop Mentoring BOD-1 & BOD-2
		Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training
		Pelatihan Training	Pelatihan Etika & Keprotokolan Ethics & Protocol Training
		Pelatihan Training	IFA Strategic Forum 2024
		Pelatihan Training	Risk & Governance Summit 2024 dengan tema Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision Risk & Governance Summit 2024 with the theme Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision
		Pelatihan Training	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi E-Learning on Enhancing Understanding of Gratification

No.	Jabatan Department	Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Training Title
2	SVP SPI SVP Internal Audit Unit (SPI)	Pelatihan Training	Wisuda Peserta Kompeten pada Pelatihan & Sertifikasi CIAE Graduation Ceremony for Competent Participants in the CIAE Training & Certification Program
		Pelatihan Training	Workshop Raker RKAP 2024 2024 RKAP Work Meeting Workshop
		Pelatihan Training	Inhouse Training Persiapan Ujian CAFB Akuntansi Keuangan In-house Training for CAFB Financial Accounting Exam Preparation
		Pelatihan Training	Inhouse Training Persiapan Ujian CAFB Akuntansi Keuangan In-house Training for CAFB Financial Accounting Exam Preparation
		Pelatihan Training	Penandatanganan PKS dan Sharing Session Bersama Panglima Kodam II / Sriwidjaya MoU Signing and Sharing Session with the Commander of Kodam II/Sriwijaya
		Pelatihan Training	Asian Confederation of Institutes of Internal Auditor (ACIIA) Regional Conference
		Pelatihan Training	Pelatihan ESG Fundamentals ESG Fundamentals Training
		Pelatihan Training	Workshop Mentoring BOD-1 & BOD-2
		Pelatihan Training	Sosialisasi / Workshop Polis Asuransi Industrial All Risk (IAR), Contractor's Plant and Machinery (CPM), dan Hull & Machinery (H&M) Socialization / Workshop on Industrial All Risk (IAR), Contractor's Plant and Machinery (CPM), and Hull & Machinery (H&M) Insurance Policies
		Pelatihan Training	IFA Strategic Forum 2024
3	SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko SVP Governance & Risk Management	Pelatihan Training	Risk & Governance Summit 2024 dengan tema Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision Risk & Governance Summit 2024 with the theme Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision
		Pelatihan Training	Pelatihan Evaluasi Environmental, Social, And Governance ESG Evaluation Training
		Pelatihan Training	Workshop Raker RKAP 2024 2024 RKAP Work Meeting Workshop
		Pelatihan Training	Pelatihan Workshop Polis Asuransi Tahun 2024 2024 Insurance Policy Workshop
		Pelatihan Training	Penandatanganan PKS dan Sharing Session Bersama Panglima Kodam II / Sriwidjaya MoU Signing and Sharing Session with the Commander of Kodam II/Sriwijaya
		Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit "Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"
		Pelatihan Training	Workshop & Seminar Implementasi GRC & ESG : Mendukung Business Judgement Rule UU BUMN & UU PT Workshop & Seminar on GRC & ESG Implementation: Supporting the Business Judgement Rule under SOE and Company Law
		Pelatihan Training	Workshop Mentoring BOD-1 & BOD-2
		Pelatihan Training	Environment, Social, and Governance (ESG) Awareness & Training
		Pelatihan Training	Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelola Risiko Kepatuhan dan Fraud Workshop on Enhancing Compliance and Fraud Risk Management Competence
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Pelatihan & Sertifikasi Certification in Audit Cimmittee Practices (CACP) Training & Certification in Certification in Audit Committee Practices (CACP)
		Pelatihan Training	Risk & Governance Summit 2024 dengan tema Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision Risk & Governance Summit 2024 with the theme Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision
		Pelatihan Training	Master Class : Risk Governance & Risk Beyond
		Sertifikasi Certification	Dual Certification QCRO-CERG

Pejabat Senior Vice President dan Senior Project Manager

Senior Vice President and Senior Project Manager

SVP Pemeliharaan
SVP Maintenance

PGS:
Agung Prasetyanto Nugroho

SVP SDM
SVP HR

Nuril Huda

SVP Teknologi & K3LH
SVP Technology & K3LH

Alfa Widyawan

SVP Umum
SVP General Affair

Marviansyah

SPM Pusri IIIB
Pusri IIIB SPM

Sholikin



SVP Administrasi Keuangan
SVP Financial Administration

Dia Imada

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Indah Irmayani

SVP Satuan Pengawasan Intern
SVP Internal Control Unit

Dian Permatasari

SVP Rantai Pasok
SVP Supply Chain

Lantip Catur Kadiyanto

SVP Teknik & Pengembangan
SVP Engineering and Development

Andri Wibawa Syarip

SVP Tata Kelola & Manajemen
Risiko

SVP Governance & Risk
Management

Junaedi

SVP Transformasi Bisnis
SVP Business Transformation

Agus Waluyo

SPM DAPEN & PKHT
DAPEN & PKHT SPM

Handra Pandu Pradana



SVP SBU Manajemen Aset
SVP Asset Management SBU

PGS:
Novan Apriadi

SVP Jaminan Kualitas Pemeliharaan
SVP Maintenance Quality Assurance

Dikdik Yuliana

SVP Operasi
SVP Operating

Andri Azmi

Profil Karyawan

Employee Profile



Hingga 31 Desember 2024, jumlah karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tercatat sebanyak 1.790 karyawan, turun 1% dari jumlah tahun lalu yang sebanyak 1.803 karyawan.

As of December 31, 2024, the number of employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was recorded at 1,790 employees, down 1% from last year, which was 1,803 employees.



Adapun rincian demografi karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, usia, lama kerja dan gender diurai dalam tabel dan grafis di bawah ini.

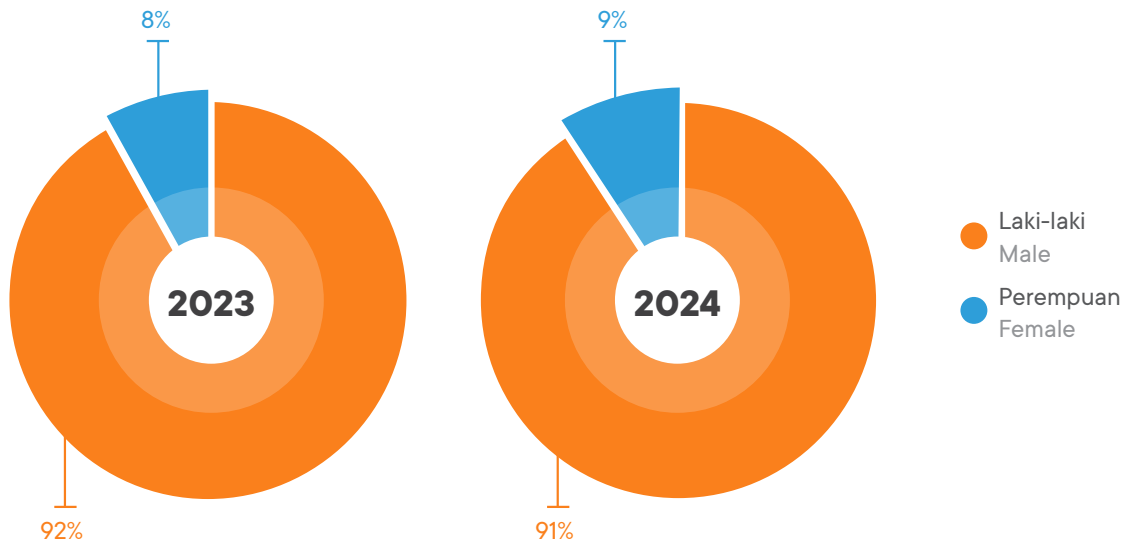
The breakdown of employee demographics by organizational level, education level, employment status, age, length of work, and gender is broken down in the table and graphic below.



Demografi Karyawan berdasarkan Gender

Employee Demographics by Gender

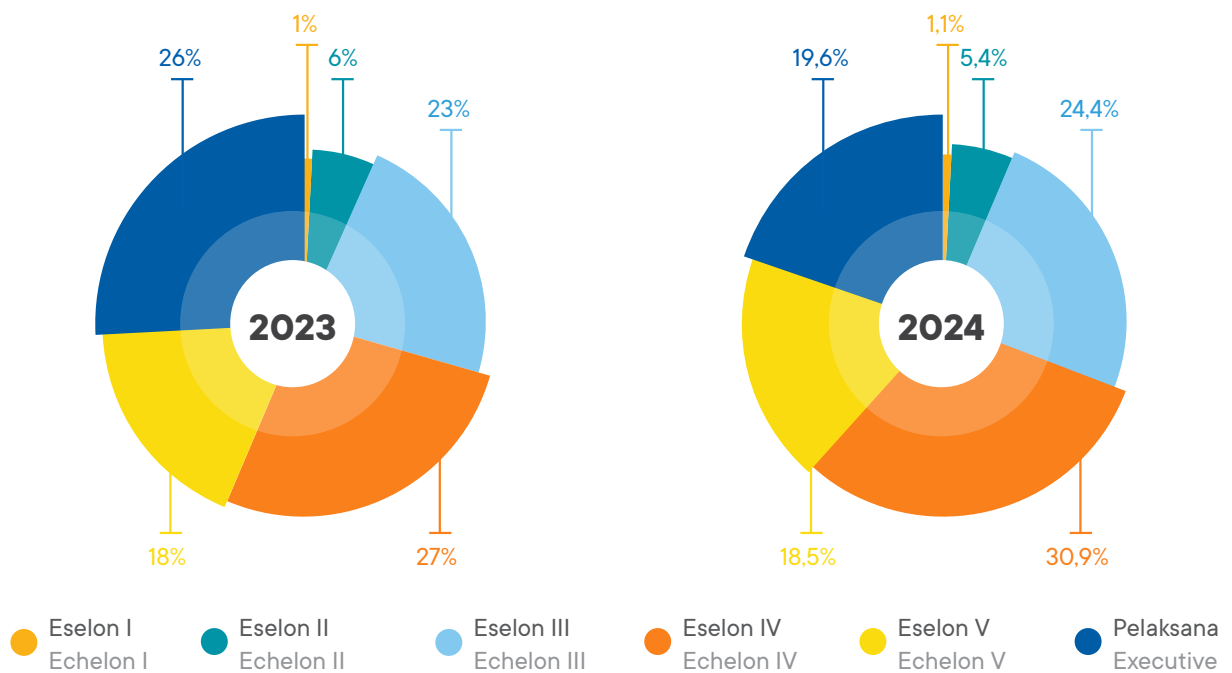
Gender	2023		2024		Pertumbuhan Growth	
	Orang People	% Komposisi Composition	Orang People	% Komposisi Composition	Orang People	%
Laki-laki Male	1.654	92	1.634	91	(20)	(1)
Perempuan Female	149	8	156	9	7	5
Jumlah Total	1.803		1.790		(13)	(1)



Demografi Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Employee Demographics by Organizational Level

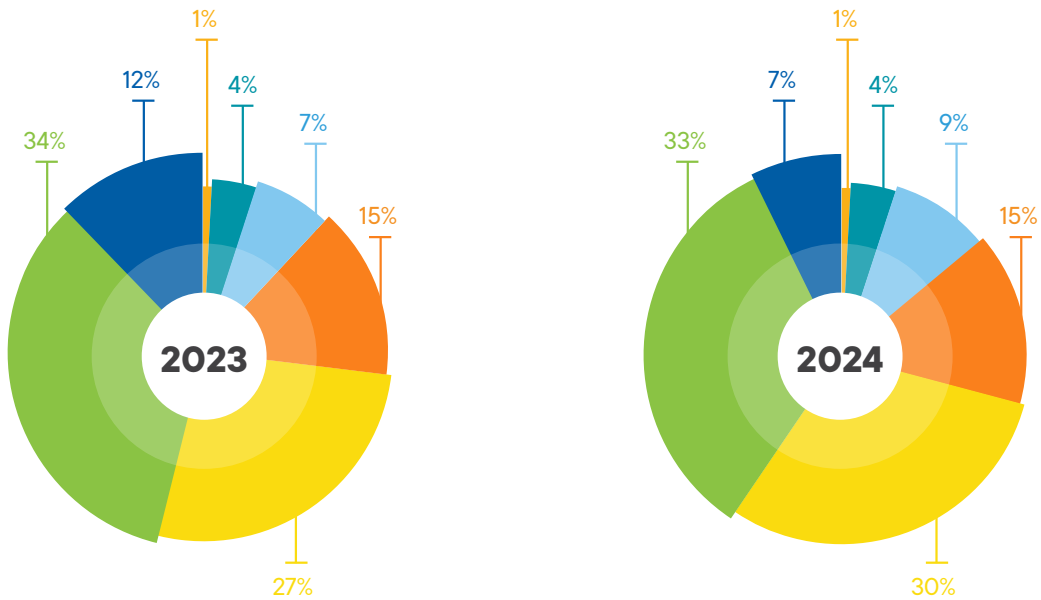
Tingkat Jabatan Organization Level	2023				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Eselon I Echelon I	3	17	20	1	3	16	19	1,1	(1)	(5)
Eselon II Echelon II	22	80	102	6	23	74	97	5,4	(5)	(5)
Eselon III Echelon III	49	360	409	23	57	380	437	24,4	28	7
Eselon IV Echelon IV	61	425	486	27	67	487	554	30,9	68	14
Eselon V Echelon V	12	311	323	18	6	326	332	18,5	9	3
Pelaksana Executive	2	461	463	26	0	351	351	19,6	(112)	(24)
Jumlah Total	149	1.654	1.803		156	1.634	1.790		(13)	(1)



Demografi Karyawan berdasarkan Usia

Employee Demographics by Age

Kelompok Usia Age Group	2023				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
>55	1	18	19	1	0	15	15	1	(4)	(21)
50-55	0	80	80	4	1	79	80	4	0	0
45-49	13	109	122	7	16	151	167	9	45	37
40-44	24	243	267	15	25	248	273	15	6	2
35-39	54	425	479	27	53	490	543	30	64	13
30-34	52	564	616	34	55	531	586	33	(30)	(5)
25-29	5	215	220	12	6	120	126	7	(94)	(43)
<25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	149	1.654	1.803		156	1.634	1.790		(13)	(1)

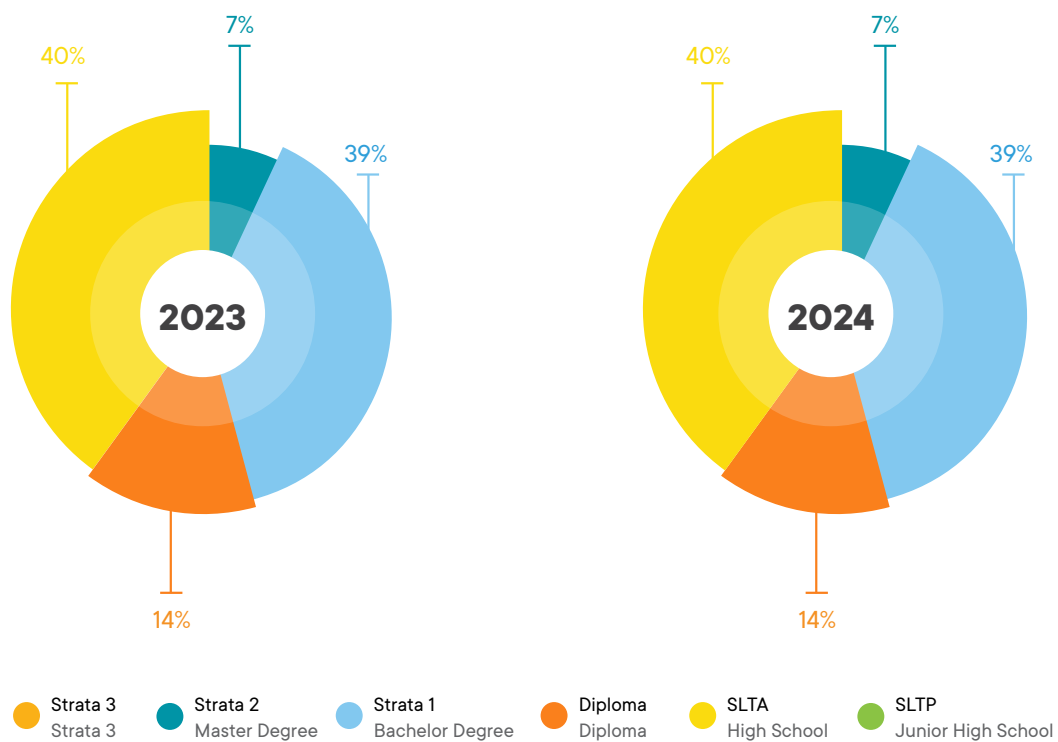


- >55
- 50-55
- 45-49
- 40-44
- 35-39
- 30-34
- 25-29
- <25

Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Demographics by Education Level

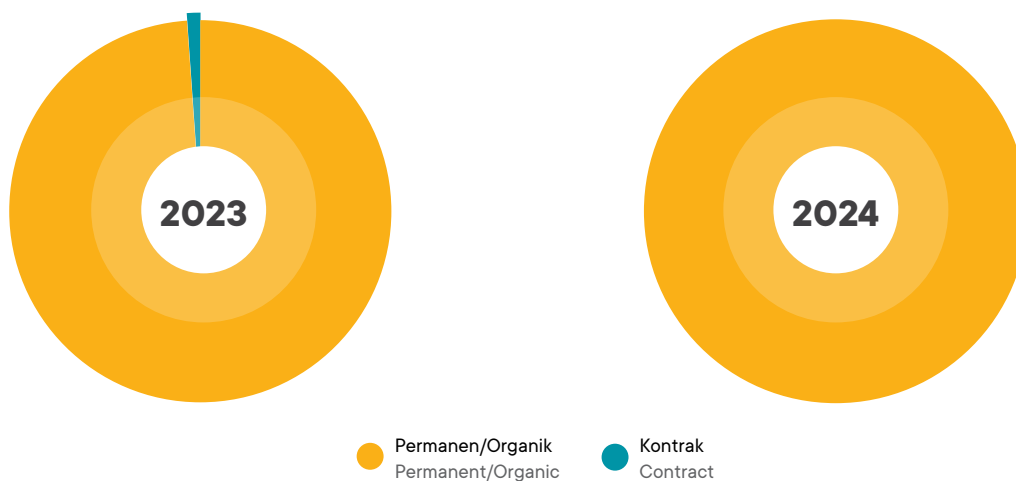
Tingkat Pendidikan Education Level	2023				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Strata 3 Strata 3	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Strata 2 Master Degree	14	104	118	7	14	109	123	7	5	4
Strata 1 Bachelor Degree	93	607	700	39	105	602	707	39	7	1
Diploma Diploma	40	214	254	14	36	209	245	14	(9)	(4)
SLTA High School	2	728	730	40	1	713	714	40	(16)	(2)
SLTP Junior High School	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	149	1.654	1.803		156	1.634	1.790		(13)	(1)



Demografi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Demographics by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Permanen/ Organik Permanent/ Organic	141	1.654	1.795	99	156	1.634	1.790	1	4	0
Kontrak Contract	8	9	17	1	0	0	0	0	(17)	(100)
Jumlah Total	149	1.663	1.812		156	1.634	1.790		(13)	(1)



BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, Perusahaan telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp25,47 miliar. Dengan demikian Investasi di bidang pengembangan *human capital* naik sebesar 9,39% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp23,28 miliar.

COMPETENCY DEVELOPMENT COST

Until the end of the 2024 financial year, the Company has realized an employee competency development budget of Rp25.47 billion. Investment in the field of human capital development increased by 9.39% from the realization in 2023 of Rp23.28 billion.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Rp Juta | Rp Million

Total Employee Competency Development Cost

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Perbandingan Realisasi 2023-2024 % Realization Comparison 2023-2024 %
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Cost	25.469	23.282	9,39

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PUSRI memiliki Sistem Manajemen SDM berbasis human capital terintegrasi sebagai metode pelaksanaan pengembangan kompetensi PUSRI. Pengembangan kompetensi tersebut dimulai sejak karyawan masuk sebagai *management trainee* di PUSRI.

PUSRI memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa membeda-bedakan dalam kesempatan pengembangan kompetensi. Kompetensi karyawan dinilai melalui kegiatan *assessment* kompetensi guna mengetahui potensi intelektual, kepemimpinan, serta *soft competency* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil *assessment* akan dikombinasikan dengan *performance management* melalui Penilaian Prestasi Kerja.

Hasil kombinasi penilaian tersebut akan dijadikan landasan objektif oleh Perusahaan dalam melakukan kegiatan pengembangan SDM melalui metode pembelajaran berbasis 70-20-10, yaitu 70% *experiential learning*, 20% *social learning*, dan 10% *formal learning*. Implementasi metode pembelajaran 70-20-10 tersebut dapat berupa pelatihan/sertifikasi, proses *mentoring/ coaching*, dan melalui mekanisme penugasan khusus, penugasan ke proyek-proyek, dan sebagainya.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PUSRI has an integrated human capital-based HR Management System as a method of implementing PUSRI competency development. The competency development began when employees entered as management trainees at PUSRI.

PUSRI provides equal opportunities to all employees without discriminating in competency development opportunities. Employee competence is assessed through competency assessment activities to determine the intellectual potential, leadership, and soft competency needed to achieve the expected performance. The results of the assessment will be combined with performance management through the Work Performance Assessment.

The results of the combined assessment will be used as an objective basis by the Company in carrying out HR development activities through 70-20-10-based learning methods, namely 70% experiential learning, 20% social learning, and 10% formal learning. The implementation of the 70-20-10 learning method can be in the form of training and certification, mentoring and coaching processes, special assignment mechanisms, assignments to projects, and so on.

Realisasi Mandays (MD) Pengembangan Kompetensi Karyawan

Realization of Mandays (MD) for Employee Competency Development

No	Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Perbandingan Realisasi 2023-2024 Realization Comparison 2023-2024
		(1)	(2)	[(1)-(2)/(2)]
1	Pelatihan Training	11.443	9.998	14,45
2	Sertifikasi Certification	2.087	1.863	12,02
3	Sharing	2.366	4.858	(51,30)
4	Instruktur Pelatihan Training Instructor	373	132	182,58
5	Pemateri Sharing Sharing Speaker	46	170	(72,94)
6	Coaching, Mentoring, Feed Back Assessment	13	13	0,00
Total		16.328	16.638	(15,5)

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN 2025

Untuk tahun 2025 Perusahaan merencanakan kegiatan pembelajaran karyawan dengan target sebesar 11.163 Mandays pembelajaran, termasuk kegiatan yang terkait dengan penerapan manajemen pengetahuan. Pembelajaran mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pelatihan, sertifikasi, *e-learning*, *sharing knowledge*, *Community of Practice*, serta *Coaching & Mentoring*. Pembelajaran karyawan meliputi berbagai bidang seperti pembelajaran untuk kepemimpinan, bidang kompetensi inti perusahaan seperti operasi dan pemeliharaan, serta bidang kompetensi penunjang seperti SDM, keuangan, audit, perencanaan strategis, dan lain-lain.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN 2025

For 2025, the Company plans employee learning activities with a target of 11,163 Mandays of learning, including activities related to the application of knowledge management. Learning includes various types of activities, such as training, certification, e-learning, knowledge sharing, Community of Practice, and Coaching & Mentoring. Employee learning covers various areas such as learning for leadership, core company competency areas such as operations and maintenance, and supporting competency areas such as HR, finance, auditing, strategic planning, and others.

Tabel Target Pengembangan Kompetensi Karyawan/Karyawati 2025

Table of Employee Competency Development Targets 2025

No	Keterangan Description	Target MD MD Target
		2025
1	Pelatihan <i>Inhouse</i> Inhouse Training	7.756
2	Pelatihan <i>Outplant</i> Outplant Training	1.338
3	<i>E-learning</i>	156
4	<i>Sharing Knowledge</i>	1.363
5	<i>Community of Practice</i>	500
6	Forum Manajemen Management Forum	500
Jumlah Total		11.613

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, PUSRI tidak pernah melakukan penawaran umum saham, dan tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. PUSRI merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada tahun buku 2024, PUSRI mengalami perubahan komposisi Pemegang Saham sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 04 Desember 2024 yang memutuskan perubahan klasifikasi saham dan memutuskan pemindahan/pengalihan hak atas 1 (satu) lembar saham PUSRI yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia melalui hibah, yang dikuatkan dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.

Komposisi pemegang saham PUSRI sejak tanggal 04 Desember 2024 adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna atau senilai Rp1.000.000 dengan kepemilikan sebesar 0,0000172%, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang memiliki 5.799.985 lembar saham Seri B atau senilai Rp5.799.985.000.000 dengan kepemilikan sebesar 99,9997414%, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI yang memiliki 14 lembar saham Seri B atau senilai Rp14.000.000 dengan kepemilikan sebesar 0,0002414%. Berikut rincian komposisi pemegang saham PUSRI per tanggal 31 Desember 2024.

Until the end of the 2024 financial year, PUSRI has never conducted a public offering of shares and does not have a share ownership program by either management or employees. PUSRI is a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE).

In the 2024 fiscal year, PUSRI underwent a change in shareholder composition pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) held on December 4, 2024, which approved a reclassification of shares and the transfer of rights over one (1) PUSRI share owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) to the Republic of Indonesia through a grant. This decision was formalized in Deed Number 05 dated December 4, 2024, concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 4, 2024, the composition of PUSRI's shareholders is as follows: the Republic of Indonesia holds one (1) Series A Dwiwarna share valued at Rp1,000,000, representing 0.0000172% ownership; PT Pupuk Indonesia (Persero) holds 5,799,985 Series B shares valued at Rp5,799,985,000,000, representing 99.9997414% ownership; and the PT PUSRI Employee Welfare Foundation holds 14 Series B shares valued at Rp14,000,000, representing 0.0002414% ownership. The detailed composition of PUSRI's shareholders as of December 31, 2024, is presented below.

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham : Rp1.000.000/Lembar Saham Share Nominal Value : Rp 1,000,000/Share			
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1 lembar saham Seri A Dwiwarna 1 Series A Dwiwarna share	Hibah dari PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp1.000.000 Grant from PT Pupuk Indonesia (Persero) amounting to Rp1,000,000.	0,0000172
PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.799.985 lembar saham Seri B 5,799,985 Series B Dwiwarna share	5.799.985.000.000	99,9997414
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT PUSRI PT PUSRI Employee Welfare Foundation	14 lembar saham Seri B 14 Series B Dwiwarna share	14.000.000	0,0002414
Jumlah Total	5.800.000	5.800.000.000.000	100

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PUSRI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024

PUSRI'S SHAREHOLDER COMPOSITION AS PUSRI SHAREHOLDERS COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2024

Kelompok Pemegang Saham 5% dan/atau Lebih

Group of Shareholders with 5% and/or More



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.799.985 lembar saham Seri B 5,799,985 Series B Dwiwarna share	99,9997414



Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Group of Shareholders Less than 5%



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1 lembar saham Seri A Dwiwarna 1 Series A Dwiwarna share	0,0000172
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri PT Pusri Employee Welfare Foundation	14 lembar saham Seri B 14 Series B Dwiwarna share	0,0002414



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PUSRI tidak memiliki saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal terseter pada Perusahaan. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.



Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi

PUSRI bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.



Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang Dari 5%

PUSRI bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

All members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of PUSRI do not own shares with 5% or more of the Company's paid-up capital. Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not own shares exceeding 25% of the paid-up capital in another company, as evidenced by a statement letter.

Shareholders by Classification

PUSRI is not a public company, so information on this matter cannot be shared.

Public Shareholders with Less than 5% Share Ownership Each

PUSRI is not a public company, so information on this matter cannot be shared.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali PUSRI ialah PT Pupuk Indonesia (Persero) sekaligus entitas induk PUSRI dengan kepemilikan sebesar 99,9998%. Pemilik akhir dari PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruhnya atau 100,00% saham PT Pupuk Indonesia (Persero). Negara Republik Indonesia yang memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna PUSRI mempunyai hak-hak istimewa untuk menyetujui :

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris.
2. Perubahan anggaran dasar.
3. Perubahan struktur kepemilikan saham.
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

The main shareholder and controller of PUSRI is PT Pupuk Indonesia (Persero), which is also the parent entity of PUSRI, holding 99,9998% of the shares. The ultimate owner of PT Pupuk Indonesia (Persero) is the Government of the Republic of Indonesia, which owns 100,00% of PT Pupuk Indonesia (Persero) shares. The Republic of Indonesia, which holds one share of Series A Dwiwarna in PUSRI, has special rights to approve:

1. The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Amendments to the articles of association.
3. Changes in the shareholding structure.
4. Mergers, consolidations, splits, dissolutions, and takeovers by other companies.

Daftar Entitas Anak dan Asosiasi

List of Subsidiaries and Associate Entities

ENTITAS ANAK

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, Perusahaan memiliki 1 (satu) entitas anak dengan uraian sebagai berikut.

SUBSIDIARIES

Until the end of the 2024 financial year, the company has one subsidiary with the following description:

Nama Name	Kegiatan Usaha Business Activities	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal Year of Inclusion	Domisili Domicile	Status Status	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)		Total Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)	
							2024	2023	2024	2023
PT Pusri Agro Lestari	Industri pestisida dan pupuk serta perdagangan bahan kimia lainnya. Pesticide and fertilizer industry and trade in other chemicals.	2015	2015	2015	Karawang	Beroperasi Operating	51,00	51,00	55.480*	57.851

*Tidak diaudit | *Unaudited



ENTITAS ASOSIASI

Per 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 4 (empat) entitas asosiasi dengan uraian sebagai berikut.



ASSOCIATED ENTITIES

As of December 31, 2024, the Company has 4 (four) associated entities with the following description:

Nama Name	Kegiatan Usaha Business Activities	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal Year of Inclusion	Domisili Domicile	Status Status	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)		Total Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)	
							2024	2023	2024	2023
PT Pupuk Indonesia Logistik	Jasa pelayaran atau jasa angkutan laut Shipping services or sea freight services	2013	2015	2013	Jakarta	Beroperasi Operating	44,23	44,23	628.791	671.510
PT Pupuk Indonesia Pangan*	Agribisnis dan mekanisasi pertanian Agribusiness and agricultural mechanization	2015	2018	2015	Karawang	Beroperasi Operating	10,00	10,00	83.678*	87.070
PT Pupuk Indonesia Utilitas	Jasa Konstruksi serta Penyediaan listrik, gas, uap dan udara Construction Services and Supply of Electricity, Gas, Steam, and Air	2014	2018	2014	Jakarta	Beroperasi Operating	7,14	7,14	1.709.680	1.665.018
PT Puspertino	Pabrikasi Peralatan Equipment Fabrication	1990	1992	1990	Gresik	Beroperasi Operating	2,31	2,31	72.572	82.462

*Tidak diaudit | Unaudited

Sekilas Kinerja Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Performance of Subsidiaries and Associated Entities at a Glance



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pusri Agro Lestari No. 1 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-0015102.AH.01.01. tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pusri Agro Lestari tanggal 6 April 2015.</p> <p>The Deed of Establishment of the Limited Liability Company PT Pusri Agro Lestari No. 1 dated March 2, 2015, was executed before Notary Lumassia, SH., a Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0015102.AH.01.01. Year 2015 concerning the Legalization of the Establishment of the Legal Entity of the Limited Liability Company PT Pusri Agro Lestari dated April 6, 2015.</p>
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PAL merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PUSRI dengan Comeco Gulf W.L.L. yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri pestisida, agrokimia dan pupuk serta perdagangan bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebagai bentuk implementasi strategi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam menyediakan sarana produksi pertanian yang terintegrasi.</p> <p>PAL is a joint venture company established by PUSRI and Comeco Gulf W.L.L., engaged in the pesticide, agrochemical, and fertilizer industries, as well as the trade of chemicals and chemical-based products. This initiative serves as part of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's strategy to provide integrated agricultural production inputs.</p>
Kepemilikan Saham Share Ownership	<p>PUSRI: 51,00%</p> <p>Comeco Gulf W.L.L: 49,00%</p>
Manajemen Kunci Key Management	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners Junaedi: Komisaris Commissioner</p> <p>Direktur Board of Directors Fakhrurrazi: Plt. Direktur Utama Acting President Director</p>

Kinerja Keuangan 2022-2024

Financial Performance 2022-2024

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2024*	2023	2022
Pendapatan Income	44.363	50.173	243.250
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(41.449)	(43.059)	(237.668)
Laba Kotor Gross Profit	2.914	7.115	5.582
Beban Usaha Operating Expenses	(2.693)	(5.267)	(4.646)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	221	1.848	936
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	172	1.721	1.502
Aset Assets	55.480	57.857	60.829
Liabilitas Liability	10.987	13.536	18.229
Ekuitas Equity	44.493	44.321	42.600

*Tidak diaudit | Unaudited



PUPUK INDONESIA LOGISTIK

(PIHC Group)



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Akta No. 211 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nur Isminingsih SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-05986.AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pupuk Indonesia Logistik tanggal 12 Februari 2014.</p> <p>Act No. 211 dated December 23, 2013 which was made in front of Notary Siti Nur Isminingsih SH, Notary in Jakarta and has been confirmed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-05986.AH.01.01. 2014 concerning Ratification of the Establishment of the Limited Liability Company Legal Entity PT Pupuk Indonesia Logistik on February 12, 2014.</p>
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PILOG bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut yang fokus utamanya mendistribusikan pupuk subsidi dan non subsidi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan mendukung bisnis Pupuk Indonesia Grup</p> <p>PILOG operates in the shipping and sea transportation services sector whose main focus is distributing subsidized and non-subsidized fertilizers in order to support the national food security program and support the Pupuk Indonesia Group business</p>
Kepemilikan Saham Share Ownership	<p>PUSRI: 44,23%</p> <p>PT Pupuk Indonesia (Persero): 55,77%</p>
Manajemen Kunci Key Management	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners Rudi Rusli: Komisaris Utama President Commissioner Aridayanto Kusumayuda : Komisaris Commissioner</p> <p>Direktur Board of Directors Zulyan Imansyah: Direktur Utama President Director Priyadhika: Direktur Administrasi & Keuangan Director of Administration & Finance Hree Shanty Bayu: Direktur Operasional Director of Operations M. Gustru Oktaviandi: Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development</p>

Kinerja Keuangan 2022-2024

Financial Performance 2022-2024

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2024	2023	2022
Pendapatan Income	594.451	481.080	503.133
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(620.871)	(454.300)	(432.181)
Laba Kotor Gross Profit	(26.420)	26.780	70.952
Beban Usaha Operating Expenses	(40.914)	(36.917)	(32.387)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(67.334)	(10.137)	38.565
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(90.948)	(11.998)	19.505
Aset Assets	628.791	671.510	654.434
Liabilitas Liability	468.743	420.941	391.808
Ekuitas Equity	160.048	250.568	262.627



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 14 tanggal 30 April 2015 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-2438224.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015. Deed No. 14 dated April 30, 2015 was made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-2438224. AH.01.01 of 2015 dated May 11, 2015.
Profil Perusahaan Company Profile	PIP didirikan untuk melakukan usaha di bidang agribisnis yang terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ketersediaan pangan, dan mendukung bisnis utama Pupuk Indonesia Group. Usaha Kegiatan agribisnis dilakukan dari hulu ke hilir melalui cluster pangan serta usaha jasa mekanisasi pertanian sehingga berkontribusi terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras dalam mendukung ketahanan pangan nasional. PIP was established to conduct an integrated agribusiness business to increase farmers' income, increase food availability, and support the main business of Pupuk Indonesia Group. Business agribusiness activities are carried out from upstream to downstream through food clusters and agricultural mechanization service businesses so as to contribute to food availability, especially rice, and support national food security.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 10,00% PT Pupuk Indonesia (Persero): 60,00% PT Pukuk Kalimantan Timur: 10,00% PT Petrokimia Gresik: 10,00% PT Pupuk Kujang Cikampek: 10,00%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Suhawi: Komisaris Utama President Commissioner Direktur Board of Directors Iwan Daru Sukmana : Direktur Utama President Director Kiki Lukmanul Hakim : Direktur Keuangan Director of Finance

Kinerja Keuangan 2022-2024

Financial Performance 2022-2024

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2024*	2023	2022
Pendapatan Income	3.535	77.722	189.396
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(3.324)	(79.578)	(213.481)
Laba Kotor Gross Profit	211	(1.856)	(24.085)
Beban Usaha Operating Expenses	(17.427)	(18.430)	(17.197)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(16.127)	(21.385)	(69.152)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(16.552)	(21.385)	(69.152)
Aset Assets	83.678	87.070	166.364
Liabilitas Liability	18.563	5.246	63.155
Ekuitas Equity	65.115	81.824	103.209

*Tidak diaudit | Unaudited



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Dasar Hukum Pendirian Akta Pendirian No. 11 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M. Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU23002.40.10.2014 tanggal 3 September 2014.</p> <p>Legal Basis for Establishment Deed of Establishment No. 11 dated August 18, 2014 which was made before Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M. Kn., Notary in Jakarta, and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU23002.40.10.2014 dated September 3, 2014.</p>
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PIU didirikan untuk menjadi perusahaan penyedia utilitas untuk mendukung bisnis utama Pupuk Indonesia Grup beserta anak usahanya. PIU bergerak di bidang konstruksi pembangkit listrik, penyediaan listrik, gas, uap dan udara, treatment air dan limbah. Di samping itu, PIU melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dalam rangka pemenuhan bahan baku dan bahan penunjang, seperti batu bara dan mineral bahan pupuk.</p> <p>PIU was established to be a utility provider company to support the main business of Pupuk Indonesia Group and its subsidiaries. PIU is engaged in the construction of power plants, supply of electricity, gas, steam and air, water and waste treatment. In addition, PIU carries out business activities in the mining sector in order to fulfill raw materials and supporting materials, such as coal and mineral fertilizers.</p>
Kepemilikan Saham Share Ownership	<p>PUSRI: 7,14% PT Rekayasa Industri: 62,86% PT Pupuk Kalimantan Timur: 10,00% PT Petrokimia Gresik: 10,00% PT Pupuk Kujang: 5,00% PT Pupuk Iskandar Muda: 5,00%</p>
Manajemen Kunci Key Management	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners Sumyana Sukandar: Komisaris Utama President Commissioner Imam Mujahidin : Komisaris Commissioner Monica Desideria Puspapranityati : Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors Mochamad Safie : Direktur Utama President Director Nuri Kristiawan : Direktur Keuangan Director of Finance Anis Ernani : Direktur Operasi Director of Operations</p>

Kinerja Keuangan 2022-2024

Financial Performance 2022-2024

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2024	2023	2022
Pendapatan Income	938.072	921.720	787.659
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	596.283	(620.790)	(546.834)
Laba Kotor Gross Profit	341.789	300.930	240.825
Beban Usaha Operating Expenses	(93.952)	(91.122)	(78.957)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	247.837	209.809	161.868
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	164.424	147.185	92.802
Aset Assets	1.709.680	1.665.018	1.637.659
Liabilitas Liability	554.328	625.476	708.795
Ekuitas Equity	1.155.352	1.039.542	928.864



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Notaris Ardjasmita, S.H., No. 30 tanggal 22 Maret 1990 Notarial Deed of Ardjasmita, S.H., No. 30, dated March 22, 1990
Profil Perusahaan Company Profile	Bergerak di bidang industri mesin-mesin pengolahan logam dan permesinan umum (<i>workshop</i>) antara lain pembuatan tower, bejana tekanan (<i>pressure vessel</i>), dan alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>), memasarkan dan atau memperdagangkan hasil-hasil usaha tersebut untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Engaged in the industry of metal processing machinery and general machinery (<i>workshop</i>), including the manufacture of towers, pressure vessels, and heat exchangers (<i>heat exchangers</i>), marketing and/or trading the results of these businesses for the domestic market and export.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 2,31% PT Petrokimia Gresik: 2,31% PT Rekayasa Industri: 94,32% Babcock Borsig Aktiengesellschaft: 1,06%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Bachronsyah: Komisaris Utama President Commissioner Wijaya Santoso: Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors Joni Kurniawan Siregar: Direktur Director

Kinerja Keuangan 2022-2024

Financial Performance 2022-2024

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2024	2023	2022
Pendapatan Income	73.473	79.944	108.983
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(64.649)	(68.292)	(97.999)
Laba Kotor Gross Profit	8.824	11.652	10.984
Beban Usaha Operating Expenses	(7.608)	(10.480)	(13.010)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	1.216	1.172	(2.026)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.551	791	131
Aset Assets	72.572	82.462	126.231
Liabilitas Liability	26.909	38.299	82.396
Ekuitas Equity	45.663	44.164	43.835

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

PUSRI belum pernah melakukan penawaran saham perdana dan belum tercatat di bursa saham mana pun. Namun demikian pada tahun 2024 Perusahaan menerbitkan 1 saham Dwiwarna A, khusus untuk Pemerintah RI, sedangkan saham Dwiwarna B menjadi representasi kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP). Dengan demikian, Perusahaan hanya dapat menyediakan informasi sebatas terbitnya saham Dwiwarna dimaksud.



CHRONOLOGY OF STOCK LISTING

PUSRI has never conducted an initial public offering and is not listed on any stock exchange. However, in 2024 the Company issued one Dwiwarna A share exclusively for the Government of Indonesia, while Dwiwarna B shares represent the ownership of PT Pupuk Indonesia (Persero) and the Employee Welfare Foundation of PT Pusri (YKKP). Therefore, the Company can only provide information limited to the issuance of the aforementioned Dwiwarna shares.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

Hingga 31 Desember 2024, PUSRI tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/ sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, peringkat obligasi/ sukuk.

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTINGS

As of December 31, 2024, PUSRI did not list bonds, sukuk, convertible bonds, or any other securities. Thus, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/ convertible bonds, interest or reward rate, maturity date, or bond or sukuk rating.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Nama Name	Alamat Address	Jasa Service	Biaya Cost	Periode Penugasan Assignment Period
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia	Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Laporan Lainnya	Rp2.359.860.000,- (Include PPN)	Mulai tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 22 Mei 2025 From October 25, 2024, until May 22, 2025
		Financial Statements, Financial Statements on the Implementation of the Micro and Small Business (MSB) Financing Program, and Other Reports		

NAME AND ADDRESS OF THE CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTION

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

NOTARIS DAN JASA KONSULTAN HUKUM

No.	Nama Name	Alamat Address
1	Notaris/PPAT Pasnelyza Karani, S.H., M.Kn Notary/PPAT Pasnelyza Karani, S.H., M.Kn	Jalan Raya Solok Padang KM 5, Koto Baru, Kabupaten Solok
2	Notaris/PPAT Imelda Sugiharti, S.H., M.Kn Notary/PPAT Imelda Sugiharti, S.H., M.Kn	Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 34, Kota Palembang
3	Notaris/PPAT Lumassia, SH., M.Kn Notary/PPAT Lumassia, SH., M.Kn	Jalan Danau Poso Nomor E.II Nomor 84, RT.018, RW.004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
4	Notaris/PPAT Ratih Setyowati, S.H., M.Kn. Notary/PPAT Ratih Setyowati, S.H., M.Kn.	Ruko Gatsula No. 8, Jalan Jend. Gatot Subroto, Gunung Simpang, Cilacap
5	Ertiga Law Firm	Gedung TRIO Lt.2 Suite 207, Jl. Mampang Prapatan Raya, No. 17 EF, Jakarta Selatan
6	Balakosa Law Firm	Pelangi Building, Lt. 2 - 3, Jalan Angkatan 45 Nomor P.30, Kota Palembang.
7	PSHP Law	World Trade Centre 5, Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
8	DE-JURIS Law Office	Gedung STC Senayan, Jalan Asia Afrika, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat

Informasi pada Website Perusahaan

Information on the Company's Website

PUSRI memiliki situs web resmi dengan alamat www.pusri.co.id yang telah dilengkapi dengan berbagai informasi seputar korporasi. Situs web tersebut menyediakan informasi terkait perusahaan, peristiwa di lingkungan perusahaan, kliping berita media, *soft copy* Info PUSRI, *soft copy* data perusahaan (*annual report, sustainability report*), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun mereka berada. PUSRI juga menyediakan alamat e-mail: humas@pusri.co.id bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan PUSRI.

Penyebaran informasi melalui *website* tersebut kepada semua pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi yang diharapkan dapat membantu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif tentang PUSRI. Situs web PUSRI menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

Walaupun PUSRI bukan merupakan perusahaan publik, namun sebagai praktik terbaik, *website* Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.pusri.co.id.

PUSRI has an official website with a www.pusri.co.id address that has been equipped with various information about the corporation. The website provides information related to the company, events in the company environment, media news clippings, soft copies of PUSRI Info, soft copies of company data (annual report, sustainability report), auction announcements, and several other pieces of information that can be easily accessed by people wherever they are. PUSRI also provides an e-mail address: humas@pusri.co.id for the public who want to inquire about various PUSRI related matters.

The dissemination of information through the website to all stakeholders is an important part of improving the principle of information transparency, which is expected to help increase knowledge, understanding, and positive perceptions about PUSRI. The PUSRI website becomes the corporation's official digital portal that can be accessed openly to provide comprehensive information about the Company to a wide audience.

Although PUSRI is not a public company, as a best practice, the company's website has complied with the provisions regulated by Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the website of issuers or public companies. All of this information can be accessed by the public through www.pusri.co.id sites.

Konten Content	Link
Board Manual	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/pedoman-kerja-dewan-komisaris-dan-direksi
Sekretaris Perusahaan	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/sekretaris-perusahaan
Pedoman Piagam SPI	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/kebijakan-manajemen/pokok-pokok-pelaksanaan-audit-internal
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (CoC) Code of Business Ethics and Conduct (CoC)	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/pedoman-etika-usaha-dan-tata-perilaku
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG): Code of Corporate Governance (CoCG)	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/pedoman-tata-kelola-perusahaan-1
Piagam KIMR	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/piagam-komite-investasi-dan-manajemen-risiko
Susunan Keanggotaan & Piagam Komite Audit	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/susunan-keanggotaan-piagam-komite-audit
Piagam KNR	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/piagam-komite-nominasi-dan-remunerasi
Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/kebijakan-manajemen/kebijakan-manajemen-risiko-perusahaan
Whistleblowing System (WBS)	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/whistleblowing-system-wbs
Komitmen Anti Korupsi	https://pusri.co.id/id/tata-kelola/gcg/komitmen-anti-gratifikasi
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & Lingkungan Corporate Social & Environmental Responsibility	https://www.pusri.co.id/id/tjsl

04

Dalam semangat Sinergi untuk M
Pangan Nasional, PT Pupuk Sri
ng tidak hanya menyediakan
eri warna bagi masa dep
kadar simbol, tetapi
dalam menciptakan
ri, dan melah
tangan pe



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Mewujudkan Swasembada
Sriwidjaja hadir sebagai entitas
solusi pertanian, tetapi juga



Tinjauan Makro Ekonomi

Macro Economic Overview



EKONOMI GLOBAL

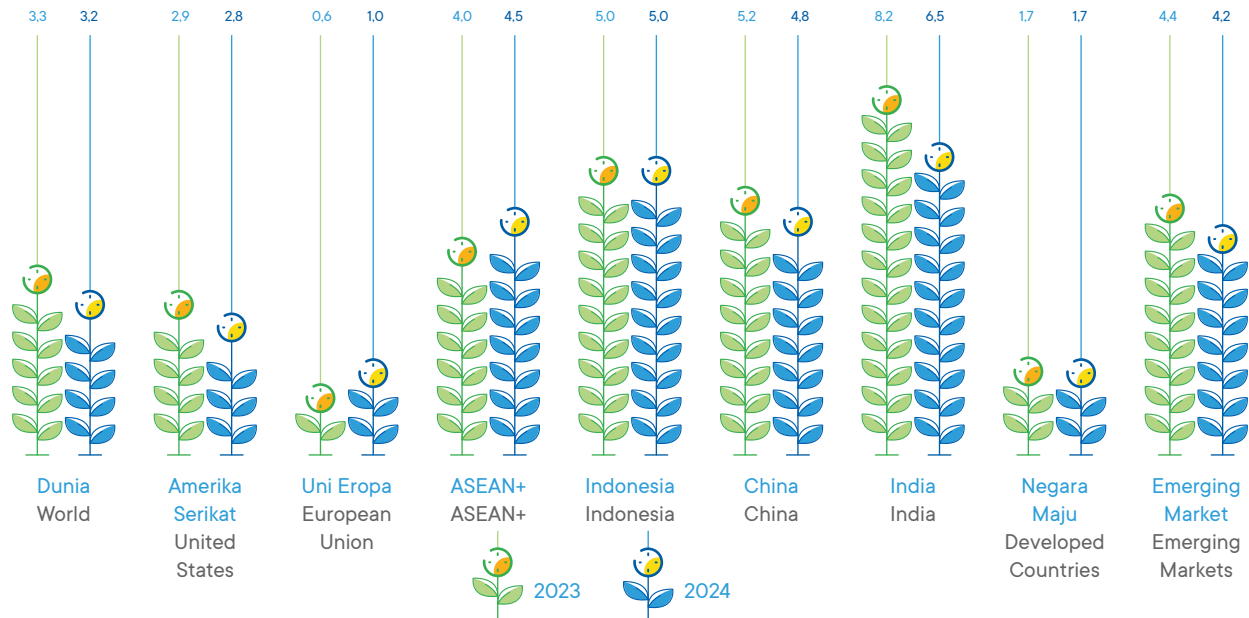
Mengacu pada kajian IMF – *World Economic Outlook* Januari 2025, perekonomian dunia di tahun 2024 masih dihadapkan pada kondisi penuh tantangan dan ketidakpastian dengan berbagai masalah utama, meliputi: disparitas pertumbuhan ekonomi antar negara besar dan antar wilayah, kuatnya dolar AS, inflasi global yang masih tinggi dan pertumbuhan perekonomian yang melambat. Perekonomian dunia diperkirakan tumbuh 3,2% pada tahun 2024, sedikit melambat dari 3,3% pada tahun sebelumnya, yang utamanya disebabkan oleh kebijakan moneter yang ketat, konflik geopolitik berkepanjangan dan pelemahan perekonomian dunia.

GLOBAL ECONOMY

Referring to the IMF – *World Economic Outlook* January 2025, the global economy in 2024 continues to face a challenging and uncertain environment with several key issues, including disparities in economic growth among major countries and regions, a strong US dollar, persistently high global inflation, and slowing economic growth. The global economy is projected to grow by 3.2% in 2024, a slight slowdown from 3.3% in the previous year, primarily due to tight monetary policies, prolonged geopolitical conflicts, and a weakening global economy.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antar Kawasan & Beberapa Negara berdasarkan GDP (%)

Comparison of Economic Growth Across Regions and Selected Countries Based on GDP (%)



Sumber: IMF – WEO Januari 2025, diolah
Source: IMF – WEO January 2025, processed

Pertumbuhan perekonomian negara adidaya mengalami pelemahan di tahun 2024, utamanya di Amerika Serikat, Tiongkok dan India. AS terkoreksi dari 2,9% ke 2,8%, Tiongkok terkoreksi dari 6,2% ke 4,8% dan India terkoreksi dari 8,5% ke 6,5%. Prospek jangka pendek masih cenderung ke arah negatif yang disebabkan oleh adanya peningkatan ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasokan, harga komoditas yang bergejolak, dan dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya.¹

The economic growth of major global powers is expected to weaken in 2024, particularly in the United States, China, and India. The US growth rate is revised down from 2.9% to 2.8%, China's from 6.2% to 4.8%, and India's from 8.5% to 6.5%. The short-term outlook remains predominantly negative due to increased trade tensions, supply chain disruptions, volatile commodity prices, and the impact of tighter monetary policies that are more significant than previously anticipated.¹

Berkepanjangannya konflik geopolitik Ukraina-Rusia dan konflik Israel-Palestina serta gangguan keamanan di wilayah Laut Merah oleh pemberontak Houthi, dapat memicu keterbatasan pasokan serta tingginya harga komoditas energi, terutama gas, dan pangan global. Kondisi ini juga membuat laju inflasi global belum kembali ke level sebelum pandemi, kendati telah mulai menurun dari kisaran 6,7% di tahun 2023 menjadi sebesar 5,7% di akhir tahun 2024. Penurunan inflasi ini telah membuat Bank Sentral beberapa negara besar, seperti *The Fed* Amerika Serikat pada akhir Desember 2024 kembali menurunkan suku bunga rujukan *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 *basis point* (bps) menjadi di kisaran 4,25%-4,5% dari sebesar 5,50% di akhir tahun 2023. Penurunan suku bunga tersebut tetap belum mampu meredam meningkatnya nilai tukar Dolar AS, mengiringi tetap kuatnya pertumbuhan perekonomian AS.

The prolonged geopolitical conflicts, the war between Ukraine and Russia, the Israel–Palestine conflict, and security disturbances in the Red Sea region by Houthi rebels could trigger supply constraints and high prices for key commodities, particularly energy (notably gas) and global food supplies. These conditions have also kept global inflation from returning to pre-pandemic levels, even though it has begun to ease, declining from around 6.7% in 2023 to 5.7% by the end of 2024. This decrease in inflation prompted central banks in several major economies, such as the U.S. Federal Reserve, to lower their benchmark interest rate. At the end of December 2024, the Fed cut the Federal Funds Rate (FFR) by 25 basis points (bps) to a range of 4.25%–4.5%, down from 5.50% at the end of 2023. However, the rate cut has not been sufficient to curb the continued strengthening of the U.S. Dollar, supported by the sustained growth of the U.S. economy.

¹ IMF, World Economic Outlook, Januari 2025



Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2024 yang tetap lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi tersebut membuat harga beberapa komoditas utama dunia bervariasi. Harga komoditas energi, seperti gas alam, misalnya (Natural Gas, Europe) yang masih terpengaruh konflik Ukraina-Rusia, naik 21,03% menjadi US\$13,93/mmbtu (November 24) dari US\$11,51/mmbtu di Desember 2024. Sementara itu, harga rata-rata minyak dunia (*Crude oil, Brent*) mencatatkan penurunan sebesar 9,93% dari US\$82,60/bbl di tahun 2023 menjadi senilai US\$74,40/bbl (November 2024, *Pink Sheet, World Bank*).²



KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL



Di tengah perekonomian dunia yang tidak stabil, penuh tantangan dan ketidakpastian sehingga tumbuh melambat, kondisi perekonomian nasional 2024 relatif berada dalam kondisi lebih baik dan memiliki daya tahan terhadap dampak global dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% di tahun 2024, hanya sedikit melandai dari 5,05% di tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, sebesar 54,04% dengan pertumbuhan sebesar 4,94% yoy pada periode tersebut. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap relatif terjaga, didukung oleh pengelolaan inflasi yang baik, dengan tingkat inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% yang berarti lebih rendah dari inflasi 2023 yang sebesar 2,61% dan berada di rentang sasaran 2,5% ±1%.³ IMF maupun Bank Dunia memandang Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di kelompok *Emerging Market* yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas 5,0%.



Kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain adalah peningkatan permintaan domestik, terutama peningkatan konsumsi rumah tangga di tengah pelaksanaan agenda politik pemilihan umum yang berlangsung aman terkendali, dan terjaganya realisasi investasi, khususnya investasi infrastruktur konektivitas dari berlanjutnya proyek-proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan ibu kota baru - Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi lapangan usaha, kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi (yoy) berasal dari sektor konstruksi, sektor lainnya, pertambangan & penggalan, perdagangan & reparasi dan industri pengolahan. Sektor konstruksi tumbuh 7,02% di sepanjang tahun 2024. Sektor-sektor lainnya, yakni: sektor lainnya; pertambangan & penggalan; perdagangan & reparasi dan industri pengolahan, tercatat tumbuh masing-masing sebesar 6,30%, 4,90%, 4,86% dan 4,43% di tahun 2024. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, sebesar 18,98% yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43%.⁴

² Global Economic Prospect, World Bank.

³ BPS

⁴ BPS, Februari 2025

The global economic growth forecast for 2024, which remains below pre-pandemic levels, has led to varied price movements for several major global commodities. For example, the price of natural gas in Europe, still affected by the Ukraine–Russia conflict, rose by 21.03% to US\$13.93/mmbtu (as of November 2024), up from US\$11.51/mmbtu in December 2024. Meanwhile, the average global crude oil price (*Brent*) recorded a decline of 9.93%, from US\$82.60/bbl in 2023 to US\$74.40/bbl in November 2024 (*Pink Sheet, World Bank*).²

NATIONAL ECONOMIC CONDITIONS

Amid an unstable global economy marked by challenges and uncertainty that have led to slower growth, Indonesia's national economy in 2024 remained relatively resilient and performed better compared to other countries in the region. Data from Statistics Indonesia (BPS) shows that Indonesia's economy grew by 5.03% in 2024, only slightly down from 5.05% in the previous year. Household consumption expenditure continued to be the largest contributor to Indonesia's GDP, accounting for 54.04%, with a year-on-year growth of 4.94% during the period. This reflects relatively stable consumer purchasing power, supported by effective inflation management. Inflation in 2024 was recorded at 1.57%, lower than the 2.61% recorded in 2023 and within the target range of 2.5% ±1%.³ Both the IMF and the World Bank recognize Indonesia as one of the few countries within the Emerging Market group that managed to achieve economic growth above 5.0%.

On the expenditure side, key contributors to economic growth included increased domestic demand, particularly household consumption, amid a peaceful and orderly general election process, as well as sustained investment realization, especially in connectivity infrastructure tied to ongoing National Strategic Projects (PSN), including the development of the new capital city, Nusantara Capital (IKN).

From a business sector perspective, the largest contributors to year-on-year economic growth came from the construction sector, other service sectors, mining and quarrying, trade and repair, and manufacturing. The construction sector grew by 7.02% throughout 2024. Other sectors: other services, mining and quarrying, trade and repair, and manufacturing grew by 6.30%, 4.90%, 4.86%, and 4.43%, respectively, in 2024. In terms of GDP structure by business sector, the manufacturing industry remained dominant, contributing 18.98% and growing by 4.43%.⁴

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2024 kembali mencatatkan surplus sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Sementara itu, neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus, dengan posisi per Desember 2024 adalah sebesar US\$31,04 miliar, turun US\$ 5,84 miliar dari 2023. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio ke pasar keuangan domestik juga terus berlanjut dengan *net inflows* hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar US\$13,14 miliar dan pada Januari 2025 (1-31 Januari 2025) tercatat sebesar US\$307 juta. Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat meningkat menjadi US\$155,7 miliar.⁵

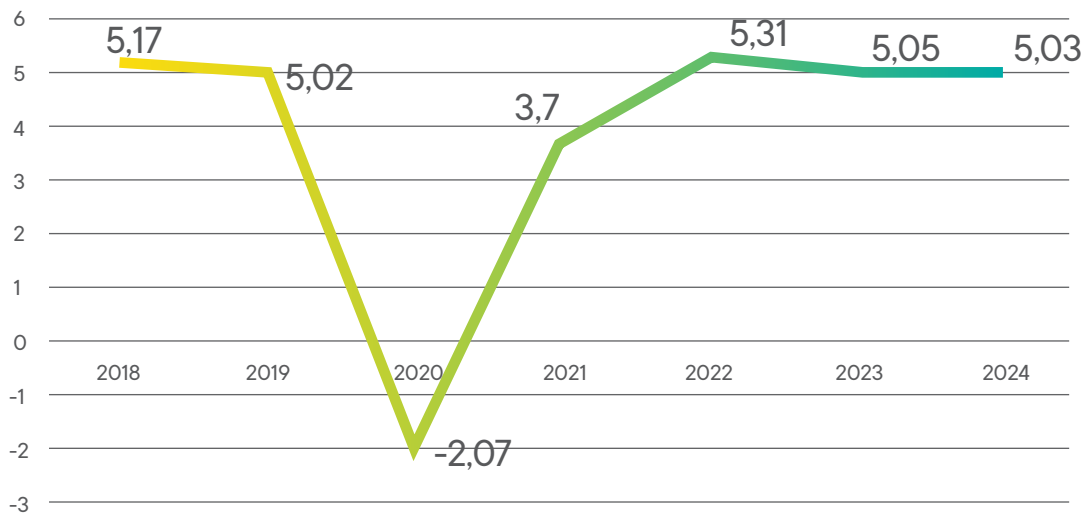
Indonesia's Balance of Payments (BOP) in 2024 again recorded a surplus, thereby supporting external resilience. Meanwhile, the trade balance continued to show a surplus, amounting to US\$31.04 billion as of December 2024, although this was down by US\$5.84 billion compared to 2023. Foreign capital inflows in the form of portfolio investment into the domestic financial market also continued, with net inflows reaching US\$13.14 billion by the end of 2024, and an additional US\$307 million recorded from January 1–31, 2025. Indonesia's foreign exchange reserves at the end of December 2024 rose to US\$155.7 billion.⁵

Stabilitas nilai tukar Rupiah relatif terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, di tengah menguatnya dolar AS. Nilai tukar Rupiah pada 31 Desember 2024 adalah Rp16.242,81 (bid) per dolar AS, atau melemah 5,1% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp15.415 per dolar AS.

The stability of the Rupiah exchange rate was relatively well maintained, supported by stabilization policies implemented by Bank Indonesia, despite the strengthening of the US Dollar. As of December 31, 2024, the Rupiah stood at Rp16,242.81 (bid) per US dollar, representing a 5.1% depreciation compared to the 2023 exchange rate of Rp15,415 per US dollar.

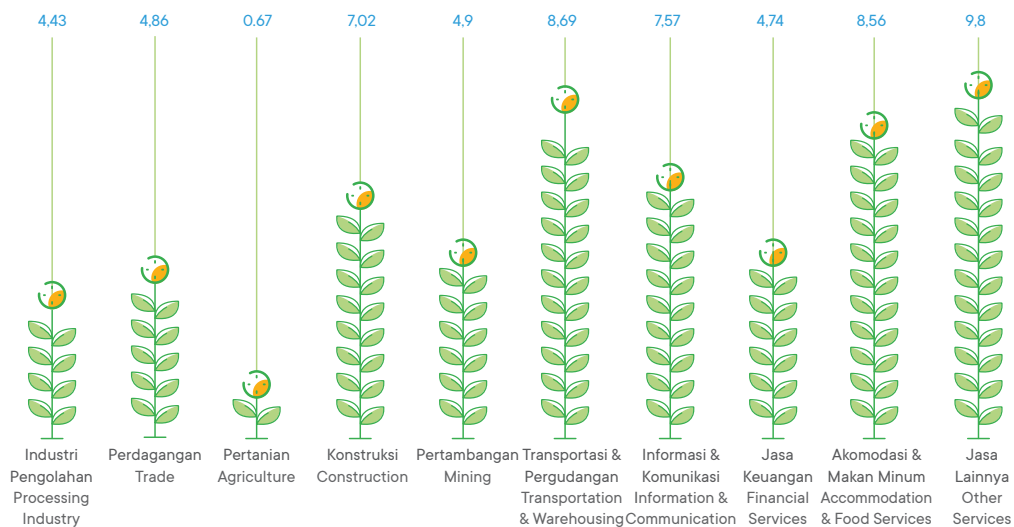
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – GDP (%)

Indonesia's Economic Growth – GDP (%)



Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha – 2024 (%)

GDP Growth by Business Sector – 2024 (%)



Sumber : Biro Pusat Statistik
Source: Central Bureau of Statistics

TINJAUAN INDUSTRI PUPUK INTERNASIONAL

Merujuk pada data Fertecon dan World Bank Commodity Price – Februari 2025, harga produk urea dan amoniak internasional di tahun 2024 cenderung stabil, setelah terjadinya lonjakan harga di tahun 2022 dan penurunan tajam di tahun 2023. Stabilitas harga di tahun 2024 terjadi karena kecukupan pasokan bersamaan dengan relatif stabilnya harga energi sekalipun terganggu oleh adanya kebijakan pembatasan ekspor, terutama dari China.



Adapun kapasitas urea global di tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 241,9 juta ton per tahun, bertambah 7,5 juta ton dari 234,4 juta ton di tahun sebelumnya. Sementara permintaan pupuk urea global di tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 183 juta ton, berkurang 1 juta ton dari 184 juta ton di tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan pelemahan serapan produk di pasar dan mengindikasikan kelebihan kapasitas. Namun perlu dicatat bahwa pada umumnya setiap unit pabrik beroperasi sesuai proyeksi permintaan pasar. Hal ini terefleksikan dari harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2024 yang sekalipun sedikit berfluktuasi, namun relatif stabil di kisaran USD350-USD361 per metric ton, setelah di tahun 2022 sempat mencapai puncaknya, di kisaran USD840-USD1,025 per metric ton.

Adapun kapasitas amoniak global 2024 diperkirakan telah mengalami peningkatan dari 236,8 juta ton di tahun 2023 dengan proporsi yang selaras dengan peningkatan kapasitas urea, mengingat sebagian besar amoniak diserap menjadi bahan baku bagi pembuatan urea. Adapun realisasi produksi amoniak di tahun 2024 adalah 150 juta metrik ton, sedikit menurun dari 152 juta metrik ton di tahun 2023. China tetap menjadi produsen sekaligus konsumen amoniak terbesar. ⁶

Harga amoniak di pasar global sangat berfluktuasi, dipengaruhi oleh intensitas pasokan yang juga berfluktuasi, disrupsi rantai pasok amoniak, gangguan cuaca maupun hambatan logistik di Kanada sebagai salah satu. Sebagai contoh harga amonia di Amerika Serikat dan Brazil pada Desember tahun 2024 dengan masing-masing sebesar USD646/ton dan USD589/ton. Harga amonia tersebut pada bulan Februari 2024 masing-masing adalah USD450/ton dan USD367/ton.

OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY

Referring to data from Fertecon and the World Bank Commodity Price Report – February 2025, international prices for urea and ammonia products in 2024 tended to be stable, following the price surge in 2022 and a sharp decline in 2023. The price stability in 2024 was due to sufficient supply, alongside relatively stable energy prices, despite disruptions caused by export restriction policies, particularly from China.

Global urea production capacity in 2024 was estimated to have reached 241.9 million tons per year, an increase of 7.5 million tons from 234.4 million tons in the previous year. Meanwhile, global urea fertilizer demand in 2024 was estimated at only 183 million tons, down by 1 million tons from 184 million tons in 2023. This indicates weakened market absorption and suggests an oversupply. However, it is worth noting that production units generally operate based on projected market demand. This is reflected in the global market price of urea throughout 2024, which—though experiencing slight fluctuations—remained relatively stable within the range of USD 350 to USD 361 per metric ton, following its peak in 2022, which ranged between USD 840 and USD 1,025 per metric ton.

Global ammonia production capacity in 2024 was also estimated to have increased from 236.8 million tons in 2023, in line with the rise in urea capacity, as most ammonia is used as a raw material for urea production. Actual ammonia production in 2024 reached 150 million metric tons, a slight decline from 152 million metric tons in 2023. China remained the largest producer and consumer of ammonia. ⁶

Ammonia prices in the global market were highly volatile, influenced by fluctuations in supply intensity, disruptions in ammonia supply chains, weather disturbances, and logistical constraints in countries like Canada. For example, ammonia prices in the United States and Brazil in December 2024 stood at USD 646/ton and USD 589/ton, respectively. These prices had been USD 450/ton and USD 367/ton, respectively, in February 2024.

⁶ <https://www.statista.com/statistics/1266378/global-ammonia-production/>

KONDISI INDUSTRI PUPUK NASIONAL

Secara Umum, industri pupuk nasional terdiri dari sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan non PSO (komersial). Pada sektor PSO, produsen pupuk nasional – dalam hal ini PT Pupuk Indonesia (Persero), termasuk PUSRI di dalamnya – melakukan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi, daerah tanggung jawab dan ketentuan dari Pemerintah, utamanya pupuk urea dan NPK.

Peruntukan komoditas penerima pupuk bersubsidi di tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023, yakni bagi sembilan komoditas strategis pertanian yang berdampak pada inflasi, antara lain: sub sektor tanaman pangan dengan jenis tanaman padi, jagung, dan kedelai; sub sektor hortikultura dengan jenis tanaman cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan terakhir sub sektor tanaman perkebunan dengan jenis tanaman tebu rakyat, kakao, dan kopi. Adapun total alokasi volume pupuk subsidi nasional di tahun 2024 adalah sejumlah 9,55 juta ton.

Dengan adanya peruntukan pupuk subsidi di atas, maka pada sektor lainnya disediakan pupuk non PSO atau komersial, sehingga peluang kebutuhan pupuk non subsidi akan lebih besar pada komoditi perkebunan terutama sawit, kopi, dan juga komoditi hortikultura seperti buah-buahan, sayur, dan tanaman lainnya. Adapun untuk sektor komersial dalam negeri terdiri dari sub sektor perkebunan, industri, dan ritel. Khusus untuk sektor ritel, terdapat program "MAKMUR" yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian di suatu wilayah dengan memfasilitasi petani dari sisi pengetahuan dengan pendampingan bersama agronomis dan penyediaan produk pupuk dan agrokimia berkualitas

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pupuk Indonesia Group selaku penyedia pupuk nasional terbesar berhasil menjaga ketersediaan pupuk dengan mengoptimalkan kapasitas produksinya. Jumlah kapasitas pabrik urea Pupuk Indonesia Group per tahun 2024 tercatat sebesar 9,36 juta ton atau 203% dari kebutuhan urea sektor pangan yang sebesar 4,6 juta ton. Untuk pupuk NPK, kapasitas Pabrik NPK sebesar 4,6 juta ton atau 105% dari kebutuhan nasional, yaitu 4,4 juta ton. Sedangkan jumlah kapasitas produksi amoniak Pupuk Indonesia Grup per tahun 2024, mencapai 7,09 juta MT. Amoniak tersebut sebagian akan digunakan sebagai bahan baku pupuk, plastik, serta bahan kimia lainnya.

CONDITION OF THE NATIONAL FERTILIZER INDUSTRY

In general, the national fertilizer industry consists of the Public Service Obligation (PSO) and non PSO (commercial) sectors. In the PSO sector, national fertilizer producers—namely PT Pupuk Indonesia (Persero), including PUSRI—distribute subsidized fertilizers according to government allocation, designated responsibility areas, and regulations, primarily focusing on urea and NPK fertilizers.

The allocation of subsidized fertilizers in 2024 remains the same as in 2023, designated for nine strategic agricultural commodities that impact inflation, including: the food crop subsector, with rice, corn, and soybeans; the horticulture subsector, with chili, shallots, and garlic; and lastly, the plantation subsector, with sugarcane, cocoa, and coffee. The total allocation for national subsidized fertilizer volume in 2024 is 9.55 million tons.

In light of this allocation for subsidized fertilizers, non-PSO or commercial fertilizers are provided for other sectors. As a result, the demand for non-subsidized fertilizers will be greater for plantation commodities, particularly palm oil, coffee, and horticultural commodities such as fruits, vegetables, and other plants. The domestic commercial sector consists of the plantation, industry, and retail subsectors. Specifically for the retail sector, there is the 'MAKMUR' program, which aims to enhance agricultural productivity in a region by providing farmers with knowledge support through guidance from agronomists, as well as the provision of high-quality fertilizers and agrochemical products.

In order to meet the national fertilizer demand, the Pupuk Indonesia Group, as the largest national fertilizer provider, has successfully maintained fertilizer availability by optimizing its production capacity. The total urea plant capacity of the Pupuk Indonesia Group in 2024 is recorded at 9.36 million tons, which is 203% of the food sector urea requirement of 4.6 million tons. For NPK fertilizers, the capacity NPK Plant is 4.6 million tons, or 105% of the national requirement, which is 4.4 million tons. Meanwhile, the ammonia production capacity of the Pupuk Indonesia Group in 2024 reaches 7.09 million MT. Part of this ammonia will be used as raw material for fertilizers, plastics, and other chemicals.

Strategi Perseroan 2024

Company Strategy 2024



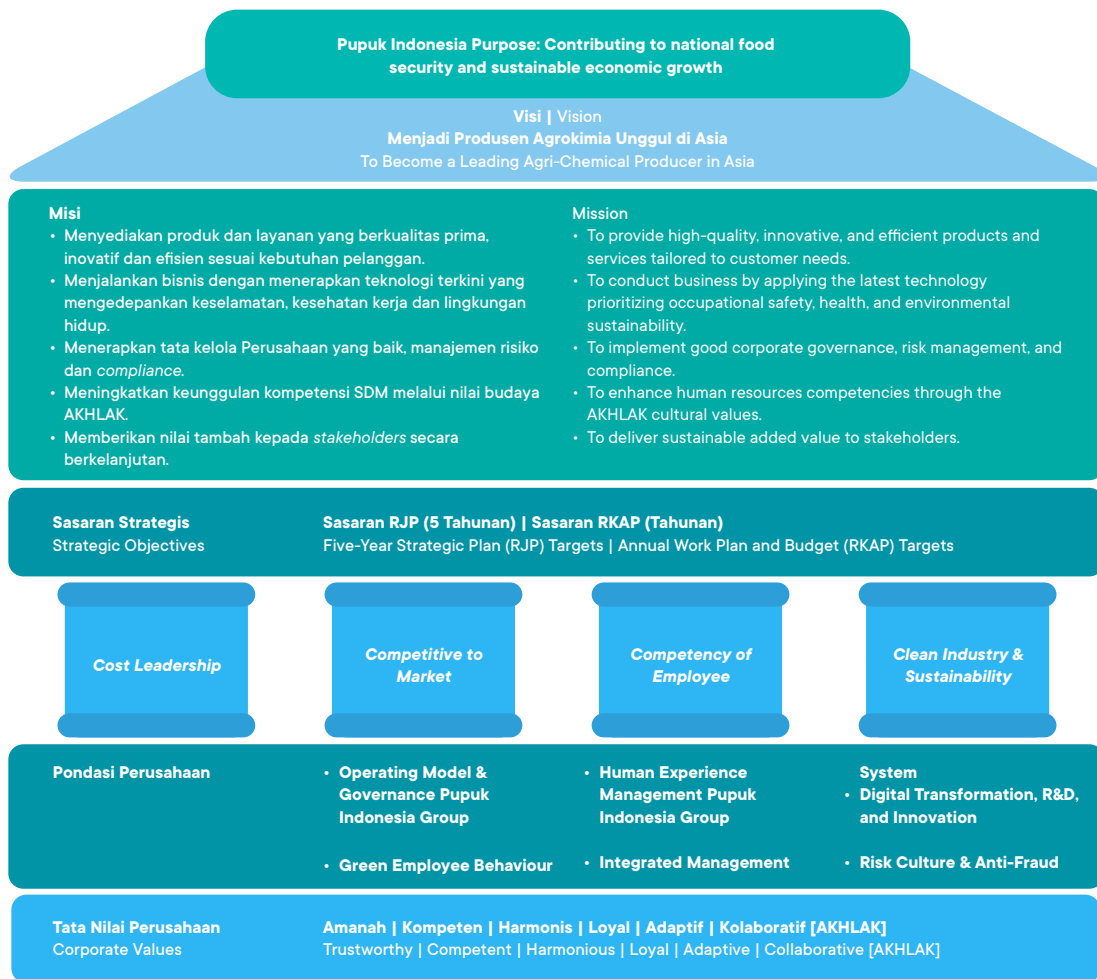
STRATEGIC HOUSE PUSRI

Mempertimbangkan dan mengantisipasi kondisi usaha di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang yang berkembang dinamis penuh tantangan tersebut, PUSRI telah menyiapkan dan mulai menjalankan inisiatif strategis, yang digambarkan dalam Strategic House PUSRI sebagai berikut.



PUSRI STRATEGIC HOUSE

Considering and anticipating the business conditions in 2024 and the coming years that are developing dynamically full of challenges, PUSRI has prepared and started implementing strategic initiatives, which are described in the PUSRI Strategic House as follows.



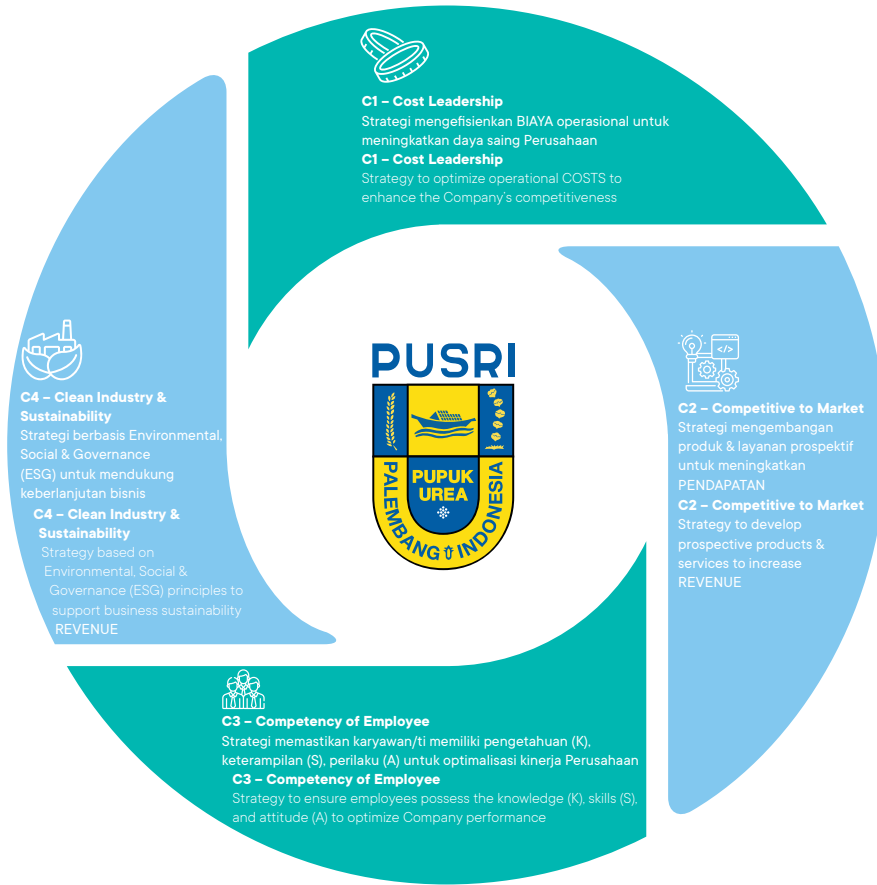
STRATEGI SEGMENT USAHA PUPUK DAN NON PUPUK 2024

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja segmen usaha pupuk dan non pupuk, PUSRI menjalankan strategi 4C (*cost leadership, competitive to market, competency of employee dan clean industry & sustainability*) yang dijabarkan dalam kerangka berikut ini:

STRATEGY FOR FERTILIZER AND NON-FERTILIZER BUSINESS SEGMENTS IN 2024

To enhance the productivity and performance of both the fertilizer and non-fertilizer business segments, PUSRI implements the 4C strategy (*cost leadership, competitive to market, employee competency, and clean industry & sustainability*), which is outlined in the following framework:

KONSEP STRATEGI 4C PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG 4C STRATEGY CONCEPT PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



INISIATIF STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2024 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG COMPANY STRATEGIC INITIATIVES IN 2024 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Cost Leadership

- Melanjutkan pembangunan pabrik Pusri IIIB sebagai tahapan revitalisasi pabrik P-III dan P-IV sesuai target schedule di tahun 2024
- Menyelesaikan proses penambahan pasokan gas bumi dari PHE Jambi Merang untuk kebutuhan operasional Perusahaan
- Melaksanakan *Operation & Maintenance Excellence* secara berkelanjutan
- Melakukan mitigasi atas kinerja Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja konsolidasi Perusahaan
- Melaksanakan program *cost reduction* berbasis risiko secara terstruktur dan terukur di seluruh lini bisnis Perusahaan
- Continue the construction of the Pusri IIIB plant as part of the revitalization phases of the P-III and P-IV plants according to the 2024 target schedule.
- Complete the process of increasing natural gas supply from PHE Jambi Merang to meet the Company's operational needs.
- Implement *Operation & Maintenance Excellence* on an ongoing basis.
- Mitigate the performance risks of Subsidiaries to optimize the Company's consolidated performance.
- Execute a structured and measurable risk-based cost reduction program across all business lines of the Company.

Competitive to Market

- Melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip 6 Tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat dan tepat harga) melalui kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku koordinator
- Melakukan tahap inkubasi dan *premarketing* pada produk hasil inovasi dan riset yang prospektif
- Melaksanakan optimalisasi pendapatan lain-lain (utamanya Jasa Pemeliharaan Pabrik dan aset) guna menunjang pencapaian laba Perusahaan
- Implement the distribution of subsidized fertilizers in accordance with applicable regulations and the "6 Rights" principles (right time, right amount, right type, right quality, right place, and right price) through collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero) as the coordinator.
- Conduct incubation and pre-marketing stages for promising products resulting from innovation and research.
- Optimize other revenues (primarily from Plant and Asset Maintenance Services) to support the Company's profit achievement.

Competency of Employee

Melanjutkan tahapan implementasi Transformasi SDM PI Group guna membangun budaya kerja *high performing* dan berdaya saing global
Continue the implementation phases of the PI Group HR Transformation to build a high-performing work culture with global competitiveness.

Clean Industry & Sustainability

Melaksanakan berbagai program dekarbonisasi dan inovasi sosial berkelanjutan guna mendukung target *Net-Zero Emission* Indonesia di tahun 2060 secara bertahap, antara lain uji coba penggunaan *co-firing* biomassa pada operasional STG & Boiler Batubara, *premarketing* produk Pusri Diesel Exhaust Fluid (DEF), pengembangan community development SESERA di Pulau Kemaro dan berbagai program lain mengedepankan konsep *Environment Social & Governance* (ESG)
Implement various decarbonization and sustainable social innovation programs to support Indonesia's gradual *Net-Zero Emission* target by 2060, including pilot testing of biomass *co-firing* in STG & coal boiler operations, *pre-marketing* of Pusri Diesel Exhaust Fluid (DEF) products, development of the SESERA community development program on Kemaro Island, and other initiatives emphasizing the *Environment, Social & Governance* (ESG) concept.

Berbagai program strategis yang dijalankan di tahun 2024 sebagai implementasi Inisiatif Strategis 4 C tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan pabrik Pusri IIIB sebagai tahapan revitalisasi pabrik P-III dan P-IV sesuai target *schedule* di tahun 2024
2. Menyelesaikan proses penambahan pasokan gas bumi dari PHE Jambi Merang untuk kebutuhan operasional Perusahaan
3. Melaksanakan *Operation & Maintenance Excellence* secara berkelanjutan
4. Melaksanakan program cost reduction berbasis risiko secara terstruktur dan terukur di seluruh lini bisnis Perusahaan
5. Melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip 6 Tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat dan tepat harga) melalui kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku koordinator.
6. Melakukan tahap inkubasi dan premarketing pada produk hasil inovasi dan riset yang prospektif
7. Melakukan mitigasi atas kinerja Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja konsolidasi Perusahaan
8. Melaksanakan optimalisasi pendapatan lain-lain (utamanya Jasa Pemeliharaan Pabrik dan aset) guna menunjang pencapaian laba Perusahaan
9. Melanjutkan tahapan implementasi Transformasi SDM Pupuk Indonesia Group guna membangun budaya kerja *high performing* dan berdaya saing global.
10. Melaksanakan berbagai program dekarbonisasi dan inovasi sosial berkelanjutan guna mendukung target Net-Zero Emission Indonesia di tahun 2060 secara bertahap, antara lain uji coba penggunaan co-firing biomassa pada operasional STG & Boiler Batubara, premarketing produk Pusri Diesel Exhaust Fluid (DEF), pengembangan *community development* SESERA di Pulau Kemaro dan berbagai program lain mengedepankan konsep Environment Social & Governance (ESG).



The various strategic programs implemented in 2024 as part of the 4 C Strategic Initiatives are as follows:

1. Continuing the construction of Pusri IIIB plant as a stage of revitalization of P-III and P-IV plants according to the target schedule in 2024.
2. Complete the process of adding natural gas supply from PHE Jambi Merang for the Company's operational needs
3. Implement *Operation & Maintenance Excellence* in a sustainable manner
4. Implement a structured and measurable risk-based cost reduction program in all lines of business of the Company
5. Carry out the distribution of Subsidized Fertilizers in accordance with applicable regulations and the 6 Right principles (right time, right amount, right type, right quality, right place and right price) through collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero) as the coordinator.
6. Conduct incubation and premarketing stages on prospective innovation and research products.
7. Mitigating the performance of subsidiaries to optimize the Company's consolidated performance
8. Carry out optimization of other income (mainly Plant and asset maintenance services) to support the achievement of the Company's profits
9. Continue the implementation stage of Pupuk Indonesia Group HR Transformation to build a high performing and globally competitive work culture.
10. Implementing various decarbonization programs and sustainable social innovations to support Indonesia's Net-Zero Emission target in 2060 in stages, including the trial use of biomass co-firing in STG & Coal Boiler operations, premarketing Pusri Diesel Exhaust Fluid (DEF) products, developing SESERA community development on Kemaro Island and various other programs promoting the concept of Environment Social & Governance (ESG).

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects



KEBIJAKAN PEMASARAN

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai produsen pupuk di Indonesia, Pusri memiliki kebijakan pemasaran yang sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, karena pupuk merupakan komoditas penting untuk sektor pertanian yang menopang perekonomian negara. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan pemasaran yang diterapkan oleh Pusri:

Permentan No 01 Tahun 2024 sebagai revisi Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang dijadikan sebagai acuan dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran. Pupuk merupakan komoditas yang penting dalam usaha mencapai ketahanan dan produksi pangan nasional.

Dalam Permentan 01 Tahun 2024, Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea, NPK dan NPK Formula khusus) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2024 untuk HET pupuk Organik sebesar Rp 800,-/kg, pupuk Urea dipatok sebesar Rp2.250 /kg, pupuk NPK Rp 2.300,- /kg, dan pupuk NPK formula khusus Rp 3.300,- /kg.

MARKETING POLICY

In order to fulfill its obligations as a fertilizer producer in Indonesia, Pusri has a marketing policy that is heavily influenced by government regulations, as fertilizers are a vital commodity for the agricultural sector, which supports the national economy. Below are several aspects of the marketing policy implemented by Pusri:

Permentan No. 01 of 2024, which is a revision of Permentan No. 10 of 2022 regarding the Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, is used as a reference for accurately and appropriately distributing subsidized fertilizers. Fertilizers are a crucial commodity in achieving national food security and production.

In Permentan No. 01 of 2024, subsidized fertilizers consist of organic and inorganic fertilizers (urea, NPK, and special formula NPK), with the Highest Retail Price (HET) set according to the Minister of Agriculture's Decree No. 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 concerning the Allocation and HET of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the year 2024. The HET for organic fertilizer is set at Rp 800 per kg, urea fertilizer at Rp 2,250 per kg, NPK fertilizer at Rp 2,300 per kg, and special formula NPK fertilizer at Rp 3,300 per kg.



Kemudian, penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah. Sedangkan pertimbangan penetapan alokasi e-RDKK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).



Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK dan SIMLUHTAN, pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data petani penerima dan kebutuhan dapat dilakukan pembaharuan ketika sistem e-RDKK dibuka. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai), Hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan Perkebunan (Tebu rakyat, kakao, kopi) dengan luas lahan yang diusahakan oleh petani maksimal 2(dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan maksimal 0,5 hektare. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing sesuai kemampuan produksi dengan prinsip efisien dan efektif.⁷⁸



PUSRI juga memanfaatkan distributor dan pengecer dalam rantai pasokan produknya sehingga dapat mencapai petani maupun pengguna akhir produk lainnya, khususnya untuk pupuk bersubsidi yang ada di wilayah rayon tahun 2024.



Distributor dan Pengecer / Kios PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Distributor and Retailers / Kiosks of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

No	Provinsi Province	Distributor	Kios Kiosk
1	Sumatera Selatan South Sumatra	40	525
2	Lampung	64	1.382
3	Bengkulu	9	349
4	Jambi	15	285
5	Kepulauan Babel Bangka-Belitung Islands	2	53
6	Jawa Tengah Central Java	189	4.837
7	DIY D.I. Yogyakarta	16	165
8	Jawa Timur East Java	58	2.552
9	Bali	9	141
Total		402	10.289

⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240430/12/1761750/kementan-tetap-kan-het-pupuk-subsidi-terbaru-2024-ini-perinciannya>

⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240430/12/1761750/kementan-tetap-kan-het-pupuk-subsidi-terbaru-2024-ini-perinciannya>

The distribution of subsidized fertilizer from retail kiosks to farmers is carried out based on data from the e-RDKK, with allocation limits per subdistrict set through the Regent/Mayor Decree. The subsidized fertilizer allocation is detailed by fertilizer type, quantity, and regional distribution. The determination of e-RDKK allocation and regional details is made by considering the area of irrigated rice fields and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B).

Farmers who are entitled to receive subsidized fertilizer must be members of a Farmer Group (Poktan) and registered in the e-RDKK and SIMLUHTAN. The data of recipient farmers can be evaluated every four months within the year, so the recipient data and fertilizer needs can be updated when the e-RDKK system is reopened. Subsidized fertilizer is intended for farmers engaged in food crop farming (rice, corn, soybeans), horticulture (chilies, shallots, garlic), and plantation crops (smallholder sugarcane, cocoa, coffee) with a maximum cultivated land area of 2 hectares per planting season. Priority is given to small farmers cultivating a maximum of 0.5 hectares. The procurement and distribution of subsidized fertilizer are carried out in accordance with the provisions of the Minister of Trade Regulation No. 04 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector. The implementation of subsidized fertilizer supply is entrusted by the Minister of SOEs to producers, distributors, and suppliers in their respective areas of responsibility, based on production capacity with principles of efficiency and effectiveness.

PUSRI also utilizes distributors and retailers within its supply chain to reach farmers and other end users, particularly for subsidized fertilizer in the 2024 rayon area.

Pusri memandang kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk mengembangkan usaha di masa depan dan oleh karenanya Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, salah satu Langkah yang dilakukan Perseroan adalah menjaga kualitas produk, serta melakukan proses bisnis dengan menjalankan prosedur operasi yang terakreditasi. Pusri selalu mengutamakan kepuasan pelanggan secara profesional melalui peningkatan standar mutu produk dan pelayanan sesuai dengan prinsip "6 Tepat", yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

Dasar prinsip "6 Tepat" tersebut adalah surat Direktur Komersil No. 82/H000.OT/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penjualan Pupuk Subsidi dan Komersil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan uraian :

Tepat Jenis

1. Pendistribusian pupuk ke wilayah kerja masing-masing produsen sesuai jumlah per jenis pupuk yang telah ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian yang berlaku
2. Melakukan kawalan teknologi agar petani melaksanakan pemupukan berimbang

Tepat Jumlah

1. Memenuhi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai SK Menteri Pertanian yang berlaku.
2. Memenuhi ketentuan stok sesuai Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku.
3. Melakukan distribusi pupuk ke Lini II/III sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan fungsi sarana distribusi (ekspediter, dan kapal) dan memperhatikan stok dan alokasi masing-masing wilayah.
4. Melakukan perencanaan dan evaluasi pengadaan melalui rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan

Tepat Harga

Harga jual di tingkat pengecer sesuai dengan HET

Tepat Tempat

1. Pendistribusian pupuk sesuai dengan wilayah kerja pertanian yang telah ditetapkan per produsen pupuk.
2. Tersedianya kios pengecer resmi di sentra lokasi pertanian.
3. Menyiapkan sarana gudang sesuai kebutuhan di Kabupaten.

Tepat Waktu

Tersedianya pupuk di Lini IV pengecer saat dibutuhkan oleh petani.

Tepat Mutu

Pengawasan terhadap mutu pupuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ISO 9001 dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pelaksanaan uji mutu oleh surveyor, baik untuk pupuk produksi sendiri dan impor di setiap lini.

Pusri views customer satisfaction as a key factor in driving future business growth, and therefore places it at the core of its service philosophy. To maintain customer satisfaction, one of the steps taken by the Company is to ensure consistent product quality and to conduct business processes in accordance with accredited operational procedures. Pusri is committed to prioritizing customer satisfaction in a professional manner by continuously enhancing product and service quality standards, guided by the "6 Rights" principle:

The foundation for the "6 Right" principles is outlined in the Director of Commercial's letter No. 82/H000.OT/2017 dated June 22, 2017, regarding the Minimum Service Standards for Subsidized and Commercial Fertilizer Sales, as detailed below:

Right Type

1. Distribute fertilizers to each producer's work area according to the type and quantity of fertilizer as stipulated in the Minister of Agriculture's Decree.
2. Implement technological oversight to ensure balanced fertilization by farmers.

Right Quantity

1. Fulfill the allocated subsidized fertilizer needs according to the applicable Minister of Agriculture's Decree.
2. Meet the stock requirements according to the applicable Minister of Agriculture's regulation.
3. Distribute fertilizer to Line II/III based on the needs, optimizing distribution facilities (expeditors, ships), and considering the stock and allocation for each area.
4. Plan and evaluate procurement through coordination meetings at least once a month or as needed.

Right Price

The sale price at the retailer level should comply with the Highest Retail Price (HET).

Right Place

1. Distribute fertilizers to the designated agricultural areas assigned to each fertilizer producer.
2. Ensure the availability of authorized retail kiosks at farming hubs.
3. Provide warehouse facilities as needed in each regency.

Right Time

Ensure that fertilizers are available at Line IV retailers when needed by farmers.

Right Quality

Oversee fertilizer quality in accordance with ISO 9001 and the Indonesian National Standard (SNI).

Conduct quality tests by surveyors for both self-produced and imported fertilizers at every distribution line.

STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan mengembangkan kegiatan pemasaran melalui berbagai strategi dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Customer Centric Model*, melalui *Customer Centric Model*, perusahaan memperkuat hubungan Kerja sama dengan Distributor dan *Retailer*, mengadakan pendekatan serta memberikan solusi kepada petani dengan menerapkan *Key Account Management* dengan penetapan harga yang terkoordinasi
2. Program Makmur merupakan program khusus untuk pendampingan intensif kepada para petani dalam budidaya pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan rantai pasok yang didukung teknologi berbasis *Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit)* untuk memakmurkan Petani Indonesia. Adapun manfaat yang ditawarkan kepada para petani dengan bergabung didalam program Makmur antara lain:
 - a. Membantu meningkatkan produktivitas pertanian
 - b. Membantu peningkatan keuntungan petani
 - c. Adopsi praktik pertanian unggul.
 - d. Mendorong penggunaan pupuk non-subsidi
3. Program Peningkatan Produktivitas Pangan Metode edukasi berupa pendampingan dan kawalan teknologi budidaya pertanian kepada petani atau kelompok tani yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan Penyuluh Pertanian tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.
4. Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan
 - a. Mengembangkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.
 - b. Mengembangkan *agrisolution services* untuk memastikan *customer stickiness*.
 - c. Mengembangkan riset institute dan melakukan riset pasar serta advokasi *policy development*.
 - d. Melakukan *market intelligent* terhadap kebutuhan pupuk oleh pihak perkebunan dan industri.
 - e. Memanfaatkan jaringan distributor dan pengecer eksisting dalam mencapai target penjualan sektor pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat.
 - f. Aktif melakukan penawaran kepada pembeli baru, baik dalam negeri maupun ekspor dengan jaminan *supply*.
 - g. Melakukan rekrutmen tenaga penjualan (asisten lapangan) yang berkompeten dalam bidang penjualan maupun agronomis.
 - h. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dan pengetahuan di bidang penjualan.
 - i. Peningkatan layanan dalam penjualan.
 - j. Menghilangkan penggunaan gancu baik di lini I,II dan III.
 - k. Survei dan Pemetaan terhadap kebutuhan pupuk.
 - l. Membangun *branding* produk melalui maskot produk.

MARKETING STRATEGY

The Company develops its marketing activities through various strategies and initiatives as follows:

1. *Customer Centric Model*
Through the *Customer Centric Model*, the Company strengthens its partnerships with distributors and retailers, engages in direct outreach, and provides solutions to farmers by implementing *Key Account Management* with coordinated pricing strategies.
2. *Makmur Program*
The *Makmur Program* is a special initiative providing intensive assistance to farmers in sustainable agricultural cultivation by involving the supply chain and utilizing technology based on the *Triple Bottom-Line 3P approach (People, Planet, Profit)*, aimed at improving the welfare of Indonesian farmers. The benefits offered to farmers who join the *Makmur Program* include:
 - a. Helping to increase agricultural productivity
 - b. Supporting increased farmer profitability
 - c. Adoption of best agricultural practices
 - d. Encouraging the use of non-subsidized fertilizers
3. *Food Productivity Enhancement Program*
This program provides educational support through hands-on guidance and technological assistance in agricultural practices to farmers or farmer groups. It is carried out in collaboration with district-level agricultural offices and sub-district agricultural extension officers to improve agricultural productivity.
4. *Marketing to Increase Sales Volume*
 - a. Developing products that meet the nutritional needs of crops
 - b. Developing *agrisolution services* to ensure customer loyalty
 - c. Establishing a research institute and conducting market research as well as policy advocacy
 - d. Conducting market intelligence on fertilizer needs in the plantation and industrial sectors
 - e. Leveraging the existing distributor and retailer network to meet sales targets in the food, horticulture, and smallholder plantation sectors
 - f. Actively making offers to new buyers, both domestic and export markets, with *supply assurance*
 - g. Recruiting competent sales personnel (field assistants) with expertise in both sales and agronomy
 - h. Providing training to improve sales competency and product knowledge
 - i. Enhancing sales service quality
 - j. Eliminating the use of metal hooks (gancu) across distribution lines I, II, and III
 - k. Conducting surveys and mapping of fertilizer needs
 - l. Building product branding through product mascots

PANGSA PASAR

Hingga saat ini, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional sekitar 24 juta ton. Sedangkan kebutuhan non subsidi juga terus berkembang, baik untuk persawahan, perkebunan maupun industri.

PUSRI sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang fokus pada bisnis pupuk, memiliki peran strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Khususnya di wilayah yang menjadi area bisnis Perusahaan, sehingga pangsa pasarnya menjadi dominan.

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI/PUPUK PSO

Pemerintah memberikan penugasan atau *Public Service Obligation* (PSO) kepada produsen pupuk untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk sampai ke tangan petani dengan prinsip '6 (enam) Tepat' Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Mutu.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menerima penugasan dari Pemerintah mengenai pengadaan dan pendistribusian pupuk PSO melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.04 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sebagai bagian dari rantai pasok pupuk, PUSRI bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di setiap lini distribusi. Oleh karena itu, PUSRI melakukan perencanaan untuk pengadaan yang dimulai dari ketersediaan stok di lini I, kesiapan armada kapal dan truk, bongkar muat di pelabuhan tujuan, sampai dengan kesiapan sarana pergudangan.

Perencanaan tersebut dilakukan guna memenuhi ketentuan stok minimum di lini III untuk kebutuhan 2 (dua) dan 3 (tiga) minggu mendatang pada puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari. Perencanaan ini dilakukan sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013. Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Skema Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi

Sesuai bagan di bawah, PUSRI memiliki skema alur distribusi pupuk yang menjadi panduan bagi Perusahaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Mengacu pada surat no.25756/A/PJ/C72/ET/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Sentralisasi Pelaporan dan Penagihan Pupuk Subsidi serta addendum kontrak PT Pupuk Indonesia – Kementan yang disetujui per tanggal 03 Juli 2023, maka mulai bulan Juli 2023 dan seterusnya untuk wewenang, tanggung jawab, proses penyaluran dan penagihan piutang atas pupuk subsidi diambil alih oleh PT Pupuk Indonesia.

MARKET SHARE

Up to this point, the national demand for subsidized fertilizer is approximately 24 million tons. Meanwhile, the demand for non-subsidized fertilizer continues to grow, both for rice fields, plantations, and industrial uses.

As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) focusing on the fertilizer business, PUSRI holds a strategic role in meeting this market demand, particularly within the Company's designated operational areas, where it maintains a dominant market share.

DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER/ PSO FERTILIZER

The Government assigns fertilizer producers a Public Service Obligation (PSO) to procure and distribute fertilizer to farmers based on the principle of the "6 Rights": the Right Time, Right Price, Right Type, Right Quantity, Right Place, and Right Quality.

PT Pupuk Indonesia (Persero) has been appointed by the Government to manage the procurement and distribution of PSO fertilizer, in accordance with the Ministry of Trade Regulation No. 04 dated January 2, 2023, concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector. As part of the fertilizer supply chain, PUSRI is responsible for ensuring the availability of subsidized fertilizer stock at every distribution level. To fulfill this responsibility, PUSRI carries out procurement planning starting from stock availability at Line I, readiness of sea and land transportation fleets, loading and unloading at destination ports, to the preparedness of warehouse facilities.

This planning is carried out to meet the minimum stock requirement at Line III for the upcoming 2 to 3 weeks during the peak planting season from November to January. The planning aligns with Article 10 of the Ministry of Trade Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated April 1, 2013, on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector.

Scheme of Subsidized Fertilizer Distribution Flow

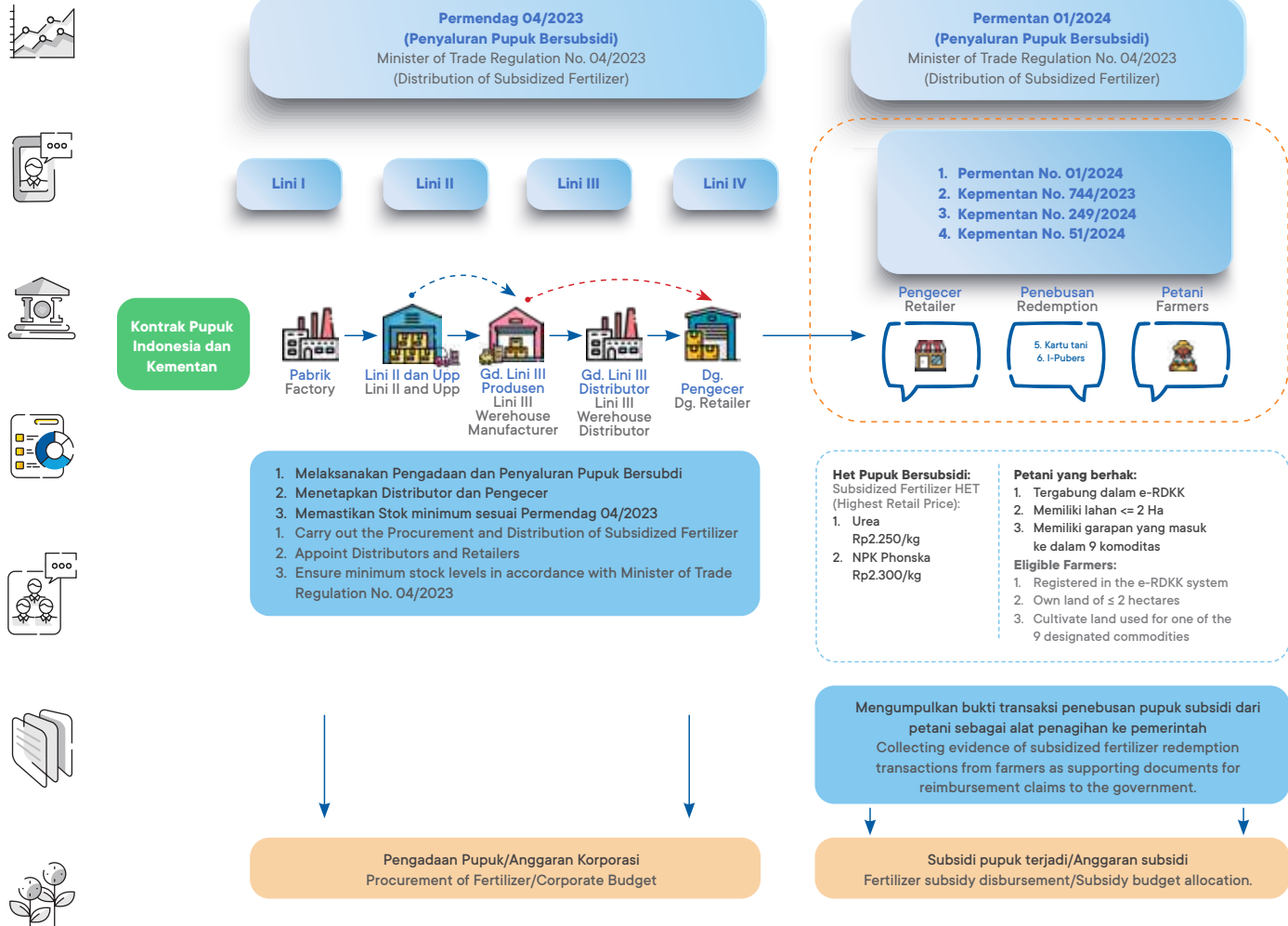
As illustrated in the diagram below, PUSRI follows a distribution flow scheme for subsidized fertilizers that serves as a guideline for the company. The explanation is as follows:

Referring to Letter No. 25756/A/PJ/C72/ET/2022 dated December 30, 2022, regarding the Implementation of Centralized Reporting and Billing for Subsidized Fertilizer and the addendum to the PT Pupuk Indonesia – Ministry of Agriculture contract approved on July 3, 2023, starting from July 2023 onwards, the authority, responsibilities, distribution process, and accounts receivable collection for subsidized fertilizers will be transferred to PT Pupuk Indonesia.

Skema Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi

Subsidized Fertilizer Distribution Flow Scheme

Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer Distribution Mechanism



Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini I hingga IV sesuai dengan prinsip '6 (enam) Tepat'. Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip tersebut dan memiliki/menguasai gudang di lini III pada wilayah tanggung jawabnya.

1. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai ke lini IV.
2. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip '6 (enam) Tepat' kepada petani dan atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
3. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dimulai dari pengajuan secara berjenjang mulai dari Pengecer sampai ke Produsen.

In accordance with Minister of Trade Regulation No. 04 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector, PT Pupuk Indonesia (Persero) is responsible for the procurement and nationwide distribution of subsidized fertilizer for the agricultural sector, from Line I to Line IV, based on the "6 Right Principles" (Right Time, Right Price, Right Type, Right Quantity, Right Place, and Right Quality). Producers are required to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizer based on these principles and must own or control warehouses in Line III within their respective areas of responsibility.

1. Distributors are responsible for distributing subsidized fertilizer from Line III to Line IV.
2. Retailers are responsible for distributing subsidized fertilizer to farmers and/or farmer groups under the "6 Right Principles," based on the Definitive Plan for Group Needs (RDKK).
3. The distribution of fertilizer to farmers/farmer groups begins with a hierarchical submission process starting from the Retailers to the Producers.

Guna menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, PUSRI menerapkan sistem penyaluran tertutup dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi menggunakan RDKK yang disusun oleh kelompok tani di lini empat pengecer. Adapun manfaat dari sistem distribusi tertutup tersebut adalah:

1. Mempermudah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pupuk bagi petani sesuai kebutuhannya.
3. Menciptakan penyaluran pupuk yang lebih efektif.

Dengan sistem distribusi tertutup, para petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi diharuskan membuat kelompok-kelompok serta menyusun rencana kebutuhan pupuk bagi kelompoknya. Rencana tersebut dituangkan dalam *form* RDKK yang diketahui oleh petugas Dinas Pertanian setempat. Dari RDKK inilah penyaluran pupuk PSO dilakukan. Kelengkapan dan keakuratan data menjadi kunci keberhasilan aplikasi sistem RDKK.

DIGITALISASI PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PUPUK PUSRI

Dalam rangka memonitoring perencanaan dan pengendalian operasional produksi berbasis digital, PT Pusri mengembangkan aplikasi Integrated Plant Management System (IPMS) yang menyediakan informasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. IPMS berfungsi untuk memantau performa operasi pabrik dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di lingkungan operasi dan produksi. Selain itu, guna mendukung optimasi pemeliharaan serta monitoring kesehatan, peralatan, dikembangkan pula aplikasi Asset Performance Management (APM) untuk pengelola aset pabrik sehingga proses produksi semakin efektif dan efisien.

PUSRI juga memiliki Sistem informasi *Stock Opname* untuk percepatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan *stock opname*. Selanjutnya ACIST PASTI Crawler merupakan teknologi pemeriksaan *Non Distruction Test* dengan menggunakan *Robotic Crawler* dan *Metode Phased Array* pada tube Katalis Reformer dan Analisis Data oleh AI ACIST. Serta *Interactive Process Display (IPD)* & *Smart Display Information (SDI)* yang merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data dari *multi platform control* yang ada di proses produksi ke dalam IoT.

Saat ini *Artificial Intelligence*, *Blockchain*, *Big Data*, dan *Connectivity* adalah hal yang sangat fundamental. Terlebih dalam bisnis untuk meraih potensi pertumbuhan terbaik dari berkembangnya ekosistem transaksi digital di Perusahaan.

Sampai dengan saat ini PT Pusri telah melaksanakan program kerja yang diturunkan dari ITMP 2020-2024 mencakup digitalisasi, infrastruktur, *cyber security* dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sebanyak 17 Aplikasi
2. Peningkatan Infrastruktur dengan implementasi Backup Server, sewa Cloud DRC (Disaster Recovery Center), penggantian SAN Storage, penggantian infrastruktur kabel Fiber Optic di Gedung Utama dan pergantian managable switch.
3. Peningkatan kapabilitas CyberSecurity.

To ensure the proper distribution of subsidized urea fertilizer and to prevent any irregularities in field distribution, PUSRI implements a closed distribution system using the RDKK, which is prepared by farmer groups at the fourth line (retailer level). The benefits of this closed distribution system include:

1. Facilitating better oversight of subsidized fertilizer distribution.
2. Ensuring availability and fulfillment of fertilizer needs for farmers based on actual demand.
3. Creating a more efficient and effective fertilizer distribution process.

Under the closed distribution system, farmers as end-users of subsidized fertilizer are required to form groups and develop a fertilizer requirement plan for their respective groups. This plan is documented in the RDKK form, which must be acknowledged by the local Agricultural Office officers. The distribution of subsidized fertilizer (PSO) is carried out based on the data in the RDKK. Completeness and accuracy of data are key to the successful implementation of the RDKK system.

DIGITALIZATION OF PUSRI'S PRODUCTION AND FERTILIZER DISTRIBUTION PROCESSES

To monitor the planning and control of digital-based production operations, PT Pusri has developed the Integrated Plant Management System (IPMS) application, which provides comprehensive upstream-to-downstream information. IPMS functions to monitor plant operation performance by integrating all existing applications within the operations and production environment. In addition, to support maintenance optimization and equipment health monitoring, the Asset Performance Management (APM) application has also been developed for plant asset management, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the production process.

PUSRI also utilizes the Stock Opname Information System to speed up the preparation, execution, and reporting of stock inventories. Additionally, ACIST PASTI Crawler, a non-destructive testing technology using Robotic Crawlers and the Phased Array Method on Reformer Catalyst Tubes, along with AI-driven Data Analysis by ACIST, has been implemented. Interactive Process Display (IPD) and Smart Display Information (SDI) systems have been integrated to merge data from various control platforms in the production process into the IoT.

Currently, Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, and Connectivity are fundamental elements, particularly in business, to unlock the best growth potential within the digital transaction ecosystem at the company.

As of now, PT Pusri has implemented work programs derived from the ITMP 2020-2024, which include digitalization, infrastructure, and cyber security, with the following details:

1. Development of 17 applications
2. Infrastructure improvements including the implementation of Backup Servers, renting Cloud DRC (Disaster Recovery Center), replacement of SAN Storage, replacement of Fiber Optic cable infrastructure in the Main Building, and replacement of manageable switches.
3. Enhancement of CyberSecurity capabilities.

Selain itu, PUSRI juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang meliputi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3, ISO 17025 (Laboratorium Kalibrasi & Laboratorium Pengujian), ISO 17043, ISO 50001, ISO 37001, ISO 22301, SMP (Sistem Manajemen Pengamanan), DUKS (Sertifikat Dermaga untuk Kepentingan Sendiri), dan ISO 27001.



SISTEM PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

Salah satu aspek penting dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada distributor mitra ialah ketepatan dan kecepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi. PUSRI memenuhi tantangan tersebut dengan menyempurnakan mekanisme penebusan melalui sistem dalam jaringan (*daring*).



Melalui sistem tersebut, PUSRI bekerja sama dengan bank-bank mitra secara *host-to-host* untuk sistem transaksi di bank dengan sistem penebusan pupuk bersubsidi di PUSRI.

RAYONISASI DAN ALOKASI PUPUK SUBSIDI

PUSRI menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea dan NPK. Untuk Urea, Rayon Subsidi mencakup Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan untuk NPK ialah Sumatera Selatan dan sebagian Lampung.



Additionally, PUSRI has developed and implemented management systems, which include ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3, ISO 17025 (Calibration & Testing Laboratories), ISO 17043, ISO 50001, ISO 37001, ISO 22301, SMP (Security Management System), DUKS (Self-Interest Dock Certification), and ISO 27001.

SUBSIDIZED FERTILIZER REDEMPTION SYSTEM

One of the key aspects in improving service quality to partner distributors is the accuracy and speed of subsidized fertilizer distribution. PUSRI addresses this challenge by enhancing the redemption mechanism through an online system.

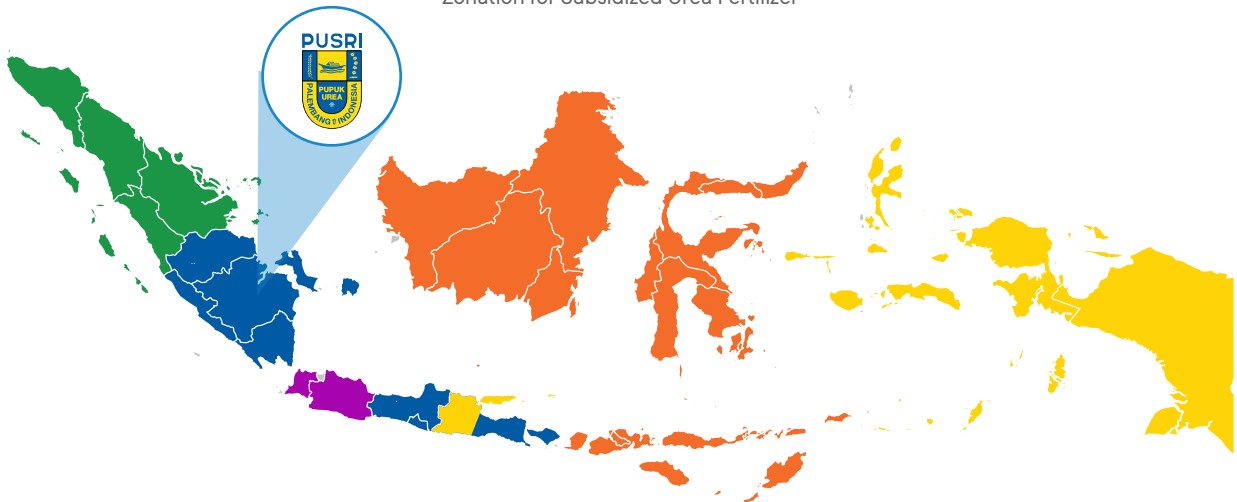
Through this system, PUSRI collaborates with partner banks via a host-to-host connection between the banking transaction system and PUSRI's subsidized fertilizer redemption system.

SUBSIDIZED FERTILIZER ZONATION AND ALLOCATION

PUSRI distributes two types of subsidized fertilizers: Urea and NPK. For Urea, the subsidized distribution zone includes Jambi, Bengkulu, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, Yogyakarta Special Region, parts of East Java, and Bali. Meanwhile, the NPK fertilizer distribution zone covers South Sumatra and parts of Lampung.

Rayonisasi Pupuk Urea Bersubsidi

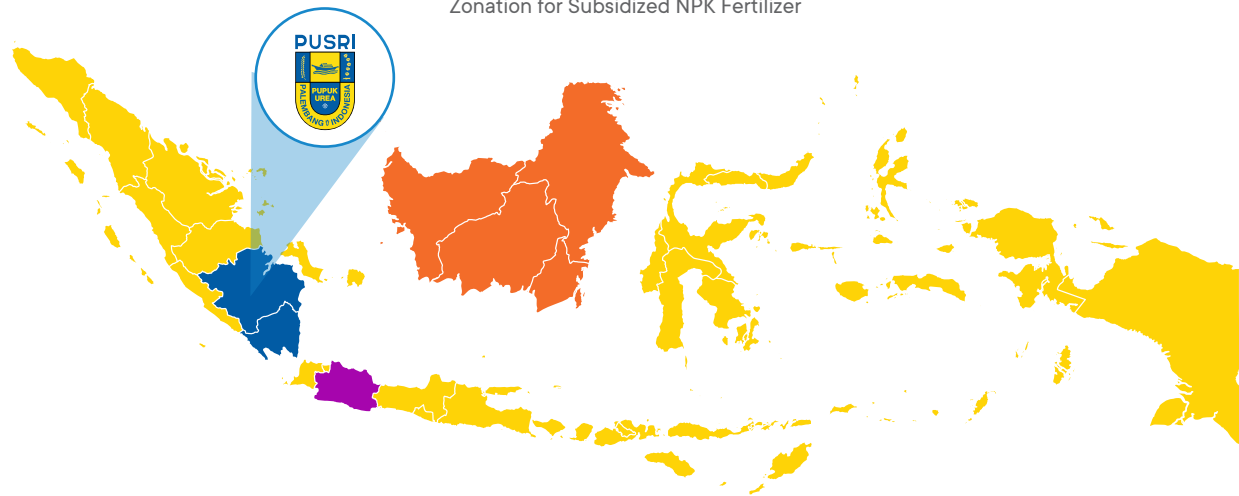
Zonation for Subsidized Urea Fertilizer



Provinsi Province	Kabupaten/Kota District/City
Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Sumatera Selatan South Sumatra	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Lampung Central Java	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Bangka Belitung	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities

Provinsi Province	Kabupaten/Kota District/City
Jawa Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota (Kecuali Brebes, Pemalang, Tegal, Kota Tegal) All Districts/Cities (Except Brebes, Pemalang, Tegal, and Tegal City)
DI Yogyakarta	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Bali	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities
Jawa Timur East Java	14 Kabupaten 14 Districts

Rayonisasi Pupuk NPK Bersubsidi Zonation for Subsidized NPK Fertilizer



Provinsi Province	Kabupaten/Kota	
Sumatera Selatan South Sumatra	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities	
Lampung	7 Kabupaten: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesisir Barat)	7 districts: West Lampung Regency North Lampung Regency Mesuji Regency Tulang Bawang Regency West Tulang Bawang Regency Way Kanan Regency Pesisir Barat Regency

- PT PUPUK ISKANDAR MUDA
- PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
- PT PUPUK KUJANG
- PT PUPUK PETROKIMIA GRESIK
- PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Target Distribusi Pupuk Bersubsidi PUSRI - 2024

PUSRI Subsidized Fertilizer Distribution Target - 2024

Provinsi Province	Urea	NPK
Jambi	17.701	-
Sumatera Selatan South Sumatra	142.954	168.478
Bengkulu	26.286	-
Lampung	349.531	260.010
Bangka Belitung	1.990	-
Jawa Tengah Central Java	705.090	-
DI Yogyakarta	49.280	-
Bali	37.109	-
Jawa Timur East Java	299.756	-
Jumlah Total	1.629.697	428.488

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Business Outlook and Forward Strategy



PROSPEK PEREKONOMIAN, PERMINTAAN UREA DAN AMONIA GLOBAL



Perekonomian global pada 2025 masih dihadapkan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh inflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Eropa, fragmentasi geo-ekonomi, kebijakan perdagangan yang masih perlu dicermati dan tingginya nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut membuat makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



IMF dalam *World Economic Outlook - Januari 2025*, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan mulai meningkat menjadi 3,3% atau sedikit meningkat dari prediksi capaian 3,2% di 2024.



Selaras dengan perkiraan pertumbuhan perekonomian global yang cenderung membaik, pertumbuhan permintaan urea diperkirakan kembali meningkat. Hal ini karena fungsinya yang sebagai sumber nitrogen, urea memainkan peran penting dalam mencukupi kebutuhan pangan populasi dunia dan mendukung proses industri. Kawasan Asia-Pasifik merupakan kontributor terbesar dalam produksi urea, menyumbang sekitar 66% dari kapasitas global. Urbanisasi yang cepat dan perubahan kebiasaan pola makan dari populasi kelas menengah yang terus meningkat, membuat wilayah Asia dan Afrika, akan terus berkontribusi signifikan terhadap permintaan urea global.



GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK AND FORECAST FOR UREA AND AMMONIA DEMAND

The global economy in 2025 continues to face rising risks and uncertainties. This situation aligns with economic recovery in advanced economies, which is overshadowed by persistent inflation, ongoing geopolitical tensions in Europe, geo-economic fragmentation, evolving trade policies, and the continued strength of the U.S. dollar. These challenges underscore the growing importance of inflation control efforts, fiscal consolidation, strong coordination between monetary and fiscal policies, and clear policy communication to strengthen macroeconomic stability and support economic growth.

According to the International Monetary Fund (IMF) in its *World Economic Outlook - January 2025*, global economic growth is projected to rise to 3.3% in 2025, a slight increase from the estimated 3.2% in 2024.

In line with this projected global economic improvement, demand for urea is also expected to rise. As a key nitrogen source, urea plays a vital role in meeting the world's food needs and supporting industrial processes. The Asia-Pacific region remains the largest contributor to global urea production, accounting for approximately 66% of global capacity. Rapid urbanization and shifting dietary patterns among the expanding middle class continue to drive strong demand for urea in Asia and Africa.

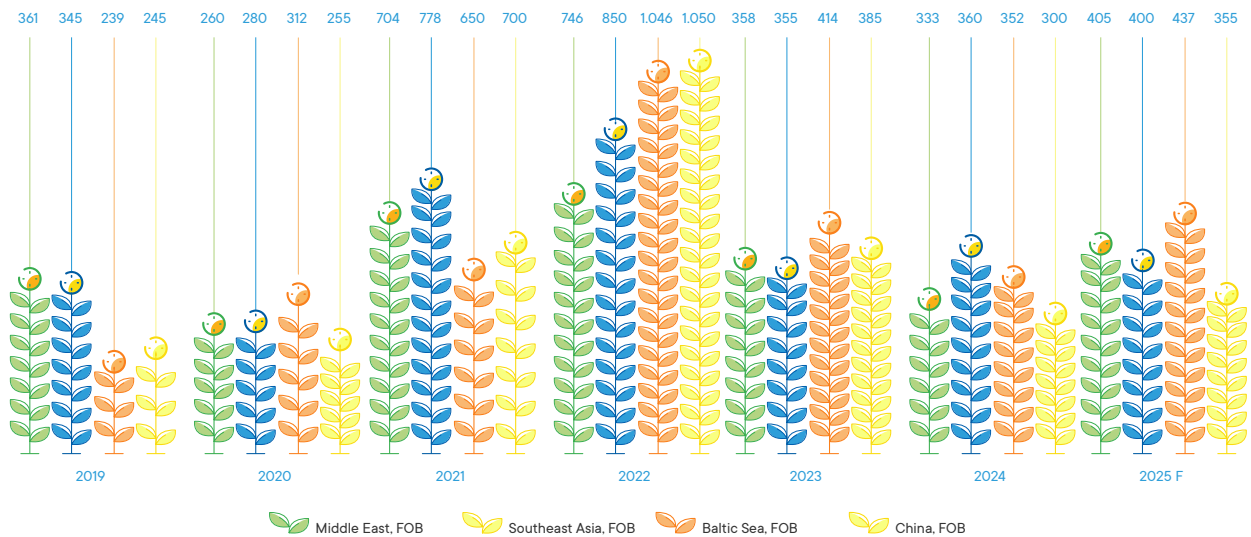
Negara-negara seperti Cina, India, dan Rusia merupakan kontributor utama dalam industri urea global, didukung oleh keberadaan fasilitas produksi pupuk yang besar dan sektor pertanian yang kuat. Wilayah-wilayah ini diuntungkan oleh ketersediaan bahan baku (gas alam untuk produksi amonia) dan akses ke pasar pertanian yang besar dengan permintaan tinggi. Cina menjadi negara terbesar dalam produksi, sekaligus konsumsi urea, oleh karenanya penerapan kebijakan pembatasan ekspor urea China akan memberi dampak terhadap harga urea global. Berkepanjangannya konflik Ukraina – Rusia juga mempengaruhi pasokan urea di pasar global, dan pada akhirnya mempengaruhi harga urea di pasar global.¹

Countries such as China, India, and Russia are major players in the global urea industry, supported by extensive fertilizer production facilities and strong agricultural sectors. These regions benefit from abundant raw materials (natural gas for ammonia production) and access to large agricultural markets with high demand. China, as the world's largest producer and consumer of urea, plays a pivotal role — and its export restriction policies have a direct impact on global urea prices. The prolonged Russia–Ukraine conflict also continues to disrupt urea supply in global markets, further influencing international price trends.⁷

Harga urea global pada tahun 2024 berfluktuasi di kisaran USD350–USD361 per metric ton, relatif sama harganya di tahun 2023 yang berkisar USD330–400 per metric ton. Harga urea global dua tahun terakhir tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai USD840–USD1,025 per metric ton. Sedangkan untuk tahun 2025 harga urea diproyeksikan menurun, dengan rata-rata sekitar \$300–350 per metric ton.

Global urea prices in 2024 fluctuated in the range of USD 350–361 per metric ton, similar to the 2023 range of USD 330–400 per metric ton. These prices are significantly lower than the peak levels seen in 2022, when urea reached USD 840–1,025 per metric ton. For 2025, urea prices are projected to decline further, averaging around USD 300–350 per metric ton.

Grafik Harga Urea Global
Global Urea Price Chart



Sumber: Publikasi Internasional

Di samping fluktuasi pertumbuhan ekonomi global dan tingginya inflasi, kebijakan negara pemasok utama urea ke pasar global, yaitu Tiongkok serta kondisi pasokan dari Timur Tengah berdampak terhadap harga urea internasional. Selama tahun 2023, dan kembali diberlakukan di tahun 2024, Tiongkok memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor urea untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang mengakibatkan terbatasnya pasokan urea di pasar global, membuat harga urea cenderung meningkat di tahun 2025.

In addition to fluctuations in global economic growth and high inflation, policies implemented by major urea-supplying countries, particularly China, and supply conditions in the Middle East have affected international urea prices. Throughout 2023, and reinstated in 2024, China imposed export restrictions on urea to meet its domestic demand. This policy has led to limited global urea supply, causing urea prices to trend upward in 2025.

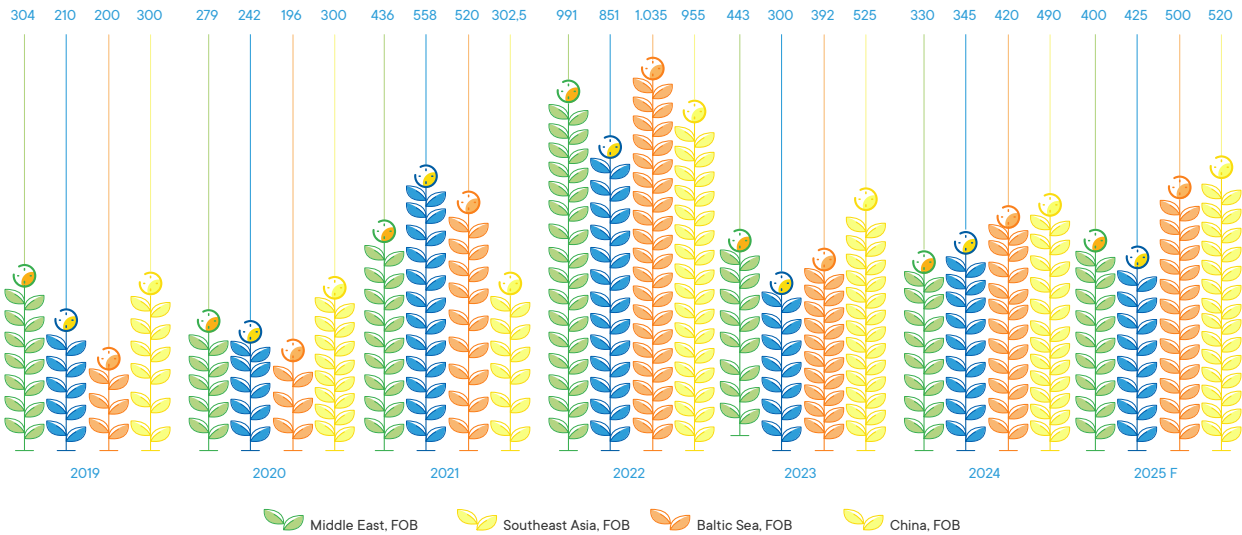
¹ <https://www.urea-market-outlook-2025-key-drivers-challenges-growth-chander-deep-delvc/>



Sementara itu, pasar amonia global diperkirakan akan menghadapi kondisi yang menantang dengan potensi kelebihan pasokan yang berdampak pada harga dan keuntungan produsennya, meskipun pasar diproyeksikan akan tumbuh karena meningkatnya permintaan pupuk, sebagai konsumen utama, dan kebutuhan aplikasi baru amonia. Produksi amonia sangat bergantung pada gas alam, yang merupakan *input* utama untuk produksi hidrogen, komponen utama dalam proses Haber-Bosch yang digunakan untuk memproduksi amonia. Fluktuasi harga gas alam dapat secara signifikan mempengaruhi biaya dan harga produksi amonia. Asia-Pasifik (termasuk Cina dan India) dan Timur Tengah diperkirakan akan menjadi wilayah pertumbuhan utama untuk pasar amonia global. Perang Rusia – Ukraina yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun 2025, diperkirakan masih akan menyebabkan gangguan rantai pasokan pupuk dan energi yang berdampak pada komoditas termasuk amonia.

Meanwhile, the global ammonia market is expected to face challenging conditions due to a potential oversupply, which could pressure prices and reduce producers' profit margins, despite projected market growth driven by increased demand from the fertilizer sector, as the primary consumer, and emerging applications of ammonia. Ammonia production is heavily dependent on natural gas, which serves as the main input for hydrogen production, a key component in the Haber-Bosch process used to manufacture ammonia. Fluctuations in natural gas prices can significantly impact the cost and pricing of ammonia production. The Asia-Pacific region (including China and India) and the Middle East are expected to be the key growth areas in the global ammonia market. The Russia-Ukraine war, which is anticipated to persist into 2025, is projected to continue disrupting fertilizer and energy supply chains, thereby affecting related commodities, including ammonia.

Grafik Harga Amonia Global
Global Ammonia Prices Chart



Harga amonia global pada tahun 2023 dengan rata-rata sekitar \$300-525 per ton menurun dibandingkan tahun 2022 dengan rata-rata sekitar \$851-1.035 per ton. Sedangkan untuk tahun 2024 harga amonia diperkirakan rata-rata sekitar \$330-490 per ton. Pergerakan harga amonia diproyeksikan akan berfluktuasi mengingat dinamika perekonomian global, konflik geopolitik (Rusia-Ukraina dan kawasan Timur Tengah) dan berlanjutnya kebijakan restriksi di negara produsen utama (Tiongkok).

The global ammonia price in 2023 averaged around \$300-525 per ton, showing a decrease compared to 2022, where it averaged around \$851-1,035 per ton. For 2024, ammonia prices are projected to average around \$330-490 per ton. Ammonia price movements are expected to fluctuate, influenced by global economic dynamics, geopolitical conflicts (Russia-Ukraine and the Middle East), and the continuation of restriction policies in major producing country (China).

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN PERMINTAAN PUPUK NASIONAL

Peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy) di 2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan perekonomian diperkirakan masih akan bertumpu pada lima lapangan usaha seperti pada tahun 2024, yaitu: industri pengolahan (18,98%), perdagangan (13,07%), pertanian (12,61%), konstruksi (10,09%) dan pertambangan (9,15%). Aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) mengindikasikan sektor tersebut terus berekspansi. Kebijakan yang diberlakukan antara lain tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan kemudahan iklim berinvestasi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia hingga sebesar 54,04% di tahun 2024, diharapkan tetap dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,03% dengan penggerak utama bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Industri pupuk diyakini masih akan menjadi industri yang prospektif mengingat pupuk merupakan komoditas yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan global maupun nasional. Hal ini tergambar dari tekad Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tanaman sebagai bagian dari program kedaulatan pangan. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk urea dan NPK Subsidi untuk Pupuk Indonesia sebesar 9,55 juta ton, dengan PUSRI mendapatkan alokasi penyaluran subsidi total sejumlah 2,058 juta ton.

Di samping penjualan dari alokasi subsidi, Perusahaan juga memanfaatkan peluang penjualan pupuk ke lahan sektor perkebunan dan hortikultura yang tidak masuk subsidi oleh pemerintah. Tanaman perkebunan yang menjadi target market antara lain sawit, kopi dan singkong. Adapun sesuai data statistik BPS tahun 2024 luas lahan untuk kopi 16,38 juta hektar dan kopi 786 ribu hektar.

Adapun berkaitan dengan pemasaran amonia di pasar domestik, sehubungan dengan telah beroperasinya pabrik amonia baru, yakni PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), maka pemasok kebutuhan amoniak sebagai bahan baku urea akan bertambah. Hal ini akan menjadikan Perusahaan mendapatkan alternatif pasokan bahan baku, manakala produksi amonia dari fasilitas sendiri mengalami kendala.

PROSPECTS FOR THE ECONOMY AND NATIONAL FERTILIZER DEMAND

The increase in economic activity in Indonesia is projected to continue, with an expected growth rate of 5.2% (yoy) in 2025. On the production side, economic growth is expected to remain focused on five key sectors, similar to 2024: manufacturing (18.98%), trade (13.07%), agriculture (12.61%), construction (10.09%), and mining (9.15%). Manufacturing activity, as reflected by the Purchasing Managers Index (PMI), indicates that the sector continues to expand. Policies in place will continue to encourage infrastructure development and improve the investment climate. Household consumption expenditure, contributing 54.04% to Indonesia's GDP in 2024, is expected to remain a driving force for national economic growth in 2025, as economic activities recover. For reference, national economic growth in 2024 reached 5.03%, with the main drivers being increased household consumption and investment.

The fertilizer industry is expected to remain a promising sector, as fertilizers are essential commodities for maintaining both global and national food security. This is reflected in the Indonesian government's determination to increase crop productivity as part of its food sovereignty program. To achieve this target, the government has allocated 9.55 million tons of subsidized urea and NPK fertilizers to Pupuk Indonesia, with PUSRI receiving a total subsidized distribution allocation of 2,058 million tons.

In addition to sales from subsidized allocations, the Company is also capitalizing on opportunities to sell fertilizers to the non-subsidized plantation and horticultural sectors. The plantation crops targeted as the market include oil palm, coffee, and cassava. According to BPS statistical data in 2024, the land area for oil palm was 16.38 million hectares, while coffee covered 786 thousand hectares.

Regarding ammonia marketing in the domestic market, with the operation of the new ammonia plant, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), the supply of ammonia as a raw material for urea will increase. This will provide the Company with an alternative source of raw material should there be any production challenges at its own facilities.

RENCANA JANGKA PANJANG

Dalam melaksanakan inisiatif strategis tahun 2024 PUSRI mengacu pada arah strategis Perusahaan yang dijabarkan dalam suatu Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan tahun 2020-2024. RJP tersebut disusun sebagai penunjang dalam memastikan pencapaian bertahap Visi Perusahaan. Potensi isu dan tantangan usaha Perusahaan periode 2020-2024, antara lain:

1. Rencana perubahan kebijakan subsidi pupuk
2. Efisiensi produksi pabrik eksisting
3. Fluktuasi harga komoditas di pasar internasional
4. Jaminan pasokan bahan baku utama produksi (gas bumi dan bahan baku NPK)
5. Aspek K3 dalam operasional pabrik dengan tingkat risiko sistemik A
6. Tahapan program Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Group
7. Pendapatan lain-lain dari Jasa Pemeliharaan Pabrik, aset dan komersialisasi produk hasil riset/inovasi belum optimal
8. Tren industri hijau dan kemajuan teknologi pertanian guna mendukung target *Net-Zero Emission* Indonesia di tahun 2060

Di samping itu, sejalan dengan telah berakhirnya periode RJP 2020-2024, pada tahun 2024 Perusahaan secara bertahap telah menginisiasi penyusunan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2025-2029 yang diawali dengan pembaharuan Visi dan Misi Perusahaan guna menyelaraskan arah strategis Pupuk Indonesia Group 2025-2029 dan rencana subholdingisasi pada periode 2025-2026. Secara umum, RJP yang disusun Perusahaan menitikberatkan pada pertumbuhan nilai dan kinerja berkelanjutan sehingga mendukung tercapainya kinerja konsolidasi Pupuk Indonesia Group yang lebih baik. Berikut beberapa rencana aksi korporasi yang disertakan pada rancangan RJP 2025-2029:

1. Menyelesaikan tahap pembangunan pabrik Pusri IIIB
2. Melaksanakan peningkatan efisiensi terhadap pabrik Amonia Urea eksisting
3. Melaksanakan pengembangan kapasitas pabrik NPK
4. Menunjang program subholdingisasi dan *streamlining* Pupuk Indonesia Group

Dalam mendukung peningkatan efisiensi korporat dan keandalan pabrik, PUSRI melaksanakan revitalisasi pabrik Pusri-III dan Pusri-IV menjadi pabrik Pusri-IIIB. Kondisi saat ini, efisiensi produksi pabrik Pusri-III dan PUSRI IV tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pabrik pesaing yang tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap daya saing PUSRI di kawasan Asia.

LONG-TERM PLAN

In implementing the strategic initiatives for 2024, PUSRI refers to the Company's strategic direction outlined in the 2020-2024 Long-Term Plan (RJP). The RJP was developed as a support framework to ensure the phased achievement of the Company's vision. The potential business issues and challenges for the 2020-2024 period include:

1. Planned changes in fertilizer subsidy policies
2. Efficiency improvements for existing production plants
3. Fluctuations in international commodity prices
4. Assurance of supply for key raw materials (natural gas and NPK raw materials)
5. Health, Safety, and Environment (HSE) aspects in plant operations with systemic risk levels categorized as A
6. Phases of the Pupuk Indonesia Group Business Transformation Program
7. Optimization of non-operating income from plant maintenance services, assets, and commercialization of research/innovation products
8. Green industry trends and advancements in agricultural technology to support Indonesia's Net-Zero Emission target by 2060

Furthermore, with the conclusion of the 2020-2024 RJP period, the Company has gradually initiated the development of the 2025-2029 Long-Term Plan, starting with the revision of the Company's vision and mission to align with the strategic direction of the Pupuk Indonesia Group for the 2025-2029 period, including plans for subholding formation in 2025-2026. Overall, the RJP developed by the Company focuses on growth in value and sustainable performance, thereby supporting the achievement of improved Pupuk Indonesia Group consolidation performance. The following corporate action plans are included in the 2025-2029 RJP draft:

1. Completing the construction phase of the Pusri IIIB plant
2. Implementing efficiency improvements for the existing Ammonia Urea plants
3. Expanding the capacity of the NPK plant
4. Supporting the subholding formation and streamlining of the Pupuk Indonesia Group

In supporting corporate efficiency improvements and plant reliability, PUSRI is revitalizing the Pusri-III and Pusri-IV factories into the Pusri-IIIB factory. Currently, the production efficiency of the Pusri-III and Pusri-IV factories is not competitive when compared to competing factories, which will significantly affect PUSRI's competitiveness in the Asian market.

Memperhatikan pergerakan harga amonia dan urea internasional beberapa tahun terakhir yang telah memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha PUSRI pada industri pupuk, semakin meningkatkan kebutuhan PUSRI untuk segera merealisasikan pembangunan pabrik Pusri-III B. Dengan adanya pabrik Pusri-III B diharapkan akan memberikan keunggulan bagi PUSRI dalam memproduksi amonia dan urea lebih efisien dan dapat bersaing dengan pesaing yang memiliki teknologi produksi terbaru dengan keunggulan biaya produksi yang lebih kompetitif.

Dalam diversifikasi produk, PUSRI telah melakukan riset pengembangan produk non urea spesifik lokasi dan komoditas dengan diluncurkannya NPK Kopi dan NPK Singkong. PUSRI mengimplementasikan Program Transformasi Pupuk Indonesia Group dalam bentuk program transformasi penjualan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan subsidi, yaitu Program Makmur/Agrosolution, *Customer Centric Model*, dan *Service Level Agreement (SLA)* untuk konsumen korporasi. Disamping mengantisipasi perubahan kebijakan subsidi, Program Makmur/Agrosolution juga bertujuan memberikan dukungan kepada petani Indonesia melalui terjaminnya penyediaan sarana produksi pertanian termasuk kawalan teknologi pertanian hingga terjaminnya permintaan serta harga jual produk pertanian. Program strategis ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Digitalisasi pada seluruh lini usaha merupakan fondasi dalam mendukung efisiensi dengan fokus pada bidang produksi, penjualan dan rantai pasok juga telah dijalankan. Hal itu diwujudkan melalui implementasi digital *plant fertilizer*, pengembangan retail *management system*, digitalisasi pergudangan, monitoring proses distribusi produk dan kondisi stok di wilayah distribusi guna menunjang S&OP konsolidasi Pupuk Indonesia Group.

Dari aspek pengelolaan Human Capital, PUSRI mengimplementasikan berbagai Program Transformasi SDM Pupuk Indonesia Group, antara lain: manajemen talenta, manajemen kinerja, budaya inovasi dan transformasi budaya AKHLAK untuk menciptakan SDM kelas dunia dan berkinerja tinggi.

Berbagai program yang dirancang diharapkan menunjang *milestone* pencapaian visi PUSRI, mengakselerasi kinerja usaha dan menunjang keberlanjutan usaha.

Considering the international price movements of ammonia and urea in recent years, which have pressured the sustainability of PUSRI's fertilizer business, there is an increasing need for PUSRI to immediately realize the construction of the Pusri-III B factory. The establishment of the Pusri-III B factory is expected to provide PUSRI with a competitive advantage in producing ammonia and urea more efficiently and allow it to compete with rivals that have the latest production technology and more competitive production cost advantages.

In product diversification, PUSRI has conducted research on the development of non-urea products specific to locations and commodities, resulting in the launch of NPK Kopi (Coffee NPK) and NPK Singkong (Cassava NPK). PUSRI implements the Pupuk Indonesia Group Transformation Program in the form of a sales transformation program to anticipate changes in subsidy policies, namely the Makmur/Agrosolution Program, Customer-Centric Model, and Service Level Agreement (SLA) for large corporate customers. In addition to anticipating changes in subsidy policies, the Makmur/Agrosolution Program also aims to provide support to Indonesian farmers through guaranteed agricultural production inputs, including agricultural technology support, ensuring demand, and guaranteeing the sale prices of agricultural products. Ultimately, this strategic program is expected to improve the welfare of farmers.

Digitalization across all business lines serves as the foundation for supporting efficiency, focusing on production, sales, and supply chain management, which has also been implemented. This is realized through the implementation of digital plant fertilizer, the development of a retail management system, digitalization of warehousing, monitoring product distribution processes, and stock conditions in distribution areas to support Pupuk Indonesia Group's S&OP consolidation.

In terms of Human Capital management, PUSRI implements various Pupuk Indonesia Group HR Transformation Programs, including talent management, performance management, innovation culture, and AKHLAK cultural transformation to create world-class, high-performing human resources.

The various programs designed are expected to support the milestone achievement of PUSRI's vision, accelerate business performance, and ensure business sustainability.

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Performance Review by Business Segment



Perekonomian global sepanjang tahun 2024, mulai menunjukkan perbaikan, kendati masih dibayang-bayangi risiko ketidakpastian yang mengakibatkan ketidakstabilan. Kondisi tersebut diakibatkan beberapa faktor seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, harga komoditas yang *volatile*, dampak perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, konflik Palestina-Israel yang merebak disertai gangguan keamanan di sekitar Laut Merah oleh pemberontak Houthi di Yaman, serta ancaman perubahan iklim. Seluruh kondisi tersebut mempengaruhi kinerja PUSRI, sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.



TINJAUAN OPERASIONAL



PUSRI mengoperasikan 4 (empat) unit pabrik dengan masing-masing pabrik terdiri atas beberapa bagian, yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.



The global economy throughout 2024 began to show signs of improvement, although it remained overshadowed by the risks of uncertainty, which led to instability. This situation was caused by several factors, such as the slowdown in China's economic growth, volatile commodity prices, the prolonged impact of the Russia-Ukraine war, the escalating Palestine-Israel conflict, along with security disturbances around the Red Sea caused by Houthi rebels in Yemen, and the looming threat of climate change. All of these conditions have impacted PUSRI's performance, as outlined in the following description.

OPERATIONAL REVIEW

PUSRI operates 4 (four) plant units, each consisting of several sections, as outlined in the table below.

No	Pabrik Plants	Uraian Description
1	Pabrik Amonia Ammonia Factory	<p>Pabrik Amonia PUSRI menghasilkan Amonia dengan kapasitas produksi mencapai 1,47 juta ton per tahun. Bahan baku pembuatan Amonia adalah gas alam, uap air (<i>steam</i>), dan udara. Secara garis besar, proses di pabrik Amonia dibagi menjadi 4 (empat) unit dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Unit Feed Treating Gas Alam yang masih mengandung kotoran (<i>impurities</i>) harus dibersihkan dahulu di unit ini, agar tidak menimbulkan keracunan pada katalis di unit <i>Reforming</i>. Unit Reforming Gas Alam yang sudah bersih direaksikan dengan <i>steam</i> di <i>Primary Reformer</i> kemudian dengan udara di <i>Secondary Reformer</i> pada temperatur tinggi. Hasil reaksi berupa gas hidrogen, dengan hasil samping gas karbon dioksida dan nitrogen. Unit Purifikasi & Metanasi Karbon dioksida hasil reaksi yang terbawa dalam gas proses, dipisahkan di unit ini karena berpotensi membentuk karbamat dan meracuni katalis di reaktor Amonia . Unit Compression Synloop & Refrigerant Gas proses direaksikan dengan tekanan tinggi di reaktor Amonia sehingga terbentuk gas Amonia. Gas Amonia ini kemudian masuk ke unit Refrigerant sehingga diperoleh Amonia dalam fasa cair <p>PUSRI Ammonia Plant produces ammonia with a production capacity of 1.47 million tons per year. The raw materials for ammonia production are natural gas, steam, and air. In general, the process at the ammonia plant is divided into 4 (four) units in the following order:</p> <ol style="list-style-type: none"> Feed Treating Unit Natural gas, which still contains impurities, must first be cleaned in this unit to prevent poisoning of the catalyst in the reforming unit. Reforming Unit The cleaned natural gas is reacted with steam in the Primary Reformer and then with air in the Secondary Reformer at high temperatures. The reaction produces hydrogen gas, with carbon dioxide and nitrogen as by-products. Purification & Methanation Unit The carbon dioxide from the reaction carried along with the process gas is separated in this unit because it can form carbamate and poison the catalyst in the ammonia reactor. Compression Synloop & Refrigerant Unit The process gas is reacted under high pressure in the ammonia reactor, resulting in ammonia gas. This ammonia gas then enters the Refrigerant unit, where ammonia in a liquid phase is obtained.

No	Pabrik Plants	Uraian Description
2	Pabrik Urea Urea Plant	<p>Kapasitas pabrik urea PUSRI mencapai 2,33 juta ton per tahun. Proses pembuatan urea menggunakan bahan baku Amonia cair dan gas karbon dioksida yang disuplai dari pabrik Amonia. Proses pembuatan urea ini terbagi menjadi enam unit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Sintesa Unit ini berfungsi membentuk larutan urea dengan mereaksikan Amonia cair dan gas karbon dioksida pada tekanan 175 kg/ cm G. Hasil samping dari reaksi ini adalah ammonium karbamat. 2. Unit Purifikasi Ammonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan Amonia di unit Sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan. 3. Unit Kristaliser Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum dengan pemanasan, kemudian kristal ureanya dipisahkan di <i>centrifuge</i>. 4. Unit <i>Prilling</i> Kristal urea keluaran centrifuge dikeringkan sampai kandungan air 0,2% berat dan dikirimkan ke bagian atas <i>Prilling Tower</i> untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke seluruh distributor. Dari distributor, lelehan urea dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah <i>tower</i> sehingga menghasilkan produk urea butiran (<i>prill</i>). 5. Unit <i>Recovery</i> Gas Amonia dan gas karbon dioksida yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan dua langkah absorpsi kemudian <i>direct cycle</i> kembali ke unit sintesa. 6. Unit <i>Process</i> Kondensat <i>treatment</i> sejumlah kecil urea, Amonia, dan karbon dioksida yang terbawa kondensat di <i>crystallizer</i> diolah dan dipisahkan di <i>stripper</i> dan <i>hydrolizer</i>. Gas karbon dioksida dan gas Amonia tersebut dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk <i>direct recovery</i>, sedangkan air kondensatnya dikirim ke utilitas. <p>PUSRI Urea Plant has a production capacity of 2.33 million tons per year. The urea production process uses liquid ammonia and carbon dioxide gas as raw materials, both supplied from the Ammonia Plant. The urea production process is divided into six units as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Synthesis Unit This unit functions to form urea solution by reacting liquid ammonia with carbon dioxide gas at a pressure of 175 kg/cm²G. A by-product of this reaction is ammonium carbamate. 2. Purification Unit Unconverted ammonium carbamate and excess ammonia from the Synthesis Unit are decomposed and separated through a process of pressure reduction and heating. 3. Crystallizer Unit The urea solution from the Purification Unit is crystallized under vacuum and heated in this unit. The resulting urea crystals are then separated using a centrifuge. 4. Prilling Unit Urea crystals from the centrifuge are dried until the moisture content reaches 0.2% by weight, then sent to the top of the Prilling Tower to be melted and evenly distributed to all distributors. From the distributors, the molten urea is dropped downward while being cooled by upward airflow in the tower, resulting in granular (prill) urea products. 5. Recovery Unit Ammonia gas and carbon dioxide gas, separated during purification, are recovered through a two-step absorption process and then recycled back to the Synthesis Unit. 6. Process Unit Condensate treatment handles small amounts of urea, ammonia, and carbon dioxide carried in the crystallizer condensate. These components are processed and separated in the stripper and hydrolyzer. The recovered carbon dioxide and ammonia gases are returned to the Purification Unit for reuse, while the condensate water is sent to the utilities system.
3	Pabrik Utilitas Utilities Plant	<p>Merupakan pabrik yang menghasilkan bahan- bahan pembantu maupun energi yang dibutuhkan oleh pabrik Amonia dan pabrik urea PUSRI. Produk yang dihasilkan dan diolah dari pabrik utilitas ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih 2. Air pendingin 3. Air demin 4. Udara pabrik dan instrumen 5. Listrik 6. <i>Steam</i> <p>This plant produces auxiliary materials and energy required by PUSRI's Ammonia and Urea Plants. The products generated and processed by the Utilities Plant include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean water 2. Cooling water 3. Demineralized water 4. Plant air and instrument air 5. Electricity 6. Steam

No	Pabrik Plants	Uraian Description
4	Pabrik NPK NPK Plant	<p>Pabrik NPK fusi PUSRI menggunakan teknologi <i>steam fused granulation</i> dengan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton per tahun. Bahan baku utama yang digunakan adalah urea produksi PUSRI, <i>Diammonium Phosphate</i> (DAP), dan <i>Kalium Clorida</i> (KCl). Pengoperasian pabrik NPK dilakukan secara kontinyu. Bahan baku diumpukan menggunakan <i>weight feeder</i> untuk kemudian digranulasi, dikeringkan, didinginkan dan diayak sesuai ukuran produk. Selanjutnya, produk NPK dilapisi <i>coating oil</i> sebelum dikantongi.</p> <p>PUSRI's NPK Fusion Plant uses steam-fused granulation technology with a production capacity of 300,000 tons per year. The main raw materials used are PUSRI-produced urea, Diammonium Phosphate (DAP), and Potassium Chloride (KCl). The NPK plant operates on a continuous process. Raw materials are fed using a weight feeder, then undergo granulation, drying, cooling, and screening to meet the desired product size. The final NPK product is then coated with oil before being packaged.</p>

Kapasitas Terpasang Pabrik PUSRI

Installed Plant Capacity of PUSRI

No	Pabrik PUSRI PUSRI Plant	Kapasitas Terpasang Urea (ton/tahun) Installed Urea Capacity (tons/year)	Kapasitas Terpasang Amonia (ton/tahun) Installed Ammonia Capacity (tons/year)	Nilai Investasi Pabrik Plant Investment Value	Mulai Beroperasi Commencement of Operations
1	Pusri-III	285.000	330.000	USD85.734.452	Desember 1976 December 1976
2	Pusri-IV	570.000	330.000	USD192.000.000	November 1977 November 1977
3	Pusri-IB	570.000	446.000	USD326.883.626	Desember 1994 December 1994
4	Pusri-IIB	908.000	660.000	USD657.091.278	Oktober 2016 October 2016

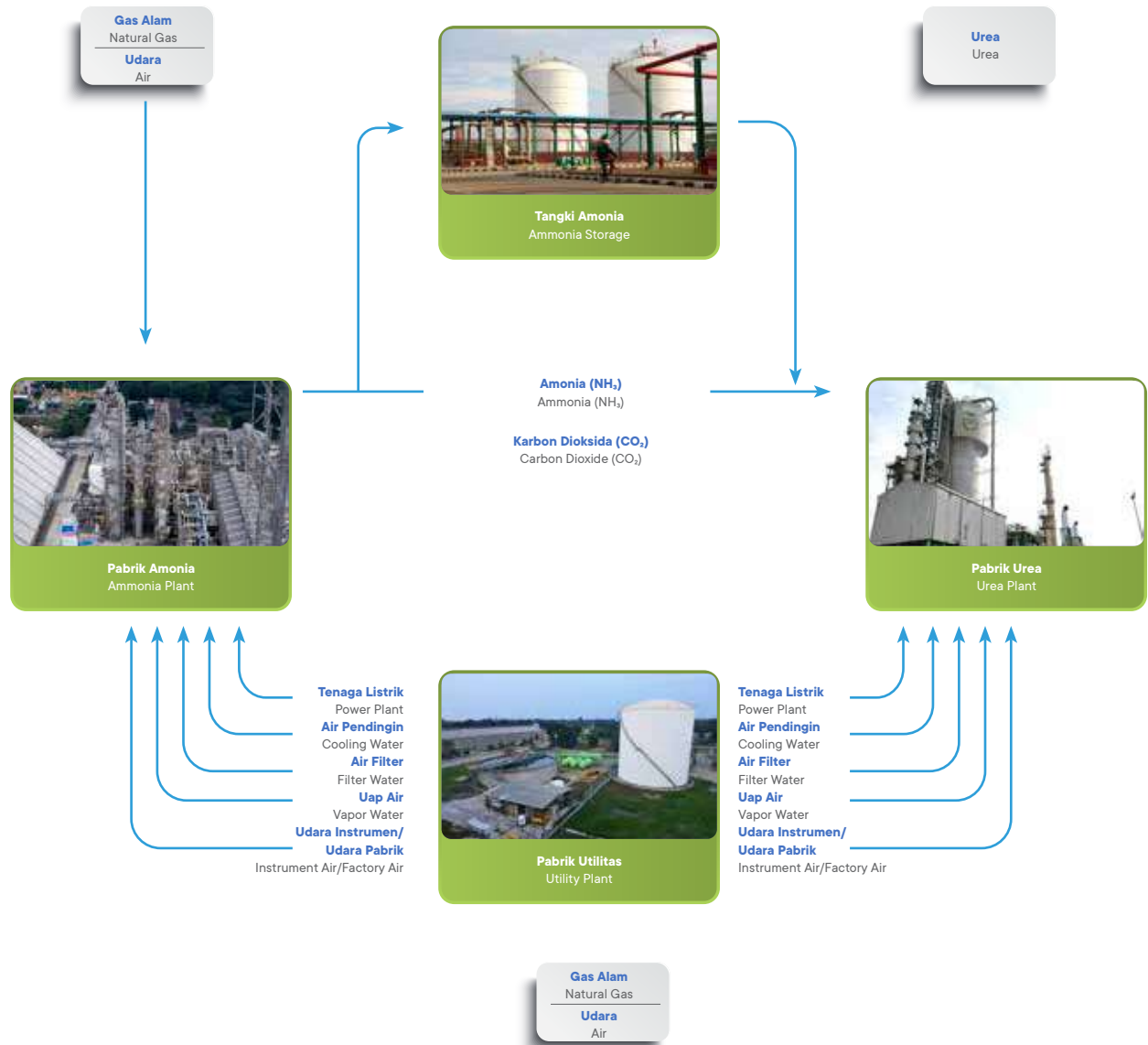
No.	Pabrik PUSRI PUSRI Plant	Kapasitas Terpasang Urea (ton/tahun) Installed Urea Capacity (tons/year)	Nilai Investasi Pabrik Plant Investment Value	Mulai Beroperasi Produksi Commencement of Operations
1	Pusri NPK-I	100.000	Rp169.691.059.202	Januari 2016 January 2016
2	Pusri NPK-II	200.000	Rp484.478.573.137	Februari 2020 February 2020

Adapun proses produksi pupuk di PUSRI tergambar pada bagan berikut.

The fertilizer production process at PUSRI is illustrated in the following diagram.

Proses Produksi Pupuk di PUSRI

Fertilizer Production Process at PUSRI



PRASARANA PENUNJANG

PUSRI memiliki perangkat dan sarana untuk menyalurkan pupuk hingga ke pelanggan. Rantai pasokan tersebut terdiri dari kantor perwakilan, dermaga/pelabuhan, unit pengantongan, gudang lini I/II, serta distributor dan pengecer.

1. Kantor Perwakilan

PUSRI memiliki kantor perwakilan di setiap ibu kota provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, yang disebut dengan Kantor PUSRI Penjualan Daerah (PPD). Kantor perwakilan berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam penjualan produk dan mewakili kepentingan perusahaan di daerah.

2. Dermaga/Pelabuhan

Untuk mendukung proses pendistribusian produk baik domestik maupun ekspor, PUSRI memiliki 7 (tujuh) dermaga yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna mengeluarkan hasil produksi di lini I pabrik selain menggunakan jalur darat (via truk). Dermaga tersebut juga dapat digunakan sebagai pelabuhan bongkar untuk bahan baku, maupun batu bara apabila dibutuhkan. Adapun dermaga dan kapasitas muat adalah sebagai berikut:

Dermaga 1 Dock 1	Pupuk in bag <1.000 ton & NH ₃ Bagged fertilizer <1,000 tons & NH ₃
Dermaga 2 Dock 2	Pupuk curah Bulk fertilizer
Dermaga 3 Dock 3	Pupuk in bag >1.000 ton Bagged fertilizer >1,000 tons
Dermaga 4 Dock 4	Pupuk in bag >1.000 ton Bagged fertilizer >1,000 tons
Dermaga 5 Dock 5	Pupuk curah Bulk fertilizer
Dermaga 6 Dock 6	Bongkar muat STG batu bara Coal loading and unloading (STG)
Dermaga 7 Dock 7	Pupuk in bag Bagged fertilizer

3. Unit Pengantongan

Sebagai upaya menjaga kualitas produk, PUSRI melakukan pengiriman pupuk curah dari Palembang yang selanjutnya akan disuplai ke unit pengantongan yang ada di beberapa daerah dengan rincian:

Lini I (2D, BS 2 & BS 3/4) Line I (2D, BS 2 & BS 3/4)	Kapasitas 1.460.000 ton/tahun Capacity: 1,460,000 tons/year
Lini II (UPP Semarang, UPP Cilacap, UPP Belawan, UPP Meneng) Line II (UPP Semarang, UPP Cilacap, UPP Belawan, UPP Meneng)	Kapasitas 1.900.000 ton/tahun Capacity: 1,900,000 tons/year

SUPPORTING INFRASTRUCTURE

PUSRI is equipped with facilities and systems to distribute fertilizer to its customers. This supply chain consists of representative offices, docks/ports, bagging units, line I/II warehouses, as well as distributors and retailers.

1. Representative Offices

PUSRI operates representative offices in every provincial capital across Sumatra, Java, West Kalimantan, and South Kalimantan, referred to as Regional Sales Offices (PPD - PUSRI Penjualan Daerah). These offices serve as the technical executors of product sales and represent the company's interests in their respective regions.

2. Docks/Ports

To support the distribution of products both domestically and for export, PUSRI operates seven (7) docks dedicated for internal use to dispatch production output from the Line I plants, in addition to land transportation (by truck). These docks can also function as unloading ports for raw materials or coal when needed. The docks and their loading capacities are as follows:

3. Bagging Units

As part of efforts to maintain product quality, PUSRI distributes bulk fertilizer from Palembang, which is then supplied to bagging units located in several regions, with the following details:

4. Gudang Lini II/III

Dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini I sampai dengan lini IV sesuai dengan prinsip ‘6 (enam) Tepat’ yaitu Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Mutu.

Selain itu, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dengan memiliki/ menguasai gudang lini III pada wilayah tanggung jawabnya. Berdasarkan kondisi tersebut, saat ini gudang yang dioperasikan oleh PUSRI untuk wilayah subsidi dan non subsidi, baik gudang milik maupun sewa adalah sebagai berikut:

Milik (29 gudang yang digunakan oleh PUSRI)
Owned (29 warehouses used by PUSRI)

Stockholder dan pengelola TKBM oleh pihak ketiga
Stockholder and TKBM managed by third parties

Sewa (82 gudang yang digunakan oleh PUSRI)
Rented (82 warehouses used by PUSRI)

Stockholder dan pengelola TKBM oleh pihak ketiga
Stockholder and TKBM managed by third parties

5. Distributor dan Pengecer

PUSRI juga memanfaatkan distributor dan pengecer dalam rantai pasokan produknya sehingga dapat mencapai petani maupun pengguna akhir produk lainnya, khususnya untuk pupuk bersubsidi yang ada di wilayah rayon. Untuk tahun 2024 terdapat 369 Distributor dan 10.179 kios sebagai rantai pasok yang mendukung kegiatan distribusi pupuk subsidi PUSRI di wilayah rayon yang dikelola, sebagaimana disampaikan pada uraian “Kebijakan Pemasaran”.

4. Line II/III Warehouses

Under the Regulation of the Minister of Trade No. 15/2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) oversees the procurement and distribution of subsidized fertilizer across Indonesia’s agricultural sector—from Line I to Line IV—based on the principle of the “Six Rights”: Right Time, Right Price, Right Type, Right Quantity, Right Place, and Right Quality.

Moreover, producers are required to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizer by owning or controlling Line III warehouses within their designated areas of responsibility. Based on these requirements, the warehouses currently operated by PUSRI in both subsidized and non-subsidized areas, whether company-owned or rented, are as follows:

5. Distributors and Retailers

PUSRI also utilizes distributors and retailers within its product supply chain to reach farmers and other end users, particularly for subsidized fertilizers in the rayon regions. As of 2024, there are 369 distributors and 10,179 kiosks in the supply chain that support the distribution of PUSRI’s subsidized fertilizers within the rayon regions managed by the company, as outlined in the “Marketing Policy” section.

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

Business Segment Performance Review



PUSRI membagi kinerja segmen usahanya menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pupuk, non pupuk, dan lain-lain. Dua dari tiga produk tersebut, yakni pupuk dan non pupuk dilakukan segmentasi berdasarkan pasar, yakni dalam negeri dan ekspor serta berdasarkan hubungan dengan pelanggan yakni sektor subsidi dan non-subsidi. Informasi lebih lanjut mengenai kinerja masing-masing segmen usaha dibahas sebagai berikut.

PUPUK

Segmen usaha pupuk mencakup kegiatan produksi, distribusi dan penjualan produk, yaitu urea dan NPK. Produk pupuk tersebut merupakan hasil dari produksi pabrik Perusahaan yang dijual ke sektor Public Service Obligation (PSO) dan non PSO (dalam negeri dan ekspor).

Produk urea dihasilkan dari Pabrik P-IB, Pabrik P-II, Pabrik P-III, Pabrik P-IV dan Pabrik P-IIB. Pabrik-pabrik tersebut memiliki penilaian dan tingkat kesehatan pabrik bidang produksi. Sedangkan produk NPK dihasilkan dari Pabrik NPK *Fusion* yang dimiliki dan dikelola oleh PUSRI.

PUSRI divides its business segment performance into 3 (three) parts: fertilizers, non-fertilizers, and others. Two of these three products, namely fertilizers and non-fertilizers, are segmented based on the market, which includes domestic and export markets, as well as based on customer relationships, which are classified as subsidized and non-subsidized sectors. Further information on the performance of each business segment is discussed below.

FERTILIZERS

The fertilizer business segment includes the production, distribution, and sale of products, namely urea and NPK. These fertilizer products are the result of production at the Company's plants and are sold to the Public Service Obligation (PSO) sector and non-PSO (domestic and export markets).

Urea is produced at the P-IB, P-II, P-III, P-IV, and P-IIB plants. These plants are assessed for their production capabilities and plant health. Meanwhile, NPK products are produced at the NPK Fusion Plant, which is owned and operated by PUSRI.

Aspek Produksi Pupuk

Pada tahun 2024, total produksi pupuk PUSRI adalah sejumlah 2.221.216 ton, menurun 5,02% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 2.338.628 ton. Penurunan ini, terutama disebabkan Pabrik Urea beroperasi dengan rate tidak optimal akibat keterbatasan suplai gas alam pada semester 1 dan gangguan listrik (*electric failure*).

Produksi urea sepanjang tahun buku tercatat 1.857.832 ton, menurun 7,58% dari realisasi produksi tahun 2023 yang sebesar 2.010.279 ton. Sedangkan produksi NPK naik 10,67% dari posisi tahun 2023 yang sebesar 328.349 ton, menjadi 363.384 ton per 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut selaras dengan naiknya permintaan dan terpenuhinya suplai bahan baku.

Selama tahun 2024 PUSRI mendapatkan tambahan pasokan gas alam dari PHE Jambi Merang. Berikut gambaran pasokan bulanan gas alam total tahun 2024.

Total Pasokan Gas Alam Perbulan 2024

Total of Monthly Natural Gas Supply 2024

		2024						Jumlah Total
Bulan Month		Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	60.816.599
Satuan Unit	MMBTU	3.431.958	4.433.605	5.101.166	5.130.335	5.226.724	5.201.862	
Bulan Month		Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December	
Satuan Unit	MMBTU	5.240.479	5.673.205	5.491.160	5.101.345	5.354.772	5.429.989	

Fertilizer Production Aspect

In 2024, PUSRI's fertilizer production amounted to 2,221,216 tons, a decrease/increase of 5.02% from the 2023 realization of 2,338,628 tons. This increase was primarily caused by the Urea Plant operating at a suboptimal rate due to limited CO2 supply and electrical disturbances (*electric failure*).

Urea production for the year was recorded at 1,857,832 tons, a decrease of 7.58% compared to the 2023 production of 2,010,279 tons. Meanwhile, NPK production decreased by 10.67% from the 2023 figure of 328,349 tons, reaching 363,384 tons as of December 31, 2024. The decline was due to one of the production warehouses being at full capacity.

During 2024, PUSRI received additional natural gas supply from PHE Jambi Merang. The following presents the monthly supply overview of natural gas from total in 2024.

Tabel Realisasi Produksi Pupuk (Urea & NPK)

Table of Fertilizer Production Realization (Urea & NPK)

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Urea				
Pabrik Pusri- IB (ton) Pusri-IB Plant (tons)	401.122	498.087	(96.965)	(19,47)
Pabrik Pusri- IIB (ton) Pusri-IIB Plant (tons)	904.612	968.362	(63.750)	(6,58)
Pabrik Pusri-III (ton) Pusri-III Plant (tons)	235.430	277.889	(42.459)	(15,28)
Pabrik Pusri- IV (ton) Pusri-IV Plant (tons)	316.668	265.941	50.727	19,07
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Tonnage (tons)	1.857.832	2.010.279	(152.447)	(7,58)
Kapasitas Produksi (ton) Production Capacity (tons)	2.333.000	2.333.000	-	0,00
Rasio Gas Bumi (MMBTU/ ton) Natural Gas Ratio (MMBTU/ton)	31.07	29.84	1.23	4,12
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	4.170.627	3.743.665	426.962	11,40

Tabel Realisasi Produksi Pupuk (Urea & NPK)

Table of Fertilizer Production Realization (Urea & NPK)

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
NPK				
Pabrik NPK Fusion I (ton) NPK Fusion Plant I (tons)	181.686	142.226	39.460	27,74
Pabrik NPK Fusion II (ton) NPK Fusion Plant II (tons)	181.698	186.123	(4.425)	(2,38)
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Tonnage (tons)	363.384	328.349	35.035	10,67
Kapasitas Produksi (ton/ tahun) Production Capacity (tons/year)	300.000	300.000	-	0,00
Rasio Konsumsi Bahan Baku (Bahan Baku/ ton) Raw Material Consumption Ratio (Raw Material/ton)	1,49	1,53	(0,04)	(2,29)
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	5.541.827	7.395.708	(1.853.881)	(25,07)
Jumlah Tonase Produksi Pupuk (ton) Total Fertilizer Production Tonnage (tons)	2.221.216	2.338.628	(117.412)	(5,02)

Realisasi Penjualan Pupuk

Sepanjang tahun 2024, PUSRI berhasil menjual pupuk Urea dan NPK total sejumlah 2.284.990 ton, naik 4,77% dari realisasi penjualan tahun sebelumnya yang sebesar 2.188.553 ton.

Seiring terjadinya sedikit kenaikan tonase penjualan tersebut, nilai penjualan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 12,93 triliun, naik 3,27% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp12,52 triliun. Kenaikan nilai penjualan pupuk ini terutama dikontribusikan oleh bertambahnya volume penjualan pupuk, sementara rata-rata harga jual sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fertilizer Sales Realization

Throughout 2024, PUSRI successfully sold a total of 2,293,021 tons of Urea and NPK fertilizer, an increase of 4,77% compared to the previous year's realization of 2,188,553 tons.

In line with the slight increase in sales tonnage, the sales value also experienced a decrease/increase to Rp12.93 trillion, up by 3.27% from the 2023 realization of Rp12.52 trillion. This was primarily due to the El Niño phenomenon, which occurred from August to October 2023, causing fertilizer sales to fall short of optimal levels.

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk

Table of Fertilizer Sales Realization

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Tonnage (tons)				
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	1.735.698	1.695.038	40.660	2,40
Pupuk Non Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	549.292	493.515	55.777	11,30
Jumlah Total	2.284.990	2.188.553	96.437	4,77
Nilai Penjualan (Rp juta) Sales Value (Rp million)				
Pupuk Subsidi (PSO) Subsidized Fertilizer (Public Service Obligation/PSO)	3.088.860	3.021.270	67.590	2,24

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk

Table of Fertilizer Sales Realization

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Nilai Subsidi Pupuk Fertilizer Subsidized Value	6.557.432	6.639.664	(82.232)	(1,24)
Pupuk Non Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	2.964.312	2.883.218	81.094	2,81
Jumlah Total	12.610.604	12.544.152	66.452	0,53

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Subsidi Perbulan 2024

Table of Monthly Realization of Subsidized Urea Fertilizer Sales in 2024

2024								Jumlah Total
Bulan Month		Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	
Satuan Unit	Ton	73.192,25	105.134,50	101.871,75	90.656,00	144.467,10	120.652,15	1.340.556
Bulan Month		Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December	
Satuan Unit	Ton	118.090,90	96.909,95	105.824,80	138.872,95	142.041,70	102.841,85	

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Non Subsidi Perbulan 2024

Table of Monthly Realization of Non-Subsidized Urea Fertilizer Sales in 2024

2024								Jumlah Total
Bulan Month		Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	
Satuan Unit	Ton	24.480,02	32.174,17	46.650,66	41.766,17	49.039,44	73.292,11	543.223
Bulan Month		Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December	
Satuan Unit	Ton	68.688,48	48.376,69	43.146	56.328	18.301	40.980	

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Total Perbulan 2024

Table of Monthly Realization of Total Urea Fertilizer Sales in 2024

2024								Jumlah Total
Bulan Month		Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	
Satuan Unit	Ton	97.672,27	137.308,67	148.522,41	132.422,17	193.506,54	193.944,26	1.883.779
Bulan Month		Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December	
Satuan Unit	Ton	186.779,38	145.286,64	148.971	195.201	160.343	143.822	

Penjualan Berdasarkan Sektor

Penjualan pupuk berdasarkan sektor untuk tahun 2024 didominasi oleh sektor pangan bersubsidi dengan kontribusi sebesar 77,96% (2023: 77,45%) atau sejumlah 1.735.698 ton. Angka tersebut meningkat 2,40% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni 1.695.038 ton. Kenaikan tersebut dikontribusikan oleh bertambahnya jumlah alokasi penyaluran pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Pada sektor pangan tersebut, volume penjualan produk Urea menurun sebesar 3,18% yaitu menjadi sebesar 1.340.556 ton dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1.384.540 ton. Sementara itu, volume penjualan produk NPK mencatatkan kenaikan sebesar 27,26% menjadi 395.142 ton pada tahun 2024, dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 310.498 ton.

Total penjualan pupuk PUSRI pada tahun 2024 adalah sebesar 2.284.990 ton, meningkat 4,41% dari total penjualan pupuk di tahun 2023 yang sebesar 2.188.553 ton.

Sales By Sector

Fertilizer sales by sector in 2024 were dominated by the subsidized food sector, contributing 77.96% (2023: 77.45%) or 1,735,698 tons. This figure represents an increase of 2.40% compared to the previous year's realization of 1,695,038 tons. This was due to the distribution of subsidized fertilizer being adjusted in accordance with the allocation set by the Ministry of Agriculture. Within the food sector, sales of Urea experienced a decrease of 3.18%, amounting to 1,340,556 tons compared to 1,384,540 tons in 2023. Meanwhile, sales of NPK fertilizer recorded a rise/fall of 27.26%, reaching 395,142 tons in 2024, compared to 310,498 tons in 2023.

The total fertilizer sales of PUSRI in 2024 amounted to 2,284,990 tons, reflecting an increase of 4.41% from the total fertilizer sales in 2023 of 2,188,553 tons.

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Sektor Pangan Food Sector				
Urea	1.340.556	1.384.540	(43.984)	(3,18)
NPK	395.142	310.498	84.644	27,26
Jumlah Penjualan Sektor Pangan (Ton) Total Sales in the Food Sector (Tons)	1.735.698	1.695.038	40.660	2,40
Sektor Komersial Commercial Sector				
Urea				
Kebun Plantation	245.024	248.367	(3.343)	(1,35)
Industri Industry	7.285	19.013	(11.728)	(61,68)
Ritel Retail	122.130	88.052	34.078	38,70
Ekspor Export	168.784	134.180	34.604	25,79
Jumlah Penjualan Urea Sektor Komersial (Ton) Total Urea Sales in the Commercial Sector (Tons)	543.223	489.612	53.611	10,95
NPK	6.069	3.902	2.167	55,54
Jumlah Penjualan Pupuk Sektor Komersial (Ton) Total Fertilizer Sales in the Commercial Sector (Tons)	549.292	493.514	55.778	11,30
Total Penjualan Pupuk (Ton) Total Fertilizer Sales (Tons)	2.284.990	2.188.552	96.438	4,41

Penjualan Berdasarkan Pasar

PUSRI juga membagi penjualan pupuk Urea dan NPK berdasarkan pasar, yakni domestik dan ekspor. Secara volume, penjualan pupuk domestik tahun 2024 naik sebesar 3,01% menjadi 2.116.205 ton dari tahun sebelumnya, sebesar 2.054.373 ton. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh adanya tambahan alokasi subsidi sehingga perusahaan fokus pada pemenuhan subsidi.

Sementara itu penjualan ekspor sepanjang tahun 2024 juga meningkat lebih besar, yakni naik 25,79%, dari 134.180 ton pada tahun 2023 menjadi 168.784 ton. Kenaikan volume penjualan ekspor tersebut dikontribusikan oleh keberhasilan Perusahaan memanfaatkan dinamika meningkatnya permintaan pupuk di pasar global, di tengah keterbatasan pasokan.

Secara nilai, penjualan di dalam negeri tercatat mencapai nilai sebesar Rp11,67 triliun, naik 1,82% dari tahun 2023 yang sebesar Rp11,80 triliun. Adapun nilai penjualan ekspor pada tahun 2024 adalah sebesar Rp913,91 miliar, naik 26,96% dari capaian tahun sebelumnya yang senilai Rp719,83 miliar. Selain dikontribusikan oleh naiknya tonase penjualan, dinamisnya harga jual komoditi Urea dan Amonia secara global dibandingkan tahun lalu turut memberikan dampak terhadap bertambahnya nilai penjualan.

Sales by Market

PUSRI also categorizes its Urea and NPK fertilizer sales based on market segments, domestic and export markets. In terms of volume, domestic fertilizer sales in 2024 increase by 3.01% to 2.116.205 tons from the previous year's 2,054,373 tons. This decline was due to an increase in subsidy allocations, prompting the company to focus on fulfilling subsidized fertilizer needs.

Meanwhile, export sales throughout 2024 declined by 25.79%, from 134,180 tons in 2023 to 168,784 tons. This was because the company prioritized meeting the subsidized allocation following the additional quotas provided by the Government.

In terms of value, domestic sales amounted to Rp11.67 trillion, an increase of 1.82% from Rp11.80 trillion in 2023. Meanwhile, export sales in 2024 reached Rp913.91 billion, a decrease of 26.96% from the previous year's Rp719.83 billion. In addition to the decline in sales volume, the drop in global selling prices of Urea and Ammonia compared to the previous year also contributed to the decline in sales value.

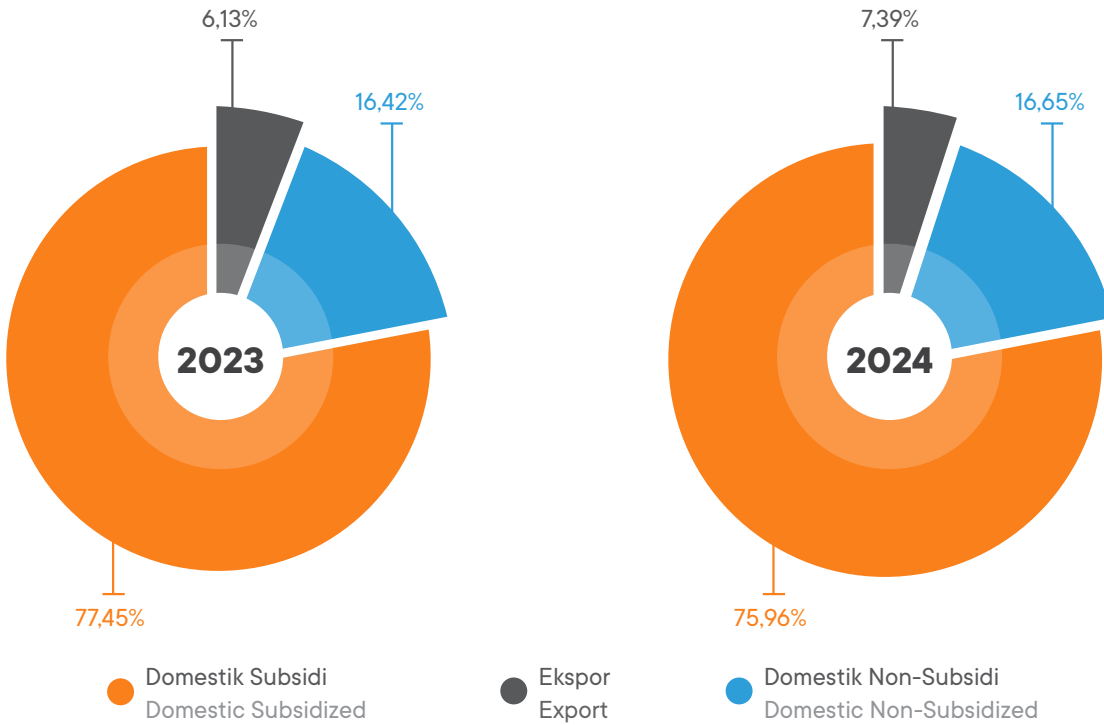
Tabel Penjualan Pupuk Urea dan NPK Berdasarkan Pasar

Table of Urea and NPK Fertilizer Sales by Market

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Tonnage (tons)				
Domestik Domestic	2.116.205	2.054.373	61.832	3,01
• Subsidi Subsidized	1.735.698	1.695.038	40.660	2,40
• Non Subsidi Non-Subsidized	380.508	359.334	21.174	5,89
Ekspor Export	168.784	134.180	34.604	25,79
Total Tonase Penjualan (Ton) Total Sales Tonnage (Ton)	2.284.989	2.188.553	96.438	4,41
Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)				
Domestik Domestic	11.667.017	11.800.321	(133.304)	(1,13)
• Subsidi Subsidized	9.646.292	9.660.934	(14.642)	(0,15)
• Non Subsidi Non-Subsidized	2.020.725	2.139.387	(118.662)	(5,55)
Ekspor Export	913.914	719.826	194.088	26,96
Total Nilai Penjualan Total Sales Value	12.580.931	12.520.147	60.783	0,49

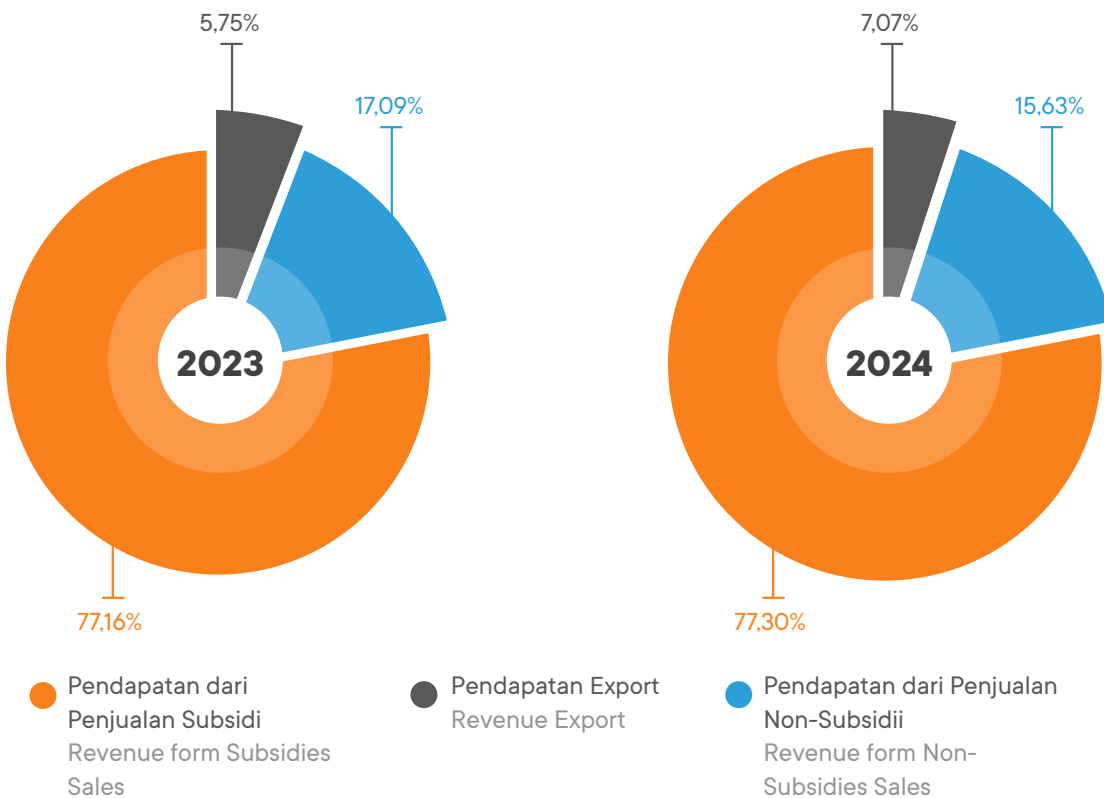
Komposisi Volume Penjualan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Urea and NPK Fertilizer Sales Volume Over the Past Two Years



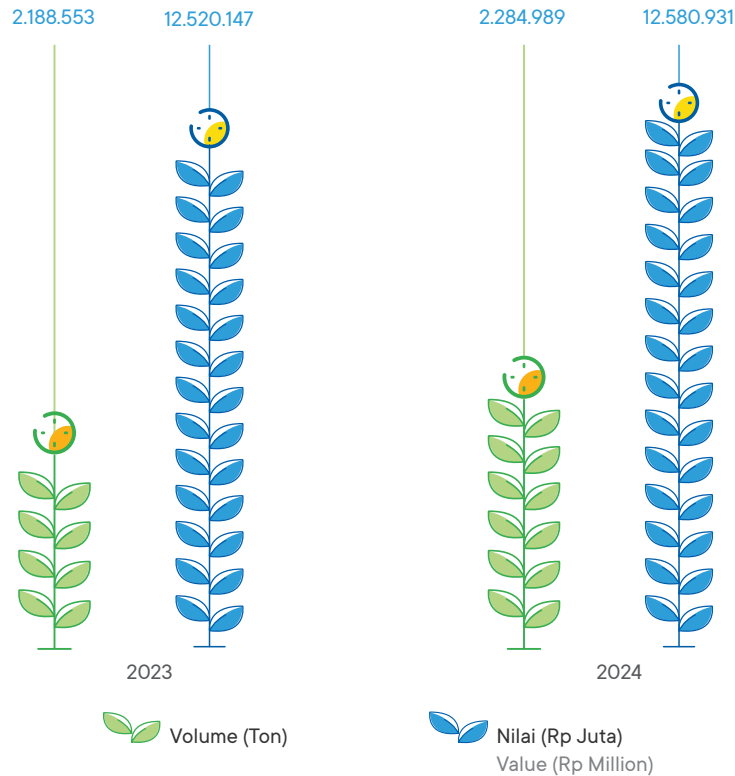
Komposisi Pendapatan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Urea and NPK Fertilizer Revenue Over the Past Two Years



Volume dan Nilai Penjualan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir

Sales Volume and Value of Urea and NPK Fertilizers Over the Past Two Years



Penjualan Berdasarkan Segmentasi Pelanggan

Produk Perusahaan diserap oleh 3 (tiga) jenis pelanggan, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Pihak-pihak Berelasi (sesuai PSAK 7 tentang Pihak-pihak Berelasi) yang terdiri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas dalam kelompok usahanya, serta Pihak Ketiga baik distributor sebagai mitra Perusahaan dalam memasarkan produk yang dimiliki Perusahaan, maupun pelanggan pengguna akhir.

Pemerintah

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan kelompok usahanya di mana Perusahaan menjadi salah satu entitas mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Perusahaan mendapatkan wilayah tanggung jawab pupuk urea untuk daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jambi, DI Yogyakarta, & Bali dengan alokasi tahun 2024 sebanyak 1.629.697 ton (2023: 1.634.939 ton). Perusahaan juga mendapatkan wilayah tanggung jawab distribusi pupuk NPK subsidi untuk daerah Sumatera Selatan dan Lampung dengan alokasi tahun 2024 sebanyak 492.485 ton (2023: 392.927ton)

Sales by Customer Segmentation

The Company's products are absorbed by three types of customers: The Government of the Republic of Indonesia, Related Parties (as defined under PSAK 7 on Related Parties), which include the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) and entities within its business group, and Third Parties, which include both distributors as the Company's partners in marketing its products—and end-user customers.

Government

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its group of companies, in which the Company is one of the entities, have been assigned by the Government of Indonesia to be responsible for fulfilling the demand for subsidized fertilizers across the country. The Company is assigned the responsibility for subsidized urea distribution in the regions of South Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Central Java, Jambi, the Special Region of Yogyakarta, and Bali, with an allocation of 1,629,697 tons in 2024 (2023: 1,634,939 ton). In addition, the Company is also assigned to distribute subsidized NPK fertilizer in the South Sumatra and Lampung regions, with an allocation of 492,485 tons in 2024 (2023: 392,927 tons).

Pihak Berelasi

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi maupun non subsidi di sektor Nasional dilakukan sinergi antar anak usaha dari Pupuk Indonesia Group dengan tujuan pemenuhan sektor pupuk untuk kebutuhan Nasional. Di tahun 2024 Perusahaan berperan penting melakukan sinergi antar anak usaha Pupuk Indonesia Group khususnya di sektor penjual.



Pihak Ketiga

Selain dari Pemerintah Indonesia dan Pihak Berelasi, proses penyerapan produk Perusahaan juga bekerja sama dengan distributor. Saat ini distributor Perusahaan berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya proses penyaluran produk Perusahaan, baik pupuk subsidi maupun non subsidi. Perusahaan juga melayani proses pembelian langsung dari *end user* atau pengguna akhir produk PUSRI.



Related Parties

To meet the demand for both subsidized and non-subsidized fertilizers at the national level, synergy is established among the subsidiaries of the Pupuk Indonesia Group with the aim of fulfilling national fertilizer needs. In 2024, the Company played a significant role in fostering synergy among the subsidiaries of the Pupuk Indonesia Group, particularly in the sales sector.

Third Parties

In addition to the Government of Indonesia and Related Parties, the Company also collaborates with distributors in the product absorption process. Currently, the Company's distributors play an active role in ensuring the successful distribution of the Company's products, both subsidized and non-subsidized fertilizers. The Company also facilitates direct purchases by end users or final consumers of PUSRI products.

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Menurut Pelanggan

Table of Fertilizer Sales Realization by Customer Segment

Ton | Tons

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pemerintah Government				
Urea	1.340.556	1.384.540	(43.984)	(3,18)
NPK	395.142	310.498	84.644	27,26
Penjualan Sektor Pangan Food Sector Sales	1.735.698	1.695.038	40.660	2,40
Pihak Berelasi Related Parties	252.598	267.688	(15.090)	(5,64)
Pihak Ketiga Third Parties	296.694	225.827	70.867	31,38
Penjualan Non Pangan Non-Food Sales	549.292	493.515	55.777	11,30
Total Volume Penjualan Total Volume Sales	2.284.990	2.188.553	96.437	4,41



Pendapatan dari segmen usaha pupuk menyumbang 93,19% terhadap total pendapatan Perusahaan pada tahun 2024. Kontribusi tersebut menurun 0,66% dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 93,81%. Penurunan proporsi pendapatan penjualan pupuk dikarenakan meningkatnya kontribusi penjualan non pupuk, sementara kontribusi penjualan pupuk subsidi terhadap penjualan pupuk mengalami kenaikan menjadi 71,28% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 72,25%.

Revenue from the fertilizer business segment contributed 93,19% to the Company's total revenue in 2024. This contribution decreased by 0,66% compared to the previous year's realization of 93,81%. The increase/decrease in the revenue proportion was due to the declining contribution from non-fertilizer sales, while the contribution of subsidized fertilizer sales to total fertilizer sales increased to 71,28% compared to 72,25% in 2023.

Tabel Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Pupuk dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan

Table of Realized Revenue from the Fertilizer Business Segment and Its Contribution to the Company's Total Revenue

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan Pupuk (Rp Juta) Revenue Fertilizer (Rp Million)	12.610.604	12.544.152	66.452	0,53
Kontribusi terhadap Pendapatan (%) Contribution to Revenue (%)	93,19	93,81	(0,66)	
Subsidi (%) Subsidized (%)	76,49	77,02	(1,34)	
Non Subsidi (%) Non-Subsidized (%)	23,51	22,98	(1,58)	

Adapun realisasi penjualan pupuk Urea bersubsidi serta pupuk NPK bersubsidi pada 2024 adalah 1.340.556 ton dan 395.142 ton atau masing-masing sebesar 82,26% dan 80,23% dari *Supply Agreement* dengan Kementerian Pertanian.

The actual sales of subsidized Urea fertilizer and subsidized NPK fertilizer in 2024 were 1,340,556 tons and 395,142 tons, respectively, representing 82,26% dan 80,23% of the *Supply Agreement* with the Ministry of Agriculture.

Target dan Realisasi Penjualan Urea Bersubsidi

Target and Sales Realization of Subsidized Urea

Provinsi Province	2024			2023		
	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture's Target	Realisasi PUSRI PUSRI's Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture's Target	Realisasi PUSRI PUSRI's Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Lampung	349.531	279.363	80	304.076	273.407	90
Sumatera Selatan South Sumatra	142.954	111.544	78	150.545	120.114	80
Bangka Belitung	1.990	1.322	66	2.068	1.555	76
Jambi	17.701	13.620	77	20.712	14.921	72
Bengkulu	26.286	20.606	78	27.494	19.593	71
Jawa Tengah Central Java	705.090	593.095	84	732.742	617.050	84
DI Yogyakarta	49.280	29.790	60	54.375	33.342	61
Bali	37.109	25.730	69	45.205	28.748	64
Jawa Timur East Java	299.756	265.487	89	297.724	275.811	93
Jumlah Total	1.629.697	1.340.556	82,26	1.634.939	1.384.540	85

Target dan Realisasi Penjualan NPK Bersubsidi

Target and Sales Realization of Subsidized NPK

Ton | Tons

Provinsi Province	2024			2023		
	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture's Target	Realisasi PUSRI PUSRI's Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture's Target	Realisasi PUSRI PUSRI's Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Lampung	260.010	244.703	94,11	170.454	118.159	69
Sumatera Selatan	168.478	150.439	89,29	222.473	192.317	86
Jumlah Total	428.488	395.142	92,21	392.927	310.476	79

Profitabilitas

Laba bruto segmen pupuk pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,28 triliun, menurun 37,99% dari tahun 2023 yang sebesar Rp2,07 triliun. Penurunan tersebut dikontribusikan dari peningkatan harga pokok penjualan tahun 2024 yang lebih tinggi dibanding 2023.

Profitability

The gross profit of the fertilizer segment in 2024 was Rp1.28 trillion, a decrease of 37.99% compared to Rp2.07 trillion in 2023. This decline was attributed to an increase in the cost of goods sold in 2024, which was higher than in 2023.

Realisasi Profitabilitas Segmen Usaha Pupuk

Realization of Fertilizer Business Segment Profitability

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp Million)	1.283.803	2.069.723	(785.920)	(37,99)
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	10,18	16,50	(6,32)	



NON PUPUK: AMONIA

Segmen usaha non pupuk adalah produk amonia. Kegiatan pada segmen ini mencakup kegiatan produksi, distribusi dan penjualan produk. Produk Amonia merupakan bahan baku utama dalam memproduksi Urea. Amonia yang dijual merupakan kelebihan produksi (ekses produksi), yang kemudian dijual di pasar dalam negeri (dalam bentuk botol dan tangki) dan ekspor.

Kinerja Segmen Amonia Tahun 2024

Aspek Produksi Amonia

Untuk tahun 2024, realisasi produksi Amonia PUSRI adalah sejumlah 1.284.490 ton, menurun 3,70% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 1.333.796 ton. Target realisasi produksi Amonia belum tercapai disebabkan oleh adanya beberapa gangguan pabrik, dan adanya gangguan pasokan gas alam pada semester 1 sehingga *on stream days* lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Realisasi Produksi Amonia, 2023-2024

Ammonia Production Realization, 2023-2024

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pabrik Pusri- IB (ton) Pusri-IB Plant (tons)	310.167	397.197	(87.030)	(21,91)
Pabrik Pusri- IIB (ton) Pusri-IIB Plant (tons)	687.182	715.154	(27.972)	(3,91)
Pabrik Pusri- IV (ton) Pusri-IV Plant (tons)	287.141	221.445	65.696	29,67
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Volume (tons)	1.284.490	1.333.796	(49.306)	(3,70)
Kapasitas Produksi (ton) Production Capacity (tons)	1.469.000	1.469.000	-	0,00
Rasio Gas Bumi (MMBTU/ ton) Natural Gas Ratio (MMBTU/ton)	36,71	36,19	0,52	1,44
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	4.647.853	4.419.760	228.093	5,16

Realisasi Produksi Amonia perbulan 2024

Monthly Ammonia Production Realization in 2024

2024								Jumlah Total
Bulan Month	Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June		
Satuan Unit	Ton	54.408,00	93.442,00	109.453,00	112.571,00	114.980,00	113.976,00	1.284.490
Bulan Month	Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December		
Satuan Unit	Ton	111.014,00	126.920,00	114.082,00	107.242,00	109.248,00	117.154,00	

Aspek Penjualan Amoniak

Volume penjualan Amoniak dalam negeri pada tahun 2024 mencapai 62.067 ton, naik 55,28% dari tahun 2023 yang sebesar 39.971 ton. Sedangkan ekspor Amonia sepanjang tahun buku 2024 meningkat 2,98%, menjadi 67.707 ton dari realisasi tahun

NON-FERTILIZER: AMMONIA

The non-fertilizer business segment comprises ammonia products. Activities within this segment include the production, distribution, and sales of ammonia. Ammonia is the primary raw material used in the production of urea. The ammonia sold consists of excess production, which is then marketed both domestically (in bottled and tanked forms) and for export.

Ammonia Segment Performance in 2024

Ammonia Production Aspect

In 2024, PUSRI's actual ammonia production amounted to 1,284,490 tons, a decrease of 3.70% compared to the 2023 realization of 1,333,796 tons. The production target for ammonia was not achieved due to several plant disruptions, resulting in fewer on-stream days compared to the previous year.

Ammonia Sales Aspect

The domestic sales volume of Ammonia in 2024 reached 62,067 tons, a decrease of 55.28% from 39,971 tons in 2023. Meanwhile, Ammonia exports throughout the 2024 fiscal year increased by 2.98%, to 67,707 tons from the previous year's realization of

sebelumnya yang sebesar 65.750 ton. Kenaikan volume penjualan tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan amoniak di pasar dalam negeri sehubungan dengan berkembangnya berbagai sektor industri penggunaannya yang terus berkembang.

65,750 tons. The increase in sales volume was in line with the rising domestic demand for ammonia, driven by the continued growth of various downstream industries that utilize it.

Dari kinerja penjualan tersebut, nilai penjualan Amoniak di pasar dalam negeri tercatat mencapai Rp386,96 miliar, naik 35,58% dari pembukuan tahun 2023 yang sebesar Rp285,40 miliar. Di pasar ekspor, nilai penjualan justru turun 1,44% menjadi Rp397,81 miliar dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp403,64 miliar.

From this sales performance, the value of Ammonia sales in the domestic market was recorded at Rp 386.96 billion, an increase of 35.58% from Rp285.40 billion in 2023. In the export market, sales value increased/decreased by 1.44% to Rp397.81 billion from the 2023 realization of Rp403.64 billion.

Realisasi Penjualan Amonia Berdasarkan Target Pasar

Ammonia Sales Realization by Market Target

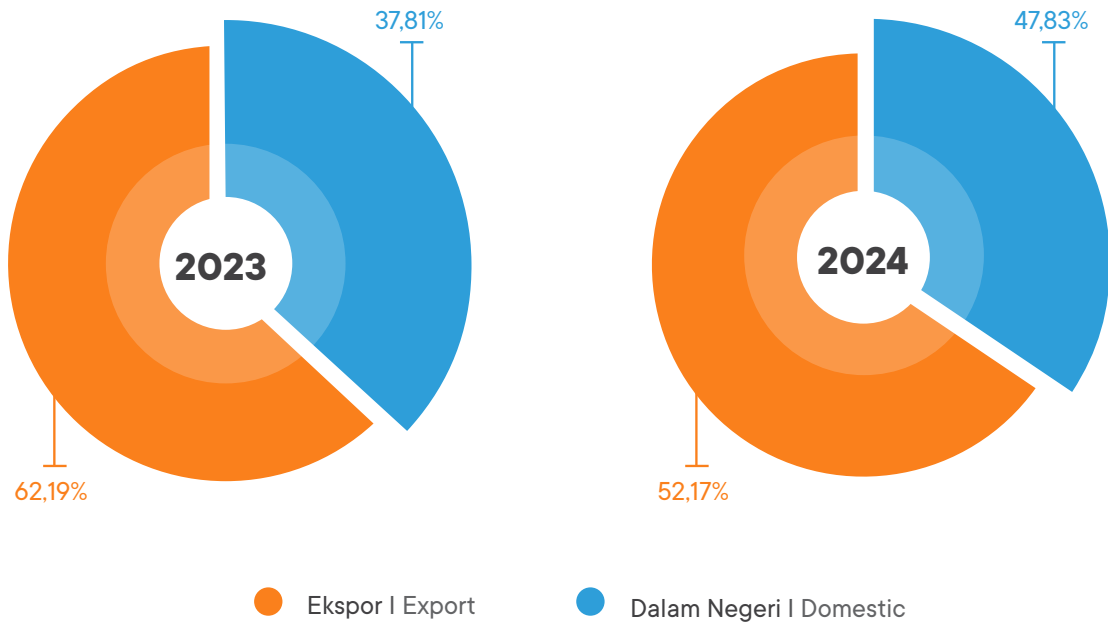
Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Tonnage (tons)				
Dalam Negeri Domestic	62.067	39.971	22.096	55,28
Ekspor Export	67.707	65.750	1.957	2,98
Jumlah Total	129.774	105.721	24.053	22,75
Nilai Penjualan (Rp Juta) Sales Value (Rp million)				
Dalam Negeri Domestic	386.961	285.403	101.558	35,58
Ekspor Export	397.812	403.638	(5.826)	(1,44)
Jumlah Total	784.773	689.041	95.732	13,89

Realisasi Penjualan Amonia perbulan 2024

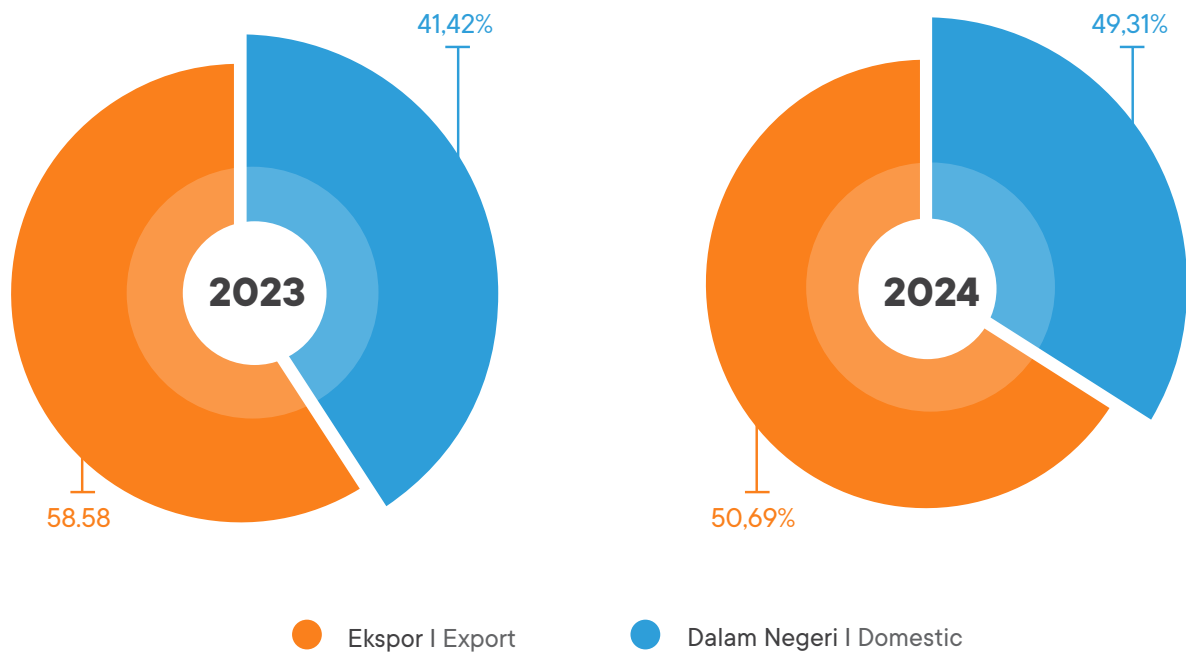
Monthly Ammonia Sales Realization in 2024

2024								Jumlah Total
Bulan Month	Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June		
Satuan Unit	Ton	7.166	11.430	8.332	7.181	10.793	11.913	129.774
Bulan Month	Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December		
Satuan Unit	Ton	13.545	19.212	14.240	6.017	5.712	14.233	

Komposisi Volume Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir Composition of Ammonia Sales Volume Over the Past Two Years

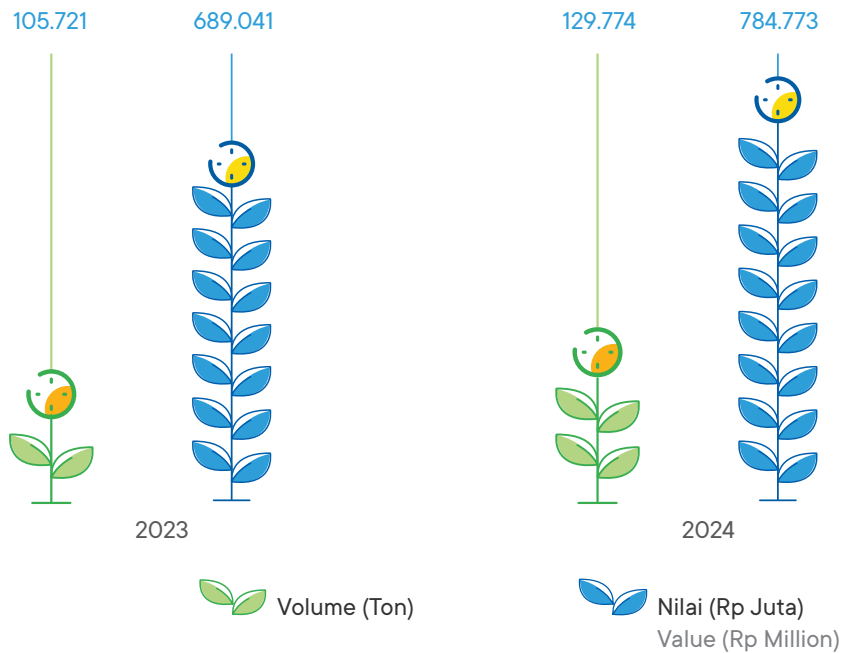


Komposisi Nilai Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir Composition of Ammonia Sales Value Over the Past Two Years



Volume dan Nilai Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir

Ammonia Sales Volume and Value Over the Past Two Years



Kontribusi penjualan Amoniak terhadap total pendapatan Perusahaan sepanjang tahun 2024 adalah sebesar 5,80%, meningkat dibandingkan kontribusi tahun 2023 sebesar 5,15%.

The contribution of Ammonia sales to the Company's total revenue throughout 2024 was 5.80%, an increase compared to the 2023 contribution of 5.15%.

Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Non Pupuk (Amonia) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan

The realization of revenue from the Non-Fertilizer business segment (Ammonia) and its contribution to the Company's total revenue

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan Non Pupuk (Rp Juta) Non-Fertilizer Revenue (Rp Million)	784.773	689.041	95.732	13,89
Kontribusi terhadap Pendapatan (%) Contribution to Revenue (%)	5,80	5,15	0,65	

Profitabilitas Segmen Non-Pupuk

Laba bruto non pupuk (Amoniak) pada tahun 2024 sebesar Rp230,468 miliar, menurun 8,92% dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp253,04 miliar. Hal tersebut dikarenakan penurunan harga jual tahun 2024 dibandingkan 2023.

Non-Fertilizer Segment Profitability

The gross profit from non-fertilizer (Ammonia) in 2024 was Rp230,468 billion, an decrease of 8.92% compared to IDR 253.04 billion in 2023. This was due to a decrease in selling prices in 2024 compared to 2023.

Realisasi Profitabilitas Segmen Usaha Non Pupuk (Amoniak)

Realization of Profitability in the Non-Fertilizer Segment (Ammonia)

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp Million)	230.468	253.042	(22.574)	(8,92)
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	29,37	36,72	(7,35)	

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain diperoleh dari penjualan dan pendapatan Perusahaan yang tidak dapat dikategorikan pada pendapatan dari penjualan pupuk dan non pupuk.

Kinerja Segmen Lain-Lain Tahun 2024

Penjualan lain-lain terdiri atas pendapatan jasa, sewa, penjualan produk utilitas, dan pendapatan anak Perusahaan PT Pusri Agro Lestari. Pada tahun 2024, pendapatan lain-lain Perusahaan mencapai Rp137,49 miliar, menurun -0,72% dari tahun 2023 yang sebesar Rp138,48 miliar. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh adanya kenaikan pendapatan sewa di tahun 2024.

Kontribusi pendapatan dari segmen usaha lain-lain di tahun 2024 mencapai 1,02% dari total pendapatan Perusahaan. Rincian pendapatan pada tahun 2024 tersebut berasal dari:

1. Pendapatan jasa Non-EPC yang didapatkan dari jasa pengantongan, jasa laboratorium, jasa keahlian, dan jasa *engineering* dengan nilai sebesar Rp11,62 miliar.
2. Pendapatan sewa dari sewa properti, sewa alat berat, dan pabrikasi dengan nilai sebesar Rp77,09 miliar.
3. Pendapatan jasa umum yang berupa tagihan *join cost* antar Anak Perusahaan Pupuk Indonesia grup dengan nilai sebesar Rp24,8 miliar.
4. Penjualan dari anak perusahaan PT Pusri Agro Lestari sebesar Rp10,14 miliar.
5. Penjualan utilitas yaitu listrik dan air serta penjualan produk lainnya sebesar Rp11,41 miliar.
6. Pendapatan dividen sebesar Rp2,32 miliar.

Pendapatan Segmen Lain-lain serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan

Revenue from Other Segments and Its Contribution to the Company's Total Revenue

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan Segmen Lain-lain Other Segments Income	137.488	138.483	(955)	(0,72)
Kontribusi terhadap Pendapatan (%) Contribution to Total Revenue (%)	1,02	1,04	(0,02)	

Profitabilitas

Laba bruto pendapatan lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp331,81 miliar meningkat 963,95% dari tahun 2023 yang sebesar Rp31,19 miliar.

Profitabilitas Segmen Usaha Lain-lain

Profitability of Other Business Segment

Keterangan Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Realisasi 2023 Realization 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp Million)	331.805	31.186	300.619	963,95
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	241,33	22,52		218,81

OTHER INCOME

Other income is derived from the sale and revenue of the Company that cannot be categorized under revenue from the sale of fertilizers and non-fertilizers.

Performance of Other Segments in 2024

Other sales consist of revenue from services, rentals, utility product sales, and income from the subsidiary PT Pusri Agro Lestari. In 2024, the Company's other income reached Rp137,49 billion, an decrease of -0,72% from 2023, which amounted to Rp138,48 billion. This increase was primarily driven by higher rental income in 2024.

The contribution of income from other business segments in 2024 amounted to 1.02% of the Company's total revenue. The breakdown of income for 2024 is as follows:

1. Non-EPC service income, including bagging services, laboratory services, technical expertise services, and engineering services, amounting to Rp11.62 billion.
2. Rental income, derived from property leases, heavy equipment rentals, and fabrication, totaling Rp77.09 billion.
3. General service income, in the form of joint cost billing among subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group, amounting to Rp24,8 billion.
4. Sales from the subsidiary PT Pusri Agro Lestari, amounting to Rp10.14 billion.
5. Utility sales, including electricity, water, and other product sales, totaling Rp11.41 billion.
6. Dividend income, amounting to Rp2,32 billion.

Profitability

The gross profit from other income in 2024 amounted to Rp331,81 billion, an increase of 963,95% compared to 2023, which was recorded at Rp31,19 billion.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review



“

Total Aset | Total Assets

Rp
IDR **25,54** Triliun
Trillion

Total aset yang dibukukan oleh Perusahaan pada tahun buku 2024 adalah sebesar Rp25,54 triliun, turun 6,05% dari tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp27,18 triliun.

The total assets recorded by the Company in the 2024 financial year amounted to Rp25.54 trillion, a decrease of 6.05% compared to the previous financial year, which stood at Rp27.18 trillion.

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian Tinjauan Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (“PUSRI”), (“Perusahaan”) ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan keuangan konsolidasi tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ASET

Total aset yang dibukukan oleh PUSRI pada tahun buku 2024 adalah sebesar Rp25,54 triliun, menurun 6,05% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp27,18 triliun. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh berkurangnya beberapa akun nilai aset lancar, terutama nilai saldo Kas & Setara Kas, Piutang Subsidi kepada Pemerintah RI dan nilai Persediaan.

Tabel Aset

Table of Assets

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents	703.733	1.454.006	(750.273)	(51,60)
Piutang Usaha: Accounts Receivable:				
Pihak Berelasi Related Parties	108.630	46.777	61.853	132,23
Pihak Ketiga Third Parties	89.437	171.987	(82.550)	(48,00)
Piutang Subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia Subsidy Receivables from Government of the Republic of Indonesia	0	1.011.204	(1.011.204)	(100,00)
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	108.612	127.903	(19.291)	(15,08)
Pajak dibayar dimuka: Prepaid Taxes				
Pajak penghasilan badan Corporate income tax	185.779	0	185.779	100,00
Pajak lainnya Other taxes	100.787	73.089	27.698	37,90
Persediaan Inventories	1.507.888	2.129.087	(621.199)	(29,18)
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	74.202	78.767	(4.565)	(5,80)
Piutang lainnya: Other Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	64.490	185.449	(120.959)	(65,22)
Pihak Ketiga Third Parties	9.423	11.468	(2.045)	(17,83)
Aset Lancar lainnya Other Current Assets	7.625	1.753.296	(1.745.671)	(99,57)
Subtotal Aset Lancar Subtotal Current Assets	2.960.606	7.043.033	(4.082.427)	(57,96)

FINANCIAL REVIEW

This Financial Review of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (“PUSRI” or “the Company”) is based on the Company’s Consolidated Financial Statements, which are presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), including the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”), for the year ended December 31, 2024. The consolidated financial statements have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, which issued an unqualified opinion in all material respects in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.









ASSETS

The total assets recorded by PUSRI in the 2024 financial year amounted to Rp25.54 trillion, a decrease of 6.05% compared to the previous fiscal year’s figure of Rp27.18 trillion. This decline was mainly attributed to a reduction in several current asset accounts, particularly the balances of Cash & Cash Equivalents, Subsidy Receivables from the Government of the Republic of Indonesia, and Inventories.

Tabel Aset

Table of Assets

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
 Piutang Subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia Subsidy Receivables from Government of the Republic of Indonesia	43.205	43.205	-	0,00
 Pajak Dibayar Dimuka; Pajak penghasilan badan Prepaid Taxes; Corporate Income Tax	54.019	183.708	(129.689)	(70,60)
 Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate Entities	101.939	142.165	(40.226)	(28,30)
 Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	45.440	50.446	(5.006)	(9,92)
 Uang Muka dan Biaya Dibayar dimuka Advances and Prepaid Expenses	643.459	927.926	(284.467)	(30,66)
 Properti Investasi Investment Property	884.944	815.958	68.986	8,45
 Aset Tetap Fixed Assets	20.780.186	17.944.706	2.835.480	15,80
 Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	21.522	29.083	(7.561)	(26,00)
Subtotal Aset Tidak Lancar Subtotal Non-Current Assets	22.574.714	20.137.197	2.437.516	12,10
Jumlah Aset Total Assets	25.535.320	27.180.230	(1.644.910)	(6,05)

ASET LANCAR

Pada akhir tahun 2024, PUSRI mencatatkan aset lancar senilai Rp2,96 triliun, turun 57,96% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,04 triliun. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya saldo kas & setara kas, Piutang subsidi kepada Pemerintah RI, Persediaan dan Aset Lancar lainnya meski terdapat kenaikan pada saldo Uang muka dan Pajak dibayar dimuka penurunan disebabkan karena optimalisasi pelunasan pinjaman modal kerja jangka pendek.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas PUSRI terdiri atas kas kecil, kas di bank dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Posisi kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2024 adalah senilai Rp703,73 miliar. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,45 triliun, saldo kas akhir tahun turun sebesar 51,60%. Penurunan tersebut terutama dikarenakan turunnya penerimaan dari pelanggan dan meningkatnya kebutuhan untuk mendukung aktivitas pendanaan.

Piutang Usaha

Piutang usaha ialah klaim atau tagihan kepada pihak pelanggan atas transaksi kegiatan operasional utama PUSRI yaitu penjualan produk Pupuk dan Amonia. Piutang usaha terdiri atas piutang kepada pihak ketiga dan berelasi. PUSRI berhasil membukukan piutang usaha total pada 2024 sebesar Rp198,07 miliar, turun 9,46% dari tahun 2023 yang senilai Rp218,76 miliar. Penurunan saldo piutang tersebut dikontribusikan oleh berkurangnya jumlah saldo piutang yang belum jatuh tempo terutama dari pihak ketiga di tahun 2024.

CURRENT ASSETS

At the end of 2024, PUSRI recorded current assets amounting to Rp2.96 trillion, a decrease of 57.96% from the same period in the previous year, which was Rp7.04 trillion. This decline was primarily due to a reduction in cash & cash equivalents, subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia, inventories, and other current assets, although there was an increase in advances and prepaid taxes.

Cash and Cash Equivalents

PUSRI's cash and cash equivalents consist of petty cash, cash in banks, and time deposits with a maturity of less than 3 (three) months. The company's cash and cash equivalents position in 2024 amounted to Rp703.73 billion. Compared to the previous year's balance of Rp1.45 trillion, the year-end cash balance decreased by 51.60%. This decline was primarily due to a decrease in receipts from customers and an increase in the need to support financing activities.

Accounts Receivable

Trade receivables are claims or invoices to customers arising from PUSRI's core operational activities, namely sales of fertilizer and ammonia products. These consist of receivables from third parties and related parties. In 2024, PUSRI recorded total trade receivables of Rp198.07 billion, a decrease of 9.46% compared to Rp218.76 billion in 2023. The decline in receivables was due to a decrease in outstanding current receivables, especially from third parties in 2024.

Piutang Subsidi Bagian Lancar dari Pemerintah

Piutang subsidi merupakan tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penyaluran pupuk Urea, NPK dan organik bersubsidi oleh Perusahaan. Pada tahun 2024 tidak terdapat piutang subsidi bagian lancar dari Pemerintah, namun terdapat kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah. Berikut rincian piutang subsidi kepada Pemerintah Indonesia per 31 Desember 2024.

Subsidy Receivables from the Government

Subsidy receivables represent claims to the Government of the Republic of Indonesia for the distribution of subsidized Urea, NPK, and organic fertilizers. In 2024, there were no current subsidy receivables from the Government, but there was excess subsidy paid by the government. Below is the breakdown of subsidy receivables from the Government of Indonesia as of December 31, 2024.

Tabel Piutang Subsidi

Subsidy Receivables Table

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Subsidi Tahun 2020 Subsidy Receivables in 2020	13.063	13.063	-	0,00
Piutang Subsidi Tahun 2022 Subsidy Receivables in 2022	34.775	34.775	-	0,00
Piutang Subsidi Tahun 2023 Subsidy Receivables in 2023	-	1.122.556	(1.122.556)	(100,00)
Piutang Subsidi Tahun 2024 Subsidy Receivables in 2024	-	-	-	-
Sub Total Sub Total	47.838	1.170.394	(1.122.556)	(95,91)
PPN Subsidi VAT on Subsidy	(4.633)	(115.985)	111.352	(96,01)
Jumlah Piutang Subsidi Total Subsidy Receivables	43.205	1.054.409	(701.946)	(95,90)
Dikurangi bagian lancar Deducted by the current portion	-	(1.011.204)	1.011.204	(100,00)
Bagian tidak lancar Non-current portion	43.205	43.205	-	0,00
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia (Utang Subsidi) Tahun 2024 Excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia (Subsidy Payables) Year 2024	(31.921)	-	(31.921)	100,00
Piutang subsidi bersih Net subsidy receivables	11.284	1.054.409	(1.043.125)	(98,93)

Piutang Subsidi yang Belum Ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk bersubsidi ke distributor, namun belum tersalur ke petani. Saldo piutang subsidi yang belum ditagih pada tahun 2024 adalah senilai Rp108,61 miliar, turun 15,08% dari tahun 2023 sebesar Rp127,90 miliar.

Unbilled Subsidy Receivables

Unbilled subsidy receivables represent revenue from the sale of subsidized fertilizers to distributors that have not yet been distributed to farmers. The balance of unbilled subsidy receivables in 2024 amounted to Rp108.61 billion, a decrease of 15.08% compared to 2023, which stood at Rp127.90 billion.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka ialah pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, terdiri atas pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Posisi total pajak dibayar di muka Perusahaan pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar Rp286,57 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp73,09 miliar, saldo pajak dibayar di muka meningkat sebesar Rp213,48 miliar, naik 292,08%.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes include income taxes (PPH) and other taxes, consisting of corporate income tax and various others. The Company's total prepaid taxes in 2024 amounted to Rp286.57 billion. Compared to Rp73.09 billion in 2023, this reflects an increase of Rp213.48 billion or 292.08%.

Persediaan

Persediaan yang dimiliki PUSRI terdiri dari persediaan barang jadi, barang setengah jadi, suku cadang dan persediaan lainnya. PUSRI membukukan penurunan persediaan pada tahun 2024 sebesar 29,18% menjadi senilai Rp1,51 triliun dari saldo tahun 2023 yang sebesar Rp2,13 triliun. Penurunan tersebut terutama dikarenakan berkurangnya persediaan bahan baku, maupun barang jadi dan setengah jadi.



Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka terdiri atas uang muka kontraktor, uang muka pembelian, uang muka operasional, dan uang muka non operasional. Sementara biaya dibayar dimuka terdiri atas beban dibayar dimuka asuransi, sewa, dan kontrak dibayar dimuka. Pada tahun 2024, uang muka dan biaya dibayar dimuka Perusahaan senilai Rp74,20 miliar, turun 5,80% dari tahun 2023 yang senilai Rp78,77 miliar.



Piutang Lain-lain

Piutang lainnya terdiri atas piutang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Saldo piutang lain-lain Perusahaan pada tahun 2024 tercatat turun 62,46% menjadi senilai Rp73,91 miliar dari pembukuan tahun 2023 yang sebesar Rp196,92 miliar. Hal ini, terutama disebabkan oleh turunnya piutang lain-lain pihak berelasi.



Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya merupakan aset lainnya yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, terdiri dari deposito berjangka lebih dari 3 bulan dan kas yang dibatasi penggunaannya yang penempatannya di pihak berelasi. Hingga berakhirnya tahun buku 2024 aset lancar lainnya tercatat tinggal senilai Rp7,62 miliar, turun 99,57% dari sebesar Rp1,75 triliun di tahun sebelumnya.



ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo aset tidak lancar dipengaruhi oleh aktivitas pembayaran pajak, investasi pada entitas asosiasi, aset keuangan tidak lancar lainnya, pembayaran uang muka, investasi properti, investasi aset tetap, serta aset tidak lancar lainnya. Perusahaan membukukan saldo aset tidak lancar pada tahun 2024 sebesar Rp22,57 triliun, meningkat 12,10% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp20,14 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya kenaikan nilai saldo aset tetap dan properti investasi di tahun 2024.

Piutang Subsidi Jangka Panjang

Saldo piutang subsidi jangka panjang dari Pemerintah Indonesia untuk tahun 2024 adalah senilai Rp43,21 miliar, sama jumlahnya dengan tahun sebelumnya.

Pajak Dibayar Dimuka Tidak Lancar

Pajak dibayar dimuka Perusahaan pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar Rp54,02 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp183,71 miliar, saldo pajak dibayar dimuka menurun 70,60%.

Inventories

PUSRI's inventories consist of finished goods, semi-finished goods, spare parts, and other inventory items. In 2024, PUSRI recorded a 29.18% decrease in inventory to Rp1.51 trillion, down from Rp2.13 trillion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in raw material inventory, as well as in finished and semi-finished goods.

Advances and Prepaid Expenses

Advances consist of contractor advances, purchase advances, operational advances, and non-operational advances. Prepaid expenses include prepaid insurance, rent, and contract expenses. In 2024, total advances and prepaid expenses were recorded at Rp74.20 billion, down 5.80% from Rp78.77 billion in 2023.

Other Receivables

Other receivables consist of receivables from third parties and related parties. The balance of other receivables in 2024 dropped 62.46% to Rp73.91 billion from Rp196.92 billion in 2023, primarily due to a decrease in related party receivables.

Other Current Assets

Other current assets are those expected to be used within one year, including time deposits of more than three months and restricted cash placed with related parties. At the end of 2024, other current assets amounted to Rp7.62 billion, down 99.57% from Rp1.75 trillion in the previous year.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets are assets that are expected to be used for a period longer than 1 (one) year. The balance of non-current assets is influenced by tax payments, investments in associates, other non-current financial assets, advance payments, property investments, investments in fixed assets, and other non-current assets. The Company recorded a non-current asset balance of Rp22.57 trillion in 2024, an increase of 12.10% from the 2023 financial year, which was Rp20.14 trillion. This increase was primarily due to the rise in the value of fixed assets and investment properties in 2024.

Long-Term Subsidy Receivables

Long-term subsidy receivables from the Government of Indonesia in 2024 remained unchanged at Rp43.21 billion.

Non-Current Prepaid Taxes

Prepaid taxes by the Company in 2024 amounted to Rp54.02 billion. Compared to the previous year's realization of Rp183.71 billion, the balance of prepaid taxes decreased by 70.60%.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada entitas di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan. PUSRI memiliki investasi pada PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG") dengan kepemilikan sebesar 44,23%. Pada tahun 2024 saldo nilai investasi pada PILOG menurun 28,30%, dari sebesar Rp142,17 miliar pada tahun 2023 menjadi senilai Rp101,94 miliar per 31 Desember 2024. Penurunan nilai investasi tersebut dikarenakan turunnya bagian atas laba bersih PILOG tahun 2024.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Aset keuangan tidak lancar lainnya merupakan piutang non usaha jangka panjang kepada pihak ketiga dan penyertaan jangka panjang pada entitas anak dan entitas asosiasi, berupa kepemilikan saham. Perusahaan membukukan aset keuangan tidak lancar lainnya pada 2024 menjadi sebesar Rp45,44 miliar, dari pembukuan tahun 2023 yang sebesar Rp50,45 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya saldo penyertaan jangka panjang pada entitas anak dimaksud.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang muka adalah pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, yang terdiri dari uang muka kontraktor, uang muka pembelian, uang muka operasional dan uang muka non operasional. Sementara rincian biaya dibayar dimuka ialah beban dibayar dimuka asuransi, sewa, dan kontrak dibayar dimuka. Uang muka dan beban dibayar dimuka PUSRI tahun 2024 tercatat senilai Rp643,46 miliar, berkurang sebesar Rp284,47 miliar dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp927,93 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi pembayaran uang muka pada pembangunan proyek Pusri-IIIB.

Properti Investasi

Properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan untuk menghasilkan sewa dan atau kenaikan nilai. Pada tahun 2024, PUSRI membukukan peningkatan properti investasi 8,45% atau bertambah senilai Rp68,99 miliar dari Rp815,96 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp884,95 miliar. Hal disebabkan antara lain oleh adanya reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi untuk optimalisasi sewa atas tanah dan bangunan.

Aset Tetap

Aset tetap PUSRI terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kapal dan sarana, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan mencatatkan saldo aset tetap sebesar Rp20,78 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp17,94 triliun, telah terjadi peningkatan sebesar 15,80%. Hal ini utamanya disebabkan perolehan aset tetap dalam penyelesaian proyek PUSRI-IIIB.

Investment in Associates

Investment in associates refers to investments in entities where the Company has significant influence but does not control. PUSRI holds an investment in PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG") with an ownership of 44.23%. In 2024, the investment balance in PILOG decreased by 28.30%, from Rp142.17 billion in 2023 to Rp101.94 billion as of December 31, 2024. The decrease in investment value was due to a decline in PILOG's share of net profit in 2024.

Other Non-Current Financial Assets

These comprise long-term non-trade receivables from third parties and long-term investments in subsidiaries and associates (in the form of equity). In 2024, other non-current financial assets were recorded at Rp45.44 billion, down from Rp50.45 billion in 2023. The decline was due to a decrease in long-term investments in subsidiaries.

Advances and Prepaid Expenses

Advances are payments made to other parties for which the performance or obligation has not yet been fulfilled. These advances consist of contractor advances, purchase advances, operational advances, and non-operational advances. Meanwhile, the details of prepaid expenses include prepaid insurance, rent, and prepaid contracts. PUSRI's advances and prepaid expenses in 2024 amounted to Rp643.46 billion, a decrease of Rp284.47 billion from the 2023 position of Rp927.93 billion. This decrease was influenced by the realization of advance payments for the Pusri-IIIB project development.

Investment Property

Investment property refers to land or buildings held to generate rental income and/or capital appreciation. In 2024, PUSRI recorded an 8.45% increase in investment property, growing by Rp68.99 billion from Rp815.96 billion in 2023 to Rp884.95 billion. This increase was primarily due to the reclassification of fixed assets to investment property and the realization of the Pusri-IIIB project development.













Fixed Assets

PUSRI's fixed assets consist of land, buildings, machinery and factory equipment, ships and facilities, vehicles and heavy equipment, office supplies, supporting assets, right-of-use assets, and assets under construction. Throughout 2024, the Company recorded a fixed asset balance of Rp20.78 trillion. Compared to Rp17.94 trillion in 2023, this represents an increase of 15.80%. This increase was primarily due to the acquisition of fixed assets related to the PUSRI-IIIB project under construction.

Tabel Aset Tetap PUSRI

Table of PUSRI'S Fixed Assets

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
 Tanah Land	6.802.188	6.869.522	(67.334)	(0,98)
 Bangunan Buildings	971.750	924.185	47.565	5,15
 Mesin dan Peralatan Pabrik Machinery and Plant Equipment	14.845.537	14.276.841	568.696	3,98
 Kapal dan Sarana Ships and Facilities	1.519	1.519	0	0,00
 Kendaraan dan Alat Berat Vehicles and Heavy Equipment	45.580	41.247	4.333	10,51
 Perlengkapan Kantor Office Supplies	284.751	260.734	24.017	9,21
 Aset Penyangga Supporting Assets	305.751	268.511	37.240	13,87
 Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	72.240	92.201	(19.961)	(21,65)
 Aset dalam Penyelesaian Assets Under Construction	4.304.126	1.022.905	3.281.221	320,77
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	27.633.442	23.757.665	3.875.777	16,31
 Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation	(6.842.750)	(5.812.959)	(1.029.791)	17,72
 Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(10.506)	-	(10.506)	(100,00)
 Saldo aset Tetap Fixed Assets Balance	20.780.186	17.944.706	2.835.480	15,80

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya adalah aset tidak lancar lainnya yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yang terdiri dari aset tak berwujud, aset tidak lancar yang akan ditinggalkan dan kas yang dibatasi penggunaannya. Pada akhir tahun buku 2024 saldo aset tidak lancar lainnya tercatat senilai Rp21,52 miliar, menurun 26,00% dari tahun 2023 yang sebesar Rp29,08 miliar. Penyebab utama penurunan tersebut ialah peningkatan amortisasi aset tidak berwujud dan lainnya di tahun 2024.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets refer to assets that are expected to be used for more than 1 (one) year, including intangible assets, non-current assets held for disposal, and restricted cash. At the end of the 2024 financial year, the balance of other non-current assets was recorded at Rp21.52 billion, a decrease of 26.00% from the 2023 figure of Rp29.08 billion. The main cause of this decrease was the increased amortization of intangible assets and others in 2024.

LIABILITAS

Total liabilitas PUSRI pada akhir tahun buku 2024 adalah sebesar Rp6,88 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,90 triliun, total liabilitas menurun sebesar 22,66%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengurangan nilai saldo liabilitas jangka pendek di tahun 2024.

LIABILITIES

PUSRI's total liabilities at the end of the 2024 fiscal year amounted to Rp6.88 trillion. Compared to the same period in the previous year, which was Rp8.90 trillion, total liabilities decreased by 22.66%. This decrease was mainly due to a reduction in the value of short-term liability balances in 2024.

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman jangka pendek Short-Term Loans	-	600.000	(600.000)	(100,00)
Utang Usaha: Trade Payables				
Pihak Berelasi Related Parties	52.287	49.366	2.921	5,92
Pihak Ketiga Third Parties	82.439	85.712	(3.273)	(3,82)
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia Excess subsidies paid by the Government of the Republic of Indonesia	31.921	-	31.921	0,00
Utang Lainnya: Other Payables:				
Pihak Berelasi Related Parties	2.958	46.388	(43.430)	(93,62)
Pihak Ketiga Third Parties	97.810	108.794	(10.984)	(10,10)
Liabilitas yg masih harus dibayar Accrued Liabilities	2.178.985	1.782.056	396.929	22,27
Utang Pajak Tax Payables				
Pajak penghasilan badan Corporate Income Tax	11.142	115	11.027	9.588,70
Pihak lainnya Other Parties	84.586	52.018	32.568	62,61
Bagian jangka pendek atas: Current Portion of				
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	7.529	22.505	(14.976)	(66,55)
Pinjaman jangka panjang Long-Term Loans	2.804	2.935.644	(2.932.840)	(99,90)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	244.367	455.044	(210.677)	(46,30)
Sub Total Liabilitas Jangka Pendek Subtotal Current Liabilities	2.796.828	6.137.642	(3.340.814)	(54,43)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	303.974	272.106	31.868	11,71
Bagian jangka panjang atas: Long-Term Portion of				
Liabilitas sewa Lease Liabilities	3.559	4.358	(799)	(18,33)
Pinjaman jangka panjang Long-Term Loans	3.168.146	1.864.271	1.303.875	69,94
Liabilitas imbalan kerja Employee Benefits Liabilities	4.281	-	4.281	0,00
Liabilitas imbalan pascakerja Post-Employment Benefit Liabilities	476.459	621.752	(145.293)	(23,37)
Utang retensi: Retention Payables:				
Pihak berelasi Related Parties	15.926	-	15.926	0,00
Pihak Ketiga Third Parties	117.460	-	117.460	0,00

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

 Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Sub Total Liabilitas Jangka Panjang Subtotal Non-Current Liabilities	4.089.805	2.762.487	1.327.318	48,05
Total Liabilitas Total Liabilities	6.886.633	8.900.129	(2.013.496)	(22,62)



LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban PUSRI yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Saldo liabilitas jangka pendek dipengaruhi oleh perubahan pada utang bank, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pajak, bagian jangka pendek atas liabilitas sewa dan pinjaman jangka panjang, serta liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Pada akhir tahun buku 2024, liabilitas jangka pendek Perusahaan adalah senilai Rp2,80 triliun, menurun 54,43% dari tahun buku 2023 yang sebesar Rp6,14 triliun. Penurunan tersebut, terutama dikondisikan oleh berkurangnya saldo bagian lancar atas pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dan adanya pelunasan atas hutang bank.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek merupakan saldo pinjaman atas kredit modal kerja (KMK) dari pihak bank. Pada akhir tahun buku 2024, PUSRI telah melunasi seluruh saldo utang bank jangka pendek tersebut yang sebelumnya bersisa sebesar Rp600 miliar, sehingga Perusahaan mencatatkan saldo nihil atas hutang bank dimaksud.

Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang terhadap pihak ketiga dan pihak berelasi. Akhir tahun buku 2024, saldo utang usaha tercatat adalah senilai Rp134,73 miliar, turun 0,26% dari tahun 2023 yang sebesar Rp135,08 miliar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pembelian bahan baku ke pihak berelasi yang telah jatuh tempo.

Liabilitas keuangan lainnya

Liabilitas keuangan lainnya terdiri atas utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi di luar kegiatan operasional utama PUSRI. Posisi liabilitas keuangan lainnya akhir tahun 2024 adalah senilai Rp100,77 miliar, menurun 35,06% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp155,18 miliar. Penurunan tersebut terutama akibat berkurangnya pendapatan sewa diterima dimuka.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Liabilitas yang masih harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar yang terdiri atas akrual gas bumi, akrual proyek, distribusi, bunga pinjaman, dan lain-lain. Saldo liabilitas yang masih harus dibayar di akhir tahun 2024 meningkat 22,27% dari posisi 2023 senilai Rp1,78 triliun menjadi sebesar Rp2,18 triliun, terutama disebabkan antara lain oleh peningkatan akrual dari progress pembangunan proyek PUSRI IIIB di tahun 2024.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities are PUSRI's obligations that are expected to be settled within 1 (one) year. The balance of current liabilities is influenced by changes in bank loans, trade payables, other payables, accrued liabilities, taxes payable, the current portion of lease liabilities, and long-term loans, as well as short-term employee benefit liabilities. As of the end of the 2024 financial year, the Company's current liabilities amounted to Rp2.80 trillion, a decrease of 54.43% compared to Rp6.14 trillion in the 2023 financial year. This decline was primarily driven by a reduction in the current portion of long-term loans maturing within one year and the repayment of bank loans.

Short-Term Loans

Short-term loans represent the loan balance of working capital credit (KMK) from banks. At the end of the 2024 fiscal year, PUSRI had fully repaid the entire outstanding short-term bank loan balance, which previously amounted to Rp600 billion, resulting in a zero balance recorded for the said bank loan.

Trade Payables

Trade payables are amounts owed to third parties and related parties. As of the end of 2024, trade payables stood at Rp134.73 billion, a 0.26% decrease from Rp135.08 billion in 2023. This decrease was due to the maturity of several raw material purchases from related parties.

Other Financial Liabilities

Other financial liabilities consist of payables to third parties and related parties arising from non-core operational activities of PUSRI. As of the end of 2024, the balance of other financial liabilities stood at Rp100.77 billion, a decrease of 35.06% from the previous year's balance of Rp155.18 billion. This decline was primarily due to a reduction in unearned rental income.

Accrued Liabilities

Accrued liabilities represent expenses that have been incurred but not yet paid, consisting of accruals for natural gas, project accruals, distribution, loan interest, and others. As of the end of 2024, the balance of accrued liabilities increased by 22.27% from Rp1.78 trillion in 2023 to Rp2.18 trillion. This increase was primarily due to a rise in project-related accruals in 2024.

Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari PPh Badan PUSRI dan pajak lainnya. Saldo utang pajak Perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp95,73 miliar, naik 83,62% dari posisi tahun lalu yang senilai Rp52,13 miliar. Komponen pajak yang mengalami kenaikan tertinggi adalah PPh 25/29 atas penghasilan badan.

Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa

Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa adalah bagian dari kewajiban atas aset sewa yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Bagian lancar atas liabilitas sewa tahun 2024 adalah senilai Rp7,53 miliar, menurun 66,55% dari tahun 2023 yang sebesar Rp22,51 miliar.

Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang

Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang adalah bagian dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang tahun 2024 adalah senilai Rp2,8 miliar, menurun 99,90% dari akhir tahun 2023 yang sebesar Rp2,94 triliun, yang disebabkan adanya penurunan bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun karena adanya pembayaran sebagian besar pinjaman dimaksud.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan liabilitas imbalan kerja yang akan dibayarkan di tahun 2025. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perusahaan di akhir tahun 2024 adalah senilai Rp244,37 miliar, turun 46,3% dari nilai sebesar Rp455,04 miliar di akhir tahun 2023. Hal dikarenakan telah diselesaikannya pembayaran liabilitas imbalan kerja dimaksud pada tahun 2024.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban PUSRI yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo liabilitas jangka panjang dipengaruhi oleh pinjaman jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, utang retensi, serta liabilitas imbalan pascakerja. Perusahaan mencatatkan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4,09 triliun, meningkat 48,05% dari tahun 2023 yang senilai Rp2,76 triliun. Hal tersebut terutama dikarenakan adanya penarikan pinjaman kredit investasi untuk pembangunan proyek PUSRI IIIB.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer pengenaan pajak. Pada akhir tahun buku 2024, PUSRI mencatatkan saldo liabilitas pajak tangguhan senilai Rp303,97 miliar, naik 11,71% dari tahun 2023 yang sebesar Rp272,11 miliar.

Bagian Jangka Panjang atas Liabilitas Sewa

Bagian jangka panjang atas liabilitas sewa adalah bagian dari kewajiban atas aset sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Bagian jangka panjang atas liabilitas sewa untuk tahun 2024 ini adalah senilai Rp3,56 miliar, turun 18,33% dari saldonya di tahun 2023 yang hanya sebesar Rp4,36 miliar.

Tax Payables

Tax payables consist of PUSRI's Corporate Income Tax and other taxes. As of 2024, the Company's tax payables amounted to Rp95.73 billion, an increase of 83.62% from the previous year's balance of Rp52.13 billion. The tax component that recorded the highest increase was Article 25/29 income tax on corporate earnings.

Current Portion of Lease Liabilities

The current portion of lease liabilities represents the portion of lease obligations that will mature in 2025. In 2024, the current portion of lease liabilities amounted to Rp7.53 billion, a decrease of 66.55% from Rp22.51 billion in 2023.

Current Portion of Long-Term Loans

The current portion of long-term loans represents the portion of long-term loans that will mature in 2025. In 2024, the current portion of long-term loans amounted to Rp2.8 billion, a decrease of 99.90% from Rp2.94 trillion at the end of 2023, due to the reduction in the portion of long-term loans maturing within one year as a result of the repayment of most of the loans.

Short-Term Employee Benefits Liabilities

Short-term employee benefit liabilities represent employee benefits that will be paid in 2025. The Company's short-term employee benefit liabilities at the end of 2024 amounted to Rp244.37 billion, a decrease of 46.3% from Rp455.04 billion at the end of 2023. This decrease was due to the settlement of the related employee benefit liabilities in 2024.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities are PUSRI's obligations that are expected to be settled in a period longer than 1 (one) year. The balance of non-current liabilities is influenced by long-term loans, deferred tax liabilities, retention payables, and post-employment benefit liabilities. As of December 31, 2024, the Company recorded non-current liabilities of Rp4.09 trillion, an increase of 48.05% compared to Rp2.76 trillion in 2023. This increase was primarily due to the drawdown of new long-term loans.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities represent the amount of income tax payable in future periods due to temporary differences in tax recognition. At the end of the 2024 financial year, PUSRI recorded a deferred tax liability balance of Rp303.97 billion, a decrease of 11.71% compared to Rp272.11 billion in 2023.

Long-Term Portion of Lease Liabilities

The non-current portion of lease liabilities represents the obligation related to leased assets, excluding the portion due within one year. In 2024, the non-current portion of lease liabilities amounted to Rp3.56 billion, a decrease of 18.33% from the 2023 balance of Rp4.36 billion.

Bagian Jangka Panjang atas Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang Perusahaan (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun) terdiri atas pinjaman atas kredit investasi (KI), pinjaman kredit modal kerja (KMK) jangka panjang, *term loan* dan pinjaman dari entitas induk PT Pupuk Indonesia (Persero). Saldo pinjaman jangka panjang Perusahaan di tahun 2024 meningkat 69,94% dari posisi 2023 yang senilai Rp1,86 triliun menjadi sebesar Rp3,17 triliun dikarenakan adanya penarikan fasilitas pinjaman jangka panjang baru.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang terdiri atas provisi imbalan kerja untuk program pensiun, manfaat kesehatan pasca kerja, program pesangon, dan program lainnya. Pada akhir tahun 2024, Perusahaan membukukan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp476,46 miliar, menurun 23,37% dari posisi akhir tahun 2023 yang sebesar Rp621,75 miliar.

EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual atas aset PUSRI setelah dikurangi semua kewajiban. Kinerja ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, penyertaan modal dalam proses penerbitan saham, tambahan modal disetor, saldo laba, dan laba komprehensif lain serta ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Total ekuitas Perusahaan pada akhir tahun buku 2024 adalah sebesar Rp18,65 triliun, meningkat 2,02% dibandingkan dengan tahun buku 2023 yang sebesar Rp18,28 triliun. Perubahan itu karena adanya peningkatan saldo laba di tahun 2024.

Tabel Ekuitas

Table of Equity

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Modal Saham Share Capital	5.800.000	5.800.000	0	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(333.876)	(333.876)	0	0,00
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditetapkan penggunaannya Designated	5.788.537	4.932.660	855.877	17,35
Belum ditentukan penggunaannya Undesignated	1.068.450	1.199.016	(130.566)	(10,89)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	6.303.773	6.660.583	(356.810)	(5,36)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	18.626.884	18.258.383	368.501	2,02

Non-Current Portion of Long-Term Loans

The Company's long-term loans (net of the portion due within one year) consist of investment credit loans (KI), long-term working capital loans (KMK), term loans, and loans from the parent company, PT Pupuk Indonesia (Persero). In 2024, the balance of the Company's long-term loans increased by 69.94%, from Rp1.86 trillion in 2023 to Rp3.17 trillion, primarily due to the drawdown of new long-term loan facilities.

Post-Employment Benefit Liabilities

Long-term post-employment benefit liabilities consist of provisions for employee benefits related to pension programs, post-employment health benefits, severance programs, and other benefit plans. As of the end of 2024, the Company recorded a balance of post-employment benefit liabilities amounting to Rp476.46 billion, a decrease of 23.37% compared to the year-end 2023 balance of Rp621.75 billion.

EQUITY

Equity represents the residual interest in PUSRI's assets after deducting all liabilities. Equity performance is influenced by equity attributable to the owners of the parent entity, which includes share capital, capital contributions in the process of share issuance, additional paid-in capital, retained earnings, and other comprehensive income, as well as equity attributable to non-controlling interests.

As of the end of the 2024 financial year, the Company's total equity stood at Rp18.91 trillion, an increase of 3.46% compared to Rp18.28 trillion in 2023. This change was primarily due to an increase in retained earnings in 2024.

Tabel Ekuitas

Table of Equity

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	21.803	21.718	85	0,39
Jumlah Ekuitas Total Equity	18.648.687	18.280.101	368.586	2,02

Modal Saham

Modal saham merupakan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai saham biasa yang memberikan hak untuk membawa 1 (satu) suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Posisi modal saham PUSRI pada 2024 masih sama dengan posisi tahun 2023, yakni sebesar Rp5,8 triliun.

Saldo Laba

Saldo laba terdiri atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya pada akhir tahun 2024 adalah senilai Rp5,79 triliun, naik 17,35% dari posisinya di akhir tahun 2023 yang sebesar Rp4,93 triliun.

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tersebut berasal dari kontribusi laba per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,07 triliun, turun 10,89% dari Rp1,20 triliun di akhir 2023.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain PUSRI terdiri atas cadangan revaluasi aset tanah dan pengukuran kembali imbalan pasca kerja. Laba komprehensif lain akhir tahun 2024 tercatat senilai Rp6,30 triliun, turun 5,36% dari tahun 2023 yang sebesar Rp6,66 triliun. Penurunan tersebut terutama dikarenakan adanya pengurangan dari hasil pengukuran kembali imbalan pascakerja di tahun 2024.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah nilai pemilik mayoritas dari pemegang saham entitas. Pada akhir tahun 2024, PUSRI mencatatkan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp18,63 triliun, meningkat 2,02% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp18,26 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba tahun 2024.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah nilai kepentingan non pengendali (minoritas) dari pemegang saham entitas. Pada akhir tahun 2024, Perusahaan mencatatkan ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp21,80 miliar, meningkat 0,39% dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp21,72 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengaruh kinerja anak perusahaan PT PAL di tahun 2024.

Share Capital

Share capital represents issued and fully paid-up ordinary shares that entitle the holder to one vote per share and the right to participate in dividends. PUSRI's share capital as of 2024 remained unchanged from 2023, amounting to Rp5.8 trillion.

Retained Earnings

Retained earnings consist of appropriated and unappropriated retained earnings. The appropriated retained earnings at the end of 2024 amounted to Rp5.79 trillion, an increase of 17.35% from Rp4.93 trillion at the end of 2023.

The unappropriated retained earnings were contributed by the profit as of December 31, 2024, recorded at Rp1.07 trillion, a decrease of 10.89% from Rp1.20 trillion at the end of 2023.

Other Comprehensive Income

PUSRI's other comprehensive income includes asset revaluation reserves and remeasurements of post-employment benefits. At the end of 2024, other comprehensive income stood at Rp6.30 trillion, down 5.36% from Rp6.66 trillion in 2023. This was mainly due to reduced gains from the remeasurement of post-employment benefits.

Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Equity attributable to the owners of the parent entity represents the value of the majority ownership held by the shareholders of the entity. As of the end of 2024, PUSRI recorded equity attributable to the owners of the parent entity at Rp18.89 trillion, an increase of 3.46% from Rp18.26 trillion in the same period of the previous year. This increase was driven by higher profits in 2024.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests represents the value of the non-controlling (minority) shareholders' interests in the entity. As of the end of 2024, the Company recorded equity attributable to non-controlling interests at Rp21.80 billion, an increase of 0.39% from Rp21.72 billion in the previous year. This increase was driven by the performance of the subsidiary, PT PAL, in 2024.













Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba-Rugi

Table of Profit and Loss

 Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
 Pendapatan Revenue	13.532.865	13.371.676	161.189	1,21
 Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(11.686.789)	(11.017.724)	(669.065)	6,07
 Laba Bruto Gross Profit	1.846.076	2.353.952	(507.876)	(21,58)
 Beban Penjualan Selling Expenses	(321.732)	(376.411)	54.679	(14,53)
 Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(299.305)	(463.318)	164.013	(35,40)
 Laba Usaha Operating Profit	1.225.039	1.514.223	(289.184)	(19,10)
 Pendapatan Bunga Interest Income	61.198	71.505	(10.307)	(14,41)
 Beban Bunga Interest Expense	(269.817)	(421.244)	151.427	(35,95)
 Pendapatan (Beban) Lainnya, Neto Other Income (Expenses), Net	423.475	373.496	49.979	13,38
 Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi Share of Net Profit (Loss) of Associated Entities	(40.226)	(5.306)	(34.920)	658,12
 Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	1.399.669	1.532.674	(133.005)	(8,68)
 Beban Pajak Tax Expense	(331.134)	(332.815)	1.681	(0,51)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.068.535	1.199.859	(131.324)	(10,94)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(356.810)	(50.036)	(306.774)	613,11
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	711.725	1.149.824	(438.099)	(38,10)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Profit for the Year Attributable to				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	1.068.450	1.199.016	(130.566)	(10,89)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	85	843	(758)	(89,92)
Jumlah Total	1.068.535	1.199.859	(131.324)	(10,94)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Total Comprehensive Income for the Period Attributable to				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	711.640	1.148.980	(437.340)	(38,06)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	85	843	(758)	(89,92)
Jumlah Total	711.725	1.149.823	(438.098)	(38,10)
Laba Tahun Berjalan per Saham (rupiah penuh) Earnings per Share for the Year (in full rupiah)	184.216	206.727	(22.511)	(10,89)

PENDAPATAN

PUSRI berhasil membukukan total pendapatan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp13,53 triliun, turun 1,21% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp13,37 triliun. Hal tersebut dikontribusikan oleh adanya kenaikan volume penjualan baik sektor PSO maupun Non PSO, serta menyesuaikan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

REVENUE

PUSRI successfully recorded total revenue for the fiscal year ending December 31, 2024, amounting to Rp13.53 trillion, a decrease of 1.21% from Rp13.37 trillion in the 2023 fiscal year. This was contributed by an increase in sales volume, a decrease in the average selling price of products, and a rise in PSO sales volume, in line with the allocation of subsidized fertilizer set by the Government of the Republic of Indonesia.

Tabel Pendapatan PUSRI

Table of PUSRI Revenue

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Jumlah Total	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah Total	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal Nominal	%
Pendapatan Pupuk Fertilizer Revenue						
Subsidi Subsidized	9.646.292	71,28	9.660.934	72,25	(14.642)	(0,15)
Non Subsidi Non-Subsidized	2.964.312	21,90	2.883.218	21,56	81.094	2,81
Jumlah Pendapatan dari Pupuk Total Revenue from Fertilizer	12.610.604	93,19	12.544.152	93,81	66.452	0,53
Pendapatan Non Pupuk Non-Fertilizer Revenue						
Amonia Ammonia	784.773	5,80	689.041	5,15	95.732	13,89
Lain-lain Others	137.488	1,02	138.483	1,04	(995)	(0,72)
Jumlah Pendapatan dari Non Pupuk Total Revenue from Non-Fertilizer	922.261	6,81	827.524	6,19	94.737	11,45
Jumlah Pendapatan Total Revenue	13.532.865	100,00	13.371.676	100,00	161.189	1,21

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri atas beban produksi, bahan baku dan bahan pembantu, biaya penyusutan, gaji dan upah, biaya pemindahan pupuk, biaya pemeliharaan, lain-lain dan persediaan. Pada tahun 2024, beban pokok pendapatan PUSRI tercatat sebesar Rp11,69 triliun, meningkat 6,07% dari tahun 2023 yang senilai Rp11,02 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan sejalan dengan kenaikan volume penjualan baik sektor PSO maupun Non PSO.











COST OF REVENUE

Cost of revenue consists of production costs, raw and auxiliary materials, depreciation expenses, salaries and wages, fertilizer distribution costs, maintenance costs, other expenses, and inventory. In 2024, PUSRI's cost of revenue was recorded at Rp11.69 trillion, an increase of 6.07% from Rp11.02 trillion in 2023. This increase was mainly contributed by higher raw material costs in 2024 compared to 2023.

Tabel Beban Pokok Pendapatan

Table of Cost of Revenue

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
 Bahan Baku dan Bahan Pembantu Raw Materials and Supporting Materials	7.835.774	8.096.263	(260.489)	(3,22)
 Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan Salaries, Wages, and Employee Welfare	841.766	907.811	(66.045)	(7,28)
 Penyusutan Depreciation	1.017.916	930.518	87.398	9,39
 Biaya Pengangkutan Fertilizer Distribution Costs	832.770	809.214	23.556	2,91
 Pemeliharaan Maintenance	317.599	285.039	32.560	11,42
 Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu Adjustment of post-employment benefits expense – past service cost	(331.567)	-	(331.567)	100,00
 Lainnya Others	318.909	242.848	76.061	31,32
 Persediaan Barang Jadi dan Setengah Jadi Awal Tahun Inventory of Finished Goods and Semi-Finished Goods at Beginning of the Year	1.722.742	1.468.773	253.969	17,29
 Pembelian Pupuk NPK Purchase of NPK Fertilizer	251.951	-	251.951	100,00
 Akhir tahun End of Year	(1.121.071)	(1.722.742)	601.671	(34,93)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	11.686.789	11.017.724	669.065	6,07

LABA BRUTO

Laba bruto didapat dari akun pendapatan yang diakumulasikan dengan beban pokok pendapatan. Laba bruto tahun adalah 2024 senilai Rp1,85 triliun, turun 21,58% dari tahun 2023 yang sebesar Rp2,35 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan beban pokok tahun 2024 yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023.

GROSS PROFIT

Gross profit is derived from revenue after deducting the cost of revenue. In 2024, gross profit amounted to Rp1.85 trillion, a decrease of 25.74% compared to Rp21.58 trillion in 2023. This decline was due to a higher increase in the cost of revenue in 2024 compared to 2023.

Tabel Laba Bruto

Table of Gross Profit

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan Revenue	13.532.865	13.371.676	161.189	1,21
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(11.686.789)	(11.017.724)	(669.065)	6,07
Laba Bruto Gross Profit	1.846.076	2.353.952	(507.876)	(21,58)

BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan terdiri atas beban distribusi, gaji dan kesejahteraan, beban sewa, beban jasa, beban pemeliharaan, perjalanan dinas, penyusutan, serta beban lain-lain dengan nilai di bawah Rp23,46 miliar. Untuk tahun 2024, beban penjualan PUSRI tercatat senilai Rp321,73 miliar, turun 14,53% dari tahun 2023 yang sebesar Rp376,41 miliar. Penurunan ini antara lain dikontribusikan oleh berkurangnya beban distribusi dan beban gaji di tahun 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa akun beban penjualan yang tetap mencatatkan kenaikan. Adapun komponen beban penjualan yang mengalami kenaikan nilai paling tinggi ialah beban pelayanan dengan peningkatan sebesar Rp22,18miliar atau naik 21,39%.

SELLING EXPENSES

Selling expenses consist of distribution costs, salaries and employee benefits, rental expenses, service fees, maintenance expenses, business travel, depreciation, and other expenses with values below Rp23.46 billion. In 2024, PUSRI's selling expenses were recorded at Rp321.73 billion, a decrease of 14.53% from Rp376.41 billion in 2023. This decline was partly attributed to reduced distribution and salary expenses in 2024.

However, several selling expense accounts still recorded an increase. The component of selling expenses that saw the highest increase in value was service expenses, which rose by Rp22.18 billion or 21.39%.

Tabel Beban Penjualan Rp Juta

Table of Selling Expenses Rp Million

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Beban Pelayanan Service Expenses	125.830	103.655	22.175	21,39
Distribusi Distribution	83.245	92.256	(9.011)	(9,77)
Gaji dan Kesejahteraan Salaries and Welfare	55.396	86.564	(31.168)	(36,01)
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	32.772	29.811	2.961	9,93
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	22.302	14.149	8.153	57,62
Beban Sewa Rent	5.548	8.110	(2.562)	(31,59)
Beban Perjalanan Dinas Business Travel	2.182	3.368	(1.186)	(35,21)
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu Adjustment to Post-Employment Benefit Expenses - Past Service Cost	(29.000)	0	(29.000)	100,00
Lain-lain Other	23.457	38.498	(15.041)	(39,07)
Jumlah Beban Penjualan Total Selling Expenses	321.732	376.411	(54.679)	(14,53)

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri atas gaji dan kesejahteraan, jasa konsultan dan profesi, listrik, air, dan utilitas, beban pemeliharaan, beban penyusutan, pajak, perjalanan dinas, asuransi, dan beban lain-lain. Akhir tahun buku 2024, beban umum dan administrasi PUSRI tercatat senilai Rp299,31 miliar, menurun 35,40% dari tahun 2023 yang sebesar Rp463,32 miliar. Penurunan disebabkan karena adanya penyesuaian beban imbalan pasca kerja (biaya jasa lalu).

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consist of salaries and welfare, consultant and professional services, electricity, water, and utilities, maintenance expenses, depreciation expenses, taxes, business travel, insurance, and other expenses. At the end of the 2024 financial year, PUSRI's general and administrative expenses were recorded at Rp299.31 billion, down 35.40% from 2023 which was Rp463.32 billion. The decrease was due to an adjustment to post-employment benefit expenses (past service costs).

Adapun komponen beban umum dan administrasi yang mencatatkan penurunan nilai terbesar ialah beban gaji dan kesejahteraan yang berkurang sebesar Rp19,42miliar.

The component that recorded the largest decrease in value was salaries and employee benefits, which declined by Rp19.42 billion.

Tabel Beban Umum dan Administrasi

Table of General and Administrative Expenses

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Gaji dan Kesejahteraan Salaries and Welfare	262.728	282.149	(19.421)	(6,88)
Jasa Konsultan Consultancy Fees	48.629	44.138	4.491	10,17
Beban Penyuluhan Outreach Expenses	29.649	35.937	(6.288)	(17,50)
Listrik, Air, dan Utilitas Electricity, Water, and Utilities	24.066	30.185	(6.119)	(20,27)
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	13.734	11.577	2.157	18,63
Beban Perjalanan Dinas Business Travel Expenses	9.036	9.078	(42)	(0,46)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	6.827	8.675	(1.848)	(21,30)
Beban Pajak Tax Expenses	3.944	5.863	(1.919)	(32,73)
Beban Asuransi Insurance Expenses	1.392	1.274	118	9,26
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu Adjustment to Post-Employment Benefit Expenses – Past Service Cost	(164.275)	-	(164.275)	(100,00)
Lainnya Others	63.575	34.442	29.133	84,59
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	299.305	463.318	(164.013)	(35,40)

PENDAPATAN LAINNYA – BERSIH

Pendapatan lainnya – bersih terdiri dari pendapatan dan beban selisih kurs dan pendapatan dan atau beban lain-lain. Pada tahun buku 2024, PUSRI membukukan pendapatan lainnya sebesar Rp423,48 miliar, meningkat 13,38% dari tahun 2023, dimana Perusahaan membukukan pendapatan lainnya-neto senilai Rp373,50 miliar. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan adanya kenaikan pendapatan dari denda dan klaim.

OTHER INCOME – NET

Other income – net consists of foreign exchange gains and losses, as well as other miscellaneous income and/or expenses. In the 2024 fiscal year, PUSRI recorded other income of Rp423.48 billion, an increase of 13.38% from 2023, when the Company booked net other income of Rp373.50 billion. The increase was mainly due to an increase in income from fines and claims.

Tabel Pendapatan Lainnya-Bersih

Table of Other Income – Net

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan Denda dan klaim Penalty and Claim Income	270.171	30.364	239.807	789,77
Keuntungan/(Kerugian) atas penjualan Aset Tetap Gain/(Loss) on Sale of Fixed Assets	44.180	(1.021)	45.201	4.227,13
Selisih Kurs Bersih Net Foreign Exchange Gain/Loss	(15.918)	(1.659)	(14.259)	859,49

Tabel Pendapatan Lainnya-Bersih

Table of Other Income – Net

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Keuntungan atas penjualan properti investasi Gain on Sale of Investment Property	-	298.326	(298.326)	(100,00)
Lain-lain Bersih Other – Net	125.042	47.486	77.556	163,32
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lainnya-Neto Total Other Income/(Expenses) – Net	423.475	373.496	49.979	13,38

LABA USAHA

Laba usaha didapatkan dari akun laba bruto yang diakumulasikan dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi. PUSRI membukukan laba usaha tahun 2024 sebesar Rp1,23 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang senilai Rp1,51 triliun, laba usaha tersebut turun 19,10%. Hal tersebut terutama dikarenakan sejalan dengan penurunan laba bruto.

OPERATING PROFIT

Operating profit is derived from gross profit, adjusted for selling expenses and general and administrative expenses. In 2024, PUSRI recorded an operating profit of IDR 1.23 trillion. Compared to IDR 1.51 trillion in 2023, this represents a 19.10% decrease. The decline was primarily due to a decrease in gross profit.

Tabel Laba Usaha

Table of Operating Profit

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Bruto Gross Profit	1.846.076	2.353.952	(507.876)	(21,58)
Beban Penjualan Selling Expenses	(321.732)	(376.411)	54.679	(14,53)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(299.305)	(463.318)	(164.013)	(35,40)
Jumlah Laba Usaha-Neto Total Operating Profit – Net	1.225.039	1.514.223	(289.184)	(19,10)

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan Keuangan merupakan pendapatan dari bunga atas jasa giro dan deposito dari penempatan dana pada bank Pemerintah atau bank swasta, serta bunga atas pinjaman yang diberikan kepada entitas lain dalam satu grup. Untuk tahun 2024, PUSRI mencatatkan pendapatan bunga senilai Rp61,20 miliar, turun 14,41% dari tahun 2023 yang sebesar Rp71,51 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo deposito maupun giro Perusahaan yang ditempatkan pada berbagai Bank di tahun 2024.

FINANCE INCOME

Finance income refers to interest income from current accounts and time deposits placed in government or private banks, as well as interest on loans provided to other entities within the same group. In 2024, PUSRI recorded interest income of Rp61.20 billion, a decrease of 14.41% compared to Rp71.51 billion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in the Company's deposit and current account balances placed in various banks during 2024.

BIAYA KEUANGAN

Biaya Keuangan adalah beban bunga dari kegiatan penggalangan dana perbankan dan pinjaman dalam rangka mendukung kelancaran operasi entitas maupun kegiatan investasi Perusahaan. PUSRI membukukan beban bunga tahun 2024 sebesar Rp269,82 miliar. Dibandingkan pembukuan tahun 2023 yang sebesar Rp421,24 miliar, jumlah beban bunga tersebut menurun 35,95%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo pinjaman Perusahaan di tahun 2024.



BAGIAN ATAS LABA/(RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI

Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi adalah pendapatan atas penyertaan PUSRI pada entitas asosiasi. Untuk tahun 2024, PUSRI mencatatkan bagian rugi dari entitas asosiasi meningkat 658,12% dari tahun 2023 yang mencatatkan rugi senilai Rp5,31 miliar menjadi rugi sebesar Rp40,23 miliar. Peningkatan rugi tersebut dikontribusikan oleh naiknya rugi PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2024.



LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Laba Sebelum Pajak Penghasilan didapatkan dari akun laba usaha yang diakumulasi dengan pendapatan dan beban bunga, serta bagian laba dari entitas asosiasi. Laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni senilai Rp1,53 triliun, mencatatkan penurunan 8,68%. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh berkurangnya beban bunga di tahun 2024.



Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Table of Profit Before Income Tax

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Usaha Operating Profit	1.225.039	1.514.223	(289.184)	(19,10)
Pendapatan (Beban) Keuangan Finance Income (Expenses)	(208.619)	(349.738)	141.119	(40,35)
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) from Associates	(40.226)	(5.307)	(34.919)	657,98
Pendapatan (Beban) Lainnya, Neto Other Income (Expenses), Net	423.475	373.496	49.979	13,38
Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	1.399.669	1.532.674	(133.005)	(8,68)



BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban Pajak Penghasilan adalah perhitungan akhir atas pajak penghasilan (PPH) pada akhir periode pembukuan. Beban pajak Perusahaan pada tahun buku 2024 adalah sebesar Rp331,13 miliar, turun Rp1,68 miliar dari tahun buku 2023 sebesar Rp332,82 miliar. Penurunan beban pajak sejalan dengan berkurangnya perolehan laba perusahaan di tahun 2024.

FINANCE COSTS

Finance costs refer to interest expenses arising from bank financing and loans undertaken to support the Company's operational activities and investment initiatives. In 2024, PUSRI recorded interest expenses of Rp269.82 billion. Compared to Rp421.24 billion in 2023, this represents a decrease of 35.95%. The decline was primarily due to a reduction in the Company's outstanding loan balance in 2024.

SHARE OF PROFIT/(LOSS) OF ASSOCIATES

The share of net profit/(loss) from associates represents income from PUSRI's investments in associate entities. For the year 2024, PUSRI recorded an increased share of loss from associates by 658.12% compared to 2023, when it reported a loss of Rp5.31 billion, rising to a loss of Rp40.23 billion. This increase in loss was contributed by the higher loss incurred by PT Pupuk Indonesia Logistik in 2024.

PROFIT BEFORE INCOME TAX

Profit Before Income Tax is derived from the operating profit account accumulated with interest income and expenses, as well as the share of profit from associate entities. The Company's income before tax for the fiscal year ended December 31, 2024, amounted to Rp1.40 trillion. Compared to the same period in the previous year, which was Rp1.53 trillion, this represents a decrease of 8.68%. The decrease was mainly contributed by the reduction in interest expenses in 2024.

INCOME TAX EXPENSE

Income Tax Expense is the final calculation of income tax (PPH) at the end of the accounting period. The Company's tax expense for the fiscal year 2024 amounted to Rp331.13 billion, a decrease of Rp1.68 billion from the fiscal year 2023 amounting to Rp332.82 billion. The reduction in tax expense is in line with the decreased profit earned by the Company in 2024.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih PUSRI yang didapatkan dari laba sebelum pajak yang diakumulasi dengan beban pajak. Pada tahun 2024, PUSRI membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,07 triliun. Dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang senilai Rp1,20 triliun, laba tahun berjalan tersebut turun 10,94%. Turunnya laba tahun berjalan tersebut sejalan dengan berkurangnya laba sebelum pajak di tahun 2024.

Net Profit for the Year

Profit for the year is PUSRI's net profit derived from profit before tax accumulated with tax expense. In 2024, PUSRI recorded a profit for the year of Rp1.07 trillion. Compared to the previous fiscal year, which amounted to Rp1.20 trillion, the profit for the year decreased by 10.94%. This decline in profit for the year is in line with the reduced profit before tax in 2024.

Tabel Laba Tahun Berjalan

Table of Profit for the Year

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	1.399.669	1.532.675	(133.006)	(8,68)
Beban Pajak Tax Expense	(331.134)	(332.815)	1.681	(0,51)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.068.535	1.199.859	(131.324)	(10,94)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan adalah kenaikan aset PUSRI yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan operasional normal perusahaan. PUSRI mencatatkan rugi komprehensif lain tahun berjalan PUSRI pada tahun buku 2024 sebesar Rp356,81 miliar naik 613,11% dari rugi komprehensif tahun buku 2023 yang sebesar Rp50,04 miliar.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Other comprehensive income for the year represents the increase in PUSRI's assets influenced by factors unrelated to the company's normal operations. PUSRI recorded other comprehensive losses for the year 2024 amounting to Rp356.81 billion, an increase of 613.11% from the other comprehensive loss of Rp50.04 billion in the fiscal year 2023.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Table of Other Comprehensive Income for the Year

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Keuntungan/(kerugian) pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja Gain/(Loss) on Remeasurement of Post-Employment Benefits	(461.365)	(64.148)	(397.217)	619,22
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Changes in the fair value of equity investments measured at fair value through other comprehensive income.	3.055	-	3.055	100,00
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	101.500	14.112	87.388	619,25
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	(356.810)	(50.036)	(306.774)	613,11

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Jumlah penghasilan komprehensif didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada tahun 2024, PUSRI membukukan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp711,73 miliar. Dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang senilai Rp1,15 triliun, mencatatkan penurunan 38,10%. Hal ini dikontribusikan oleh adanya penyesuaian penghasilan komprehensif lain dan turunnya laba tahun berjalan di tahun 2024.



Tabel Jumlah Penghasilan Komprehensif

Table of Total Comprehensive Income

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.068.535	1.199.859	(131.324)	(10,94)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(356.810)	(50.036)	(306.774)	613,11
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	711.725	1.149.824	(438.099)	(38,10)

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK DAN KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

- Pemilik Entitas Induk**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan pada tahun buku 2024 sebesar Rp1,07 triliun, turun 10,89% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp1,20 triliun.
- Kepentingan Non Pengendali**
Pada tahun 2024, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali adalah sebesar Rp85 juta, turun 89,92% dari periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp843 juta.

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK DAN KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

- Pemilik Entitas Induk**
Pada tahun 2024, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan sebesar Rp711,64 miliar. Jumlah tersebut turun 38,06% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,15 triliun.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Total comprehensive income is derived from the profit for the year combined with other comprehensive income for the year. In 2024, PUSRI recorded total comprehensive income of Rp1,26 trillion. Compared to Rp711,73 trillion in the previous financial year, this represents an decrease of 38,10%. This growth was driven by adjustments in other comprehensive income and the decrease in profit for the year in 2024.

PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY AND NON-CONTROLLING INTERESTS

- Owners of the Parent Entity**
The profit for the year attributable to the parent entity owners of the Company for the financial year 2024 amounted to Rp1,07 trillion, decreased by 10,89% from the financial year 2023, which was Rp1,20 trillion.
- Non-Controlling Interests**
In 2024, the profit for the year attributable to non-controlling interests amounted to Rp85 million, down 89,92% from the previous year's period, which was Rp843 million.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY AND NON-CONTROLLING INTERESTS

- Owners of the Parent Entity**
In 2024, the total comprehensive income for the year attributable to the parent entity owners of the Company amounted to Rp711,64 billion. This amount decreased by 38,06% from the same period in the previous year, which was Rp1,15 trillion.

2. Kepentingan Non Pengendali

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di tahun 2024 adalah sebesar Rp85 juta, turun 89,92% dari tahun buku 2023 yang sebesar laba Rp843 juta.

LABA PER SAHAM

Laporan keuangan audited PUSRI tidak menyajikan akun laba per saham karena Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka. PUSRI memberikan informasi ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Laba per saham dihitung dari pembagian antara laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham Perusahaan.

Untuk tahun buku 2024, laba per saham PUSRI tercatat sebesar Rp184,22 per saham, turun 10,89% dari Rp206.727 per saham di tahun 2023.

Tabel Laba Per Saham

Table of Earnings per Share

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit for the Year Attributable to	1.068.450	1.199.016	(130.566)	(10,89)
Jumlah Saham (lembar) Total Shares (units)	5.800.000	5.800.000	-	0,00
Jumlah Laba Rugi per Saham (rupiah penuh/lembar saham) Earnings per Share (full Rupiah/share)	184.216	206.727	(22.511)	(10,89)

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

PUSRI telah dan memperkirakan perubahan nilai tukar akan terus memberikan pengaruh terhadap usaha dan arus kas PUSRI. Pembelian bahan baku berupa gas alam diproyeksikan akan terus didenominasi dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

PUSRI mempunyai kebijakan untuk melakukan lindung nilai dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB) transaksi lindung nilai melalui transaksi derivatif meliputi transaksi *spot*, *forward*, *option*, dan *swap*. Transaksi lindung nilai dilaksanakan dengan tujuan memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, melindungi aset/kewajiban PUSRI serta tidak diperuntukkan untuk kegiatan spekulasi atau mencari keuntungan dari pergerakan nilai tukar.

2. Non-Controlling Interests

The total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2024 was Rp85 million, down 89.92% from the 2023 financial year, which was a profit of Rp843 million.

EARNINGS PER SHARE

The audited financial statements of PUSRI do not present earnings per share accounts because the Company is not a publicly listed company. PUSRI provides this information as part of information transparency. Earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to the parent entity owners by the number of the Company's shares.

For the fiscal year 2024, PUSRI's earnings per share were recorded at Rp184.22 per share, a decrease of 10.89% from Rp206.727 per share in 2023.

IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATES ON COMPANY PERFORMANCE

PUSRI has recognized and continues to anticipate that exchange rate fluctuations will impact its operations and cash flows. The purchase of raw materials, particularly natural gas, is projected to remain denominated in U.S. dollars.

PUSRI has established a hedging policy through Standard Operating Procedures (SOP) for hedging transactions using derivative instruments, including spot, forward, option, and swap transactions. These hedging activities are undertaken to mitigate the risks associated with exchange rate volatility, protecting PUSRI's assets and liabilities, and are not intended for speculative purposes or for profiting from currency movements.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA OPERASI

Penjualan

Nilai penjualan Perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13,53 triliun atau 1,21% lebih tinggi dari tahun 2023 yang senilai Rp13,37 triliun. Hal tersebut dikontribusikan terutama oleh adanya kenaikan volume produk yang dijual serta adanya peningkatan penjualan PSO menyesuaikan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Laba Operasi

Harga Urea dan Amonia yang meningkat akibat kurangnya pasokan produk Urea dan Amonia di pasar berdampak pada naiknya laba operasi. Laba operasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1,23 triliun, 19,10% lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar Rp1,51 triliun dikarenakan turunnya nilai pendapatan tahun 2024. Persentase penurunan laba operasi berbeda dengan catatan persentase kenaikan pendapatan lebih, disebabkan oleh naiknya beban pokok pendapatan yang lebih besar dari persentase kenaikan pendapatan.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES AND OPERATING PROFIT

Sales

The Company's sales value in 2024 was recorded at Rp13.53 trillion, which is 1.21% higher than in 2023, when it amounted to Rp13.37 trillion. This increase was mainly contributed by the rise in the volume of products sold as well as the increase in PSO sales, adjusted according to the allocation of subsidized fertilizers set by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.

Operating Profit

The increased prices of Urea and Ammonia due to the limited supply of these products in the market impacted the rise in operating profit. The operating profit for 2024 was realized at Rp1.23 trillion, which is 19.10% lower than in 2023, when it was Rp1.51 trillion, due to the decrease in revenue in 2024. The percentage decrease in operating profit differs from the recorded percentage increase in revenue because the increase in the cost of goods sold was greater than the percentage increase in revenue.

ARUS KAS

Perusahaan membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2024 sebesar Rp703,73 miliar, turun 51,60% dari akhir tahun buku 2023 yang senilai Rp1,45 triliun. Perubahan tersebut terutama dikontribusikan oleh meningkatnya arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, berupa pembayaran kewajiban yang jatuh tempo di tahun 2024.

CASH FLOW

The Company recorded cash and cash equivalents at the end of the 2024 financial year, amounting to Rp703.73 billion, a decrease of 51.60% compared to Rp1.45 trillion at the end of the 2023 financial year. This change was primarily due to an increase in cash outflows used for financing activities, particularly for the repayment of obligations maturing in 2024.

Tabel Arus Kas PUSRI

Table of PUSRI Cash Flow

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Arus kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	3.350.505	2.130.382	1.220.123	57,27
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(1.383.270)	(2.798.786)	1.415.516	(50,58)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(2.712.289)	2.738	(2.715.027)	(99.175,23)
Kenaikan/(Penurunan) kas dan setara kas bersih Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(745.055)	(665.666)	(79.389)	11,93
Dampak Perubahan Nilai Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	(5.219)	(3.986)	(1.232)	30,91
Kas dan setara kas awal tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.454.006	2.123.658	(669.652)	(31,53)
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	703.733	1.454.006	(750.273)	(51,60)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi dipengaruhi oleh penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari subsidi, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan, serta penerimaan restitusi pajak penghasilan.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun buku 2024 mencapai nilai sebesar Rp3,35 triliun, meningkat 57,27% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp2,13 triliun. Perubahan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan di tahun 2024.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash flows from operating activities are influenced by receipts from customers, subsidy receipts, payments to suppliers, payments to employees, interest income, payments of finance costs, income tax payments, and income tax refunds.

Net cash generated from operating activities in the 2024 fiscal year amounted to Rp3.35 trillion, an increase of 57.27% from Rp2.13 trillion in the 2023 fiscal year. This change aligns with the increased sales activity in 2024.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Table of Cash Flows from Operating Activities

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	6.977.591	6.777.534	200.057	2,95
Penerimaan dari Subsidi Receipts from Subsidies	7.504.869	6.937.979	566.890	8,17
Pembayaran kepada Pemasok Payments to Suppliers	(9.573.764)	(9.115.525)	(458.239)	5,03
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	(1.050.529)	(1.273.100)	222.571	(17,48)
Penerimaan Bunga Interest Income	66.047	68.182	(2.135)	(3,13)
Pembayaran Beban Keuangan Financial Expense Payments	(329.427)	(418.988)	89.561	(21,38)
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Placement of Restricted Cash and Cash Equivalents	(1.454)	(6.121)	4.667	(76,25)
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments	(242.828)	(839.579)	596.752	(71,08)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	3.350.505	2.130.382	1.220.123	57,27

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Penerimaan Kas dari Pelanggan adalah penerimaan kas atas transaksi penjualan pupuk dan nonpupuk atau pemberian jasa kepada pelanggan. Perusahaan membukukan penerimaan dari pelanggan pada tahun 2024 sebesar Rp6,98 triliun, naik 2,95% dari tahun buku 2023 yang sebesar Rp6,78 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya nilai penjualan di tahun 2024.

Cash Receipts from Customers

Cash Receipts from Customers refer to cash inflows from the sale of fertilizer and non-fertilizer products or the provision of services to customers. In 2024, the Company recorded cash receipts from customers amounting to Rp6.98 trillion, an increase of 2.95% compared to the 2023 financial year, which stood at Rp 6.78 trillion. This increase was in line with the growth in sales value in 2024.

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia merupakan penerimaan kas atas penjualan pupuk subsidi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2024, PUSRI mencatatkan penerimaan dari subsidi Rp7,50 triliun, meningkat 8,17% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp6,94 triliun.

Receipt of Fertilizer Subsidies from the Government of Indonesia

The receipt of fertilizer subsidies from the Government of Indonesia refers to cash inflows from the sale of subsidized fertilizer provided by the Government of the Republic of Indonesia. In 2024, PUSRI recorded subsidy receipts amounting to Rp7.50 trillion, an increase of 8.17% compared to the same period in the previous year, which stood at Rp6.94 trillion.

Pembayaran kepada Pemasok

Pembayaran kepada pemasok adalah pembayaran kas kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga atas transaksi pembelian barang atau jasa yang digunakan oleh PUSRI. Pada akhir tahun buku 2024, pembayaran kepada pemasok adalah sebesar Rp9,57 triliun, meningkat 5,03% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp9,12 triliun, terutama disebabkan oleh naiknya harga bahan baku gas dan kurs.



Pembayaran kepada Karyawan

Pembayaran kepada karyawan adalah pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Pembayaran kepada karyawan pada tahun buku 2024 sebesar Rp1,05 triliun, turun 17,48% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp1,27 triliun. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya penurunan pembayaran jasa operasi kepada karyawan dibandingkan dengan tahun 2023.



Penerimaan Pendapatan Keuangan

Penerimaan Pendapatan Keuangan adalah penerimaan kas dari pendapatan bunga atas jasa giro dan dana deposito yang ditempatkan Perusahaan pada bank Pemerintah atau bank swasta serta bunga atas pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada entitas lain dalam satu grup.



Penerimaan bunga sampai dengan berakhirnya tahun buku 2024 adalah sebesar Rp66,05 miliar, berkurang 3,13% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp68,18 miliar. Penurunan tersebut disebabkan nilai deposito tahun 2024 menurun dibandingkan nilainya di tahun 2023.



Pembayaran Beban Keuangan

Pembayaran beban keuangan merupakan pembayaran kas atas bunga pinjaman yang diterima dari entitas lain dalam satu grup maupun bank swasta dan lembaga keuangan lainnya. Pembayaran beban keuangan pada 2024 tercatat sebesar Rp329,43 miliar, turun 21,38%, dari pembayaran periode 2023 yang sebesar Rp418,99 miliar karena terdapat penurunan saldo pinjaman pada tahun 2024.



Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak penghasilan badan ialah pembayaran atas beban pajak penghasilan (PPh). Pada tahun 2024, pembayaran pajak penghasilan menurun 71,08% menjadi senilai Rp242,83 miliar dari sebesar Rp839,58 miliar dari tahun 2023. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran utang pajak atas penghasilan badan tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024.

Payments to Suppliers

Payments to suppliers refer to cash outflows to related parties and third parties for the purchase of goods or services used by PUSRI. At the end of the 2024 financial year, payments to suppliers amounted to Rp9.57 trillion, an increase of 5.03% compared to the 2023 financial year, which stood at Rp9.12 trillion. This increase was primarily driven by the rise in raw material prices.

Payments to Employees

Payments to employees are cash payments made to and for the benefit of employees. In the fiscal year 2024, payments to employees amounted to Rp1.05 trillion, a decrease of 17.48% from Rp1.27 trillion in 2023. This decline was mainly due to salary adjustments made in 2024.

Receipt of Financial Income

Receipt of Financial Income refers to cash inflows from interest income on current accounts and deposits placed by the Company in government or private banks, as well as interest on loans provided by the Company to other entities within the same group.

Interest income as of the end of the 2024 financial year amounted to Rp66.05 billion, a decrease of 3.13% compared to the 2023 financial year, which stood at Rp68.18 billion. This decline was due to a decrease in the value of deposits in 2024 compared to 2023.

Payment of Financial Expenses

Payment of financial expenses refers to cash outflows for interest on loans received from other entities within the same group, as well as from private banks and other financial institutions. In 2024, the payment of financial expenses was recorded at Rp329.43 billion, a decrease of 21.38% compared to the payment of Rp418.99 billion in 2023, due to a reduction in the loan balance in 2024.

Payment of Corporate Income Tax

Payment of corporate income tax refers to the payment of income tax expenses (PPh). In 2024, the payment of corporate income tax decreased by 71.08%, amounting to Rp242.83 billion, compared to Rp839.58 billion in 2023. This decrease was due to the settlement of tax liabilities for corporate income in 2023, which were paid in 2024.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi dipengaruhi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap dan properti investasi, perolehan aset tak berwujud, serta perolehan aset tetap, penerimaan dividen kas, penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, penempatan deposito berjangka, dan pembayaran uang muka untuk aset dalam penyelesaian.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun buku 2024 adalah sebesar Rp1,38 triliun, berkurang 50,58% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,80 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari saldo perolehan aset tetap sebagai hasil kegiatan investasi.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash flows from investing activities are influenced by proceeds from the sale of fixed assets and investment properties, the acquisition of intangible assets and fixed assets, the receipt of cash dividends, the placement of restricted cash and cash equivalents, the placement of time deposits, and advance payments for assets under construction.

Net cash used in investing activities in the 2024 financial year totaled Rp1.38 billion, representing a 50.58% decrease compared to the same period in the previous year, which was Rp2.80 trillion. This decrease was due to an increase in the acquisition of fixed assets as part of the Company's investment activities, alongside a significant increase in dividend income received by the Company.

Tabel Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Table of Net Cash Used in Investing Activities

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Penjualan Properti Investasi Proceeds from Sale of Investment Property	-	347.311	(347.311)	(100,00)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale of Fixed Assets	44.665	-	44.665	0,00
Penerimaan Dividen Dividend Receipts	2.323	160	2.163	1.353,33
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(3.181.258)	(488.316)	(2.692.942)	551,48
Penempatan deposito berjangka Placement of Time Deposits	-	(1.751.000)	1.751.000	(100,00)
Penarikan deposito berjangka Withdrawal of Time Deposits	1.751.000	-	1.751.000	0,00
Pembayaran uang muka untuk ADP Advance Payments for Assets Under Construction (AUC)	-	(906.941)	906.941	(100,00)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(1.383.270)	(2.798.786)	1.415.516	(50,58)

Penerimaan Penjualan Properti Investasi

Penerimaan penjualan properti investasi adalah penerimaan kas dari transaksi penjualan properti investasi. Pada tahun 2024 tidak terdapat penerimaan transaksi penjualan dari properti investasi.

Receipts from Investment Property Sales

Receipts from investment property sales are cash inflows from transactions involving the sale of investment properties. In 2024, PUSRI recorded zero cash receipts from the sale of fixed assets and investment properties.

Penerimaan Penjualan Aset Tetap

Penerimaan penjualan aset tetap adalah penerimaan kas atas transaksi penjualan aset tetap. Pada tahun 2024 PUSRI mencatatkan penerimaan transaksi penjualan aset tetap sebesar Rp44,66 miliar, dari nihil di tahun sebelumnya.



Penerimaan Dividen

Penerimaan dividen adalah penerimaan dividen dari entitas anak usaha dimana porsi kepemilikan sebagian dimiliki oleh PUSRI. Pada tahun 2024, penerimaan dividen kas melonjak hingga sebesar Rp2,32 miliar, naik dari periode sebelumnya yang hanya senilai Rp160 juta, sejalan dengan naiknya nilai pembagian dividen dari laba entitas anak di tahun berjalan.



Perolehan Aset Tetap

Perolehan atau pembelian aset tetap adalah pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap dalam rangka realisasi investasi. Untuk tahun 2024, nilai perolehan aset tetap PUSRI adalah sebesar Rp3,18 triliun. Dibandingkan dengan perolehan tahun 2023 yang senilai Rp488,32 miliar, perolehan aset tetap meningkat 551,48%. Peningkatan tersebut sejalan dengan kemajuan pembangunan Pabrik IIIB sebagai bagian dari realisasi strategi pengembangan bisnis PUSRI.



Penempatan Deposito Berjangka

Pada tahun 2024, PUSRI tidak melakukan penempatan pada deposito berjangka namun melakukan pencairan dana deposito berjangka sebesar Rp1,75 triliun di tahun 2024.



Pembayaran Uang Muka untuk Aset dalam Penyelesaian

Pada tahun 2024 tidak terdapat pembayaran uang muka untuk aset dalam penyelesaian.



Receipts from Fixed Asset Sales

Receipts from fixed asset sales are cash inflows from transactions involving the sale of fixed assets. In 2024, PUSRI recorded receipts from fixed asset sales amounting to Rp44.66 billion, compared to zero in the previous year.

Dividend Receipts

Dividend receipts are dividends received from subsidiary entities in which PUSRI holds partial ownership. In 2024, cash dividend receipts surged to Rp2.32 billion, up from Rp160 million in the prior period, reflecting an increase in dividend distributions from the subsidiaries' profits during the year.

Acquisition of Fixed Assets

The acquisition or purchase of fixed assets refers to cash outflows for the procurement of fixed assets as part of investment realization. In 2024, the value of PUSRI's fixed asset acquisitions amounted to Rp3.18 trillion. Compared to the 2023 acquisition value of Rp488.32 billion, this represents an increase of 551.46%. The increase was in line with the progress of the construction of Plant IIIB, which is part of the implementation of PUSRI's business development strategy.

Placement of Time Deposits

In 2024, PUSRI made placements in time deposits amounting to zero rupiah. Instead, PUSRI withdrew time deposit funds totaling Rp1.75 trillion in 2024.

Advance Payment for Assets Under Construction

PUSRI made advance payment transactions for assets under construction amounting to zero rupiah in 2024.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan dipengaruhi oleh penerimaan utang bank jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka panjang, tambahan modal disetor pada entitas asosiasi, serta pembayaran dividen kas.

Pada tahun 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2,71 triliun, melonjak hingga 99.175,23% dari periode tahun sebelumnya dimana PUSRI mendapatkan kas sebesar Rp2,74 miliar dari aktivitas pendanaan. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan pembayaran pinjaman bank baik jangka pendek maupun jangka panjang di tahun 2024 yang telah jatuh tempo.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash flows from financing activities are influenced by the receipt of short-term bank loans, long-term borrowings, repayment of short-term bank loans, repayment of long-term loans, additional paid-in capital in associates, and cash dividend payments.

In 2024, net cash used in financing activities amounted to Rp2.71 trillion, a significant increase of 99,175.23% compared to the previous year, when PUSRI received cash of Rp2.74 billion from financing activities. This increase was due to the higher repayment requirements for both short-term and long-term bank loans that matured in 2024.

Tabel Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Table of Cash Used for Financing Activities

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds from Short-Term Bank Loans	5.480.000	1.628.500	3.851.500	236,51
Penerimaan Pinjaman Bank dan lainnya Jangka Panjang Proceeds from Long-Term Bank Loans	2.381.101	2.064.437	316.664	15,34
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Repayment of Short-Term Bank Loans	(6.080.000)	(1.653.500)	(4.426.500)	267,70
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lainnya Jangka Panjang Repayment of Bank and Other Long-Term Loans	(4.118.417)	(1.600.000)	(2.518.417)	157,40
Pembayaran Liabilitas Sewa Repayment of Lease Liabilities	(31.834)	(61.699)	29.865	(48,40)
Pembayaran Dividen Dividend Payments	(343.139)	(375.000)	31.861	(8,50)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(2.712.289)	2.738	(2.715.027)	(99.160,96)

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek adalah penerimaan kas dari pinjaman bank jangka pendek. PUSRI membukukan penerimaan pinjaman jangka pendek pada akhir tahun buku 2024 sebesar Rp5,48 triliun, meningkat 236,51% dari tahun buku 2023 yang senilai Rp1,63 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penarikan kredit modal kerja yang lebih tinggi di tahun 2024.

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang

Penerimaan pinjaman jangka panjang adalah penerimaan kas dari pinjaman bank jangka panjang. PUSRI membukukan penerimaan pinjaman sebesar Rp2,38 triliun pada tahun buku 2024, sementara pada tahun buku 2023 PUSRI membukukan penarikan pinjaman jangka panjang senilai Rp2,06 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan pinjaman Kredit Investasi untuk mendanai kegiatan proyek.

Receipts from Short-Term Bank Loans

Receipts from short-term bank loans are cash inflows from short-term bank borrowing. PUSRI recorded short-term loan receipts of Rp5.48 trillion at the end of fiscal year 2024, an increase of 236.51% from Rp1.63 trillion in 2023. This increase/decrease was due to higher withdrawals of working capital/investment credit in 2024.

Receipts from Long-Term Bank Loans

Receipts from long-term bank loans are cash inflows from long-term bank borrowing. PUSRI recorded loan receipts of Rp2.38 trillion in 2024, while in 2023, PUSRI recorded long-term loan withdrawals amounting to Rp2.06 trillion. The increase was due to the need for investment credit loans to fund project activities.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek

PUSRI membukukan pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp6,08 triliun pada tahun buku 2024, sementara pada tahun buku 2023 PUSRI membukukan pembayaran pinjaman jangka pendek senilai Rp1,65 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya sebagian pinjaman bank jangka pendek yang jatuh tempo.



Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang

PUSRI membukukan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp4,12 triliun pada tahun buku 2024, sementara pada tahun buku 2023 PUSRI membukukan pembayaran pinjaman jangka panjang senilai Rp1,60 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya sebagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo.



Pembayaran Liabilitas Sewa

Pembayaran liabilitas sewa merupakan pembayaran sewa atas biaya pembiayaan-pembiayaan yang menjadi fasilitas PUSRI. Pada tahun 2024 Perusahaan melakukan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp31,83 miliar, sementara pada tahun 2023 PUSRI melakukan pembayaran sewa pembiayaan senilai Rp61,70 miliar.



Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen adalah pembayaran dividen yang dilakukan PUSRI kepada pemegang saham sesuai keputusan RUPS. Pada tahun buku 2024, pembayaran dividen kas tercatat sebesar Rp343,14 miliar, sementara pembayaran dividen kas kepada pemegang saham pada tahun buku 2023 adalah senilai Rp375 miliar.



Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas Bersih Tahun Buku 2024

Dengan demikian, pada akhir tahun buku 2024, PUSRI mencatatkan penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp745,06 miliar, naik 11,93% dari posisi yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan penurunan sebesar Rp665,67 miliar.



Saldo Kas dan Setara Kas Akhir tahun

Di tahun 2024, PUSRI juga mencatatkan dampak perubahan nilai kurs terhadap kas dan setara kas senilai Rp5,22 miliar. Sehingga setelah diperhitungkan dengan saldo kas dan setara kas awal tahun 2024 yang sebesar Rp1,45 triliun, PUSRI membukukan nilai saldo kas dan setara kas akhir tahun 2024 senilai Rp703,73 miliar.

Payments on Short-Term Bank Loans

PUSRI recorded short-term bank loan repayments of Rp6.08 trillion in the 2024 fiscal year, while in the 2023 fiscal year, PUSRI recorded short-term loan repayments amounting to Rp1.65 trillion. The increase was due to some short-term bank loans reaching their maturity.

Payments on Long-Term Bank Loans

PUSRI recorded long-term bank loan repayments of Rp4.12 trillion in the 2024 fiscal year, while in the 2023 fiscal year, PUSRI recorded long-term loan repayments amounting to Rp1.60 trillion. The increase was due to some long-term bank loans reaching their maturity.

Repayment of Lease Liabilities

Repayment of lease liabilities refers to lease payments for financing arrangements that are facilities provided to PUSRI. In 2024, the Company made lease payments amounting to Rp31.83 billion, while in 2023, PUSRI made lease payments of Rp61.70 billion..

Dividend Payments

Dividend payments refer to the cash dividends paid by PUSRI to its shareholders in accordance with the resolutions of the GMS. In the 2024 financial year, cash dividend payments were recorded at Rp343.14 billion, while cash dividend payments to shareholders in the 2023 financial year amounted to Rp375 billion.

Increase/(Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents for the 2024 Financial Year

Therefore, at the end of the 2024 financial year, PUSRI recorded a net decrease in cash and cash equivalents of Rp745.06 billion, an increase of 11.93% compared to the same position in the previous year, which recorded a decrease of Rp665.67 billion.

Balance of Cash and Cash Equivalents at End of Year

In 2024, PUSRI also recorded the impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents amounting to Rp5.22 billion. After taking into account the beginning balance of cash and cash equivalents in 2024 of Rp1.45 trillion, PUSRI recorded an ending balance of cash and cash equivalents of Rp703.73 billion for the 2024 financial year.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang, antara lain dapat direpresentasikan melalui pendekatan *Debt to Equity Ratio* (DER). Pada tahun 2023, DER PUSRI berada pada posisi 36,91%, menurun dari 48,69% di tahun sebelumnya atau masih di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan kemampuan membayar utang bagi PUSRI masih sangat baik, karena kemampuan modal masih kuat untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas PUSRI berdasarkan rasio *Receivable Turn Over* untuk periode tahun 2024 adalah selama 5,34 hari berkurang dari 5,97 hari di tahun sebelumnya.

Tabel Kolektabilitas PUSRI

Table of PUSRI's Receivables Collectibility

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Lancar Fluent	168.131	205.926	(37.795)	(18,35)
1-90 hari days	29.665	4.241	25.424	599,48
91-120 hari days	27	639	(612)	(95,77)
121-365 hari days	744	1.458	(714)	(48,97)
> 365 hari days	97.308	94.985	2.323	2,45
Cadangan Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(97.808)	(88.485)	(9.323)	10,54
Jumlah Total	198.067	218.764	(20.697)	(9,46)

Tingkat Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar.

Tabel Likuiditas

Table of Liquidity

Rp Juta
Rp Million

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	25,16	23,69		1,47
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	105,86	114,75		(8,90)

DEBT REPAYMENT CAPACITY

Debt payment ability can be represented by the Debt to Equity Ratio (DER) approach. In 2023, PUSRI's DER was 36.91%, down from 48.69% the previous year, and still below 100%. This indicates that PUSRI's ability to pay debt remains very good, as capital strength is sufficient to meet these obligations.

Receivables Collectibility

PUSRI's collectability level based on the Receivable Turnover ratio for 2024 was 5.34 days, down from 5.97 days the previous year.

Rasio Kas

PUSRI menunjukkan angka rasio kas tahun 2024 sebesar 25,16%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 23,69%. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan PUSRI dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang lebih likuid (*liquid assets*).



Rasio Lancar

Rasio lancar pada tahun 2024 menunjukkan angka 105,86%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 114,75%. Meskipun rasio lancar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun kemampuan membayar utang jangka pendek PUSRI masih berada di atas level 100%.



Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Keuntungan

Kemampuan PUSRI dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu melalui rasio margin laba bruto atau *Gross Profit Margin* (GPM), margin laba usaha atau *Operating Profit Margin* (OPM), margin laba bersih atau *Net Profit Margin* (NPM), tingkat pengembalian aset atau *Return On Asset* (ROA), tingkat imbalan kepada pemegang saham atau *Return On Equity* (ROE), dan tingkat imbalan investasi atau *Return On Investment* (ROI).



Berikut adalah rasio-rasio yang menunjukkan kemampuan PUSRI dalam menghasilkan keuntungan pada tahun 2024.

Rasio Profitabilitas

Profitability Ratios

dalam %
in%

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
			%
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	13,64	17,60	(3,96)
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	9,05	11,32	(2,27)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	7,90	8,97	(1,08)
Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Return on Assets (ROA)	4,18	4,41	(0,23)
Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	5,73	6,56	(0,83)
Tingkat Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	10,82	9,53	1,29



Cash Ratio

PUSRI showed a cash ratio of 25.16% in 2024, an increase compared to 23.69% in 2023. The cash ratio is used to measure PUSRI's ability to meet its immediate obligations using more liquid current assets.

Current Ratio

The current ratio in 2024 was 105.86%, lower than 114.75% in 2023. Although the current ratio decreased compared to the previous year, PUSRI's ability to pay short-term debts remains above the 100% level.

The Company's Ability to Generate Profit

PUSRI's ability to generate profit can be measured using profitability ratios, including the Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Return on Investment (ROI).

The following are the ratios that demonstrate PUSRI's ability to generate profit in 2024.

STRUKTUR MODAL

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ada yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan.

PUSRI senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola permodalan. Untuk itu, Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah serta mengelola permodalan. Dalam mengelola modal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaannya berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan struktur modal yang kuat serta pengembalian optimal bagi Pemegang Saham.

Selain itu, PUSRI juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tahun 2024 tidak ada perubahan pada pendekatan dalam kelompok usaha dalam mengelola permodalannya.

Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal tahun 2024 yang dimiliki oleh PUSRI adalah 26,97% berasal dari liabilitas dan 73,03% berupa ekuitas atau permodalan sendiri. Komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, posisi ekuitas PUSRI pada tahun 2024 semakin kuat.

Tabel Struktur Modal PUSRI 2023 - 2024

Table of PUSRI's Capital Structure for 2023 - 2024

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	(Rp Juta) (Rp Million)	(%)	(Rp Juta) (Rp Million)	(%)	(Rp Juta) (Rp Million)	(%)
Kewajiban Berbunga Interest-Bearing Liabilities						
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	-	0,00	600.000	2,21	(600.000)	(100,00)
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	3.168.146	12,41	1.864.271	6,86	1.303.875	69,94
Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang Current Portion of Long-Term Loans	2.804	0,01	2.935.644	10,80	(2.932.840)	(99,90)
Kewajiban Tidak Berbunga Non-Interest-Bearing Liabilities	3.715.683	14,55	3.500.214	12,88	215.469	6,16
Jumlah Kewajiban Total Liabilities	6.886.633	26,97	8.900.129	32,74	(2.013.496)	(22,62)
Jumlah Ekuitas Total Equity	18.648.687	73,03	18.280.101	67,26	368.586	2,02
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	25.535.320	100,00	27.180.230	100,00	(1.644.910)	(6,05)

CAPITAL STRUCTURE

Capital structure refers to the balance or ratio between liabilities and equity. Liabilities can be either long-term or short-term, while equity consists of paid-up capital and retained earnings.

PUSRI consistently maintains business continuity and maximizes benefits for shareholders and other stakeholders in managing its capital. To achieve this, the Company actively and routinely reviews and manages its capital. In managing this capital, the Company considers the efficiency of its use based on operating cash flow and capital expenditures, while also taking into account future capital needs. This policy aims to ensure a strong capital structure and optimal returns for shareholders.

Additionally, PUSRI strives to maintain a balance between the level of borrowing and equity position to ensure an optimal capital structure and returns. In 2024, there were no changes in the approach within the business group for managing its capital.

Details of Capital Structure

The composition of PUSRI's capital structure in 2024 consists of 26,97% from liabilities and 73,03% from equity or self-capital. The proportion of the capital structure derived from liabilities decreased compared to the previous year. As a result, PUSRI's equity position in 2024 has become stronger.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan ikatan yang material yang dilakukan Perusahaan untuk investasi barang modal yang bukan merupakan permodalan.



MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

The following are the material commitments made by the Company for capital expenditure that do not constitute capital funding.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #01

Material Commitments for Natural Gas Procurement #01

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PT Pertamina EP ("PEP")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of Commitment:	<p>PUSRI melakukan adendum perpanjangan perjanjian jual beli gas bumi dengan PEP pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, PEP berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM.</p> <p>PUSRI extended the natural gas purchase agreement with PEP through an amendment in 2023. Under this agreement, PEP is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2024 until 2028 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).</p>
Sumber Dana Source of Funds:	Modal sendiri (100% internal) Equity (100% internal)
Mata Uang Currency:	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection:	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #02

Material Commitment for Natural Gas Procurement #02

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PT Tropik Energi Pandan ("TEP")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of Commitment:	<p>PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan TEP pada tahun 2018. Berdasarkan perjanjian tersebut, TEP berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2027 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM.</p> <p>PUSRI signed a natural gas purchase agreement with TEP in 2018. According to this agreement, TEP is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2019 until 2027 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).</p>
Sumber Dana Source of Funds:	Modal sendiri (100% internal) Equity (100% internal)
Mata Uang Currency:	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection:	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #03

Material Commitment for Natural Gas Procurement #03

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Grissik Ltd. ("MEPGL")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of Commitment:	PUSRI melakukan addendum penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPGL pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, MEPGL berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI made an addendum to the natural gas purchase agreement with MEPGL in 2023. Under this agreement, MEPGL is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2023 until 2028 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).
Sumber Dana Source of Funds:	Modal sendiri (100% internal) Equity (100% internal)
Mata Uang Currency:	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection:	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #04

Material Commitment for Natural Gas Procurement #04

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Indonesia ("MEPI")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of Commitment:	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPI pada tahun 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, MEPI berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2033 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas purchase agreement with MEPI in 2021. Under this agreement, MEPI is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2021 until 2033 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).
Sumber Dana Source of Funds:	Modal sendiri (100% internal) Equity (100% internal)
Mata Uang Currency:	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection:	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #05

Material Commitment for Natural Gas Procurement #05

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Indonesia ("MEPI") dan Medco E&P Lematang ("MEPL")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of Commitment:	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPI dan MEPL pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, MEPI dan MEPL berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2033 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas purchase agreement with MEPI and MEPL in 2023. Under this agreement, MEPI and MEPL are obligated to supply natural gas to PUSRI from 2023 until 2033 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).
Sumber Dana Source of Funds:	Modal sendiri (100% internal) Equity (100% internal)
Mata Uang Currency:	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection:	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #06

Material Engagement for Natural Gas Procurement #06

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PHE Jambi Merang ("PHE JM")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Agreement:	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan PHE JM pada tahun 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, PHE JM berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas sales and purchase agreement with PHE JM in 2024. Under the agreement, PHE JM is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2024 to 2028 at a price determined by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal funding)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2024, PUSRI melakukan pembelanjaan barang modal untuk investasi rutin sebesar Rp155,69 miliar dan investasi pengembangan sebesar Rp3.334,6 miliar, termasuk di antaranya digunakan untuk bangunan dan prasarana, peralatan pabrik, hingga suku cadang penyangga. Realisasi total investasi tersebut lebih tinggi 331,78% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.051,99 miliar.

Capital Goods Investment Realization

In 2024, PUSRI made capital goods investments amounting to Rp155.69 billion and development investments totaling Rp3.334.6 billion. These expenditures were used for buildings and infrastructure, plant equipment, and supporting spare parts. The total investment realization was 331.78% higher compared to the previous year, which amounted to Rp1,051.99 billion.

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal

Table of Capital Goods Investment Realization

Jenis Investasi Types of Investment	Nilai Investasi (dalam Rp Juta) Investment Value (in Rp Million)	
	2024	2023
Investasi Rutin Routine Investment	155.691	156.228
Investasi Pengembangan Development Investment	3.334.660	895.763
Investasi Penyertaan Equity Investment	-	-
Total Realisasi Investasi Total Investment Realization	3.490.351	1.051.991

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL NERACA

- Pinjaman bank jangka pendek**
Selama bulan Januari sampai April 2025, Perusahaan melakukan penarikan atas pinjaman bank jangka pendek kepada SMBC dan BNI masing-masing sebesar Rp2,09 triliun dan Rp500 milyar.
- Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek**
Pada bulan Maret 2025, PUSRI melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek kepada SMBC sebesar Rp400 milyar.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE BALANCE SHEET DATE

- Short-Term Bank Loans**
From January to April 2025, the Company drew short-term bank loans from SMBC and BNI amounting to Rp2,09 trillion and Rp500 billion, respectively.
- Payments on Short-Term Bank Loans**
In March 2025, the PUSRI made a payment on a short-term bank loan to SMBC amounting to Rp400 billion.

Dampak Terhadap Kinerja dan Risiko Usaha di Masa Mendatang

Dengan adanya pembayaran atas pinjaman tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha dan kondisi keuangan PUSRI ke depannya.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Undang-undang Cipta Kerja

Undang-undang Cipta Kerja ("RUU Cipta Kerja") atau yang biasa dikenal dengan "Undang-undang Omnibus", telah disahkan Presiden pada 2 November 2020. Undang-undang ini berfokus pada peningkatan kemudahan proses usaha di Indonesia diantaranya menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan.

PUSRI telah mengikuti pembaruan yang ada pada Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan sesuai PMK No.18/PMK.03/2021 sesuai dengan kondisi transaksi internal terutama dalam menentukan perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan.

Komponen Substansial Atas Pendapatan Dan Beban Lain-Lain

Pendapatan dan beban lain-lain terdiri atas pendapatan denda dan klaim, rugi/laba penjualan aset tetap, selisih kurs, pendapatan keuangan, biaya keuangan, dan bagian atas rugi bersih entitas asosiasi. Komponen substansial atas pendapatan lain-lain yaitu pendapatan keuangan dan keuntungan atas pelepasan aset tetap.

Pendapatan keuangan tercatat sebesar Rp61,20 miliar, menurun 14,41% atau berkurang Rp10,31 miliar dari periode sebelumnya yang sebesar Rp71,51 miliar. Sementara itu, biaya keuangan juga mencatatkan penurunan 35,95% atau berkurang 151,43 miliar dari sebesar Rp421,24 miliar menjadi senilai Rp269,82 miliar seiring dengan penurunan saldo pinjaman. PUSRI mencatatkan penerimaan kas atas penjualan aset tetap sebesar Rp46,66 miliar di tahun 2024.

Impact on Performance and Business Risks in the Future

The payment of the loan does not have any adverse impact on the sustainability of the business or PUSRI's financial condition in the future.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Omnibus Law (Job Creation Law)

The Job Creation Law ("RUU Cipta Kerja"), commonly known as the "Omnibus Law," was enacted by the President on November 2, 2020. This law focuses on improving the ease of doing business in Indonesia, including simplifying licensing processes, streamlining land acquisition procedures, formalizing economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending labor laws.

PUSRI has adhered to the updates in Law No. 11 of 2020 on the Job Creation Law, particularly the Taxation Cluster, in accordance with PMK No. 18/PMK.03/2021, in line with internal transactions, especially in determining employee benefit obligations.

Substantial Components of Other Income and Expenses

Other income and expenses consist of income from fines and claims, gains/losses on the sale of fixed assets, foreign exchange differences, financial income, financial expenses, and the share of net losses from associates. The substantial components of other income include financial income and gains from the disposal of fixed assets.

Financial income amounted to Rp61.20 billion, a decrease of 14.41% or a reduction of IDR 10.31 billion from the previous period, which was Rp71.51 billion. Meanwhile, financial expenses also decreased by 35.95% or a reduction of Rp151.43 billion, from Rp 421.24 billion to Rp269.82 billion, in line with the reduction in loan balances. PUSRI recorded cash receipts from the sale of Fixed Assets amounting to Rp46.66 billion in 2024.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION AS WELL AS PROJECTIONS FOR THE COMING YEAR

Tabel Target VS Realisasi

Table of Target vs Realization

Uraian Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2024 Target 2024	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Pupuk Fertilizer Production Tonnage	2.221.216	2.440.000	91,03
Tonase Produksi Non Pupuk Non-Fertilizer Production Tonnage	1.284.490	1.365.131	94,09
Tonase Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Tonnage	2.284.990	2.315.706	99,04
Tonase Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Tonnage	129.774	80.695	160,82
Nilai Penjualan Pupuk (Rp Juta) Fertilizer Sales Value (Rp Million)	12.610.604	12.886.732	97,86
Nilai Penjualan Non Pupuk (Rp Juta) Non-Fertilizer Sales Value (Rp Million)	922.261	828.978	111,25
Pendapatan (Rp Juta) Revenue (Rp Million)	13.532.865	13.715.709	98,67
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Net Profit for the Year (Rp Million)	1.068.535	687.986	155,31
Aset (Rp Juta) Assets (Rp Million)	25.535.320	30.528.862	83,64
Liabilitas (Rp Juta) Liabilities (Rp Million)	6.886.633	11.842.782	58,13
Ekuitas (Rp Juta) Equity (Rp Million)	18.648.687	18.686.080	99,80

Operasi dan Produksi

Realisasi operasi dan produksi PUSRI pada tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Pada tahun 2024 terdapat kendala keterbatasan pasokan gas bumi sehingga realisasi produksi pupuk pada tahun 2024 adalah 2.221.216 ton atau 91% dari target sebesar 2.440.000 ton. Sedangkan produksi non pupuk terealisasi sebesar 1.284.490 ton atau 94% dari target sebesar 1.365.131 ton.

Pemasaran

Pada tahun 2024, PUSRI menyalurkan pupuk sebanyak 2.284.990 ton atau 99,04% dari target RKAP. Adapun penyebab tidak tercapainya penjualan produk pupuk, terutama tidak tercapainya penjualan PSO akibat dampak dari perubahan sistem pennebusan oleh Kementerian Pertanian RI dari T-Pubers menjadi i-pubers tmt 1 Januari 2024 yang menyebabkan banyak kios membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan berhati-hati dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu terdapat kendala lain antara lain keterlambatan terbitnya SK Alokasi pupuk oleh pemerintah daerah dan wacana implementasi kebijakan terkait penyaluran pupuk subsidi langsung ke Gapoktan yang menyebabkan menurunnya minat Distributor dan Kios dalam melakukan pennebusan..

Operations and Production

The actual operations and production of PUSRI in 2024 did not meet the target set. This was due to 2024 being a year full of challenges. Throughout the year, the prices of ammonia and urea fluctuated, with the average price slightly increasing, in line with fluctuating supply as a result of the decline in global gas prices. The actual fertilizer production in 2024 was 2,221,216 tons, or 91% of the target of 2,440,000 tons. Meanwhile, non-fertilizer production was 1,284,490 tons, or 94% of the target of 1,365,131 tons.

Marketing

In 2024, PUSRI distributed 2,284,990 tons of fertilizer, achieving 99.04% of the RKAP (Corporate Work Plan and Budget) target. The shortfall in fertilizer product sales was mainly due to the underachievement of Public Service Obligation (PSO) sales, which was impacted by a change in the fertilizer redemption system by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia—from T-Pubers to i-Pubers effective January 1, 2024. This transition required many kiosks to take time to adapt and proceed cautiously in distributing subsidized fertilizer. Additional challenges included delays in the issuance of fertilizer allocation decrees (SK Alokasi) by local governments and the proposed implementation of a policy to channel subsidized fertilizer directly to farmer groups (Gapoktan), which led to decreased interest among Distributors and Kiosks in redeeming fertilizer allocations.

Sementara itu, jumlah tonase penjualan produk non pupuk pada tahun 2024 terealisasi sebesar 129.774 ton, melebihi target RKAP yaitu 80.695 ton atau tercapai 160%.

Pendapatan dan Laba (Rugi) Konsolidasi

Nilai penjualan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13,53 triliun, tercapai sebesar 98,67% dari RKAP yang sebesar Rp13,72 triliun. Sedangkan realisasi laba tahun berjalan 2024 sebesar Rp1,07 triliun atau 155,31% dari target sebesar Rp687,99 miliar. Realisasi pendapatan dan laba tercapai sejalan dengan pencapaian total tonase penjualan diatas asumsi RKAP

Posisi Keuangan Konsolidasi

Aset PUSRI tahun 2024 sebesar Rp25,54 triliun, atau 83,64% dari target yang telah ditetapkan yakni Rp30,53 triliun. Kemudian, liabilitas PUSRI pada akhir tahun buku 2024 adalah sebesar Rp6,88 triliun atau 58,13% dari target yang telah ditetapkan yakni Rp11,84 triliun. Adapun ekuitas pada tahun 2024 hanya sedikit dibawah target yang ditetapkan yakni sebesar 99,80% dari target atau senilai Rp18,65 triliun dari target sebesar Rp18,69 triliun.

PROYEKSI TAHUN BUKU 2025

Proyeksi yang ditetapkan oleh PUSRI telah memperhitungkan kondisi yang akan datang serta realisasi pada masa sebelumnya. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Proyeksi Kinerja PUSRI 2025

Table of PUSRI's 2025 Performance Projections

Uraian Description	2024	Target 2025	Perubahan (%) Change (%)
Tonase Produksi Pupuk (ton) Fertilizer Production Tonnage (tons)	2.221.216	2.350.000	94,52
Tonase Produksi Non Pupuk (ton) Non-Fertilizer Production Tonnage (tons)	1.284.490	1.310.000	98,05
Tonase Penjualan Pupuk (ton) Fertilizer Sales Tonnage (tons)	2.284.990	2.250.240	101,90
Tonase Penjualan Non Pupuk (ton) Non-Fertilizer Sales Tonnage (tons)	129.774	92.600	140,14
Nilai Penjualan Pupuk (Rp juta) Fertilizer Sales Value (Rp million)	12.610.604	13.797.155	91,40
Nilai penjualan non pupuk dan lainnya (Rp juta) Non-Fertilizer and Other Sales Value (Rp million)	922.261	887.642	103,90
Pendapatan (Rp juta) Revenue (Rp million)	13.532.865	14.684.797	92,16
Laba Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year (Rp million)	1.068.535	610.444	175,04
Aset (Rp juta) Assets (Rp million)	25.535.320	31.638.815	80,71
Liabilitas (Rp juta) Liabilities (Rp million)	6.886.633	12.424.612	55,43
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	18.648.687	19.214.203	97,06

Meanwhile, the total sales volume of non-fertilizer products in 2024 reached 129,774 tons, exceeding the RKAP target of 80,695 tons, achieving 160% of the target.

Consolidated Revenue and Profit (Loss)

Sales in 2024 were recorded at Rp13.53 trillion, reaching 98.67% of the RKAP target of Rp13.72 trillion. Meanwhile, the realized profit for 2024 was Rp1.07 trillion or 155.31% of the target of Rp687.99 billion. Revenue did not meet the target, while profit in December 2024 exceeded the set target due to an increase in commercial Urea fertilizer and Ammonia selling prices above RKAP assumptions, despite sales volume being slightly below target.

Consolidated Financial Position

PUSRI's assets in 2024 were Rp25.54 trillion, or 83.64% of the set target of Rp30.53 trillion. Meanwhile, liabilities at the end of 2024 were Rp6.88 trillion or 58.13% of the target of Rp11.84 trillion. Equity in 2024 was slightly below target at 99.80%, amounting to Rp18.65 trillion from a target of Rp18.69 trillion.

2025 FINANCIAL YEAR PROJECTION

The projections established by PUSRI have taken into account upcoming conditions as well as realizations from previous periods. The details are presented in the table below.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy



“

Dalam Anggaran Dasar Perusahaan, disebutkan tentang penggunaan laba dan pembagian Dividen kepada Pemegang Saham bahwa penggunaan laba bersih untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen, Pembagian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.

In the Company's Articles of Association, it is stated that the appropriation of net profit and the distribution of dividends to shareholders shall include the allocation of net profit for distribution to shareholders as dividends, tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners, employee bonuses, or the placement of net profit into the Company's reserves, which may include allocations for business expansion. The percentage for each allocation is determined annually by the General Meeting of Shareholders (GMS).

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

Sesuai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan agenda pertanggungjawaban manajemen atas kinerja PUSRI untuk tahun 2023, Pemegang Saham menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PUSRI untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.199.016.000.000,- untuk Dividen sebesar Rp343.139.000.000,- dan sisanya ditetapkan sebagai cadangan.

Adapun riwayat pembagian dividen PUSRI dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel Riwayat Pembagian Dividen PUSRI

Table of PUSRI's Dividend Distribution History

Tahun Dividen Year of Dividend	Tahun Dibagikan Dividen Year of Dividend Distributed	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen (Rp Miliar) Total Dividend (Rp Billion)	Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	Payout Ratio (%)
2023	2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	Tahap I: 16 Agustus 2024 Tahap II: 13 September 2024 Tahap III: 16 Oktober 2024 Phase I: August 16, 2024 Phase II: September 13, 2024 Phase III: October 16, 2024	343.14	59.162	28,62
2022	2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	Tahap I: 3 Juli 2023 Tahap II: 2 Agustus 2023 Tahap III: 1 September 2023 Phase I: July 3, 2023 Phase II: August 2, 2023 Phase III: September 1, 2023	375.00	64.655	31,28
2021	2022	30 Juni 2022 June 30, 2022	25 Juli 2022 July 25, 2022	136.9	23.603	15
2020	2021	30 Juni 2021 June 30, 2021	-	-	-	-
2019	2020	6 Agustus 2020 August 6, 2020	Tahap I: 1 September 2020 dan 27 Oktober 2020 Tahap II: 1 Oktober 2020 Tahap III: 27 Oktober 2020 Phase I: September 1, 2020, and October 27, 2020 Phase II: October 1, 2020 Phase III: October 27, 2020	151.42	26.106	30
2018	2019	21 Mei 2019 May 21, 2019	Tahap I: 13 Juni 2019 dan 8 Agustus 2019 Tahap II: 12 Juli 2019 Tahap III: 14 Agustus 2019 Phase I: June 13, 2019, and August 8, 2019 Phase II: July 12, 2019 Phase III: August 14, 2019	166	28.616	39

DIVIDENDS DISTRIBUTED

According to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on July 22, 2024, with the agenda of management accountability for PUSRI's 2023 performance, the shareholders approved and determined the use of consolidated profit attributable to the owners of PUSRI for the fiscal year ended December 31, 2023, amounting to Rp1,199,016,000,000, of which Rp343,139,000,000 was allocated for dividends and the remainder set aside as reserves.

The history of PUSRI's dividend distribution over the past five years is as follows.

Kontribusi Terhadap Negara

PUSRI berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan terkait perpajakan. Untuk tahun 2024, PUSRI berkontribusi terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak dan dividen sebesar Rp2,49 triliun.

Contribution to the State

PUSRI is fully committed to complying with all applicable laws and regulations. One of the key areas of compliance is in relation to taxation. For the year 2024, PUSRI contributed to the state through tax obligations and dividends amounting to Rp2.49 trillion.

Tabel Kontribusi Pembayaran Pajak dan Dividen Rp Juta

Table of Tax and Dividend Payment Contribution Rp Million

Keterangan Explanation	2024	2023*	%
	1	2	3=1:2
A. Pajak			
Taxes			
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Property Tax (PBB)	27.678	28.742	96,00
2. Pajak dan Retribusi Daerah Regional Taxes and Levies	5.640	5.273	107,00
- Retribusi Air Water Levy	-	-	0,00
- Pajak Kendaraan di atas air Waterborne Vehicle Tax	-	-	0,00
- Pajak Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Tax	245	423	100,00
- Penerangan listrik jalan Street Lighting Tax	3.729	3.735	100,00
- Retribusi kebersihan Sanitation Levy	-	29	100,00
- Pajak Pembangunan I (Hotel & Rumah Makan) Building Tax I (Hotels & Restaurants)	16	11	141,00
- Pajak Sumur Bor & Air Permukaan Groundwater and Surface Water Tax	1.568	1.021	154,00
- Pajak alat berat Heavy Equipment Tax	-	-	0,00
- Retribusi Parkir dan Tol Parking and Toll Levy	52	53	153,00
3. Wajib Pungut Withholding Obligations	360.797	291.308	124,00
- PPh Pasal 21 (Karyawan) Income Tax Article 21 (Employees)	204.2460	224.586	91,00
- PPh Pasal 22 (WPDN) Income Tax Article 22 (Domestic Taxpayer)	24.393	15.928	153,00
- PPh Pasal 23 (WPDN) Income Tax Article 23 (Domestic Taxpayer)	52.649	36.938	430,00
- PPh Pasal 26 (WPLN) Income Tax Article 26 (Foreign Taxpayer)	103	7	1.437,00
- PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 15 Income Tax Article 4 (2) and Article 15	79.406	13.849	573,00
4. Wajib Bayar Payable Obligations	251.370	826.935	30,00
- PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	23.686.620	19.509	121,00
- PPh Pasal 22 dipungut oleh WAPU Income Tax Article 22 withheld by WAPU	5.806	6.926	84,00
- PPh Pasal 22 dipungut oleh Bendaharawan Subsidi Income Tax Article 22 withheld by Subsidy Treasurer	114.287	61.189	187,00
- PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	680	544	125,00
- PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	86.147	215.869	40,00
- PPh Pasal 26 (Fiskal) Income Tax Article 26 (Fiscal)	-	-	0,00
- PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	-	485.703	0,00
- Pendapatan Bunga Deposito Deposit Interest Income	12.068	17.578	69,00

Tabel Kontribusi Pembayaran Pajak dan Dividen Rp Juta
Table of Tax and Dividend Payment Contribution Rp Million

Keterangan Explanation	2024	2023*	%
	1	2	3=1:2
- Pendapatan Bunga Jasa Giro Bank Interest Income	4.655	1.632	285,00
- Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan Land/Building Lease Income	4.040	10.163	40,00
- Pengalihan Hak Tanah/Bangunan Transfer of Land/Building Rights	-	7.822	0,00
- PPh Final Revaluasi Aset Final Income Tax on Asset Revaluation	-	-	0,00
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – Netto Value Added Tax (VAT) - Net	59.987	161.920	37,00
6. Bea Masuk Customs Duties/Import Tariffs	680	1.335	51,00
7. PPN WAPU VAT WAPU	1.443.98	1.049.243	138,00
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Acquisition Duty on Land and Buildings	-	3.513	100,00
9. Pajak Lainnya Other Taxes	1.376	1.547	89,00
- PPN Masukan tidak dpt dikreditkan Non-creditable Input VAT	1.376	1.547	88,00
- Surat Tagihan/Ketetapan Pajak Tax Bill/Assessment Letter	18	-	0,00
TOTAL PAJAK TOTAL TAXES	2.151.418	2.369.817	91,00
B. Dividen Dividends			
Dividen yang dibayarkan Dividend Paid	343.139	375.001	92,00
C. Pajak dan Dividen Taxes and Dividends			
	2.494.557	2.744.818	91,00

*Dikarenakan perubahan metode menjadi cash basis
*Due to the change in method to cash basis

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga berakhirnya tahun buku 2024 PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen (ESOP/MSOP). PUSRI merupakan entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan kepemilikan saham seri B sebesar 99,999741% oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), Yayasan Kesejahteraan Karyawan PUSRI sebesar 0,000241%, dan saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia sebesar 0,000017%. PUSRI juga tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat sehingga tidak terdapat kepemilikan publik pada saham PUSRI.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2024, PUSRI tidak melakukan *Initial Public Offering* (IPO) maupun penawaran efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disampaikan.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of the end of the 2024 fiscal year, PUSRI did not have an Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP) in place. PUSRI is a subsidiary of the State-Owned Enterprise (SOE) PT Pupuk Indonesia (Persero), with Series B shares ownership of 99.999741% held by PT Pupuk Indonesia (Persero), 0.000241% by the PUSRI Employee Welfare Foundation, and one Series A Dwiwarna share held by the Government of the Republic of Indonesia, amounting to 0.000017%. PUSRI's shares are not publicly traded, and therefore, there is no public ownership in PUSRI's shares.

REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2024, PUSRI has not conducted an Initial Public Offering (IPO) or any form of securities offering. Therefore, information regarding the realization of proceeds from a public offering cannot be provided.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2024



Investasi

PUSRI merealisasikan investasi pengembangan usaha selama tahun 2024 dengan dukungan dana total sebesar Rp3,49 triliun terdiri atas investasi rutin sebesar Rp155,69 miliar dan investasi pengembangan sebesar Rp3,33 Triliun.



Ekspansi

PUSRI tidak melakukan ekspansi selama tahun 2024, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.



Divestasi

PUSRI tidak melakukan divestasi entitas usaha selama tahun 2024, karena itu rincian informasi tidak dapat disampaikan.



Penggabungan atau Peleburan Usaha

PUSRI tidak melakukan penggabungan maupun peleburan unit usaha selama tahun 2024, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.



Akuisisi

PUSRI tidak melakukan akuisisi selama tahun 2024, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.



Restrukturisasi

PUSRI tidak melakukan restrukturisasi kewajiban selama tahun 2024. Dengan demikian informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.



TRANSAKSI MATERIAL YANG MENDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DAN/ATAU BERELASI

Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

Transaksi Afiliasi

Selama tahun 2024 tidak terdapat adanya transaksi afiliasi yang dijalankan oleh PUSRI, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING, MATERIAL TRANSACTIONS, AFFILIATED TRANSACTIONS, AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS IN 2024

Investment

In 2024, PUSRI realized business development investments with a total funding support of Rp3.49 trillion, consisting of routine investments amounting to Rp155.69 billion and development investments amounting to Rp3.33 Trillion..

Expansion

PUSRI did not undertake any expansion activities in 2024; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Divestment

PUSRI did not carry out any divestment of business entities in 2024; therefore, detailed information cannot be provided.

Merger or Consolidation of Business Units

PUSRI did not conduct any merger or consolidation of business units in 2024; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Acquisition

PUSRI did not carry out any acquisitions in 2024; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Restructuring

PUSRI did not undertake any liability restructuring in 2024. Accordingly, information regarding this matter cannot be provided.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED AND/OR RELATED PARTIES

Conflict of Interest Transactions

In 2024, there were no transactions involving a conflict of interest; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Affiliated Transactions

In 2024, PUSRI did not engage in any affiliated transactions; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Transaksi Pihak Berelasi

Alasan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pemberian beberapa pekerjaan konstruksi, penjualan dan pembelian, sewa-menyewa lahan dan pinjam meminjam dana operasional.

Kewajaran dan Mekanisme Reviu atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses reviu dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. PUSRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Direksi memandang bahwa transaksi dengan pihak berelasi/terafiliasi telah memenuhi prosedur memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2024.

Rujukan di Laporan Keuangan

Pengungkapan terkait dengan transaksi berelasi ini juga diuraikan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit pada Catatan 29 seperti terdapat dalam Lampiran Laporan Tahunan ini.

Telaah Dewan Komisaris dan Komite Audit serta persetujuan Pemegang Saham atas kewajaran transaksi

Transaksi dengan perusahaan afiliasi pada tahun 2024 salah satunya adalah pinjaman jangka menengah/panjang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas PUSRI. Berdasarkan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar PUSRI, tindakan Direksi untuk menerima pinjaman jangka menengah/panjang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Direktur Utama PUSRI memohon persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima pinjaman jangka menengah/panjang melalui surat Nomor: 03541/F/KU/F3011/ET/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor: 03616/F/KU/F3011/ET/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diterima oleh Direksi PUSRI melalui Surat Nomor: S-11/ DEKOM/ PUSRI/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Persetujuan Menerima Pinjaman Jangka Menengah/Panjang Pinjaman Pemegang Saham.

Related Party Transactions

Reasons for Related Party Transactions

In the normal course of business, these transactions primarily involve the provision of various construction services, sales and purchases, land leasing, and borrowing and lending of operational funds.

Fairness and Review Mechanism of Transactions

The fairness of transactions and compliance with regulations regarding related party transactions have undergone a review and audit process by both internal and external auditors. PUSRI's transactions with related parties comply with PSAK No. 7 concerning the Disclosure of Related Parties.

The Board of Directors believes that transactions with related/affiliated parties have followed adequate procedures and are in line with generally accepted business practices.

Compliance with Regulations and Provisions

Compliance with the relevant regulations and provisions, the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), is carried out through the disclosure of PSAK 7 (Revised 2014) on "Disclosure of Related Parties" in the Company's financial statements for 2024.

Reference in the Financial Statements

The disclosure related to affiliated transactions is also detailed in the audited Financial Statements in Note 30, as presented in this Annual Report.

Review by the Board of Commissioners and the Audit Committee, as well as Shareholders' Approval of the Fairness of Transactions

One of the affiliated company transactions in 2024 was a medium/long-term loan from PT Pupuk Indonesia (Persero), the majority shareholder of PUSRI. Pursuant to Article 11, Paragraph 8 of PUSRI's Articles of Association, the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to undertake medium/long-term loans.

The President Director of PUSRI requested approval from the Board of Commissioners to obtain a medium/long-term loan through letters Number: 03541/F/KU/F3011/ET/2024 dated March 27, 2024 and Number: 03616/F/KU/F3011/ET/2024 dated March 28, 2024.

Written approval from the Board of Commissioners was received by the PUSRI Board of Directors through Letter Number: S-11/ DEKOM/PUSRI/III/2024 dated March 28, 2024 concerning Approval to Obtain Medium/Long-Term Shareholder Loan.

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan realisasi transaksi dengan pihak berelasi disampaikan dalam catatan 29 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PUSRI 2024 yang dilampirkan dalam Laporan ini.

Realization of Transactions with Related Parties

The disclosure of the realization of transactions with related parties is presented in Note 29 of the PUSRI 2024 Consolidated Audited Financial Statements, which is attached to this Report.

Tabel Perkembangan Saldo Transaksi Pihak Berelasi

Table of Related Party Transaction Balance Development

 Rp Juta
Rp Million

Aset Assets	2024	2023	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			2024	2023	Jumlah Total	Persentase Percentage
Jumlah Kas di Bank Cash in Bank	251.758	23.808	0,99	0,09	227.950	957,45
Jumlah Deposito Berjangka Total Time Deposits	259.383	3.137.750	1,02	11,54	(2.878.367)	(91,73)
Piutang Usaha Accounts Receivable	108.633	46.779	0,43	0,17	61.854	132,23
Piutang Subsidi Subsidy Receivables	43.205	1.054.409	0,17	3,88	(1.011.204)	(95,90)
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	108.612	127.903	0,43	0,47	(19.291)	(15,08)
Piutang Lainnya Other Receivables	65.518	185.854	0,26	0,68	(120.335)	(64,75)
Aset Lancar Lainnya Other Current Asset	7.625	2.296	0,03	0,01	5.329	232,10
Jumlah Aset Total Assets	25.535.320	27.180.230	100,00	100,00	(1.644.910)	(6,05)
Liabilitas Liabilities						
Pinjaman Pemegang Saham Shareholder Loans	775.000	3.460.000	11,25	38,88	(2.685.000)	(77,60)
Utang Usaha Accounts Payable	52.287	49.366	0,76	0,55	2.921	5,92
Utang Lain-lain Other Payables	2.958	46.388	0,04	0,52	(43.430)	(93,62)
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	1.857.193	1.183.770	26,97	13,30	673.423	56,89
Utang Subsidi Subsidy Payable	31.921	0	0,46	0,00	31.921	0
Utang Retensi Retention Payable	15.926	0	0,23	0,00	15.926	0
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	6.886.633	8.900.129	100,00	100,00	(2.013.496)	(22,62)
Pendapatan Revenue						
Jumlah Pendapatan dari Pihak Berelasi Total Revenue from Related Parties	7.512.890	7.251.128	55,52	54,23	261.762	3,61
Pendapatan Denda dan Klaim Penalty and Claim Income	250.225	13.886	1,85	0,10	236.339	1701,99
Jumlah Pendapatan Total Revenue	13.532.865	13.371.676	100,00	100,00	161.189	1,21

Tabel Perkembangan Saldo Transaksi Pihak Berelasi
Table of Related Party Transaction Balance Development

Rp Juta
Rp Million

Aset Assets	2024	2023	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			2024	2023	Jumlah Total	Persentase Percentage
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue						
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi Total Purchases from Related Parties	4.520.692	4.024.720	38,68	36,53	495,972	12,32
Kompensasi Manajemen Kunci Key Management Compensation	38.527	43.568	0,33	0,40	(5.041)	(11,57)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	11.686.789	11.017.724	100,00	100,00	669.065	6,07

Tabel Piutang Usaha Berelasi
Table of Related Party Accounts Receivable

No	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)
1	PT Petrokimia Gresik	Pupuk Indonesia Grup	Non Pupuk	57.695
2	PT Pupuk Indonesia Niaga	Pupuk Indonesia Grup	pupuk	46.954
3	Lain-lain Others			3.984
Jumlah Total				108.633

Tabel Piutang Subsidi Berelasi
Table of Related Party Subsidy Receivables

No	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah Government	Pupuk Fertilizer	43.205
Jumlah Total				43.205

Tabel Piutang Subsidi Berelasi – Belum Ditagih
Table of Related Subsidy Receivables – Unbilled

No	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah Government	Pupuk Fertilizer	108.612
Jumlah Total				108.612

Tabel Piutang Lain Berelasi
Table of Related Other Receivables

No	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)
1	PT Petrokimia Gresik	Pupuk Indonesia Grup	15.399
2	PT Pupuk Kujang	Pupuk Indonesia Grup	10.183
3	PT ReKayasa Industri	Pupuk Indonesia Grup	9.702

Tabel Piutang Lain Berelasi

Table of Related Other Receivables

No	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)
4	PT Pupuk Kaltim	Pupuk Indonesia Grup	7.027
5	PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk Indonesia Grup	1.659
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pupuk Indonesia Grup	280
7	PT Pupuk Indonesia Logistik	Pupuk Indonesia Grup	13
8	Lain-lain Others		21.256
Jumlah Total			65.519



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, PUSRI senantiasa memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan usahanya. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perusahaan pada tahun buku 2024 adalah sebagai berikut.





CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

As a company that complies with prevailing laws and regulations, PUSRI consistently monitors changes in legislation for implementation in its business activities. The regulatory changes that affected the Company in the 2024 financial year are as follows.

Peraturan Regulation	Keterangan Information	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud pada pokoknya mengatur terkait dengan akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum.	Perusahaan perlu memperkuat pengawasan terkait dengan penggunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan Perusahaan.
The Republic of Indonesia Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions	The second amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions primarily regulates the consequences of misuse of electronic information, electronic documents, information technology, and/or electronic transactions that may disrupt public order.	The Company needs to strengthen supervision related to the use of electronic information, electronic documents, information technology, and/or electronic transactions conducted by its employees to ensure compliance with applicable regulations and to prevent any harm to the Company.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan yang diterbitkan setiap bulan oleh Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Keputusan ini memberikan harga acuan untuk penggunaan mineral logam dan batubara setiap bulannya.	Perusahaan selaku pengguna batubara untuk proses bahan baku industri berkewajiban untuk memenuhi ketentuan harga acuan yang ditetapkan.
The Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia concerning the Reference Prices for Metal Minerals and Reference Prices for Coal, issued monthly by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.	This decree provides the reference prices for the use of metal minerals and coal on a monthly basis.	As a coal user for industrial raw material processes, the Company is obligated to comply with the established reference price regulations.

Peraturan Regulation	Keterangan Information	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 9 of 2024 concerning the Management of Waste Containing Hazardous and Toxic Materials and Hazardous and Toxic Waste.</p>	<p>Peraturan ini mengatur tentang kewajiban bagi penghasil sampah dan/atau limbah B3 untuk melakukan pengelolaan yang meliputi pengurangan dan penanganan atas sampah/ limbah B3, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya</p> <p>This regulation governs the obligations of hazardous and toxic waste (B3) producers to carry out management activities, including the reduction and handling of hazardous and toxic waste, as well as sanctions for violations.</p>	<p>Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sebagai efek dari proses produksi.</p> <p>The Company needs to enhance supervision over the management of hazardous and toxic waste (B3) generated as a result of the production process.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 11 of 2024 concerning the Implementation of the Indonesian National Qualification Framework in the Field of Hazardous and Toxic Waste Management.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan limbah B3 harus didukung dan dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pelaku Usaha pengelolaan limbah B3 (jasa pengelolaan, penghasil limbah B3, dan usaha/kegiatan berisiko tinggi) diwajibkan untuk memiliki tenaga kerja yang telah bersertifikasi kompetensi di bidang tersebut. This regulation stipulates that the management of hazardous and toxic waste (B3) must be supported and carried out by competent personnel who meet the Indonesian National Qualification Framework (KKNI) standards in the field of hazardous and toxic waste management. Business actors involved in hazardous and toxic waste (B3) management (including waste management services, waste producers, and high-risk businesses/ activities) are required to have personnel certified for competency in the relevant field. 	<p>Perusahaan selaku pelaku usaha yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah B3 perlu memastikan memiliki tenaga kerja yang bersertifikasi dalam pengelolaan limbah B3.</p> <p>As a business entity generating hazardous and toxic waste (B3) in its production process, the Company needs to ensure it has certified personnel for hazardous and toxic waste management.</p>
<p>Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.</p> <p>Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 3 of 2024 concerning the Joint Utilization of Natural Gas Transportation Facilities via Pipeline.</p>	<p>Peraturan ini mengatur tentang penggunaan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh transporter agar dapat dimanfaatkan bersama oleh shipper dan calon shipper.</p> <p>This regulation governs the use of natural gas transportation facilities via pipelines owned by transporters to be jointly utilized by shippers and prospective shippers.</p>	<p>Perusahaan selaku pelaku usaha pengguna gas yang telah memiliki Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG) perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan dimaksud agar pengangkutan gas sebagai bahan baku produksi tidak terganggu.</p> <p>As a business entity using gas and holding a Gas Transportation Agreement (GTA), the Company needs to comply with the provisions stipulated in the regulation to ensure uninterrupted gas transportation as a raw material for production.</p>
<p>Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.</p> <p>Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 255.K/MG.01/MEM.M/2024 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number: 91.K/MG.01/MEM.M/2023 regarding Specific Natural Gas Users and Specific Natural Gas Prices in the Industrial Sector.</p>	<p>Peraturan ini mengatur penetapan harga gas bumi tertentu untuk pengguna gas bumi tertentu.</p> <p>This regulation governs the determination of specific natural gas prices for designated natural gas users.</p>	<p>Perusahaan selaku pengguna gas bumi memiliki kepastian harga dalam penggunaan gas bumi.</p> <p>As a natural gas user, the Company benefits from price certainty in the use of natural gas.</p>

Peraturan Regulation	Keterangan Information	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	Perubahan UU Paten ini mengatur terkait penyesuaian dan perkembangan paten agar selaras dengan perkembangan hukum internasional, peningkatan pelayanan pendaftaran paten kepada masyarakat, mengatur tentang paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.	Perusahaan yang telah memiliki beberapa paten dapat menjadikan paten sebagai jaminan fidusia.
 Law of the Republic of Indonesia Number 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 13 of 2016 on Patents.	This amendment to the Patent Law regulates adjustments and developments in patents to align with international legal developments, improve patent registration services for the public, and stipulates that patents can be used as fiduciary collateral.	The Company, which holds several patents, may use its patents as fiduciary collateral.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2024, terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang rinciannya dijelaskan pada tabel di bawah ini:



Perubahan Kebijakan Change in Policy	Alasan Perubahan Reason for Change	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on the Financial Statements
<ol style="list-style-type: none"> Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar; Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; Amandemen PSAK 116: Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik; Amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan; Amandemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan Amandemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok. 	<ol style="list-style-type: none"> Entitas untuk mengungkapkan "informasi kebijakan akuntansi material" dibandingkan dengan "kebijakan akuntansi signifikan". Mengklarifikasi bahwa tidak semua kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian, atau kondisi material lainnya adalah material dalam laporan keuangan. Amandemen PSAK 116 menambahkan persyaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa balik Amandemen PSAK 212 memperkenalkan pengecualian sementara terhadap persyaratan untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua Amandemen PSAK 207 dan 107 tentang memperjelas pengungkapan pengaturan pembiayaan pemasok 	<p>Tidak terdapat dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya</p> <p>There was no material impact on the amounts reported in the current year or the previous year.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements - Classification of Current or Non-current Liabilities; Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants; Amendment to PSAK 116: Leases - Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions; Amendment to PSAK 212: Income Taxes; Amendment to PSAK 207: Statement of Cash Flows; Amendment to PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Supplier Financing Arrangements. 	<ol style="list-style-type: none"> Entities are required to disclose "material accounting policy information" instead of "significant accounting policies." Clarification that not all accounting policies related to transactions, events, or other material conditions are themselves material to the financial statements. The amendment to PSAK 116 adds subsequent measurement requirements for sale and leaseback transactions. The amendment to PSAK 212 introduces a temporary exception from the requirements to recognize and disclose information on deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income tax The amendments to PSAK 207 and 107 clarify disclosure requirements for supplier financing arrangements. 	

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Sebagai entitas anak dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN dan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa Tingkat Kesehatan BUMN dinilai menggunakan peringkat (*rating*) yang didasarkan pada Pemeringkatan.

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat Kesehatan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2024 adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia yang disampaikan pada tanggal 19 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2025 dengan hasil: AA-.
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): idAAA/Stable .
3. Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PUSRI pada Tahun Buku 2024 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri nomor PER-02/MBU/03/2024.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Perusahaan melakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagai alat untuk menentukan posisi Perusahaan melalui pendekatan analisis faktor internal, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan serta analisis faktor eksternal, yaitu dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Analisis ini dilakukan berkesinambungan.

Faktor yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) secara tahunan dievaluasi untuk mengukur efektivitas pencapaian dan kesesuaian arah jangka panjang yang akan dituju oleh Perusahaan. Penentuan nilai dilakukan pada masing-masing faktor dengan cara *brainstorming* oleh Komite RKAP bersama Direksi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan asesmen antara lain arahan pemegang saham pada RUPS RKAP tahun 2024, pencapaian kinerja tahun 2024, dan isu-isu internal dan eksternal yang dinilai berdampak terhadap pencapaian kinerja tahun 2024.

COMPANY SOUNDNESS RATING

As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), a State-Owned Enterprise (SOE), and in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023, the soundness of SOEs is assessed using a rating based on a ranking system.

The rating provided for the soundness assessment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for the year 2024 is the rating conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia, which was delivered on May 19, 2025 with the following results:

1. Standalone Rating, signed on May 19, 2025, with the final rating result: AA-.
2. Final Rating: idAAA/Stable .
3. Therefore, the soundness rating for PUSRI for the financial year 2024 is Very Sound (AAA) as stipulated in the Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2024.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Management's Assessment of Factors That Could Significantly Affect the Company's Going Concern

The company conducts a Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis as a tool to determine the company's position through internal factor analysis, identifying strengths and weaknesses within the company, as well as external factor analysis, identifying opportunities and threats that may affect the company's ability to continue its operations. This analysis is conducted continuously.

The factors established in the Long-Term Plan (RJP) are evaluated annually to measure the effectiveness of achievement and the alignment with the company's long-term objectives. The value of each factor is determined through brainstorming sessions conducted by the RKAP Committee together with the Board of Directors.

Assumptions Used by Management in Assessing Factors That Could Significantly Affect the Company's Business Continuity

The assumptions used by management in conducting the assessment include the shareholders' directions at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2024 RKAP, the performance achievements in 2024, and internal and external issues considered to impact the performance achievements of the company in 2024.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun 2025

Berikut ini disampaikan hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PUSRI pada tahun 2025

1. Kecelakaan kerja/sabotase/aksi terorisme di fasilitas vital Perusahaan
2. Perubahan iklim yang berdampak terhadap sektor pertanian.
3. Fluktuasi harga amonia, urea, batubara, dan komoditas lainnya di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global, serta kebijakan negara-negara utama eksportir pupuk.
4. Fluktuasi nilai tukar Rupiah sebagai dampak dinamika perekonomian dan geopolitik global.
5. Pasokan gas bumi sesuai kebutuhan produksi dengan harga yang kompetitif.
6. Pasokan bahan baku pupuk NPK di tengah dinamika geopolitik global.
7. Rencana perubahan kebijakan subsidi pupuk.
8. Progress pembangunan pabrik P-III B
9. Rencana streamlining dan subholdingisasi Pupuk Indonesia Group
10. Pendangkalan sungai Musi yang menjadi jalur utama shipping-out produk Perusahaan dan industri di Sumatera Selatan..



STRATEGI PERBAIKAN PERUSAHAAN

Untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, PUSRI telah merencanakan strategi 4C (*cost leadership, competitive to market, competency of employees, dan clean industry for sustainability*) dengan rincian sebagai berikut:

1. **Cost Leadership**
 - a. Peningkatan keandalan dan efisiensi produk guna mendukung *operational excellence* dan *energy management system* (EMS).
 - b. Pengelolaan pasokan gas bumi dengan mitra- mitra strategis.
 - c. Implementasi digital *plant fertilizer* serta pengembangan digitalisasi proses bisnis lainnya.
 - d. Pembangunan pabrik Pusri-III B yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan *reliability* tinggi.
 - e. Penerapan transaksi lindung nilai (*hedging*) untuk meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar.
 - f. Implementasi *cost reduction* program di seluruh lini bisnis Perusahaan.
2. **Competitive to Market**
 - a. Diversifikasi produk utama Perusahaan melalui pengembangan produk PUSRI DEF (*Diesel Exhaust Fluid*).
 - b. Komersialisasi produk-produk hasil riset dan inovasi.
 - c. Implementasi Program Makmur/Agrosolution.
 - d. Riset sektor perkebunan dan bidang prospektif lainnya dari hulu ke hilir.
 - e. Optimalisasi aset dan jasa pemeliharaan pabrik untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan.
 - f. Sinergi dengan anak perusahaan dalam diversifikasi portofolio bisnis.

Factors that Could Significantly Affect the Company's Business Continuity in 2025

The following are the factors that could significantly affect PUSRI' business continuity in 2025:

1. Workplace accidents, sabotage, or acts of terrorism at the Company's critical facilities.
2. Climate change impacting the agricultural sector.
3. Fluctuations in the prices of ammonia, urea, coal, and other commodities amid global economic and geopolitical dynamics, as well as policies of major fertilizer-exporting countries.
4. Volatility in the Rupiah exchange rate due to global economic and geopolitical developments.
5. Availability of natural gas in line with production needs and at competitive prices.
6. Supply of raw materials for NPK fertilizer amid global geopolitical dynamics.
7. Planned changes to fertilizer subsidy policies.
8. Progress of the P-III B plant construction.
9. Plans for streamlining and sub-holding restructuring within the Pupuk Indonesia Group.
10. Siltation of the Musi River, which serves as the main shipping route for the Company's products and industrial activities in South Sumatra.

COMPANY IMPROVEMENT STRATEGY

To support the achievement of the various objectives that have been set, PUSRI has planned a 4C strategy (*cost leadership, competitive in the market, competency of employees, and clean industry for sustainability*) with the following details:

1. **Cost Leadership**
 - a. Improvement of product reliability and efficiency to support operational excellence and energy management system (EMS).
 - b. Management of natural gas supply with strategic partners.
 - c. Implementation of digital plant fertilizer and development of other business process digitization.
 - d. Construction of the Pusri-III B plant that is more efficient, environmentally friendly, and highly reliable.
 - e. Implementation of hedging transactions to minimize exchange rate fluctuation risks.
 - f. Implementation of a cost reduction program across all business lines of the Company.
2. **Competitive to Market**
 - a. Diversification of the Company's main products through the development of PUSRI DEF (*Diesel Exhaust Fluid*).
 - b. Commercialization of products resulting from research and innovation.
 - c. Implementation of the Makmur/Agrosolution Program.
 - d. Research in the plantation sector and other prospective fields from upstream to downstream.
 - e. Optimization of assets and plant maintenance services to increase the Company's revenue.
 - f. Synergy with subsidiaries in diversifying the business portfolio.

3. *Competency of Employee*

- a. Implementasi Program Transformasi SDM Pupuk Indonesia, Manajemen Kinerja Unggul, Inovasi, dan Transformasi Budaya AKHLAK.
- b. Program pembelajaran dan pengembangan SDM dan *digital learning*.

4. *Clean Industry for Sustainability*

- a. Program dekarbonisasi dan konservasi air untuk mewujudkan industri hijau dan menjaga keberlangsungan alam.
- b. Program pengembangan masyarakat yang selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG).
- c. Pengelolaan limbah Perusahaan untuk mewujudkan ekonomi sirkuler.
- d. Implementasi *good corporate governance*.

3. *Competency of Employee*

- a. Implementation of the Pupuk Indonesia Human Resource Transformation Program, Excellent Performance Management, Innovation, and the AKHLAK Cultural Transformation.
- b. Human Resource learning and development programs and digital learning.

4. *Clean Industry for Sustainability*

- a. Decarbonization and water conservation programs to realize a green industry and preserve the sustainability of nature.
- b. Community development programs aligned with the achievement of sustainable development goals (SDGs).
- c. Waste management programs to achieve a circular economy.
- d. Implementation of good corporate governance.



05

Dalam semangat Sinergi untuk Swasembada Pangan Nasional, hadir sebagai entitas yang tidak menyediakan solusi pertanian, memberi warna bagi masa depan di sini bukan sekadar simbol, tetapi mencerminkan peran aktif perusahaan perubahan positif, melahirkan generasi menghadapi tantangan





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

Sumber Daya Manusia

Human Capital



“



PUSRI memandang karyawan merupakan aset paling berharga dan menjadi faktor utama bagi tercapainya tujuan Perusahaan maupun tercapainya target-target program keberlanjutan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karenanya pengelolaan dan pengembangan SDM di PUSRI menjadi bagian dari realisasi program suksesi penyiapan kader-kader potensial untuk menduduki jabatan strategis tertentu, guna menjamin kemampuan mengatasi persaingan bisnis, peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha.



PUSRI views its employees as the most valuable asset and a key factor in achieving the Company's objectives, as well as the targets of its sustainability programs and long-term business continuity. Therefore, the management and development of human resources at PUSRI are integral to the implementation of succession programs, aimed at preparing potential future leaders to occupy strategic positions. This ensures the Company's ability to face business competition, improve performance, and maintain business continuity.



Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM

Human Capital Management Policies and Strategies

PUSRI telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut berkenaan dengan peningkatan sikap saling percaya antara PUSRI dengan karyawan serta peningkatan kapabilitas dan kapasitas karyawan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

PUSRI menyadari bahwa salah satu tanggung jawab utama adalah pengelolaan dan peningkatan kompetensi SDM guna menunjang prioritas bisnis lainnya. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan dan peningkatan kompetensi SDM PUSRI dilakukan melalui pola pengembangan komprehensif dengan pendekatan *Learning Value Chain*, dimana proses peningkatan kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran organisasi, sebagai pondasi yang handal dalam membangun sistem dan solusi pembelajaran yang efektif guna mendukung implementasi strategi dan operasional perusahaan.

Dalam proses pembelajaran sendiri, dilakukan strategi 70-20-10, yaitu 70% *experiential learning*, 20% *social learning*, dan 10% *formal learning*. Implementasi metode pembelajaran 70-20-10 tersebut dapat berupa pelatihan/sertifikasi, proses *mentoring/coaching*, dan melalui mekanisme penugasan khusus, penugasan ke proyek-proyek, dan sebagainya.

Human Capital Management bertanggung jawab menjalankan kegiatan pengembangan SDM PUSRI, didukung oleh berbagai perangkat manajemen SDM yang telah tersedia. Perangkat dimaksud antara lain: kamus kompetensi; kebutuhan kompetensi jabatan; pengukuran kompetensi, dilakukan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten di bidangnya; sistem *Learning Experience Platform*, sistem *Knowledge Management*, serta *Human Capital Management System (HCMS)*. Melalui perangkat-perangkat tersebut diharapkan penilaian kompetensi karyawan akan lebih objektif. Pengembangan SDM di lingkungan PUSRI juga lebih terarah sesuai dengan minat karir dan kompetensinya.

PUSRI juga mendukung implementasi kebijakan Holding yang tertuang dalam *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap Pupuk Indonesia Group tahun 2022-2027* dimana salah satunya adalah penggunaan *Single Platform* yang bertujuan untuk menyelaraskan proses-proses SDM antar perusahaan PI Group - PI SMART. Adapun PI SMART saat ini tidak hanya digunakan sebagai *tool* untuk pengukuran kinerja karyawan dan *updating data pribadi* menggunakan standar CV BUMN, tetapi juga keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial di Perusahaan. Tidak hanya itu, PUSRI juga mendukung implementasi program Holding untuk membentuk *competency based career movement* untuk meningkatkan mobilisasi pegawai PI Group melalui program *Talent Mobility* dimana program ini bertujuan untuk memaksimalkan kapabilitas *talent*, *exposure*, dan pengalaman.

PUSRI has established and continuously implements human capital management policies. Fundamentally, these policies aim to enhance mutual trust between the Company and its employees, as well as to improve employee capabilities and capacities to achieve corporate objectives.

PUSRI recognizes that one of its primary responsibilities is the management and development of human resource competencies to support other business priorities. Therefore, PUSRI's HR competency development strategy is carried out through a comprehensive development model based on the Learning Value Chain approach. This ensures that competency enhancement processes are aligned with the organization's learning needs, serving as a solid foundation for building effective learning systems and solutions to support the implementation of corporate strategies and operation

In the learning process, the 70-20-10 strategy is applied, consisting of 70% experiential learning, 20% social learning, and 10% formal learning. The implementation of this 70-20-10 learning method includes training/certification, mentoring/coaching processes, as well as through special assignments, project-based assignments, and other similar mechanisms.

Human Capital Management is responsible for implementing PUSRI's human resource development activities, supported by a range of existing HR management tools. These tools include: a competency dictionary; job competency requirements; competency assessments conducted in collaboration with qualified institutions; a Learning Experience Platform; a Knowledge Management system; and a Human Capital Management System (HCMS). Through these tools, employee competency assessments are expected to be more objective, and HR development within PUSRI can be more targeted, aligned with employees' career interests and competencies.

PUSRI also supports the implementation of Holding policies as outlined in the *Pupuk Indonesia Group Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap 2022-2027*, one of which includes the use of a *Single Platform* to harmonize HR processes across the PI Group companies—PI SMART. Currently, PI SMART functions not only as a tool for employee performance measurement and personal data updates based on the SOE-standard CV, but also for tracking employee engagement in corporate social activities. Furthermore, PUSRI supports the Holding program to establish a competency-based career movement aimed at enhancing talent mobility across the PI Group. This *Talent Mobility* program seeks to maximize talent capability, exposure, and experience across the Group.

Pengelolaan SDM

Human Capital Management



SISTEM REKRUTMEN

Pelaksanaan rekrutmen SDM di lingkungan PUSRI mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan. Sistem rekrutmen juga berpedoman pada standar kompetensi seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh nilai-nilai Perusahaan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan. PUSRI senantiasa berupaya menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat sehingga tercipta SDM berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.

Strategi pemenuhan kebutuhan karyawan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu rekrutmen eksternal (berdasarkan SK/DIR/526/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) dan internal melalui proses promosi/rotasi/mutasi. Proses rekrutmen karyawan PUSRI juga mempertimbangkan Perencanaan Tenaga Kerja dan Rekrutmen tahun 2023-2027, yang intinya menyatakan bahwa jumlah karyawan yang akan direkrut dari luar Perusahaan maksimal sebesar 70% dari jumlah karyawan yang pensiun di tahun berjalan.

RECRUITMENT SYSTEM

The recruitment of human resources at PUSRI is based on projected employee needs for the current year. The recruitment system adheres to competency standards as outlined in the Company's Articles of Association, while upholding the Company's core values. Recruitment is conducted openly in accordance with the required needs and qualifications. PUSRI consistently strives to place the right people in the right roles, thereby cultivating high-quality human capital capable of long-term growth.

The strategy for fulfilling employee needs is carried out through two primary methods: external recruitment (based on Director's Decree No. SK/DIR/526/2021 dated 12 November 2021 concerning Recruitment Guidelines for Prospective Employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) and internal recruitment through promotion, rotation, or transfer. PUSRI's recruitment process also takes into account the 2023-2027 Manpower Planning and Recruitment Plan, which states that the number of employees to be recruited from outside the Company shall not exceed 70% of the total number of employees retiring in the current year.

Proses rekrutmen harus bebas kepentingan dan bebas tekanan. Calon karyawan yang direkrut memiliki kompetensi yang telah sesuai dengan kebutuhan PUSRI, karena telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, *aptitude test*, tes keahlian (untuk jurusan tertentu seperti operator *crane* dan *welder*), psikotes, Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris dengan standar TOEFL, tes kesehatan, dan wawancara.

Bagi calon karyawan dari lulusan Strata 1 (S1), Direksi secara khusus melakukan wawancara untuk memastikan agar calon karyawan yang diperoleh benar-benar mampu dan memiliki kualitas terbaik. Pada kegiatan rekrutmen eksternal, PUSRI bekerja sama dengan konsultan rekrutmen independen yang dalam penunjukannya telah melalui seleksi *beauty contest*.

Pemenuhan kebutuhan karyawan melalui sumber internal maupun sumber eksternal, dilakukan dengan program atau jalur sebagai berikut:

1. Rekrutmen Umum merupakan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka melalui media massa dan *online*.
2. Rekrutmen *Roadshow* adalah rekrutmen yang dilakukan langsung ke universitas dan sekolah yang memiliki kualifikasi khusus, misalnya Sekolah Analisis Kimia, Sekolah STM Pembangunan.
3. Rekrutmen bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup, yaitu rekrutmen yang dilakukan bersama-sama dengan anggota *holding* di PT Pupuk Indonesia (Persero) lainnya.
4. Rekrutmen bersama Kementerian BUMN (RBB), yaitu rekrutmen yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh BUMN yang ada di Indonesia.

PUSRI juga memiliki kebijakan untuk menerima tenaga kerja lokal untuk jenis jabatan tertentu dengan tetap melalui proses seleksi agar ada kesamaan dalam kualifikasi dan kompetensi. Tenaga kerja lokal didefinisikan sebagai tenaga kerja yang berasal dari wilayah-wilayah operasional Perusahaan.

Dalam rangka memberdayakan putra daerah, khusus untuk tingkat pendidikan SLTA yang direkrut melalui jalur rekrutmen umum, peserta dibatasi hanya berasal dari Sumatera Selatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan oleh PUSRI.

Dari Tahun 2021-2024, PUSRI belum melakukan rekrutmen karyawan.

The recruitment process must be free from conflicts of interest and external pressures. Candidates must meet PUSRI's competency requirements, having passed a rigorous selection process that includes administrative screening, aptitude tests, skill assessments (for specific roles such as crane operators and welders), psychological tests, Academic Potential Test (TPA), English proficiency tests (TOEFL standard), medical exams, and interviews.

For candidates with a Bachelor's degree (S1), the Board of Directors conducts personal interviews to ensure the selected individuals are truly capable and of the highest quality. For external recruitment activities, PUSRI collaborates with independent recruitment consultants who are appointed through a "beauty contest" selection process.

Recruitment through both internal and external sources is implemented via the following programs or channels:

1. General Recruitment, conducted openly through mass media and online platforms.
2. Roadshow Recruitment, carried out directly at universities and specialized schools, such as Chemical Analyst Schools and Technical High Schools (STM Pembangunan).
3. Joint Recruitment with PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, a recruitment program conducted in collaboration with other companies under the PT Pupuk Indonesia (Persero) holding group.
4. Joint Recruitment with the Ministry of State-Owned Enterprises (RBB), which is a collaborative recruitment process conducted together with all State-Owned Enterprises (SOEs) across Indonesia.

PUSRI also maintains a policy to hire local workers for specific positions, while still enforcing a selection process to ensure consistent qualifications and competencies. Local labor refers to workers originating from the Company's operational areas.

To empower local talent, PUSRI limits general recruitment at the senior high school level (SLTA) to candidates from South Sumatra. This initiative supports PUSRI's ongoing community empowerment programs.

From 2021 to 2024, PUSRI has not conducted any employee recruitment.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PUSRI mengembangkan kompetensi SDM dengan merealisasikan program-program pelatihan secara komprehensif dengan rincian: 10% *structure learning* (melalui pelatihan, *e-learning*, seminar, *self-study*), 20% *learning from others* (melalui proses *mentoring/coaching/feedback*), dan 70% *learning from experience* (melalui penugasan khusus, rotasi, *job enrichment*, *action learning & problem solving*).



Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mendukung peningkatan kinerja PUSRI, Pengembangan SDM PUSRI mengintegrasikan program pelatihan dan pengembangan SDM dengan strategi PUSRI. Program pendidikan dan pelatihan pegawai memfasilitasi pegawai yang mempunyai kualifikasi program profesional di segala disiplin ilmu, baik dalam negeri maupun internasional, dan merupakan sarana peningkatan kompetensi pegawai guna mencapai pengembangan profesionalisme pegawai.

Adapun program pelatihan yang dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Managerial & Leadership Eselon 1, 2, 3, 4, dan 5: Bertujuan untuk pemenuhan *soft competency* dan *hard competency* bagi pejabat Eselon 1, 2, 3, 4, dan 5 khususnya terkait kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Inti (KI):
3. Pelatihan Purna Tugas:

Adapun total *mandays* pelatihan yang dicapai Perusahaan di tahun 2024 adalah 16.328 *mandays* di luar *mandays* Pembimbing KP/Riset. Adapun rata-rata jam pembelajaran karyawan adalah 73 jam/ orang/tahun. Ringkasan tabel pengembangan karyawan disampaikan pada bagian Profil Perusahaan.

Uraian lebih lengkap mengenai program pengembangan kompetensi karyawan PUSRI disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PUSRI, dengan sub-judul yang sama.

Selama tahun 2024, PUSRI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp25,46 miliar, naik 9,39% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp 23,28 miliar.

PENILAIAN KINERJA

Hasil evaluasi akan diintegrasikan dengan manajemen kinerja melalui penilaian prestasi kerja. Evaluasi kinerja ditingkatkan dengan evaluasi perilaku (integritas, ketertanggung di bawah tekanan, motivasi, penguasaan keterampilan teknis, dan lain-lain) oleh atasan, bawahan, diri mereka sendiri, kolega, dan pelanggan (penilaian 360). Evaluasi ini didasarkan pada penilaian objektif terhadap kesepakatan kerja antara atasan dan bawahan dalam mencapai KPI individu. Penilaian ini dilakukan setiap enam bulan sekali atau dua kali setahun.

COMPETENCY DEVELOPMENT

PUSRI develops human capital competencies by implementing comprehensive training programs based on the 70-20-10 learning model: 10% structured learning (through training, e-learning, seminars, and self-study), 20% learning from others (through mentoring, coaching, and feedback), 70% learning from experience (through special assignments, job rotation, job enrichment, action learning, and problem-solving).

To ensure all programs and activities are carried out effectively, efficiently, and support the improvement of PUSRI's performance, Human Capital Development integrates training and development programs with the company's overall strategy. Education and training programs are provided to employees across all disciplines, both domestically and internationally, and serve as a means to enhance employee competencies in pursuit of professional development..

The training programs conducted in 2024 included the following:

1. Managerial & Leadership Training for Echelon Levels 1 to 5: Aimed at fulfilling both soft and hard competencies for Echelon 1–5 personnel, particularly in managerial and leadership skills.
2. Core Competency (CC) Training and Certification:
3. Pre-Retirement Training:

The total number of training mandays achieved by the Company in 2024 was 16,328, excluding mandays for internship/research supervisors. The average employee learning hours amounted to 73 hours per person per year. A summary table of employee development is presented in the Company Profile section.

A summary of employee development is presented in the Company Profile section.

A more detailed explanation of PUSRI's employee competency development programs can be found in the PUSRI Sustainability Report under the same subheading. In 2024, PUSRI allocated Rp25.46 billion for employee competency development, an increase of 9.39% from the 2023 realization of Rp23.28 billion.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The results of evaluations are integrated into performance management through work performance appraisals. Performance evaluation is enhanced by behavioral assessments (including integrity, dependability under pressure, motivation, mastery of technical skills, and others) conducted by supervisors, subordinates, self-assessments, peers, and customers (360-degree evaluation). This evaluation is based on an objective assessment of the work agreement between supervisors and subordinates in achieving individual KPIs. The evaluation is conducted semiannually or twice a year.

Pada tahun 2024, PUSRI telah melaksanakan program asesmen karyawan, dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga. Program ini telah dilakukan terhadap 143 orang karyawan dengan uraian sebagai berikut:

1. Eselon I : 9 orang
2. Eselon II : 32 orang
3. Eselon III : 54 orang
4. Eselon IV : 42 orang
5. Eselon V : 4 orang
6. Pelaksana : 2 orang

PENGEMBANGAN KARIER

Kebijakan mengenai pengembangan karier di PUSRI diatur dalam SK/DIR/156/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Peraturan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Karyawan, serta Komite Jabatan dan Komite PSDM.

Dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi karyawan, Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus setiap tahun. Program pengembangan karier juga ditujukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja yang sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Pada tahap awal, karyawan yang telah diterima di Perusahaan akan mengikuti program *on boarding* berupa *Management Trainee*. Karyawan dikenalkan dengan seluruh proses bisnis Perusahaan, terutama pada pembentukan tata nilai dan budaya Perusahaan. Kompetensinya akan dinilai melalui kegiatan *assessment* kompetensi untuk mengetahui potensi intelektual, kepemimpinan, serta *soft competency* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Pengembangan karier dan kompetensi karyawan juga dilakukan melalui program *Talent Management* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK/DIR/407/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman dan Prosedur PT Pupuk Indonesia (Persero) Bidang SDM di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pada tahun 2024, PUSRI memiliki total 350 karyawan yang termasuk kategori *talent* (eselon I, II, III dan IV) terdiri dari 254 karyawan *talent longlist* dan 96 karyawan *talent shortlist* atau sekitar 19,53% dari total karyawan Perusahaan

Adapun jumlah karyawan yang dipromosikan pada tahun 2024, adalah 479 karyawan atau 26,72% dari total karyawan Perusahaan tahun 2024 yaitu sebanyak 1.790 orang. Berikut disampaikan data perkembangan promosi tahun 2023-2024:

In 2024, PUSRI implemented an employee assessment program in collaboration with a third party. The program was conducted for 143 employees, with the following breakdown:

1. Echelon I: 9 employees
2. Echelon II: 32 employees
3. Echelon III: 54 employees
4. Echelon IV: 42 employees
5. Echelon V: 4 employees
6. Staff level: 2 employees

CAREER DEVELOPMENT

Career development policies at PUSRI are governed by Director's Decree No. SK/DIR/156/2016 dated April 27, 2016 concerning the Regulations on Employee Rotation, Transfer, and Promotion, as well as by the Position Committee and Human Capital Development Committee.

As part of the promotion process to fill certain positions and as a part of the employee succession planning process, the Company holds special training programs annually. Career development programs are also aimed at enhancing employee competencies and motivating them to improve their performance in line with business needs and the achievement of the Company's performance targets.

At the initial stage, newly hired employees will undergo an onboarding program in the form of a Management Trainee program. Employees are introduced to the Company's entire business process, particularly focusing on the development of corporate values and culture. Their competencies are assessed through a competency assessment program to evaluate intellectual potential, leadership, and soft skills necessary to meet expected performance standards.

Career and competency development is also conducted through the Talent Management program, established under the Director's Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/407/2022 dated December 5, 2022 concerning the Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero)'s Human Capital Guidelines and Procedures at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

In 2024, PUSRI had a total of 350 employees classified as talent (echelons I, II, III, and IV), consisting of 254 employees on the talent longlist and 96 employees on the talent shortlist, representing approximately 19.53% of the company's total workforce.

The number of employees promoted in 2024 was 479, accounting for 26.72% of the company's total workforce of 1,792 employees that year. The following data presents the promotion trends for 2023-2024:

Tabel Promosi Karyawan PUSRI, 2023-2024
Table of Employee Promotions at PUSRI, 2023-2024

No	Tahun	2023	2024
1	Promosi	374	479
2	Rotasi	1.818	482

REMUNERASI

Untuk setiap unit kerja, Perusahaan telah memenuhi Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/ Kota (UMP/K) yang ditetapkan pemerintah. Program dan fasilitas kesejahteraan karyawan Perusahaan dikompensasi sesuai dengan aturan dan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk membayar upah yang sesuai. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2023-2025 yang dibentuk pada 27 Juli 2023 mengatur seluruh kebijakan pengelolaan SDM, kesejahteraan, dan fasilitas.

REMUNERATION

For each unit, the Company complies with the Provincial/District/City Minimum Wages (UMP/K) set by the government. The Company's employee welfare programs and benefits are compensated in accordance with the regulations and policies set by the Ministry of Manpower and Transmigration, including the payment of appropriate wages. The Collective Labor Agreement (PKB) 2023-2025, established on July 27, 2023, governs all human resource management policies, welfare, and benefits.

Tabel Remunerasi dan Tunjangan Karyawan

Table of Employee Benefits and Remuneration

No	Tunjangan Karyawan Employee Benefits	Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities
1	Tunjangan Jabatan, yang terdiri dari Tunjangan Pimpinan dan Tunjangan pabrik Position Allowance, which consists of Leadership Allowance and Factory Allowance	Insentif, yang diterima setiap tiga bulan sekali atas pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu. Incentives which are received every three months based on the achievement of the Company's performance, unit performance, and individual performance.
2	Tunjangan Risiko Risk Allowance	Jasa operasi, yang diterima setiap tahunnya atas pencapaian kinerja Perusahaan dan tolak ukur lainnya. Operational services which are received annually based on the achievement of the Company's performance and other benchmarks.
3	Tunjangan Daerah Regional Allowance	Cuti lainnya, seperti cuti hamil dan melahirkan, cuti menikah, cuti menikah anak, cuti istri melahirkan, cuti keluarga inti meninggal, cuti haji, cuti khitan/cuti aqiqah/baptis/mepades. Other leaves, such as maternity and childbirth leave, marriage leave, leave for the marriage of a child, paternity leave, leave for the death of an immediate family member, Hajj leave, and leave for circumcision/aqiqah/baptism/mepades.
4	Tunjangan Sarana, yang terdiri dari Tunjangan Transport dan Tunjangan Shift Facilities Allowance, which consists of Transportation Allowance and Shift Allowance	Pemeliharaan kesehatan, berupa BPJS Kesehatan dan top-up menggunakan provider asuransi kesehatan. Health maintenance, in the form of BPJS Health and top-up using a health insurance provider.
5	Tunjangan Call Out Call Out Allowance	Bantuan lainnya, seperti bantuan pernikahan, bantuan melahirkan, bantuan aqiqah/khitanan, membaptis, mepades, bantuan rekreasi, bantuan ibadah haji dan bantuan kepemilikan rumah pribadi. Other assistance, such as marriage assistance, childbirth assistance, aqiqah/circumcision assistance, baptism, mepades, recreation assistance, pilgrimage assistance, and assistance for homeownership.
6	Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance (THR)	Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) dan Asuransi Kematian Death Benefits (BPJS Employment) and Death Insurance.
7	Tunjangan Kesetiaan Kerja Loyalty Allowance	Fasilitas rumah dinas sesuai ketentuan. Company-provided housing in accordance with regulations
8	Tunjangan Kesejahteraan Hari Tua Old Age Welfare Allowance	Fasilitas pakaian kerja dan kelengkapannya, peralatan kerja, dan pelindung keselamatan kerja. Workwear and its accessories, work tools, and personal protective equipment (PPE).

PROGRAM PENSIUN

Pekerja di PUSRI yang akan memasuki masa pensiun, berhak mengikuti Pelatihan Program Pensiun. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan Pekerja untuk dapat mandiri finansial ketika masa pensiun. Pelatihan Program Pensiun terdiri dari program keterampilan bisnis mandiri yang dapat diikuti oleh karyawan ketika mereka berusia antara 50 sampai dengan 55 tahun.

Selain itu, perusahaan juga memberikan Manfaat Pensiun kepada Pekerjanya untuk kesinambungan penghasilan pada saat Pensiun, berupa Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sudah dibatasi Pesertanya, yaitu hanya Pekerja yang mulai bekerja sebelum tahun 2007 dengan restriksi Manfaat Pensiun Bulanan. Seluruh Pekerja Perusahaan diikutkan dalam program Pensiun Iuran Pasti, dengan pendanaan (iuran bulanan) berasal dari kontribusi Perusahaan maupun kontribusi Pekerja.

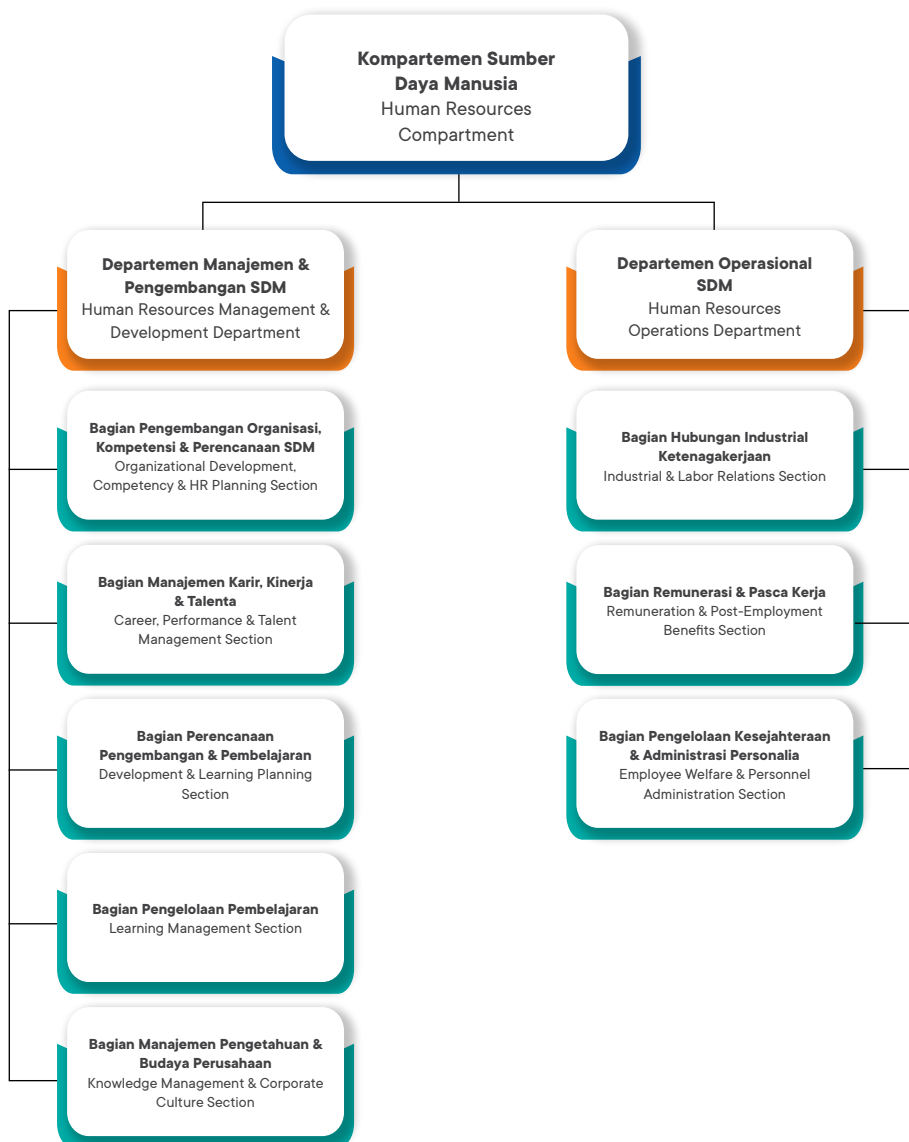
RETIREMENT PROGRAM

Employees at PUSRI who are approaching retirement age are entitled to participate in the Retirement Program Training. The purpose of this program is to prepare employees to achieve financial independence upon retirement. The training includes entrepreneurial and self-employment skill development programs, available to employees aged between 50 and 55 years.

In addition, the Company provides Retirement Benefits to ensure income continuity during retirement, through the Defined Benefit Pension Program (PPMP) and the Defined Contribution Pension Program (PPIP). Participation in the PPMP is limited to employees who began working before 2007 and is subject to restrictions on monthly pension benefits. All Company employees are enrolled in the Defined Contribution Pension Program, which is funded through monthly contributions from both the Company and the employees.

STRUKTUR PENGELOLA HUMAN CAPITAL

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRUCTURE



RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2025

PUSRI telah menyiapkan rencana pengelolaan/ pengembangan SDM untuk tahun 2025 yang terdiri dari:

2025 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN

PUSRI has prepared a human capital management and development plan for 2025, which consists of:









Sasaran Objectives	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Programs
<p>Terciptanya SDM yang kompeten, berdaya saing, dan berbudaya AKHLAK. The creation of competent, competitive human capital with the AKHLAK culture.</p>	<p><i>Competency of Employee</i> Penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Placement of employees according to their competencies</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi asesmen kompetensi untuk proses suksesi dan talent review. Target: 100 orang. Melakukan proses Rotasi, Mutasi, dan Promosi (RMP) karyawan/ti di lingkungan Perusahaan. Target: 800 orang.
	<p><i>Competency of Employee</i> Penetapan talent dalam perusahaan. Identification and designation of talent within the Company</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan proses seleksi dan penetapan talent BOD, eselon I, II, III & IV bersama dengan Pupuk Indonesia. Target: Dilaksanakan pada Semester II 2025. Conducting the selection and designation process of talents for the Board of Directors and Echelon I, II, III & IV levels in collaboration with Pupuk Indonesia. Target: To be carried out in the second half of 2025.
	<p><i>Competency of Employee</i> Peningkatan jumlah talenta unggul milenial dan perempuan sesuai ketentuan Pupuk Indonesia. Increasing the number of outstanding millennial and female talents under Pupuk Indonesia's regulations</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan proses seleksi dan penetapan talenta perempuan dan milenial/ muda. Target: Semester II 2025. Conducting the selection and designation process for female and millennial/young talents. Target: Second half of 2025.
	<p><i>Competency of Employee</i> Peningkatan produktivitas karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan Improving employee productivity with a positive impact on employee performance</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Pusri Employee Assistance Program (PEAP) dan SI EAP. Target: Semester II 2025. Implementing the Pusri Employee Assistance Program (PEAP) and the EAP Information System (SI EAP). Target: Second half of 2025.
	<p><i>Competency of Employee</i> Implementasi Budaya AKHLAK melalui program transformasi budaya sesuai arahan Pupuk Indonesia dan Kementerian BUMN. Implementation of AKHLAK culture through cultural transformation programs in accordance with the directives of Pupuk Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Program AKHLAK Culture Journey Pupuk Indonesia Group, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Kampanye Budaya AKHLAK melalui Sapa Pagi, EnPeKa, Budaya Perusahaan Awarding Day, Pengukuran Survey Acceptance, Pelaksanaan program sesuai hasil Appreciate Inquiry (AI Summit). Target: Semester II 2025 Melakukan pengukuran Indeks Maturitas Budaya AKHLAK. Target: Skor sesuai arahan Pupuk Indonesia. Mengimplementasikan Program Inclusive Workplace Policy. Target: Semester II 2025. Melaksanakan Program Employee Wellbeing. Target: Semester II 2025. Melaksanakan Program Peningkatan Awareness RWP. Semester II 2025.
		<ol style="list-style-type: none"> Implementing the AKHLAK Culture Journey Program of Pupuk Indonesia Group, including: <ol style="list-style-type: none"> Conducting the AKHLAK Culture Campaign through Morning Greetings, EnPeKa, Company Culture Awarding Day, Acceptance Survey Measurement, and program implementation based on Appreciate Inquiry (AI Summit) results. Target: Second half of 2025 Measuring the AKHLAK Culture Maturity Index. Target: Score under Pupuk Indonesia's guidelines. Implementing the Inclusive Workplace Policy Program. Target: Second half of 2025. Executing the Employee Wellbeing Program. Target: Second half of 2025. Carrying out the RWP Awareness Enhancement Program. Target: Second half of 2025.

Sasaran Objectives	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Programs
	<p>Competency of Employee Peningkatan kompetensi karyawan berdasarkan konsep 70-20-10 dan 4E Kementerian BUMN. Enhancing employee competencies based on the 70-20-10 learning model and the 4E framework of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan program pembelajaran terkait managerial & leadership untuk meningkatkan kapabilitas leaders melalui pembelajaran terintegrasi berbasis 70-20-10 (project assignment, coaching & mentoring, dan classroom). Target: 200 MD pelatihan. Melaksanakan program pengembangan kompetensi dan kapabilitas, khususnya di bidang-bidang yang terkait langsung dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan (atau arahan pemegang saham) seperti: digitalisasi, customer focus, product & innovation, operational excellence, renewable energy, dll. Target: 5.000 MD pelatihan. Meningkatkan kompetensi karyawan sesuai aturan perundangan ketenagakerjaan maupun industri pupuk melalui sertifikasi keahlian. Target: 200 orang memiliki sertifikasi yang masa berlakunya masih aktif. Pemenuhan kompetensi digital (digital competency/ digital skill) untuk karyawan. Target: 25% karyawan terdata mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi digital. <ol style="list-style-type: none"> Implementing managerial and leadership learning programs to enhance leadership capabilities through integrated learning based on the 70-20-10 model (project assignments, coaching & mentoring, and classroom training). Target: 200 man-days of training. Conducting competency and capability development programs, particularly in areas directly aligned with the company's vision, mission, and long-term strategy (or shareholder directives), such as digitalization, customer focus, product & innovation, operational excellence, renewable energy, etc. Target: 5,000 man-days of training. Enhancing employee competencies following labor regulations and fertilizer industry standards through professional certification. Target: 200 employees with valid certifications. Fulfilling digital competency requirements (digital competencies/ skills) for employees. Target: 25% of employees recorded as participating in digital competency development activities.
	<p>Competency of Employee Pemberdayaan tenaga ahli berpendidikan S2 yang berdaya saing tinggi. Empowerment of highly competitive experts with a Master's degree</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Program Tugas Belajar/ Beasiswa Pendidikan S2 bagi karyawan sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan di masa depan. Target: 3 orang menjalankan tugas belajar S2. Melaksanakan Program Implementasi Hasil Tugas Belajar (PINTAR) bagi Karyawan yang telah menyelesaikan tugas belajar S2. Target: 3 orang menjalankan Program PINTAR. <ol style="list-style-type: none"> Implementing the Study Assignment/Graduate Scholarship Program for employees in line with the Company's future strategic needs. Target: 3 employees undertaking Master's degree studies. Implementing the Postgraduate Implementation Program (PINTAR) for employees who have completed their Master's degree studies. Target: 3 employees participating in the PINTAR Program.
	<p>Competency of Employee Peningkatan budaya belajar karyawan melalui pemberian wewenang dalam memilih pengembangannya sendiri sesuai budget, serta apresiasi atas kegiatan belajar-mengajar yang sudah dilakukan. Enhancing the employee learning culture by granting autonomy to choose their development paths within the allocated budget, as well as providing recognition for completed learning and teaching activities.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Program LEAP (Learning Experience & Achievement Point). Target: 1 kali sesi penukaran poin. Mengimplementasikan Learning Wallet sesuai dengan arahan Pupuk Indonesia. Target: Semester II 2025. Melakukan program award atau penghargaan lainnya sebagai apresiasi bagi karyawan di bidang pembelajaran. Target: 3 jenis award atau penghargaan. <ol style="list-style-type: none"> Implementing the LEAP Program (Learning Experience & Achievement Point). Target: One point redemption session. Implementing the Learning Wallet program under Pupuk Indonesia's directives. Target: Second half of 2025. Organizing awards or other forms of recognition as appreciation for employees in the field of learning. Target: Three types of awards or recognitions.

Sasaran Objectives	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Programs
      	<p>Competency of Employee Penyempurnaan silabus dan desain Pembelajaran berbasis Kompetensi. Refinement of competency-based learning syllabus and design</p> <hr/> <p>Cost Leadership Implementasi dan optimalisasi penerapan knowledge management. Implementation and optimization of knowledge management practices</p> <hr/> <p>Cost Leadership Competency of Employee Implementasi Digital Learning melalui pengembangan konten pembelajaran digital dan proses pembelajaran daring. Implementation of Digital Learning through the development of digital learning content and online learning processes</p> <hr/> <p>Clean Industry & Sustainability Penyediaan sarana belajar mengajar yang nyaman bagi karyawan untuk mendukung proses belajar kolaborasi di perusahaan. Provision of comfortable teaching and learning facilities for employees to support collaborative learning processes within the company</p>	<p>Menyusun dan memperbarui Silabus Pembelajaran sebagai acuan belajar karyawan. Target: 60 silabus. Developing and updating Learning Syllabi as a reference for employee learning. Target: 60 syllabi</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sertifikasi keahlian/ kompetensi dan pelatihan terkait pembuatan atau penyampaian materi sebagai upaya pengembangan Program Subject Matter Expert (SME) dan atau Instruktur Internal. Target: 2 kali penyelenggaraan pelatihan. Meningkatkan proses akuisisi dan transfer pengetahuan melalui kegiatan sharing knowledge, forum manajemen, community of practice, benchmarking, dll. Target: Forum Management dilaksanakan 6 Kali, CoP & sharing knowledge dilaksanakan 24 kali. <ol style="list-style-type: none"> Conducting certification of skills/competencies and training related to the development or delivery of materials as part of the Subject Matter Expert (SME) and/or Internal Instructor Program. Target: 2 training sessions. Enhancing knowledge acquisition and transfer processes through knowledge sharing activities, management forums, communities of practice, benchmarking, etc. Target: Management forums held 6 times; Communities of Practice and knowledge sharing held 24 times. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan konten pembelajaran digital dengan menerapkan prinsip gamification dan/atau microlearning, seperti video belajar, podcast, games, VR, AR, e-book, dll. Target: 2 modul pembelajaran digital. Melakukan pembelian alat AR/VR. Target: Semester 2 2025. <ol style="list-style-type: none"> Developing digital learning content by applying gamification and/or microlearning principles, such as learning videos, podcasts, games, VR, AR, e-books, etc. Target: 2 digital learning modules. Procuring AR/VR equipment. Target: Second half of 2025. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> Merenovasi Gazebo Diklat. Target: Selesai Semester II 2025. Membangun Studio AR/VR. Target: Selesai Semester 2 2025. Melakukan pembelian TV 85 inch. Target: Selesai Semester II 2025. Melakukan pembelian interactive whiteboard touch screen. Target: Selesai Semester II 2025. <ol style="list-style-type: none"> Renovating the Training Gazebo. Target: Completed by the second half of 2025. Constructing the AR/VR Studio. Target: Completed by the second half of 2025. Purchasing an 85-inch TV. Target: Completed by the second half of 2025. Purchasing an interactive touchscreen whiteboard. Target: Completed by the second half of 2025.
<p>Tersedianya struktur organisasi yang efektif sesuai dengan visi misi dan strategi perusahaan. Availability of an effective organizational structure aligned with the company's vision, mission, and strategy</p>	<p>Competency of Employee Penyempurnaan terhadap struktur organisasi secara efektif sesuai kebutuhan perusahaan. Effective refinement of the organizational structure in accordance with the company's needs</p>	<p>Mengevaluasi dan menyempurnakan struktur organisasi, tupoksi, dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), termasuk proyek-proyek lainnya sesuai kebutuhan perusahaan dan sentralisasi PI Group. Target: Dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Evaluating and refining the organizational structure, roles and responsibilities, and Job Competency Requirements (KKJ), including other projects in accordance with company needs and PI Group centralization. Target: To be carried out throughout 2025.</p>

Sasaran Objectives	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Programs
	<p>Competency of Employee Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (workforce planning) sesuai struktur organisasi. Workforce planning in accordance with the organizational structure</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perhitungan manpower planning berdasarkan hasil analisa beban kerja. Target: Selesai Semester I Merencanakan kebutuhan TKNO non borongan (rutin) sesuai dengan perhitungan manpower planning dan mengevaluasi perencanaan jumlah TKNO borongan Target: Selesai Semester I <ol style="list-style-type: none"> Conducting manpower planning calculations based on workload analysis. Target: Completed by the first half of the year. Planning the need for non-contracted (regular) labor according to manpower planning calculations and evaluating the planning for contracted labor numbers. Target: Completed by the first half of the year.
	<p>Competency of Employee Mendukung implementasi hasil kajian penyalarsan sistem grading sesuai arahan Pupuk Indonesia. Supporting the implementation of the grading system alignment study results in accordance with directives from Pupuk Indonesia</p>	<p>Mengimplementasikan hasil kajian penyalarsan sistem grading PI Group sesuai arahan Pupuk Indonesia. Target: Semester II 2025. Implementing the results of the PI Group grading system alignment study in accordance with directives from Pupuk Indonesia. Target: Second half of 2025</p>
<p>Tersedianya Pedoman-pedoman bidang SDM yang diselaraskan dengan rencana transformasi SDM oleh Pemegang Saham. Availability of HR guidelines aligned with the HR transformation plan set by the Shareholders</p>	<p>Clean Industry & Sustainability Penyempurnaan pedoman-pedoman bidang SDM yang diselaraskan dengan Pedoman dari Pupuk Indonesia. Refinement of HR guidelines aligned with the guidelines from Pupuk Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meratifikasi pedoman induk bidang SDM dari Pupuk Indonesia. Target: Semester II 2025. Revisi aturan-aturan internal Pusri sehingga selaras dengan Pedoman Induk. Target: Semester II 2025. <ol style="list-style-type: none"> Ratifying the HR master guidelines from Pupuk Indonesia. Target: Second half of 2025. Revising Pusri's internal regulations to align with the Master Guidelines. Target: Second half of 2025.
<p>Tersedianya Sistem Manajemen Kinerja. Availability of a Performance Management System</p>	<p>Competency of Employee Penyusunan KPI Individu sesuai dengan KPI Unit Kerja. Preparation of Individual KPI in accordance with the Work Unit KPI</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun target dan pengisian realisasi KPI Individu dari level BoD-1 (SVP/SPM) sampai dengan pelaksana. Target: Dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Menyelenggarakan program performance coaching oleh atasan langsung per triwulan terkait realisasi KPI Individu. Target: setiap triwulan. <ol style="list-style-type: none"> Setting targets and recording the realization of Individual KPI from the BoD-1 level (SVP/SPM) down to operational staff. Target: Implemented throughout 2025. Conducting quarterly performance coaching programs by direct supervisors related to the realization of Individual KPI. Target: Every quarter.
	<p>Competency of Employee Penilaian 360 berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku. 360-degree assessment based on the Behavioral Competency Dictionary</p>	<p>Melakukan penilaian kompetensi perilaku oleh atasan, bawahan, dan rekan kerja seluruh karyawan Target: Semester II 2025. Conduct behavioral competency assessments of all employees by supervisors, subordinates, and peers. Target: Second half of 2025.</p>
	<p>Competency of Employee Kalibrasi peringkat kinerja sebagai dasar pembayaran Kompensasi & benefit karyawan. Performance rating calibration as the basis for employee compensation and benefits payments</p>	<p>Melakukan penilaian peringkat kinerja berdasarkan capaian KPI Individu serta nilai kompetensi perilaku. Target: Semester II Conduct performance rating assessments based on individual KPI achievements and behavioral competency scores. Target: Second half of 2025</p>
	<p>Competency of Employee Penilaian learning agility untuk mengukur kemampuan dan kesediaan untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian menerapkan hasil pembelajaran ke dalam pekerjaan. Assessment of learning agility to measure the ability and willingness to learn from experience, and subsequently apply the learning outcomes to work</p>	<p>Melakukan penilaian learning agility oleh diri sendiri dan atasan. Target: Semester II 2025. Conduct learning agility assessments by both employees and their supervisors. Target: Second Semester of 2025.</p>
<p>Tersedianya tenaga kerja non organik yang berkualitas. Availability of high-quality non-organic workforce</p>	<p>Competency of Employee Peningkatan kompetensi tenaga kerja non organik. Enhancement of competencies for non-organic workforce</p>	<p>Melakukan sertifikasi kompetensi tenaga kerja non organik. Target: Dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Conducting competency certification for non-organic workforce. Target: To be implemented throughout 2025.</p>

Sasaran Objectives	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Programs
 <p>Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan. Establishment of harmonious industrial relations within the company environment</p>	<p>Competency of Employee Pembaharuan aturan internal perusahaan. Revision of the company's internal regulations.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Rapat LKS Bipartit. Target: Dilaksanakan sebanyak 12 kali. Melaksanakan Perundingan PKB 2025-2027. Target: Semester II 2025 <ol style="list-style-type: none"> Conducting Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) meetings. Target: To be held 12 times. Carrying out negotiations for the 2025-2027 Collective Labor Agreement (CLA). Target: Semester II 2025.
 <p>Tercapainya kesehatan karyawan dalam 4 aspek Employee Wellbeing Policy (EWP). Achieving employee health across the four aspects of the Employee Wellbeing Policy (EWP)</p>	<p>Competency of Employee Peningkatan pengetahuan karyawan dalam upaya preventif untuk mencapai sehat pada 4 aspek Employee Wellbeing Policy (EWP). Enhancing employee knowledge through preventive efforts to achieve well-being across the four aspects of the Employee Wellbeing Policy (EWP).</p>	<p>Menyelenggarakan seminar kesehatan terkait aspek fisik dalam Employee Wellbeing Policy (EWP). Target: Dilaksanakan 4 kali. Organizing health seminars related to the physical aspect of the Employee Wellbeing Policy (EWP). Target: Conducted 4 times</p>
	<p>Competency of Employee Peningkatan kebugaran karyawan dalam upaya promotif untuk mencapai sehat fisik pada Employee Wellbeing Policy (EWP). Improving employee fitness through promotive efforts to achieve physical health under the Employee Wellbeing Policy (EWP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran karyawan yang merupakan upaya dalam aspek fisik Employee Wellbeing Policy (EWP). Target: Dilaksanakan 12 kali. Menyelenggarakan program penurunan berat badan bagi peserta overweight. Target: Dilaksanakan 1 kali. <ol style="list-style-type: none"> Organizing sports activities to improve employee fitness as part of the physical aspect of the Employee Wellbeing Policy (EWP). Target: Conducted 12 times. Implementing a weight loss program for participants who are overweight. Target: Conducted once.
	<p>Competency of Employee Penyempurnaan peraturan terkait pemberian reward terhadap karyawan yang memiliki kinerja terbaik. Improvement of regulations related to granting rewards to employees with the best performance</p>	<p>Penyempurnaan proses pemilihan karyawan terbaik. Target: Selesai Semester I 2025 Improvement of the employee of the year selection process. Target: Completed by the first half of 2025</p>
		
		



Teknologi Informasi

Information Technology



“ Konsistensi PUSRI melanjutkan proses *improvement* pada sistem Tata Kelola TI membuahkan hasil, yakni kini telah memenuhi target Tingkat Kematangan TI Perusahaan, sesuai arahan Pemegang Saham dan Kementerian BUMN.

PUSRI's consistency in continuing the improvement process to the IT Governance system has resulted in the fulfillment of the Company's IT Maturity Level target, in accordance with the direction of Shareholders and the Ministry of SOEs.



PUSRI menyusun tata kelola dan model arsitektur Teknologi Informasi di mana setiap nilai yang dihasilkan dari setiap proses memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan. Tata kelola dan model ini ditetapkan perusahaan sebagai acuan pengembangan Teknologi Informasi untuk mendukung setiap perubahan bisnis perusahaan ke arah yang lebih baik.

Tata Kelola Teknologi Informasi bertujuan untuk mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja teknologi informasi memenuhi dan sesuai dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi Perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan teknologi informasi
2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan IT dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan IT tersebut.
3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya IT.
4. Manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat.

PUSRI develops governance and Information Technology architecture models in which every value generated from each process contributes to the decision-making process. This governance and model are set by the company as a reference for the development of Information Technology to support every change in the company's business for the better.

Information Technology Governance aims to control its use by ensuring that the performance of information technology meets and is in accordance with the objectives, as follows:

1. Aligning information technology with the Company's strategy and the realization of the promised benefits from the application of information technology
2. The use of information technology allows companies to take advantage of existing opportunities and maximize the benefits of implementing IT.
3. Responsible for the use of IT resources.
4. Proper management of existing risks related to information technology.

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Policies and Governance



Pengelolaan TI yang andal harus ditunjang dengan struktur dan fungsi yang jelas. Bidang Teknologi Informasi mengelola sistem teknologi informasi di Perusahaan dalam rangka mendukung pencapaian strategis bisnis PSP sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 083/A/HK/P30/SK/2023 pada tanggal 28 April 2023 tentang Struktur Organisasi Direktorat Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), yang menjelaskan perihal struktur organisasi, jabatan, dan tugas pokok di Kompartemen Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero).



Reliable IT management must be supported by a clear structure and function. The Information Technology Sector manages information technology systems in the Company in order to support the strategic achievements of the PSP business as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 083/A/HK/P30/SK/2023 on April 28, 2023 concerning the Organizational Structure of the Business Transformation Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero), which explains the organizational structure, positions and main tasks in the Information Technology Compartment of PT Pupuk Indonesia (Persero).



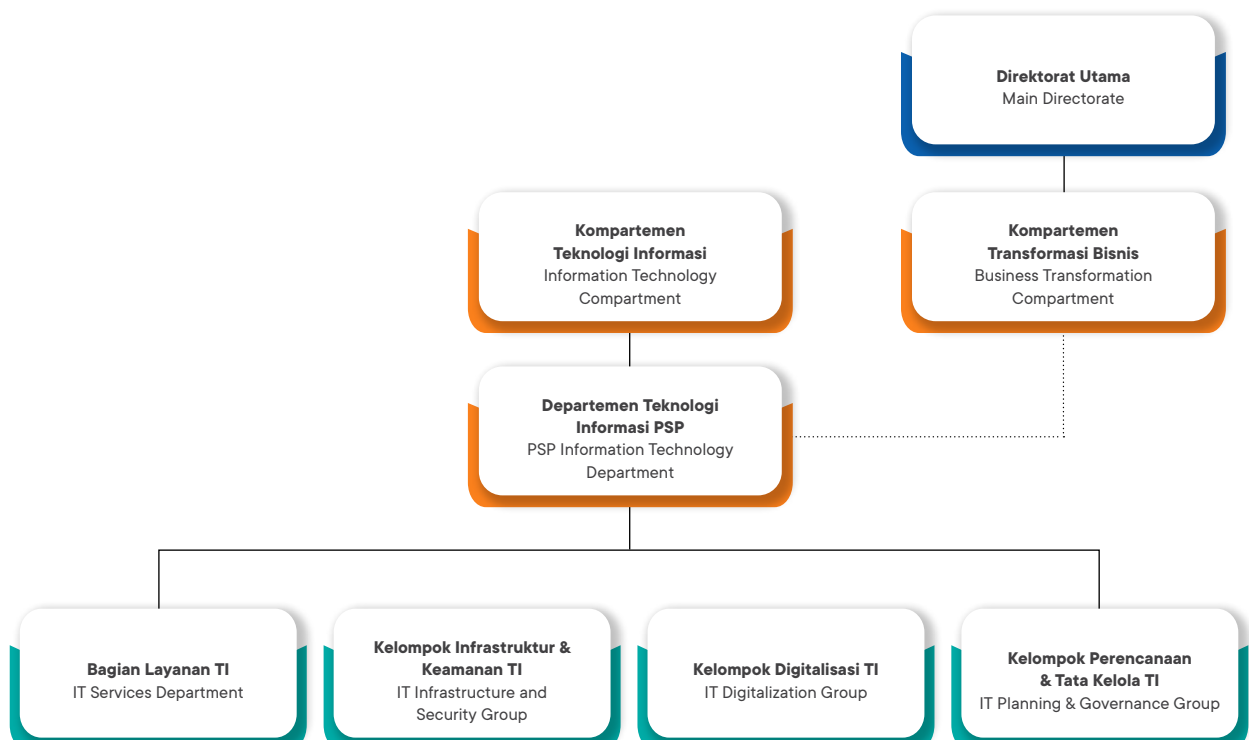
Pada tanggal 18 Desember 2023 sesuai SK/DIR/474/2023 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Kompartemen Transformasi Bisnis Direktorat Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dimana organisasi TI menjadi Departemen Teknologi Informasi PSP dan memiliki garis koordinasi pekerjaan dengan Kompartemen Transformasi Bisnis.



On December 18, 2023, in accordance with SK/DIR/474/2023 concerning Improving Organizational Structure in the Business Transformation Compartment Environment of the Main Directorate of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, where the IT organization became the PSP Information Technology Department and had a work coordination line with the Business Transformation Compartment..

Bagan Organisasi Departemen Teknologi Informasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Information and Technology Department Organization Chart of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Departemen Teknologi Informasi PSP dikepalai oleh VP Teknologi Informasi PSP, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Menjadi *point of contact* untuk kebutuhan teknologi informasi di PUSRI.
2. Mendefinisikan, menyusun, dan mengelola *business requirement* pengembangan TI berdasarkan masukan dari fungsi bisnis di PUSRI.
3. Melaksanakan, memonitor dan memastikan keberlangsungan operasional layanan TI dan membantu menyelesaikan isu *user group* di PUSRI.
4. Melakukan pengembangan solusi TI untuk kebutuhan Pupuk Indonesia Grup (pengembangan bersama) dan pengembangan yang terkait inovasi di PUSRI.
5. Mendukung dan memastikan keberhasilan implementasi sistem aplikasi, baik aplikasi terpusat, aplikasi bersama, maupun aplikasi spesifik anak perusahaan yang diimplementasikan di anak perusahaan.
6. Memberikan usulan anggaran dan investasi RKAP TI, pengelolaan operasional anggaran dan aset TI termasuk administrasi pengadaannya.
7. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
8. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan *job description* sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
9. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, GCG (*Good Corporate Governance*), TQM (*Total Quality Management*), dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
10. Melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan melalui penerapan teknologi informasi dan berperan aktif menerapkan sistem manajemen keamanan informasi

The PSP Information Technology Department is headed by the PSP VP of Information Technology, with the following key responsibilities:

1. Become a point of contact for information technology needs at PUSRI.
2. Define, compile, and manage IT development business requirements based on input from business functions at PUSRI.
3. Implement, monitor, and ensure the continuity of IT service operations and help resolve user group issues at PUSRI.
4. Developing IT solutions for Pupuk Indonesia Group needs (joint development) and innovation-related development at PUSRI.
5. Support and ensure the successful implementation of application systems, including both centralized applications, joint applications, and subsidiary-specific applications implemented in subsidiaries.
6. Provide budget and investment proposals for IT RKAP, and provide operational management of IT budgets and assets, including procurement administration.
7. Responsible for the management of fixed assets, inventory, and work equipment under his responsibility so that they are well maintained.
8. Responsible for coaching and improving the competence, ability, and work attitude of employees in their work units based on company regulations, collective labor agreements (PKB), and job descriptions so as to produce quality human resources.
9. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (K3) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, GCG (*Good Corporate Governance*), TQM (*Total Quality Management*), and CSR (*Corporate Social Responsibility*) in the area of its work unit to achieve OHS standards and quality standards in order to make continuous improvements.
10. Make continuous improvement efforts through the application of information technology and play an active role in implementing an information security management system.

Tata kelola IT PUSRI

PUSRI IT governance



Tata kelola IT PUSRI dilaksanakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Membuat kerangka kerja IT yang sejalan dengan tata kelola perusahaan. Ini dilakukan dengan menjaga keselarasan antara tata kelola IT dengan peraturan dan regulasi yang ada.
2. Membangun pemahaman Pengelola Perusahaan agar memahami pentingnya masalah-masalah strategis IT. Ini dilakukan dengan memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki IT untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.
3. Membuat pencapaian kinerja dan nilai tambah yang maksimum. Pengelola IT harus mampu menyediakan nilai tambah maksimum bagi proses bisnis perusahaan dan meyakinkan bahwa usaha yang maksimum telah dilakukan untuk memungkinkan hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tertib pada manajemen proyek dan program kerja yang baik.
4. Membuat manajemen sumber daya dan manajemen risiko yang baik. Pengelola IT harus dapat melakukan alokasi sumber daya yang baik dan manajemen risiko yang memperhitungkan risiko dalam menjalankan fungsi-fungsi IT. Ini dapat dicapai dengan bantuan *Risk Officer*.



Dari sisi infrastruktur dan aplikasi, PUSRI berfokus untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem yang diharapkan dapat mendorong efisiensi dan optimalisasi proses bisnis yang dijalankan. Seiring hal itu, hingga tahun 2024, PUSRI juga konsisten melanjutkan proses *improvement* pada sistem Tata Kelola TI hingga memenuhi target Tingkat Kematangan TI PUSRI, sesuai arahan Pemegang Saham dan Kementerian BUMN.



Terkait hal tersebut, PUSRI dan Pupuk Indonesia telah melaksanakan *Business Impact Analysis Disaster Recovery Plan* dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses yang penting, menganalisis persyaratan pemulihan proses bisnis, menganalisis persyaratan pemulihan teknologi informasi, serta menentukan prioritas sumber daya teknologi informasi yang penting, jika suatu bencana terjadi.

Pada bulan Desember tahun 2024 telah dilakukan asesmen tingkat kematangan tata kelola TI (*IT Maturity Level*) yang dilaksanakan oleh pihak eksternal melalui PT Pupuk Indonesia (Persero). *Assessment IT Maturity* dilakukan dengan menggunakan *framework* COBIT 2019 terhadap 16 proses yang dinilai dengan mencatat skor maturitas 4,00 dari 5,00. Sepanjang tahun 2024, PUSRI telah melakukan pemenuhan terhadap 100% dari total *room of improvement* yang ditemukan. Pemenuhan dilakukan meliputi perbaikan proses dan Tata Kelola TI, selain itu terkait kebijakan manajemen keamanan informasi PUSRI telah disusun berdasarkan standar internasional ISO 27001:2022 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan pengukuran *cyber security* sedang melakukan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) oleh BSSN.

The implementation of PUSRI IT Governance has the following objectives:

1. Create an IT framework that aligns with corporate governance. This is done by maintaining alignment between IT governance and existing rules and regulations.
2. Build an understanding of Company Management in order to understand the importance of strategic IT issues. This is done by introducing the potential that IT has to contribute to the progress of the company.
3. Make maximum performance and value-added achievements. IT managers must be able to provide maximum added value to the company's business processes and ensure that maximum effort has been made to make it possible. This can be done with orderly approaches to good project and program management.
4. Make good resource and risk management decisions. IT managers must be able to carry out good resource allocation and risk management that takes into account risks in carrying out IT functions. This can be achieved with the help of a Risk Officer.

In terms of infrastructure and applications, PUSRI focuses on continuing to innovate and develop systems that are expected to drive efficiency and optimize business processes. In line with that, until 2024, PUSRI will also continue the process to improve the IT Governance system by meeting the company's IT maturity level target, according to the direction of Shareholders and the Ministry of SOEs.

Related to this, PUSRI, and Pupuk Indonesia, has implemented a *Business Impact Analysis Disaster Recovery Plan* that aims to identify important processes, analyze business process recovery requirements, analyze information technology recovery requirements, and determine the priority of important information technology resources if a disaster occurs.

In December 2024, an IT maturity level assessment was carried out by external parties through PT Pupuk Indonesia (Persero). An IT maturity assessment was conducted using the COBIT 2019 framework against 16 processes assessed, with a maturity score of 4.00 out of 5.00. Throughout 2024, PUSRI has successfully addressed 100% of the identified rooms of improvement. This fulfillment includes enhancements in processes and IT Governance. Additionally, PUSRI's information security management policies have been developed in accordance with the international standard ISO 27001:2022 - Information Security Management System (ISMS). Furthermore, cybersecurity assessments are currently being conducted through the Cyber Security Maturity (CSM) evaluation by BSSN.

Program Pengembangan Teknologi Informasi 2024

Information Technology Development Program 2024

Dalam rangka mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan, PUSRI terus mengembangkan aplikasi dan perangkat teknologi informasi, pengembangan yang dilakukan diantaranya:

In order to support the smooth running of the company's business processes, PUSRI continues to develop information technology applications and devices, including:

Tabel Pengembangan dan Inovasi TI pada Tahun 2024

Table of IT Development and Innovation in 2024

No	Program Kegiatan	Activity Program
1	Melakukan pengembangan aplikasi sesuai hasil evaluasi dan rapat ITSC tahun 2024, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • SI Logis • SI Supermen, • i-PMS, • Teman Pusri, • SI Produk Samping, • SI Kerja Praktek, • TAMS, • IAM Pusri, • SI Pemeliharaan, • SI Aset, • SI CRP, • SI RUPS, • SAKTI • SIAP • Layanan Aduan Pelanggan • SI Central Tools • HCMS 	Carrying out application developments in accordance with the evaluation and ITSC meeting results in 2024, including: <ul style="list-style-type: none"> • Logical IS • Supermen IS, • i-PMS, • Pusri Friends, • Byproduct IS, • Practical Work IS, • TAMS, • IAM Pusri, • Maintenance IS, • Assets IS, • CRP IS, • RUPS IS, • SAKTI • SIAP • Customer Complaints Services • Central Tools IS • HCMS
2	Penambahan kapasitas <i>server development</i> & peningkatan keandalan infrastruktur <i>data center</i> .	The addition of a development server and improved reliability of data center infrastructure.
3	<i>Managed service cyber security</i> & penambahan <i>tool monitoring security system</i> .	Managed cyber security service and the addition of the monitoring security system tool.
4	Revitalisasi infrastruktur jalur FO gedung utama & kantor pusat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan perusahaan.	Revitalization of FO line infrastructure, main building and Office Center in order to improve the quality of the company's network.
5	Peningkatan kapasitas LAN serta <i>wireless network</i> dalam rangka peningkatan keandalan jaringan perusahaan.	Increasing LAN and wireless network capacity in order to increase the reliability of the company network.

Sertifikasi Teknologi Informasi

Information Technology Certification

Teknologi Informasi PUSRI memiliki beberapa sertifikasi, antara lain:

1. CEH (*Certified Ethical Hacker*), 2 orang karyawan
2. ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), 7 orang karyawan
3. *Agile Scrum Master*, 1 orang karyawan

PUSRI Information Technology has several certifications, including:

1. CEH (Certified Ethical Hacker), 2 employees
2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 7 employees
3. Agile Scrum Master, 1 employee

Investasi Teknologi Informasi

Information Technology Investment



Perusahaan secara berkala melakukan investasi rutin dan biaya rutin Departemen Teknologi Informasi. Berikut adalah uraiannya sepanjang tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023.

The Company periodically makes regular investments and routine expenses for the Information Technology Department. The following is the breakdown for 2024 and how it compares to 2023.



No.	Akun Account	Item Investasi Investment Items
1	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	SERVER EMAIL ZIMBRA
2	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	BANDWIDTH MANAGEMENT
3	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SWITCH MANAGEABLE
4	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SERVER BACKUP
5	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP VMWARE
6	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SERVER HYPER-V DAN AD
7	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP LCD PROJECTOR



Tabel Investasi Teknologi Informasi PUSRI, 2023-2024

Table of PUSRI's Information Technology Investments, 2023-2024

Dalam Rupiah | In Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Investasi Rutin (Capex) Regular Investments (Capex)	4.082.727.800	2.630.183.000	1.452.544.800	36
Biaya Rutin (Opex) Recurring Expenses (Opex)	21.248.580.613	21.861.234.406	612.653.793	3



Rencana Kerja Departemen Teknologi Informasi PSP Tahun 2025

PSP Information Technology Department Work Plan for 2025

Pupuk Sriwidjaja Palembang telah melakukan penyusunan Rencana Strategis TI (RSTI) periode 2025 - 2029 yang selaras dengan Rencana Strategis TI (RSTI) Pupuk Indonesia Group 2025 - 2029. Program Kerja tahun 2025 telah direncanakan dengan mengacu pada RSTI tersebut.

Pupuk Sriwidjaja Palembang has prepared an IT Strategic Plan (RSTI) for the period of 2025 - 2029, which is in line with the IT Strategic Plan (RSTI) of Pupuk Indonesia Group 2025 - 2029. The 2025 Work Program has been planned with reference to the RSTI.

Adapun program kerja strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut ini.

The following is the strategic work program for 2025:

No.	Program Kegiatan	Activity Program
1	Pengembangan <i>Plant Maintenance System</i>	Development of Plant Maintenance System
2	Pengembangan <i>i-PMS (Digital Fertilizer)</i>	Development of i-PMS (Digital Fertilizer)
3	Pengembangan <i>Smart Production</i>	Development of Smart Production
4	Pengembangan Sistem K3 Terintegrasi	Development of Integrated OHS System
5	Peningkatan Sistem Manajemen Kearsipan & Dokumen	Improvement of Archival & Document Management System
6	Pengembangan Portal Rantai Pasok	Development of Supply Chain Portal
7	Pengembangan Portal Adm. Keuangan	Development of Finance Administration Portal
8	Perapihan <i>access point, LAN, switch, dan fiber optic</i>	Reorganization of access points, LAN, switches, and fiber optic
9	<i>Piloting Bring Your Own Device (BYOD)</i>	Piloting of Bring Your Own Device (BYOD)
10	<i>Implementasi Security Operation Center (SOC), Network Access Control (NAC) dan Network Operation Center (NOC)</i>	Implementation of Security Operation Center (SOC), Network Access Control (NAC) and Network Operation Center (NOC)
11	Penambahan <i>Endpoint Detection Response (EDR)</i> sebanyak 70 lisensi per tahun	Addition of Endpoint Detection Response (EDR) amounting to 70 licenses per year
12	<i>Surveillance audit ISO27001</i>	Surveillance audit ISO27001
13	Implementasi Pelindungan data Pribadi (PDP)	Implementation of Personal Data Protection (PDP)
14	Penyusunan <i>Enterprise Architecture</i> bidang Produksi & Non-Produksi	Development of Enterprise Architecture for Production and Non-Production Areas
15	<i>Assessment IT Maturity</i>	IT Maturity Assessment
16	Simplifikasi prosedur IT	Simplification of IT procedures
17	Penyusunan dokumen <i>Disaster Recovery Plan (DRP)</i>	Development of Disaster Recovery Plan (DRP) Document
18	Penyusunan dokumen <i>Configuration Management Database (CMDB)</i>	Development of Configuration Management Database (CMDB) Document



06



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



PUSRI meyakini pentingnya penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dan sarana bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan. PUSRI juga meyakini penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan praktik terbaik GCG juga menjadi bagian penting bagi terciptanya pertumbuhan dan stabilitas skala usaha yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bagi PUSRI penerapan praktik terbaik GCG bukanlah semata memenuhi peraturan yang berlaku, tapi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha yang optimal dan berkelanjutan. Penerapan praktik terbaik GCG juga merupakan bagian dari upaya PUSRI dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, membangun dan meningkatkan ketahanan pangan serta berkontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa.

PUSRI firmly believes in the importance of implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG) principles as a foundation and means for achieving the Company's vision, mission, and objectives. PUSRI also believes that the implementation of best practices in GCG principles will foster healthy competition and a conducive business climate. Furthermore, the implementation of best practices in GCG is a key factor in ensuring high-quality and sustainable business growth and stability.

For PUSRI, implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG) is not merely about complying with applicable regulations but is a crucial component in achieving optimal and sustainable business growth. It is also part of PUSRI's efforts to support economic growth, strengthen and enhance food security, and make a significant contribution to national development.

“

“PUSRI memandang penerapan praktik terbaik GCG bukanlah semata memenuhi peraturan yang berlaku, tapi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha yang optimal dan berkelanjutan. Penerapan praktik terbaik GCG juga merupakan bagian dari upaya PUSRI mewujudkan visi dan misinya, sebagai jalan terbaik dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, membangun dan meningkatkan ketahanan pangan serta berkontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa”

“PUSRI views the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG) not merely as compliance with applicable regulations but as a crucial element in achieving optimal and sustainable business growth. The application of best practices in GCG is also an integral part of PUSRI’s efforts to realize its vision and mission, serving as the best path to supporting economic growth, strengthening and enhancing food security, and making a significant contribution to national development.”

Penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor penting bagi PUSRI dalam menjalankan aktivitasnya dan mewujudkan visi serta misinya. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan kegiatan produksi serta memberikan layanan dengan integritas tinggi disertai sikap profesional sebagai bagian Budaya Perusahaan yang senantiasa dijaga oleh seluruh insan PUSRI.

Prinsip-prinsip GCG terus berkembang seiring dengan dinamisnya pertumbuhan lingkungan bisnis maupun ekosistem dunia usaha. Oleh karenanya PUSRI Bertekad untuk terus memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG, selain berupaya mengikuti perkembangan terakhir kaidah prinsip-prinsip GCG yang telah disuarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi, sebagai lembaga nasional yang melakukan tugas kajian mengenai perkembangan praktik tata kelola perusahaan terkini baik di tatanan nasional maupun global.

The implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG) principles is one of the key factors for PUSRI in carrying out its activities and realizing its vision and mission. This is reflected in the company's commitment to conducting production activities and providing services with high integrity, accompanied by a professional attitude, as part of the Corporate Culture upheld by all PUSRI personnel.

The principles of Good Corporate Governance (GCG) continue to evolve in line with the dynamic growth of the business environment and corporate ecosystem. Therefore, PUSRI is committed to continuously improving the quality of its implementation of best practices in GCG principles while also striving to keep up with the latest developments in GCG guidelines as advocated by the National Governance Policy Committee, a national institution responsible for reviewing the latest corporate governance practices at both national and global levels.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Objectives of Good Corporate Governance Implementation

PUSRI menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan operasional, manajemen risiko, dan pengendalian internal guna meraih berbagai manfaat dari penerapan praktik terbaik GCG tersebut, antara lain:

1. Memaksimalkan nilai PUSRI agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan tumbuh berkualitas secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong terlaksananya pengelolaan PUSRI secara profesional dan mandiri;
3. Mendorong terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar;
4. Meningkatkan kontribusi PUSRI dalam perekonomian nasional khususnya bagi berkembangnya ketahanan pangan;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional khususnya di industri Pupuk.

PUSRI implements best practices in Good Corporate Governance (GCG) principles, integrating them with operational management, risk management, and internal control to achieve various benefits, including:

1. Maximizing PUSRI's corporate value to establish strong competitiveness both nationally and internationally, ensuring its sustainability and high-quality growth to achieve the Company's objectives;
2. Encouraging the professional and independent management of the Company;
3. Promoting decision-making across all Company organs based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, along with an awareness of corporate social responsibility toward stakeholders and environmental sustainability;
4. Enhancing PUSRI's contribution to the national economy, particularly in strengthening food security;
5. Improving a conducive climate for the growth of national investment, particularly in the fertilizer industry.



Dasar Hukum, Landasan dan Ruang Lingkup Kebijakan GCG

Legal Basis, Foundation, and Scope of GCG Policy

DASAR HUKUM

Berbagai ketentuan perundangan, peraturan maupun pedoman praktik nasional yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penerapan praktik terbaik GCG PUSRI, adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu No.PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012.

LEGAL BASIS

The implementation of PUSRI's best practices in Good Corporate Governance (GCG) is based on various laws, regulations, and national practice guidelines, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which was subsequently enacted as Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committees for State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 on Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises, with its latest amendment, No. PER-15/MBU/2012, dated September 25, 2012.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 7. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. 9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises. 6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. 7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises. 8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. 9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises. |
|--|---|

Ketentuan lain yang menjadi acuan pelaksanaan praktik-praktik terbaik GCG PUSRI:

1. Ketentuan umum dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).*
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).

Other provisions serving as references for the implementation of PUSRI's best practices in Good Corporate Governance (GCG):

1. General provisions from the National Governance Policy Committee (KNKG).
2. Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).
3. Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI).

LANDASAN PENERAPAN GCG PUSRI

Sebagai pedoman operasional penerapan praktik terbaik GCG, PUSRI kemudian membuat berbagai kebijakan dan pedoman yang mengatur perilaku, fungsi, dan tugas seluruh organ tata kelola dalam melaksanakan GCG di internal Perusahaan dengan mengacu pada berbagai dasar hukum pelaksanaan praktik terbaik GCG tersebut, mencakup

FOUNDATION FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG AT PUSRI

As an operational guideline for implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG), PUSRI has established various policies and guidelines that regulate the behavior, functions, and duties of all governance organs in executing GCG within the Company. These are based on various legal frameworks for best GCG practices and include:

No.	Nama Name	Deskripsi Description
1	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan soft structure Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) yang menggambarkan secara keseluruhan sistem, struktur, kelengkapan, dan cakupan penerapan GCG di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Melalui Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) tergambar komitmen dalam penerapan GCG yang tercermin dari referensi aturan yang digunakan, organ dan kelengkapan pendukung, mekanisme interaksi antar organ dan mekanisme hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk komitmen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG. The Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance) serve as the soft structure of Good Corporate Governance (GCG) that comprehensively describe the system, structure, completeness, and scope of GCG implementation at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Through the Corporate Governance Guidelines, the company's commitment to applying GCG is illustrated by the referenced regulations used, the governance organs and supporting components, the mechanisms of interaction between these organs, and the relationship mechanisms with stakeholders, including PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's commitment to conducting assessments and evaluations of GCG implementation.
2	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) ini merupakan salah satu perangkat GCG yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta dasar-dasar hukum yang berlaku. The Board of Commissioners and Directors Work Manual (Board Manual) is one of the GCG tools that refers to the Company's Articles of Association as well as the applicable legal foundations.

No.	Nama Name	Deskripsi Description
3	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct	<p>Pedoman ini menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi insan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya Perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance) dan semangat Etika Usaha dan Tata Perilaku.</p> <p>This guideline outlines the principles that serve as the behavioral foundation for the personnel of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in carrying out their respective duties, responsibilities, and authorities. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang strives to achieve sustainable business success built upon the Company's culture and the character of its Human Resources in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the spirit of Business Ethics and Code of Conduct.</p>
4	Piagam Komite Audit. Audit Committee Charter	<p>Komite Audit di Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan implementasi tata kelola Perusahaan yang baik. Dokumen terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023.</p> <p>The Audit Committee at the Company is tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System as well as overseeing the duties of internal and external auditors by monitoring and evaluating the planning and execution of audits. This is done to assess the adequacy of internal controls, including the financial reporting process, risk management, and the implementation of good Corporate Governance. The details are documented in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023.</p>
5	Piagam Komite Investasi & Manajemen Risiko. Investment & Risk Management Committee Charter	<p>Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko berisikan tugas komite di bawah Dewan Komisaris agar menjalankan fungsi pengawasan yang kompeten dan independen. Dokumen terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor KEP-04/DEKOM/PUSRI/XII/2023.</p> <p>The Investment and Risk Management Committee Charter outlines the committee's duties under the Board of Commissioners to carry out competent and independent supervisory functions. The document is contained in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number KEP-04/DEKOM/PUSRI/XII/2023.</p>
6	Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan. Corporate Risk Management Policy	<p>Dokumen terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/412/2024 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.</p> <p>The document is contained in the Board of Directors' Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/412/2024 concerning the Corporate Risk Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.</p>
7	Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan (Bribery). Anti-Bribery Management Policy.	<p>Dokumen terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/468/2024 tentang Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan (Bribery) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.</p> <p>The document is contained in the Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/468/2024 concerning the Anti-Bribery Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.</p>
8	Pemberlakuan Pedoman dan Prosedur PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan. Implementation of the Guidelines and Procedures of PT Pupuk Indonesia (Persero) related to Governance and Compliance Functions.	<p>Pemberlakuan Pedoman dan Prosedur PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan Nomor SK/DIR/227/2022 tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>Enforcement of the Guidelines and Procedures of PT Pupuk Indonesia (Persero) related to Governance and Compliance Functions pursuant to Decree of the Board of Directors Number SK/DIR/227/2022 dated June 20, 2022.</p>

No.	Nama Name	Deskripsi Description
9	Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Enforcement of the Guidelines of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.	Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023. Enforcement of the Guidelines of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number SK/DIR/422/2023 dated November 2, 2023.
10	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Guidelines for Handling Conflicts of Interest	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Nomor SK/DIR/528/2021 tanggal 17 November 2021. Guidelines for Handling Conflicts of Interest Number SK/DIR/528/2021 dated November 17, 2021.
11	Pedoman Penandatanganan Pakta Integritas. Guidelines for Signing the Integrity Pact.	Pedoman Penandatanganan Pakta Integritas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/035/2023 tanggal 27 Februari 2023. Guidelines for Signing the Integrity Pact of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/035/2023 dated February 27, 2023.
12	Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Gratification Control Guidelines.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/183/2024 tanggal 04 April 2024. Gratification Control Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/183/2024 dated April 4, 2024.
13	Pedoman Sistem Pengendalian Kecurangan (Fraud Control System). Fraud Control System Guidelines.	Pedoman Sistem Pengendalian Kecurangan (Fraud Control System) Nomor SK/DIR/463/2024 tanggal 17 Oktober 2024. Fraud Control System Guidelines Number SK/DIR/463/2024 dated October 17, 2024.
14	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan. Asset Reporting Guidelines.	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Nomor SK/DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Asset Reporting Guidelines Number SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024.
15	Pedoman Anti Penyuapan. Anti-Bribery Guidelines.	Pedoman Anti Penyuapan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/512/2024 tanggal 22 November 2024. Anti-Bribery Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/512/2024 dated November 22, 2024.
16	Tim Penerapan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) Implementation Team.	Tim Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/483/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Good Corporate Governance (GCG) Implementation Team at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/483/2021 dated October 29, 2021.
17	Unit Pengendali Gratifikasi. Gratification Control Unit.	Unit Pengendali Gratifikasi di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/525/2021 tanggal 12 November 2021. Gratification Control Unit at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/525/2021 dated November 12, 2021.

No.	Nama Name	Deskripsi Description
18	Kebijakan Lainnya Other Policies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Cost Reduction Program (CRP) 2. Kebijakan Environmental, Social & Governance (ESG) 3. Kebijakan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 4. Kebijakan Industri 4.0 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 5. Kebijakan Inovasi 6. Kebijakan Kepatuhan Perusahaan (Corporate Compliance) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 7. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan Kebijakan Manajemen Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy) 8. Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi & Perlindungan Data Pribadi 9. Kebijakan Operasional Pabrik Pusri-II PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 10. Kebijakan Operasional Pabrik Pusri-IIB PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 11. Kebijakan Pelaksanaan Proper PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 12. Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 13. Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 14. Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 15. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial ISO 26000 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 16. Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy) 17. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 18. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 19. Kebijakan Manajemen Terintegrasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang <ol style="list-style-type: none"> 1. Cost Reduction Program (CRP) Policy 2. Environmental, Social & Governance (ESG) Policy 3. Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 4. Industry 4.0 Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 5. Innovation Policy 6. Corporate Compliance Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 7. Electrical Safety Policy and Respectful Workplace Policy 8. Information Security & Personal Data Protection Management Policy 9. Operational Policy of Pusri-II Plant PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 10. Operational Policy of Pusri-IIB Plant PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 11. PROPER Implementation Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 12. Workplace Tuberculosis Control Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 13. Information Technology Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 14. Archival Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 15. Social Responsibility Policy ISO 26000 of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 16. Respectful Workplace Policy 17. Legal and Regulatory Compliance Policy 18. Business Continuity Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19. Integrated Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



RUANG LINGKUP KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ruang lingkup kebijakan GCG tersebut adalah untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:

1. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham;
2. Fungsi serta peran Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan seperti karyawan, pemasok serta masyarakat; dan
4. Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perusahaan seperti kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Manajemen Strategis Perusahaan, serta prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan lainnya.

SCOPE OF GCG POLICY

The scope of the GCG policy is to provide guidance to all levels of the Company in carrying out its business activities. Several aspects regulated in this policy include:

1. Relationship between the Company and Shareholders;
2. Functions and roles of the Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Relationship between the Company and stakeholders such as employees, suppliers, and the community; and
4. Principles regarding Company policies such as internal supervision and control policies, risk management, Company strategic management, and other Company policy principles.

Struktur Tata Kelola

Governance Structure

Sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 Bab I yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PUSRI telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PUSRI memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *soft structure* GCG. Tujuan membangun *soft structure* GCG, antara lain adalah:

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG
2. Menjadi pedoman bagi PUSRI dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi PUSRI dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ Perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

In accordance with Law No. 40 of 2007, Chapter I, which has now been amended by Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, regarding General Provisions Article 1, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the law and/or the Articles of Association.
2. The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

PUSRI already has a complete governance structure, especially in the implementation of GCG principles. In its implementation, PUSRI has various policies and guidelines for carrying out its functions and duties, called the GCG soft structure. The objectives of building a GCG soft structure include the following:

1. Complement supporting policies in GCG implementation
2. Become a guideline for PUSRI in carrying out daily activities in accordance with the expected corporate culture
3. It is a form of written commitment to all levels of the PUSRI organization in order to improve the discipline and responsibility of corporate organs in order to safeguard the interests of stakeholders in accordance with their respective responsibilities.

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Socialization of Corporate Governance Policy



PUSRI melakukan kegiatan sosialisasi GCG dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG, *soft structure* dan Infrastruktur GCG, pelaporan *Whistleblowing System*, pencegahan dan pengendalian Gratifikasi serta pelaporan LHKPN.



Sosialisasi atas komitmen penerapan GCG dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:



1. Sosialisasi terkait pengendalian Gratifikasi melalui rangkaian *training*, *social media* Perusahaan, surat DOF, dan *sharing knowledge* dengan pemateri dari KPK RI melalui acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).



2. Sosialisasi mengenai LHKPN dilakukan oleh Departemen Tata Kelola sebagai unit kerja Pengelola LHKPN Perusahaan, sosialisasi dilakukan kepada seluruh Pejabat Wajib Laporan LHKPN melalui surat DOF, PA System, dan melakukan asistensi e-LHKPN untuk seluruh wajib lapor.



3. Sosialisasi tentang kebijakan dan aturan Perusahaan terkait *Whistleblowing System* melalui *banner* IAM Pusri, materi *fraud* dan pelaporannya pada *training* ERM *Fundamental*, Internalisasi WBS Terintegrasi Pupuk Indonesia Group, dan penayangan video sosialisasi WBS pada kegiatan rapat Perusahaan.



4. Sosialisasi kebijakan dan himbauan terkait penandatanganan pakta integritas *online* yang dilakukan melalui surat DOF, jaringan email internal, *website* Perusahaan, dan PA System.



5. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan dalam kegiatan Forum Manajemen Bersama Kajati Sumsel dengan tema Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Perusahaan Negara dan *sharing knowledge* dengan pemateri dari KPK RI melalui acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).

6. Pelaksanaan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan perluasan ruang lingkup seluruh unit kerja oleh lembaga Sertifikasi TUV Nord Indonesia yang di selenggarakan pada tanggal 25 - 26 November 2024.

PUSRI conducts GCG socialization activities with the aim of providing an in-depth understanding of GCW Implementation, Softstructure and Infrastructure, Whistleblowing Reporting System, Prevention and Control of Gratification, and Compliance through LHKPN Reporting.

The socialization of the commitment to GCG implementation is carried out through several activities, as follows:

1. Socialization regarding Gratification Control through a series of training sessions, the Company's social media, DOF letters, and knowledge-sharing sessions featuring speakers from the Corruption Eradication Commission (KPK RI) during the World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) event.

2. Socialization on LHKPN conducted by the Governance Department as the unit responsible for managing the Company's LHKPN. This dissemination is carried out for all LHKPN-reporting officials through DOF letters, the PA System, and by providing e-LHKPN assistance to all obligated reporters.

3. Socialization of company policies and regulations related to the Whistleblowing System, including IAM Pusri banners, fraud-related materials, and reporting during ERM Fundamental training, the internalization of the Integrated WBS within the Pupuk Indonesia Group, and the screening of WBS awareness videos during company meetings.

4. Socialization of policies and reminders regarding the online signing of the integrity pact, conducted via DOF letters, the internal email network, the Company's website, and the PA System.

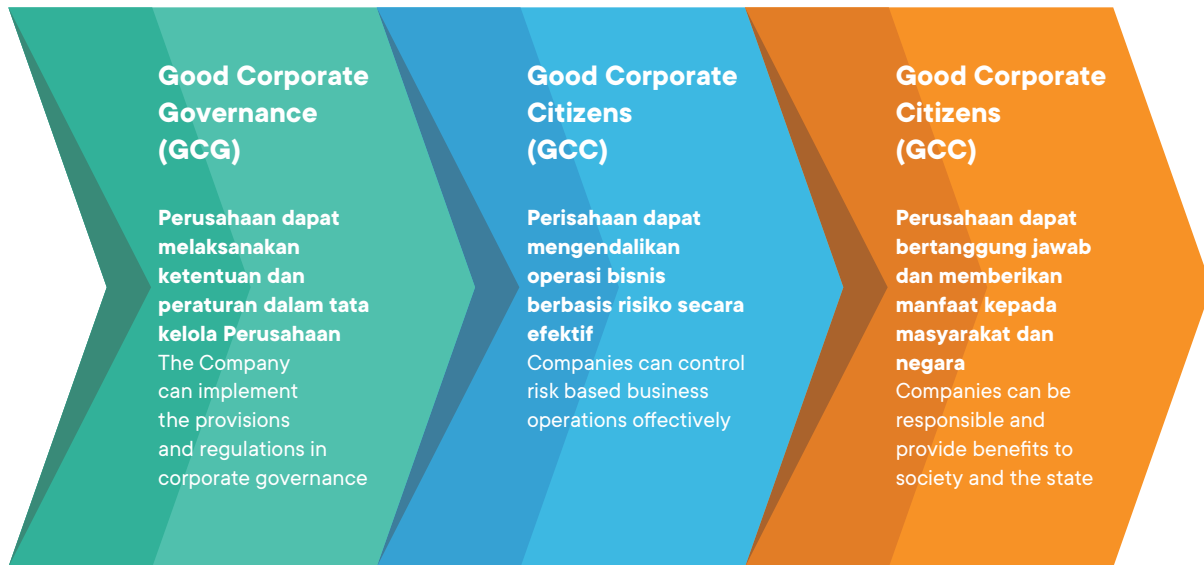
5. Socialization of the Conflict of Interest Handling Policy, carried out during the Joint Management Forum with the South Sumatra Attorney General's Office under the theme "Mitigating Corruption in State-Owned Enterprises," as well as knowledge-sharing sessions featuring speakers from KPK RI during the World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) event.

6. Implementation of Surveillance Audit for the Anti-Bribery Management System (SMAP) under SNI ISO 37001:2016, with an expanded scope covering all work units, conducted by the certification body TUV Nord Indonesia on November 25-26, 2024.



Roadmap Peningkatan Kualitas Penerapan dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan

Roadmap for Implementation and Internalization of Corporate Governance



Peningkatan Penerapan GCG

Improved GCG Implementation



	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Sasaran	Tahap perencanaan dan pembangunan sistem GCG	Tahap implementasi dan evaluasi sistem GCG	Membangun budaya GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan
Goal	Planning and Development Stages of the GCG System	Implementation and Evaluation Stages of the GCG System	Building a GCG Culture in Every Business Activity of the Company
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun struktur organisasi GCG Pemetaan praktik GCG Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk pengelolaan GCG Menyusun dokumen pedoman-pedoman GCG 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun GCG <i>Champion</i> Pemutakhiran pedoman-pedoman GCG Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan mengenai GCG Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sistem kerja yang mengacu pada praktik GCG Mengimplementasikan sistem GCG berbasis IT
Activities	<ul style="list-style-type: none"> Develop a GCG organizational structure. GCG practice mapping Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to GCG Management Prepare GCG guideline documents 	<ul style="list-style-type: none"> Compiling GCG Champions Update of GCG Guidelines Carry out socialization, dissemination, and training on the Company's GCG 	<ul style="list-style-type: none"> Implement a work system that refers to GCG practices Implement an IT-based GCG system

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG

Improvement in the Quality of GCG Implementation



PENILAIAN GCG

Pada tahun 2024, PUSRI turut serta dalam kegiatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang merupakan ajang *awarding* yang juga merupakan penilaian atas penerapan GCG di Perusahaan Indonesia, dengan capaian nilai 86,24 dengan predikat “Sangat Terpercaya” dengan beberapa *area of improvement* yang diberikan oleh penyelenggara:

GCG ASSESSMENT

In 2024, PUSRI participated in the *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*, an awarding event that also serves as an assessment of GCG implementation among Indonesian companies. PUSRI achieved a score of 86.24 with a “Highly Trusted” predicate, along with several areas of improvement identified by the organizer:

Aspek I Aspect I	
Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	Total <i>area of improvement</i> untuk Aspek I adalah sebanyak 5 (lima) rekomendasi The total areas of improvement for Aspect I amount to five (5) recommendations
Rekomendasi Hasil Penilaian Assessment Result Recommendations	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi. 2. PUSRI perlu mengoptimalkan kebijakan pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan. 3. PUSRI perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi. 4. PUSRI perlu mempertimbangkan pembentukan struktur komite ESG untuk mengoptimalkan implementasi dan monitoring program ESG Perusahaan. 5. PUSRI perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI should consider and respond to gender diversity within the Board of Directors' membership structure. 2. PUSRI should optimize its leadership development policies to ensure the availability of competent, competitive, adaptive, and agile future company leaders who can continuously navigate dynamic changes. 3. PUSRI should establish an organizational structure design that aligns with the company's business plan and fills any vacancies in the functional structure under the Board of Directors' responsibility. 4. PUSRI should consider forming an ESG committee structure to optimize the implementation and monitoring of the Company's ESG programs. 5. PUSRI should periodically update its corporate policies and strategies through comprehensive risk-based analysis, considering the dynamics of the business and industry environment, to maximize the company's potential.

Aspek II Aspect II	
Aspek Proses Tata Kelola (Governance Process)	Total <i>area of improvement</i> untuk Aspek II adalah sebanyak 5 (lima) rekomendasi
Governance Process Aspect	The total areas of improvement for Aspect II amount to five (5) recommendations
Rekomendasi Hasil Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI perlu mengoptimalkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. 2. PUSRI perlu mengoptimalkan pemanfaatan <i>whistleblowing system</i> (WBS) diantaranya dengan pelaksanaan sosialisasi yang terus menerus secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dalam melaporkan tindakan pelanggaran di perusahaan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, bertanggung jawab, bersih dan berintegritas. 3. PUSRI perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang bagus serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 4. PUSRI perlu mengembangkan evaluasi pengukuran kematangan sistem tata kelola human capital yang dapat mendukung pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi perusahaan, serta menjadikan perusahaan sesuai standar best practice internasional. 5. PUSRI perlu memastikan manajemen krisis, proses tata kelola risiko di teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, telah diidentifikasi dan dikelola di unit kerja masing – masing perusahaan.
Recommended Assessment Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI should optimize integrated governance, risk management, and compliance (GRC) by addressing various uncertainties in a unified manner with high integrity to ensure the corporation achieves its objectives. 2. PUSRI should enhance the utilization of the whistleblowing system (WBS), including continuous and sustained awareness programs, to improve employees' understanding and commitment to reporting violations within the company. This will help create an open, accountable, clean, and integrity-driven work environment. 3. PUSRI should strengthen the implementation of a comprehensive risk culture to serve as a solid foundation for maximizing potential, achieving strong performance, and ensuring sustainable business growth. 4. PUSRI should develop an evaluation framework to measure the maturity of its human capital governance system, ensuring HR management aligns with the company's strategy and meets international best practice standards. 5. PUSRI should ensure that crisis management, IT risk governance processes—including disruption management, cybersecurity, and disaster recovery—are properly identified and managed across all company units.
Aspek III Aspect III	
Aspek Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)	Total <i>area of improvement</i> untuk Aspek III adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi
Governance Outcome Aspect	The total areas of improvement for Aspect III amount to four (4) recommendations
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI perlu mengembangkan program penilaian dan pengukuran penerapan pedoman etika yang efektif oleh seluruh anggota perusahaan untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang menyimpang. 2. PUSRI perlu meningkatkan capaian inovasi bisnis perusahaan menjadi yang terbaik tidak hanya pada produk dan layanan namun juga pada proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi atau strategi sehingga menjadi keunggulan bersaing perusahaan serta menjaga nilai perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan. 3. PUSRI perlu meningkatkan penanganan pengaduan yang diterima dari berbagai sumber untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan Perusahaan. 4. PUSRI perlu mengoptimalkan pengukuran pemangku kepentingan perusahaan dengan menggunakan pihak eksternal independent, guna menjalankan pelibatan yang efektif dan mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan perusahaan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUSRI needs to develop an assessment and measurement program for the effective implementation of ethical guidelines by all company members to prevent corporate involvement in unethical behavior. 2. PUSRI needs to enhance business innovation achievements to be the best, not only in products and services but also in processes, support functions, organizational performance, and strategy, thereby strengthening the company's competitive advantage and ensuring sustainable growth. 3. PUSRI needs to improve the handling of complaints received from various sources to enhance stakeholder trust in the company. 4. PUSRI needs to optimize stakeholder measurement by engaging an independent external party to ensure effective stakeholder involvement and drive the creation of sustainable value for the company's stakeholders.

Pada tahun 2024 PUSRI tidak melakukan asesmen bersama konsultan maupun *self assessment* karena Kementerian BUMN mencabut Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan belum diterbitkan ketentuan pengganti untuk pelaksanaan penilaian implementasi GCG.

In 2024, PUSRI did not conduct any assessments, either with a consultant or through self-assessment, as the Ministry of State-Owned Enterprises revoked the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators or Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in State-Owned Enterprises, and no replacement regulation has yet been issued for the implementation of GCG assessments.

PUSRI telah menyampaikan *progress* tindak lanjut *Area of Improvement (Aoi)* atas pengukuran kualitas kinerja (*assessment*) penerapan GCG tahun 2022 kepada Pemegang Saham melalui surat DOF No.10068/F/MR/4/F4022/ET/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Penilaian GCG (Assessment GCG) Tahun Buku 2022 dengan hasil 31 dari 33 Aoi telah ditindaklanjuti atau pencapaian 94% dari total Aoi per 17 Januari 2025 melalui rapat bersama dengan Pemegang Saham Aoi *Assesment* GCG Tahun 2022 telah dinyatakan selesai 100%.

PUSRI has communicated the progress of the follow-up on the Areas of Improvement (Aoi) based on the GCG performance quality assessment for 2022 to the Shareholders through DOF Letter No. 10068/F/MR/4/F4022/ET/2024 dated September 6, 2024, regarding the Monitoring Report on the Follow-up of the GCG Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year. As of January 17, 2025, 31 out of 33 Aoi have been addressed, achieving a 94% completion rate. Through a joint meeting with the Shareholders, the Aoi Assessment for GCG in 2022 has been declared 100% complete.

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN GCG DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penilaian kualitas penerapan GCG tahun 2022 tersebut, berikut rekomendasi hasil penilaian masing-masing aspek:

GCG ASSESSMENT RESULTS AND FOLLOW-UP RECOMMENDATIONS

Based on the results of the GCG implementation quality assessment for 2022, the following are the recommendations for each assessed aspect:

ASPEK I ASPECT I	
Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Total <i>area of improvement</i> untuk Aspek I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebanyak 4 rekomendasi.
Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance	The total area of improvement for Aspect I of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable Manner is 4 recommendations.
Rekomendasi Hasil Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Memuat KPI Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam salah satu KPI unit kerja yang menjalankan fungsi tata kelola Perusahaan. Memastikan tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Memastikan kesesuaian ketentuan yang diatur dalam POB Pengendalian Gratifikasi telah selaras dengan Peraturan KPK RI Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Menyampaikan pelaporan penanganan gratifikasi oleh Tim UPG kepada Direksi.
Recommended Assessment Results	<ol style="list-style-type: none"> Contains the KPIs of good corporate governance as outlined in one of the KPIs of work units that carry out the function of corporate governance. Ensure an adequate level of achievement of KPIs regarding the implementation of good corporate governance. Ensure the conformity of the provisions stipulated in the Gratification Control POB is in line with KPK RI Regulation Number 2 of 2019 dated November 5, 2019, concerning Gratification Reporting. Submit reports on the handling of gratuities by the UPG Team to the Board of Directors.

Tindak lanjut:

Follow-up:

- Ditindaklanjuti melalui KPI Tahun 2023 pada Kompartemen Sekretaris Perusahaan & Tata Kelola; Departemen Tata Kelola & Manajemen Risiko serta Bagian Tata Kelola Perusahaan yang termuat dalam PI SMART (Selesai).
 - Hasil capaian GCG dapat dilihat pada realisasi akhir tahun 2023 Kompartemen Sekretaris Perusahaan & Tata Kelola; Departemen Tata Kelola & Manajemen Risiko serta Bagian Tata Kelola Perusahaan yang termuat dalam PI SMART (Selesai).
 - Telah dilakukan update pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/183/2024 tanggal 4 April 2024 (Selesai).
 - Ditindaklanjuti apabila ada laporan yang masuk dari Tim UPG. Adapun Laporan per semester tertuang pada Laporan GCG semester I dan II setiap tahunnya (Selesai).
- Followed up through the 2023 KPI for the Corporate Secretary & Governance Compartment; Governance & Risk Management Department; and Corporate Governance Division, as recorded in PI SMART (Completed).
 - The GCG achievement results can be seen in the year-end 2023 realization report for the Corporate Secretary & Governance Compartment; Governance & Risk Management Department; and Corporate Governance Division, as recorded in PI SMART (Completed).
 - An update has been made to the Gratification Control Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang under Decree No. SK/DIR/183/2024 dated April 4, 2024 (Completed).
 - Followed up when reports are received from the Gratification Control Unit (UPG) Team. The semi-annual reports are included in the GCG Reports for Semester I and II each year (Completed).

**ASPEK II
ASPECT II**

Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Total *area of improvement* untuk Aspek II Pemegang Saham dan RUPS / Pemilik Modal adalah sebanyak 3 rekomendasi.

Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance The total area of improvement for Aspect II of Shareholders and GMS/Capital Owners is 3 recommendations.

Rekomendasi Hasil Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Mencantumkan hasil penilaian kinerja Direksi secara Individu dalam Keputusan RUPS. (WP II.10.30.1d) 3. Memastikan Dewan Komisaris menindaklanjuti hasil keputusan RUPS terkait penetapan imbal jasa audit.
Recommended Assessment Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determine the maximum number of Commissioners that may be concurrently held by each member of the Company's board of Commissioners. 2. Include the results of the performance appraisal of the Board of Directors individually in the GMS Resolution. (WP II.10.30.1d) 3. Ensure that the Board of Commissioners follows up on the results of GMS resolutions related to the determination of audit fees.

Tindak lanjut :

Follow-up:

1. Pupuk Indonesia selaku pemegang saham mayoritas agar membuat aturan untuk menentukan batasan jumlah jabatan yang boleh rangkap bagi Dewan Komisaris.
 2. Hasil penilaian kinerja Direksi telah dimasukkan ke dalam Akta No. 7 tanggal 8 Juni 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kinerja Tahun Buku 2022 PT Pusri Palembang.
 3. Surat Dewan Komisaris No. S-39/DEKOM/PUSRI/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait persetujuan penetapan KAP dan telah mencantumkan besaran imbalan jasa auditnya.
1. Pupuk Indonesia, as the majority shareholder, should establish regulations to determine the maximum number of concurrent positions allowed for the Board of Commissioners.
 2. The performance assessment results of the Board of Directors have been incorporated into Deed No. 7 dated June 8, 2023, regarding the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2022 of PT Pusri Palembang.
 3. The Board of Commissioners' letter No. S-39/DEKOM/PUSRI/VI/2023 dated June 7, 2023, concerning the Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023, was submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero) for approval of the KAP appointment, including the audit fee amount.

**ASPEK III
ASPECT III**

Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Total *area of improvement* untuk Aspek III Dewan Komisaris adalah sebanyak 17 rekomendasi.

Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance The total area of improvement for Aspect III of the Board of Commissioners is 17 recommendations.

Rekomendasi Hasil Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan sesuai ketentuan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-14/DEKOM/ XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. 2. Memastikan penjelasan mengenai Stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan menjadi materi dalam program pengenalan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, sesuai dengan CoCG dan Board Manual. 3. Memastikan dalam penyampaian tanggapan atau saran atas rancangan RKAP kepada Pemegang Saham disertai dengan simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. 4. Menindaklanjuti keputusan RUPS yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris untuk penetapan imbal jasa audit. 5. Memberikan arahan terhadap kebijakan pengelolaan anak Perusahaan kepada Direksi dan melakukan penelaahan atas kebijakan tersebut Bersama Komite Dewan Komisaris. 6. Menegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-14/DEKOM/ XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 dalam hal usulan pengangkatan anggota Direksi dilakukan langsung oleh Pemegang Saham. 7. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan dimasukkan ke dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. 8. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.
-----------------------------	---

9. Melengkapi Board Manual dengan ketentuan terkait Etika Rapat.
10. Memperhatikan jangka waktu penyampaian Undangan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
11. Memastikan pengangkatan anggota Komite telah dilaporkan kepada Pemegang Saham.
12. Melengkapi Piagam Komite Audit dengan aturan Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (3).
13. Melengkapi Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan aturan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 16A Ayat (5).
14. Melengkapi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan rencana pelaksanaan dan agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
15. Memastikan Komite Audit, Komite Investasi & Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi melaksanakan rapat secara periodik sesuai dengan ketentuan dalam Piagam masing-masing Komite.
16. Menandatangani Notulen Rapat Komite Audit dan Komite Investasi & Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Piagam masing-masing Komite.
17. Melengkapi Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite Nominasi & Remunerasi dengan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

Recommended Assessment Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carry out an introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) months after appointment in accordance with the provisions in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-14 / DEKOM / XII / 2021 dated December 31, 2021. 2. Ensure that explanations regarding the Company's main stakeholders and corporate social responsibility become material in the introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners, in accordance with the CoCG and Board Manual. 3. Ensure that the submission of responses or suggestions on the draft RKAP to Shareholders is accompanied by a conclusion that the draft RKAP is aligned and/or not in line with the RJPP. 4. Follow up on the resolution of the GMS, which is the authority of the Board of Commissioners to determination of audit fees. 5. Provide direction on the management policy of subsidiaries to the Board of Directors and review the policy together with the Committee of the Board of Commissioners. 6. Affirm in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-14 / DEKOM / XII / 2021 dated December 31, 2021, in the event that the proposal for the appointment of members of the Board of Directors is carried out directly by the Shareholders. 7. Evaluate the performance of the Board of Directors individually and enter it into the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners. 8. Evaluate the performance achievements of each member of the Board of Commissioners, as stated in the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners. 9. Complete the board manual with provisions related to meeting ethics. 10. Pay attention to the period of submission of the Board of Commissioners Meeting Invitation in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. 11. Ensure that the appointment of committee members has been reported to the Shareholders. 12. Complete the Audit Committee Charter with the rules. The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners who is a member of the Independent Board of Commissioners or a member of the Board of Commissioners who can act independently as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number: PER-14 / MBU / 10/2021 dated October 29, 2021 concerning the Second Amendment to the State Minister of SOEs Number: PER-12 / MBU / 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of SOEs Article 11 paragraph (3). 13. Complete the Nomination and Remuneration Committee Charter with the rules for appointment and dismissal of Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function reported to the General Meeting of Shareholders, as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number: PER-14 / MBU / 10/2021 dated October 29, 2021 concerning the Second Amendment to the State Minister of SOEs Number: PER-12 / MBU / 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of SOEs Article 16A Paragraph (5). 14. Complete the work program of the Nomination and Remuneration Committee with the implementation plan and agenda of the Nomination and Remuneration Committee meeting. 15. Ensure that the Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee hold periodic meetings in accordance with the provisions in the charter of each committee. 16. Sign the meeting minutes of the Audit Committee and the Investment and Risk Management Committee in accordance with the provisions of the charter of each committee. 17. Complete the Quarterly Report and Annual Report of the Nomination & Remuneration Committee with a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of activities and recommendations.
--------------------------------	--

Tindak lanjut :

Follow-up:

Aspek Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 tidak ada Komisaris baru. Pada tahun 2024 Pengangkatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Ibu Siti Nurizka berdasarkan RUPS LB Akta No. 2 tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya program pengenalan perusahaan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2024.
2. Materi program pengenalan perusahaan yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2024 telah diupdate dengan menambahkan penjelasan mengenai Stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.
3. Surat Dewan Komisaris No. S-55/DEKOM/PUSRI/IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2023 dan Surat No. S-01/DEKOM/PUSRI/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi Rancangan RKAP Tahun 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
4. Surat No. S-39/DEKOM/PUSRI/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Usulan Penunjukkan KAP untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan & Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
5. Telaah dan Evaluasi Pengelolaan & Kinerja Anak Perusahaan oleh Dekom tertuang dalam Surat No. S-86/DEKOM/PUSRI/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Tanggapan Tertulis atas Program Streamlining PT Pusri Agro Lestari.
6. Tertuang pada Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-14/DEKOM/PUSRI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Dewan Komisaris Pusri dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada huruf G terkait Kebijakan peranan Dewan Komisaris dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
7. Surat No. LAP-01/DEKOM/PUSRI/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022.
8. Risalah Rapat Bulan Juli 2023 tanggal 31 Juli 2023.
9. Pada Board Manual 2022 telah tertuang pada 3.6.2 Etika dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.
10. Jangka waktu penyampaian Undangan Rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
11. Tertuang pada Surat Keputusan Dekom No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 Tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Komite Investasi & Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
12. Tertuang pada Surat Keputusan Dekom No. Kep-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023 Tanggal 09 November 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisaris Nomor : Kep-12/Dekom/Pusri/XI/2020 Tentang Piagam Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
13. Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
14. Tertuang pada Surat Keputusan Dekom No. Surat No. S-46/DEKOM/PUSRI/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.
15. Telah dilaksanakan rapat secara periodik sebanyak 15 (lima belas) kali pada tahun 2024.
16. Telah ditandatangani pada Risalah Rapat Internal Komite Audit dengan SPI, Risalah Rapat Komite Investasi Manajemen Risiko dengan Manrisk, dan Risalah Komite Nominasi & Remunerasi.
17. Telah ditambahkan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya pada Laporan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2022 dan Laporan Triwulan I Tahun 2023.

The Board of Commissioners aspect has been followed up with the following results:

1. In 2023, there were no new Commissioners. In 2024, the appointment of Ms. Siti Nurizka as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Deed No. 2 dated June 10, 2024. The company introduction program was subsequently conducted on June 19, 2024.
2. The materials for the company introduction program presented on June 19, 2024, were updated to include explanations regarding the Company's key stakeholders and corporate social responsibility.
3. The Board of Commissioners' Letter No. S-55/DEKOM/PUSRI/IX/2022 dated September 29, 2022, regarding the Board of Commissioners' response to the 2023 RKAP (Corporate Work Plan and Budget) and Letter No. S-01/DEKOM/PUSRI/I/2023 dated January 2, 2023, regarding the Board of Commissioners' response to the Revised Draft of the 2023 RKAP of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
4. Letter No. S-39/DEKOM/PUSRI/VI/2023 dated June 7, 2023, regarding the Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023.
5. The Board of Commissioners' Review and Evaluation of Subsidiary Management & Performance was documented in Letter No. S-86/DEKOM/PUSRI/XII/2023 dated December 15, 2023, regarding the Written Response to the Streamlining Program of PT Pusri Agro Lestari.
6. Stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. Kep-14/DEKOM/PUSRI/XII/2021 dated December 31, 2021, regarding the Policy of the Pusri Board of Commissioners in Implementing Good Corporate Governance (GCG), specifically in Section G concerning the role of the Board of Commissioners in the nomination of Board of Directors members, evaluating their performance (both individually and collectively), and proposing bonuses/incentives in accordance with applicable regulations while considering the performance of the Board of Directors.
7. Letter No. LAP-01/DEKOM/PUSRI/V/2023 dated May 2, 2023, regarding the Board of Commissioners' Supervision Report for the Year 2022.
8. Minutes of the July 2023 Meeting dated July 31, 2023.
9. The 2022 Board Manual includes Section 3.6.2 on Ethics and Rules of Procedure for Board of Commissioners' Meetings.
10. The timeline for sending invitations to Board of Commissioners' meetings complies with the provisions of the Company's Articles of Association.
11. Stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/VII/2023 dated July 3, 2023, regarding the Dismissal & Appointment of Members of the Investment & Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
12. Stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. Kep-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023 dated November 9, 2023, regarding Amendments to the Board of Commissioners' Decision No. Kep-12/DEKOM/PUSRI/XI/2020 on the Audit Committee Charter of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
13. The Board of Commissioners' Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023 dated December 4, 2023, regarding the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
14. Stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. S-46/DEKOM/PUSRI/VII/2023 dated July 11, 2023, regarding the Submission of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2024.
15. A total of 15 (fifteen) periodic meetings were conducted in 2024.
16. The meeting minutes have been signed for the Internal Audit Committee Meeting with SPI, the Investment & Risk Management Committee Meeting with Manrisk, and the Nomination & Remuneration Committee Meeting.
17. A comparison between the realization of activities and the annual work program, along with the substance of activity results and recommendations, has been added to the 2022 Nomination & Remuneration Committee Report and the Q1 2023 Report.

ASPEK IV ASPECT IV	
Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Total area of improvement untuk Aspek IV Direksi adalah sebanyak 8 rekomendasi.
Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance	The total area of improvement for Aspect IV Direction is 8 recommendations.
Rekomendasi Hasil Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. 2. Menyelaraskan pengaturan terkait batas waktu penyampaian Buku RKAP kepada Pemegang Saham antara Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Code of Group Governance</i>) PT Pupuk Indonesia (Persero), Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Anggaran Dasar dan <i>Code of Corporate Governance</i>. 3. Melengkapi Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Governance</i>) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Bab II Angka 2.2 Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait penilaian KPI Direksi Anak Perusahaan secara individu. 4. Meningkatkan upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi/temuan Audit Internal. 5. Menyusun kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan pelaksanaan survei kepuasan karyawan. Telah ditindaklanjuti pada tahun 2023 6. Melengkapi <i>Board Manual</i> Point 2.5.2 tentang Etika dan Tata Tertib Rapat Direksi butir 4.c sesuai dengan AD Perusahaan Pasal 12 ayat 4.c atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 7. Memastikan bahwa temuan Eksternal Audit dapat segera ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. 8. Memastikan jangka waktu tindak lanjut rekomendasi SPI oleh audited dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.
Recommended Assessment Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that the Company's operational activities are in accordance with the established SOPs and that there are no deviations in their implementation. 2. Harmonize arrangements related to the deadline for submission of the RKAP Book to Shareholders between the Code of Group Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero), the Guidelines for Budget Preparation and Management of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Articles of Association and Code of Corporate Governance. 3. Completing the Governance of Parent and Subsidiary Governance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Chapter II Number 2.2: Determination of Performance Targets and Performance Appraisal of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries related to the assessment of KPIs of the Board of Directors of Subsidiaries individually. 4. Increase efforts to follow up on internal audit recommendations and findings. 5. Develop policies regarding assessment methods to measure employee satisfaction and conduct employee satisfaction surveys. Actionable in 2023 6. Complete Board Manual Point 2.5.2 concerning Ethics and Rules of Meeting of the Board of Directors point 4.c in accordance with the Company's AD Article 12 paragraph 4.c at the written request of 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights. 7. Ensure that the findings of the external audit can be immediately followed up by the relevant work unit. 8. Ensure that the period for follow-up of SPI recommendations by audited can be implemented as stipulated.

Tindak lanjut :

Follow-up:

1. Melalui Divisi SPI kegiatan operasional Perusahaan selalu dinilai secara berkala yang ditentukan dengan Risk Based Audit.
2. CoCG telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) sedang dalam proses revisi untuk penyesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan (*Subsidiary Governance*) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Bab II Angka 2.2 Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilengkapi dengan penilaian KPI Direksi Anak Perusahaan secara individu.
4. Pelaksanaan rapat monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dilaksanakan setiap bulan dengan unit kerja terkait.
5. Pelaksanaan survey kepuasan karyawan di PT Pusri Palembang telah tertuang dalam Instruksi Kerja (IK) Nomor 3DDD 01.
6. Tertuang dalam Board Manual Pusri 2022 pada 4.1.2 Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Direksi.
7. Monitoring tindaklanjut audit dilakukan secara berkala dan dilaporkan pada Laporan Bulanan SPI.
8. Proses tindaklanjut tahun 2022 internal audit SPI dengan temuan 146 temuan dengan rincian 121 close dan 25 on progres.

1. Through the SPI Division, the Company's operational activities are regularly assessed based on a Risk-Based Audit approach.
2. The CoCG is in accordance with the Company's Articles of Association, and the Guidelines for Preparing the Company's Work Plan & Budget (RKAP) are currently under revision to align with the Articles of Association.
3. The Governance of Parent-Subsidiary Relationships (*Subsidiary Governance*) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Chapter II, Section 2.2, on Setting Performance Targets and Evaluating the Performance of the Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, has been updated to include the individual KPI assessment of Subsidiary Directors.
4. Monthly monitoring meetings are conducted with relevant work units to follow up on internal audit findings.
5. The implementation of the employee satisfaction survey at PT Pusri Palembang is documented in Work Instruction (IK) Number 3DDD 01.
6. Stipulated in the 2022 Pusri Board Manual under Section 4.1.2 regarding the Attendance of the Board of Commissioners in Directors' Meetings.
7. Audit follow-up monitoring is conducted periodically and reported in the SPI Monthly Report.
8. The follow-up process for the 2022 SPI internal audit recorded 146 findings, with 121 closed and 25 still in progress.

ASPEK V
ASPECT V

Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Total *area of improvement* untuk Aspek V Pengungkapan Informasi dan Transparansi adalah sebanyak 1 rekomendasi.

Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance The total *area of improvement* for Aspect V Information Disclosure and Transparency is 1 recommendation.

Rekomendasi Hasil Penilaian Melengkapi Laporan Tahunan bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dengan Program Pengembangan Seni dan Budaya.

Recommended Assessment Results Complete the Annual Report on Corporate Social Responsibility and Community Development with the Arts and Culture Development Program.

Tindak lanjut :
Follow-up:

Telah ditindaklanjuti pada buku Laporan Tahunan tahun buku 2022

It has been followed up in the annual report book for the 2022 financial year.

ASPEK VI
ASPECT VI

Aspek Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Total *area of improvement* untuk Aspek VI Aspek Lain-Lain adalah sebanyak 0 rekomendasi

Assessment Aspects of the Implementation of Good Corporate Governance The total *area of improvement* for Aspect VI, Miscellaneous Aspects, is 0 recommendation

Rekomendasi Hasil Penilaian -

Recommended Assessment Results



Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG

Enhancing the Quality of GCG Best Practices Implementation

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG di Perusahaan, selama tahun 2024 PUSRI menjalankan berbagai program, meliputi:

1. Melengkapi seluruh *soft structures* yang belum ada dan melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan kualitas penerapan GCG.
2. Melakukan monitoring pelaporan secara berkala dan reviu atas penerapan GCG.
3. Meningkatkan peran serta seluruh karyawan dan *stakeholders* agar lebih aktif dalam penerapan dan pengawasan praktik GCG dalam Perusahaan melalui Sosialisasi/Internalisasi GCG & WBS.
4. Turut serta dalam program BUMN bersih, sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
5. Melakukan penilaian atas penerapan GCG secara berkala setiap tahun.
6. Memperbaharui infrastruktur GCG (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual*) sesuai dengan perkembangan Perusahaan.
7. Berkoordinasi dengan KPK-RI dalam melakukan Sosialisasi tentang Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi.
8. Melakukan Sosialisasi GCG (Gratifikasi & WBS) kepada Anak Perusahaan.
9. Melakukan Sosialisasi GCG (Gratifikasi & WBS) kepada mitra kerja Perusahaan (distributor, pengecer, mitra binaan, dll)
10. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap *Whistleblowing System*.
11. Mendorong & memonitor Kepatuhan Insan Perusahaan terkait Pelaporan LHKPN & Penandatanganan Pakta Integritas Online.
12. Melakukan audit internal & *surveillance* atas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.
13. Memperluas penerapan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.
14. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada personil GCG pada topik GRC, ESG, dan penerapan SDGs.

Sosialisasi Penerapan Tata Kelola dan Anti Korupsi di Lingkup Pusri

Adapun daftar sosialisasi dan internalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

To enhance the quality of best practice implementation of GCG in the Company, throughout 2024, PUSRI has conducted various programs, including

1. Completing all soft structures that are not yet in place and conducting reviews to improve existing ones in order to enhance the quality of GCG (Good Corporate Governance) implementation.
2. Conducting regular monitoring and reviews of GCG implementation and reporting.
3. Increasing the active participation of all employees and stakeholders in the implementation and oversight of GCG practices within the Company through GCG and Whistleblowing System (WBS) dissemination/internalization programs.
4. Participating in the Clean SOEs (State-Owned Enterprises) program in accordance with the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-05/MBU/2013 on the Roadmap Towards Clean SOEs.
5. Conducting periodic annual assessments of GCG implementation.
6. Updating GCG infrastructure (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual*) in line with the Company's developments.
7. Coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK-RI) to disseminate information on gratuities and submit gratuity reports.
8. Conducting GCG (Gratuity & WBS) dissemination to Subsidiaries.
9. Conducting GCG (Gratuity & WBS) dissemination to the Company's business partners (distributors, retailers, fostered partners, etc.).
10. Enhancing and improving the Whistleblowing System.
11. Encouraging and monitoring employee compliance with the submission of the State Official Wealth Report (LHKPN) and the signing of the Online Integrity Pact.
12. Conducting internal audits and surveillance on the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016.
13. Expanding the scope of implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016.
14. Providing training and certification to GCG personnel on topics related to GRC (Governance, Risk Management, and Compliance), ESG (Environmental, Social, and Governance), and the implementation of the SDGs (Sustainable Development Goals).

Socialization of Governance and Anti-Corruption Implementation within the Company

The list of socialization and internalization of the implementation of good corporate governance in the Company that has been implemented in 2024 includes:

Tanggal Date	Acara Event	Media Media
2024	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi melalui IAM PUSRI Sosialisasi melalui Email. Sosialisasi media WBS setiap rapat. 	<p>Aplikasi IAM PUSRI Email Tayangan video</p> <p>IAM PUSRI Application Email Video Presentation</p>
Januari 2024 Februari 2024	Asistensi LHKPN 2024.	Workshop
January 2024 February 2024	LHKPN 2024 Assistance	
27 Februari 2024	Forum Manajemen Bersama Kajati Sumsel Bapak Dr. Yulianto, SH.,MH terkait Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Perusahaan Negara.	Workshop
February 27, 2024	Joint Management Forum with the South Sumatra Chief Prosecutor, Dr. Yulianto, SH., MH, on Mitigating Corruption Crimes in State-Owned Enterprises.	
8 April 2024	Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui sosial media Instagram PUSRI	Instagram
April 8, 2024	Anti-Gratification Awareness Campaign through PUSRI's Instagram social media	
3 Mei 2024	Sosialisasi Fraud pada Pelatihan Inhouse Enterprise Risk Management (ERM Fundamental.	Workshop
May 3, 2024	Fraud Awareness Campaign in the In-house Training on Enterprise Risk Management (ERM) Fundamentals.	
10 Juni 2024	Sosialisasi anti benturan kepentingan melalui surat No.35417/F/MR/F1012/IT/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Larangan Keterlibatan Direksi dan Karyawan/ti pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Surat DOF
June 10, 2024	Conflict of Interest Awareness Campaign through Letter No. 35417/F/MR/F1012/IT/2024 dated June 10, 2024, regarding the Prohibition of Directors and Employees from Engaging in Regional Election Activities and/or Holding Positions as Political Party Officials, Regional Heads, or Deputy Regional Heads.	DOF Letter
23 - 26 Juli 2024	Training Awareness SNI ISO 37001:2016. Training Interpretasi SNI ISO 37001:2016.	Workshop
July 23 - 26, 2024	Training on SNI ISO 37001:2016 Awareness. Training on SNI ISO 37001:2016 Interpretation.	
26 Agustus 2024	Internalisasi WBS Terintegrasi Pupuk Indonesia Group.	Workshop
August 26, 2024	Internalization of the Integrated Whistleblowing System (WBS) within Pupuk Indonesia Group.	
November 2024	<i>E-learning</i> "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi"	Training
November, 2024	E-learning "Enhancing Understanding of Gratification"	
23 Desember 2024	Surat DOF dalam rangka menyambut hari keagamaan 2024 dan tahun baru 2025.	Surat DOF
December 23, 2024	DOF Letter in Commemoration of Religious Holidays 2024 and New Year 2025.	DOF Letter
27 Desember 2024	<i>Sharing knowledge</i> dengan pemateri dari KPK RI melalui acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).	Pelatihan
December 27, 2024	Knowledge sharing session with speakers from the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) through the World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) event.	Training

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

Struktur Kepemilikan PUSRI mencakup Pemegang Saham Utama/Pengendali hingga Entitas Pemilik Akhir per 31 Desember 2024.

SHARES AND SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The ownership structure of PUSRI includes the Main/Controlling Shareholder up to the Ultimate Beneficial Owner as of December 31, 2024.



PUSRI PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan Perusahaan, dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PUSRI. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi PUSRI, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional.

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PUSRI. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi PUSRI, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional.

Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as updated by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, provides a clear definition of the roles, functions, rights, and obligations of shareholders as part of the Company's ownership. These matters are regulated through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The GMS plays a central role in making strategic decisions. Moreover, the GMS serves as a platform to ensure the protection and equal treatment of all Shareholders, as facilitated by PUSRI. Through the GMS, Shareholders can exercise their rights to maximize PUSRI's value, with these rights being upheld fairly and proportionally.

As one of the Company's organs, the General Meeting of Shareholders (GMS) plays a central role in making strategic decisions. Additionally, the GMS serves as a forum for protecting and ensuring equal treatment of all Shareholders, as organized by PUSRI. Through the GMS, Shareholders can exercise their rights to create optimal value for PUSRI, with these rights being applied fairly and proportionally.

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berjalan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.



Karena PUSRI bukan merupakan Perusahaan terbuka, RUPS PUSRI dilaksanakan oleh Sekretariat Perusahaan dan tidak dilaksanakan oleh pihak independen.



HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis Perusahaan, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
- Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
- Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan
- Penilaian kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk di antaranya terkait dividen
- Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
- Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan



RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali wajib memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lain.

Dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi memaparkan Laporan Tahunan, rekomendasi penggunaan laba bersih, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Sebagai anak usaha BUMN, PUSRI tunduk pada Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS, paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku.

The organization of the GMS is as follows:

- Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the Company's Work Plan & Budget: held no later than the end of January of the current financial year.
- Annual General Meeting of Shareholders: held annually, no later than six months after the end of the Company's financial year.
- Extraordinary General Meeting of Shareholders: convened at any time as needed.

Since PUSRI is not a publicly listed company, the General Meeting of Shareholders (GMS) is organized by the Corporate Secretariat, not by an independent party.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS IN THE GMS

In the GMS, Shareholders have the right to receive equal treatment in expressing their opinions and contributing to the decision-making process on important and strategic corporate matters, including:

- Appointment and dismissal of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- Setting the amount of remuneration and allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors
- Ratification of the Company's Work Plan & Budget
- Assessment of the Company's performance for the relevant fiscal year
- Approval of the use of the Company's net profit, including matters related to dividends
- Amendment of the Company's Articles of Association
- All corporate actions that require decisions by the GGMS as stipulated in the Company's Articles of Association

The Annual GMS is authorized to approve the Financial Statements and Annual Reports. PT Pupuk Indonesia (Persero), as the Controlling Shareholder, must observe its responsibility in exercising its rights, both in using voting rights and in other matters.

In the GMS, the Board of Commissioners and Directors present the Annual Report, recommendations for the use of net profit, and other matters requiring Shareholder approval in the GMS.

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), PUSRI is subject to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law. These regulations require the Company to report its performance to the Shareholders through the Annual Report, which must be approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) no later than six months after the end of the fiscal year.

Di tahun 2024 PUSRI menyelenggarakan 6 (enam) kali RUPS, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 yakni tanggal 30 Januari 2024 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, serta 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 2 kali dan tanggal 24 Desember 2024.

In 2024, PUSRI held 6 (six) General Meetings of Shareholders (RUPS), consisting of 1 (one) RUPS for the 2024 RKAP and TJSL RKA on January 30, 2024, 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year Performance held on July 22, 2024, and 4 (four) Extraordinary General Meetings of Shareholders held on March 4, 2024, June 10, 2024 (held twice) and held on December 24, 2024.

RUPS RKAP DAN RKA TJSL TAHUN 2024 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2024 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

GMS RKAP AND RKA TJSL YEAR 2024, PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

On Tuesday, January 30, 2024, the General Meeting of Shareholders (GMS) was held to discuss the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for the 2024 Fiscal Year, with the following agenda and resolutions:

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS, RKAP, and RKA TJSL Year 2024, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution												
30 Januari 2024	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PUSRI dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024	<p>Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang Produksi <ol style="list-style-type: none"> Rencana produksi pupuk total sebesar 2.440.000 ton, dengan rincian pupuk Urea 2.115.000 ton dan pupuk NPK 325.000 ton. Rencana produksi non pupuk (amoniak) sebesar 1.365.131 ton . Rasio pemakaian gas bumi rata-rata untuk Amonia adalah 36,19 MMBTU/ton dan untuk Urea adalah 29,03 MMBTU/ton. Mempertahankan PROPER Emas. Bidang Pemasaran Marketing <ol style="list-style-type: none"> Target total pemasaran pupuk PSO sebesar 1.825.506 ton, terdiri dari pupuk Urea 1.431.490 ton dan NPK 394.016 ton. Target penjualan pupuk komersil sebesar 490.200 ton. Target penjualan non pupuk sebesar 80.695 ton. Bidang Keuangan Finance <p>Target bidang keuangan konsolidasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laba Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp687,97 miliar. Total Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp30,53 triliun. Tingkat Kesehatan Perusahaan setelah konsolidasi tahun 2024 dengan kategori Sehat "AA" dengan capaian skor minimal IdAAA/Stable. Bidang SDM Human Resources <p>Anggaran biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1,179 Triliun.</p> Bidang Investasi <p>Total investasi tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2,26 triliun. Adapun target pelaksanaan investasi yaitu tercapai 100% untuk realisasi kegiatan dan tercapai minimal 90% untuk target anggaran sesuai yang tercantum dalam RKAP.</p> <p>Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PUSRI Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Nilai (Rp Juta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pilar Sosial</td> <td>32.665</td> </tr> <tr> <td>Pilar Ekonomi</td> <td>14.830</td> </tr> <tr> <td>Pilar Lingkungan</td> <td>11.598</td> </tr> <tr> <td>Pilar Hukum dan Tata Kelola</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>59,293</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Nilai (Rp Juta)	Pilar Sosial	32.665	Pilar Ekonomi	14.830	Pilar Lingkungan	11.598	Pilar Hukum dan Tata Kelola	200	Total	59,293
Keterangan	Nilai (Rp Juta)													
Pilar Sosial	32.665													
Pilar Ekonomi	14.830													
Pilar Lingkungan	11.598													
Pilar Hukum dan Tata Kelola	200													
Total	59,293													

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS, RKAP, and RKA TJSL Year 2024, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution												
January 30, 2024	Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year 2024 of PUSRI and the Work Plan and Budget of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for the year 2024.	<p>Approved and ratified the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) as well as the 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) with the following details:</p> <ol style="list-style-type: none"> Production Sector <ol style="list-style-type: none"> Total fertilizer production plan of 2,440,000 tons, consisting of 2,115,000 tons of Urea and 325,000 tons of NPK fertilizer. Non-fertilizer production plan (ammonia) of 1,365,131 tons. Average natural gas consumption ratio for Ammonia is 36.19 MMBTU/ton and for Urea is 29.03 MMBTU/ton. Maintain Gold PROPER rating. Marketing Sector <ol style="list-style-type: none"> Target total PSO fertilizer marketing of 1,825,506 tons, consisting of 1,431,490 tons of Urea and 394,016 tons of NPK. Target commercial fertilizer sales of 490,200 tons. Target non-fertilizer sales of 80,695 tons. Finance Sector <p>The target for consolidated finance in 2024 is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Net income (after tax) of Rp687.97 billion. Total assets as of December 31, 2024, of Rp30.53 trillion. The company's health rating after the 2024 consolidation is "AA" with a minimum score of IdAAA/Stable. Human Resources Sector <p>The budget for salaries and employee welfare, as well as the Directors and Board of Commissioners, is Rp1,179 trillion.</p> Investment Sector <p>The total investment target for 2024 is Rp2.26 trillion. The investment implementation target is 100% for the realization of activities and at least 90% for the budget target as stated in the RKAP.</p> <p>Approved and ratified the 2024 Corporate Social Responsibility and Environmental Program Work Plan and Budget (RKA TJSL) with the following details:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Value (Rp Million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Social Pillar</td> <td>32,665</td> </tr> <tr> <td>Economic Pillar</td> <td>14,830</td> </tr> <tr> <td>Environmental Pillar</td> <td>11,598</td> </tr> <tr> <td>Legal and Governance Pillar</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>59,293</td> </tr> </tbody> </table>	Description	Value (Rp Million)	Social Pillar	32,665	Economic Pillar	14,830	Environmental Pillar	11,598	Legal and Governance Pillar	200	Total	59,293
Description	Value (Rp Million)													
Social Pillar	32,665													
Economic Pillar	14,830													
Environmental Pillar	11,598													
Legal and Governance Pillar	200													
Total	59,293													
	<p>Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Koligial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.</p> <p>Approval and Ratification of the Annual Management Contract which includes the target Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2024.</p>	<p>Mengesahkan dan menyetujui Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Koligial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.</p> <p>Approved and ratified the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPIs) targets for the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2024.</p>												

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the Work Plan & Budget (RKAP) and the Work Plan & Budget of the Corporate Social Responsibility & Environmental Program (RKA TJSL) for the 2024 Fiscal Year of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Setya Utama	Komisaris Utama PUSRI President Commissioner of PUSRI	Daconi Khotob	Direktur Utama PUSRI President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Gusrizal	Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Amiruddin Nahrawi	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PUSRI Operation & Production Director of PUSRI	Bob Indiarso	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Finance Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Ali Jamil	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero) HR Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Farrizal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang








Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Annual GMS Performance for the 2023 Financial Year PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

On Monday, July 22, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2023 Financial Year Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was held, with the following agenda and resolution:

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS Performance for the 2023 Fiscal Year, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
22 Juli 24	      <p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023..</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. Mengesahkan: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00513/2.1025/AU.1/04/1122-5/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00544/2.1025/AU.2/11/1122-5/1/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dengan opini, "wajar, dalam semua hal yang material. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang: <ol style="list-style-type: none"> Tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP; Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar kode etik dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Catatan KAP ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas; dan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disajikan tersebut telah memuat hal-hal dan kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi Perseroan di kemudian hari. <p>Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilamana di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau bertindak di luar kewenangannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan/atau bertentangan dengan kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) tersebut dinyatakan tidak berlaku.
July 22, 2024	 <p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, along with the full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) for the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company carried out during the 2023 Fiscal Year.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Approve the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year. Ratify: <ol style="list-style-type: none"> The Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, ending on December 31, 2023, audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP), as stated in their report No. 00513/2.1025/AU.1/04/1122-5/1/III/2024 dated March 31, 2024, with the opinion "fair, in all material respects." The Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, ending on December 31, 2023, audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP), as stated in their report No. 00544/2.1025/AU.2/11/1122-5/1/IV/2024 dated April 4, 2024, with the opinion "fair, in all material respects." With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, ending on December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) grants full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2023 Fiscal Year, provided that: <ol style="list-style-type: none"> The actions are included in the Annual Report or the Financial Statements audited by the KAP; The actions do not constitute criminal acts and do not violate the code of ethics and/or applicable laws and regulations; The KAP's findings are followed up and resolved thoroughly; and The Annual Report and Financial Statements presented include all relevant facts and events, ensuring that no harm will be caused to the Company in the future. <p>In the event that the provided financial statements are found to be incorrect, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the harmed party.</p> <ul style="list-style-type: none"> If, at a later date, any abuse of authority and/or actions beyond their authority is found, and such actions cause harm and/or violate the code of ethics and/or applicable laws and regulations, the full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) shall be considered void.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS Performance for the 2023 Fiscal Year, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
	<p>Penetapan Penggunaan laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023.</p>	<p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.199.016.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividen sebesar Rp343.139.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar Rp343.138.171.000,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), merupakan dividen bagian PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividen tersebut agar disetor ke rekening Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta a.n PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor 116.00.9000.554.8 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). b. Sebesar Rp829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), merupakan dividen bagian Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri. Dividen tersebut agar disetor langsung kepada Yayasan tersebut, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). 2. Sisanya ditetapkan sebagai cadangan perseroan.
	<p>Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2023 Fiscal Year.</p>	<p>Approval and Determination of the Use of Consolidated Profit for the Current Year Attributable to the Owners of the Parent Entity of the Company for the Fiscal Year Ended December 31, 2023, Amounting to IDR 1,199,016,000,000 (One Trillion One Hundred Ninety-Nine Billion Sixteen Million Rupiah), with details as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividend amounting to IDR 343,139,000,000 (Three Hundred Forty-Three Billion One Hundred Thirty-Nine Million Rupiah), with the following breakdown: <ol style="list-style-type: none"> a. IDR 343,138,171,000 (Three Hundred Forty-Three Billion One Hundred Thirty-Eight Million One Hundred Seventy-One Thousand Rupiah), representing the dividend portion for PT Pupuk Indonesia (Persero). This dividend shall be deposited into the Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta account under the name of PT Pupuk Indonesia (Persero), account number 116.00.9000.554.8, no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this decision, unless otherwise stipulated by applicable rules and regulations. A copy of the dividend deposit slip shall be submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero). b. IDR 829,000 (Eight Hundred Twenty-Nine Thousand Rupiah), representing the dividend portion for the Pusri Employee Welfare Foundation. This dividend shall be deposited directly to the Foundation no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this decision, unless otherwise stipulated by applicable rules and regulations. A copy of the dividend deposit slip shall be submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero). 2. The remaining amount shall be designated as the company's reserve.
	<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan. 2. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi untuk Karyawan atas kinerja tahun buku 2023. Persetujuan dan penetapan mengenai Jasa Operasi tersebut akan diberikan secara terpisah dan tersendiri dalam amplop tertutup pada pelaksanaan RUPS ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS tahunan ini. Jasa Operasi agar diberikan kepada Karyawan (termasuk Karyawan Penugasan) secara proporsional dengan memperhatikan masa kerja, kinerja dan tugas serta tanggung jawab.
	<p>Establishment of Salaries/Honorarium along with Facilities and Benefits for the Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for Performance in the Fiscal Year 2023 and/or Long-Term Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and the determination of Employee Operational Services for Performance in the Fiscal Year 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The establishment of salaries/honorarium along with other facilities and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024, as well as the tantiem/performance incentives/special incentives for performance in the Fiscal Year 2023 and/or long-term incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, will be determined separately at a later date by PT Pupuk Indonesia (Persero) as the majority shareholder of the Company. 2. Approval and determination of Operational Services for Employees based on the performance of the fiscal year 2023. The approval and determination of these Operational Services will be provided separately and individually in a sealed envelope during the Annual General Meeting (AGM) and will be an inseparable part of this AGM. Operational Services will be granted to Employees (including Assigned Employees) proportionally, considering their length of service, performance, duties, and responsibilities.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS Performance for the 2023 Fiscal Year, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
    	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.</p> <p>Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Reappoint the Public Accounting Firm (KAP) Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2023 Fiscal Year for the Company's purposes and interests. 3. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit fee or other requirements for the appointed Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 fiscal year, including determining the audit fee and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
 	<p>Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <p>Ratification of the enforcement of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia Number:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P E R - 1 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises; 2. P E R - 2 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. P E R - 3 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.. 	<p>Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <p>Ratification of the enforcement of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia Number:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P E R - 1 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises; 2. P E R - 2 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. P E R - 3 / M B U / 0 3 / 2 0 2 3 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPST 2023

Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders at the 2023 AGMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Setya Utama	Komisaris Utama PUSRI President Commissioner of PUSRI	Daconi Khotob	Direktur Utama PUSRI President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Gusrizal	Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Amiruddin Nahrawi	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PUSRI Operation & Production Director of PUSRI	Bob Indiarito	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Finance Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Ali Jamil	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Sally Salamah	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero) HR Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Farrizal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

On Monday, dated March 04, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was held, with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
04 Maret 2024	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan wafatnya Tuan Amiruddin Nahrawi pada tanggal 02 (dua) bulan Februari 2024, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (29) huruf a Anggaran Dasar Perseroan maka yang bersangkutan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Amiruddin Nahrawi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsuhnya terhadap Perseroan selama ini. Mengangkat Tuan Fajar Yudisiawan sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Menegaskan kembali anggota Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya rapat, yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Tuan Setya Utama : Komisaris Utama Tuan Ali Jamil : Komisaris Tuan Prahoro Yulijanto Nurtjahyo : Komisaris Nyonya Sally Salamah : Komisaris Tuan Fajar Yudisiawan : Komisaris Tuan Bambang Supriyambodo : Komisaris Independen
March 04, 2024	Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners of the Company	<ol style="list-style-type: none"> In connection with the passing of Mr. Amiruddin Nahrawi on February 2, 2024, in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (29) letter a of the Company's Articles of Association, his term of office as a member of the Board of Commissioners of the Company has ended. Based on this, the resignation of Mr. Amiruddin Nahrawi as a member of the Board of Commissioners of the Company, effective February 2, 2024, is hereby ratified, with sincere thanks for his services and contributions to the Company during his tenure. To appoint Mr. Fajar Yudisiawan as a Commissioner of the Company, effective from the closing of this meeting, for a term in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and subject to the provision that he may be dismissed at any time in accordance with the Company's Articles of Association. To reaffirm the members of the Board of Commissioners of the Company at the closing of this meeting, as follows: <ol style="list-style-type: none"> Mr. Setya Utama: President Commissioner Mr. Ali Jamil: Commissioner Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo: Commissioner Mrs. Sally Salamah: Commissioner Mr. Fajar Yudisiawan: Commissioner Mr. Bambang Supriyambodo: Independent Commissioner

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPSLB 2024 tanggal 4 Maret 2024

Attendance of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders in EGM 2024 on March 4, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Setya Utama	Komisaris Utama PUSRI President Commissioner of PUSRI	Daconi Khotob	Direktur Utama PUSRI President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PUSRI Operations and Production Director of PUSRI	Gusrizal	Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Sally Salamah	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero) HR Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPSLB 2024 tanggal 4 Maret 2024

Attendance of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders in EGM 2024 on March 4, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Khairul Anwar	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Syakbarudin Noer	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Subsequently, on Monday, June 10, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was held, with the following agenda and resolutions:






RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
10 Juni 2024	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk surat pengunduran diri Tuan Setya Utama tertanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dengan ini menerima pengunduran diri dan selanjutnya mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Setya Utama sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsinya terhadap Perseroan ini. Mengangkat Nyonya Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Menegaskan kembali anggota Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya rapat, yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Nyonya Siti Nurizka Puteri Jaya : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Tuan Ali Jamil : Komisaris Tuan Prahoro Yulijanto Nurtjahyo : Komisaris Nyonya Sally Salamah : Komisaris Tuan Fadjar Yudisiawan : Komisaris Tuan Bambang Supriyambodo : Komisaris Independen
June 10, 2024	Change in the Composition of the Board of Commissioners of the Company	<ol style="list-style-type: none"> Referring to the resignation letter of Mr. Setya Utama dated May 15, 2024, the resignation is hereby accepted, and the honorable dismissal of Mr. Setya Utama as the President Commissioner of the Company is confirmed, effective as of May 15, 2024, with sincere appreciation for his services and contributions to the Company. Appointing Mrs. Siti Nurizka Puteri Jaya as the President Commissioner, concurrently serving as an Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this meeting, for a term in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with the provision that she may be dismissed at any time in accordance with the Company's Articles of Association. Reaffirming the composition of the Board of Commissioners of the Company at the time of the meeting's closure, as follows: <ol style="list-style-type: none"> Mrs. Siti Nurizka Puteri Jaya: President Commissioner, concurrently Independent Commissioner Mr. Ali Jamil: Commissioner Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo: Commissioner Mrs. Sally Salamah: Commissioner Mr. Fadjar Yudisiawan: Commissioner Mr. Bambang Supriyambodo: Independent Commissioner

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2024

Attendance of the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders at the EGMS on June 10, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
 Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PUSRI Operations and Production Director and Interim President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Bob Indiarito	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Penerima Kuasa Wakil Direktur Utama dan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pupuk Indonesia (Persero) Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and as the Authorized Representative of the President Director and Human Resources Director of PT Pupuk Indonesia (Persero).
 Ali Jamil	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Interim Director of Finance of PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Sally Salamah	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Fadjar Yudisiawan	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

Setelah dilakukan RUPSLB tanggal 10 Juni 2024 di atas, pada hari yang sama Senin, tanggal 10 Juni 2024 dilakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Following the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on June 10, 2024, another EGMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was conducted on the same day, Monday, June 10, 2024, with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

EGMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
10 Juni 2024	Perubahan Nomenklatur Direksi Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Mengubah nomenklatur Direksi Perseroan dengan menambahkan jabatan Direktur Manajemen Risiko Perseroan. Menunjuk Tuan Saifullah Lasindrang untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan, disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditetapkannya Direktur Manajemen Risiko Perseroan yang definitif, dengan ketentuan penunjukan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
June 10, 2024	Changes to the Nomenclature of the Company's Board of Directors	<ol style="list-style-type: none"> To amend the nomenclature of the Company's Board of Directors by adding the position of Director of Risk Management. To appoint Mr. Saifullah Lasindrang to perform the duties of Director of Risk Management, with the same powers and authority as the Director of Risk Management, in addition to his role as Director of Finance and General Affairs of the Company, effective from the closing of this Meeting until the appointment of a definitive Director of Risk Management, with the understanding that this appointment may be revoked at any time by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2024

Attendance of the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders at the EGMS on June 10, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PUSRI President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PUSRI	Filius Yulianti	Direktur Operasi dan Produksi dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PUSRI Operations and Production Director and Interim President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Bob Indiarito	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Penerima Kuasa Wakil Direktur Utama dan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pupuk Indonesia (Persero) Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and as the Authorized Representative of the President Director and Director of Human Resources of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Interim Finance Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Ali Jamil	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Sally Salamah	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Fadjar Yudisiawan	Komisaris PUSRI Commissioner of PUSRI			Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

Pada tanggal 4 Desember 2024 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

On December 4, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was held, with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

EGMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Tanggal Date	Agenda Agenda	Keputusan Resolution
4 Desember 2024	1. Perubahan Klasifikasi Saham Perseroan 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 3. Persetujuan Hibah Saham Seri A Dwiwarna kepada Negara Republik Indonesia	1. Menyetujui perubahan klasifikasi saham Perseroan dari seluruhnya saham biasa menjadi 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar Saham Seri B. 2. Menyetujui hak-hak istimewa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yaitu ha untuk menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; Perubahan anggaran dasar; Perubahan struktur kepemilikan saham; dan Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. 3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari adanya perubahan klasifikasi saham Perseroan dan hak istimewa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 4. Menyetujui pemindahan/pengalihan hak atas 1 (satu) lembar Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia melalui hibah, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 9 ayat 6 dari Anggaran Dasar Perseroan. 5. Sehubungan dengan hibah Saham Seri A Dwiwarna kepada Negara Republik Indonesia tersebut, menyetujui perubahan struktur kepemilikan Saham di Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia sebanyak 5.799.985 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham Seri B dengan nominal seluruhnya sebesar Rp5.799.985.000.000,- (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah); dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri sebanyak 14 (empat belas) saham Seri B dengan nominal seluruhnya sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali segala sesuatu mengenai perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan perubahan yang diputuskan dalam rapat ini dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang bila diperlukan, serta menandatangani setiap akta atau setiap dokumen-dokumen yang terkait dengannya. 7. Terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tidak akan dibacakan namun disampaikan secara terpisah yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.
December 4, 2024	1. Amendment to the Classification of the Company's Shares 2. Amendment to the Company's Articles of Association 3. Approval of the Grant of Series A Dwiwarna Shares to the Government of the Republic of Indonesia	1. Approved the amendment to the Company's share classification from entirely common shares to 1 (one) Series A Dwiwarna share and 5,799,999 (five million seven hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series B shares. 2. Approved the special rights of the holder of the Series A Dwiwarna share, which include the right to approve: <ol style="list-style-type: none"> Appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; Amendments to the Articles of Association; Changes in shareholding structure; and Merger, consolidation, spin-off, dissolution, and acquisition of the Company by another company. 3. Approved the amendment to the Company's Articles of Association as a result of the change in share classification and the special rights granted to the holder of the Series A Dwiwarna share. 4. Approved the transfer of ownership of 1 (one) share of the Company from PT Pupuk Indonesia (Persero) to the Government of the Republic of Indonesia in the form of a grant, by waiving the application of Article 9 paragraph 5 and Article 9 paragraph 6 of the Company's Articles of Association. 5. In relation to the grant of the Series A Dwiwarna share to the Government of the Republic of Indonesia, approved the amendment to the Company's shareholding structure to be as follows: <ol style="list-style-type: none"> The Government of the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of IDR 1,000,000 (one million Rupiah); PT Pupuk Indonesia (Persero) holds 5,799,985 (five million seven hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-five) Series B shares with a total nominal value of IDR 5,799,985,000,000 (five trillion seven hundred ninety-nine billion nine hundred eighty-five million Rupiah); The PT Pusri Employee Welfare Foundation holds 14 (fourteen) Series B shares with a total nominal value of IDR 14,000,000 (fourteen million Rupiah). 6. Granted authority, with the right of substitution, to the President Director of the Company to represent the Shareholders in drafting and restating any matters related to the amendments of the Company's Articles of Association as decided in this meeting before a Notary or authorized official if required, and to sign any deeds or related documents. 7. Stated that the detailed amendments to the Company's Articles of Association will not be read aloud but will be submitted separately and form an integral part of the minutes of this Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPSLB tanggal 4 Desember 2024

Attendance of the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders at the EGMS on December 4, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PUSRI President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PUSRI	Daconi Khotob	Direktur Utama PUSRI President Director of PUSRI	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Gusrizal	Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PUSRI Independent Commissioner of PUSRI	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PUSRI Operations and Production Director of PUSRI	Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Finance Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum PUSRI Finance and General Affairs Director of PUSRI	Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero) HR Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Bob Indiarjo	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Penerima Kuasa Wakil Direktur Utama dan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pupuk Indonesia (Persero) Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and as the Authorized Representative of the President Director and Director of Human Resources of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Interim Finance Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Portfolio and Business Development Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP YKKP Chairman
				Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP YKKP Executive Secretary

RUPS RKAP DAN RKA TJSL PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2023, PUSRI menggelar 3 (tiga) kali RUPS, yaitu RUPS tanggal 27 Januari 2023 tentang Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 dan RUPS Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, RUPS Tahunan 2023 tanggal 08 Juni 2022 tentang pertanggungjawaban kinerja Perusahaan untuk tahun buku 2022, dan RUPSLB pada tanggal 13 November 2023.

Keputusan RUPS pemegang saham di tahun 2023 dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas keputusan pemegang saham tersebut disajikan di bawah ini.

GMS RKAP AND RKA TJSL OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG FOR THE PREVIOUS YEAR

In 2023, PUSRI held three General Meetings of Shareholders (GMS): the GMS on January 27, 2023, concerning the 2023 Work Plan & Budget (RKAP) and the 2023 Work Plan & Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; the 2023 Annual GMS on June 8, 2022, regarding the Company's performance accountability for the fiscal year 2022; and the Extraordinary GMS (EGMS) on November 13, 2023.

The resolutions of the shareholders' GMS in 2023 and the follow-up actions taken by management on these resolutions are presented below.

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS, RKAP, and RKA TJSL of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in 2023

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
27 Januari 2023	<p>Mengesahkan dan menyetujui RKAP Tahun 2023 dan RKA Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah disampaikan oleh Direksi Anak Perusahaan dengan pokok-pokok sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang Produksi <ol style="list-style-type: none"> Rencana produksi pupuk sebesar 2.463.500 Ton. Rencana produksi non pupuk sebesar 1.357.900 Ton. Rasio pemakaian gas bumi rata-rata untuk Amonia adalah 36,20 MMBTU/Ton dan untuk Urea adalah 29,03 MMBTU/Ton. Mempertahankan PROPER Emas. Bidang Pemasaran <ol style="list-style-type: none"> Target pemasaran dan alokasi pupuk PSO sebesar 1.954.603 Ton. Target penjualan pupuk komersil sebesar 535.128 Ton. Target penjualan non pupuk sebesar 80.000 Ton. Bidang Keuangan <p>Target bidang keuangan konsolidasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laba Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp1,801 Triliun. Total Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp27,780 Triliun. Tingkat Kesehatan Perusahaan setelah konsolidasi tahun 2023 dengan kategori Sehat "AA" dengan capaian skor minimal 88,50. Bidang SDM <p>Anggaran biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1,258 Triliun.</p> Bidang Investasi <p>Total investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp661,59 Miliar. Adapun target pelaksanaan investasi yaitu tercapai 100% untuk realisasi kegiatan dan tercapai minimal 90% untuk target anggaran sesuai yang tercantum dalam RKAP.</p> Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) <p>Menyetujui RKA TJSL Tahun Buku 2023.</p> 	<p>Bidang Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi produksi 2023 Urea (total) sebesar 2.010.279 ton (93,78%) dan NPK sebesar 328.349 ton (102,61%). Realisasi produksi 2023 Amoniak (total) sebesar 1.333.796 ton (98,22%). Realisasi efisiensi Amoniak 2023 sebesar 36,19 MMBTU/ton (99,96%) dan efisiensi urea 29,84 MMBTU/ton (102,80%). Mendapatkan Proper Emas pada tanggal 20 Desember 2023 <p>Bidang Pemasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi penyaluran pupuk PSO 2023 sebesar 1.695.038 ton atau 87% dari RKAP 2023 dan 99% dari Supply Agreement 2023. Realisasi penjualan pupuk komersil 2023 sebesar 493.515 ton atau 92% dari RKAP 2023. Realisasi penjualan non pupuk (Amoniak) 2023 sebesar 105.721 ton atau 132% dari RKAP 2023. <p>Bidang Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,199 Triliun atau 67% dari RKAP 2023. Total Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp27,18 Milyar atau 93% dari RKAP 2023. Peringkat kesehatan tahun buku 2023 sesuai Permen BUMN No.PER-2/MBU/03/3023 oleh PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia), dengan hasil final rating AAA berdasarkan Sertifikat No: RC-567/PEF-DIR/V/2024 tanggal 6 Mei 2024. <p>Bidang SDM</p> <p>Realisasi biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 1.278,39 M. (Biaya gaji dan kesejahteraan s.d. 2023 lebih tinggi dari RKAP dikarenakan terdapat pembebanan imbalan pasca kerja dari perhitungan PSAK 24 oleh aktuaris KKA Steven Mourits).</p> <p>Bidang Investasi</p> <p>Realisasi total investasi Pusri tahun 2023 telah melampaui target 90% dari RKAP dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Investasi Rutin tahun 2023 senilai Rp156,228 Milyar (96,68% dari RKAP). Realisasi Investasi Pengembangan (Proyek Pusri IIIB) senilai Rp977 Milyar. <p>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)</p> <p>Telah disetujui RKA TJSL dengan nilai tersebut dalam buku RKAP 2023.</p>

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS, RKAP, and RKA TJSL of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in 2023

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
January 27, 2023	<p>To ratify and approve the 2023 Work Plan & Budget (RKAP) and the Work Plan & Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) as submitted by the Board of Directors of the subsidiary, with the following key points:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Production <ol style="list-style-type: none"> Planned fertilizer production of 2,463,500 tons. Planned non-fertilizer production of 1,357,900 tons. The average natural gas consumption ratio is 36.20 MMBTU/ton for ammonia and 29.03 MMBTU/ton for urea. Maintain the PROPER Gold rating. 2. Marketing <ol style="list-style-type: none"> The target marketing and allocation of PSO fertilizers is 1,954,603 tons. The target sales of commercial fertilizers is 535,128 tons. The target sales of non-fertilizer products is 80,000 tons. 3. Finance <ol style="list-style-type: none"> The consolidated financial targets for the 2023 fiscal year are as follows: <ol style="list-style-type: none"> Net profit for the year (after tax) of Rp1.801 trillion. Total assets as of December 31, 2023, amounting to Rp27,780 trillion. The Company's financial sound rating after the 2023 consolidation is categorized as "Sound (AA)" with a minimum achievement score of 88.50. 4. Human Resources <p>The budget for employee salaries and welfare, as well as for the Board of Directors and Board of Commissioners, amounts to Rp1.258 trillion.</p> 5. Investment <p>The total investment for the 2023 fiscal year is targeted at Rp661.59 billion. The investment implementation targets include achieving 100% completion of activities and a minimum of 90% of the budget target as stated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP).</p> 6. Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program <p>Approve the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) Budget Plan for the 2023 Fiscal Year.</p> 	<p>Production Division</p> <ol style="list-style-type: none"> The total Urea production realization in 2023 was 2,010,279 tons (93.78%) and NPK was 328,349 tons (102.61%). The total Ammonia production realization in 2023 was 1,333,796 tons (98.22%). The Ammonia efficiency realization in 2023 was 36.19 MMBTU/ton (99.96%) and Urea efficiency was 29.84 MMBTU/ton (102.80%). Received the Proper Emas award on December 20, 2023. <p>Marketing Division</p> <ol style="list-style-type: none"> The distribution of PSO fertilizer in 2023 was 1,695,038 tons, or 87% of the 2023 RKAP and 99% of the 2023 Supply Agreement. The realization of commercial fertilizer sales in 2023 was 493,515 tons, or 92% of the 2023 RKAP. The realization of non-fertilizer sales (Ammonia) in 2023 was 105,721 tons, or 132% of the 2023 RKAP. <p>Finance Division</p> <ol style="list-style-type: none"> The net profit for the year was Rp1.199 trillion, or 67% of the 2023 RKAP. The total assets as of December 31, 2023, were Rp27.18 trillion, or 93% of the 2023 RKAP. The health rating for the fiscal year 2023 according to Ministry of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 by PEFINDO (PT Pernerjangan Efek Indonesia), with a final rating of AAA, as per Certificate No: RC-567/PEF-DIR/V/2024 dated May 6, 2024. <p>Human Resources Division</p> <p>The realization of employee, Board of Directors, and Board of Commissioners' salary and welfare costs up to December 2023 was Rp1,278.39 billion. (The salary and welfare costs up to 2023 were higher than the RKAP due to the post-employment benefits charged from the PSAK 24 calculation by actuary KKA Steven Mourits).</p> <p>Investment Division</p> <p>The total investment realization for PUSRI in 2023 exceeded 90% of the RKAP target, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Routine Investment realization for 2023 was Rp156.228 billion (96.68% of the RKAP). Development Investment realization (Pusri IIIB Project) was Rp977 billion. <p>Corporate Social Responsibility and Environmental Program (TJSL)</p> <p>The TJSL RKA with the stated value has been approved in the 2023 RKAP book.</p>

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS, RKAP, and RKA TJSL of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in 2023

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up												
	<p>Menetapkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan Perusahaan sebagai berikut : Establish the operational aspect indicators for the Company's health rating as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan Information</th> <th>Bobot Weight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspek Operasional Operational Aspect</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pencapaian Produksi Production Achievement</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi Bahan Baku Raw Material Efficiency</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Produktivitas SDM Human Resource Productivity</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Total Aspek Operasional Total Operational Aspect</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Direksi (<i>Key Performance Indicator</i>) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023. Approve and ratify the Directors' Contract (<i>Key Performance Indicator</i>) for the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders for the 2023 Fiscal Year.</p> <p>Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Direksi (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP PUSRI Tahun 2023. Approve and ratify the Board of Commissioners' Contract (<i>Key Performance Indicator</i>) for overseeing the Board of Directors in the implementation of PUSRI's 2023 Corporate Budget and Work Plan (RKAP).</p>	Keterangan Information	Bobot Weight	Aspek Operasional Operational Aspect		Pencapaian Produksi Production Achievement	5,00	Efisiensi Bahan Baku Raw Material Efficiency	5,00	Produktivitas SDM Human Resource Productivity	5,00	Total Aspek Operasional Total Operational Aspect	15,00	<p>Persetujuan RKAP dan RKA TJSL Tahun 2023 untuk Tahun Buku 2023 telah dilembagakan dalam akta No. 11 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>The approval of the RKAP and RKA TJSL for the fiscal year 2023 has been formalized in Notarial Deed No. 11 dated January 30, 2024, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</p>
Keterangan Information	Bobot Weight													
Aspek Operasional Operational Aspect														
Pencapaian Produksi Production Achievement	5,00													
Efisiensi Bahan Baku Raw Material Efficiency	5,00													
Produktivitas SDM Human Resource Productivity	5,00													
Total Aspek Operasional Total Operational Aspect	15,00													

RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS for the 2023 Financial Year Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
8 Juni 2023	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00293/2.1025/AU.1/04/1784-1/1/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP; Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Catatan KAP ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas; dan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disajikan tersebut telah memuat hal-hal dan kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi PUSRI dikemudian hari. 	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 telah dilembagakan dalam akta keputusan rapat ini.</p>




RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS for the 2023 Financial Year Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
June 8, 2023	<p>1. Approve the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Implementation Report of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program. Additionally, ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, which ended on December 31, 2022, as audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, as stated in its report No. 00293/2.1025/AU.1/04/1784-1/1/III/2023 dated March 13, 2023, with an opinion of "fair in all material respects." Furthermore, granted full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the Fiscal Year ending December 31, 2022, provided that:</p> <ol style="list-style-type: none"> Such actions are recorded in the Annual Report or Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP); Such actions do not constitute a criminal offense and do not violate the code of ethics and/or applicable laws and regulations; The findings of the Public Accounting Firm (KAP) have been addressed and fully resolved; The presented Annual Report and Financial Statements accurately reflect actual events and conditions, ensuring that they do not result in future losses for PUSRI. 	<p>The approval of the 2022 Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2022 Fiscal Year, has been formalized in the deed of this meeting resolution.</p>
	<p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00491/2.1025/AU.2/11/1784-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PUSRI tanggal 31 Desember 2022, Laporan Aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku- buku laporan PUSRI.</p> <p>2. Ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Fiscal Year, which ended on December 31, 2022, as part of the Social and Environmental Responsibility Report. These financial statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, as stated in its report No. 00491/2.1025/AU.2/11/1784-1/1/III/2023 dated March 30, 2023, covering the financial position of PUSRI's Micro and Small Business Funding Program as of December 31, 2022, along with the Activity Report and Cash Flow Statement for the fiscal year ended on that date. Additionally, granting full discharge and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year, provided that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in PUSRI's financial records.</p>	<p>Persetujuan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022 telah dilembagakan dalam Akta No. 07 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta</p> <p>The approval of the Financials for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2022 has been formalized in Notarial Deed No. 07 dated June 8, 2023, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</p>

RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS for the 2023 Financial Year Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
      	<p>3. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.655.533.000.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Dividen sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp374.999.094.000 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah), merupakan dividen bagian PT Pupuk Indonesia. Dividen tersebut agar disetor ke rekening Bank Mandiri KCP PUSRI Jakarta a.n. PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor 116.00.9000.554.8 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada Pupuk Indonesia. • Sebesar Rp906.000 (sembilan ratus enam ribu rupiah), merupakan dividen bagian Yayasan Kesejahteraan Karyawan PUSRI. Dividen tersebut agar disetor langsung ke Yayasan tersebut, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada Pupuk Indonesia. <p>b. Sisanya ditetapkan sebagai cadangan.</p> <p>3. Approve and determine the allocation of the consolidated current year's profit attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year ending December 31, 2022, amounting to Rp2,655,533,000,000.00 (two trillion six hundred fifty-five billion five hundred thirty-three million rupiah), with the following details:</p> <p>a. Dividend amounting to Rp375,000,000,000.00 (three hundred seventy-five billion rupiah), with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An amount of Rp374,999,094,000 (three hundred seventy-four billion nine hundred ninety-nine million ninety-four thousand rupiah) constitutes the dividend portion for PT Pupuk Indonesia. This dividend shall be deposited into Bank Mandiri KCP PUSRI Jakarta account under the name of PT Pupuk Indonesia (Persero), account number 116.00.9000.554.8, no later than twenty-five (25) calendar days from the date of this resolution, unless otherwise stipulated in accordance with the applicable rules and regulations. A copy of the dividend deposit receipt shall be submitted to Pupuk Indonesia. • An amount of Rp906,000 (nine hundred six thousand rupiah) constitutes the dividend allocated to the PUSRI Employee Welfare Foundation. This dividend must be directly transferred to the foundation no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this decision, unless otherwise stipulated in accordance with the applicable rules and regulations. A copy of the dividend deposit receipt must be submitted to Pupuk Indonesia. <p>b. The remaining amount is allocated as reserves.</p>	<p>Penetapan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 tersebut telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS Kinerja Tahun Buku 2022.</p> <p>The determination of the use of the consolidated net income attributable to the parent company shareholders for the fiscal year ended December 31, 2022, has been implemented in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the Fiscal Year 2022.</p>

RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS for the 2023 Financial Year Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
	<p>4. Memutuskan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2023, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas kinerja Tahun Buku 2022 dan penetapan Jasa Operasi Karyawan atas kinerja Tahun Buku 2022, sebagai berikut:</p> <p>a. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 serta gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham mayoritas.</p> <p>b. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi karyawan atas kinerja tahun buku 2022. Ketetapan Jasa Operasi akan diberikan secara tersendiri dalam amplop tertutup dalam pelaksanaan RUPS ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RUPS tahunan. Jasa operasi agar diberikan kepada karyawan (termasuk karyawan penugasan) secara proporsional dengan memperhatikan masa kerja, kinerja dan tugas serta tanggung jawab.</p> <p>4. Determine the Salaries/Honorariums along with other facilities and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023, as well as performance bonuses/performance incentives/special incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company based on the performance of the 2022 Fiscal Year, and the determination of Employee Operational Compensation based on the performance of the 2022 Fiscal Year, as follows:</p> <p>a. The performance bonuses (tantiem) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year, as well as the salaries of the Board of Directors and the honorariums of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year, will be determined separately and independently by Pupuk Indonesia as the majority shareholder.</p> <p>b. Approve and determine the Employee Operational Service Compensation for the 2022 Fiscal Year performance. The determination of the Operational Service Compensation will be provided separately in a sealed envelope during the implementation of this General Meeting of Shareholders (GMS) and constitutes an integral part of the Annual GMS. The Operational Service Compensation shall be granted to employees (including assigned employees) proportionally, taking into account their length of service, performance, duties, and responsibilities.</p>	<p>1. Telah ditetapkan Peraturan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui SK/DIR/252/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2022 melalui SK/DIR/236/2023 tanggal 14 Juli 2023.</p> <p>2. Pemberian Final Jasa Operasi Karyawan Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan SK/DIR/197/2023 tanggal 12 Juni 2023.</p> <p>1. The Regulations on the Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang have been established through Decree No. SK/DIR/252/2023 dated July 24, 2023, and the Granting of the Performance Bonus to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 has been carried out through Decree No. SK/DIR/236/2023 dated July 14, 2023.</p> <p>2. The Final Payment for Employee Operational Services for the Year 2022 has been carried out in accordance with Decree No. SK/DIR/197/2023 dated June 12, 2023.</p>
	<p>5. Memberi wewenang Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 kepada Dewan Komisaris Perusahaan.</p> <p>5. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2023 Fiscal Year and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year.</p>	<p>Telah dilakukan penunjukan terhadap KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, melalui Surat Perjanjian No. 281/A/HK/A12/SP/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Jasa Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Tahun Buku 2023.</p> <p>The appointment of Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (PwC) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023 has been made through Agreement Letter No. 281/A/HK/A12/SP/2023 dated October 2, 2023, regarding Public Accountant Services for the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group for the Fiscal Year 2023.</p>

RUPS LUAR BIASA TAHUN 2023 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

THE 2023 EXTRAORDINARY GMS OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

On Monday, November 13, 2023, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was held, with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
13 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk surat pengunduran diri Tuan Tri Wahyudi Saleh tertanggal 02 November 2023, dengan ini menerima pengunduran diri dan selanjutnya mengukuhkan pemberhentian diri dengan hormat Tuan Tri Wahyudi Saleh sebagai Direktur Utama Perusahaan terhitung sejak tanggal 02 November 2023, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsinya terhadap Perusahaan selama ini. Mengangkat Tuan Daconi Khotob sebagai Direktur Utama Perusahaan terhitung sejak Rapat ini ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dan dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Menegaskan kembali anggota Direksi Perusahaan pada saat ditutup rapat, yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Tuan Daconi Khotob : Direktur Utama Tuan Saifullah Lasindrang : Direktur Keuangan dan Umum Tuan Filius Yuliandi : Direktur Operasi dan Produksi 	Persetujuan RUPSLB Tahun 2023 tersebut telah dilembagakan dalam Akta Notaris No. 03 tanggal 13 November 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta
November 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Referring to the resignation letter of Mr. Tri Wahyudi Saleh dated November 2, 2023, the resignation is hereby accepted, and his honorable dismissal as President Director of the Company is confirmed, effective as of November 2, 2023, with the utmost gratitude for his services and contributions to the Company. Appoint Mr. Daconi Khotob as the President Director of the Company, effective upon the closing of this Meeting, for a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with the condition that he may be dismissed at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Reaffirm the members of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting, as follows: <ol style="list-style-type: none"> Mr. Daconi Khotob: President Director Mr. Saifullah Lasindrang: Finance and General Affairs Director Mr. Filius Yuliandi: Operations and Production Director 	Approval of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) has been formalized in Notarial Deed No. 03 dated November 13, 2023, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.



Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Board of Commissioners and Independent Commissioners



Dewan Komisaris adalah salah satu organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat tersebut terkait dengan pengelolaan Perseroan, termasuk penerapan GCG dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners is one of the Company's organs responsible for conducting general and/or specific supervision in accordance with the Company's Articles of Association, and for providing advice to the Board of Directors. Such supervision and advice relate to the Company's management, including the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and compliance with applicable laws and regulations.

“

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris harus dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

The Board of Commissioners is accountable to the Shareholders for overseeing management policies, the overall management of the Company, and the Company's business activities carried out by the Board of Directors, while also providing advice to the Board of Directors.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners must act independently, meaning it should not have any conflicts of interest that could hinder its ability to perform its duties independently and critically, whether in relation to one another or in relation to the Board of Directors.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris PUSRI adalah:

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri BUMN No PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
5. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
6. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja

KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK MENJADI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dewan Komisaris juga wajib memenuhi persyaratan materiil yang meliputi integritas, dedikasi, pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta menyediakan waktu yang cukup dan memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan PUSRI.

Persyaratan lain Anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

LEGAL BASIS OF APPOINTMENT

The legal basis for the appointment of the PUSRI Board of Commissioners is:

1. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises;
5. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 on Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero);
6. Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja.

CRITERIA AND REQUIREMENTS TO BECOME A MEMBER OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS

A candidate for the Board of Commissioners must be an individual legally competent to perform legal acts and, within the five (5) years prior to appointment, must not have:

1. Been declared bankrupt;
2. Served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners/Supervisory Board deemed responsible for causing a State-Owned Enterprise (SOE), its subsidiaries, and/or other business entities to be declared bankrupt; and
3. Been convicted of a criminal offense that caused financial losses to the state, an SOE, its subsidiaries, other business entities, and/or offenses related to the financial sector.

Members of the Board of Commissioners must also meet material requirements, including integrity, dedication, an understanding of corporate management issues relevant to one of the company's management functions, sufficient knowledge of the Company's line of business, the ability to dedicate sufficient time, and a strong willingness (enthusiasm) to advance and develop PUSRI.

Other requirements for members of the Board of Commissioners include:

1. Not serving as an administrator of a political party, a legislative candidate, and/or a legislator in the House of Representatives, Regional Representatives Council, Provincial Regional House of Representatives, or Regency/Municipal Regional House of Representatives;



2. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
3. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan
4. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham dengan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN

KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) periode atau setara dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

Ketentuan ini juga berlaku untuk Komisaris Independen yang diangkat sesuai keputusan RUPS LB.

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dengan alasan sebagai berikut:

1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
4. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara; atau
6. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. mengundurkan diri.

2. Not serving as a candidate for regional head/deputy regional head and/or a regional head/deputy regional head, including an acting regional head/deputy regional head.;
3. Not currently holding a position that may give rise to a conflict of interest with the relevant SOE and/or its Subsidiaries;
4. Not having served as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the SOE or the Board of Commissioners of its Subsidiaries for two (2) terms;
5. Not currently holding a position that, under prevailing laws and regulations, is prohibited from being held concurrently with a position as a member of the Board of Commissioners;
6. Being physically and mentally healthy, and not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
7. Having a Taxpayer Identification Number (NPWP) and having fulfilled tax payment obligations for the past two (2) years.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Shareholder(s) following a fit and proper test process in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for members of the Board of Commissioners is one (1) term or the equivalent of five (5) years from the date determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). Upon the expiry of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed for one (1) additional term. However, members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by resolution of the GMS.

This provision also applies to Independent Commissioners appointed by resolution of the Extraordinary GMS.

DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by resolution of the GMS for the following reasons:

1. Inability to perform their duties properly;
2. Failure to comply with the provisions of prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association;
3. Involvement in actions that cause harm to the Company and/or the state;
4. Engagement in unethical and/or improper conduct unbecoming of a member of the Board of Commissioners;
5. Being named a suspect or defendant by the competent authority in a case that harms the SOE and/or state finances;
6. Being found guilty by a final and binding court decision; or
7. Voluntary resignation.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan 10 Juni 2024. Perubahan tersebut dilakukan atas usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pemegang saham Perseroan, dalam rangka restrukturisasi organisasi dan Manajemen Anak Perusahaan Pupuk Indonesia.

COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, there were changes in the composition and membership of the Board of Commissioners based on the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on March 4, 2024, and June 10, 2024. These changes were made upon the recommendation of PT Pupuk Indonesia (Persero) as the Company's shareholder, as part of the organizational and management restructuring of Pupuk Indonesia's Subsidiaries.

Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Komisaris Commissioner	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Menjabat Term of Office
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	Akta No. 02 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	10 Juni 2024 s.d 9 Juni 2029, Periode Pertama
	President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner	Deed No. 02 dated June 10, 2024, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	June 10, 2024 to June 9, 2029, First Term
Ali Jamil	Komisaris	Akta No. 13 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	27 Desember 2021 s.d 26 Desember 2026, Periode Pertama
	Commissioner	Deed No. 13 dated December 27, 2021, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	December 27, 2021 to December 26, 2026, First Term
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris	Akta No. 01 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	20 April 2020 s.d 19 April 2025, Periode Pertama
	Commissioner	Deed No. 01 dated April 20, 2020, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	April 20, 2020 to April 19, 2025, First Term
Bambang Supriyambodo	Komisaris	Akta No. 08 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	25 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2025, Periode Pertama
	Commissioner	Deed No. 08 dated August 25, 2020, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	August 25, 2020 to August 24, 2025, First Term
Sally Salamah	Komisaris	Akta No.11 tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	12 Juni 2021 s.d 11 Juni 2026, Periode Pertama
	Commissioner	Deed No. 11 dated June 12, 2021, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	June 12, 2021 to June 11, 2026, First Term
Fadjar Judisiawan	Komisaris	Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta	4 Maret 2024 s.d 3 Maret 2029, Periode Pertama
	Commissioner	Deed No. 02 dated March 4, 2024, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	March 4, 2024 to March 3, 2029, First Term

KOMISARIS INDEPENDEN

PUSRI adalah bagian dari Holding BUMN Pupuk yang tidak menawarkan saham ke publik (non-listed). Dengan demikian, peraturan yang menjadi acuan Perseroan terkait dengan Komisaris Independen adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 15 dan Anggaran Dasar yang menyebutkan komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atas hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENT COMMISSIONER

PUSRI is part of the state-owned fertilizer holding company that does not offer its shares to the public (non-listed). Therefore, the regulations governing the Company regarding Independent Commissioners are based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, Article 15, and the Articles of Association, which state that the composition of the Board of Commissioners must include at least 20% Independent Commissioners. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, shareholding, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders in relation to the company in question, which could affect their ability to act independently.



PUSRI memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bambang Supriyambodo yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Siti Nurizka Puteri Jaya yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB pada 10 Juni 2024. Dengan demikian, dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, lebih dari 30% di antaranya adalah Komisaris Independen, sehingga telah memenuhi jumlah minimal Komisaris Independen yang diatur dalam peraturan yang berlaku.



Persyaratan Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagaimana disebutkan dalam pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengawasi jalannya pengurusan Perseroan dan usaha Perseroan, Dewan Komisaris PUSRI berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah ditandatangani pada 10 November 2022. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa dikaji secara berkelanjutan dan dilakukan penyesuaian dengan dinamika perusahaan dan lingkungan usaha.

Pokok isi dan cakupan *Board Manual* Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
 - a. Fungsi Dewan Komisaris;
 - b. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris;
 - d. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
 - e. Pembagian Kerja Dewan Komisaris;
 - f. Rapat Dewan Komisaris;
 - g. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PUSRI has 2 (two) Independent Commissioners, namely Bambang Supriyambodo, who was appointed based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) decision on August 25, 2020, and Siti Nurizka Puteri Jaya, who was appointed based on the RUPS LB decision on June 10, 2024. Therefore, of the 6 (six) members of the Board of Commissioners, more than 30% are Independent Commissioners, thus meeting the minimum number of Independent Commissioners as required by applicable regulations.

Requirements for Independent Commissioners

An Independent Commissioner, as outlined in the Board of Commissioners and Board of Directors' work guidelines, must meet the following requirements:

- Must not be an individual who has worked or has authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months, unless reappointed as an Independent Commissioner for the following period;
- Must not own shares, either directly or indirectly, in the Company;
- Must not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority shareholders of the Company; and
- Must not have any business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms may be reappointed for the following term, provided that the Independent Commissioner affirms their continued independence to the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

In carrying out its duties, responsibilities, and authority to oversee the management and operations of the Company, the Board of Commissioners of PUSRI adheres to the Board Manual, which was signed on November 10, 2022. This manual was developed based on applicable laws and regulations, and is continuously reviewed and adjusted to align with the company's dynamics and the business environment.

The main content and scope of the Board Manual for the Board of Commissioners include the following:

1. Introduction
2. Board of Directors
3. Board of Commissioners
 - a. Functions of the Board of Commissioners;
 - b. General Concept of Supervision by the Board of Commissioners;
 - c. Duties, Authority, & Responsibilities of the Board of Commissioners;
 - d. Code of Ethics for Board Members;
 - e. Division of Work Among the Board of Commissioners;
 - f. Board of Commissioners Meetings;
 - g. Supporting Organizational Structure for the Board of Commissioners.

4. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
5. Kegiatan Antar Organ Perusahaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dirinci sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam proses bisnis Perseroan;
7. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
8. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;
9. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KEP-04/DEKOM/PUSRI/VI/2022 sesuai dengan peran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dari Komite di bawah Dewan Komisaris. Pembagian tugas juga memperhatikan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman.

4. Governance of the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. Activities Between Corporate Governance Bodies.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The general duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to oversee the policies and management of the Company, as well as the operations of the Company carried out by the Board of Directors, and to provide advice to the Board of Directors. Based on the articles of association and applicable laws and regulations, these duties and responsibilities are detailed as follows:

1. Provide advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. Review, evaluate, and sign the Company's Long-Term Plan and the Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association.
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the reasons the Board of Commissioners signs the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget.
4. Monitor the progress of the Company's activities and provide feedback and suggestions to the General Meeting of Shareholders on any issues deemed important for the Company's management.
5. Immediately report to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining performance of the Company.
6. Monitor the application of Good Corporate Governance (GCG) principles in the Company's business processes.
7. Oversee and provide advice on the implementation of the Internal Audit function, Risk Management, and Integrated Governance.
8. Evaluate the performance of the Board of Directors in managing the Company and report it to the Shareholders.
9. Carry out other duties related to supervision and advisory roles, as long as they do not contradict applicable laws, the articles of association, and/or decisions made at the General Meeting of Shareholders.

RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER

Coordinate the implementation of all duties of the Board of Commissioners and also serve as the Chairman of the Nomination & Remuneration Committee.

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The division of duties of the Board of Commissioners is determined based on KEP-04/Dekom/PUSRI/VI/2022 in accordance with the role of each member of the Board of Commissioners as Chair of the Committee under the Board of Commissioners. The division of tasks also takes into account abilities, knowledge, and experience.

Nama Name	Bidang Tugas Areas of Duty
Siti Nurizka Puteri Jaya	Merangkap selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi anggota-anggota Dewan Komisaris Concurrently serves as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, and coordinates all tasks and functions of the Board of Commissioners members.
Ali Jamil	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Penjualan Produk PSO, Produk Komersil, Distribusi dan Pemasaran. In charge of all aspects related to PSO product sales, commercial products, distribution, and marketing.
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Teknik dan Sistem Informasi, Riset dan Pengembangan, serta Proyek Pembangunan Pabrik PUSRI III-B. In charge of all aspects related to engineering and information systems, research and development, and the PUSRI III-B plant construction project.
Bambang Supriyambodo	Merangkap selaku Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Operasi, Teknologi dan Pemeliharaan, Investasi dan Manajemen Risiko. Concurrently serves as Chairman of the Investment and Risk Management Committee, as well as in all aspects related to the fields of operations, technology and maintenance, investment, and risk management.
Sally Salamah	Merangkap selaku Ketua Komite Audit serta segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Keuangan, Pengawasan Internal, dan Tata Kelola. Concurrently serves as Chairman of the Audit Committee and all aspects related to finance, internal supervision, and governance.
Fadjar Judisiawan	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Umum, Pengadaan dan Sumber Daya Manusia. In charge of all aspects related to the general sector, procurement, and human resources.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi setiap awal tahun untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wujud dari pelaksanaan etika jabatan anggota Dewan Komisaris.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

All members of the Board of Commissioners make an independence statement at the beginning of each year, affirming their commitment to act independently and free from any conflicts of interest in performing their duties and responsibilities. This is a demonstration of their adherence to the ethical standards of their positions as members of the Board of Commissioners.

Nama Name	Pernyataan Sikap Bebas benturan Kepentingan Statement of Conflict of Interest Independence
Siti Nurizka Puteri Jaya	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 19 Juni 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on June 19, 2024)
Ali Jamil	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 10 Januari 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on January 10, 2024)
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 10 Januari 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on January 10, 2024)
Bambang Supriyambodo	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 10 Januari 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on January 10, 2024)
Sally Salamah	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 10 Januari 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on January 10, 2024)
Fadjar Judisiawan	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 4 Maret 2024) Conflict of Interest-Free (Statement signed on March 4, 2024)

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN

Antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

AFFILIATION AND MANAGEMENT IN OTHER COMPANIES

There is no family relationship up to the third degree, either in a direct or collateral line, or by marriage, between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Family relationships among members of the Board of Commissioners, or between the Board of Commissioners and/ or members of the Board of Directors, as well as Shareholders, can be found in the section "Relations Between the Board of Commissioners and Board of Directors."

Kepengurusan Perusahaan lain anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Management positions in other companies held by members of the Board of Commissioners are listed in the table below:

Kepengurusan di Perusahaan Lain

Management in Other Companies

Nama Name	Sebagai Dewan Komisaris As the Board of Commissioners	Sebagai Direksi/Jabatan Lain As the Board of Directors/Other Positions	Sebagai Pemegang Saham As Shareholders
Siti Nurizka Puteri Jaya	-	-	-
Ali Jamil	-	Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian / Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian Expert Staff to the Minister of Agriculture in the Field of Agricultural Infrastructure / Acting Secretary General, Ministry of Agriculture	-
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	-	Kepala BPSDM, Kementerian ESDM Head of the Human Resources Development Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources	-
Bambang Supriyambodo	-	-	-
Sally Salamah	-	Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP Head of the Human Resources Development Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources	-
Fadjar Judisiawan	-	Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan, Kementerian BUMN Assistant Deputy for the Health Industry, Ministry of State-Owned Enterprises	-

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Pasal 14 ayat 32 Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap dengan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

MULTIPLE POSITIONS AND CONFLICT OF INTEREST

Based on Article 14, paragraph 32 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions with other positions in accordance with applicable laws and regulations, including positions as political party officials, candidates for legislative members, and/or candidates for regional heads/vice regional heads.

Selama tahun 2024, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

During 2024, no members of the Board of Commissioners held dual positions that conflicted with the provisions of the Company's Articles of Association.

PERTEMUAN/RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain dilaksanakan dalam bentuk pertemuan atau rapat, baik antar anggota Dewan Komisaris maupun dengan mengundang Direksi dan Komite. Pelaksanaan pertemuan juga menjadi salah satu mekanisme evaluasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, termasuk dalam hal pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan atau rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat internal kali, dan 15 (lima belas) kali rapat gabungan, berikut rinciannya:



Tingkat Kehadiran rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi Tahun 2024

Attendance Rate of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors in 2024

Jenis Rapat Type of Meeting	Jumlah Rapat Total Meeting	Tingkat Kehadiran % Attendance Rate %
Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	12	93
Rapat Dewan Komisaris – Direksi Board of Commissioners – Board of Directors Meetings	15	91



RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board Manual Dewan Komisaris PUSRI menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris dapat diperluas dengan mengundang Direksi, komite-komite, atau undangan lainnya. Direksi diperkenankan mengikutsertakan/ menugaskan staf Perusahaan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan pada akhir bulan atau sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pembahasan kinerja Perusahaan serta hal-hal yang strategis dan aktual.



Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama melakukan panggilan rapat secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam setiap rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah disusun risalah serta dinamika rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya agar penerima kuasa dapat bertindak sesuai dengan yang dikuasakan kepadanya.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are carried out in the form of meetings, both among Board members and with the Directors and Committees. These meetings also serve as one of the mechanisms for evaluating the performance of the Board's duties, authority, and responsibilities, including in terms of fulfilling social and environmental responsibilities.

During the year 2024, the Board of Commissioners held a total of 12 (twelve) internal meetings and 15 (fifteen) joint meetings, as detailed below:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The PUSRI Board Manual states that Board of Commissioners meetings may be extended by inviting the Board of Directors, committees, or other guests. The Board of Directors may include or assign Company staff to participate. Joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors are held at the end of the month or as agreed upon by both the Board of Commissioners and Board of Directors to discuss the Company's performance as well as strategic and current issues.

The President Commissioner or a Commissioner designated by the President Commissioner will issue a written meeting invitation, which is sent to both the Board of Commissioners and Board of Directors at least 3 (three) days before the meeting, or in a shorter period if the matter is urgent, in accordance with the Company's Articles of Association.

During each joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, minutes are prepared, documenting the discussions (including any dissenting opinions from the Commissioners, if any) and decisions made by the Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary. These minutes are signed by all present members of the Board of Commissioners and Board of Directors and distributed to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Any member of the Board of Commissioners or Board of Directors who is unable to attend an internal meeting of the Board of Commissioners must give a power of attorney to another member of the Board of Commissioners or Board of Directors, allowing the designated person to act on their behalf as authorized.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2024, rapat gabungan digelar sebanyak 15 (lima belas) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2024, a total of 15 (fifteen) joint meetings were held. The frequency and attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absence	Kehadiran (%) Attendance (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Setya Utama*	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	0	100
Siti Nurizka Puteri Jaya**	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner	10	10	0	100
Ali Jamil	Komisaris Commissioner	15	14	1	93
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris Commissioner	15	12	3	80
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	15	14	1	93
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	15	15	0	100
Fadjar Judisiawan***	Komisaris Commissioner	13	12	1	92
Direksi Board of Directors					
Daconi Khotob	Direktur Utama President Director	14	12	2	86
Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi Operation & Production Director	14	13	1	93
Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum Finance and General Director	15	15	0	100
Saifullah Lasindrang**	Pt. Direktur Manajemen Risiko Acting Director of Risk Management	10	10	0	100

*) Menjabat sampai tanggal 15 Mei 2024

***) Menjabat sejak tanggal 4 Maret 2024

***) Menjabat sejak tanggal 10 Juni 2024

*) Served until May 15, 2024

***) Serving since June 10, 2024

***) Serving since March 4, 2024

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Attendance List of the Board of Commissioners in Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absence	Kehadiran (%) Attendance (%)
Setya Utama*	Komisaris Utama President Commissioner	4	3	1	75
Siti Nurizka Puteri Jaya**	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner	7	7	0	100
Ali Jamil	Komisaris Commissioner	12	11	1	91
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Komisaris Commissioner	12	10	2	83
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	10	0	100
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	12	10	0	100
Fadjar Judisiawan***	Komisaris Commissioner	10	9	1	90

*) Menjabat sampai tanggal 15 Mei 2024

*) Served until May 15, 2024

***) Menjabat sejak tanggal 10 Juni 2024

***) Serving since June 10, 2024

****) Menjabat sejak tanggal 4 Maret 2024

****) Serving since March 4, 2024

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN KUNJUNGAN KE LAPANGAN

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tanggung jawab pengawasan dalam beberapa aspek seperti pertemuan atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi dalam rangka evaluasi kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, sebanyak 15 (lima belas) kali serta rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali.

Selain itu, dalam kurun waktu periode pelaporan, Dewan Komisaris juga telah melakukan kunjungan area kerja Perusahaan. Kunjungan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pekerjaan sesuai Rencana Kerja, serta mengawasi kegiatan operasi Perusahaan secara faktual. Kunjungan kerja dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY DUTIES AND FIELD VISITS

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out several activities related to its supervisory responsibilities across various aspects. These included 15 (fifteen) joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to evaluate performance and monitor the implementation of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP), as well as 12 (twelve) internal meetings of the Board of Commissioners.

Additionally, during the reporting period, the Board of Commissioners conducted site visits to the Company's operational areas. These visits were undertaken to assess the progress of work implementation in accordance with the Work Plan and to oversee the Company's operational activities firsthand. The following members of the Board of Commissioners participated in the site visits:

No	Tanggal Date	Tujuan Purpose	Agenda Agenda
1	4 s.d 7 Maret 2024 March 4 – 7, 2024	Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Working visit to Central Java and D.I Yogyakarta	Peninjauan Aset PUSRI Review of PUSRI Assets
2	19 Juni 2024 June 19, 2024	Kunjungan Kerja ke Palembang Working visit to Palembang	Peninjauan Proyek Pusri IIIB Review of Pusri IIIB Project
3	4 s.d 7 Juli 2024 July 4 – 7, 2024	Kunjungan Kerja ke D.I Yogyakarta Working visit to D.I Yogyakarta	Peninjauan Aset PUSRI dan Diskusi terkait Distribusi Pupuk Subsidi dengan Stakeholder Review of PUSRI Assets and Discussion on Subsidized Fertilizer Distribution with Stakeholders

No	Tanggal Date	Tujuan Purpose	Agenda Agenda
4	5 s.d 10 Agustus 2024 August 5 – 10, 2024	Kunjungan Kerja ke Wuhan, Cina Working visit to Wuhan, China	Factory Visit dan Management Meeting bersama Wuhan Engineering Co.Ltd Factory Visit and Management Meeting with Wuhan Engineering Co.Ltd
5	28 s.d 30 Agustus 2024 August 28 – 30, 2024	Kunjungan Kerja ke Bangka Working visit to Bangka	Peninjauan Aset PUSRI dan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Subsidi melalui Program PI Menyapa Review of PUSRI Assets and Outreach on Subsidized Fertilizer Distribution through the PI Menyapa Program
6	3 s.d 5 September 2024 September 3 – 5, 2024	Kunjungan Kerja ke Palembang Working visit to Palembang	Peninjauan Aset Taman Kenten 8 Ilir dan Indralaya KM 27 Review of Taman Kenten 8 Ilir and Indralaya KM 27 Assets
7	19 s.d 21 September 2024 September 19 – 21, 2024	Kunjungan Kerja ke Makassar Working visit to Makassar	Peninjauan Aset PUSRI Review of PUSRI Assets
8	2 Oktober 2024 October 2, 2024	Kunjungan Kerja ke Palembang Working visit to Palembang	Peninjauan Aset Gedung Serba Guna (GSG) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Review of Multipurpose Building (GSG) and Terminal for Own Interests (TUKS) Assets
9	14 s.d 17 Oktober 2024 October 14 – 17, 2024	Kunjungan Kerja ke Lombok dan Bali Working visit to Lombok and Bali	Peninjauan Aset PUSRI Review of PUSRI Assets

KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan pihak yang posisinya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya Perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian (*Skill*) yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan. Menyadari peran dan posisi Dewan Komisaris yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya pengelolaan Perusahaan melalui tugas pengawasan dan penasehatan yang dijalankannya, PUSRI menyediakan program peningkatan pengetahuan dan kompetensi melalui pendidikan informal antara lain: Seminar, Workshop, Studi Banding. Program pengembangan tersebut harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program pengembangan kepada Pemegang Saham.

Adapun realisasi program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024 disajikan bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

PROGRAM PENGENALAN UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

Selain menyediakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris yang telah bertugas, PUSRI juga melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru. Tujuannya adalah memberikan gambaran terhadap aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada anggota Dewan Komisaris yang baru, sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS DEVELOPMENT PROGRAM POLICY

The Board of Commissioners holds a crucial role in determining the success of the Company's governance. Therefore, each member of the Board of Commissioners is required to possess the necessary skills and expertise to meet the Company's needs. Recognizing the significant role and position of the Board of Commissioners in ensuring the success of the Company's management through its supervisory and advisory duties, PUSRI provides knowledge and competency enhancement programs through informal education, including seminars, workshops, and benchmarking studies. These development programs must align with the Company's work plan and budget, with a report on the program's implementation submitted to the Shareholders.

The realization of training and competency enhancement programs attended by the Board of Commissioners throughout 2024 is presented in the Company Profile section of this annual report.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In addition to providing training and competency development programs for serving members of the Board of Commissioners, PUSRI also implements an orientation program for newly appointed members. The purpose of this program is to provide an overview of the company's business activities, future plans, work guidelines, and other responsibilities of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is responsible for delivering materials to new members of the Board of Commissioners in accordance with the guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Program pengenalan tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat pemegang saham melalui RUPS.



Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.



PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris juga dapat melakukan *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan secara mandiri sebagai upaya untuk melakukan evaluasi internal Dewan Komisaris mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada pencapaian atas target yang ditetapkan dalam indikator-indikator kinerja kunci (KPI), termasuk perihal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The orientation program includes:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company.
2. An overview of the Company related to its objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues.
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited activities.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stipulated in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, as well as the mandate of shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners and each member are an integral part of the compensation and incentive scheme for the Board of Commissioners. The evaluation results of each member serve as one of the considerations for shareholders in deciding on the dismissal and/or reappointment of the respective Commissioner. These performance evaluations also serve as a tool for assessing and improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

PROCEDURE FOR THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners may also conduct a self-assessment of its performance independently as an effort to internally evaluate the effectiveness of the Board's function and duties.

The self-assessment is carried out by each member of the Board of Commissioners. The evaluation is based on the achievement of targets set in key performance indicators (KPIs), including the implementation of social and environmental responsibilities.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Adapun kriteria evaluasi kinerja bagi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jajaran Manajemen.
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan metode *self assessment* untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan secara kolegial oleh anggota Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama (KPI) tahun 2024.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Assessment penilaian kinerja Dewan Komisaris PUSRI dilakukan pada tahun 2024. Dalam mengukur kinerja Dewan Komisaris, digunakan 11 (sebelas) indikator dengan total bobot nilai kinerja maksimum sebesar 100%. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan kesimpulan deskripsi penilaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Activity	Frekuensi Frequency		%	Bobot Weight	Skor Score
		Rencana Plan	Realisasi Realization			
1	Rapat Internal Evaluasi kebijakan, laporan manajemen, dan masalah khusus Internal Meeting for Policy Evaluation, Management Reports, and Special Issues	12	12	100	10	10
2	Rapat Internal Evaluasi usulan mengenai KAP Internal Meeting for Evaluation of Proposals Regarding KAP	1	1	100	3	3
3	Rapat Internal Evaluasi RKAP Internal Meeting for Evaluation of the Corporate RKAP	1	1	100	7	7
4	Pembahasan RKAP Discussion on the Corporate RKAP	1	1	100	10	10
5	Pembahasan laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) Discussion on Management Reports (Monthly, Quarterly, Semi-Annual, Annual)	12	12	100	10	10
6	Pembahasan kebijakan & masalah khusus Discussion on Policies & Specific Issues	2	2	100	5	5
7	Pembahasan dalam rangka pengesahan RKAP yang dilaksanakan dalam forum RUPS Discussion for the Approval of RKAP Conducted in the GMS Forum	1	1	100	15	15

PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance evaluation criteria of the Board of Commissioners are determined in the GMS. The evaluation criteria for members of the Board of Commissioners are as follows:

1. Attendance at Board of Commissioners meetings as well as meetings with existing committees.
2. Contribution to the supervision process and provision of advice to Management.
3. Involvement in specific assignments.
4. Compliance with applicable laws and regulations as well as Company policies.
5. Commitment to advancing the Company's interests.

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted using a self-assessment method to assess the effectiveness of the Board's supervisory duties and functions. The evaluation is carried out collegially by the members of the Board of Commissioners based on the achievement of targets set in the key performance indicators (KPIs) for 2024.

RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of PUSRI's Board of Commissioners was conducted in 2024. To measure the performance of the Board of Commissioners, 11 (eleven) indicators were used, with a total maximum performance score of 100%. The results of the Board of Commissioners' performance assessment, based on the conclusions of the 2024 performance evaluation, are as follows:

No	Kegiatan Activity	Frekuensi Frequency		%	Bobot Weight	Skor Score
		Rencana Plan	Realisasi Realization			
8	Pembahasan dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Discussion for the Approval of the Annual Report and Audited Annual Financial Statements	1	1	100	15	15
9	Kunjungan kerja dalam rangka pemahaman bisnis dilakukan perjalanan dinas ke cabang-cabang atau lokasi-lokasi lain yang dipandang perlu Work visits for business understanding are conducted through official trips to branches or other necessary locations	2	9	450	3	14
10	Untuk meningkatkan kompetensi, Dekom menghadiri seminar atau studi banding terkait dengan aspek pengawasan dan atau manajemen To enhance competencies, the Board of Commissioners attends seminars or benchmarking studies related to supervision and/or management aspects	2	4	200	2	4
11	Saran lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis Oral suggestions recorded in the meeting minutes or written suggestions	12	15	125	20	25
JUMLAH SKOR TOTAL SCORE					100	118

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

PUSRI melakukan evaluasi kinerja anggota komite baik secara individual maupun secara kolektif, setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, dan menjadi bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota komite untuk tahun berikutnya.

Indikator umum di antaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif dengan sesama anggota komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan rencana strategis PUSRI. Indikator khusus meliputi kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing komite.

Hasil penilaian kinerja Komite-komite Dewan Komisaris di tahun 2024 dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE SUPPORTING COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PUSRI conducts performance evaluations of committee members both individually and collectively once a year through a self-assessment process. The evaluation is carried out using a system established in the Board of Commissioners' Decision and serves as a basis for assessing the extension of committee members' terms for the following year.

General indicators include attendance at meetings, the ability to collaborate and communicate actively with fellow committee members, integrity, and the ability to understand PUSRI's vision, mission, and strategic plans. Specific indicators cover the quality of suggestions or recommendations provided related to each committee's work program.

The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners' Committees in 2024 are documented in the 2024 Board of Commissioners' Supervisory.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit selama tahun 2024 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Audit tahun 2024, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Audit Tahun 2024 adalah "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024 adalah "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Investasi & Manajemen Risiko selama tahun 2024 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Investasi & Manajemen Risiko tahun 2024, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2024, Dewan Komisaris menilai Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024 adalah "Sangat Baik".

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Commissioners' Assessment of the Audit Committee's Performance

In carrying out its duties and functions throughout 2024, and based on the 2024 Audit Committee KPI Achievement Results, the Board of Commissioners has assessed the Audit Committee's performance for 2024 as "Excellent."

Board of Commissioners' Assessment of the Nomination and Remuneration Committee's Performance

Based on the implementation of duties and functions of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2024, as well as the 2024 KPI Achievement Results of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners has assessed the Committee's performance for 2024 as "Excellent."

Board of Commissioners' Assessment of the Investment & Risk Management Committee's Performance

Based on the implementation of duties and functions of the Investment & Risk Management Committee throughout 2024, as well as the 2024 KPI Achievement Results of the Investment & Risk Management Committee, the Board of Commissioners has assessed the Committee's performance for 2024 as "Excellent."

Board of Commissioners' Assessment of the Performance of the Board of Commissioners' Secretary

Based on the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners' Secretariat throughout 2024, the Board of Commissioners has assessed the performance of the Board of Commissioners' Secretary for 2024 as "Excellent."

POLICY REGARDING THE RESIGNATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE EVENT OF INVOLVEMENT IN FINANCIAL CRIMES

If, in the course of performing their duties, a member of the Board of Commissioners is involved in financial crimes, the Company's follow-up actions will refer to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

Direksi

Board of Directors



Direksi bertugas memimpin, mengurus dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolektif tetap berlaku.

The Board of Directors is responsible for leading, managing, and overseeing the business to achieve the Company's objectives, as well as representing the Company both in and out of court, in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.

Each member of the Board of Directors, including the President Director, holds an equal position, with the President Director's role being to coordinate the activities of the Board of Directors. The Board of Directors may make decisions, including in Board of Directors meetings, and implement those decisions in accordance with their respective duties and authorities. However, collective responsibility remains in effect.

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas memimpin, mengurus dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolektif tetap berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi wajib mengerahkan segenap sumber daya dan kompetensinya untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan pencapaian kinerja Perusahaan di tahun pelaporan dan dimasa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya, dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, baik sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pemilihan dan pengangkatan Direksi PUSRI adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri BUMN No PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
4. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
5. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

The Board of Directors is a corporate organ responsible for leading, managing, and overseeing the Company's business to achieve its objectives, as well as representing the Company both in and out of court, in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.

Each member of the Board of Directors, including the President Director, holds an equal position, with the President Director's role being to coordinate the activities of the Board of Directors. The Board of Directors may make decisions, including in Board of Directors meetings, and implement those decisions in accordance with their respective duties and authorities. However, collective responsibility remains in effect.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors operates under the supervision of the Board of Commissioners. The Board of Directors is required to utilize all available resources and competencies to maintain the Company's achieved performance and further improve its performance in the reporting year and beyond.

In executing its duties and authorities, the Board of Directors must prioritize the interests of the Company above any other interests and act in accordance with the Company's vision and mission while adhering to the limitations set by applicable laws and regulations.

To avoid conflicts of interest, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions. This includes serving as a member of the Board of Directors in another State-Owned Enterprise (SOE), Regional-Owned Enterprise, or privately-owned company; holding structural or functional positions in central or regional government institutions/agencies; serving as a political party official and/or a legislative candidate/member; and holding any other position that may cause a conflict of interest or is prohibited under applicable laws and regulations.

LEGAL BASIS

The legal basis for the selection and appointment of PUSRI's Board of Directors is as follows:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on State-Owned Enterprise Organs and Human Resources;
4. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 on Guidelines for Implementing Good Corporate Governance within the Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero);
5. Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

KRITERIA DIREKSI

Setiap Direksi PUSRI diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagai pembuktian pemenuhan kriteria yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Adapun kriteria yang telah diatur oleh Perusahaan sebagai syarat menjadi Direksi, mencakup:



1. Pengalaman atau rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN, anak Perusahaan BUMN, dan atau Perusahaan lainnya.
2. Keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, pemahaman yang baik terhadap manajemen dan tata kelola Perusahaan dan kemampuan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan.
3. Integritas, dalam artian calon anggota Direksi tersebut tidak pernah terlibat melakukan perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
4. Kepemimpinan yang diterjemahkan dengan memiliki kemampuan untuk memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan, membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan agar mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang bersangkutan. Persyaratan kepatutan atau syarat formal yang harus dimiliki oleh calon anggota Direksi, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan dan atau Perusahaan lainnya.

PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang juga mencakup penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

Each member of PUSRI's Board of Directors is required to sign a declaration letter as proof of compliance with the criteria set by the Company. The criteria established by the Company as requirements for becoming a member of the Board of Directors include:

1. Experience and Track Record: Demonstrated success in managing State-Owned Enterprises (BUMN), subsidiaries of State-Owned Enterprises, and/or other companies.
2. Expertise and Knowledge: Adequate proficiency in the Company's line of business, a strong understanding of corporate management and governance, and the ability to make and implement strategic decisions for business development.
3. Integrity, in the sense that the candidate for the Board of Directors has never been involved in fraudulent activities or unethical practices at their previous workplace prior to the nomination (engaging in dishonest behavior), actions that breach commitments or agreements that can be categorized as not fulfilling the commitments made at their previous workplace before the nomination, actions that could provide unlawful benefits to the individual and/or other parties before the nomination, or actions that could be categorized as violations against regulations and the principles of sound corporate governance (engaging in improper conduct).
4. Leadership: The ability to formulate and articulate the Company's vision, inspire and motivate executives and employees, and drive the organization toward achieving its objectives.
5. Commitment and Dedication: A strong enthusiasm and high dedication to advancing and developing the Company. Additionally, candidates must meet formal eligibility requirements, meaning they must be individuals legally capable of conducting legal actions. However, they are disqualified if, within the five years preceding their appointment, they have:
 - a. Been declared bankrupt.
 - b. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a State-Owned Enterprise, its subsidiary, and/or another company to go bankrupt.
 - c. Been convicted of a criminal offense that caused financial harm to the state, a State-Owned Enterprise, its subsidiary, and/or another company.

PROCEDURE FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, which also determines the effective date of such appointment and dismissal. If the General Meeting of Shareholders does not specify an effective date, the appointment and dismissal of Board members shall take effect upon the closing of the General Meeting of Shareholders.

Apabila pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat umum Pemegang Saham.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengatur masa jabatan anggota Direksi yakni maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang tidak terisi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang tidak terisi.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI

Hingga berakhirnya tahun 2024 jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Direksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Direksi Perusahaan, yakni jumlah Direksi minimal 2 (dua) orang.

Berikut susunan anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tahun 2024. Tidak terdapat pergantian susunan anggota Direksi, namun terdapat tambahan satu nomenklatur Direktur, yakni Direktur Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Pelaksana Tugas, dan diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 10 Juni 2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term	Periode Menjabat Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Daconi Khotob	Direktur Utama President Director	13 November 2023 - sekarang November 13, 2023 – present	Pertama First	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 13 November 2023 yang dikuatkan dengan Akta No. 03 tanggal 13 November 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated November 13, 2023, as legalized by Deed No. 03 dated November 13, 2023, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum Finance and General Director	25 Agustus 2020- sekarang August 25, 2020 – present	Pertama First	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan Akta No.9 Tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 25, 2020, as affirmed in Deed No. 9 dated August 25, 2020, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Saifullah Lasindrang	Plt. Direktur Manajemen Risiko Acting Risk Management Director	10 Juni 2024 - sekarang June 10, 2024 – present	Pertama First	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 03 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. The resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 10, 2024, which was affirmed by Deed No. 03 dated June 10, 2024, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.

If the appointment and dismissal of Board members are carried out through a resolution of the Shareholders outside of the General Meeting of Shareholders, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in the respective Shareholders' resolution. If no effective date is specified in the resolution, the appointment and dismissal shall take effect from the date the Shareholders' resolution is issued. Members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the Shareholders, and such nominations are binding for the General Meeting of Shareholders.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Articles of Association stipulate that the term of office for members of the Board of Directors is a maximum of five (5) years and may be renewed for one (1) additional term. If the term of office of a member of the Board of Directors expires and the General Meeting of Shareholders has not yet appointed a successor, the duties of the vacant position shall be carried out in accordance with the provisions for filling vacant positions on the Board of Directors.

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of the end of 2024, the Board of Directors consisted of three (3) members. This number complies with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, which requires a minimum of two (2) members on the Board of Directors.

The composition of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in 2024 is as follows. There were no changes in the composition of the Board of Directors; however, an additional directorate, the Director of XXX, was introduced and concurrently held by an Acting Officer. This decision was made in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 10, 2024, as shown in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term	Periode Menjabat Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi Operation & Production Director	13 Januari 2021- Sekarang January 13, 2021 – present	Kedua Second	<ol style="list-style-type: none"> Pertama menjadi Direktur Produksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dikuatkan dengan Akta No. 05 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Periode jabatan kedua sebagai Direktur Operasi dan Produksi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 18 Januari 2021 yang dikuatkan dengan Akta No 5 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. <ol style="list-style-type: none"> First appointed as Director of Production pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as affirmed in Deed No. 05 dated January 13, 2016, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. Second term as Director of Operations and Production based on the Shareholders' Resolution dated January 18, 2021, as affirmed in Deed No. 5 dated February 25, 2021, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.



RANGKAP JABATAN

PUSRI memberlakukan kebijakan mengenai rangkap jabatan Direksi dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Ayat 34 yang menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

- Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
- Jabatan lain pada institusi diluar PUSRI yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Adapun informasi mengenai rangkap jabatan Direksi PUSRI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.



CONCURRENT POSITIONS

PUSRI enforces a policy on concurrent positions for the Board of Directors as stipulated in Article 10, Paragraph 34 of the Company's Articles of Association, which states that members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as follows:

- Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), or Private Enterprises;
- Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in State-Owned Enterprises;
- Other structural and functional positions in central and/or regional government institutions/agencies;
- Other positions in accordance with statutory regulations, including as a political party executive, legislative candidate/member, and/or candidate for Regional Head/Deputy Regional Head; and
- Any other position in an institution outside PUSRI that may cause a conflict of interest.

The information regarding concurrent positions held by PUSRI's Board of Directors in 2024 is as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan dan Nama Concurrent Positions and Name
Daconi Khotob	Direktur Utama President Director	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold concurrent positions
Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko The Director of Finance and General Affairs concurrently serves as the Director of Risk Management.	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold concurrent positions
Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold concurrent positions

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DIREKSI

PUSRI telah memiliki dan memberlakukan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disahkan melalui pernyataan komitmen bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2022 yang merupakan kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PUSRI di dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai penganut amanat Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD MANUAL: BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

PUSRI has established and implemented the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines, which were officially enacted through a joint commitment statement signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on November 10, 2022. This document represents a mutual agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PUSRI in carrying out their functions and roles as entrusted by the Company, in accordance with applicable laws and regulations.

Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris menjadi acuan Direksi maupun Komisaris dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing.

Dokumen tersebut menjadi salah satu perangkat *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar serta dasar-dasar hukum yang berlaku. Penyusunan Board Manual itu bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menjunjung tinggi empat pilar governansi korporat terkini mencakup Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan di setiap kegiatan di PUSRI secara konsisten.
4. Menerapkan 8 Prinsip GCG terkini, yakni: (1) Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris; (2) Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; (3) Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris; (4) Perilaku Etis; (5) Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan; (6) Pengungkapan dan Transparansi; (7) Hak-hak Pemegang Saham; dan (8) Hak-hak Pemangku Kepentingan, pada setiap kegiatan di PUSRI secara konsisten.

Ruang lingkup hal yang diatur dalam Board Manual ini secara umum mencakup hal-hal seperti peran dan fungsi masing-masing organ, pembagian tugas, hubungan kerja antar organ, rapat organ dan mekanisme pengambilan keputusan, dan lain-lain. Perusahaan juga menekankan dokumen tersebut merupakan dokumen yang hidup sehingga senantiasa dilakukan penyesuaian dengan dinamika Perusahaan dan lingkungan usaha serta dikaji secara berkelanjutan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

PUSRI telah mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dalam Board Manual. Namun, pada tanggal 27 Oktober 2020, Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 11 mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Akta No.11 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H. tanggal 27 Oktober 2020, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0405621 tanggal 10 November 2020, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines serve as a reference for both the Directors and Commissioners in performing their respective duties, authorities, and responsibilities.

The document serves as one of the tools for Good Corporate Governance (GCG) and is prepared based on the Company's Articles of Association as well as applicable legal foundations. The purpose of drafting the Board Manual is to:

1. Serve as a reference/guideline regarding the main duties and functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Improve the quality and effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Upholding the four pillars of modern corporate governance consistently in all activities at PUSRI, which include Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability.
4. Implementing the 8 latest Principles of Good Corporate Governance (GCG): (1) Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners; (2) Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners; (3) Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners; (4) Ethical Behavior; (5) Risk Management, Internal Control, and Compliance; (6) Disclosure and Transparency; (7) Shareholders' Rights; and (8) Stakeholders' Rights, consistently in all activities at PUSRI.

The scope of matters regulated in this Board Manual generally includes aspects such as the roles and functions of each corporate organ, the division of duties, working relationships between corporate organs, meetings of corporate organs, decision-making mechanisms, and other relevant matters. The Company also emphasizes that this document is a living document, meaning it is continuously adjusted in response to the dynamics of the Company and the business environment and is subject to ongoing review.

DUTIES, AUTHORITIES, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

PUSRI has regulated the duties, authorities, and obligations of the Board of Directors in the Board Manual. However, on October 27, 2020, the Company amended its Articles of Association in Article 11 concerning the Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors.

Referring to the Articles of Association as stated in Deed No. 11, drawn up before Lumassia, S.H., a Notary in Jakarta, on October 27, 2020, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0405621 dated November 10, 2020, the Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Company in the best interest of the Company and in accordance with its purposes and objectives. The Board of Directors also represents the Company both in and out of court in all matters and situations, subject to the limitations stipulated in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/ or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi mempunyai kewenangan antara lain:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham mayoritas berwenang menetapkan kebijakan untuk bidang-bidang tertentu.
2. Melaksanakan kepengurusan Perusahaan dengan ketentuan bawah terhadap penyelenggaraan bidang-bidang di Perusahaan antara lain:
 - a. Pemasaran dan penjualan.
 - b. Penelitian dan pengembangan.
 - c. Supply chain management dan *cost management*.
 - d. Pengadaan barang dan atau jasa.
 - e. Finance dan audit serta manajemen risiko dan kepatuhan.
 - f. Manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi.
 - g. Hukum.
 - h. Bidang lainnya, diatur dan ditetapkan oleh Pemegang Saham mayoritas.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
5. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa terhadap penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja, wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas.
6. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan serta membentuk Satuan Pengawasan Intern.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.

Di samping itu, Direksi juga memiliki kewajiban yang mencakup:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham mayoritas.
3. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,

In carrying out its duties, the Board of Directors has the authority to:

1. Establish corporate management policies, provided that the majority shareholder has the authority to determine policies in specific areas.
2. Manage the Company with the provision that the implementation of certain areas within the Company, including but not limited to:
 - a. Marketing and sales.
 - b. Research and development.
 - c. Supply chain management and cost management.
 - d. Procurement of goods and/or services.
 - e. Finance and audit, as well as risk management and compliance.
 - f. Talent management and integrated human resource development.
 - g. Legal affairs.
 - h. Other areas as regulated and determined by the majority shareholder.
3. Regulate the delegation of authority from the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board or to represent the Company both in and out of court.
4. Regulate the delegation of authority from the Board of Directors to one or more Company employees, either individually or collectively, or to other parties, to represent the Company both in and out of court.
5. Establish provisions regarding the Company's employment policies, including determining salaries, pensions, or retirement benefits, and other remuneration for Company employees in accordance with applicable laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions, or retirement benefits, and other remuneration for employees must first obtain written approval from the majority shareholder.
6. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
7. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and establish the Internal Audit Unit.
8. Perform all other actions related to the management or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company both in and out of court in all matters and situations, subject to the limitations stipulated in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Additionally, the Board of Directors also has the following obligations:

1. Ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives and business operations.
2. Execute policies established by the majority shareholder.
3. Prepare the Company's Long-Term Plan, Work Plan, and Budget, along with any amendments, in a timely manner and

- dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 5. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
 6. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 8. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
 9. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
 10. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 12. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.
 13. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
 14. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 15. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 16. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 17. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
 18. Menyusun dan menetapkan *blueprint* organisasi Perusahaan.
 19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the General Meeting of Shareholders.
4. Provide explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget.
 5. Maintain the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors' Meetings.
 6. Prepare the Annual Report as a form of accountability for the Company's management, as well as financial documents as required by laws regarding corporate documentation.
 7. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them for audit by a Public Accountant.
 8. Submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, along with reports on the Company's unrecorded rights, including those resulting from the write-off of receivables.
 9. Provide explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report.
 10. Submit the Balance Sheet and Income Statement, as approved by the General Meeting of Shareholders, to the Minister responsible for Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.
 11. Report any changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners to the Minister responsible for Law and Human Rights.
 12. Maintain the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners' Meetings, Minutes of the Board of Directors' Meetings, the Annual Report, the Company's financial documents, and other corporate documents.
 13. Store at the Company's registered office the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners' Meetings, Minutes of the Board of Directors' Meetings, the Annual Report, the Company's financial documents, and other corporate documents.
 14. Establish an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal control principles, particularly in terms of management, recording, storage, and supervision functions.
 15. Provide periodic reports in the manner and timeframe as stipulated by applicable regulations, as well as other reports upon request by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
 16. Prepare the Company's organizational structure, complete with detailed functions and responsibilities.
 17. Provide explanations on any matters requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.
 18. Develop and establish the Company's organizational blueprint.
 19. Fulfill other obligations in accordance with the provisions of the Articles of Association and as determined by the General Meeting of Shareholders based on applicable regulations.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Secara umum Direksi bertugas secara kolektif dalam melaksanakan pekerjaan, namun tentunya perlu dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Berikut adalah ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS


In general, the Board of Directors collectively carries out its duties; however, it is necessary to allocate responsibilities among its members based on their backgrounds and expertise. The following outlines the scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors.

 Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members
 Daconi Khotob Direktur Utama President Director	<p>Direktur Utama adalah pemimpin tertinggi di Perusahaan dalam batas wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang saham, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Agar tujuan jabatan tersebut dapat tercapai, Direktur Utama bertanggungjawab atas pengelolaan Perusahaan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <p>The President Director is the highest leader in the Company within the limits of authority granted by the General Meeting of Shareholders and the Company's Articles of Association. To ensure the achievement of the objectives of this position, the President Director is responsible for managing the Company, which includes the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan, yaitu menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang (1) industri, yaitu industri pupuk urea, petrokimia dan bahan kimia lainnya, (2) perdagangan, yaitu kegiatan distribusi dan perdagangan yang berhubungan dengan produk industri kimia, (3) jasa yaitu kegiatan studi penelitian, pengembangan, engineering design, pengantongan, konstruksi, pengoperasian pabrik, perbaikan dan pemeliharaan pabrik, konsultasi teknis, dan jasa teknis lainnya, dan (4) angkutan, yaitu angkutan perkapalan, ekspedisi lain, dan pergudangan. Leading the management of the Company in accordance with its objectives, purposes, and business activities, which are to support government policies and programs in the fields of economy and national development in general, specifically in: (1) Industry – including the urea fertilizer industry, petrochemical industry, and other chemical products, (2) Trade – including distribution and trading activities related to chemical industry products, (3) Services – including research studies, development, engineering design, packaging, construction, plant operation, plant repair and maintenance, technical consulting, and other technical services, (4) Transportation – including shipping transportation, other expedition services, and warehousing. 2. Menetapkan perencanaan strategis pengembangan Perusahaan melalui usaha-usaha pengembangan kreativitas dan inovasi sumber daya manusia Perusahaan, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, dan cara- cara lain untuk pengembangan investasi dan kekayaan Perusahaan demi kelangsungan hidup ekonomis dan pertumbuhan Perusahaan jangka panjang. Establishing the Company's strategic development planning through initiatives such as fostering creativity and innovation among the Company's human resources, enhancing management, expanding market reach, and implementing various approaches to develop investments and corporate assets to ensure the Company's economic sustainability and long-term growth. 3. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran Perusahaan, baik untuk dalam pembuatan/penetapan rencana jangka panjang maupun rencana kegiatan dan anggaran Perusahaan jangka pendek/tahunan, yang menyangkut; produksi, kedudukan pasar, laba, produktivitas, inovasi, sarana fisik dan finansial, pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, manajemen risiko Perusahaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Formulating and establishing the Company's strategic planning and maneuvers or actions to achieve corporate objectives, both in the development/determination of long-term plans and short-term/annual corporate activity and budget plans. These encompass aspects such as production, market positioning, profitability, productivity, innovation, physical and financial resources, organizational and human resource development, corporate risk management, and responsibility toward society and the environment. 4. Menetapkan kebijakan-kebijakan Perusahaan dalam memimpin pengelolaan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama bidang produksi, distribusi dan pemasaran, perekayasaan, konstruksi dan pengadaan, anggaran dan keuangan, risiko, sumber daya manusia, dan pembinaan usaha kecil dan lingkungan, dan menyebarluaskan kebijakan tersebut agar menjadi nilai- nilai operasional. Establishing corporate policies in leading the management of the Company across various key areas, particularly in production, distribution and marketing, engineering, construction and procurement, budgeting and finance, risk management, human resources, as well as the development of small businesses and environmental programs, and disseminating these policies to ensure they become operational values. 5. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Perusahaan. Establishing the draft of the long-term plan, which serves as the Company's strategic plan for a five-year period, and determining the draft of the Company's work plan and budget, which is an annual breakdown of the long-term plan, while directing the strategic plan across all elements of the Company's organization. 6. Memimpin proses perubahan, memberikan visi dan arahan- arahan selaras dengan perubahan perbaikan yang diinginkan, memberikan sumber daya yang dibutuhkan, dan mendorong organisasi dan karyawannya ke arah perubahan yang positif. Leading the transformation process by providing vision and direction aligned with the desired improvements, allocating necessary resources, and encouraging the organization and its employees toward positive change.

**Nama dan
Jabatan**
Name and
Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members

7. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menentukan dan atau menyebarluaskan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh organisasi Perusahaan mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan.
Creating a pleasant, cooperative work environment with high enthusiasm to achieve the Company's mission and objectives by defining and/or disseminating the Company's vision, business ethics, and providing encouragement and direction based on a shared vision to the entire organization regarding the Company's path forward.
8. Menetapkan dan memelihara Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Perusahaan untuk mengamankan investasi dan aktiva Perusahaan meliputi pengendalian keuangan, pengendalian operasional, dan mendorong seluruh organisasi untuk memperbaiki proses kerja berdasarkan temuan Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Utama.
Establishing and maintaining the Company's Internal Control System to safeguard the Company's investments and assets, including financial control, operational control, and encouraging the entire organization to improve work processes based on findings from the Internal Audit Unit and the Audit Committee, including controlling the finances of work units under the President Director's Directorate.
9. Menetapkan bagan, struktur dan komposisi organisasi yang efektif, efisien dalam pengambilan keputusan guna menunjang operasional Perusahaan, dan perubahan-perubahannya, setelah melakukan pembahasan bersama direksi lainnya, dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Establishing an effective and efficient organizational chart, structure, and composition for decision-making to support the Company's operations and any necessary changes, after discussions with other directors and obtaining approval from the Board of Commissioners.
10. Mengarahkan kebijakan pengelolaan limbah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.
Directing policies on production waste management and environmental management around the plant to create an environment that is at least free from company waste and to maintain a harmonious relationship with the surrounding community.
11. Bersama-sama dengan anggota direksi lainnya menetapkan strategi dan ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai pensiun dan jaminan hari tua.
Together with other members of the Board of Directors, establish strategies and regulations regarding the development and management of human resources, including provisions on retirement and pension benefits.
12. Menetapkan besaran penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat lingkungan setelah mendapat laporan analisis keuangan yang wajar untuk penyisihan laba tersebut dari Direktur Keuangan dan Umum.
Determine the allocation of net profit for the development of small businesses/cooperatives and community development after receiving a reasonable financial analysis report on the profit allocation from the Director of Finance and General Affairs.
13. Mengawasi pengelolaan keuangan yayasan-yayasan dan anak-anak Perusahaan di bawah yayasan-yayasan, agar tercipta pengelolaan keuangan yang sehat, termasuk terhadap Dana Pensiun Karyawan agar tercapai kecukupan dana yang berkelanjutan bagi program pensiun hari tua karyawan.
Establish the allocation of net profit for small business/cooperative development and community development after obtaining a reasonable financial analysis report on the allocation from the Director of Finance and General Affairs.
14. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain, mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili Perusahaan di Perusahaan kerja sama atau patungan, mendelegasikan wewenang direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan.
Represent the Company both in and outside the court, act on behalf of the Company in binding agreements with other parties, regulate the delegation of the Board of Directors' authority to represent the Company in joint ventures or partnerships, and delegate the Board of Directors' authority to employees or other parties to perform legal actions on behalf of the Company.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members
<p>Filius Yuliandi Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director</p>       	<p>Direktur Operasi dan Produksi adalah pembantu utama Direktur Utama dalam bidang operasi & produksi dalam batas wewenang yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Agar tujuan jabatan tersebut dapat tercapai, Direktur Produksi bertanggung jawab atas pengelolaan Direktorat Operasi dan Produksi yang meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <p>Commissioners, General Meeting of Shareholders, and the Company's Articles of Association. In order to achieve the objectives of this position, the Director of Production is responsible for managing the Directorate of Operations and Production, which includes the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang operasi & produksi, yaitu mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk urea, dan pembuatan bahan kimia lainnya atau produk lain di bidang petrokimia, termasuk penyimpanan, pengemasan (pengantongan), dan pengeluaran produk dari pusat produksi sebelum dipasarkan. Leading the management of the Company in accordance with its objectives, purposes, and activities in the field of operations & production, which includes processing certain raw materials into essential materials required for the production of urea fertilizer and other chemicals or products in the petrochemical sector, including storage, packaging (bagging), and the release of products from the production center before being marketed. 2. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang operasi & produksi dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran produksi, baik dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang menyangkut bahan baku, proses, produk, pemeliharaan pabrik, dan risiko-risiko teknis yang mungkin terjadi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen, agar tercapai produksi yang berkelanjutan dengan efisiensi yang tinggi. Develop and establish the Company's strategic planning in the field of operations & production, as well as maneuvers or actions to achieve production targets, both in the attainment of long-term and short-term goals related to raw materials, processes, products, plant maintenance, and potential technical risks. This is done through the development of creativity, innovation, and management system improvements to ensure sustainable production with high efficiency. 3. Menyebarkan kebijakan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama di bidang operasi & produksi untuk pencapaian sasaran Perusahaan pada bidang hasil pokok yang ditentukan, dan menjadikan kebijakan tersebut menjadi nilai-nilai operasional. Disseminate the Company's policies across various key production areas, particularly in operations & production, to achieve the Company's targeted key output goals and ensure that these policies are translated into operational values. 4. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang operasi & produksi dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang operasi & produksi tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Operasi & Produksi. Establish a long-term plan design as the Company's strategic plan in the field of operations & production for a five-year period, formulate an annual work plan for operations & production, and direct the strategic plan across all elements of the Operations & Production Directorate. 5. Memimpin proses perubahan di bidang operasi & produksi, memberikan visi dan arahan-arahan selaras dengan perubahan-perbaikan yang diinginkan, memberikan sumber daya yang dibutuhkan, dan mendorong karyawannya ke arah perubahan yang positif. Lead the change process in the field of operations & production, provide vision and guidance aligned with the desired improvements, allocate necessary resources, and encourage employees toward positive change. 6. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menyebarkan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh jajaran Direktorat Operasi & Produksi mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan, dan pembinaan dan pengembangan bertanggung manusia. Create a positive, cooperative, and high-spirited work environment to achieve the Company's mission and objectives by disseminating the Company's vision, business ethics, and providing motivation and direction based on a shared vision to all levels of the Operations & Production Directorate regarding the Company's path, as well as fostering and developing human resources. 7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Perusahaan di lingkungan Direktorat Operasi & Produksi sebagai suatu strategi menjaga mutu produk melalui pengendalian kualitas bahan baku dan bahan-bahan penunjang, material dan perawatan peralatan, proses, produk, jaminan kualitas, pabrik dan penunjang pabrik, dan aset-aset lain di bawah, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Operasi & Produksi dan mengarahkan tindak lanjut dari hasil audit, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (benchmark) proses bisnis atau proses manajemen. Direct the Company's Internal Control System within the Operations & Production Directorate as a strategy to maintain product quality through the control of raw materials and supporting materials, equipment maintenance, processes, products, quality assurance, plants and supporting facilities, and other assets under its management. This includes controlling the financial aspects of work units under the Operations & Production Directorate and overseeing follow-up actions on audit findings, including establishing benchmarks for business processes or management processes. 8. Mengarahkan kebijakan penyaluran gas alam dan atau bahan baku lainnya sesuai dengan jumlah kebutuhan produksi ke pusat produksi. Direct the policy on the distribution of natural gas and/or other raw materials to the production center in accordance with production requirements.

**Nama dan
Jabatan**
Name and
Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members

9. Menentukan kebijakan Perusahaan mengenai pengelolaan limbah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan.
Determine the Company's policy on production waste management and environmental management around the plant to create an environment that is minimally free from Company waste.
10. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dalam bidang tertentu dan sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan/atau Pemegang Saham.
Represent the Company in and out of court, and represent the Company in binding agreements with other parties in specific fields and up to a certain amount as determined by the President Director and/or Shareholders.
11. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang jasa teknik dan perekayasaan teknik, baik untuk penunjang produksi Perusahaan sendiri maupun untuk pihak luar, yaitu pemeliharaan overhaul pabrik (*breakdown maintenance*), perbaikan dan pabrikasi peralatan pabrik, kapal, pengantongan, gudang dan pekerjaan sipil, melalui kegiatan-kegiatan perekayasaan, pengadaan barang teknik, dan manajemen konstruksi.
Lead the management of the Company in accordance with its objectives, goals, and activities in the field of technical services and engineering, both to support the Company's own production and for external parties. This includes plant overhaul maintenance (*breakdown maintenance*), repair and fabrication of plant equipment, ships, bagging facilities, warehouses, and civil works through engineering activities, procurement of technical goods, and construction management.
12. Mengarahkan kebijakan penyaluran gas alam dan atau bahan baku lainnya sesuai dengan jumlah kebutuhan produksi ke pusat produksi.
Direct policies on the distribution of natural gas and/or other raw materials to the production center in accordance with production requirements.
13. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang jasa teknik dan perekayasaan teknik, baik untuk penunjang produksi Perusahaan sendiri maupun untuk pihak luar, yaitu pemeliharaan overhaul pabrik (*breakdown maintenance*), perbaikan dan pabrikasi peralatan pabrik, kapal, pengantongan, gudang dan pekerjaan sipil, melalui kegiatan-kegiatan perekayasaan, pengadaan barang teknik, dan manajemen konstruksi.
Lead the management of the Company in accordance with its purpose, objectives, and activities in the field of technical services and engineering, both to support the Company's own production and for external parties. This includes plant overhaul maintenance (*breakdown maintenance*), repair and fabrication of plant equipment, ships, bagging facilities, warehouses, and civil works through engineering activities, procurement of technical goods, and construction management.
14. Menentukan kebijakan Perusahaan mengenai pengelolaan limbah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan.
Determine the Company's policy on production waste management and environmental management around the plant to create an environment that is minimally free from the Company's waste.
15. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dalam bidang tertentu dan sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan/atau Pemegang Saham.
Represent the Company in and out of court, act on behalf of the Company in binding agreements with other parties in specific fields and up to a certain amount as determined by the President Director and/or Shareholders.
16. Perusahaan bidang jasa teknik dan perekayasaan teknik dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran jasa teknik, baik dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang menyangkut perekayasaan teknik, pengadaan dan logistik barang teknik, konstruksi, dan risiko-risiko teknis yang mungkin terjadi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen di Direktorat Operasi & Produksi, agar tercapai keuntungan optimal dan pelayanan memuaskan dalam jasa teknik.
Establish technical engineering service strategies and maneuvers or actions to achieve technical service targets, both in the long term and short term, covering technical engineering, procurement and logistics of technical goods, construction, and potential technical risks. This is done through the development of creativity and innovation as well as the improvement of management systems within the Directorate of Operations & Production to achieve optimal profits and satisfactory service in technical services.
17. Mengarahkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan dan pengembangan usaha Perusahaan di masa mendatang, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, dan mengarahkan rencana strategis dan pengembangan usaha Perusahaan tersebut ke seluruh unsur Perusahaan.
Direct the long-term plan design, which serves as the Company's strategic plan and future business development, both in the long term and short term, and guide the implementation of the strategic plan and business development across all elements of the Company.

**Nama dan
Jabatan**
Name and
Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members

- 
18. Menyebarluaskan kebijakan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama pada bidang perekayasaan teknik, pengadaan barang teknik, konstruksi, dan pengembangan untuk pencapaian sasaran Perusahaan pada bidang hasil pokok yang ditentukan, dan menjadikan kebijakan tersebut menjadi nilai-nilai operasional.
Disseminate the Company's policies in various core areas, especially in engineering design, procurement of technical goods, construction, and development, to achieve the Company's objectives in the specified core areas, and integrate these policies into operational values.
- 
19. Memimpin proses perubahan di bidang perekayasaan teknik, pengadaan dan logistik, dan konstruksi teknik, memberikan visi dan arahan-arahan selaras dengan perubahan-perbaikan yang diinginkan, memberikan sumberdaya yang dibutuhkan, dan mendorong karyawannya ke arah perubahan yang positif.
Lead the transformation process in engineering design, procurement and logistics, and technical construction, providing vision and guidance in line with desired improvements, providing the necessary resources, and encouraging employees towards positive change.
- 
20. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menyebarluaskan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh jajaran Direktorat Operasi & Produksi mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan, dan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Direktorat Operasi & Produksi.
Create a pleasant, cooperative work environment with high enthusiasm to achieve the Company's mission and objectives, by disseminating the Company's vision, business ethics, and providing encouragement and direction based on the same vision to all members of the Operations & Production Directorate regarding the path the Company will take, as well as the development and empowerment of human resources within the Operations & Production Directorate.
- 
21. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di lingkungan Direktorat Operasi & Produksi sebagai suatu strategi menjaga mutu pelayanan teknik di bidang perekayasaan, pengadaan barang teknik dan konstruksi, teknologi informasi, dan di bidang pemeliharaan pabrik, serta memelihara keandalan peralatan dan aset-aset lain dibawah Direktorat Operasi & Produksi, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Operasi & Produksi, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (benchmark) proses bisnis atau proses manajemen.
Direct the Company's Internal Control System within the Operations & Production Directorate as a strategy to maintain the quality of technical services in engineering, procurement of technical goods, construction, information technology, and plant maintenance, as well as to ensure the reliability of equipment and other assets under the Operations & Production Directorate, including controlling the finances of the work units under the Operations & Production Directorate, among other things, through the establishment of business process or management process benchmarks.
- 
22. Mengarahkan sistem pengendalian mutu secara terpadu meliputi pengawasan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lainnya dan pengawasan realisasi rencana kerja guna peningkatan performance Perusahaan.
Direct the integrated quality control system, including the supervision of the quality management system and other management systems, as well as monitoring the implementation of the work plan to improve the Company's performance.
- 
23. Mengarahkan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengelola limbah produksi, dan mengelola lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan.
Direct the use of appropriate technology to manage production waste and environmental management around the factory to create an environment that is at least free from the Company's waste.
- 
24. Menetapkan kebijakan pengadaan gas alam dan atau bahan baku lainnya, dan melakukan usaha pengadaan gas alam langsung dari sumber utama (pemerintah, BP Migas, PT Pertamina) sesuai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
Establish policies for the procurement of natural gas and/or other raw materials, and undertake efforts to procure natural gas directly from primary sources (government, BP Migas, PT Pertamina) according to short-term and long-term needs.
25. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dalam bidang tertentu dan sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan atau Pemegang Saham.
Develop and establish strategic planning. Represent the Company in and out of court, and represent the Company in binding agreements with third parties in specific fields and up to a certain amount as determined by the President Director and/or Shareholders.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members
<p>Saifullah Lasindrang Direktur Keuangan dan Umum Finance and General Affairs Director</p>	<p>Direktur Keuangan dan Umum adalah pembantu utama Direktur Utama dalam bidang Keuangan & Umum dalam batas wewenang yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Agar tujuan jabatan tersebut dapat tercapai, Direktur Keuangan dan Umum bertanggungjawab atas pengelolaan Direktorat Keuangan & Umum yang meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <p>The Director of Finance and General Affairs is the main assistant to the President Director in the fields of Finance & General Affairs within the authority granted by the President Director, the Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders, and the Company's Articles of Association. To achieve the objectives of this position, the Director of Finance and General Affairs is responsible for managing the Finance & General Director, which includes the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang keuangan & umum, yaitu mendistribusikan dan memperdagangkan produk-produk Perusahaan (utama dan sampingan) baik produk yang diperdagangkan secara bebas maupun produk pupuk bersubsidi untuk pertanian sampai pada daerah lini pemasaran yang ditetapkan pemerintah, termasuk penyediaan sarana seperti kapal angkut, pengantongan di daerah pemasaran, angkutan perkapalan dan ekspedisi lainnya, dan pergudangan.</p> <p>Lead the management of the Company in accordance with the purpose, objectives, and activities of the Company in the fields of finance & general affairs, which includes distributing and trading the Company's products (main and by-products), both freely traded products and subsidized fertilizers for agriculture, up to the marketing areas designated by the government. This also includes providing facilities such as transport ships, packaging in marketing areas, shipping transportation, and other expeditions, as well as warehousing.</p> <p>2. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang distribusi dan pemasaran dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran distribusi dan pemasaran, baik dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang menyangkut pengadaan dan persediaan barang, perkapalan dan angkutan lainnya, pergudangan, penjualan, dan ekspor, dan risiko-risiko teknis yang mungkin terjadi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen di Direktorat Keuangan & Umum agar tercapai keuntungan yang optimal.</p> <p>Develop and establish the Company's strategic planning in the distribution and marketing fields, as well as maneuvers or steps to meet the distribution and marketing targets, both for long-term and short-term objectives. This includes procurement and inventory of goods, shipping and other transportation, warehousing, sales, exports, and potential technical risks, through the development of creativity, innovation, and management system improvements in the Finance & General Director, in order to achieve optimal profit.</p> <p>3. Menyebarkan kebijakan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama pada bidang distribusi dan pemasaran untuk pencapaian sasaran Perusahaan pada bidang hasil pokok yang ditentukan, dan menjadikan kebijakan tersebut menjadi nilai-nilai operasional.</p> <p>Disseminate the Company's policies in various core areas, especially in distribution and marketing, to achieve the Company's objectives in the designated core areas, and integrate these policies into operational values.</p> <p>4. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang keuangan & umum dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang keuangan & umum tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Keuangan & Umum.</p> <p>Establish the long-term plan, which serves as the Company's strategic plan in the financial & general affairs sector for a five-year period, and establish the annual work plan for the financial & general affairs sector, while directing the strategic plan throughout the entire organization of the Directorate of Finance & General Affairs.</p> <p>5. Memimpin proses perubahan di bidang keuangan & umum, memberikan visi dan arahan-arahan selaras dengan perubahan-perbaikan yang diinginkan, memberikan sumber daya yang dibutuhkan, dan mendorong karyawannya ke arah perubahan yang positif</p> <p>Lead the process of change in the financial & general affairs sector, providing vision and guidance in line with the desired improvements, providing the necessary resources, and encouraging employees towards positive change.</p> <p>6. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menyebarkan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh jajaran Direktorat Keuangan & Umum mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan, dan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum.</p> <p>Create a pleasant, cooperative work environment with high enthusiasm for achieving the Company's mission and goals, by disseminating the Company's vision, business ethics, and providing encouragement and guidance based on the shared vision to all levels of the Directorate of Finance & General Affairs regarding the path the Company will take, as well as fostering and developing human resources within the Directorate of Finance & General Affairs.</p>

**Nama dan
Jabatan**
 Name and
Position








Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
 Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members

7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum untuk memaksimalkan proses pengadaan, distribusi, pemasaran dan penjualan, pemeliharaan mutu produk, untuk menetapkan strategi pemeliharaan sarana distribusi seperti unit pengantongan pupuk, gudang, kantor-kantor pemasaran, dan untuk pengendalian keuangan (penerimaan dan biaya) unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Keuangan & Umum, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (*benchmark*) proses bisnis atau proses manajemen.
 Direct the Company's Internal Control System within the Directorate of Finance & General Affairs to optimize procurement, distribution, marketing and sales processes, product quality maintenance, and to establish strategies for maintaining distribution facilities such as fertilizer bagging units, warehouses, marketing offices, and financial control (revenues and costs) of work units under the Directorate of Finance & General Affairs, including through the establishment of business process or management process benchmarks.
8. Mengarahkan dan mendorong pengembangan pemasaran dan penjualan diantara peluang-peluang pemasaran yang ada, diversifikasi usaha pemasaran, dan mengarahkan pengembangan hubungan di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, baik pada produsen lain, distributor, pengecer, pembeli, pemerintah, dan lainnya.
 Direct and encourage the development of marketing and sales among available marketing opportunities, business diversification in marketing, and guide the development of relationships with stakeholders to achieve high customer satisfaction levels, including with other producers, distributors, retailers, buyers, government, and others.
9. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dalam bidang tertentu dan sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan atau Pemegang Saham.
 Represent the Company both in and out of court, and represent the Company in binding agreements with third parties in specific areas and up to a certain amount as determined by the President Director and/or Shareholders.
10. Memimpin pengurusan Perusahaan untuk menunjang maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan dibidang sumber daya manusia dan masalah-masalah umum, yaitu penyediaan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, sistem remunerasi, keamanan, hubungan ketenagakerjaan seperti penyelesaian perselisihan, organisasi dan kelengkapannya, pelayanan umum untuk kelancaran operasional Perusahaan, masalah lingkungan masyarakat sekitar, dan pembinaan industri kecil.
 Lead the management of the Company to support the aims, objectives, and activities of the Company in the fields of human resources and general affairs, including labor supply, workforce training and development, remuneration systems, security, labor relations such as dispute resolution, organizational structure and its components, general services to ensure the smooth operation of the Company, issues concerning the surrounding community, and the development of small industries.
11. Menyebarkan kebijakan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama pada bidang sumberdaya manusia, pelayanan umum, bidang pembinaan industri kecil, dan bidang pembinaan lingkungan untuk pencapaian sasaran Perusahaan pada bidang hasil pokok yang ditentukan, dan menjadikan kebijakan tersebut menjadi nilai-nilai operasional.
 Disseminate the Company's policies in various key areas, particularly in human resources, general services, small industry development, and environmental management, to achieve the Company's objectives in the specified key areas, and integrate these policies into operational values.
12. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang pengembangan sumberdaya manusia, administrasi tenaga kerja, hubungan industrial di dalam dan di luar Perusahaan, keamanan dan ketertiban (sekuriti), aset Perusahaan (kecuali aset pabrik dan produksi) pelayanan umum, pembinaan lingkungan sekitar, dan pembinaan industri kecil sekitar; dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran bidang-bidang tersebut baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen di Direktorat Keuangan & Umum.
 Develop and establish the Company's strategic plan in the areas of human resources development, labor administration, industrial relations both within and outside the Company, security and order (security), Company assets (excluding factory and production assets), general services, community environmental management, and development of local small industries; and implement maneuvers or actions to achieve the objectives in these areas, both in the short and long term, through the development of creativity and innovation and management system improvements within the Directorate of Finance & General Affairs.
13. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang sumberdaya manusia dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang sumberdaya manusia tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Keuangan & Umum.
 Establish the draft of the long-term plan, which is the Company's strategic plan in the field of human resources for a five-year period, and establish the draft of the annual human resources work plan, directing the strategic plan to all elements of the organization within the Directorate of Finance & General Affairs.
14. Memimpin proses perubahan di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum, memberikan visi dan arahan-arahan selaras dengan perubahan-perbaikan yang diinginkan, memberikan sumberdaya yang dibutuhkan, dan mendorong karyawannya ke arah perubahan yang positif.
 Lead the change process within the Directorate of Finance & General Affairs, providing vision and direction in line with the desired improvements, providing the necessary resources, and encouraging employees toward positive change.

**Nama dan
Jabatan**
Name and
Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members

15. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menyebarluaskan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh jajaran Direktorat Keuangan & Umum mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan, dan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum.
Create a pleasant, cooperative work environment with high morale to achieve the Company's mission and objectives, by disseminating the Company's vision, business ethics, and providing encouragement and direction based on the same vision to all levels of the Directorate of Finance & General Affairs regarding the path the Company will take, as well as fostering and developing human resources within the Directorate of Finance & General Affairs.
16. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum sebagai suatu strategi meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia, menjaga mutu pelayanan umum, pemeliharaan keamanan, dan pemeliharaan aset-aset di bawah pembinaan Direktorat Keuangan & Umum, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Keuangan & Umum, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (benchmark) proses bisnis atau proses manajemen.
Direct the Company's Internal Control System within the Directorate of Finance & General Affairs as a strategy to enhance the development and welfare of human resources, maintain the quality of general services, ensure security, and preserve assets under the supervision of the Directorate of Finance & General Affairs, including controlling the finances of work units within the Directorate of Finance & General Affairs, among others, through the establishment of benchmarks for business processes or management processes.
17. Mengkoordinasikan pembahasan organisasi diantara anggota Direksi pada setiap perubahan bagan, struktur dan komposisi organisasi Perusahaan agar terjadi peningkatan efisiensi usaha pada setiap bidang hasil pokok Perusahaan dan atau direktorat, sebelum pembahasan terakhir dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Coordinate the discussion of the organization among the members of the Board of Directors regarding any changes to the organizational chart, structure, and composition of the Company, to ensure improved operational efficiency in each of the Company's core areas and/or directorates, prior to the final discussion with the President Director and the Board of Commissioners.
18. Mengarahkan kebijakan pengelolaan yayasan-yayasan dan anak-anak Perusahaan di bawah yayasan-yayasan agar yayasan-yayasan dan anak-anak Perusahaannya mampu menetapkan perencanaan dan sasaran strategis perusahaan masing-masing Perusahaan sehingga tercapai keuntungan optimal dengan penggunaan sumberdaya yang efisien. Mengarahkan kebijakan pengelolaan Dana Pensiun Karyawan agar tercapai kecukupan dana yang berkelanjutan bagi program pensiun hari tua karyawan.
Direct the management policy of foundations and subsidiaries under the foundations so that the foundations and their subsidiaries are able to establish planning and strategic goals for each company's operations, thereby achieving optimal profits with the efficient use of resources. Direct the management policy of the Employee Pension Fund to ensure sustainable fund adequacy for the employees' retirement pension program.
19. Mengarahkan besaran penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat lingkungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan keuangan Perusahaan mendatang dan kebutuhan pembinaan masyarakat lingkungan.
Direct the amount of net profit allocation for the development of small businesses/cooperatives and community development, considering the company's future financial needs and the needs for community development.
20. Mengarahkan kebijakan Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat lingkungan, dan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program kemitraan dengan usaha kecil, mikro dan koperasi.
Direct the company's policy to create harmonious relationships with the surrounding community and develop the local economy through partnership programs with small businesses, microenterprises, and cooperatives.
21. Menetapkan kebijakan Perusahaan dalam pembinaan masyarakat sekitar baik sebagai suatu program pembinaan dan pembangunan lingkungan masyarakat sekitar (community development) maupun sebagai akibat dari pengelolaan limbah industri yang menimpa masyarakat.
Establish the company's policy in community development, both as a program for the development and improvement of the surrounding community (community development) and as a result of the management of industrial waste impacting the community.
22. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dalam bidang tertentu dan sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan atau Pemegang Saham.
Represent the Company in and out of court, and represent the Company in binding the Company with other parties in specific fields and up to a certain amount as determined by the President Director and/or Shareholders.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors Members
 <p>Saifullah Lasindrang Plt. Direktur Manajemen Risiko Act. Director of Risk Management</p>      	<p>Direktur Manajemen Risiko adalah pembantu utama Direktur Utama dalam bidang Manajemen Risiko dalam batas wewenang yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Anggaran Dasar Perusahaan. The Risk Management Director serves as the primary assistant to the President Director in Risk Management, within the scope of authority granted by the President Director, the Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders, and the Company's Articles of Association.</p> <p>Agar tujuan jabatan tersebut dapat tercapai, Direktur Manajemen Risiko bertanggungjawab atas pengelolaan Direktorat Manajemen Risiko yang meliputi kegiatan sebagai berikut: To achieve the objectives of this role, the Director of Risk Management is responsible for managing the Directorate of Risk Management, which includes the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang Manajemen Risiko Leading the management of the Company in accordance with its vision, mission, and activities in the field of Risk Management. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis perusahaan dan mendukung kegiatan pemasaran sesuai yang diatur oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Developing and establishing the company's strategic planning and supporting marketing activities as regulated by PT Pupuk Indonesia (Persero). Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis perusahaan di bidang Manajemen Risiko dalam kurun waktu lima tahun dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang Manajemen Risiko tahunan dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Manajemen Risiko. Formulating the long-term strategic plan, which serves as the company's risk management strategy for a five-year period, and establishing the annual risk management work plan, while directing the strategic plan across all components of the Directorate of Risk Management. Mengarahkan sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Manajemen Risiko untuk memaksimalkan proses bisnis Perusahaan. Directing the internal control system within the Directorate of Risk Management to optimize the Company's business processes. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan utama/core Perusahaan di bidang Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, dengan menetapkan kebijakan/peraturan perusahaan sesuai lingkup kewenangan selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Directing, coordinating, controlling, and being accountable for the Company's core activities in the areas of Corporate Governance and Risk Management, by setting policies/regulations within the scope of authority aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan internal perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, controlling, and being accountable for the implementation of company activities in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association internal company regulations, and prevailing laws and regulations. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian anggaran perusahaan. Directing, coordinating, controlling, and being accountable for the preparation and control of the company's budget. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pengelolaan risiko secara efektif. Directing, coordinating, controlling, and being accountable for the effective management of risks.

TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Pasal 11 Ayat (8), beberapa tindakan Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dinyatakan sebagai berikut. "Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris", mencakup:

- Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
- Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, nilai kerjasama < Rp5 Miliar dengan jangka waktu >3-5 tahun dan nilai kerjasama Rp5-15 Miliar dengan jangka waktu 0-5 tahun.
- Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.
- Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun.
- Menetapkan struktur organisasi 1 (tingkat) di bawah Direksi.

Pada tahun 2024, tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris adalah Permohonan persetujuan menerima pinjaman jangka menengah/panjang.

Tindakan Direksi yang Memerlukan Rekomendasi Atau Tanggapan Dewan Komisaris Dan Persetujuan Pemegang Saham

Mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Pasal 11 Ayat (10), beberapa tindakan Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan Pemegang Saham, dinyatakan sebagai berikut. "Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham", mencakup :

1. Menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya.
2. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
3. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan perseroan lain
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
5. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
7. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist),
8. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan

ACTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS REQUIRING APPROVAL AND RECOMMENDATION FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

ACTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Article 11 Paragraph (8), several actions of the Board of Directors must first obtain approval from the Board of Commissioners, as stated below: "The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners," including:

- Pledging fixed assets for short-term credit withdrawal.
- Entering into cooperation with business entities or other parties, with a cooperation value of <Rp5 billion for a period of >3-5 years, and a cooperation value of Rp5-15 billion for a period of 0-5 years.
- Accepting or granting medium/long-term loans.
- Writing off bad debts and obsolete inventory from the books.
- Releasing movable fixed assets with an economic life typically applicable in the industry, up to five years.
- Determining the organizational structure 1 (level) below the Board of Directors.

In 2024, the action taken by the Board of Directors that required approval from the Board of Commissioners was the request for approval to obtain medium/long-term loans.

Actions of the Board of Directors Requiring Recommendations or Responses from the Board of Commissioners and Shareholder Approval

Referring to the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Article 11, Paragraph (10), several actions of the Board of Directors, after obtaining written responses from the Board of Commissioners and approval from the Shareholders' General Meeting, are stated as follows: "The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining written responses from the Board of Commissioners and approval from the Shareholders' General Meeting," which include:

1. Issuing bonds and other debt securities.
2. Pledging fixed assets for obtaining medium/long-term credit.
3. Making equity investments in other corporations.
4. Establishing subsidiaries and/or joint ventures.
5. Divesting investments in subsidiaries and/or joint ventures.
6. Merging, consolidating, acquiring, demerging, or dissolving subsidiaries and/or joint ventures.
7. Binding the corporation as a guarantor (surety or avalist).
8. Entering into partnerships with businesses or other parties in the form of licensing agreements, management contracts,

aset, kerjasama operasional (KSO), bangun serah guna (*Build Transfer Operate/BTO*), bangun milik serah (*Build Own Transfer (BowT)*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan nilai kerjasama \geq Rp5 Miliar dengan jangka waktu > 5 tahun dan nilai kerjasama > Rp15 Miliar dengan jangka waktu > 5 tahun.



9. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
10. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.
12. Menetapkan dan merubah logo Perseroan.
13. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) yang belum ditetapkan dalam RKAP.
14. Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang dapat berdampak pada Perseroan.
15. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.
16. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.



Sepanjang tahun 2024, tindakan Direksi yang membutuhkan tanggapan Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham sebagai berikut:



1. Persetujuan hapus tagihan piutang macet atas nama Ir. Dedi Hidayat.
2. Permohonan persetujuan Pemegang Saham atas perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapensri dan perubahan Roadmap Penyehatan Dapensri.
3. Persetujuan atas kerjasama sewa 17 PPD milik Pusri oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)



PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi merupakan rapat yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya secara berkala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan dapat dilakukan sewaktu waktu sesuai Anggaran Dasar Perusahaan untuk mendiskusikan pembahasan strategis dan menetapkan kebijakan-kebijakan Perusahaan. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris secara berkala guna membahas kinerja Perusahaan atau permasalahan terkait lainnya.

Kebijakan Rapat Direksi

Board Manual dan Prosedur Tata Tertib Rapat Direksi No.PSP-STK-PR-015 menegaskan bahwa rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Rapat juga dapat diselenggarakan apabila terdapat permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

asset leasing, operational cooperation (KSO), Build Transfer Operate (BTO), Build Own Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) agreements with partnership values \geq Rp5 billion and a term > 5 years, or partnership values > Rp15 billion with a term > 5 years. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

9. Not collecting bad debts that have been written off.
10. Releasing and eliminating the corporation's fixed assets, except for movable fixed assets with a useful life commonly applicable in the industry, up to 5 (five) years.
11. Establishing the corporation's organizational blueprint.
12. Establishing and changing the corporation's logo.
13. Taking other actions and actions as referred to in Article 11, Paragraph (8) that have not been specified in the RKAP.
14. Establishing foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the corporation, that may impact the corporation.
15. Charging the corporation with fixed and routine expenses for foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the corporation.
16. Proposing representatives of the corporation to be candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures that provide significant contributions to the corporation and/or have strategic value as determined by the GMS.

Throughout 2024, the actions taken by the Board of Directors that required responses from the Board of Commissioners and approval from the Shareholders were as follows:

1. Approval to write off non-performing receivables under the name of Ir. Dedi Hidayat.
2. Request for Shareholders' approval on the amendments to the Pension Fund Regulations (PDP) of Dapensri and the revision of the Dapensri Recovery Roadmap.
3. Approval of the lease agreement for 17 PPD units owned by Pusri to PT Pupuk Indonesia (Persero).

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

The Board of Directors' meetings are held periodically, at least once a month, and may be held at any time as per the Company's Articles of Association, to discuss strategic matters and establish company policies. In addition, the Board of Directors also conducts coordination meetings with the Board of Commissioners on a regular basis to discuss the company's performance or other related issues.

Board of Directors Meeting Policy

The Board Manual and Procedure Board of Directors' Meeting Rules No.PSP-STK-PR-015 stipulate that Board of Directors' meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors. A meeting can also be convened if requested in writing by one or more members of the Board of Commissioners or by one or more Shareholders who together represent at least one-tenth (1/10) or more of the total

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selain itu rapat Direksi juga dapat dilakukan apabila terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum pula pada Prosedur Tata Tertib Rapat Direksi No.PSP-STK-PR-015, panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Rapat dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota Direksi. Lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran, mekanisme pengambilan keputusan Direksi, dan lain- lain diatur di dalam Board Manual dan Tata Tertib Rapat Direksi No PSP-STK-PR-015..

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Direksi menggelar rapat sepanjang tahun 2024 sebanyak 64 kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absence	Kehadiran (%) Attendance (%)
Daconi Khotob	Direktur Utama President Director	64	61	3	95,31
Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum Finance and General Affairs Director	64	60	4	93,75
Filius Yuliandi	Direktur Operasi & Produk Operation & Production Director	64	59	5	92,19
Saifullah Lasindrang	Plt. Direktur Manajemen Risiko Acting Director of Risk Management	37	37	0	100
Rata-Rata Average	95.31				

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

PUSRI memiliki kebijakan untuk terus memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh sumber daya manusianya, termasuk Direksi. Program pengembangan dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankan di antaranya ialah diklat dalam dan luar negeri dalam bentuk short course, seminar, workshop, konferensi, dan sertifikasi. Selain itu, apabila dipandang perlu juga dilakukan studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan industri pupuk dunia.

Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi diikuti Direksi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab "Profil Perusahaan" dalam laporan tahunan ini.

voting shares. Additionally, a meeting can be held if there is a change in the business environment or issues that significantly impact the company's operations and performance.

Referring to the Company's Articles of Association, which are also outlined in the Board of Directors' Meeting Rules No.PSP-STK-PR-015, the call for a Board of Directors' meeting must be made in writing by a member of the Board of Directors authorized to represent the Company, and must be communicated no later than three (3) days before the meeting or within a shorter period if the matter is urgent. A meeting is considered quorum if attended by more than 50% of the members of the Board of Directors. Further provisions regarding attendance, decision-making mechanisms, and other matters are governed by the Board Manual and the Board of Directors' Meeting Rules No PSP-STK-PR-015..

Frequency and Attendance of Meetings

The Board of Directors held meetings throughout the year 2024 a total of 64 times. The frequency and attendance rate of the Company's Board of Directors are as follows:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

PUSRI has a policy of continuously providing training and competency development for all its human resources, including the Board of Directors. The development program is intended as a way to enhance the knowledge and insights of the Board of Commissioners to improve their ability to perform their duties, functions, and responsibilities.

The activities carried out include domestic and international training, such as short courses, seminars, workshops, conferences, and certifications. Additionally, when deemed necessary, comparative studies abroad may also be conducted to understand global developments in the fertilizer industry.

The implementation of training and competency development attended by the Board of Directors throughout 2024 can be found in the "Company Profile" section of this annual report.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PUSRI memiliki kebijakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi terkini Perusahaan sehingga anggota Direksi yang baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Program pengenalan tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada Direksi yang baru, sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan. Karena tidak adanya pergantian Direksi pada tahun 2024 dan hanya perubahan nomenklatur Direksi pada tanggal 10 Juni 2024 serta Direktur Keuangan & Umum yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Risiko, PUSRI terakhir melaksanakan Program pengenalan perusahaan pada tanggal 14 November 2023 sehubungan dengan adanya pergantian Direktur Utama.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegial melalui KPI

Kinerja Direksi secara Kolegial dinilai serta dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Pemegang Saham. Penilaian dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria target pencapaian KPI yang telah disepakati, sebagai berikut.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD MEMBERS

PUSRI has a policy for an orientation program for new members of the Board of Directors, aimed at providing an understanding of the current state of the Company so that new Board members gain a comprehensive understanding of the Company, both organizationally and operationally. The orientation program includes:

1. The implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles by the Company
2. An overview of the Company related to its goals, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues
3. Information regarding delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited actions

The Corporate Secretary is responsible for providing materials to the newly appointed Board of Directors, in accordance with the Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The company's orientation program may include presentations, meetings, company visits, and document reviews or other programs deemed suitable by the company. Since there was no change in the Board of Directors in 2024, only a change in the nomenclature of the Board of Directors on June 10, 2024, and the Finance & General Director also serving as the Acting Director of Risk Management, PUSRI last conducted the company orientation program on November 14, 2023, due to the change in the position of President Director.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Collegial Performance Assessment of the Board of Directors through KPI

The collegial performance of the Board of Directors is assessed and evaluated by the Board of Commissioners. The results of the assessment and evaluation are reported to the Shareholders. The assessment and evaluation are conducted based on the agreed KPI target achievement criteria, as follows.

Tabel Kinerja KPI

Table of KPI Performance

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	AUDITED 2024		
				Realisasi Realization	Target	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	6	7	10 = (4 x 9) / 100
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA						
1	% ROIC to WACC	Persen Percent	7,00	1,08	0,01	7,70
2	# Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	5,00	1,43	3,50	5,50
3	% Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persen Percent	5,00	14,58	30,68	5,50
4	\$ Kontribusi Laba Bersih Anak Perusahaan dan Afiliasi \$ Contribution of Net Profit from Subsidiaries and Affiliates	Rp Miliar IDR Billion	4,00	(40,14)	11,99	0,00
5	% Laporan Keuangan Audited % Audited Financial Statements	Persen Percent	3,00	100,00	100,00	3,00
6	\$ Cashflow From Operation	Rp Miliar IDR Billion	5,00	3.350,51	1.516,40	5,50
7	# HSSE Score	Poin Point	5,00	99,00	100,00	4,95
8	# Penurunan Emisi Karbon # Carbon Emission Reduction	Ton CO2	3,00	20.956,86	8.614,00	3,30
9	% ESG Risk Rating	Persen Percent	3,00	110,00	100,00	3,30
10	# Luasan Lahan Agrosolution # Agrosolution Land Area	Hektar Hectare	5,00	102.085,00	77.000,00	5,50
11	% Plant Availability	Persen Percent	5,00	99,00	100,00	4,95
Subtotal Perspektif A Subtotal Perspective A			50,00			49,20
B. INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION						
12	% Diversifikasi Produk Baru % New Product Diversification	Persen Percent	3,00	87,67	100,00	2,63
13	% Implementasi Roadmap Perbaikan Manajemen Risiko % Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	Persen Percent	4,00	100,00	100,00	4,00
14	% SGA to Sales	Persen Percent	4,00	4,59	5,66	4,40
15	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Findings Recommendations	Persen Percent	4,00	100,00	100,00	4,00
16	% Pemenuhan Rencana Produksi % Fulfillment of Production Plan	Persen Percent	4,00	99,00	100,00	3,96
17	\$ COGM Urea	Rp per Ton IDR per Ton	4,00	4.027.654	3.798.428	3,77
18	\$ COGM NPK	Rp per Ton IDR per Ton	3,00	5.541.827	5.766.742	3,12

Tabel Kinerja KPI

Table of KPI Performance

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	AUDITED 2024		
				Realisasi Realization	Target	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	6	7	10 = (4 x 9) / 100
Subtotal Perspektif B Subtotal Perspective B			26,00			25,88
C. PENINGKATAN INVESTASI INCREASE IN INVESTMENT						
19	% EPCC Proyek Amurea Pusri IIIB % EPCC Progress of Amurea Pusri IIIB Project	Persen Percent	4,00	31,87	20,00	4,40
20	% Gap Realisasi Investasi Rutin terhadap Anggaran % Gap Between Actual Routine Investment and Budget	Persen Percent	3,00	0,03	10,00	3,30
21	% Gap Realisasi Investasi Pengembangan terhadap Anggaran % Gap Between Actual Development Investment and Budget	Persen Percent	4,00	-	20,00	4,40
Subtotal Perspektif C Subtotal Perspective C			11,00			12,10
D. PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT						
22	% Rasio Top Talent Muda dalam Nominated Talent % Ratio of Young Top Talent within Nominated Talent	Persen Percent	3,00	16,30	15,00	3,26
23	% Rasio Perempuan dalam Nominated Talent % Ratio of Women within Nominated Talent	Persen Percent	3,00	16,30	15,00	3,26
24	% Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko % Ratio of Compliance with Risk Management Organ Qualifications	Persen Percent	3,00	100,00	100,00	3,00
25	% Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun % Implementation of Pension Fund Recovery Roadmap	Persen Percent	4,00	110,00	100,00	4,40
Subtotal Perspektif D Subtotal Perspective D			13,00			13,92
GRAND TOTAL			100,00			101,10

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDUAL
Pihak Yang Melakukan Penilaian

Kantor Akuntan Publik PwC, sama seperti Auditor LK Adapun hasil penilaian dan evaluasi KPI Direksi secara individual dilaksanakan berdasarkan kriteria target pencapaian KPI yang telah disepakati, sebagai berikut

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Assessing Party

The Public Accounting Firm PwC serves as the Financial Statement Auditor. The results of the individual KPI assessment and evaluation of the Board of Directors are conducted based on the agreed KPI target achievement criteria, as follows.

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Operasi dan Produksi

Table of Individu KPI Performance of Operations and Production Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
KPI Bersama Joint KPI	1	% ROIC to WACC	Persen Percent	10,00	Maximize	1,08	0,01	10.800,00	110,00	11,00
	2	\$ Cashflow From Operation	Rp Miliar IDR Billion	10,00	Maximize	3.350,51	1.516,00	221,01	110,00	11,00
	3	\$ COGM Urea	Rp per Ton IDR per Ton	8,00	Minimize	4.027.654	3.798.428	94,31	94,31	7,54
	4	\$ COGM NPK	Rp per Ton IDR per Ton	7,00	Minimize	5.541.827	5.766.742	104,06	104,06	7,28
	5	% Implementasi Roadmap Perbaikan Manajemen Risiko % Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	Persen Percent	5,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00
KPI Direktorat Directorate KPI	6	\$ Kontribusi Laba Bersih Anak Perusahaan dan Afiliasi \$ Contribution of Net Profit from Subsidiaries and Affiliates	Rp Miliar IDR Billion	2,00	Maximize	(40,14)	12,00	(334,50)	-	0,00
	7	# HSSE Score	Poin Point	2,00	Maximize	99,00	100,00	99,00	99,00	1,98
	8	# Penurunan Emisi Karbon # Carbon Emission Reduction	Ton CO2	5,00	Maximize	20.956,86	8.614,00	243,29	110,00	5,50
	9	% ESG Risk Rating	Persen Percent	2,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	2,20
	10	% Plant Availability	Persen Percent	5,00	Maximize	99,00	100,00	99,00	99,00	4,95
	11	% Diversifikasi Produk Baru % New Product Diversification	Persen Percent	2,00	Maximize	87,67	100,00	87,67	87,67	1,75
	12	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Findings Recommendations	Persen Percent	2,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00
	13	% Pemenuhan Rencana Produksi % Fulfillment of Production Plan	Persen Percent	4,00	Maximize	99,00	100,00	99,00	99,00	3,96
	14	% EPCC Proyek Amurea Pusri IIIB % EPCC Progress of Amurea Pusri IIIB Project	Persen Percent	5,00	Maximize	31,87	20,00	159,35	110,00	5,50

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Operasi dan Produksi

Table of Individu KPI Performance of Operations and Production Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	15	% Gap Realisasi Investasi Rutin terhadap Anggaran % Gap Between Actual Routine Investment and Budget	Persen Percent	4,00	Minimize	0,03	10,00	33.333,33	110,00	4,40
	16	% Gap Realisasi Investasi Pengembangan terhadap Anggaran % Gap Between Actual Development Investment and Budget	Persen Percent	5,00	Minimize	-	20,00	110,00	110,00	5,50
	17	# Rasio Konsumsi Energi Urea # Urea Energy Consumption Ratio	MMBTU per ton	2,00	Minimize	31,07	29,03	93,43	93,43	1,87
	18	# Inventory Turnover Ratio	Kali Times	4,00	Maximize	4,08	1,50	272,00	110,00	4,40
	19	\$ Sinergi Perusahaan PI Group \$ Synergy of PI Group Companies	Rp Miliar IDR Billion	5,00	Maximize	793,68	558,00	142,24	110,00	5,50
	20	% Perbaikan Indikator Kinerja Anak Perusahaan % Improvement of Subsidiaries' Performance Indicators	Persen Percent	3,00	Maximize	50,00	100,00	50,00	50,00	1,50
	21	% Dukungan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri % Support for the Restructuring of PT Rekayasa Industri	Persen Percent	4,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	4,40
	22	\$ Produktivitas Tenaga Kerja \$ Labor Productivity	Rp Juta per orang IDR Million per person	4,00	Maximize	1.244,60	1.331,00	93,51	93,51	3,74
Pencapaian						100,00			100,97	
Achievement										

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Keuangan dan Umum

Table of Individu KPI Performance of Finance and General Affairs Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
KPI Bersama Joint KPI	1	% ROIC to WACC	Persen Percent	10,00	Maximize	1,08	0,01	10.800,00	110,00	11,00

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Keuangan dan Umum

Table of Individu KPI Performance of Finance and General Affairs Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	2	\$ Cashflow From Operation	Rp Miliar IDR Billion	10,00	Maximize	3.350,51	1.516,00	221,01	110,00	11,00
	3	\$ COGM Urea	Rp per Ton IDR per Ton	8,00	Minimize	4.027.654	3.798.428	94,31	94,31	7,54
	4	\$ COGM NPK	Rp per Ton IDR per Ton	7,00	Minimize	5.541.827	5.766.742	104,06	104,06	7,28
	5	% Implementasi Roadmap Perbaikan Manajemen Risiko % Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	Persen Percent	5,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00
KPI Direktorat Directorate KPI	6	# Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	5,00	Minimize	1,43	3,50	244,76	110,00	5,50
	7	% Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persen Percent	5,00	Minimize	14,58	30,68	210,43	110,00	5,50
	8	% Laporan Keuangan Audited % Audited Financial Statements	Persen Percent	3,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	3,00
	9	# HSSE Score	Poin Point	2,00	Maximize	99,00	100,00	99,00	99,00	1,98
	10	# Luasan Lahan Agrosolution # Agrosolution Land Area	Hektar Hectare	5,00	Maximize	102.085,00	77.000,00	132,58	110,00	5,50
	11	% Diversifikasi Produk Baru % New Product Diversification	Persen Percent	2,00	Maximize	87,67	100,00	87,67	87,67	1,75
	12	% SGA to Sales	Persen Percent	4,00	Minimize	4,59	5,66	123,31	110,00	4,40
	13	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completions of Audit Findings Recommendations	Persen Percent	2,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00
	14	% Rasio Top Talent Muda dalam Nominated Talent % Ratio of Young Top Talent within Nominated Talent	Persen Percent	3,00	Maximize	16,30	15,00	108,67	108,67	3,26

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Keuangan dan Umum

Table of Individu KPI Performance of Finance and General Affairs Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	15	% Rasio Perempuan dalam Nominated Talent % Ratio of Women within Nominated Talent	Persen Percent	3,00	Maximize	16,30	15,00	108,67	108,67	3,26
	16	\$ Sinergi Perusahaan PI Group \$ Synergy of PI Group Companies	Rp Miliar IDR Billion	2,00	Maximize	793,68	558,00	142,24	110,00	2,20
	17	\$ Produktivitas Tenaga Kerja \$ Labor Productivity	Rp Juta per orang IDR Million per person	4,00	Maximize	1.244,60	1.331,00	93,51	93,51	3,74
	18	% Kolektibilitas Piutang Usaha % Collectibility of Accounts Receivable	Persen Percent	2,00	Maximize	62,53	30,00	208,43	110,00	2,20
	19	% Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha % Recovery of Allowance for Impairment of Accounts Receivable	Persen Percent	2,00	Maximize	3,05	15,00	20,33	20,33	0,41
	20	% Nilai Koreksi Audit Negatif terhadap Laba Tahun Berjalan % Value of Negative Audit Adjustments to Current Year Profit	Persen Percent	3,00	Minimize	0,29	3,00	1.034,48	110,00	3,30
	21	\$ EBITDA Uplift dari Inovasi \$ EBITDA Uplift from Innovation	Rp Miliar IDR Billion	2,00	Maximize	35,79	59,99	59,66	59,66	1,19
	22	% Implementasi Roadmap SDM % Implementation of HC Roadmap	Persen Percent	3,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	3,00
	23	% Tindak Lanjut Hasil Human Capital Maturity Assessment % Follow-up on Human Capital Maturity Assessment Results	Persen Percent	3,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	3,00
	24	% Pelaksanaan Program TJSL % Implementation of CSR Programs	Persen Percent	3,00	Maximize	102,50	100,00	102,50	102,50	3,08

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Keuangan dan Umum

Table of Individu KPI Performance of Finance and General Affairs Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	25	% Indeks Kepuasan Lingkungan % Environmental Satisfaction Index	Persen Percent	2,00	Maximize	92,10	92,00	100,11	100,11	2,00
Pencapaian Achievement						100,00			102,09	

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Manajemen Risiko

Table of Individu KPI Performance of Risk Management Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
KPI Bersama Joint KPI	1	% ROIC to WACC	Persen Percent	10,00	Maximize	1,08	0,01	10.800,00	110,00	11,00
	2	\$ Cashflow From Operation	Rp Miliar IDR Billion	10,00	Maximize	3.350,51	1.516,00	221,01	110,00	11,00
	3	\$ COGM Urea	Rp per Ton IDR per Ton	8,00	Minimize	4.027.654	3.798.428	94,31	94,31	7,54
	4	\$ COGM NPK	Rp per Ton IDR per Ton	7,00	Minimize	5.541.827	5.766.742	104,06	104,06	7,28
	5	% Implementasi Roadmap Perbaikan Manajemen Risiko % Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap	Persen Percent	5,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00
KPI Direktorat Directorate KPI	6	\$ Kontribusi Laba Bersih Anak Perusahaan dan Afiliasi \$ Net Profit Contribution from Subsidiaries and Affiliates	Rp Miliar IDR Billion	2,00	Maximize	(40,14)	12,00	(334,50)	-	0,00
	7	# HSSE Score	Poin Point	2,00	Maximize	99,00	100,00	99,00	99,00	1,98
	8	% ESG Risk Rating	Persen Percent	2,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	2,20
	9	% Diversifikasi Produk Baru % Diversification of New Products	Persen Percent	2,00	Maximize	87,67	100,00	87,67	87,67	1,75

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Manajemen Risiko
Table of Individu KPI Performance of Risk Management Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	10	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Resolution of Audit Findings Recommendations	Persen Percent	2,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00
	11	% Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko % Ratio of Compliance with Risk Management Organ Qualifications	Persen Percent	10,00	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
	12	% Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun % Implementation of the Pension Fund Recovery Roadmap	Persen Percent	4,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	4,40
	13	# Inventory Turnover Ratio	Kali Times	4,00	Maximize	4,08	1,50	272,00	110,00	4,40
	14	\$ Sinergi Perusahaan PI Group \$ Synergy Value of PI Group Companies	Rp Miliar IDR Billion	5,00	Maximize	793,68	558,00	142,24	110,00	5,50
	15	% Dukungan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri % Support for the Restructuring of PT Rekayasa Industri	Persen Percent	2,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	2,20
	16	\$ Produktivitas Tenaga Kerja \$ Labor Productivity	Rp Juta per orang IDR Million per person	2,00	Maximize	1.244,60	1.331,00	93,51	93,51	1,87
	17	% Kolektibilitas Piutang Usaha % Collectibility of Trade Receivables	Persen Percent	2,00	Maximize	62,53	30,00	208,43	110,00	2,20
	18	% Pelaksanaan Program TJSL % Implementation of CSR Programs	Persen Percent	4,00	Maximize	102,50	100,00	102,50	102,50	4,10
	19	% Penurunan Tingkat Risiko Utama % Reduction in Key Risk Levels	Persen Percent	8,00	Maximize	66,90	30,00	223,00	110,00	8,80

Tabel Kinerja KPI Individu Direktur Manajemen Risiko
Table of Individu KPI Performance of Risk Management Director

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Polaritas Polarity	AUDITED 2024				
						Realisasi Realization	Target	%	Nilai Maks Maximum Score	Pencapaian Achievement
	20	% Implementasi Organ Tata Kelola Perusahaan % Implementation of Corporate Governance Structure	Persen Percent	7,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	7,70
	21	% Penyelesaian Tindak Lanjut AOI GCG % Completion of Follow-up on GCG AOI	Persen Percent	2,00	Maximize	110,00	100,00	110,00	110,00	2,20
Pencapaian Achievement				100,00						103,12

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, RJPP, RKAP, KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/ RKM pada direktorat tersebut. KPI Individu Direktur Utama merupakan mirroring dari KPI Direksi Kolegial. Sementara itu, KPI Direksi Individual lainnya merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. KPI Direksi secara individual terdiri dari:

Criteria for Board of Directors Performance Assessment

The management of individual KPIs for the Board of Directors refers to applicable government regulations, the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the Collegial Board of Directors' KPIs, and the strategic initiatives/Management Work Plan (RKM) of the respective directorates. The individual KPI of the President Director mirrors the Collegial Board of Directors' KPI. Meanwhile, the individual KPIs of the other Directors are derived from the President Director's KPI and are assigned to each member of the Board of Directors in accordance with their duties, functions, and responsibilities within the scope of their respective directorates. The individual KPIs of the Board of Directors consist of:

Perspektif Perspective	Bobot Weight	Skor Score
Direktur Utama President Director	100	101,10
Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	100	100,97
Direktur Keuangan dan Umum Finance and General Affairs Director	100	102,09
Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	100	103,12

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Surat Dinas. Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan.

The achievement of individual KPIs of the Board of Directors, along with explanations of the results, is submitted to the Board of Commissioners and Shareholders through an official letter. The individual KPIs of the Board of Directors are assessed based on measurements performed by the External Auditor auditing the Company's Financial Statements for the relevant year.

ASESMEN PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. Asesmen atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan entitas anak BUMN dan adanya kepemilikan negara sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.



Dikarenakan dihapusnya SK-16/5.MBU/2012 yang merupakan dasar pengukuran penerapan tata kelola perusahaan selama ini, penilaian (assessment) penerapan GCG tahun 2023 dan 2024 tidak dilaksanakan oleh seluruh Anper PT Pupuk Indonesia (Persero).



Sejalan dengan asesmen yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses asesmen. Untuk asesmen penerapan GCG tahun ukur 2022, hasil asesmen memberikan predikat “Sangat Baik” dengan nilai mencapai 95,50%. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 95,17% dan 96,25% keduanya dengan predikat “Sangat Baik”.



Lebih lanjut tentang metode, proses dan hasil penilaian terkait penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian “Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik” di awal bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini.



Karena Direksi PUSRI tidak memiliki Komite di bawah Direksi, maka Direksi tidak melakukan evaluasi terhadap Komite-komite Direksi.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

The Board of Commissioners and the Board of Directors play a central role in the company's growth. Assessment of these two organs is essential, particularly because the company is a subsidiary of a state-owned enterprise (SOE) and is subject to state ownership of one Series A Dwiwarna share, which is directed towards applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) to SOE standards, along with evaluating the implementation of these principles.

Due to the removal of SK-16/5.MBU/2012, which served as the basis for measuring corporate governance implementation, the GCG assessment for 2023 and 2024 will not be conducted by all subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero).

In line with the assessment's objective of providing evaluation and recommendations, the Company's Management is expected to follow up on the recommendations resulting from the assessment process. For the GCG implementation assessment in the 2022 evaluation year, the assessment results awarded a rating of “Excellent” with a score of 95.50%. Specifically, for the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors, each achieved scores of 95.17% and 96.25%, respectively, both with an “Excellent” rating.

Further details on the methods, processes, and assessment results related to the implementation of GCG for the Board of Commissioners and Board of Directors can be found in the section “Assessment: Evaluation, Monitoring, and Improvement of Good Corporate Governance Implementation” at the beginning of the Corporate Governance chapter in this annual report.

Since the PUSRI Board of Directors does not have any committees under its authority, the Board of Directors does not conduct evaluations of Director Committees.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Salah satu hal yang dianggap penting oleh Perusahaan dalam efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi ialah keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang beragam. Sementara ketentuan tentang keberagaman komposisi Direksi dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perusahaan.

One of the key factors considered important by the Company in ensuring the effectiveness of the supervisory duties of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors is the diversity of expertise, experience, and educational backgrounds. All members of the Board of Commissioners possess adequate and relevant competencies for their respective positions, enabling them to fulfill their duties and responsibilities while also contributing diverse competencies. Meanwhile, provisions regarding the diversity of the composition of the Board of Directors are outlined in the Company's Board of Directors Guidelines and Code of Conduct.

Hingga akhir tahun 2024, PUSRI belum memiliki kebijakan tertulis yang memuat keberagaman bagi komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk masing-masing aspek pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepenuhnya dikelola oleh entitas induk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

As of the end of 2024, PUSRI has not yet established a written policy specifying diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in terms of educational background (fields of study), work experience, age, and gender. The appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors is entirely managed by the parent entity, PT Pupuk Indonesia (Persero).

PUSRI senantiasa berupaya untuk menjaga bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana yang diurai dalam tabel berikut.

PUSRI continuously strives to maintain a balanced mix of expertise and experience among the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as detailed in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience/Expertise	Usia Age	Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Siti Nurizka Puteri Jaya Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen)	Indonesia	Magister di bidang Hukum	Memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang dibidang Legal Consultant selama 2 tahun di PT Medco Power Indonesia, Divisi Legal PT Indonesia Comnets selama 3 tahun, Direktur Management di Abrazqa Law Office (2015 s.d sekarang), Anggota DPR RI Komisi III (2019 s.d 2024).	37	Perempuan
(President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissionerr)		Master of Laws	Has extensive expertise and experience in the field of Legal Consultant for 2 years at PT Medco Power Indonesia, in the Legal Division of PT Indonesia Comnets for 3 years, Director of Management at Abrazqa Law Office (2015 to present), and Member of the Indonesian House of Representatives Commission III (2019 to 2024).	37	Female
Ali Jamil (Komisaris)	Indonesia	Doktor dibidang Pertanian	Memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang dibidang Pertanian sebagai birokrat baik sebagai Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan (2017-2018), Direktur Serealia, Ditjen Tanaman Pangan (2017-2018), Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan (2018-2019), Kepala Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian (2019-2021), Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian / Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (2024 – sekarang)	59	Laki-laki
(Commissioner)		Doctorate in Agriculture	Has extensive expertise and experience in the agricultural sector as a bureaucrat, having served in various strategic roles, including: Director of Perennial and Refreshing Crops at the Directorate General of Plantations (2017-2018), Director of Cereals at the Directorate General of Food Crops (2017-2018), Director of Various Legumes and Tubers at the Directorate General of Food Crops (2018-2019), Head of the Agricultural Quarantine Agency (2019-2021), and currently serves as Expert Staff to the Minister for Agricultural Infrastructure / Secretary General of the Ministry of Agriculture (2024-present).	59	Male

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience/Expertise	Usia Age	Gender
 Fadjar Judisiawan (Komisaris)	Indonesia	Magister dibidang Manajemen	Asisten Deputy Industri Kesehatan, Kementerian BUMN (Januari 2024 – sekarang), Direktur Keuangan & Umum, PT Patra Jasa (Maret 2022 - Januari 2024), Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Mei 2018 – Desember 2021), Direktur Keuangan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Sept 2017– Mei 2018), Asisten Deputy Konstruksi, Sarana dan Prasarana 1, Kementerian BUMN (2015-2017), Asisten Deputy Usaha Jasa Konstruksi, KBUMN (2014-2015)Asisten Deputy Riset & Penyajian Informasi, Kementerian BUMN (2013-2014), Komisaris PT Pelindo 2 (Persero) (2016 – 2017), Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2014 – 2016),Komisaris PT Petrokimia Gresik (2012 – 2014), Komisaris PT PNIM (2011 – 2012), Komisaris PT SIER (Persero) (2009 – 2011), Komisaris Utama PT Atmindo (2008-2010).	59	Laki-laki
 (Commissioner)	Indonesian	Master's Degree in Management	Assistant Deputy for Health Industry, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2024 – Present), Director of Finance & General Affairs, PT Patra Jasa (March 2022 – January 2024), Director of Business Strategy & Business Development, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (May 2018 – December 2021), Finance Director, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (September 2017 – May 2018), Assistant Deputy for Construction, Facilities and Infrastructure I, Ministry of State-Owned Enterprises (2015 – 2017), Assistant Deputy for Construction Services Enterprises, Ministry of State-Owned Enterprises (2014 – 2015), Assistant Deputy for Research & Information Presentation, Ministry of State-Owned Enterprises (2013 – 2014), Board of Commissioners Experience, Commissioner, PT Pelindo 2 (Persero) (2016 – 2017), Commissioner, PT Pelindo 3 (Persero) (2014 – 2016), Commissioner, PT Petrokimia Gresik (2012 – 2014), Commissioner, PT PNIM (2011 – 2012), Commissioner, PT SIER (Persero) (2009 – 2011), President Commissioner, PT Atmindo (2008 – 2010).	59	Male
 Prahoro Yulijanto Nurtjahyo (Komisaris)	Indonesia	Doktor Ocean Engineering	Memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang di bidang engineering dengan beragam posisi yang dijalankannya, baik di luar dan dalam negeri, antara lain Principal Lead Engineer SBM Offshore, Inc., Houston, Texas (2006-2013), VP Operations and Managing Consultant Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013-2016), Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Struktur Kementerian ESDM (2017-2020), Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM (2020-sekarang), dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2017-2020).	54	Laki-laki
 (Commissioner)		Doctorate in Ocean Engineering	Possesses extensive expertise and experience in engineering, having held various positions both domestically and internationally, including Principal Lead Engineer at SBM Offshore, Inc., Houston, Texas (2006-2013); VP of Operations and Managing Consultant at Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013-2016); Expert Staff for Investment and Structural Development at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2017-2020); Head of the Human Resources Development Agency at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2020–present); and Commissioner of PT Pertamina Hulu Energi (2017-2020).	54	Male
 Bambang Supriyambodo (Komisaris)	Indonesia	Sarjana Kehutanan	Memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang di bidang kehutanan melalui sejumlah jabatan yang pernah dijalankannya, di antaranya Manager Pengurusan Hutan PT ITCIKU (2005-2006), Direktur Operasional PT ITCIKU (2008- 2009), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020), Komisaris Utama PT Rakabu Sejahtera (2016- sekarang),	64	Laki-laki
 (Commissioner)		Bachelor's Degree in Forestry	Experienced and skilled in the field of forestry through various positions held, including Forest Management Manager at PT ITCIKU (2005-2006), Operational Director at PT ITCIKU (2008-2009), Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020), and President Commissioner of PT Rakabu Sejahtera (2016–present).	64	Male

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience/Expertise	Usia Age	Gender
Sally Salamah (Komisaris)	Indonesia	Doktor Ekonomi Pembangunan	Memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang di bidang Akuntansi dan Audit Keuangan, dengan pengalaman Panjang di Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan saat ini sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020-sekarang)	58	Perempuan
(Commissioner)		Doctorate in Development Economics	Possesses expertise in Accounting and Financial Auditing, with extensive experience at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), currently serving as Deputy Head of BPKP in the State Accountant Division, Financial and Development Supervisory Agency (2020–present).	58	Female

Direksi

Board of Directors

Daconi Khotob (Direktur Utama)	Indonesia	Doktor Manajemen SDM	Memiliki pengalaman yang panjang di bidang Manajemen Produksi dan Strategis sempat menjabat Direktur Utama PT Semen Baturaja (2022-2023), Direktur Produksi & Pengembangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017- 2022), Komisaris PT Baturaja Multi Usaha (2019), Direktur Utama PT Kabau Sirah SP (Klub Sepak Bola) (2014), GM Produksi V PT Semen Padang (2016-2017), GM Produksi IV PT Semen Padang (2015-2016), dan GM Produksi II / III PT Semen Padang (2013-2015)	53	Laki-laki
(President Director)		Doctorate in Human Resource Management	Has extensive experience in Production and Strategic Management, having served as President Director of PT Semen Baturaja (2022-2023), Director of Production & Development at PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017-2022), Commissioner of PT Baturaja Multi Usaha (2019), President Director of PT Kabau Sirah SP (Football Club) (2014), GM of Production V at PT Semen Padang (2016-2017), GM of Production IV at PT Semen Padang (2015-2016), and GM of Production II/III at PT Semen Padang (2013-2015).	53	Male
Saifullah Lasindrang (Direktur Keuangan dan Umum)	Indonesia	Magister Ilmu dan Teknik Material	Memiliki pengalaman yang panjang di bidang industri pupuk dan keahlian metalurgi-high temperatur alloy steel. Sempat menjabat sebagai General Manager SDM PT Pupuk Kaltim (2018), Kepala Pembelajaran dan Management PT Pupuk Indonesia (2019), dan Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (2019-2020).	59	Laki-laki
(Finance and General Affairs Director)		Master's Degree in Materials Science and Engineering	Has extensive experience in the fertilizer industry and expertise in metallurgy, particularly high-temperature alloy steel. Previously held positions as General Manager of Human Resources at PT Pupuk Kaltim (2018), Head of Learning and Management at PT Pupuk Indonesia (2019), and Corporate Secretary of PT Pupuk Indonesia (2019–2020).	59	Male
Filius Yuliandi (Direktur Operasi dan Produksi)	Indonesia	Magister Manajemen	Memiliki pengalaman yang panjang di bidang industri pupuk dengan keahlian manajemen dan teknik elektro serta telah berkarier di PUSRI sejak lama dengan beragam jabatan, di antaranya Direktur Produksi PUSRI (2016- 2020), General Manager Pemeliharaan PUSRI (2013-2016), dan Departemen Produksi PUSRI sejak 1993.	57	Laki-laki
(Operation and Production Director)		Master's Degree in Management	Has extensive experience in the fertilizer industry with expertise in management and electrical engineering and has had a long career at PUSRI, holding various positions, including Director of Operations at PUSRI (2016-2020), General Manager of Maintenance at PUSRI (2013-2016), and in the Production Department at PUSRI since 1993.	57	Male

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Directors



PROSEDUR DAN KEBIJAKAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Sebagai entitas bisnis milik negara, proses nominasi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dibuat berdasarkan pada ketentuan yang termaktub di Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



Secara umum, proses penentuan nominee dan penunjukkan anggota Dewan Komisaris diawali dengan pengajuan kandidat oleh Dewan Komisaris kepada RUPS Perusahaan. Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan kemudian harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pemegang Saham. RUPS akan menentukan pengangkatan mereka yang lulus uji tersebut untuk mengesahkannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.



Proses Nominasi dan Pemilihan Direksi

Sementara itu, prosedur pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi nominasi.



Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pemegang saham mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan kandidat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam hal ini adalah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Kemudian kandidat anggota Direksi PUSRI yang diajukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam RUPS, dapat berasal dari:

1. Anggota Direksi Perusahaan Anggota Holding, Anak Perusahaan Anggota Holding dan/atau Anak Perusahaan Holding;
2. Pejabat internal Perusahaan Anggota Holding, Anak Perusahaan Anggota Holding dan/atau Anak Perusahaan Holding minimal dua tingkat di bawah Direksi;
3. Sumber lain yang memiliki reputasi baik, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

PROCEDURES AND POLICIES FOR THE NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nomination and Selection Process of the Board of Commissioners

As a state-owned business entity, the nomination process for members of the Company's Board of Commissioners is conducted in accordance with the provisions outlined in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

In general, the process of determining nominees and appointing members of the Board of Commissioners begins with the submission of candidates by the Board of Commissioners to the Company's GMS. The proposed candidates must then undergo a fit and proper test conducted by the Shareholders. The GMS will decide on the appointment of those who pass the test, thereby officially confirming them as members of the Company's Board of Commissioners.

Nomination and Selection Process for the Board of Directors

Meanwhile, the procedure for appointing, dismissing, and/or replacing members of the Board of Directors in the General Meeting of Shareholders (GMS) must take into account recommendations from the Board of Commissioners or the Committee responsible for carrying out the nomination function.

As stipulated in the Company's Articles of Association, shareholders have the exclusive right to propose candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners, in this case, PT Pupuk Indonesia (Persero).

The candidates for PUSRI's Board of Directors proposed by PT Pupuk Indonesia (Persero) in the GMS may come from:

1. Members of the Board of Directors of Holding Company Members, Subsidiaries of Holding Company Members, and/or Holding Company Subsidiaries;
2. Internal officials of Holding Company Members, Subsidiaries of Holding Company Members, and/or Holding Company Subsidiaries, at least two levels below the Board of Directors;
3. Other sources with a good reputation, relevant experience, and credible qualifications.

Dalam hal kandidat anggota Direksi yang diusulkan berasal dari internal Perusahaan, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melaksanakan Fit and Proper Test. Kandidat anggota Direksi yang diusulkan tersebut merupakan pemangku jabatan 1 (satu) level di bawah Direksi dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai assessment yang dilakukan oleh lembaga independen.

Kemudian, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan mengevaluasi seluruh kandidat yang berasal dari internal Perusahaan maupun dari luar Perusahaan, untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebelum diusulkan dalam RUPS untuk dimintakan persetujuannya.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Kebijakan Suksesi Manajemen Kunci

Succession Policy for the Board of Directors and Key Management Dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya, PUSRI diharapkan memiliki pimpinan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu, Perusahaan telah merancang kebijakan suksesi anggota Direksi guna memastikan transisi di level Direksi berjalan lancar dan berdampak positif pada kelangsungan usaha dan operasional Perusahaan.

Ketentuan mengenai usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Suksesi Manajemen Kunci

Kebijakan suksesi untuk manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Direksi akan melakukan revidu terhadap seluruh Manajemen Kunci (BOD-1) dan memilih talent sebanyak 20% dari total Manajemen Kunci.
2. Parameter yang dinilai pada setiap Talent berupa KPI selama 3 Tahun terakhir, Capacity (Kompetensi, Learning Agility), Performance (Result, Behaviour AKHLAK Values).
3. Melakukan validasi dan kalibrasi oleh Cluster Talent Committee.
4. Nominasi 20% terpilih dikirim masuk ke dalam database Kementerian BUMN.

If the proposed candidates for the Board of Directors come from within the Company, PT Pupuk Indonesia (Persero) will conduct a Fit and Proper Test. The proposed candidates must hold a position one level below the Board of Directors and meet the qualification requirements based on an assessment conducted by an independent institution.

PT Pupuk Indonesia (Persero) will then evaluate all candidates, whether from within or outside the Company, before submitting them to the Ministry of State-Owned Enterprises for approval, before being formally proposed in the GMS.

Board of Directors Succession Policy and Key Management Succession Policy

To ensure business continuity, PUSRI is expected to have leaders of high quality and competence. Therefore, the Company has designed a succession policy for the Board of Directors to ensure a smooth transition at the director level, positively impacting the Company's business sustainability and operations.

The provisions regarding the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors in the GMS refer to the regulations stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Key Management Succession Policy

The Company's key management succession policy is as follows:

1. The Board of Directors will review all Key Management (BOD-1) and select talents amounting to 20% of the total Key Management.
2. The assessment parameters for each talent include KPI performance over the past three years, capacity (competency and learning agility), and performance (results, behavior, and adherence to AKHLAK values).
3. Validation and calibration will be conducted by the Cluster Talent Committee.
4. The selected 20% of nominees will be submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises' database.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan. Besarnya gaji/ honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun yang berlaku selama 1 (satu) tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.



Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/ industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan kinerja Perusahaan agar mampu bersaing dengan entitas usaha lain di bidang atau industri yang sama.



PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI



Dasar hukum yang menjadi acuan PUSRI dalam menentukan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



PUSRI memiliki kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris yang mencakup mulai dari prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi. Proses pengusulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dimulai dengan rekomendasi dari pemegang saham utama yakni PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan mengacu pada prinsip-prinsip remunerasi Perusahaan dan hasil penilaian atas pencapaian target (goal setting), peraturan yang berlaku, perbandingan industri dan kinerja Perusahaan.

Rekomendasi Pemegang Saham disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Sementara untuk Direksi, pengusulan remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

Berikut adalah proses pengusulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PUSRI.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on a formula established by the General Meeting of Shareholders (GMS) and has been reviewed by the Board of Commissioners through an in-depth assessment conducted by the shareholders. The decision regarding the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is approved at the Annual GMS. The salaries/ honoraria for the Board of Commissioners and Board of Directors are set annually by the GMS and are valid for one financial year of the Company, starting from January of the current year.

The remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is provided in the form of salaries/honoraria and allowances/facilities, including post-employment benefits, with the types and amounts determined by the GMS. The remuneration structure also takes into account professional income standards within the same sector/industry to ensure fair compensation aligned with the responsibilities assigned to the Board of Commissioners and Board of Directors. This approach aims to enhance the Company's performance and enable it to compete effectively with other business entities in the same industry.

PROCEDURE FOR PROPOSAL AND DETERMINATION OF REMUNERATION

The legal basis for PUSRI in determining the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors is the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

PUSRI has a policy for determining the remuneration of the Board of Commissioners, covering the entire process from proposal submission to final determination. The process of proposing the remuneration for the Board of Commissioners begins with a recommendation from the main shareholder, PT Pupuk Indonesia (Persero). This recommendation is based on the Company's remuneration principles, an assessment of target achievement (goal setting), applicable regulations, industry benchmarks, and the Company's performance.

The shareholders' recommendation is then submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval. Meanwhile, for the Board of Directors, the remuneration proposal is submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders.

Below is the process for proposing the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of PUSRI.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Procedure for Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Pemegang Saham

Shareholders

Menetapkan pedoman remunerasi bagi Direksi dan Komisaris dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, kondisi keuangan Perusahaan dan faktor lainnya yang relevan serta perundang-undangan yang berlaku

Establish remuneration guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners by considering factors such as revenue, assets, inflation rate, the Company's financial condition, and other relevant factors, as well as applicable laws and regulations.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Rapat Gabungan membahas usulan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham

The Joint Meeting discusses the proposed amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the guidelines set by the shareholders.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi kepada Pemegang Saham

The Board of Commissioners proposes the remuneration of the Board of Directors to the Shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

The GMS determines the amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Setelah adanya pengusulan remunerasi selanjutnya dilakukan pembahasan di dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

After the remuneration proposal is submitted, it is then discussed in the GMS, where a decision is made regarding the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Penetapan

Dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris PUSRI memperhatikan hal-hal antara lain:

1. Pendapatan
2. Aktiva
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor yang relevan seperti tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PUSRI mengacu pada PER-13/MBU/09/2021, yang merupakan perubahan keenam dari PER-04/MBU/2014 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER04/MBU/2014 tanggal 24 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Basis for Determination

The determination of remuneration for the Board of Commissioners at PUSRI takes into account the following factors:

1. Revenue
2. Assets
3. Inflation rate
4. The company's financial condition and capability
5. Relevant factors such as prevailing income levels in similar industries
6. Applicable laws and regulations

The determination of the structure and components of remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PUSRI refers to PER-13/MBU/09/2021, which is the sixth amendment to PER-04/MBU/2014 dated May 31, 2019, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 dated September 24, 2021, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprises.

Selain itu, struktur remunerasi juga mengacu pada pedoman yang dimiliki pemegang saham utama. Dengan demikian struktur remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Transportasi, Asuransi purna jabatan)
3. Fasilitas (Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum)
4. Tantiem/insentif kerja/Insentif Khusus
5. Pajak atas honorarium, tunjangan dan fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/Insentif kinerja Dewan Komisaris menjadi beban masing-masing Dewan Komisaris



Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dalam menentukan besaran gaji atau honorarium bagi Dewan Komisaris, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

1. Perhitungan honorarium bagi Komisaris Utama sebesar 45% dari nilai gaji Direktur Utama.
2. Perhitungan honorarium bagi Wakil Komisaris Utama sebesar 42.5% dari nilai gaji Direktur Utama.
3. Perhitungan honorarium bagi Anggota Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Sedangkan struktur remunerasi Direksi Perusahaan terdiri dari:

1. Gaji.
2. Tunjangan (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Perumahan, Asuransi purna jabatan)
3. Fasilitas (Fasilitas Kendaraan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum)
4. Tantiem/insentif kerja/Insentif Khusus
5. Pajak atas honorarium, tunjangan dan fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

Sedangkan pajak atas tantiem/Insentif kinerja Direksi menjadi beban masing-masing Direksi.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dalam menentukan besaran gaji atau honorarium bagi Direksi, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

- Gaji Direktur Utama menjadi acuan dengan porsi 100%.
- Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

Accordingly, the remuneration structure for the Company's Board of Commissioners consists of:

1. Honorarium
2. Allowances (Holiday Allowance, Transportation Allowance, Post-Service Insurance)
3. Facilities (Healthcare Facilities, Legal Assistance Facilities)
4. Tantiem/Performance incentives/Special Incentives
5. Taxes on honorarium, allowances, and facilities are borne by the Company, while taxes on tantiem/performance incentives for the Board of Commissioners are borne by each individual Commissioner.

Meanwhile, in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, the determination of the salary or honorarium amount for the Board of Commissioners is based on the following calculation:

1. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director.
2. The honorarium for the Vice President Commissioner is calculated at 42.5% of the President Director's salary.
3. The honorarium for Members of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.

Meanwhile, the remuneration structure for the Company's Board of Directors consists of:

1. Salary
2. Allowances (Religious Holiday Allowance, Housing Allowance, Post-Employment Insurance)
3. Facilities (Vehicle Facility, Health Facility, Legal Assistance Facility)
4. Tantieme/Work Incentives/Special Incentives
5. Taxes on honorarium, allowances, and facilities are covered by and borne by the Company.

Meanwhile, taxes on tantiem/work performance incentives for the Board of Directors are borne by each respective Director.

Meanwhile, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-13/MBU/09/2021 and No. PER-3/MBU/03/2023, the determination of the salary or honorarium for the Board of Directors is calculated based on the following:

- The President Director's salary serves as the reference at 100%.
- The salary of other Directors is set at 85% of the President Director's salary.





Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris berupa honorarium/gaji, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap. Remunerasi untuk masing-masing Anggota Dewan Komisaris dapat berbeda sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah rincian komposisi remunerasi Dewan Komisaris PUSRI beserta penjelasannya.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure for the Board of Commissioners consists of honorarium/salary, allowances, and fixed benefits. The remuneration for each member of the Board of Commissioners may vary in accordance with applicable laws and regulations. Below is a detailed composition of the remuneration for the Board of Commissioners of PUSRI, along with its explanations.

Uraian Description	Komisaris Commissioner	Direksi Board of Directors
Gaji	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan. Adapun ketentuannya yakni: 1. Perhitungan honorarium bagi Dewan Komisaris Utama sebesar 45% dari nilai gaji Direktur Utama 2. Perhitungan honorarium bagi Anggota Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan. Adapun ketentuannya yakni: 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal dalam kelompok usaha Pupuk Indonesia 2. Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama
Salary	Fixed income refers to the monetary compensation received monthly due to the position as a member of the Company's Board of Directors. The provisions are as follows: 1. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary. 2. The honorarium for Members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.	Fixed income refers to the monetary compensation received monthly due to the position as a member of the Company's Board of Directors. The provisions are as follows: 1. The President Director's salary is determined based on internal guidelines within the Pupuk Indonesia business group. 2. The salary of other Directors is set at 85% of the President Director's salary.
Tunjangan	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Komisaris selain gaji.	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi selain gaji.
Allowance	Income in the form of money or monetary equivalents received by the Board of Commissioners at specific times other than salary.	Income in the form of money or monetary equivalents received by the Board of Directors at specific times other than salary.
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium setiap tahun. Granted once a year in the amount of one-time honorarium.	Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium setiap tahun. Granted once a year in the amount of one-time honorarium.
Tunjangan Perumahan	Dewan Komisaris tidak diberikan Tunjangan Perumahan.	Diberikan tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,-. Direksi dapat menempati rumah dinas dengan ketentuan potongan sewa rumah dinas. Besaran tarif potongan sewa rumah dinas direksi setiap bulannya diatur sebagai berikut : 1. Rumah dinas Direktur Utama sebesar Rp. 11.000.000,- 2. Rumah dinas Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-
Housing Allowance	The Board of Commissioners is not provided with a Housing Allowance.	A monthly housing allowance of Rp25,000,000 is provided. Members of the Board of Directors may reside in official housing, subject to a deduction for official residence rent. The monthly rent deduction for the official residence is set as follows: 1. President Director's official residence: Rp11,000,000 2. Director's official residence: Rp10,000,000

Uraian Description	Komisaris Commissioner	Direksi Board of Directors
 Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Dewan Komisaris tidak diberikan fasilitas kendaraan namun diberikan Tunjangan Transportasi. Tunjangan Transportasi ditetapkan untuk setiap bulan paling banyak 20% dari honorarium. The Board of Commissioners is not provided with a vehicle facility but is given a Transportation Allowance. The Transportation Allowance is set at a maximum of 20% of the honorarium per month.	Direksi dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas dengan spesifikasi mesin maksimal 3.000 cc beserta biaya pemeliharaan dan operasional yang ditetapkan oleh RUPS atau Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS. The Board of Directors may be provided with an official vehicle facility, limited to 1 (one) unit with a maximum engine specification of 3,000 cc, along with maintenance and operational costs as determined by the GMS or a Shareholders' Resolution outside the GMS.
 Asuransi Purna Jabatan	Diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun, termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah berhenti dari jabatan sebagai Komisaris.	Diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun, termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah berhenti dari jabatan sebagai Direksi.
 Post-Term Insurance	Provided with a premium covered by the Company of up to a maximum of 25% of the annual salary, including premiums for accident and life insurance. Granted after stepping down from the position as Commissioner.	Provided with a premium covered by the Company of up to a maximum of 25% of the annual salary, including premiums for accident and life insurance. Granted after stepping down from the position as Director.
 Fasilitas	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 Facilities	Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/enjoyed by the Board of Commissioners in the performance of their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on applicable laws and regulations.	Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/enjoyed by the Board of Directors in the performance of their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on applicable laws and regulations.
 Kesehatan	Diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak, yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.	Diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Direksi beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak, yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.
 Health	Health facilities are provided in the form of health insurance or reimbursement for medical expenses. Health facilities are provided to the Board of Commissioners along with one spouse and up to 3 (three) children who have not yet reached the age of 25. However, if the child under 25 years of age has ever been married or employed, they will no longer be eligible for the health facilities.	Health facilities are provided in the form of health insurance or reimbursement for medical expenses. Health facilities are given to the Board of Directors along with one spouse and up to 3 (three) children who have not reached the age of 25. However, if a child under the age of 25 has ever been married or employed, they will no longer be eligible for the health facilities.
Perkumpulan Profesi	Dewan Komisaris dapat diikutsertakan sebagai anggota perkumpulan profesi maksimal 2 (dua) perkumpulan. Diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.	Direksi dapat diikutsertakan sebagai anggota perkumpulan profesi maksimal 2 (dua) perkumpulan. Diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.
Professional Association	The Board of Commissioners may be included as members of up to 2 (two) professional associations. This benefit is provided only in the form of an initial membership fee (registration fee) and annual dues.	The Board of Directors may be included as members of up to 2 (two) professional associations. This benefit is provided only in the form of an initial membership fee (registration fee) and annual dues.
Bantuan Hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan. Dibayarkan sebesar biaya-biaya resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.	Diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan. Dibayarkan sebesar biaya-biaya resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Legal Assistance	Legal assistance is provided in the event of actions or conduct performed on behalf of their position, related to the purposes, objectives, and activities of the Company. The payment covers official expenses that can be legally accounted for.	It is provided in the event of actions or conduct carried out on behalf of their position, related to the objectives and activities of the Company. The payment covers official expenses that can be legally justified.

Uraian Description	Komisaris Commissioner	Direksi Board of Directors
Fasilitas Club Membership	-	Diberikan maksimal 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.
Club Membership Facility		A maximum of 2 (two) memberships are provided, taking into account the Company's financial capabilities.
Fasilitas Biaya Representasi	-	Dalam hal Direksi mewakili Perusahaan.
Representation Expense Facility		In the event that the Board of Directors represents the Company.

Adapun besaran remunerasi masing-masing Dewan Komisaris PUSRI secara nominal diurai dalam tabel berikut:

The amount of remuneration for each member of the PUSRI Board of Commissioners, in nominal terms, is detailed in the table below:

Nama Name	Masa Menjabat Term of Office	Penghasilan per Bulan Monthly Income		Jumlah Penghasilan per Bulan Total Monthly Income	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Annual Income	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Jumlah Remunerasi 2024 Total Remuneration 2024
		Honorarium Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance				
Setya Utama*	TMT 18 Mei 2022-15 Mei 2024	103.500.000	20.700.000	124.200.000	552.890.323	103.500.000	656.390.323
Siti Nurizka Puteri Jaya**	TMT 10 Juni 2024	103.500.000	20.700.000	124.200.000	869.400.000	-	869.400.000
Ali Jamil	TMT 27 Desember 2021	93.150.000	18.630.000	111.780.000	1.341.360.000	93.150.000	1.434.510.000
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	TMT 14 April 2020	93.150.000	18.630.000	111.780.000	1.341.360.000	93.150.000	1.434.510.000
Bambang Supriyambodo	TMT 25 Agustus 2020	93.150.000	18.630.000	111.780.000	1.341.360.000	93.150.000	1.434.510.000
Sally Salamah	TMT 12 Juni 2021	93.150.000	18.630.000	111.780.000	1.341.360.000	93.150.000	1.434.510.000
Amiruddin Nahrawi	TMT 18 Mei 2022 - 02 Februari 2024	93.150.000	18.630.000	111.780.000	119.181.612	93.150.000	212.331.612
Fadjar Judisiawan	TMT 04 Maret 2024	93.150.000	18.630.000	111.780.000	1.117.800.000	75.431.039	1.193.231.039

*Pak Setya Utama bertugas hingga 15 Mei 2024

**Ibu Siti Nurizka Puteri Jaya bertugas mulai tanggal 10 Juni 2024

*Mr. Setya Utama served until May 15, 2024

**Ms. Siti Nurizka Puteri Jaya commenced her duties on June 10, 2024

BONUS KINERJA

Dewan Komisaris juga menerima bonus kinerja berupa tantiem atau insentif kinerja yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi Key Performance Indicators tercapai 100%.



Tantiem atau insentif kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris yakni Komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur Utama. Sedangkan Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama.



Berikut adalah pendapatan tantiem Dewan Komisaris PUSRI pada tahun 2024 yang merupakan hasil Keputusan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023.



HUBUNGAN ANTARA REMUNERASI DIREKSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN

PUSRI menerapkan kebijakan mengaitkan kinerja Perusahaan dengan total remunerasi yang diterima oleh Direksi. Pencapaian usaha Perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran tantiem dan insentif kinerja Direksi.

Adapun struktur remunerasi masing-masing Direksi PUSRI secara nominal diurai dalam tabel berikut:

Nama Name	Masa Menjabat Term of Office	Penghasilan per Bulan Monthly Income	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Annual Income	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Jumlah Remunerasi 2024 Total Remuneration 2024
Daconi Khotob	TMT 13/11/2023	244.000.000	2.928.000.000	230.000.000	3.158.000.000
Saifullah Lasindrang	TMT 25/08/2020	210.500.000	2.526.000.000	195.500.000	2.721.500.000
Filius Yuliandi	TMT 25/02/2021	210.500.000	2.526.000.000	195.500.000	2.721.500.000

PERFORMANCE BONUS

The Board of Commissioners also receives performance bonuses in the form of tantiem or performance incentives, which are given to the members of the Board of Commissioners if the company achieves profit and does not accumulate losses. The company may grant tantiem to the members of the Board of Commissioners based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) in the approval of the annual report, provided that the Key Performance Indicators (KPIs) are achieved at 100%.

Tantiem or performance incentives are compensation awarded to the members of the Board of Commissioners. The calculation of tantiem/performance incentives for the Board of Commissioners is as follows: the President Commissioner receives 45% of the tantiem/performance incentive of the President Director, while the other members of the Board of Commissioners receive 90% of the tantiem/performance incentive of the President Commissioner.

The following is the tantiem income of the PUSRI BoC in 2024, which is the result of the GMS resolution on the 2023 Fiscal Year Performance.

Nama Name	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Setya Utama	1.401.545.217
Ali Jamil	1.261.390.695
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	1.261.390.695
Bambang Supriyambodo	1.261.390.695
Sally Salamah	1.261.390.695
Amiruddin Nahrawi	1.261.390.695

RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION AND COMPANY PERFORMANCE

PUSRI implements a policy that links the company's performance with the total remuneration received by the Board of Directors. The company's business achievements are one of the considerations in determining the amount of tantiem and performance incentives for the Board of Directors.

The remuneration structure for each member of PUSRI's Board of Directors, in nominal terms, is detailed in the following table:

BONUS KINERJA

Direksi juga menerima bonus kinerja berupa tantiem dan insentif kinerja yang bersifat variabel (merit system) yang diberikan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan..

Tantiem adalah penghasilan yang didapat sebagai bentuk penghargaan apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi *Key Performance Indicators* tercapai 100%.

Adapun perhitungan tantiem bagi masing-masing anggota Direksi berbeda-beda yakni untuk Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal dalam kelompok usaha Pupuk Indonesia. Kemudian, tantiem kinerja Direktur lainnya sebesar 90% dari besaran Direktur Utama.

Berikut adalah pendapatan tantiem Direksi PUSRI pada tahun 2024 yang merupakan hasil Keputusan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023:

Nama Name	Jumlah Total
Daconi Khotob	418.116.990
Saifullah Lasindrang	2.647.363.189
Filius Yuliandi	2.647.363.189

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

Berikut jumlah remunerasi yang diberikan oleh Perusahaan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024.

Uraian Description	Jumlah Total
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	20.990.355.454
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	17.536.677.160
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024	38.527.032.614

PERFORMANCE BONUS

The Board of Directors also receives performance bonuses in the form of tantiem and performance incentives, which are variable (merit system) and are awarded based on target achievement, the financial health and capacity of the Company, as well as other relevant factors.

Tantiem is income received as a form of recognition when the company achieves profits and does not accumulate losses. Tantiem may also be awarded as part of a Long-Term Reward. The Company can grant tantiem to the members of the Board of Directors based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) upon approval of the annual report if the Key Performance Indicators (KPIs) are achieved 100%.

The calculation of tantiem for each member of the Board of Directors varies. For the President Director, the tantiem is determined using internal guidelines within the Pupuk Indonesia business group. The tantiem for other Directors is set at 90% of the President Director's tantiem amount.

The following is the tantiem income of the PUSRI BoD in 2024, which is the result of the GMS resolution on the 2023 Fiscal Year Performance.

TOTAL REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Below is the total remuneration provided by the Company to the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

RASIO GAJI

Berikut adalah informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan.



Uraian Description	Jumlah Total
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1: 0,86
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Board of Commissioners Members	1: 0,9
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1: 0,51
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to Highest-Ranking Employee	1:0,19
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to Lowest-Ranking Employee	1: 0,02
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest-Ranking Employee to Lowest-Ranking Employee	1: 0,13
Karyawan Terendah terhadap UMP Sumatra Selatan Lowest-Ranking Employee to Regional Minimum Wage (UMP) South Sumatra	1: 0,61

Karyawan tertinggi adalah karyawan grade tertinggi dengan *take home pay* tertinggi yaitu Rp40.518.054. Sementara karyawan terendah adalah karyawan dengan grade terendah dengan *take home pay* terendah yaitu Rp5.629.804.

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat pemberian bonus non kinerja, dan/atau opsi saham bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. PUSRI memberikan gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

Kebijakan Penghargaan/ Kompensasi yang Memperhitungkan Kinerja Perusahaan Jangka Panjang

PUSRI belum memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja, namun PUSRI memiliki Asuransi Purna Jabatan kepada Direksi.

SALARY RATIO

The following is information regarding the salary ratio between the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company.

The highest-ranking employee is the employee with the highest grade and highest take-home pay, which is Rp40,518,054. Meanwhile, the lowest-ranking employee is the employee with the lowest grade and lowest take-home pay, which is Rp5,629,804.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses, and Stock Options for the Board of Commissioners and Board of Directors

The structure and components of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors do not include non-performance bonuses and/or stock options for any member of the Board of Commissioners and Board of Directors. PUSRI provides salaries/honoraria and performance bonuses for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year, as determined by the Shareholders' Resolution at the Company's General Meeting of Shareholders.

Policy on Rewards/Compensation Considering the Company's Long-Term Performance

PUSRI does not yet have a policy for providing long-term performance-based compensation; however, PUSRI offers Retirement Insurance to the Board of Directors.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Organs and Committees Under the Board of Commissioners



Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maupun tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Dewan Komisaris PUSRI membentuk tiga Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan administrasi pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris juga didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada manajemen. Komite Audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta memastikan review yang memadai atas segala informasi yang dikeluarkan PUSRI.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit PUSRI dilakukan dengan mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003 dan PER-03/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

To ensure the effective and efficient implementation of its supervisory functions, duties, and responsibilities, the PUSRI Board of Commissioners has established three committees under its supervision: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Risk Management Committee. Additionally, to support the coordination and administration of the supervisory functions and duties, the Board of Commissioners is also assisted by the Secretary to the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee that assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties and providing input to management. It is one of the institutional elements within the Good Corporate Governance (GCG) framework. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System and the performance of both internal and external auditors. It also provides recommendations for improving the management control system and its implementation, identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners, and ensures adequate review of all information issued by PUSRI.

LEGAL BASIS

The establishment of the PUSRI Audit Committee is based on Law No. 19 of 2003, dated June 19, 2003, and Regulation PER-03/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit PUSRI memiliki pedoman kerja, yakni Piagam Komite Audit yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-02/DEKOM/ PUSRI/XI/2023. Piagam Komite Audit tersebut disusun dengan tujuan untuk membantu terselenggaranya tugas pengawasan dan bimbingan terhadap Direksi PUSRI oleh Dewan Komisaris secara efektif dan komprehensif sesuai dengan garis besar kebijakan pelaksanaan program Perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta membantu terciptanya interaksi yang lebih komunikatif antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Isi Piagam Komite Audit mencakup deskripsi tugas, wewenang, dan kode etik Komite Audit. Dengan isi yang komprehensif tersebut diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG serta terlaksananya tugas dan fungsi Komite Audit secara independen, profesional dan berintegritas.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris. Berikut deskripsi ringkas Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit.

1. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan alat manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung. Penilaian yang dilakukan Komite Audit meliputi penilaian atas perencanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi hasil audit yang diberikan SPI.
3. Melakukan proses seleksi terhadap calon auditor eksternal, menetapkan auditor eksternal berdasarkan hasil seleksi, melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal. Penilaian ini meliputi penelaahan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal termasuk melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan SPI serta pembahasan segala yang dianggap perlu.
4. Menilai tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5. Menilai program-program (operasi rutin maupun investasi barang modal) yang akan dan telah dilakukan oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya pada setiap program tersebut.
6. Menilai proses penyusunan budget maupun penggunaan budget sebagai alat perencana dan pengendalian atas pusat-pusat penghasilan dan biaya yang ada dalam organisasi Perusahaan.



AUDIT COMMITTEE CHARTER

The PUSRI Audit Committee operates under a work guideline, namely the Audit Committee Charter, which was ratified through the Board of Commissioners' Decree No. KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023. The Audit Committee Charter was formulated to support the Board of Commissioners in effectively and comprehensively carrying out its supervisory and advisory duties over PUSRI's Board of Directors, in alignment with the Company's program implementation policies as determined in the General Meeting of Shareholders (GMS). Additionally, it aims to foster more effective communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Audit Committee Charter outlines the committee's duties, authority, and code of ethics. With its comprehensive content, the charter is expected to establish high work standards in accordance with GCG principles and ensure that the Audit Committee performs its duties and functions independently, professionally, and with integrity.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

As stated in the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee include providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors, identifying issues that require the Board of Commissioners' attention, and carrying out other tasks related to the implementation of the Board of Commissioners' functions and duties. Below is a brief description of the Audit Committee's duties and responsibilities:

1. Ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System and the effectiveness of the performance of internal and external auditors.
2. Assessing the effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI) in performing its direct supervisory function as a management tool. This assessment includes evaluating audit planning, audit reporting, and the Board of Directors' follow-up actions on SPI's audit recommendations.
3. Conducting the selection process for external auditor candidates, appointing an external auditor based on the selection results, and evaluating the effectiveness of the external audit. This includes reviewing the independence and objectivity of the external auditor, coordinating with the external auditor and SPI, and discussing any necessary matters.
4. Assessing the Company's compliance with applicable laws and regulations.
5. Evaluating the Company's programs (routine operations and capital investments) in the short, medium, and long term, as well as the allocation and realization of resources for each program.
6. Assessing the budget preparation process and its use as a planning and control tool for the Company's revenue and cost centers.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Menilai peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasi Perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha. 8. Menilai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maupun kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi barang modal Perusahaan. 9. Menilai proses penyusunan dan penyampaian laporan (internal) hasil analisis manajemen dan informasi keuangan dan non keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di setiap lini dalam struktur organisasi Perusahaan. 10. Melakukan telaah atas usulan aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi 11. Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan Dewan Komisaris. 12. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya. 13. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, 14. Memastikan revidu yang memadai atas segala informasi yang dikeluarkan PUSRI | <ol style="list-style-type: none"> 7. Evaluating efficiency and productivity improvements in the Company's operations that impact business performance. 8. Reviewing the accounting treatment of financial transactions presented in financial statements, as well as the completeness and adequacy of accounting records for all operational and capital investment activities. 9. Assessing the preparation and submission process of internal reports, including management analysis and financial and non-financial information, required for decision-making at all levels of the Company's organizational structure. 10. Reviewing proposed corporate actions submitted by the Board of Directors. 11. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners. 12. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya. 13. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, 14. Memastikan revidu yang memadai atas segala informasi yang dikeluarkan PUSRI |
|---|---|

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga memiliki wewenang meliputi:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Audit dapat menggunakan:
 - a. Laporan atau catatan yang dibuat oleh SPI, akuntan publik, konsultan/kontraktor proyek.
 - b. Kontrak/surat perjanjian/MoU/notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham.
 - c. Brosur/proyek/forecast keuangan dan ekonomi.
 - d. Laporan keuangan berkala Perusahaan.
 - e. Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham.
 - f. Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
3. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain SPI, Komite Audit diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

Authority of the Audit Committee

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Full, unrestricted access to employee records, resources, funds, and other Company assets related to the execution of its duties.
2. Utilizing various sources in performing its work, including:
 - a. Reports or records prepared by the Internal Audit Unit (SPI), public accountants, consultants, or project contractors.
 - b. Contracts, agreements, Memorandums of Understanding (MoUs), meeting minutes, and resolutions of the Board of Directors and Shareholders.
 - c. Brochures, project documents, financial and economic forecasts.
 - d. The Company's periodic financial reports.
 - e. Correspondence documents between the Board of Directors and Shareholders.
 - f. Other relevant information, including information from third parties.
3. For any assignments requiring data and information from work units other than SPI, the Audit Committee is provided with an assignment letter signed by the entire Board of Commissioners.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari tiga orang. Salah seorang di antaranya adalah Ketua Komite yang dijabat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

The Audit Committee consists of three members, one of whom serves as the Committee Chairperson and is a member of the Board of Commissioners.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Ketua | Chairperson

Anggota | Members

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

: Sally Salamah

: Eddie Sulistiady
Bagas Putranto

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS



Sally Salamah

Ketua Komite Audit
Chairperson of Audit Committee

Kelahiran Birth	Usia Age
Cirebon, 20 April 1967	58 Tahun
Cirebon, April 20, 1967	58 Years Old

Kewarganegaraan Nationality	Domisili Domicile
Indonesia	Jakarta

Periode Jabatan Term of Office

Periode Jabatan 14 Juni 2021 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
June 14, 2021 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris

Her profile can be seen on the profile of the Board of Commissioners

Riwayat Penunjukan Appointment History

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.08/DEKOM/PUSRI/IV/2021 tanggal 14 Juni 2021.
Appointed as Chairperson of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. 08/DEKOM/PUSRI/IV/2021 dated June 14, 2021.



Eddie Sulistiady

Anggota Komite Audi
Member of Audit Committee

Kelahiran | Birth
Palembang, 28 Oktober 1962
Palembang, October 28, 1962

Usia | Age
62 Tahun
62 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang

Periode Jabatan Term of Office

Periode Jabatan 14 April 2022 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) dan pengangkatan kembali 14 April 2025 dengan masa jabatan 2 (dua) tahun
April 14, 2022 – the end of the term (3 years) and reappointment on April 14, 2025, with a term of 2 (two) years

Riwayat Penunjukan Appointment History

Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/ DEKOM/PUSRI/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
Appointed as a member of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/IV/2022 dated April 14, 2022.

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 1986
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM Tahun 2001 (S2)

Educational Background

1. State College of Accounting, 1986
2. ISM College of Economics, 2001 (Master's Degree)

Pengalaman Kerja

1. Tim Evaluasi Proyek-proyek strategis terkendala program investasi PT Angkasa Pura II tahun 2020.
2. Tim Reviu Pengadaan Kapal Pengangkut Batubara (Panamax) oleh PT Bahtera Adhiguna tahun 2020.
3. Tim Reviu Pekerjaan Pengerukan (dredging) pada PLTU oleh PT PJB – Bahtera Adhiguna tahun 2021.
4. Tim Reviu atas pemilihan mitra strategis pengembangan Bandar Udara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II tahun 2021.
5. Sebagai asesor asesmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN/ BUMD sejak tahun 2005 sd. 2021.

Work Experience

1. Evaluation Team for delayed strategic investment projects at PT Angkasa Pura II, 2020.
2. Review Team for the procurement of coal transport vessels (Panamax) by PT Bahtera Adhiguna, 2020.
3. Review Team for dredging works at PLTU by PT PJB – Bahtera Adhiguna, 2021.
4. Review Team for the selection of a strategic partner for the development of Kualanamu Airport by PT Angkasa Pura II, 2021.
5. Assessor for corporate governance implementation assessments in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) from 2005 to 2021.

Sertifikasi Keahlian

1. Certification in Audit Committee Practices (CACP)
2. Pengawasan Governance, Risk Management, Compliance Organisasi Certified GRC Oversight Professional (CGRCOP)

Professional Certifications

1. Certification in Audit Committee Practices (CACP)
2. Oversight of Governance, Risk Management, and Compliance by the Organization Certified as GRC Oversight Professional (CGRCOP)



Bagas Putranto

Anggota Komite Audi
Member of Audit Committee

Kelahiran | Birth
Jakarta, 5 Februari 1984
Jakarta, February 5, 1984

Usia | Age
41 Tahun
41 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesia
Domisili | Domicile
Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	Periode Jabatan 26 Juni 2022 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) <i>June 26, 2022 – the end of the term (3 years)</i>
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/ VI/2022 tanggal 26 Juni 2022. <i>Appointed as a member of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2022 dated June 26, 2022.</i>
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (29 Mei tahun 2005); 2. Sarjana Hukum Universitas Indonesia (12 Agustus tahun 2010); 3. Magister Administrasi Publik Universitas Nasional (10 September tahun 2020). <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bachelor's Degree in Communication Science from Muhammadiyah University of Jakarta (May 29, 2005)</i> 2. <i>Bachelor's Degree in Law from the University of Indonesia (August 12, 2010)</i> 3. <i>Master's Degree in Public Administration from National University (September 10, 2020)</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2020; 2. Anggota, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2021; 3. <i>Liaison Officer (LO), Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Member, Self-Assessment Team for Bureaucratic Reform Implementation, Cabinet Secretariat (2020)</i> 2. <i>Member, Self-Assessment Team for Bureaucratic Reform Implementation, Cabinet Secretariat (2021)</i> 3. <i>Liaison Officer (LO), Risk Management Team, Secretariat General of the Judicial Commission (2023)</i>
Sertifikasi Keahlian Professional Certifications	Certified Risk Professional (CRP) Certification in Audit Committee Practices (CACP)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan operasional. Baik ketua maupun anggota Komite Audit adalah independen terhadap Direksi, auditor internal maupun auditor eksternal.

Independensi Ketua dan Anggota Komite Audit dijalankan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Piagam Komite Audit. Untuk memenuhi syarat independensi, maka anggota Komite Audit tidak ditunjuk dari anggota eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir.

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Pernyataan Independensi Statement of Independence	Sally Salamah	Eddie Sulistiady	Bagas Putranto
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir Not an insider of a Public Accounting Firm, Law Consultant Office, Public Appraisal Service Office, or any other party providing insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consulting services to PUSRI within the last six months.	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen) Not an individual who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PUSRI's activities within the last six months (except for the Independent Commissioner).	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI Does not own either direct or indirect shares in PUSRI.	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI Family members do not own either direct or indirect shares in PUSRI.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or PUSRI's Major Shareholders.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI Has no direct or indirect business relations related to PUSRI's business activities.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/ atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah Does not serve as a political party official and/or a candidate/member of the legislature and/or a candidate or incumbent regional head/deputy regional head.	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI Does not hold any other position that may create a conflict of interest related to the position at PUSRI.	√	√	√

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee collectively possesses expertise and experience in accounting, finance, and operations. Both the Chairperson and members of the Audit Committee are independent of the Board of Directors, internal auditors, and external auditors.

The independence of the Chairperson and members of the Audit Committee is maintained in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Audit Committee Charter. To fulfill the independence requirements, members of the Audit Committee are not appointed from executive members of a Public Accounting Firm that has provided audit and/or non-audit services to the Company within the past six months.

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Concurrent Positions of Audit Committee Members

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
1	Eddie Sulistiady	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.
2	Bagas Putranto	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Ultimate and Controlling Shareholders.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Realisasi Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Berikut rekapitulasi kehadiran agenda rapat dan kehadiran dalam rapat-rapat yang diselenggarakan tersebut.

Jumlah dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Number and Attendance Rate of Audit Committee Meetings

No	Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
1	Sally Salamah	12	12	100
2	Eddie Sulistiady	12	12	100
3	Bagas Putranto	12	12	100

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, mencakup: rapat-rapat Komite, baik yang dilakukan Bersama Dewan Komisaris maupun rapat bersama dengan Direksi dan Komisaris, juga beberapa agenda kegiatan Komite Audit lainnya.

Selama tahun 2024 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya, yaitu:

- Memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
- Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal,
- Menilai efektivitas kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI)
- Melakukan proses seleksi terhadap calon auditor eksternal, menetapkan auditor eksternal berdasarkan hasil seleksi.
- Menilai tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- Menilai program-program (operasi rutin maupun investasi pengembangan) yang akan dan telah dilakukan oleh

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Audit Committee Meeting Policy

The Audit Committee holds regular meetings at least once a month to carry out its duties and responsibilities.

Audit Committee Meeting Realization

Throughout 2024, the Audit Committee held a total of 12 meetings. The following is a summary of meeting agendas and attendance at the meetings conducted.

SUMMARY REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2024, the Audit Committee has carried out its duties in accordance with its functions and responsibilities, including Committee meetings—both with the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors and Commissioners—as well as several other Audit Committee activities.

Throughout 2024, the Audit Committee has carried out its duties:








- Monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System.
- Ensuring the effective execution of the external auditor's duties.
- Assessing the performance effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI).
- Conducting the selection process for prospective external auditors and appoint external auditors based on the selection results.
- Evaluating the Company's compliance with applicable laws and regulations.
- Assessing the programs (routine operations as well as development investments) planned and implemented by the

Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya pada setiap program tersebut.

7. Menilai proses penyusunan budget maupun penggunaan budget sebagai alat perencana dan pengendalian atas pusat-pusat penghasilan dan biaya yang ada dalam organisasi Perusahaan.
8. Menilai peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasi Perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha.
9. Menilai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maupun kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi barang modal Perusahaan.
10. Menilai proses penyusunan dan penyampaian laporan (internal) hasil analisis manajemen dan informasi keuangan dan non keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di setiap lini dalam struktur organisasi Perusahaan.
11. Melakukan telaah atas usulan aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi
12. Evaluasi terhadap Kinerja Perusahaan.
13. Evaluasi terhadap Kinerja Eksternal Auditor (KAP).
14. *Sharing Session* dan sebagai Narasumber dalam rangka meningkatkan kapabilitas SPI PT Pusri Palembang, berbagai topik bahasan antara lain: Audit Berbasis Risiko, Audit Ketahanan Pangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Probitas Audit, IACM, GCG, GRC, Manajemen Risiko, dll.
15. Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan Dewan Komisaris.
16. Eviden:
 - a. Melakukan rapat kinerja SPI bulanan dengan SVP SPI dan staf sebanyak 12 (dua belas) kali (realisasi 100% dari rencana);
 - b. Melakukan rapat kinerja Perusahaan bulanan dengan SVP/setingkat sebanyak 12 (dua belas) kali (realisasi 100% dari rencana);
 - c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perusahaan setiap bulan kepada Komisaris Utama sebanyak 12 (dua belas) kali (realisasi 100%).
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan I, semester I, triwulan III dan tahunan kegiatan Komite Audit kepada Komisaris Utama sebanyak 4 (empat) kali (realisasi 100% dari rencana);
 - e. Menyampaikan hasil telaah atas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan 2024.
 - f. Laporan hasil telaah atas usulan aksi korporasi
 - g. Mengevaluasi tindak lanjut hasil audit pemeriksa eksternal seperti KAP dan BPK-RI melalui hasil pemantauan SPI;
 - h. Membahas dan memberikan masukan kepada SPI dalam rangka penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI 2025;
 - i. Menyusun dan menyampaikan analisa Draft RKAP 2025 bersama Komite Investasi & MR kepada Komisaris Utama;

Company in the short, medium, and long term, including the allocation and realization of resource usage for each program.

7. Evaluate the budget preparation process as well as the budget usage as a planning and control tool over the revenue and cost centers within the Company's organization.
8. Assess improvements in the efficiency and productivity of the Company's operational activities that affect business results.
9. Evaluate the accounting treatment of financial transactions presented in the financial statements, as well as the completeness and adequacy of accounting records for each operational activity and capital investment of the Company.
10. Assess the process of preparing and delivering (internal) reports on management analysis and financial and non-financial information needed for decision-making at every level within the Company's organizational structure.
11. Review proposals for corporate actions submitted by the Board of Directors.
12. Evaluate the Company's performance.
13. Evaluate the performance of the External Auditor (Public Accounting Firm).
14. Conduct Sharing Sessions and act as a resource person to enhance the capabilities of PT Pusri Palembang's Internal Audit Unit (SPI), covering various topics including Risk-Based Auditing, Food Security Auditing, Procurement of Goods and Services, Probitas Audit, IACM, GCG, GRC, Risk Management, etc.
15. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners.
16. Evidence:
 - a. Conducting monthly performance meetings of the Internal Audit Unit (SPI) with the Senior Vice President (SVP) of SPI and staff 12 (twelve) times (100% realization of the plan).
 - b. Conducting monthly company performance meetings with the SVP or equivalent 12 (twelve) times (100% realization of the plan).
 - c. Submitting company performance evaluation reports to the President Commissioner 12 (twelve) times per month (100% realization).
 - d. Preparing and submitting quarterly I, semester I, quarterly III, and annual reports on the activities of the Audit Committee to the President Commissioner 4 (four) times (100% realization of the plan).
 - e. Submitting the review results of the Company's Internal Control System for 2024.
 - f. Reporting the review results on proposed corporate actions.
 - g. Evaluating the follow-up on audit findings from external auditors such as Public Accounting Firms (KAP) and the Audit Board of Indonesia (BPK-RI) based on monitoring results from the Internal Audit Unit (SPI).
 - h. Discussing and provide input to SPI in the preparation of the 2025 Annual Supervision Work Program (PKPT) of SPI.
 - i. Preparing and submitting the analysis of the 2025 Draft Work Plan and Budget (RKAP) together with the Investment & MR Committee to the President Commissioner.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- j. Menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - k. Menghadiri rapat pengadaan jasa akuntan publik PT. Pupuk Indonesia Grup tahun buku 2024;
 - l. Rapat-rapat progres pelaksanaan audit KAP;
 - m. Rapat-rapat progres pelelangan dan persiapan project Pusri-IIIb;
17. Site visit fisik Rencana Aksi Korporasi dan Current Issues (Gudang Penyediaan Pupuk, program Marketing Support, Agrosolution & Demplot, Permasalahan Kartu Tani, dan sebagainya).
- j. Attending the socialization of the Ministry of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
 - k. Attending meetings for the procurement of public accountant services for PT Pupuk Indonesia Group for the 2024 fiscal year;
 - l. Meetings on the progress of the Public Accounting Firm (KAP) audit implementation;
 - m. Meetings on the progress of the tender process and preparations for the Pusri-IIIb project;
17. Conducted physical site visits for the Corporate Action Plan and Current Issues (Fertilizer Supply Warehouse, Marketing Support Program, Agrosolution & Demonstration Plots, Farmer Card Issues, and others).

PENCAPAIAN KPI KOMITE AUDIT

Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun buku. Rencana kerja tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar evaluasi atas kinerja Komite. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit pada tahun 2024 masuk kategori "Sangat Baik".

Selain penilaian dari Dewan Komisaris, Komite Audit juga melakukan penilaian mandiri. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Hasil Self Assessment Kinerja Komite Audit Tahun 2024

Results of the 2024 Audit Committee Performance Self-Assessment

No.	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	
		Rencana Plan	Hasil Result
1	Melakukan rapat kinerja SPI bulanan dengan SVP SPI dan staf Conducting monthly SPI performance meetings with the SVP of SPI and staff.	12 kali 12 times	12
2	Melakukan rapat kinerja Perusahaan bulanan dengan Para SVP/VP setingkat Conducting monthly company performance meetings with SVPs/VPs or equivalent positions.	12 kali 12 times	12
3	Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris Attending Internal Meetings of the Board of Commissioners.	12 kali 12 times	12
4	Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi kinerja Perusahaan bulanan kepada Komisaris Utama Preparing and submitting the Company's monthly performance evaluation report to the President Commissioner.	12 kali 12 times	12
5	Melakukan <i>self assessment</i> kinerja/ aktivitas Komite Audit triwulan IV / tahun 2022 Conducting a self-assessment of the performance/activities of the Audit Committee for the fourth quarter/year 2022.	1 kali 1 time	1

ACHIEVEMENT OF THE AUDIT COMMITTEE KPI

Performance Assessment of the Audit Committee by the Board of Commissioners

The performance assessment of the Audit Committee is conducted by the Board of Commissioners. The evaluation is based on the work plan prepared at the beginning of the fiscal year. This work plan is established by the Board of Commissioners as the basis for evaluating the Committee's performance. Based on these considerations, the Board of Commissioners has assessed the Audit Committee's performance in 2024 as falling under the "Excellent" category.

In addition to the assessment by the Board of Commissioners, the Audit Committee also conducts a self-assessment. The details are presented in the table below.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) adalah komite penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu pekerjaan Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PUSRI membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada 14 September 2020 yang dikuatkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-09/DEKOM/ PUSRI/IX/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan upaya Perusahaan untuk menjaga independensi dan keterbukaan/ transparansi dalam proses pembentukan talent pegawai, pengangkatan pejabat serta pengkajian dan pengusulan remunerasi manajemen PUSRI.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PUSRI adalah:

1. POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagai wujud upaya menjaga independensi setiap anggota Komite, masing-masing anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris memberikan pernyataan independensi. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menyatakan bahwa mereka:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen)
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI
4. Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) is a supporting committee of the Board of Commissioners tasked with assisting the Board of Commissioners in overseeing the implementation of nomination and remuneration policies for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with applicable regulations.

PUSRI established the Nomination and Remuneration Committee on September 14, 2020, as formalized by the Board of Commissioners' Decree No. KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The formation of this committee reflects the Company's commitment to maintaining independence and transparency in the employee talent development process, the appointment of officials, as well as the review and proposal of PUSRI's management remuneration.

LEGAL BASIS


The legal basis for the establishment of PUSRI's Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.


INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

As part of the effort to maintain the independence of each Committee member, all members of the Board of Commissioners' Supporting Committees provide an independence statement. Each member of the Nomination and Remuneration Committee declares that they:


1. Are not insiders of a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Office, or any other party providing insurance, non-insurance, appraisal, and/or other consulting services to PUSRI within the last six months.
2. Are not individuals who have worked for or held authority and responsibility in planning, leading, controlling, or supervising PUSRI's activities within the last six months (except for Independent Commissioners).
3. Do not own, either directly or indirectly, any shares in PUSRI.
4. Do not have family members who own, either directly or indirectly, any shares in PUSRI.
5. Have no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or PUSRI's Major Shareholders.

- 
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI
 7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah
 8. Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI.


PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI





Komite Nominasi dan Remunerasi PUSRI memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023.



Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup tentang petunjuk dan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Risiko serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dengan demikian, diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sehingga akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.



PUSRI menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*. Isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup:

- 
- 
1. Struktur Organisasi
 2. Persyaratan Keanggotaan
 3. Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangan
 4. Rapat
 5. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
 6. Penilaian Kinerja

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengatur tugas dan tanggung jawab Komite sebagai berikut:

Tanggung Jawab

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas
 - b. Laporan triwulan pelaksanaan tugas
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite
3. Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari eksternal maupun internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

6. Have no business relationships, either directly or indirectly, related to PUSRI's business activities.
7. Do not serve as officials of a political party and/or candidates/ members of the legislature and/or candidates or incumbents for regional head or deputy regional head positions.
8. Do not hold any other position that could create a conflict of interest concerning their role at PUSRI.

CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PUSRI's Nomination and Remuneration Committee operates under the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was ratified through the Board of Commissioners' Decree No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023.

The Nomination and Remuneration Committee Charter provides guidelines and work directives for the Committee, outlining structured, systematic, easily understandable, and consistently applicable procedures. This document serves as a reference for the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission, ensuring high work standards in alignment with GCG principles.

PUSRI has developed the Nomination and Remuneration Committee Charter based on corporate legal principles, the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, shareholder directives, and best practices in Good Corporate Governance. The contents of the Charter, which govern the implementation of the Committee's duties, include:

1. Organizational Structure
2. Membership Requirements
3. Responsibilities, Duties, and Authorities
4. Meetings
5. Education and Supporting Personnel
6. Performance Assessment

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee Charter has set out the duties and responsibilities of the Committee as follows:

Responsibilities

1. The Committee is accountable to the Board of Commissioners.
2. Accountability to the Board of Commissioners is presented through the following reports:
 - a. Annual report on the implementation of duties
 - b. Quarterly report on the implementation of duties
 - c. Report for each specific task assigned to the Committee
3. The Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both externally and internally, and ensuring they are used solely to carry out its duties.

4. Laporan Komite ditandatangani Ketua dan Anggota Komite.

Tugas

1. Secara kolektif dalam pelaksanaan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Tugas terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Tugas terkait fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan, Komisaris dan Direksi anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Mengevaluasi kebijakan remunerasi.
 - d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
 - e. Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Risiko juga memiliki wewenang meliputi:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung serta kantor yang digunakan oleh Perusahaan.
2. Berhak mendapatkan dan meminta setiap hasil kajian nominasi dan remunerasi yang dilakukan baik oleh para risk owner, para pejabat struktural terkait, risk champion, SPI maupun Direksi Perusahaan.
3. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

4. The Committee's reports are signed by the Chairperson and Members of the Committee.

Duties

1. Collectively assists the Board of Commissioners in carrying out its duties.
2. Acts independently in performing its duties, preparing reports, and is accountable to the Board of Commissioners.
3. Duties related to the nomination function:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - The composition of positions for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - Policies and criteria required in the nomination process.
 - Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on established benchmarks as evaluation material.
 - c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity-building programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - d. Propose qualified candidates for the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the GMS.
4. Duties related to the remuneration function:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for the Board of Directors of the Company, as well as the Board of Commissioners and Board of Directors of subsidiaries.
 - b. Develop and recommend the system and procedures for the selection and/or replacement of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners.
 - c. Evaluate remuneration policies.
 - d. Identify matters requiring attention from the Board of Commissioners and other assigned duties.
 - e. Carry out special assignments from the Board of Commissioners, provided they do not conflict with applicable laws and regulations.

Authority of the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee also has the authority to:

1. Access records or information related to assets and other resources, as well as enter company premises, buildings, and offices used by the Company.
2. Obtain and request any nomination and remuneration review results conducted by risk owners, relevant structural officials, risk champions, the Internal Audit Unit (SPI), or the Company's Board of Directors.
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any matters related to the Company's management.

4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini risk owner, para pejabat struktural terkait SDM, organisasi serta SPI Perusahaan.
5. Melakukan review, memeriksa, melakukan analisis dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
6. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
7. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.



KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite serta memiliki pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.



MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Dewan Komisaris adalah mengikuti masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris Perusahaan. Sementara itu, apabila terdapat anggota komite yang bukan merupakan Dewan Komisaris diatur sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



4. Collaborate with relevant work units, including risk owners, HR-related structural officials, organizational units, and the Internal Audit Unit (SPI), in exercising its authority.
5. Review, examine, analyze, and provide opinions and recommendations within the scope of its duties.
6. Seek and obtain unrestricted access to relevant information from the Management Information System (MIS), reports, as well as from any member of the Board of Directors, employees, individuals, or relevant resource persons.
7. Invite management to attend Committee meetings.

QUALIFICATIONS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

Referring to the Nomination and Remuneration Committee Charter, members of the Committee must meet the following requirements:

1. Possess high integrity, adequate competence, knowledge, and work experience in the Committee's areas of responsibility, as well as an understanding of the Company's business scope.
2. Have no personal interests or affiliations that could negatively impact the Company or create conflicts of interest.
3. Be able to allocate sufficient time to fulfill their duties.
4. Demonstrate strong collaboration and communication skills, both effectively and efficiently.

TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who are also members of the Board of Commissioners follows their tenure as Commissioners of the Company. Meanwhile, for committee members who are not part of the Board of Commissioners, their term of office is regulated in accordance with the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Siti Nurizka Puteri Jaya	Ketua Chairperson	KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2024
Prahero Yulijanto Nutjahyo	Anggota Member	KEP-05/DEKOM/PUSRI/VI/2022
Ali Jamil	Anggota Member	KEP-02/DEKOM/PUSRI/I/2022
Sally Salamah	Anggota Member	KEP-09/DEKOM/PUSRI/VI/2021
Bambang Supriyambodo	Anggota Member	KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020
Fadjar Judisiawan	Anggota Member	KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024
Rifky Zul Fauzan	Anggota Member	KEP-12/DEKOM/PUSRI/XII/2024

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE



Siti Nurizka Puteri Jaya

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairperson of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
Term of Office 13 Juni 2024 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
June 13, 2024 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan
Appointment History KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2024



Prahoro Yulijanto Nurtjahyo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
Term of Office 25 September 2020 – 13 April 2025
September 25, 2020 – April 13, 2025

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan
Appointment History KEP-05/DEKOM/PUSRI/VI/2022



Ali Jamil

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan 10 Januari 2022 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
Term of Office January 10, 2022 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan KEP-02/DEKOM/PUSRI/I/2022
Appointment History



Sally Salamah

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan 15 Juni 2021 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
Term of Office June 15, 2021 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan KEP-09/DEKOM/PUSRI/VI/2022
Appointment History



Bambang Supriyambodo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan 25 September 2020 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
Term of Office September 25, 2020 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020
Appointment History



Fadjar Judisiawan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan 18 Maret 2024 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
Term of Office March 18, 2024 – the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan
Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024
Appointment History




Rifky Zul Fauzan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Kelahiran Birth	Usia Age
Bandung 12 September 1988	37 Tahun
Bandung September 12, 1988	37 Years Old
Kewarganegaraan Nationality	Domisili Domicile
Indonesian	Jakarta

Periode Jabatan 10 Desember 2024 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun)
Term of Office December 10, 2024 – the end of the term (3 years)

Riwayat Penunjukan KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024
Appointment History

Riwayat Pendidikan Taylors University Malaysia, Business Management
Educational Background

Pengalaman Kerja
Work Experience

1. Managing Director Golden Andalas Techno
2. Marketing Manager Visa Worldwide Indonesia
3. Head of PR & Marcomm BRI Insurance
4. Head of Marketing Allyoung International Indonesia

Sertifikasi Keahlian
Professional Certifications

1. Circular Economies & Busines Strategies, Cambridge Judge Business School
2. Digital Transformation Organization, Boston Consulting Group



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PUSRI senantiasa mendorong peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pendidikan dan Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun buku disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

RAPAT DAN KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite yang paling senior masa keanggotaannya, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite. Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir. Komite mengadakan rapat koordinasi dengan struktural manajemen SDM dan organisasi sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat internal Komite sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PUSRI continuously encourages the enhancement of the Nomination and Remuneration Committee's competencies through various training and educational programs, with full funding provided by the Company. The training and education programs undertaken by the Nomination and Remuneration Committee during the fiscal year are presented in the "Company Profile" chapter.

MEETINGS AND MEETING POLICIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee meetings are held regularly, at least as frequently as the minimum meeting requirements of the Board of Commissioners. The meetings are chaired by the Committee Chair or the longest-serving Committee member if the Chair is unavailable. If deemed necessary, the Committee may invite relevant management representatives to attend the meetings. Each Committee meeting is documented in meeting minutes, which are signed by all attending members. Additionally, the Committee holds coordination meetings with the Human Resources and Organizational Management structure at least once every three months.

FREQUENCY OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 12 (twelve) internal committee meetings, with the attendance rate as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absence	Kehadiran (%) Attendance (%)
Setya Utama*	Ketua Chairperson	4	4	0	100
Siti Nurizka Puteri Jaya**	Ketua Chairperson	7	7	0	100
Ali Jamil	Anggota Member	12	8	4	66
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo	Anggota Member	12	9	3	75
Bambang Supriyambodo	Anggota Member	12	10	2	83
Sally Salamah	Anggota Member	12	12	0	100
Fadjar Judisiawan***	Anggota Member	10	9	1	90
Rifky Zul Fauzan****		1	1	0	100

*) Menjabat sampai tanggal 15 Mei 2024

***) Menjabat sejak tanggal 10 Juni 2024

****) Menjabat sejak tanggal 4 Maret 2024

*****) Menjabat sejak tanggal 10 Desember 2024

*) Served until May 15, 2024

***) Serving since June 10, 2024

****) Serving since March 4, 2024

*****) Serving since December 10, 2024

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

IMPLEMENTATION OF DUTIES BY THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

Sepanjang 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi Komite antara lain:

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its functions, including:

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency		Keterangan Remarks	
		Rencana Plan	Realisasi Realization		
1	Melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Conducting Meetings of the Nomination and Remuneration Committee	12 kali 12 times	12 kali 12 times	Pelaksanaan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> 31 Januari 2024 27 Februari 2024 28 Maret 2024 30 April 2024 31 Mei 2024 23 Juni 2024 23 Juli 2024 23 Agustus 2024 23 September 2024 24 Oktober 2024 22 November 2024 23 Desember 2024 	Meeting Dates: <ul style="list-style-type: none"> January 31, 2024 February 27, 2024 March 28, 2024 April 30, 2024 May 31, 2024 June 23, 2024 July 23, 2024 August 23, 2024 September 23, 2024 October 24, 2024 November 22, 2024 December 23, 2024
2	Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris Attending Internal Board of Commissioners Meetings	12 kali 13 times	12 kali 12 times	Pelaksanaan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> 31 Januari 2024 27 Februari 2024 28 Maret 2024 30 April 2024 31 Mei 2024 23 Juni 2024 23 Juli 2024 23 Agustus 2024 23 September 2024 24 Oktober 2024 22 November 2024 20 Desember 2024 	Meeting Dates: <ul style="list-style-type: none"> January 31, 2024 February 27, 2024 March 28, 2024 April 30, 2024 May 31, 2024 June 23, 2024 July 23, 2024 August 23, 2024 September 23, 2024 October 24, 2024 November 22, 2024 December 20, 2024
3	Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Prepare and submit the Report on Task Implementation	4 Laporan 4 Report	4 Laporan 4 Report	<ul style="list-style-type: none"> Laporan TW I 2024 Laporan TW II 2024 Laporan TW III 2024 Laporan s/d TW IV 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Report for Q1 2024 Report for Q2 2024 Report for Q3 2024 Report up to Q4 2024
4	Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait Nominasi dan Remunerasi Evaluate the Board of Directors' proposals related to Nominations and Remuneration	100%	100%	Telaah atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 Review of the Remuneration Proposals for the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2024.	
5	Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait Nominasi dan Remunerasi Conduct evaluations of the Board of Directors' proposals related to Nomination and Remuneration.	100%	100%	Telaah atas Usulan Jasop Karyawan Tahun 2023 Review of the Employee Service Fee Proposal for the Year 2023.	
6	Melakukan <i>Self Assessment</i> Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Conduct a Self-Assessment of the Nomination and Remuneration Committee's Performance.	1 kali 1 times	1 kali 1 times	Pelaksanaan Desember 2024 Implementation in December 2024	

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI OLEH DEWAN KOMISARIS



Penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja, terutama berkenaan dengan pembentukan talent management yang oleh Dewan Komisaris dinilai sangat strategis, karena dapat menjaga kelangsungan pengelolaan PUSRI di masa datang. Strategi tersebut merupakan upaya mempersiapkan talenta dalam proses regenerasi pimpinan di berbagai level. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024 masuk kategori "Sangat Baik".



KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI



Mengacu pada peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, PUSRI menerapkan kebijakan suksesi Direksi sebagai langkah mempersiapkan dan melanjutkan regenerasi kepemimpinan di masa depan. Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.



PUSRI juga memiliki program *Talent Management System* yang bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk menempati posisi-posisi kunci di Perusahaan, meningkatkan motivasi karyawan untuk berkompetisi secara sehat, mengembangkan karyawan tepat pada sasaran dan sesuai kebutuhan Perusahaan serta mempertahankan dan memberdayakan talent terbaik. Program *Talent Management System* mempersiapkan Pejabat Eselon I sebagai kandidat Direksi sebagaimana tergambar dalam struktur Program Talent Management System di bawah ini:



KARYAWAN ESELON I ECHELON I OFFICERS

Program pengembangan talent yang berada di Eselon I untuk dipersiapkan sebagai kandidat Direksi

Talent development program for Echelon I to be equipped as candidate for Directors

KARYAWAN ESELON II ECHELON II OFFICERS

Program pengembangan talent yang berada di Eselon II untuk dipersiapkan sebagai kandidat Eselon I

Talent development program for Echelon II to be equipped as candidate for Echelon I

KARYAWAN ESELON III ECHELON III OFFICERS

Program pengembangan talent yang berada di Eselon III untuk dipersiapkan sebagai kandidat Eselon II

Talent development program for Echelon III to be equipped as candidate for Echelon II

KARYAWAN ESELON IV ECHELON IV OFFICERS

Program pengembangan talent yang berada di Eselon IV untuk dipersiapkan sebagai kandidat Eselon III, termasuk para talent yang berasal dari Program Management Trainee

Talent development program for Echelon IV to be equipped as candidate for Echelon III, including talents from management trainee program

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Nomination and Remuneration Committee is assessed by the Board of Commissioners. The basis for this assessment is the work plan, particularly related to talent management development, which the Board of Commissioners considers to be very strategic, as it ensures the continuity of PUSRI's management in the future. This strategy is an effort to prepare talent for leadership regeneration at various levels. Based on this consideration, the Board of Commissioners has assessed the performance of the Nomination and Remuneration Committee in 2024 as "Excellent."

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Referring to the Ministry of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, PUSRI implements a Board of Directors succession policy as a step to prepare and continue leadership regeneration in the future. This also serves as an effort to establish a transparent, accountable, and responsible process and mechanism for the selection and replacement of Board of Directors members.

PUSRI also has a Talent Management System program aimed at preparing future leaders to fill key positions within the Company, enhancing employee motivation for healthy competition, developing employees in alignment with the Company's needs, and retaining and empowering the best talent. The Talent Management System program prepares Echelon I Officials as candidates for the Board of Directors, as shown in the structure of the Talent Management System program below:

Adapun langkah-langkah *talent management* yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan talent pada unit kerja/proyek atau jabatan tertentu berdasarkan:
 - a. Strategi Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Perencanaan Perusahaan dan struktur organisasi.
 - c. Posisi kunci di unit kerja (struktural dan fungsional).
 - d. *Job Family*.
 - e. Usia karyawan.
2. *Talent Acquisition* merupakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan perencanaan kebutuhan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Seleksi ini dilakukan dengan cara memetakan penilaian terhadap Kinerja dan *Core Values* dengan Kompetensi dan *Learning Agilities*. Dari seleksi yang dilakukan akan terpilih Talent Shortlist dan *Talent Longlist* yang selanjutnya akan mengikuti program pengembangan Talent yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Talent Development, dengan cara:
 - a. Penugasan, yaitu program pengembangan yang bertujuan memperkaya pengalaman dan wawasan talent (*enrichment jobs*) dengan menugaskan/ menempatkan talent pada jabatan-jabatan khusus, proyek, tim, penugasan antar anak Perusahaan PIHC, dan penugasan lainnya.
 - b. Program pengembangan pengetahuan keterampilan dan wawasan berupa: tugas belajar, bantuan beasiswa, dan/atau program pelatihan khusus talent.
 - c. *Fast-track career-path*, yaitu suatu jalur karier cepat yang disediakan khusus untuk para talent.
4. *Talent Mobility* yang merupakan pergerakan karyawan dari suatu *Job Family*/Fungsi ke *Job Family*/Fungsi lainnya dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
5. *Talent Retention* merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong karyawan agar berkinerja secara maksimal dan memiliki *engagement* yang tinggi serta dapat menurunkan *turnover* karyawan. *Talent retention* diberikan kepada para talent guna meningkatkan motivasi dan loyalitas terhadap Perusahaan yang berupa serangkaian rencana pengembangan.

Sementara itu, proses seleksi calon Direksi dibagi ke dalam empat tahap yakni pembentukan tim evaluasi, proses penjurangan, proses penilaian, dan proses penetapan. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pembentukan Tim Evaluasi

1. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau lembaga profesional untuk melakukan penilaian, jika diperlukan.
2. Tim Evaluasi melakukan penjurangan dan penilaian terhadap Calon Direksi.
3. Tim Evaluasi menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) guna mendapatkan penetapan.

The talent management steps implemented by the Company are as follows:

1. The Company identifies the talent needs in work units/projects or specific positions based on:
 - a. The Company's short-term and long-term strategies.
 - b. The Company's planning and organizational structure.
 - c. Key positions in the work unit (structural and functional).
 - d. Job Family.
 - e. Employee age.
2. Talent Acquisition is the process of recruiting and selecting employees to fulfill staffing needs in accordance with the organizational structure and workforce planning, aimed at supporting the achievement of the company's objectives. This selection is conducted by mapping assessments of Performance and Core Values against Competencies and Learning Agilities. From this selection process, a Talent Shortlist and Talent Longlist are identified, who will then participate in the Talent development programs established by the company.
3. Talent Development, through the following methods:
 - a. Assignment, which is a development program aimed at enriching the experience and knowledge of talent (*enrichment jobs*) by assigning/placing talent in special positions, projects, teams, assignments between subsidiaries of PIHC, and other assignments.
 - b. Knowledge, skills, and insights development programs, including study assignments, scholarship assistance, and/or special training programs for talent.
 - c. Fast-track career path, a dedicated fast-track career route specifically provided for talent.
4. Talent Mobility refers to the movement of employees from one Job Family/Function to another, carried out in accordance with established guidelines.
5. Talent Retention is a process conducted by the company to encourage employees to perform at their best, maintain high engagement, and reduce employee turnover. Talent retention initiatives are provided to talents to enhance their motivation and loyalty to the company through a series of development plans.

Meanwhile, the selection process for prospective Directors is divided into four stages: the formation of the evaluation team, the screening process, the assessment process, and the appointment process. These stages are explained as follows.

Formation of the Evaluation Team

1. The Evaluation Team appoints experts or professional institutions to conduct assessments, if necessary.
2. The Evaluation Team conducts screening and assessments of the prospective Directors.
3. The Evaluation Team determines the final evaluation results to be submitted to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) for approval.

- Tim Evaluasi menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) guna disampaikan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.



Proses Penjaringan

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal calon Direksi dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun daftar bakal calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- Tim Evaluasi menyerahkan daftar bakal calon (*long list*) kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperoleh persetujuan.



Proses Penilaian

- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan wawancara bakal calon Direksi yang namanya tercantum dalam daftar bakal calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai calon Direksi.
- Tim Evaluasi melakukan menyampaikan daftar calon (*short list*) kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menetapkan calon Direksi terpilih.



Proses Penetapan

- Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) calon Direksi terpilih untuk jabatan anggota Direksi.
- Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan calon Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan menjadi anggota Direksi.



Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai anggota Direksi Perusahaan.

- The Evaluation Team prepares the final evaluation results, which have been approved by the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero), to be submitted by the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to the Board of Commissioners and/or the Minister of State-Owned Enterprises, if required.

Screening Process

- The Evaluation Team receives proposals and gathers information on potential Director candidates from various sources.
- The Evaluation Team conducts a selection based on the criteria and administrative requirements set (CVs, other documents, and information received) to compile a long list of at least five (5) candidates for each position on the Board of Directors.
- The Evaluation Team submits the long list of candidates to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) for approval.

Assessment Process

- The Evaluation Team assesses the CVs and conducts interviews with the potential Director candidates listed in the long list that has been approved by the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to select the best candidates to be proposed to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) as potential Directors.
- The Evaluation Team submits the short list of candidates to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to finalize the selection of the chosen Director candidates.

Establishment Process

- The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) conducts the final evaluation of the assessment results to select one (1) chosen Director candidate for the Director position.
- The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) submits the selected Director candidate to be appointed at the AGMS of the subsidiary to become a member of the Board of Directors.

The Shareholders' decision, whether during the AGMS or outside the AGMS, appoints the selected Director candidate as a member of the Company's Board of Directors.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, bahwa jumlah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) komite, yaitu komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan komite lainnya jika diperlukan. Implementasi saat ini di PUSRI telah terbentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan bahwa PUSRI telah memenuhi ketentuan jumlah maksimal komite yang ditetapkan.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-12/DEKOM/ PUSRI/ II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada beberapa peraturan, meliputi:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

PIAGAM KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko PUSRI memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko terbaru yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-4/DEKOM/ PUSRI/XII/2023. Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko mencakup tentang petunjuk dan pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dengan demikian, diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sehingga akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Based on the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the number of committees established by the Board of Commissioners consists of three (3) committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Risk Management Committee—or other nomenclatures with the same functions—and other committees if necessary. Currently, PUSRI has established the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Investment and Risk Management Committee, considering that PUSRI has complied with the maximum number of committees stipulated.

The Investment and Risk Management Committee is structurally accountable to the Board of Commissioners. The committee was formed by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-12/DEKOM/PUSRI/II/2012 dated February 28, 2012, concerning the establishment of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

LEGAL BASIS

The establishment of the Investment and Risk Management Committee is guided and based on several regulations, including:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 regarding the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises,
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

CHARTER OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The PUSRI Investment and Risk Management Committee has a working guideline in the form of the Investment and Risk Management Committee Charter, which was approved through the Board of Commissioners Decree No. KEP-4/DEKOM/ PUSRI/XII/2023. The Charter outlines the guidelines and work procedures for the Investment and Risk Management Committee, detailing the stages of activities in a structured, systematic, easily understandable, and consistent manner. This document is expected to serve as a reference for the Investment and Risk Management Committee in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission, thereby attaining high work standards in alignment with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

PUSRI menyusun Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*Good Corporate Governance*). Isi dari Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko mencakup:

1. Tugas, Wewenang, dan Kode Etik
2. Rapat Komite
3. Tanggung jawab Pelaporan
4. Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
5. Kualifikasi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
6. Jangka Waktu Masa Jabatan

PUSRI has developed the Investment and Risk Management Committee Charter based on the principles of corporate law, the Articles of Association, applicable laws and regulations, Shareholder directives, and best practices (*Good Corporate Governance*). The content of the Charter, which governs the execution of the Committee's tasks, includes:

1. Tasks, Authorities, and Code of Ethics
2. Committee Meetings
3. Reporting Responsibilities
4. Investment and Risk Management Committee Membership
5. Qualifications of Investment and Risk Management Committee Members
6. Term of Office

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Mengacu pada Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko, berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Melakukan analisis dan evaluasi rencana investasi dan pengembangan, risiko usaha, dan asuransi Perusahaan.
2. Memberikan kajian secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap kebijakan investasi yang telah digariskan dan petunjuk pelaksanaannya termasuk tingkat risiko dari setiap investasi.
3. Mengevaluasi secara periodik mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi Perusahaan.
4. Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perusahaan.
5. Menetapkan, memperbaharui, menyempurnakan kebijakan manajemen risiko di Perusahaan.
6. Melakukan identifikasi potensi seluruh risiko sehubungan dengan kegiatan Perusahaan dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.
7. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
8. Melakukan pengawasan atas kegiatan Unit Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko.
9. Melakukan pengawasan atas rekomendasi Komite Investasi dan Manajemen Risiko oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
10. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan RJPP termasuk usulan rencana investasi.
11. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan- laporan yang akan dipublikasikan melalui diskusi bersama dengan manajemen.
12. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting di lingkungan Perusahaan dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.
13. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
14. Melakukan telaah atas aksi korporasi yang diusulkan oleh Direksi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Referring to the Charter of the Investment and Risk Management Committee, the following are the duties and responsibilities:

1. Conduct analysis and evaluation of investment and development plans, business risks, and the Company's insurance.
2. Provide periodic assessments of the investment activities carried out by the Company, including compliance with the outlined investment policies and their implementation guidelines, as well as the risk levels associated with each investment.
3. Periodically evaluate the financing and profitability of the Company's investment activities.
4. Review the effectiveness of the established investment guidelines for the Company's investment activities.
5. Establish, update, and improve the Company's risk management policies.
6. Identify all potential risks related to the Company's activities and evaluate the application of risk management on a regular basis.
7. Review and provide recommendations on the effectiveness of risk management implemented by the Risk Management Unit.
8. Monitor the activities of the Risk Management Unit in overseeing the implementation of risk mitigation.
9. Oversee the recommendations of the Investment and Risk Management Committee by the Risk Management Unit.
10. Analyze and evaluate the proposals for the Annual Business Plan (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP), including investment plan proposals.
11. Review the information on risks and risk management in the Company's reports to be published through discussions with management.
12. Discuss significant risks within the Company that fall under the oversight authority of the Board of Commissioners.
13. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
14. Review corporate actions proposed by the Board of Directors.

15. Melakukan Tugas Peninjauan Aset-aset Pusri di lapangan dan monitoring penyerapan Pupuk PSO oleh Petani.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga memiliki wewenang meliputi:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat menggunakan:
 - a. Laporan atau catatan yang dibuat oleh Unit Kerja Manajemen Risiko, akuntan publik, konsultan/kontraktor proyek.
 - b. Kontrak/surat perjanjian/MoU/notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham.
 - c. Brosur/proyek/forecast keuangan dan ekonomi.
 - d. Laporan keuangan berkala Perusahaan.
 - e. Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham.
 - f. Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
3. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain Unit Kerja Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

15. Conduct Asset Review tasks of Pusri's assets in the field and monitoring the absorption of PSO fertilizers by farmers.
16. Perform other tasks as assigned by the Board of Commissioners.

Authority of the Investment and Risk Management Committee

In carrying out its duties, the Investment and Risk Management Committee also has the authority to:

1. Have full, unrestricted, and unlimited access to employee records, resources, funds, and other assets of the Company that are related to the performance of its duties.
2. In carrying out its work, the Investment and Risk Management Committee may use:
 - a. Reports or records prepared by the Risk Management Unit, public accountants, consultants/project contractors.
 - b. Contracts/agreements/MoUs/meeting minutes of the Board of Directors and Shareholders.
 - c. Brochures/projects/financial and economic forecasts.
 - d. Periodic financial reports of the Company.
 - e. Correspondence documents of the Board of Directors and Shareholders.
 - f. Other relevant information, including information from third parties.
3. For any assignments related to requests for data and information from units other than the Risk Management Unit, the Investment and Risk Management Committee will be issued a letter of assignment signed by all members of the Board of Commissioners.



KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri dari tiga orang. Satu orang Komisaris sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta dua orang anggota Komite.



MEMBERSHIP OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Investment and Risk Management Committee consists of three members: one Commissioner who also serves as the Chairperson of the Investment and Risk Management Committee, and two Committee members.

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen



Ketua
Chairperson
Anggota
Members

: Bambang Supriyambodo
: Ida Zuraida
Sara Dewi

Composition of the Management Committee



Bambang Supriyambodo

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Chairperson of Investment and Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office

14 Juni 2021 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
June 14, 2021 – the end of tenure as Commissioner


Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Her profile can be seen on the Company Profile Chapter

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 04/ DEKOM/PUSRI/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Appointment History

Appointed as the Chairman of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-04/DEKOM/PUSRI/VI/2021 dated June 14, 2021.



Sara Dewi

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of Investment and Risk Management Committee

Kelahiran | Birth: Jakarta 25 Mei 1973
Usia | Age: 52 Tahun / 52 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality: Indonesian

Periode Jabatan	3 Juli 2023 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun)
Term of Office	<i>July 3, 2023 – the end of the term (3 years)</i>
Riwayat Penunjukan	Diangkat sebagai anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 01/ DEKOM/PUSRI/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.
Appointment History	<i>Appointed as a member of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/VII/2023 dated July 3, 2023.</i>
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> S2 Finance Universitas Gadjah Mada (2017) S1 Akuntansi Universitas Indonesia (1998)
Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> Master's Degree in Finance from Gadjah Mada University (2017) Bachelor's Degree in Accounting from University of Indonesia (1998)
Rangkap Jabatan	SVP Portofolio PT Pupuk Indonesia (Persero)
Concurrent Positions	<i>SVP Portfolio of PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>
Hubungan Afiliasi	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada PT Pupuk Indonesia (Persero). Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.
Affiliate Relationship	<i>Has an affiliate relationship with the Majority/Controlling Shareholder, through a position at PT Pupuk Indonesia (Persero). This dual position is part of managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Additionally, does not have any affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> SVP Portofolio PT Pupuk Indonesia (2023 - saat ini) SVP Kinerja Korporat PT Pupuk Indonesia (2021- 2023) VP Akuntansi Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016-2021) Manager Akuntansi PT Pupuk Indonesia (Persero) (2011-2016)
Work Experience	<ol style="list-style-type: none"> <i>SVP Portfolio PT Pupuk Indonesia (2023 - present)</i> <i>SVP Corporate Performance PT Pupuk Indonesia (2021 - 2023)</i> <i>VP Management Accounting PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016 - 2021)</i> <i>Accounting Manager at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2011-2016)</i>



Ida Zuraida

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of Investment and Risk Management Committee

Kelahiran | Birth
Jakarta 11 Desember 1957
Jakarta, December 11, 1957

Usia | Age
67 Tahun
67 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Periode Jabatan	8 Oktober 2021 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun)
Term of Office	October 8, 2021 – the end of the term (3 years)
Riwayat Penunjukan	Diangkat kembali sebagai anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-12/ DEKOM/ PUSRI/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
Appointment History	Reappointed as a member of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-12/DEKOM/PUSRI/X/2021 dated October 8, 2021.
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas YAI Jakarta S2 Manajemen SDM Sekolah Tinggi IPWI Jakarta, dan Pendidikan informal lainnya di USA, Hongkong, Singapore, Jepang dll.
Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree in Accounting Economics from YAI University Jakarta Master's Degree in Human Resource Management from IPWI College Jakarta, and Other informal education in the USA, Hong Kong, Singapore, Japan, etc.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan
Concurrent Positions	Does not hold any concurrent positions
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Dewan Komisaris atau Direksi
Affiliate Relationship	Does not have any affiliation with the Majority Shareholder, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan dan Kepala Divisi Bank Liabilities BPPN Kepala Divisi Pengawasan dan Administrasi BPPN, Waka Div Teknologi dan Informasi BAPINDO KaTim Online System BNI 46 Staf Ahli Puskaji DPD-RI Dosen STIE Indonesia Banking School LPPI (Akuntansi) Dosen STIE Universitas Dharma Persada (Akuntansi) Komisaris Utama PT E-Depro Ka Keuangan, Ka Penjualan, Ka Penjualan di beberapa swasta Instruktur Keuangan dan Perbankan.
Work Experience	<ol style="list-style-type: none"> Vice Chairman of the Government Guarantee Implementation Unit (UP3), Ministry of Finance, and Head of the Bank Liabilities Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) Head of the Supervision and Administration Division, BPPN Deputy Head of the Technology and Information Division, BAPINDO Head of the Online System Team, BNI 46 Specialist Staff, Puskaji, Regional Representative Council (DPD-RI) Lecturer at the Indonesia Banking School (STIE) LPPI (Accountancy) Lecturer in Accounting at STIE Dharma Persada University President Commissioner of PT E-Depro Head of Finance, Head of Sales, and Head of Marketing at various private companies Finance and Banking Instructor

INDEPENDENSI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya untuk memastikan independensi setiap anggota Komite, setiap tahunnya masing-masing anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris memberikan pernyataan independensi.

INDEPENDENCE OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

As an effort to ensure the independence of each Committee member, every year, each member of the Supporting Committee of the Board of Commissioners submits an independence statement.

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Pernyataan Independensi Independence Statement	Sally Salamah	Sara Dewi	Ida Zuraida
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir. They are not individuals from the Public Accounting Firm, Law Consultancy Firm, Public Appraisal Services Firm, or any other party that has provided insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consultancy services to PUSRI in the last six months.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen). They are not individuals who have worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PUSRI's activities in the last six months (except for Independent Commissioners).	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI. They do not have direct or indirect shares in PUSRI.	✓	✓	✓
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI. Their family does not have direct or indirect shares in PUSRI.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI. They do not have any affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of PUSRI.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI. They do not have any direct or indirect business relations related to the business activities of PUSRI.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. They do not serve as officials of political parties and/or candidates/members of the legislature, and/or are not candidates or hold the position of head/deputy head of a regional government.	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI. They do not hold any other position that could create a conflict of interest related to their position at PUSRI.	✓	✓	✓

Rangkap Jabatan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Concurrent Positions Held by Members of the Investment and Risk Management Committee

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
1	Sara Dewi	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada PT Pupuk Indonesia (Persero). Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Has an affiliate relationship with the Majority Shareholder/Controller through their position at PT Pupuk Indonesia (Persero). This concurrent position is part of the managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Furthermore, they do not have any affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.
2	Ida Zuraida	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Does not have any affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with the Majority Shareholder and Controller.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

PUSRI senantiasa mendorong peningkatan kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pendidikan dan Pelatihan Komite Investasi dan Manajemen Risiko pada tahun buku disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

RAPAT KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Rapat, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Komite Investasi dan Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat satu kali dalam setiap bulan atau bilamana diperlukan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat mengundang Dewan Komisaris untuk turut serta hadir dalam rapat yang diselenggarakan Komite. Selama tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan Rapat sebanyak kali yang terdiri dari:

- 12 kali Rapat Internal KIMR
- 12 kali Rapat dengan Internal Dekom

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PUSRI continuously encourages the enhancement of the competencies of the Investment and Risk Management Committee through various training and educational programs, with full funding provided by the Company. The Education and Training of the Investment and Risk Management Committee for the fiscal year is presented in the “Company Profile” section.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

Meeting Policy, Frequency, and Attendance

The Investment and Risk Management Committee holds meetings once a month or as needed. The Committee may invite the Board of Commissioners to attend meetings held by the Committee. Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee has held meetings as follows:

- 12 Internal KIMR Meetings
- 12 Meetings with the Internal Dekom

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Bambang Supriyambodo	Komisaris/ Ketua Komite Commissioner/ Chairperson of Committee	12	12	100
Sara Dewi	Anggota Komite Member of Committee	12	10	90
Ida Zuraida	Anggota Komite Member of Committee	12	12	100

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Charter Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko 2024. Dalam pelaksanaannya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan Pengawasan/ Monitoring pelaksanaan analisis risiko terutama untuk bisnis Perusahaan yang utama sebagai penyangga *cash flow* Perusahaan, serta bisnis dalam Perusahaan yang berpotensi mendatangkan kerugian melalui berbagai upaya mitigasi risiko yang dilakukan bersama-sama dengan Unit Kerja Manajemen Risiko dan seluruh Unit Kerja terkait di PUSRI.

Adapun realisasi pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko di tahun 2024 di antaranya:

2024 IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S DUTIES

Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Investment and Risk Management Committee Charter and the 2024. In its implementation, the Investment and Risk Management Committee conducts oversight and monitoring of risk analysis activities, particularly for the Company's core business that supports its cash flow, as well as other business areas that have the potential to incur losses. This is carried out through various risk mitigation efforts in collaboration with the Risk Management Unit and all relevant Work Units within PUSRI.

The following is the realization of the Investment and Risk Management Committee's duties in 2024:

HASIL SELF ASSESSMENT KOMITE INVESTASI & MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

2024 RESULT OF THE INVESTMENT & RISK MANAGEMENT COMMITTEE SELF-ASSESSMENT

Sepanjang 2024, Komite Investasi & Manajemen Risiko telah menjalankan fungsi Komite antara lain:

Throughout 2024, the Investment & Risk Management Committee has carried out its committee functions, including:

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	Rencana Plan	Realisasi Realization	Keterangan Remarks
1	Pengadaan rapat internal KIMR dan Unit Kerja terkait Investasi dan Manajemen Risiko Procurement of internal KIMR meetings and related Investment and Risk Management Work Units	Bulanan Monthly	12 kali 12 times	100%	15 Januari 2024 20 Februari 2024 19 Maret 2024 24 April 2024 16 Mei 2024 14 Juni 2024 16 Juli 2024 19 Agustus 2024 17 September 2024 21 Oktober 2024 15 November 2024 16 Desember 2024 January 15, 2024 February 20, 2024 March 19, 2024 April 24, 2024 May 16, 2024 June 14, 2024 July 16, 2024 August 19, 2024 September 17, 2024 October 21, 2024 November 15, 2024 December 16, 2024
2	Pengadaan rapat gabungan KIMR, KA, dan dengan SVP seluruh unit kerja. Procurement of joint meetings between KIMR, KA, and SVP of all work units	Bulanan Monthly	Insidental Incidental	100%	23 Januari 2024 22 Februari 2024 19 Maret 2024 26 April 2024 January 23, 2024 February 22, 2024 March 19, 2024 April 26, 2024
3	Menghadiri rapat Internal Dekom dengan Komite. Attending the Internal Dekom meeting with the Committee	Bulanan Monthly	12 kali 12 times	100%	31 Januari 2024 27 Februari 2024 28 Maret 2024 30 April 2024 31 Mei 2024 27 Juni 2024 23 Juli 2024 22 Agustus 2024 23 September 2024 24 Oktober 2024 22 November 2024 20 Desember 2024 January 31, 2024 February 27, 2024 March 28, 2024 April 30, 2024 May 31, 2024 June 27, 2024 July 23, 2024 August 22, 2024 September 23, 2024 October 24, 2024 November 22, 2024 December 20, 2024
4	Pembuatan Laporan Progress Investasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PUSRI Preparation of Investment Progress Reports and PUSRI Risk Management Implementation	Bulanan/ Triwulan/ Semester Monthly/ Quarterly/ Semester	12 kali 12 times	100%	Laporan bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Monthly, Quarterly, Semi-Annual, and Annual Reports
5	Pemantauan pelaksanaan RJPP dan RKAP 2004 melalui rapat bulanan Komite bersama manajemen serta identifikasi adanya permasalahan Monitoring the implementation of the RJPP and RKAP 2004 through monthly committee meetings with management, as well as identifying any issues	Bulanan Monthly	12 kali 12 times	100%	Diadakan dalam rapat bulanan Held during the monthly meeting
6	Mendorong realisasi atas implementasi Proyek Investasi sesuai dengan rencana awal Encouraging the realization of the implementation of investment projects in accordance with the initial plan.	Bulanan Monthly	12 kali 12 times	100%	Dalam rapat bulanan selama ada proyek During monthly meetings for the duration of the project
7	Monitoring atas pelaksanaan investasi yang direncanakan dalam tahun 2024 Monitoring of the implementation of investments planned in 2024	Insidental & Bulanan Incidental & Monthly	12 kali 12 times	100%	Dalam rapat bulanan selama ada proyek During monthly meetings for the duration of the project

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	Rencana Plan	Realisasi Realization	Keterangan Remarks
8	 <p>Identifikasi risiko Perusahaan pada bagian yang signifikan seperti kebijakan dan harga gas bumi, kebijakan distribusi PSO, aspek produksi, pemasaran, dan SDM Dapensri.</p>	Insidental	Jika ada	100%	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring kelangkaan gas sejak triwulan akhir sampai dengan akhir tahun 2024 Monitoring ke lapangan terkait adanya isu kelangkaan pupuk Kunjungan ke UPP dan diskusi dengan distributor
	 <p>Identification of the Company's risks in significant areas such as natural gas pricing and policy, PSO distribution policy, production, marketing, and Dapensri HR aspects.</p>	Incidental	If there are		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring of gas shortages from the final quarter through the end of 2024 Field monitoring in response to issues related to fertilizer shortages Visits to Production Units (UPP) and discussions with distributors
9	 <p>Monitoring tingkat pencapaian nilai GCG Perusahaan dengan terus meningkatkan penyempurnaan proses dan pelaporan sebagaimana diperlukan.</p>	Tahunan	1 kali	100%	Evaluasi setahun sekali, namun persiapan dilakukan secara insidental setiap kali diperlukan dalam tahun berjalan. Pelaksanaan dilaksanakan pada saat rapat bulanan.
	 <p>Monitoring the achievement of the Company's GCG (Good Corporate Governance) values by continuously improving processes and reporting as necessary.</p>	Annual	1 times		Evaluations are conducted once a year, however, preparations are carried out on an incidental basis whenever needed throughout the year. Implementation takes place during monthly meetings.
10	 <p>Melakukan Self Assessment Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tiap Semester.</p>	Akhir Tahun	1 kali	100%	Pelaksanaan Akhir Tahun
	 <p>Conducting a Self-Assessment of the Performance of the Investment and Risk Management Committee every semester</p>	End of the Year	1 times		Year-End Implementation
11	 <p>Menyusun Rencana Kerja Tahunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko.</p>	Tahunan	1 kali	100%	Dilakukan bulan Juli dan Agustus
	 <p>Prepare the Annual Work Plan for the Investment and Risk Management Committee</p>	Annual	1 times		Conducted in July and August.
12	 <p>Melaksanakan Training atas suatu topik terkait kebutuhan tugas.</p>	Insidental	1 Kali	100%	Seminar Online terkait Manajemen Risiko
	 <p>Conduct training on a topic related to the requirements of the duties</p>	Incidental	1 times		Online Seminar on Risk Management
13	 <p>Pelaksanaan Tugas lainnya dari Komisaris.</p>	Insidental	Sesuai kebutuhan	100%	Mendampingi Dekom dalam kunjungan lapangan Peninjauan Aset Pusri, pertemuan dengan Distributor, pengecer dan petani Ke daerah Jawa Tengah, DIY, Palembang, Bangka, Makassar, dan Bali & Lombok.
	 <p>Execution of other tasks from the Board of Commissioners</p>	Incidental	According to the needs		Accompanied the BoC during field visits for asset inspection of Pusri, and meetings with distributors, retailers, and farmers in the regions of Central Java, Yogyakarta (DIY), Palembang, Bangka, Makassar, as well as Bali and Lombok.
14	 <p>Pengadaan Rapat Internal Komite dengan Dekom untuk suatu kebutuhan keputusan Dekom terkait surat dari Direksi atas suatu hal.</p>	Insidental	3 Kali	100%	Membahas Kontrak Proyek Pusri IIIB dan membahas isu penting lainnya seperti masalah PT PAL, PILOG, dan lain-lain.
	<p>Internal Committee meetings held with the BoC to support decision-making by the BoC in response to a letter from the BoD regarding a specific matter.</p>	Incidental	3 times		Discussion on the Pusri IIIB Project Contract and other key issues such as matters related to PT PAL, PILOG, and others.

PENCAPAIAN KPI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun buku. Rencana kerja tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar evaluasi atas kinerja Komite. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko pada tahun 2024 masuk kategori Sangat Baik. Selain penilaian dari Dewan Komisaris, Komite Investasi & Manajemen Risiko juga melakukan penilaian mandiri (*self assessment*).

ACHIEVEMENT OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE KPI

The performance of the Investment & Risk Management Committee is assessed by the Board of Commissioners. The basis for this assessment is the work plan prepared at the beginning of the fiscal year. This work plan is established by the Board of Commissioners as the foundation for evaluating the Committee's performance. Based on this consideration, the Board of Commissioners has rated the performance of the Investment & Risk Management Committee in 2024 as "Very Good." In addition to the assessment by the Board of Commissioners, the Investment & Risk Management Committee also conducts a self-assessment.



Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners Secretary



Sekretaris Dewan Komisaris PUSRI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.



PEDOMAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



Sekretaris Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya secara umum telah diatur di dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas spesifik. Adapun tugas dan tanggung jawabnya, baik secara umum dan spesifik diuraikan pada bagian berikut.



Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Board Manual

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Dewan Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib.
2. Membuat risalah rapat baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Dalam hal membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris harus bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan.
4. Menyampaikan kepada Komisaris Utama setiap surat yang masuk ke Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendapatkan disposisi dari Komisaris Utama.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh staf Asisten Dewan Komisaris yang keberadaannya diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
6. Ikut mengevaluasi setiap laporan Perusahaan bersama-sama dengan Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
7. Untuk ketertiban administrasi, setiap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris harus terlebih dahulu dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris Komisaris.



The Secretary of the Board of Commissioners of PUSRI is established based on the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Secretariat of the Board of Commissioners is responsible for supporting the smooth execution of the Board of Commissioners' duties by acting as a liaison between the Board of Commissioners and other parties. The Secretariat is led by an official serving as the Secretary of the Board of Commissioners.

WORK GUIDELINES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

The Secretary of the Board of Commissioners follows the work guidelines outlined in the Board of Directors and Board of Commissioners Manual (Board Manual) as a guide in carrying out their duties and responsibilities. Although their duties and responsibilities are generally outlined in the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors, the Secretary of the Board of Commissioners also has specific tasks. Both the general and specific duties and responsibilities are outlined in the following section.

Duties and Responsibilities Based on the Board Manual

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the orderly execution of the Board of Commissioners' code of conduct and regulations.
2. Preparing the minutes of meetings, both for internal Board of Commissioners meetings and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. When preparing the minutes for meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Secretary of the Board of Commissioners must collaborate with the Corporate Secretary.
4. Submit all incoming correspondence received by the Secretary to the Board of Commissioners to the President Commissioner for disposition.
5. In carrying out their duties, the Secretary of the Board of Commissioners is assisted by the Secretary staff, and if necessary, can be supported by the Assistant Commissioner staff, whose appointments or dismissals are made by the Board of Commissioners.
6. Participating in evaluating every report from the Company, together with the committees established by the Board of Commissioners.
7. For administrative orders, any letter signed by the Board of Commissioners must first be reviewed and initialed by the Secretary of the Board of Commissioners.

8. Untuk setiap kegiatan Komite-komite, Sekretaris Dewan Komisaris diminta membantu demi kelancaran tugas-tugas dimaksud.
9. Setiap semesteran Sekretaris Dewan Komisaris membuat laporan ke Dewan Komisaris tentang realisasi penggunaan anggaran komisaris.
10. Berkoordinasi dengan pihak manajemen, Sekretaris Dewan Komisaris setiap bulan Agustus mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya.

Tanggung Jawab Spesifik

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.
11. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

KRITERIA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

MASA JABATAN

Perusahaan telah mengatur masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

8. For each committee activity, the Secretary of the Board of Commissioners is required to assist in ensuring the smooth execution of these tasks.
9. Every semester, the Secretary of the Board of Commissioners prepares a report to the Board of Commissioners on the actual use of the commissioners' budget.
10. In coordination with management, the Secretary of the Board of Commissioners prepares the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) for the following year every August.

Specific Responsibilities

1. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners.
2. Drafting the minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. Managing the documentation of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents.
4. Preparing the draft work plan and budget for the Board of Commissioners.
5. Preparing the draft reports for the Board of Commissioners.
6. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.
7. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the applicable laws and regulations and implements the principles of GCG (Good Corporate Governance).
8. Providing the information required by the Board of Commissioners regularly and/or whenever requested.
9. Coordinating with committee members, if necessary, to facilitate the tasks of the Board of Commissioners.
10. Acting as the liaison between the Board of Commissioners and other parties.
11. Ensuring that the documentation of activities within the Board of Commissioners is properly stored within the company.

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Board of Commissioners' Secretary with the following criteria:

1. Understand the management, supervision, and development systems of State-Owned Enterprises (BUMN);
2. Have good integrity;
3. Understand the functions of the secretariat;
4. Possess the ability to communicate and coordinate effectively.

TERM OF OFFICE

The Company has regulated the term of office for the Board of Commissioners' Secretary, which is set by the Board of Commissioners for 3 (three) years and may be reappointed for an additional 2 (two) years, without affecting the Board of Commissioners' right to dismiss the Secretary at any time.

PEJABAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Posisi Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Neneng Suryatiningsih berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No KEP-11/DEKOM/PUSRI/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Berikut adalah profilnya:

BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

The position of Secretary to the Board of Commissioners is currently held by Neneng Suryatiningsih, based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-11/DEKOM/PUSRI/XI/2024 dated November 11, 2024, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Her profile is as follows:



Neneng Suryatiningsih

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kelahiran | Birth: Jakarta, 10 Juli 1974
Jakarta, July 10, 1974

Usia | Age: 50 Tahun
50 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality: Indonesian

Periode Jabatan	11 November 2024 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun)
Term of Office	November 11, 2024 – the end of the term (3 years)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> S1 STIE – Yayasan Pendidikan Keuangan & Perbankan, 1997 S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, 2008
Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree (S1) in Economics from STIE – Yayasan Pendidikan Keuangan & Perbankan, 1997 Master's Degree (S2) in Economics from the University of Indonesia, 2008
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Penata Kelola Perusahaan Negara Muda Kementerian BUMN (2022-sekarang) Sekretaris Dekom/Dewas PT Pelindo Multi Terminal (2019-2022), Sekretaris Dekom/Dewas PT Pelabuhan Indonesia I (2019 – 2022), Sekretaris Dekom/Dewas PT Perkebunan Nusantara IV (2016–2019) Sekretaris Dekom/Dewas PT Semen Baturaja Tbk (2011-2016) Sekretaris Dekom/Dewas PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2008-2012)
Work Experience	<ol style="list-style-type: none"> Junior State-Owned Enterprise Governance Officer at the Ministry of SOEs (2022–present) Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Pelindo Multi Terminal (2019–2022) Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Pelabuhan Indonesia I (2019–2022) Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Perkebunan Nusantara IV (2016–2019) Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Semen Baturaja Tbk (2011–2016) Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2008–2012)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

1. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
2. Menyampaikan kepada Komisaris Utama setiap surat yang masuk ke Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendapatkan disposisi dari Komisaris Utama.
3. Membuat risalah rapat baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi setiap Laporan atau Surat Direksi (Perusahaan) bersama-sama dengan Komite dan membuat Tanggapan Dewan Komisaris atas surat Direksi.
5. Membuat Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan.
6. Membuat Tanggapan Dewan Komisaris atas Tanggapan Aksi Korporasi.
7. Mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS OLEH DEWAN KOMISARIS

Penilaian atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2024. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Sekretaris Dewan Komisaris masuk kategori "Sangat Baik".

2024 REPORT ON THE PERFORMANCE OF DUTIES

1. Administer the documents of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents.
2. Submit all incoming correspondence received by the Secretary to the Board of Commissioners to the President Commissioner for disposition.
3. Prepare the minutes of meetings, both internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. Evaluate each report or letter from the Board of Directors (Company) in collaboration with the Committee and prepare the response from the Board of Commissioners to the Board of Directors' letter.
5. Prepare the Board of Commissioners' response to quarterly, semi-annual, and annual reports.
6. Prepare the Board of Commissioners' Response to the Corporate Action Feedback.
7. Prepare the Budget Work Plan (RKA) for the Board of Commissioners for the following year.
8. Provide the information required by the Board of Commissioners regularly and/or whenever requested.

EVALUATION AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Board of Commissioners' Secretary is evaluated by the Board of Commissioners. The basis for the assessment is the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners' Secretariat throughout 2024. Based on this consideration, the Board of Commissioners has rated the performance of the Board of Commissioners' Secretary as "Excellent."

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

SEKRETARIS PERUSAHAAN



Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; sebagai penghubung (liaison officer) dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar PUSRI seperti pemegang saham, stakeholder, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.



Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki koordinasi pekerjaan kepada Direktur Keuangan & Umum serta membawahi Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat, Departemen Hukum dan Departemen Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan. Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai pejabat penghubung, legal compliance officer, dan membantu tugas Direksi untuk menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah/notulen rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang saham.



Sekretaris Perusahaan berada serta bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Perusahaan dalam menciptakan implementasi terbaik GCG. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara dokumen-dokumen penting yang menunjang struktur GCG dalam penerapan prinsip-prinsip GCG Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary plays a crucial role in ensuring that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles; providing information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and/or upon request; acting as a liaison officer with external stakeholders such as shareholders, stakeholders, and other interested parties; and managing and safeguarding the Company's documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Registers, and minutes of the Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and General Meetings of Shareholders (GMS).

In the Company's organizational structure, the Corporate Secretary reports directly to the President Director and oversees the Corporate Communication and Administration Department, the Legal Department, and the Social & Environmental Responsibility Department. The Corporate Secretary has a mission to consistently and sustainably create a positive image for the Company through the management of an effective communication program to all stakeholders. The Corporate Secretary's main functions include acting as a liaison officer, legal compliance officer, and assisting the Board of Directors in managing and storing the Company's documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings and General Meetings of Shareholders.

The Corporate Secretary is directly accountable to the President Director. This reflects the Company's seriousness in achieving the best implementation of GCG. The Corporate Secretary is responsible for maintaining important documents that support the GCG structure and the application of the Company's GCG principles.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar PUSRI
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

KEORGANISASIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Kompartemen Sekretaris Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penyempurnaan organisasi. Pada tahun 2024, Struktur Kompartemen Sekretaris Perusahaan disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/ DIR/291/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, Sekretaris Perusahaan menjadi pimpinan unit kerja Kompartemen Sekretaris Perusahaan, yang terdiri dari: Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat, Departemen Hukum, dan Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat bertanggung jawab atas Bagian Komunikasi Internal, Bagian Komunikasi Eksternal, Bagian Protokol dan Bagian Kesekretariatan & Pelaporan. Sedangkan Departemen Hukum bertanggung jawab atas Bagian Layanan Hukum Korporat dan Kelompok Corporate Lawyer. Sementara Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertanggung jawab atas Bagian Kemitraan, Bagian Administrasi & Keuangan TJSL dan Bagian *Corporate Social Responsibility*.

BASIS FOR APPOINTMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

The formation, appointment, and implementation of the functions and duties of the Corporate Secretary are based on the following:

1. The Articles of Association of PUSRI
2. The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

ORGANIZATION OF THE CORPORATE SECRETARY

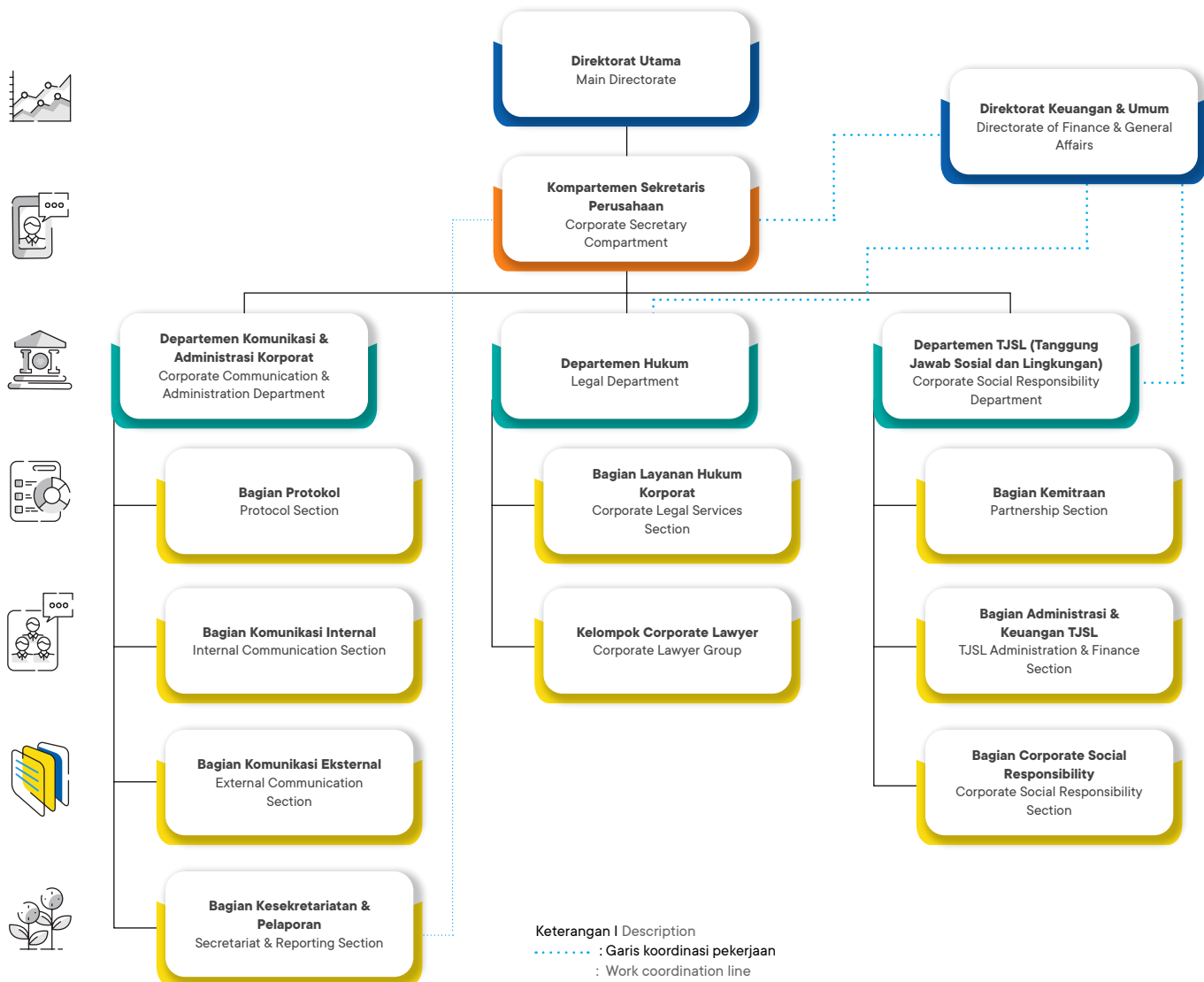
The structure of the Corporate Secretary Division has undergone several changes to improve the organization. In 2024, the structure of the Corporate Secretary Division was established based on the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/291/2024 dated July 1, 2024.

To effectively carry out its activities, the Corporate Secretary acts as the head of the Corporate Secretary Division, which consists of the Communication & Corporate Administration Department, the Legal Department, and the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Department.

The Communication & Corporate Administration Department is responsible for the Internal Communication Section, External Communication Section, Protocol Section, and Secretariat & Reporting Section. Meanwhile, the Legal Department is responsible for the Corporate Legal Services Section and the Corporate Lawyer Group. The Social and Environmental Responsibility Department oversees the Partnership Section, TJSL Administration & Finance Section, and the Corporate Social Responsibility Section.

Struktur Organisasi Kompartemen Sekretaris Perusahaan

Organizational Structure of the Corporate Secretary Compartment



Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan pada Kompartemen Sekretaris Perusahaan adalah 26 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the total number of employees in the Corporate Secretary division is 26 employees, with the following details:

Posisi Position	Total
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1
Officer Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Officer	1
Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat Corporate Communication & Administration Department	10
Departemen Hukum Corporate Legal Department	4
Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social Responsibility & Environmental Department	10

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki PUSRI, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan secara jelas telah diuraikan.

FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sangat dibutuhkan oleh Perusahaan karena memiliki beberapa fungsi. Pertama, adalah fungsi komunikasi dan pembinaan hubungan baik antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekretaris Perusahaan juga menjadi jalur komunikasi dan sumber informasi resmi, seperti menyediakan informasi terbaru melalui website, sehingga beredarnya isu atau informasi palsu yang merugikan Perusahaan dapat dihindari.

Sekretaris Perusahaan juga menjalankan fungsi kehumasan, kesekretariatan maupun penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks administratif, Sekretaris Perusahaan menyimpan dokumen penting Perusahaan, seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, dan Risalah RUPS.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan peran strategis, antara lain:

Fungsi

1. Fungsi komunikasi dan pembinaan hubungan baik antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekretaris Perusahaan juga menjadi jalur komunikasi dan sumber informasi resmi, seperti menyediakan informasi terbaru melalui website, sehingga beredarnya isu atau informasi palsu yang merugikan Perusahaan dapat dihindari.
2. Fungsi kehumasan, kesekretariatan maupun penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks administratif, Sekretaris Perusahaan menyimpan dokumen penting Perusahaan, seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, serta Risalah RUPS.
3. Fungsi Hukum dengan memberikan saran/ tindakan hukum kepada Direksi dengan cara aktif menelaah setiap persoalan yang dihadapi perusahaan saat ini dan atau yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Agar perusahaan/ Direksi terhindar dari persoalan hukum serta mewakili perusahaan dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Perusahaan.
4. Fungsi dan tanggungjawab atas kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

WORK GUIDELINES FOR CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary operates under guidelines outlined in the Corporate Governance Guidelines as well as the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors. Within PUSRI's Corporate Governance Guidelines, the duties and functions of the e Corporate Secretary are clearly described.

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is essential to the Company due to several key functions. First, the role involves communication and fostering good relationships between the Company and its internal and external stakeholders. The Corporate Secretary also serves as the official communication channel and source of information, such as providing the latest updates through the website, helping to prevent the spread of false or damaging information about the Company.

Furthermore, the Corporate Secretary carries out public relations functions, secretarial duties, and organizes the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors meetings, meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as activities involving other stakeholders. From an administrative perspective, the Corporate Secretary is responsible for maintaining important Company documents, including the Shareholders Register, Special Registers, Board of Directors Meeting Minutes, and GMS Minutes.

The Corporate Secretary has a strategic role and function, including:

Functions

1. The communication function and the fostering of good relationships between the Company and internal and external stakeholders. The Corporate Secretary also serves as the communication channel and official source of information, providing the latest updates through the website, thereby preventing the circulation of harmful or misleading information about the Company.
2. The public relations, secretarial functions, and the organization of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and activities with other stakeholders. Administratively, the Corporate Secretary is responsible for storing important Company documents, such as the Shareholder Register, Special List, Board of Directors Meeting Minutes, and GMS Minutes.
3. Legal Function by providing legal advice/actions to the Board of Directors through actively reviewing every issue the company is currently facing or may face in the future, in order to protect the company and the Board of Directors from legal problems, as well as representing the company in resolving legal matters encountered by the company.
4. Function and responsibility for CSR (*Corporate Social Responsibility*) activities to ensure a positive impact on the environment and the community.

Peran Strategis

1. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan kegiatan Perusahaan.
2. Menjaga hubungan baik antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, media massa, dan masyarakat luas.
3. Mengelola informasi terkait aspek bisnis Perusahaan.
4. Melakukan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.



Sesuai dengan SK/DIR/291/2024 tanggal 01 Juli 2024, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membangun hubungan baik dengan *Stakeholders* dan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara menjalankan fungsi-fungsi pokok Sekretariat Perusahaan yaitu *Compliance Officer*, *Public Relation*, *Investor Relation* dan *Business Information* agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
2. Membangun hubungan antara kepentingan unit-unit internal Perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar Perusahaan dengan cara meningkatkan komunikasi dan pemberian informasi agar masing-masing pihak dapat melaksanakan perannya dengan baik.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
4. Memiliki tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Mengembangkan data bisnis Perusahaan dan mengelola dokumen-dokumen penting Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan investasi atau kerja sama bisnis lainnya.
6. Melakukan persiapan RUPS/RUPS-LB, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi/Pimpinan dan staf baik yang dilakukan di Palembang atau di luar Palembang dengan cara mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan unit kerja terkait agar kegiatan rapat tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
7. Mengarahkan kegiatan penyusunan annual report, pengelolaan website Perusahaan, video profil Perusahaan dan media komunikasi lainnya baik media cetak maupun media elektronika sebagai informasi Perusahaan kepada publik.
8. Memiliki tanggung jawab atas kegiatan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) yang dilaksanakan oleh Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar pelaksanaannya dapat menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.
9. Memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian proses (pembinaan/pengembangan) dan akuntabilitas program kemitraan dari Perusahaan kepada masyarakat lingkungan eksternal, serta dana pembinaan untuk pelatihan, studi banding, penelitian dan promosi/

Strategic Roles

1. Assisting the Board of Directors in organizing the Company's activities.
2. Maintaining good relationships between the Company and its stakeholders, including the government, regulators, the media, and the general public.
3. Managing information related to the Company's business aspects.
4. Carrying out other tasks assigned by the Board of Directors, as long as they fall within the authority and responsibility of the Corporate Secretary.

In accordance with SK/DIR/291/2024 dated July 01, 2024, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Build good relationships with stakeholders and other relevant parties by performing the key functions of the Corporate Secretariat, including Compliance Officer, Public Relations, Investor Relations, and Business Information, to establish harmonious and mutually beneficial relationships.
2. Build connections between the interests of the Company's internal units and external stakeholders by improving communication and providing information to ensure that each party can perform its role effectively.
3. Provide the necessary information to the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or whenever requested.
4. Be responsible for the storage and management of the Company's documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register, and minutes of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings, and General Shareholders Meetings (GSM).
5. Develop the Company's business data and manage important documents through the utilization of information technology to make them more accessible to stakeholders for investment or other business collaboration purposes.
6. Prepare for the GSM/EGM, Board of Commissioners' meetings, Board of Directors/Leadership and staff meetings, whether held in Palembang or outside Palembang, by coordinating the implementation with related units to ensure that the meetings run smoothly and orderly.
7. Direct the preparation of the annual report, management of the Company's website, corporate profile videos, and other media communications, both print and electronic, to provide the public with Company information.
8. Be responsible for the Corporate Social Responsibility (CSR) activities carried out by the Department of Social and Environmental Responsibility (TJSL) to ensure that their implementation has a positive impact on the environment and society.
9. Be responsible for managing and controlling the partnership program process (coaching/development) and accountability for the Company's programs to the external community, as well as training, study visits, research, and promotion/exhibition funding, in an effective and efficient manner to ensure

pameran, secara efektif dan efisien sehingga dapat saling menguntungkan kedua belah pihak serta tetap menjaga akuntabilitas program kemitraan sesuai amanat RUPS.

10. Memberikan saran/pendapat hukum kepada Direksi dengan cara aktif menelaah setiap persoalan yang dihadapi Perusahaan saat ini dan atau yang akan terjadi di waktu yang akan datang agar Perusahaan/ Direksi terhindar dari persoalan hukum.
 11. Mewakili Direksi/Perusahaan dalam penyelesaian masalah hukum baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan dan termasuk menghadapi pihak yang berwajib/berwenang seperti: Instansi Pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaan melalui Surat Kuasa Hukum agar setiap permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dapat terselesaikan dengan baik.
 12. Merencanakan, mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran di Kompartemen.
 13. Melakukan pengelolaan risiko (identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko) di unit kerja sebagai upaya memaksimalkan nilai Perusahaan dan membentuk budaya pengelolaan risiko dan berinovasi di unit kerja.
 14. Mendorong implementasi tata nilai AKHLAK di lingkup Kompartemen.
 15. Merencanakan, menyetujui, mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan lingkungan, tujuan lingkungan, sasaran lingkungan dan program untuk mencapainya di lingkup Kompartemen.
10. Provide legal advice to the Board of Directors by actively reviewing issues currently faced by the Company and potential future issues, ensuring that the Company/Board of Directors is protected from legal problems.
 11. Represent the Board of Directors/Company in resolving legal matters, both in court and out of court, and in dealing with authorities such as Government Agencies, Police, and Prosecutors through Power of Attorney, to ensure the Company's legal issues are resolved properly.
 12. Plan, manage, and monitor the budget usage in the department.
 13. Manage risks (identification, measurement, and mitigation) within the unit to maximize the Company's value and establish a risk management culture while fostering innovation within the unit.
 14. Promote the implementation of AKHLAK values within the department.
 15. Plan, approve, develop, communicate, and socialize environmental policies, environmental goals, targets, and programs to achieve them within the department.



PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

APPOINTING AND DISMISSAL AUTHORITY

The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on a Board of Directors' Resolution in accordance with the Company's internal mechanisms, with the approval of the Board of Commissioners and PT Pupuk Indonesia (Persero).




Indah Irmayani

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kelahiran | Birth
Palembang, 19 Juli 1979
Palembang, July 19, 1979

Usia | Age
45 Tahun
45 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Riwayat Penunjukan	Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/019/2022 tanggal 05 Januari 2022
Appointment History	<i>Appointed based on the Director's Decree No. SK/DIR/019/2022 dated January 5, 2022</i>
Riwayat Pendidikan	Sarjana Pertanian Universitas Sriwijaya (2001)
Educational Background	<i>Bachelor of Agriculture from Sriwijaya University (2001)</i>
Keahlian	Sosial Ekonomi Pertanian
Expertise	<i>Agricultural Economics</i>
Rangkap Jabatan	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan
Concurrent Positions	<i>Does Not Hold Concurrent Positions</i>
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Dewan Komisaris atau Direksi
Affiliate Relationship	<i>Does not have any affiliate relationship with the Majority Shareholders, Board of Commissioners, or Board of Directors</i>
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Perusahaan (2024 - Sekarang) 2. SPV Sekretariat Perusahaan & Tata Kelola (2022 - 2024) 3. SVP Umum (2021 - 2022) 4. GM Penjualan Produk Komersial (2020 - 2021)
Work Experience	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate Secretary (2024 - Present) 2. SPV of Corporate Secretariat & Governance (2022 - 2024) 3. SVP of General Affairs (2021 - 2022) 4. GM of Commercial Product Sales (2020 - 2021)
Bergabung dengan PUSRI	01 April 2004
Began working at PUSRI	<i>April 1, 2004</i>

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, Perusahaan melaksanakan program pengembangan karier untuk seluruh karyawan, tidak terkecuali bagi Sekretaris Perusahaan beserta jajarannya yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan. Proses pengembangan karir yang dilaksanakan di lingkungan Perusahaan diatur berdasarkan Surat Keputusan SK/DIR/407/2022 tanggal 05 Desember 2022.

COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to develop employee competencies and motivate employees to improve their performance, the Company implements a career development program for all employees, including the Corporate Secretary and their team, in line with business needs and the achievement of the Company's performance targets. The career development process within the Company is governed by the Decree No. SK/DIR/407/2022 dated December 5, 2022.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out several tasks and activities as follows:

No	Aktivitas Activity	Keterangan Information
Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Public Relations (PR)		
1	Aktivitas Kehumasan Public Relations Activities	Meliputi acara internal, eksternal, government relations, stakeholders relations community relations dan kunjungan Includes internal and external events, government relations, stakeholder relations, community relations, and visits.
2	Aktivitas Komunikasi Communication Activities	Aktivitas Publikasi dan pemberitaan menghasilkan: - 1.756 berita di media cetak dan media online; - 100 siaran pers. Aktivitas media sosial telah menghasilkan: - 3.920 konten, - 650.000 pengikut, - 465.720 <i>account reached</i> , - 25.415 <i>account engaged</i> . Publication and news activities resulted in: - 1,756 news articles in print and online media; - 100 press releases. Aktivitas media sosial telah menghasilkan: - 3,920 content posts, - 650,000 followers, - 465,720 accounts reached, - 25,415 accounts engaged.

No	Aktivitas Activity	Keterangan Information
3	Special Event	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan special event Raker RKAP PT Pusri Palembang Tahun 2024. Menyelenggarakan kegiatan special event Safari Ramadhan 1445 H. Menyelenggarakan kegiatan special event Silaturahmi Manajemen dan Karyawan/ti PT Pusri Palembang. Mengorganisir Kunjungan Peserta SSDN Lemhanas RI. Mengorganisir Kunjungan Kerja Komisaris Utama PT Pusri Palembang. Mengorganisir kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI. Menyelenggarakan kegiatan special event Peresmian Day Care. Menyelenggarakan kegiatan special event Gala Premier of Srinova 2024. Menyelenggarakan kegiatan special event Peringatan Hut Ke-79 RI. Menyelenggarakan kegiatan special event Rakor Dirut PI Group di Lampung Menyelenggarakan kegiatan special event PIQI 2024. Menyelenggarakan kegiatan special event CEO Talk. Menyelenggarakan kegiatan special event PKD Internal dan Eksternal. Menyelenggarakan kegiatan special event Peringatan HUT Ke-65 PT Pusri Palembang.
	Special Event	<ul style="list-style-type: none"> Organized the special event for the 2024 RKAP Work Meeting of PT Pusri Palembang. Organized the special event for the 1445 H Ramadan Safari. Organized the special event for the Gathering between Management and Employees of PT Pusri Palembang. Coordinated the visit of SSDN Lemhanas RI participants. Coordinated the working visit of the President Commissioner of PT Pusri Palembang. Coordinated the specific working visit of Commission VI of the House of Representatives (DPR RI). Organized the special event for the Day Care Inauguration. Organized the special event for the Gala Premiere of Srinova 2024. Organized the special event for the 79th Anniversary of the Republic of Indonesia. Organized the special event for the PI Group CEOs Coordination Meeting in Lampung. Organized the special event for PIQI 2024. Organized the special event for CEO Talk. Organized the special event for Internal and External PKD. Organized the special event for the 65th Anniversary of PT Pusri Palembang.
4	Biaya Kehumasan Public Relations Expenses	<p>Total biaya kehumasan untuk kegiatan publikasi, kehumasan, dokumentasi, jamuan & representasi, perayaan dan sumbangan & donasi selama tahun 2024 adalah Rp.3.104.764.033,-</p> <p>The total public relations expenses for publication, public relations, documentation, hospitality & representation, celebrations, and contributions & donations in 2024 amounted to IDR 3,104,764,033.</p>
5	Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors	<p>Rapat Direksi terlaksana sebanyak 64 kali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi terlaksana sebanyak 15 kali</p> <p>A total of 64 Board of Directors Meetings and 15 Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held.</p>
6	Penyusunan <i>Annual Report & Sustainability Report</i> Preparation of the Annual Report & Sustainability Report	<p>Proses tender jasa konsultan untuk penyusunan Annual Report dan Sustainability Report tahun 2024.</p> <p>The tender process for consultant services for the preparation of the 2024 Annual Report and Sustainability Report.</p>

Bidang Hukum

Legal Division

1	Advokasi dan Pengelolaan Hukum Advocacy and Legal Management	<p>Sepanjang tahun 2024 telah diselesaikan pelaksanaan advokasi dan pendampingan hukum sebanyak 35 kali.</p> <p>Selama tahun 2024 terdapat 3 perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian, dimana pada saat penyusunan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) tahun 2024 ini perkara-perkara hukum tersebut sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun penanganan perkara hukum dalam proses eksekusi sebanyak 4 perkara.</p> <p>Throughout 2024, a total of 35 instances of legal advocacy and assistance were completed.</p> <p>During the year, there were 3 legal cases still in the process of resolution. At the time of the preparation of this 2024 Annual Report, these cases are under judicial review (cassation) at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Additionally, there are 4 legal cases currently in the execution phase.</p>
---	---	--

No	Aktivitas Activity	Keterangan Information
2	Pengurusan Perizinan Perusahaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Management of Company Licensing and Protection of Intellectual Property Rights	Sepanjang tahun 2024 telah diselesaikan pengurusan perizinan hak atas tanah milik Perusahaan sebanyak 7 (tujuh) Hak Guna Bangunan, perizinan yang bersifat korporat sebanyak 4 (empat) perizinan dan hak kekayaan intelektual Perusahaan sebanyak 13 (tiga belas) hak. Throughout 2024, the management of land rights permits owned by the Company has been completed for 7 (seven) Building Use Rights, corporate permits totaling 4 (four), and 13 (thirteen) intellectual property rights of the Company.
3	Reviu atas dokumen dan surat-surat strategis Perusahaan Review of the Company's strategic documents and letters	Sepanjang tahun 2024 terlaksana review dokumen pengadaan barang dan jasa sebanyak 95 kali, Surat Perjanjian dan Addendum Surat Perjanjian sebanyak 147 kali, Nota Kesepahaman/MoU sebanyak 24 kali, Surat Kuasa Khusus sebanyak 40 kali, Surat Keputusan Direksi/Pedoman/ Prosedur sebanyak 44 kali, Keputusan Direksi di Luar Rapat sebanyak 12 kali, Legal Opinion dan Legal Advice sebanyak 96 kali, Keputusan Pemegang Saham sebanyak 5 kali, Kajian Hukum sebanyak 16 kali dan Berita Acara sebanyak 6 kali dan Dokumen Perusahaan Lainnya sebanyak 13 kali. Throughout 2024, reviews were conducted on procurement documents 95 times, agreements and addenda 147 times, Memorandums of Understanding (MoUs) 24 times, special powers of attorney 40 times, Directors' Decisions/guidelines/procedures 44 times, Directors' decisions outside meetings 12 times, legal opinions and legal advice 96 times, shareholders' resolutions 5 times, legal studies 16 times, minutes of meetings 6 times, and other company documents 13 times.

Bidang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Division

1	Penyaluran TJSL Program Pendanaan UMK (PUMK) Distribution of CSR Program for MSME Funding (PUMK)	Realisasi penyaluran PUMK berkolaborasi dengan PT BRI merupakan salah satu komponen dalam Pilar Ekonomi. Jumlah dana PUMK yang telah ditransfer ke PT BRI tahun 2023 sebesar Rp16,3 Miliar dan sd. Desember 2024 sebesar Rp5 Miliar. Dari total dana sebesar Rp21,3 Miliar tersebut, telah disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 97,32% atau sebesar Rp20,73 Miliar kepada 622 mitra binaan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Lampung. The realization of PUMK disbursement in collaboration with PT BRI is one of the components within the Economic Pillar. The amount of PUMK funds transferred to PT BRI was IDR 16.3 billion in 2023 and IDR 5 billion up to December 2024. From the total funds amounting to IDR 21.3 billion, PT Bank Rakyat Indonesia has disbursed 97.32%, equivalent to IDR 20.73 billion, to 622 assisted partners in the provinces of South Sumatra, Central Java, and Lampung.
2	Penerimaan angsuran pinjaman mitra binaan Translate into English accurately in context and meaning for PUSRI annual report:	Hasil Penerimaan angsuran Mitra Binaan termasuk di dalamnya hasil penagihan sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp5.055.776.200 atau 126,01% dari RKA Tahun 2024 sebesar Rp 4.012.350.000 The results of installment payments received from Assisted Partners, including collections up to December 2024, amounted to IDR 5,055,776,200, or 126.01% of the 2024 Work Plan and Budget (RKA) target of IDR 4,012,350,000.
3	Program TJSL CID (PUMK dan Non PUMK) TJSL CID Program (PUMK and Non-PUMK)	Sampai dengan bulan Desember tahun 2024, Program TJSL CID (PUMK dan Non PUMK) yang telah direalisasikan meliputi 4 Pilar yakni : Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Realisasi Pilar Sosial sebesar Rp15,09 Miliar atau 95,39% dari RKA tahun 2024 sebesar Rp15,82 Miliar, realisasi Pilar Ekonomi sebesar Rp14,89 Miliar atau 116,06% dari RKA 2024 sebesar Rp12,83 Miliar, realisasi Pilar Lingkungan sebesar Rp3,61 Miliar atau 72,93% dari RKA 2024 sebesar Rp4,95 Miliar. As of December 2024, the TJSL CID Program (PUMK and Non-PUMK) has been realized across 4 Pillars, namely: Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar, and Legal and Governance Pillar. The realization for the Social Pillar amounted to IDR 15.09 billion, or 95.39% of the 2024 Budget Work Plan (RKA) of IDR 15.82 billion; the Economic Pillar reached IDR 14.89 billion, or 116.06% of the 2024 RKA of IDR 12.83 billion; and the Environmental Pillar realization was IDR 3.61 billion, or 72.93% of the 2024 RKA of IDR 4.95 billion.

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2024 telah mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya Key Performance Indicator (KPI) Sekretaris Perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut tabel penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan:

PERFORMANCE EVALUATION OF THE Corporate Secretary

The execution of the Corporate Secretary duties in 2024 has achieved the planned targets. This is reflected in the achievement of the Key Performance Indicators (KPIs) for the Corporate Secretary that have been set. Below is the performance evaluation table for the Corporate Secretary.

No	Indikator Kerja Performance Indicators	Target	Realisasi Realization	Nilai Value
1	Mengelola Stakeholders Relations Managing Stakeholder Relations	6 Stakeholders Relations	12 Stakeholders Relations	110
2	Rapat Direksi dan/atau Direksi - Staf Board of Directors and/or Directors - Staff Meetings	12 Kali 12 times	64 Kali 64 times	110
3	Pengembalian Dana Program Pendanaan UMK Refunds of Micro and Small Business Funding Program	4,01 Miliar 4.01 Billion	5,06 Miliar 5.06 Billion	110
4	Efektivitas Pengelolaan Biaya Operasional Effectiveness of Operational Cost Management	100%	103%	103
5	Implementasi Program Unggulan TJSL Implementation of Flagship TJSL Programs	100%	110%	110
6	Indeks Kepuasan Lingkungan Environmental Satisfaction Index	92%	92,1%	100,11
7	Internal Customer Satisfaction Index Internal Customer Satisfaction Index	100%	110%	110
8	Learning & Development Effectiveness Learning & Development Effectiveness	100%	110%	110
9	Melakukan dan memberikan advokasi hukum dan pendampingan hukum terhadap setiap permasalahan hukum yang dialami Perusahaan Providing legal advocacy and assistance for any legal issues faced by the Company	100%	110%	110
10	Memastikan kebenaran/keabsahan (riviui) dokumen dan/atau surat-surat strategis Perusahaan Ensuring the accuracy/validity (review) of the Company's strategic documents and/or letters	100%	110%	110
11	Pelaksanaan Program TJSL Implementation of TJSL Programs	100%	102,5%	102,5
12	Pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan/atau kajian hukum kepada User Providing legal opinions and/or legal reviews to Users	100%	110%	110
13	Pemberitaan Positif Perusahaan Positive Company Coverage	90%	96,21%	106,90
14	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Resolution of Audit Recommendations	100%	100%	100
15	ROIC to WACC ROIC to WACC	0,01%	2,14%	110
Jumlah Total				107,78

Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit Unit

SPI memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan jasa *assurance* (audit) dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan: efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk memberikan *value added* kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam mencapai tujuannya.

Dalam menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko, Perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Internal Audit Charter yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi No. SK/DIR/180/2024 tanggal 01 April 2024 serta Prosedur Operasional Baku (POB) Audit Internal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/215/2023 tanggal 26 Juni 2023. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SVP SATUAN PENGAWASAN INTERN

SPI dipimpin oleh *Senior Vice President* Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PROFIL SENIOR VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/019/2022 tanggal 5 Januari 2022, *Senior Vice President* Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Dian Permatasari. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan/memberhentikan *Senior Vice President* Satuan Pengawasan Intern adalah Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Berikut profilnya.

The Internal Audit Unit (SPI) plays a crucial role and bears the responsibility of providing independent and objective assurance (audit) and consulting services. This is carried out through a systematic and disciplined approach to evaluate and enhance the effectiveness of governance, risk management, and internal controls, ultimately delivering added value to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in achieving its objectives.

In implementing a risk-based supervision and internal control system, the Company adheres to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Internal Audit Charter, established under the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/180/2024 dated April 1, 2024, as well as the Standard Operating Procedures (POB) for Internal Audit of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/215/2023 dated June 26, 2023. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang continually strives to enhance the implementation of internal controls by developing and implementing applicable systems and procedures to prevent fraud.

APPOINTING AND DISMISSING AUTHORITY OF THE SVP OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit (SPI) is led by the Senior Vice President of the Internal Audit Unit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PROFILE OF THE SENIOR VICE PRESIDENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Based on Decree No. SK/DIR/019/2022 dated January 5, 2022, the position of Senior Vice President of the Internal Audit Unit is held by Dian Permatasari. The parties involved in the appointment and dismissal process of the Senior Vice President of the Internal Audit Unit are the Board of Commissioners and the President Director. Below is the profile.



Dian Permatasari

SVP Satuan Pengawasan Intern
SVP of the Internal Audit Unit

Kelahiran | Birth
Jakarta, 6 September 1976
Jakarta, September 6, 1976

Usia | Age
49 Tahun
49 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili	Palembang, Sumatera Selatan
<i>Residence</i>	<i>Palembang, South Sumatera</i>
Riwayat Penunjukan	Ditunjuk sebagai SVP SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK/DIR/019/2022 tanggal 5 Januari 2022.
<i>Appointment History</i>	<i>Appointed as SVP of the Internal Audit Unit based on the Board of Directors' Decree No SK/DIR/019/2022 Dated January 5, 2022.</i>
Riwayat Penunjukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualified Chief Risk Officer (QCRO). 2. Certified Governance, Risk & Compliance Executive Officer (CGRCEO) 3. Manajemen umum Dana Pensiun (MUDP) 4. Qualified Risk Management Professional (QRMP) 5. Certified Internal Auditor Executive (CIAE). 6. Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) 7. Sarjana Akuntansi, Universitas Lampung – 2000
<i>Appointment History</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Qualified Chief Risk Officer (QCRO)</i> 2. <i>Certified Governance, Risk & Compliance Executive Officer (CGRCEO)</i> 3. <i>Pension Fund General Management (MUDP)</i> 4. <i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> 5. <i>Certified Internal Auditor Executive (CIAE)</i> 6. <i>Qualified Internal Auditor Certification (QIA)</i> 7. <i>Bachelor's Degree in Accounting, University of Lampung – 2000</i>
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. VP Akuntansi (2021-2022). 2. Manager Keuangan (2018-2021), 3. Manager Pengawasan Keuangan (2016-2018) 4. Manager Program Kemitraan & Bina Lingkungan (April-November 2016), 5. Staf Pengendali Teknis Pengawasan Keuangan (2014-2016) 6. Memulai karir di Pusri, 1 Januari 2004
<i>Work Experience</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Vice President of Accounting (2021-2022)</i> 2. <i>Finance Manager (2018-2021)</i> 3. <i>Financial Supervision Manager (2016-2018)</i> 4. <i>Partnership & Community Development Program Manager (April-November 2016)</i> 5. <i>Financial Supervision Technical Control Staff (2014-2016)</i> 6. <i>Began career at Pusri on January 1, 2004</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SENIOR VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan telah mengatur tugas dan tanggung jawab Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan seluruh pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kegiatan unit kerja agar kebijakan Direksi, fungsi-fungsi manajemen dan pengendalian intern di lingkungan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SENIOR VICE PRESIDENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Company has established the duties and responsibilities of the Senior Vice President of the Internal Audit Unit, which include:

1. Coordinating all supervision and examination of the company's operational units to ensure that the Board of Directors' policies, management functions, and internal control

perusahaan dengan memperhatikan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif). Dalam pelaksanaannya, SVP Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan audit internal pada seluruh unit kerja yang ada di perusahaan meliputi audit kepatuhan, audit operasional (manajemen audit), audit keuangan (*financial audit*) dan audit khusus/audit investigasi sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.
3. Mengkoordinasikan kegiatan konsultasi kepada Manajemen perihal penyempurnaan sistem, prosedur, dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan dan pengendalian Manajemen, sehingga selaras dengan misi dan tujuan serta strategi perusahaan.
4. Mengkoordinasikan audit dengan auditor dan/atau konsultan eksternal serta menyediakan data & informasi perusahaan untuk kebutuhan tersebut.
5. Memberikan pendapat, rekomendasi & saran perbaikan kepada Direksi dalam mengamankan harta dan kekayaan perusahaan.
6. Memberikan opini atas implementasi Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko untuk keseluruhan perusahaan.
7. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka perencanaan audit internal dan pelaksanaan audit oleh eksternal auditor.
8. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi (EDP Audit) dan Manajemen Risiko, sesuai ketentuan pemerintah dan perkembangan bisnis perusahaan.
9. Melakukan pengawasan jalannya perusahaan agar tetap dalam prinsip-prinsip GCG.
10. Mengkoordinir KPI, program pelatihan auditor, rencana kerja dan anggaran serta laporan unit kerja SPI untuk disampaikan kepada manajemen dan eksternal.
11. Melaksanakan setiap perintah atasan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.
12. Melakukan pengelolaan risiko (identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko) di unit kerja sebagai upaya memaksimalkan nilai perusahaan dan membentuk budaya pengelolaan risiko dan berinovasi di unit kerja.
13. Mendorong implementasi tata nilai AKHLAK di lingkup Kompartemen Satuan Pengawasan Intern.
14. Merencanakan, menyetujui, mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan lingkungan, tujuan lingkungan, sasaran lingkungan dan program untuk mencapainya di lingkup Kompartemen.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT SPI

SPI berada langsung di bawah Direktur Utama dan merupakan organisasi audit internal yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SPI ditetapkan dalam Surat Keputusan No. SK/DIR/412/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/547/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan

mechanisms adhere to the principles of economy, efficiency, and effectiveness (3E). In carrying out these responsibilities, the SVP of the Internal Audit Unit reports to the President Director.

2. Coordinating all internal audit activities across the company's operational units, including compliance audits, operational (management) audits, financial audits, and special/ investigative audits, in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
3. Coordinating consultation activities with management regarding the improvement of systems, procedures, and policies necessary to enhance efficiency, effectiveness, and management controls, aligning them with the company's mission, objectives, and strategies.
4. Coordinating audits with external auditors and/or consultants and providing company data and information as required.
5. Providing opinions, recommendations, and improvement suggestions to the Board of Directors for safeguarding the company's assets and wealth.
6. Providing opinions on the implementation of internal controls and risk management throughout the company.
7. Coordinating with the Audit Committee regarding internal audit planning and external audit execution.
8. Developing IT-based audit and supervision systems (EDP Audit) and risk management practices in compliance with government regulations and the company's business development.
9. Supervising company operations to ensure adherence to Good Corporate Governance (GCG) principles.
10. Overseeing key performance indicators (KPIs), auditor training programs, work plans, budgets, and Internal Audit Unit reports for submission to management and external stakeholders.
11. Carrying out directives from superiors in accordance with company policies.
12. Managing risk (identification, measurement, and mitigation) within the Internal Audit Unit to maximize company value and foster a culture of risk management and innovation.
13. Promoting the implementation of the AKHLAK corporate values within the Internal Audit Unit.
14. Planning, approving, developing, communicating, and socializing environmental policies, environmental objectives, targets, and programs within the Internal Audit Unit.

STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

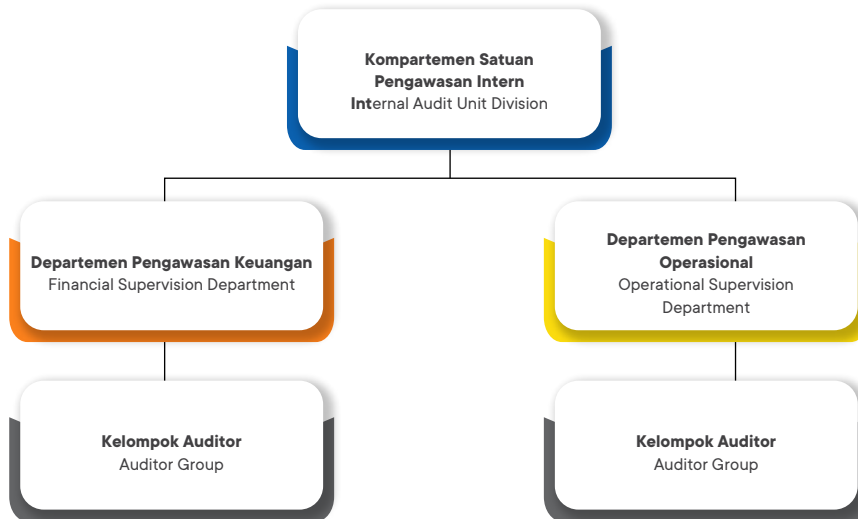
The Internal Audit Unit (SPI) reports directly to the President Director and functions as an independent and objective internal audit organization. The Internal Audit Unit's structure was established through Decree No. SK/DIR/412/2022 dated December 12, 2022, concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and was last amended by the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/547/2024 dated December 10, 2024, regarding the Enhancement of the Organizational Structure within

Kompartemen Teknologi & K3LH Direktorat Operasi & Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

the Technology & HSE (K3LH) Division under the Directorate of Operations & Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yang berkedudukan di Kantor Pusat dan membawahi Departemen Pengawasan Keuangan dan Departemen Pengawasan Operasional. Berikut adalah bagan struktur organisasi SPI.

The Internal Audit Unit is directly accountable to the President Director, who is based at the Head Office, and oversees the Financial Supervision Department and the Operational Supervision Department. Below is the organizational structure chart of the Internal Audit Unit.



KEANGGOTAAN SPI

Per 31 Desember 2024, jumlah personel Satuan Pengawasan Intern sebanyak 17 karyawan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

SPI MEMBERSHIP

As of December 31, 2024, the Internal Audit Unit has a total of 17 employees. The details are as follows:

Jabatan Position	Formasi Formation	Realisasi Realization
SVP SPI SVP SPI	1	1
Senior Officer Pengawasan Intern Senior Internal Audit Officer	2	0
VP Pengawasan Operasional VP of Operational Supervision	1	1
Senior Officer Pengendali Teknis Pengawasan Operasional Senior Technical Control Officer for Operational Supervision	2	2
Officer Pengawasan Produksi Production Supervision Officer	1	1
Officer Pengawasan Teknik Technical Supervision Officer	1	0
Officer Pengawasan Pemasaran Marketing Supervision Officer	1	1
Officer Pengawasan Penunjang Support Supervision Officer	1	1
Junior Officer Pengawasan Operasional Junior Operational Supervision Officer	4	3
VP Pengawasan Keuangan VP of Financial Supervision	1	1
Senior Officer Pengendali Teknis Pengawasan Keuangan Senior Technical Control Officer for Financial Supervision	2	1
Officer Pengawasan Keuangan Financial Supervision Officer	1	1
Officer Pengawasan Electronic Data Processing (EDP) Electronic Data Processing (EDP) Supervision Officer	1	0

Jabatan Position	Formasi Formation	Realisasi Realization
Officer Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Riksus) Special Audit (Riksus) Supervision Officer	1	1
Officer Pengawasan Perencanaan & Analisa Planning & Analysis Supervision Officer	1	1
Junior Officer Pengawasan Keuangan Junior Financial Supervision Officer	4	2

KOMPETENSI AUDITOR

Perusahaan secara berkesinambungan menyertakan para auditor pada program-program sertifikasi profesi di bidang SPI, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi auditor.

AUDITOR COMPETENCY

The Company continuously enrolls auditors in professional certification programs in the field of internal auditing, both at the national and international levels. This initiative is part of the strategy to enhance auditors' knowledge and competencies.

Sertifikasi Certification	Total Total	Nama Name
CIAE <i>Certified Internal Auditor Executive</i>	1	Dian Permatasari
QIA <i>Qualified Internal Auditor</i>	17	<ol style="list-style-type: none"> Dian Permatasari Hadi Suyono Nurni Astuti Firman Aji Bayutomo Livia Sarita Nyoman Pramesti M. Iqbal Hakim Abdul Hakim Rosmaida Rully Nugraha R. Zakky Rahman Chandra Herdiputra Mutia Lamora Agus Ginta Ryan Saputra M. Ridho Adriandz Achmad Alba Anjany
CIAO <i>Certified Internal Auditor Officer</i>	3	<ol style="list-style-type: none"> Mutia Lamora Agus M. Ridho Adriandz
QRMP <i>Qualified Risk Management Professional</i>	4	<ol style="list-style-type: none"> Dian Permatasari Nurni Astuti Hadi Suyono Firman Aji Bayutomo
QRMA <i>Qualified Risk Management Analyst</i>	11	<ol style="list-style-type: none"> Livia Sarita Nyoman Pramesti Abdul Hakim M. Iqbal Hakim Rully Nugraha R. Zakky Rahman Chandra Herdiputra Mutia Lamora Ginta Ryan Saputra M. Ridho Adriandz Achmad Alba Anjany
CA <i>Chartered Accountant</i>	1	Livia Sarita
ERMAP <i>Enterprise Risk Management Associate Professional</i>	2	<ol style="list-style-type: none"> Nyoman Pramesti Rosmaida

Sertifikasi Certification	Total Total	Nama Name
MUDP Manajemen Umum Dana Pensiun	8	1. Dian Permatasari 2. Hadi Suyono 3. Nurni Astuti 4. Firman Aji Bayutomo 5. Livia Sarita 6. Abdul Hakim 7. Nyoman Pramesti 8. Agus
Brevet AB	1	Abdul Hakim
Brevet C	1	Abdul Hakim
CGRCEO Certified Governance, Risk & Compliance Executive Officer	1	Dian Permatasari
CGRCP Certified Governance, Risk & Compliance Professional	16	1. Nurni Astuti 2. Hadi Suyono 3. Firman Aji Bayutomo 4. Livia Sarita 5. Abdul Hakim 6. Nyoman Pramesti 7. Rosmaida 8. Rully Nugraha 9. M. Iqbal Hakim 10. R. Zakky Rahman 11. Chandra Herdiputra 12. Mutia Lamora 13. Agus 14. Ginta Ryan Saputra 15. M. Ridho Adriandz 16. Achmad Alba Anjany
QCRO Qualified Chief Risk Officer	1	Dian Permatasari

Selama tahun 2024, PT Pusri Palembang telah menyertakan para auditor dalam berbagai pelatihan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualitas audit. Secara keseluruhan ada 22 kegiatan pelatihan, termasuk pelaksanaan sertifikasi profesi.

Throughout 2024, PT Pusri Palembang has enrolled auditors in various training programs aimed at enhancing competencies and improving audit quality. A total of 22 training activities were conducted, including professional certification programs.

Nama Kegiatan Activity Name	Pemberi Sertifikasi Certification Provider	Tahun Pelaksanaan Year
CIAE	BPKP Pusat	2024
MUDP	ADPI	2024
CGRCP	CRMS	2024
ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (PECB Certified) – ISO 37001 Anti-Bribery Management System (PECB Certified)	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)	2024
Business Acumen - Personal Development	Inixindo	2024
Performance Coaching	Daya Dimensi Indonesia	2024
Inhouse Training Persiapan Ujian CAFB Akuntansi Keuangan In-House Training for CAFB Financial Accounting Exam Preparation	PPA FEB Universitas Indonesia	2024
Penilai Risk Maturity Index (RMI) Batch II Risk Maturity Index (RMI) Assessor Batch II	PT PMLI	2024
Environmental, Social, Governance (ESG) for Sustainable Business	PT Olahkarsa Inovasi Indonesia	2024
Workshop Penilaian Kapabilitas SPI Pupuk Indonesia Grup Berbasis IACM Workshop on SPI Pupuk Indonesia Group Capability Assessment Based on IACM	SPI PT Pupuk Indonesia (Persero)	2024
Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA & K)	2024
Akuntansi Derivatif & Lindung Nilai dan Pelatihan PSAK 16 Aset Tetap Derivative Accounting & Hedging and PSAK 16 Fixed Assets Training	Ikatan Akuntan Indonesia / IAI	2024
Strategic Management	Insmart	2024

Nama Kegiatan Activity Name	Pemberi Sertifikasi Certification Provider	Tahun Pelaksanaan Year
ESG Fundamentals	CRMS Indonesia	2024
Workshop Quality Assurance Improvement Programs (QAIP)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2024
Building Innovation with Design Thinking & System Thinking	Inixindo Jogja	2024
Data Visualization with Power BI	Inixindo Jogja	2024
Workshop Percepatan Implementasi Audit Management System SPI Pupuk Indonesia Group Workshop on Accelerating the Implementation of the Audit Management System for the Pupuk Indonesia Group Internal Audit Unit	SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) & Konsultan Centria	2024
Procurement Audit for Private Sectors (PAPR)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2024
Fundamental IT Audit	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2024
Fundamental IT IHT PT PSP Angkatan I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2024
Evaluasi Environmental, Social, And Governance Environmental, Social, and Governance (ESG) Evaluation	BPKP Bidang Akuntan Negara	2024

PROGRAM KERJA SPI

Kegiatan SPI dilakukan sesuai dengan standar dengan memperhatikan setiap risiko dikenali dan dikelola secara tepat, pengendalian internal dilaksanakan secara efektif; segala kebijakan, prosedur dan peraturan ditaati; serta setiap kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, diinvestigasi, dan diatasi.

Hasil Audit Internal yang berupa rekomendasi untuk perbaikan dilaporkan secara periodik kepada pihak manajemen dan Komite Audit dan implementasinya dimonitor secara berkesinambungan.

RAPAT SPI

Sepanjang tahun 2024, SPI menyelenggarakan 12 kali rapat dengan agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota SPI sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT (SPI) WORK PROGRAM

SPI activities are conducted in accordance with established standards, ensuring that all identified risks are properly managed, internal controls are effectively implemented, policies, procedures, and regulations are adhered to, and any potential fraud is anticipated, identified, investigated, and addressed.

Internal Audit results, including recommendations for improvement, are periodically reported to management and the Audit Committee, with their implementation continuously monitored.

SPI MEETINGS

Throughout 2024, the Internal Audit Unit (SPI) held 12 meetings, with the agenda and attendance of each SPI member detailed as follows:

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Agenda	Kehadiran % Attendance %
1	16 Januari 2024 January 16, 2024	Rapat Kinerja Bulan Desember 2023 SPI dan Komite Audit December 2023 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
2	19 Februari 2024 February 19, 2024	Rapat Kinerja Bulan Januari 2024 SPI dan Komite Audit January 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
3	19 Maret 2024 March 19, 2024	Rapat Kinerja Bulan Februari 2024 SPI dan Komite Audit February 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
4	22 April 2024 April 22, 2024	Rapat Kinerja Bulan Maret 2024 SPI dan Komite Audit March 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
5	17 Mei 2024 May 17, 2024	Rapat Kinerja Bulan April 2024 SPI dan Komite Audit April 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
6	14 Juni 2024 June 14, 2024	Rapat Kinerja Bulan Mei 2024 SPI dan Komite Audit May 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
7	15 Juli 2024 July 15, 2024	Rapat Kinerja Bulan Juni 2024 SPI dan Komite Audit June 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
8	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Rapat Kinerja Bulan Juli 2024 SPI dan Komite Audit July 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Agenda	Kehadiran % Attendance %
9	12 September 2024 September 12, 2024	Rapat Kinerja Bulan Agustus 2024 SPI dan Komite Audit August 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
10	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Rapat Kinerja Bulan September 2024 SPI dan Komite Audit September 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
11	11 November 2024 November 11, 2024	Rapat Kinerja Bulan Oktober 2024 SPI dan Komite Audit October 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100
12	16 Desember 2024 December 16, 2024	Rapat Kinerja Bulan November 2024 SPI dan Komite Audit November 2024 Performance Meeting – SPI and Audit Committee	100



KINERJA DAN REALISASI PELAKSANAAN AUDIT 2024

Proses audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perusahaan (bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya). Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI disampaikan kepada Direktur Utama. Selanjutnya, rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya.



Berikut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SPI:



PERFORMANCE AND REALIZATION OF THE 2024 AUDIT IMPLEMENTATION

The audit process is carried out to evaluate the effectiveness of the Company's Internal Control System, Risk Management, and Corporate Governance processes, as well as to assess the efficiency and effectiveness of all company activities, including finance, operations, human resources, information technology, and other areas. The audit reports prepared by the Internal Audit Unit (SPI) are submitted to the President Director. Subsequently, the recommendations from these audit results are considered and serve as a reference for follow-up actions.

Below are the results of SPI's duties and responsibilities implementation:

Uraian Description	Realisasi Kegiatan SPI s.d. Triwulan IV 2024 SPI Activity Realization up to Q4 2024		
	Rencana PKPT PKPT Plan	Realisasi Realization	%
Penerbitan Laporan Kegiatan Assurance: Issuance of Assurance Activity Reports:			
Audit Audit	12	12	100
Evaluasi Evaluation	12	42	350
Konsultansi Consultancy	10	16	160
Kegiatan Pendampingan (Counterpart) Advisory Activities (Counterpart)	4	18	450
Kegiatan Rapat Komite Audit/Dewan Komisaris Audit Committee/Board of Commissioners Meeting Activities	12	12	100

Selama tahun 2024 SPI PT Pusri Palembang telah merealisasikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 12 program pemeriksaan, 42 kegiatan evaluasi, 16 kegiatan konsultansi, serta 18 kegiatan dengan *counterpart*.

Throughout 2024, the Internal Audit Unit (SPI) of PT Pusri Palembang has implemented the Annual Supervision Work Program (PKPT), carrying out 12 audit programs, 42 evaluation activities, 16 consultancy activities, and 18 counterpart activities.

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal PKPT tahun 2023

Monitoring of Follow-Up Actions on the 2023 Internal Audit PKPT

No	Objek Audit Audit Object	Rekomendasi PKPT PKPT Recommendations		
		Selesai Completed	Belum Not Completed	%
1	Kompartemen SDM HR Compartment	14	2	88

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal PKPT tahun 2023

Monitoring of Follow-Up Actions on the 2023 Internal Audit PKPT

No	Objek Audit Audit Object	Rekomendasi PKPT PKPT Recommendations		
		Selesai Completed	Belum Not Completed	%
2	Persiapan Pembangunan Pabrik P-IIIB Preparation for the Construction of P-IIIB Plant	15	0	100
3	Departemen Operasi P-VI P-VI Operations Department	11	0	100
4	Pengelolaan Dana Pensiun (Iuran Pasti) Pension Fund Management (Defined Contribution)	15	0	100
5	Departemen Operasi P-IIB P-IIB Operations Department	21	0	100
6	Pengelolaan Investasi pada Dapensri – PPMP Investment Management at Dapensri - PPMP	3	0	100
7	Evaluasi SPIP SPIP Evaluation	3	0	100
8	Evaluasi Manajemen Risiko & Tata Kelola Risk Management & Governance Evaluation	7	1	88
9	Joint Audit Optimalisasi Aset dan Pengelolaan Operasional UPP Meneng Joint Audit on Asset Optimization and Operational Management of UPP Meneng	10	6	63

Note: Rekomendasi target date 2023: 2 (dua) rekomendasi | Target date for recommendations in 2023: 2 (two) recommendations
Rekomendasi target date 2024: 7 (tujuh) rekomendasi | Target date for recommendations in 2024: 7 (seven) recommendations

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal PKPT tahun 2024

Monitoring of Follow-Up Actions on the 2024 Internal Audit PKPT

No	Objek Audit Audit Object	Rekomendasi PKPT PKPT Recommendations		
		Selesai Completed	Belum Not Completed	%
1	Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Berbasis IACM Self-Assessment of SPI Capability Based on IACM	0	2*	0
2	Evaluasi SPIP SPIP Evaluation	0	3*	0
3	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	0	9*	0
4	Aktivitas Jasa Pemeliharaan Pabrik Plant Maintenance Service Activities	20	8	71
5	Aktivitas Pengadaan Barang & Jasa Procurement of Goods & Services Activities	12	8+2*	55
6	Proyek P-IIIB P-IIIB Project	0	10*	0

*26 rekomendasi dengan target date selesai tahun 2025

*26 recommendations with a target completion date in 2025

EVALUASI KINERJA KOMPARTEMEN SPI

Kinerja SPI diukur dan dinilai dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) secara tahunan. Realisasi pencapaian KPI SVP SPI tahun 2024 sebesar 107,27% dari target 100%. Untuk dapat memastikan bahwa tindak lanjut atau langkah perbaikan atas hasil audit atau hasil reviu/evaluasi wajib dilaksanakan oleh *auditee* dan/atau pihak terkait tertuang dalam laporan hasil audit dan laporan hasil reviu/evaluasi. Tanggung jawab SPI adalah melakukan pemantauan dan penilaian atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh *auditee* dan atasannya, serta melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut, termasuk jika *auditee* dan atasannya gagal melakukan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE SPI COMPARTMENT

The performance of the Internal Audit Unit (SPI) is measured and assessed based on the achievement of annual. Realization of SVP SPI KPI achievement in 2024 was 107.27%. To ensure that follow-up actions or corrective measures on audit findings or review/evaluation results are carried out, the auditee and/or relevant parties are required to implement them as documented in the audit report and review/evaluation report. SPI is responsible for monitoring and assessing the corrective actions taken by the auditee and their superiors, as well as reporting the follow-up monitoring results. If the auditee and their superiors fail to implement the required corrective actions, SPI will report this to the President Director and the Board of Commissioners.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Company Internal Control System



Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan Perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan Perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program Perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

SPIP yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi Top Management yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan PUSRI yang lebih efektif pula.

SPIP berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*.

Tujuan penerapan SPIP dalam Perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan Perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan Perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PUSRI berusaha untuk menghindari risiko dari penerapan sistem.

The Company's Internal Control System (SPIP) is a business or social system implemented by the Company, consisting of an organizational structure, methods, and measures designed to safeguard and guide the Company's operations in alignment with its objectives and programs, while also promoting efficiency and ensuring compliance with management policies.

A reliable and effective SPIP provides accurate information to Top Management, enabling them to make well-informed decisions and policies that effectively support PUSRI's goal achievement.

SPIP functions as a mechanism to optimize the utilization of existing resources to maximize returns (gains) by applying a design approach based on the *Cost-Benefit* principle.

The primary objectives of implementing SPIP within the Company are to prevent procedural deviations, ensure the reliability of financial reporting, and align the Company's activities with applicable laws and regulations. This reflects PUSRI's commitment to mitigating risks associated with system implementation.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengendalian internal harus selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kerangka yang digariskan dalam visi, misi dan tujuan Perusahaan.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilaksanakan dengan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO). Tujuan SPIP adalah mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Secara garis besar, SPIP yang dilaksanakan di PUSRI, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
3. Aktivitas pengendalian.
4. Sistem informasi dan komunikasi.
5. Monitoring dalam implementasi secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan. Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan penasihatn terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit. Sedangkan Direksi menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu SPIP yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi pegawai. SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

In its implementation, the internal control function must always consider the interests of the Company, Shareholders, and Stakeholders in accordance with the framework outlined in the Company's vision, mission, and objectives.

The development of the Company's Internal Control System is carried out using the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) approach. The objective of the Internal Control System (SPIP) is to safeguard the Company's investments and assets. The Internal Control System (SPIP) implemented at PUSRI includes:


1. A disciplined and structured internal control environment within the Company.
2. Business risk assessment and management.
3. Control activities.
4. Information and communication systems.
5. Monitoring of implementation, which is further detailed through various policies, including Guidelines, Operational Instructions, and Work Instructions.

CONTROL OVER OPERATIONAL IMPLEMENTATION AND FINANCIAL REPORTING



The implementation of financial and operational control is carried out at multiple levels, covering all elements within the Company. The Board of Commissioners exercises financial and operational control by providing supervision and advisory support regarding the adequacy and fairness of financial report preparation and risk management, ensuring adherence to the principle of prudence, with the assistance of the Audit Committee. Meanwhile, the Board of Directors enforces the Company's Internal Control System (SPIP) through the consistent implementation of corporate policies and procedures, ensuring compliance with applicable regulations, including those related to the Company's business activities, risk management, strategic planning, task delegation, authority delegation, and adequate accounting policies.

The Board of Directors establishes an effective Internal Control System (SPIP) to safeguard the Company's investments and assets. The internal control environment within the Company is implemented with discipline, structured processes, high integrity, strong ethical values, and employee competence. The Internal Audit Unit (SPI) is an integral part of the Company's Internal Control System (SPIP) and is established to assist the President Director in fulfilling obligations to Shareholders by conducting internal audits within the Company. SPI actively enhances internal control in financial reporting and various operational activities. Internal control within the Company is continuously evaluated to ensure it remains aligned with the Company's business developments.



EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL




Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) ini memiliki peran sebagai pengawas atas seluruh aktivitas Perusahaan, memberikan pandangan objektif serta kepastian hasil evaluasi adanya efektivitas dalam menjalankan baik manajemen risiko maupun pelaksanaan manajemen operasional pada setiap unit Kerja.





PUSRI melakukan analisis laporan hasil audit secara periodik tahunan dan mengelompokkan hasil audit sesuai dengan kategori sasaran (*objectives*) dan komponen dalam kerangka COSO. Dengan demikian, Perusahaan dapat melakukan peningkatan (*improvement*) untuk komponen-komponen yang memerlukannya secara terarah. Analisis hasil audit tersebut juga dilakukan untuk mengukur keefektifan dari pencapaian sasaran Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (operasional, keakurasian/keandalan laporan-laporan Perusahaan, serta kepatuhan terhadap aturan perundangan yang berlaku).

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi Perusahaan harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga dapat meminimalkan angka risiko penyimpangan. Kegiatan pengendalian pada PUSRI pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- 
1. Melakukan Audit terhadap kinerja unit kerja atau aktivitas operasional Perusahaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan di tahun 2024.
 2. Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) secara rutin setiap tahunnya.
 3. Melakukan peran konsultasi dan fungsi *counterpart* untuk kegiatan rutin tahunan dan auditor eksternal.



SPI menerapkan metodologi audit berbasis risiko. Melalui metodologi ini pelaksanaan audit lebih difokuskan untuk evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap sistem pengendalian intern atas aktivitas bisnis Perusahaan yang berisiko tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang berlangsung tahun 2024, SPI telah memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal kepada manajemen untuk area-area yang masih memerlukan perbaikan, antara lain:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System (SPIP) plays a supervisory role over all Company activities, providing an objective perspective and ensuring that risk management and operational management are effectively implemented in each work unit.

PUSRI conducts periodic annual analyses of audit reports, categorizing the findings based on objectives and components within the COSO framework. This approach enables the Company to systematically improve the components that require enhancement. The audit analysis is also used to measure the effectiveness of the Internal Control System (SPIP) in achieving its objectives, including operational efficiency, the accuracy and reliability of the Company reports, and compliance with applicable laws and regulations.

Control activities are designed to ensure that the supervision mechanism functions effectively and continuously, involving all relevant parties. All stakeholders within the Company's organizational structure must reflect a clear segregation of duties to minimize the risk of irregularities. The control activities carried out by PUSRI in 2024 included:

1. Conducting audits on the performance of work units and operational activities in accordance with the Annual Supervision Work Program (PKPT) established for 2024.
2. Performing routine evaluations of the Internal Control System (SPIP) on an annual basis.
3. Acting in a consultative role and as a counterpart for annual routine activities and external auditors.

The Internal Audit Unit (SPI) applies a risk-based audit methodology, which allows audits to focus on evaluating and providing recommendations for internal control systems related to high-risk business activities.

Based on the evaluation conducted in 2024, SPI has provided internal control improvement recommendations to management for areas that still require enhancements, including:

Lingkungan Pengendalian

Control Environment

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) aspek dengan 28 (dua puluh delapan) kriteria dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan ke-tujuh aspek tersebut masuk dalam kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 28,35 dari skor maksimal 30 atau 94,50%, namun masih terdapat dua kriteria penilaian pada aspek penegakan integritas dan nilai etika serta pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan.

Based on the review conducted on 7 (seven) aspects with 28 (twenty-eight) criteria, it can be concluded that, overall, the implementation of these seven aspects falls under the 'Very Good' category, with a score of 28.35 out of the maximum score of 30, or 94.50%. However, there are still two assessment criteria on the aspects of integrity enforcement and ethical values, as well as the establishment of an organizational structure that aligns with needs, which require further improvement.

Departemen Tata Kelola agar memutakhirkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang dibubuhi tanda tangan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini.

The Governance Department is required to update the Code of Ethics and Conduct, which must be signed by the current Board of Commissioners and Board of Directors.

Penilaian Risiko

Risk Assessment

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 4 (empat) aspek dengan 16 (enam belas) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan keempat aspek tersebut masuk dalam kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 19,55 dari skor maksimal 20 atau 97,75%. Tidak terdapat aspek yang penerapannya memerlukan perbaikan.

Based on the review conducted on 4 (four) aspects with 16 (sixteen) criteria, it can be concluded that the implementation of these aspects falls into the 'Very Good' category, with a score of 19.55 out of a maximum score of 20, or 97.75%. No aspects require improvement in their implementation.

Aktivitas Pengendalian

Control Activities

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) aspek dengan 21 (dua puluh satu) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepuluh aspek tersebut masuk dalam kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 19,56 dari skor maksimal 20 atau 97,81%. Tidak terdapat aspek yang penerapannya memerlukan perbaikan.

Based on the review conducted on 10 (ten) aspects with 21 (twenty-one) criteria, it can be concluded that the implementation of these aspects falls into the 'Very Good' category, with a score of 19.56 out of a maximum score of 20, or 97.81%. No aspects require improvement in their implementation.

Informasi dan Komunikasi

Information and Communication

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dengan 7 (tujuh) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga aspek tersebut masuk dalam kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 14,67 dari skor maksimal 15 atau 97,83%. Tidak terdapat aspek yang penerapannya memerlukan perbaikan.

Based on the review conducted on 3 (three) aspects with 7 (seven) criteria, it can be concluded that the implementation of these aspects falls into the 'Very Good' category, with a score of 14.67 out of a maximum score of 15, or 97.83%. No aspects require improvement in their implementation.

Pemantauan

Monitoring

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dengan 13 (tiga belas) kriteria dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan ketiga aspek tersebut termasuk kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 14,40 dari skor maksimal 15 atau 96,00%, namun terdapat dua kriteria penilaian pada aspek pemantauan berkelanjutan dan penyelesaian audit yang masih perlu ditingkatkan.

Based on the review conducted on 3 (three) aspects with 13 (thirteen) criteria, it can be concluded that, overall, the implementation of these aspects falls under the 'Very Good' category, with a score of 14.40 out of the maximum score of 15, or 96.00%. However, there are two assessment criteria on the aspects of continuous monitoring and audit resolution that still need improvement.

1. SPI agar berkoordinasi dengan unit kerja (selevel Departemen) untuk pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal di unit kerja masing-masing.
2. SPI agar berkoordinasi dengan unit kerja (*auditee*) untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dan dilakukan pemantauan oleh pimpinannya melalui SI-MTL.

1. The Internal Audit (SPI) is to coordinate with the work units (at the Department level) to conduct a self-assessment on the adequacy and effectiveness of the internal control system within each unit.
2. The Internal Audit (SPI) is to coordinate with the work units (auditees) to ensure the resolution of follow-up actions on internal audit recommendations in accordance with the agreed-upon timeline, with monitoring conducted by the leadership through SI-MTL.

Hasil evaluasi tersebut yang kemudian menjadi dasar evaluasi manajemen terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

The results of this evaluation serve as the basis for management's assessment of the effectiveness of the internal control system in order to implement improvements and enhance the quality of corporate management, thereby minimizing the occurrence of discrepancies.

PERNYATAAN DIREKSI/ DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN



Dewan Komisaris senantiasa memastikan kecukupan pengendalian internal, perihal tersebut dituangkan dalam Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Pusri No.S-67/DEKOM/PUSRI/XII/2024 perihal Telaah atas Kebijakan/Rancangan Sistem Pengendalian Intern Nomor SK/DIR/263/2016 Serta Telaah Pelaksanaan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pengendalian Intern Pada Tingkat Operasional.



Dalam optimalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, agar dilakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi internal dan eksternal ataupun terkait perkembangan usaha PUSRI yang terus berjalan.



Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PUSRI berada pada tingkat kecukupan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP yang diterapkan PUSRI telah distandarisasi dan secara periodik dievaluasi, sehingga aspek-aspek setiap komponen dapat terpenuhi atau mendekati *best practices* penerapan sistem pengendalian internal. Meskipun pada setiap komponen SPIP masih terdapat penerapan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan, antara lain:



1. Karyawan belum seluruhnya mengetahui kode etik mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Budaya kerja untuk mencapai tujuan Perusahaan belum seutuhnya dibangun.
3. Perusahaan belum memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh karyawan telah menerima pelatihan yang tepat dan berkesinambungan.
4. Dari hasil survei, sebagian karyawan beranggapan pimpinan Perusahaan hanya berorientasi pada pencapaian hasil jangka pendek.
5. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi dan sosial telah dimitigasi, namun risiko terkait politik dan budaya belum dipertimbangkan.
6. Karyawan yang bertanggung jawab atas catatan pengendalian atas aset belum melaporkan catatan pengendalian aset di unit kerjanya secara rutin/periodik.
7. Belum semua pimpinan unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sesuai target waktu yang ditetapkan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners consistently ensures the adequacy of internal control, as outlined in the Board of Commissioners' Letter to the Board of Directors of PT Pusri No. S-67/DEKOM/PUSRI/XII/2024 regarding the Review of the Policy/Draft of Internal Control System No. SK/DIR/263/2016 and the Review of the Implementation of the Evaluation Results on the Effectiveness of Internal Control at the Operational Level.

In optimizing the implementation of Good Corporate Governance, a continuous evaluation of the effectiveness of the internal control system is recommended. The evaluation should focus on functional activities and business processes that carry high risks, either due to changes in internal and external conditions or in connection with the ongoing development of PUSRI's business.

Based on the evaluation of the Board of Commissioners, the implementation of PUSRI's Internal Control System is at a satisfactory level of adequacy. This indicates that PUSRI's Internal Control System (SPIP) has been standardized and is periodically evaluated, ensuring that each component's aspects are met or closely aligned with best practices in internal control implementation. However, certain areas within the SPIP still require improvements and enhancements, including:

1. Not all employees are fully aware of the code of ethics regarding acceptable and unacceptable behavior.
2. The corporate culture to achieve the Company's objectives has not been fully established.
3. The Company has not yet implemented a mechanism to ensure that all employees receive proper and continuous training.
4. Survey results indicate that some employees perceive Company leadership as being primarily focused on short-term results.
5. Risks arising from changes in economic and social conditions have been mitigated; however, political and cultural risks have not yet been considered.
6. Employees responsible for asset control records have not been regularly reporting asset control records within their respective work units.
7. Not all unit heads have followed up on audit recommendations within the designated timeframe.



Audit Eksternal

External Audit



PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) didasarkan pada kebutuhan PUSRI terkait pelaksanaan audit laporan keuangan selama periode tertentu oleh pihak independen. KAP bertugas menguji komponen dalam laporan keuangan untuk memastikan kewajaran dalam perhitungan dan pencatatan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan PUSRI serta memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PUSRI mensyaratkan Kantor Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The use of Public Accounting Firm (KAP) services is based on PUSRI's need for the implementation of financial statement audits over a specific period by an independent party. The KAP is responsible for examining the components of the financial statements to ensure the fairness of calculations and financial records presented in PUSRI's financial statements, as well as to verify compliance with generally accepted financial accounting standards. Additionally, the KAP provides an opinion on the fairness and conformity of the financial statements with generally accepted accounting principles in Indonesia.

PUSRI requires that the Public Accounting Firm remain free from influence by the Board of Commissioners, Board of Directors, and other interested parties within the Company. Moreover, the Company is obligated to provide all necessary accounting records and supporting data during the external audit process, enabling the Public Auditor to issue an opinion on the fairness, compliance, and alignment of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penggunaan jasa Akuntan Publik yang termasuk ke dalam auditor eksternal dibutuhkan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada dasarnya, pernyataan akuntan Publik merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham PUSRI maupun stakeholders lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024 ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat PUSRI.

Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Eksternal Auditor serta mengusulkan penunjukan/pemberhentian Kantor Akuntan Publik.

Pada tahun 2024, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) ditunjuk sebagai auditor eksternal PUSRI berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No. L202412270002/YSR/YSR & No. 03170/A/PA/A0102/SP/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang terakhir diubah dengan Addendum II No.01564/A/PA/A0102/SP/2025 & No.EL202505080004/HWO/HWO tanggal 08 Mei 2025 yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025.

Hasil evaluasi/penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) dengan kesimpulan:

1. Pelaksanaan kegiatan audit sejalan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan menunjukkan independensi serta objektivitas yang tinggi.
2. Finalisasi laporan diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati berdasarkan surat perjanjian.
3. Komunikasi Auditor dengan Komite Audit berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komite Audit mengajukan permohonan persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2024 PT Pusri dengan biaya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau maksimal sebesar Rp2.359.860.000,00 (termasuk PPN).

The engagement of a Public Accountant, classified as an external auditor, is essential to express an opinion on the fairness, in all material respects, of the financial position, financial performance, changes in equity, and cash flows in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia. Essentially, a Public Accountant's statement serves as an independent third-party opinion on the fairness of the financial statements presented to PUSRI's shareholders and other stakeholders regarding material matters contained in the financial statements.

The Public Accounting Firm assigned to audit the Company's financial statements for the 2024 fiscal year is appointed through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor must not have any conflicts of interest with any level of PUSRI officials.

Audit Committee's Responsibility in Recommending the Appointment and Dismissal of the External Auditor

The Audit Committee evaluates and assesses the effectiveness of the audit conducted by the External Auditor and proposes the appointment or dismissal of the Public Accounting Firm (KAP).

In 2024, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) was appointed as the external auditor for PUSRI based on Agreement Letter (SP) No. L202412270002/YSR/YSR & No. 03170/A/PA/A0102/SP/2024 dated December 27, 2024 which was last amended by Addendum II No.01564 /A/PA/A0102/SP/2025 & No.EL202505080004/HWO/HWO dated May 8, 2025 The engagement is effective from October 25, 2024 until dated May 22, 2025.

The evaluation and assessment of the effectiveness of the audit performed by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) with conclusion:

1. The audit process aligned with Public Accountant Professional Standards (SPAP) and demonstrated a high level of independence and objectivity.
2. The finalization of reports was completed on schedule, as agreed in the contract.
3. Communication between the Auditor and the Audit Committee was well-maintained.

Based on these findings, the Audit Committee requests shareholder approval to reappoint KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) to audit PUSRI's 2024 Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Micro and Small Enterprises (UMK). The proposed audit fee is lower than the previous year or a maximum of Rp2,359,860,000.00 (including VAT).

PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PUSRI menggunakan jasa auditor eksternal untuk memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham. Penunjukan penugasan KAP sebagai pelaksana audit penyajian Laporan Keuangan PUSRI dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Pada tahun 2023, Perusahaan menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) sebagai pelaksana audit eksternal yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.



Akuntan Publik Tahun 2024

Public Accountant in 2024



Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan
Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners

Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm Business License

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 315/KM.1/2024

Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 315/KM.1/2024

Akuntan Publik

Public Accountant

Heryanto

Tahun Audit

Audit Year

Tahun Buku 2024

2024 Fiscal Year

Periode Penugasan

Engagement Period

2024

Ruang Lingkup Pekerjaan

Scope of Work

1. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PUSRI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan *Management Letter* atas Pengendalian Internal pada PUSRI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4. Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi Kolegial dan Individu Direksi PUSRI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) PUSRI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

1. Independent Auditor's Report on PUSRI's Financial Statements for the year ended December 31, 2024.
2. Independent Auditor's Report on Compliance Audit with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended December 31, 2024.
3. Management Letter Report on Internal Control at PUSRI for the year ended December 31, 2024.
4. Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures for the Assessment of the Achievement Level of the Key Performance Indicators (KPI) of PUSRI's Collegial Board of Directors and Individual Directors for the year ended December 31, 2024.
5. Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Implementation of PUSRI's Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the year ended December 31, 2024.

Opini atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opinion on the Consolidated Financial Statements

Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Fair in all material respects, the Group's consolidated financial position as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Biaya

Fee

Rp2.359.860.000,- (Include PPN) I (including VAT)

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) AUDIT

PUSRI engages external auditors to ensure the integrity of its Financial Statement presentation to Shareholders. The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) as the auditor for PUSRI's Financial Statements is determined by the General Meeting of Shareholders (RUPS). In 2023, the Company appointed Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) as the external auditor responsible for auditing the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.



RIWAYAT PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PUSRI sepanjang tahun 2017-2024, sebagai berikut:

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Biaya (Rp) Fee (IDR)	Opini Opinion
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto, & Partners	Heryanto, CPA Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 1784	2.359.860.000	Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Fair in all material respects, the Group's consolidated financial position as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Partners	Toto Harsono Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 1122	2.354.310.000	Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Fair in all material respects, the consolidated financial position of the group as of December 31, 2023, and the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Partners	Heryanto Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 1784	2.218.890.000	Wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Nilai AAA untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Fair in all material respects and in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, with an AAA rating for the Company's Financial Soundness Level.
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Partners	Toto Harsono Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 1122	2.171.400.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fair in all material respects, A rating for Company Performance
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Partners	Yusron Fauzan	2.043.800.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fair in all material respects, A rating for Company Performance
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No Izin: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 477/ KM.1/2015 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No: Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 477/KM.1/2015	Rudi Hartono Purba No Izin: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 935/ KM.1/2016	621.785.450	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fair in all material respects, A rating for Company Performance

HISTORY OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM APPOINTMENTS

Number of Periods for Public Accountants and Public Accounting Firms

The Public Accounting Firms that have audited PUSRI's Financial Statements from 2017 to 2024 are as follows:

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Biaya (Rp) Fee (IDR)	Opini Opinion
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No Izin: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 477/ KM.1/2015 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No: Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 477/KM.1/2015	Saptoto Agustomo	624.910.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fair in all material respects, A rating for Company Performance
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Partners	Yanto	828.300.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fair in all material respects, A rating for Company Performance

Tugas Pokok Audit Eksternal

KAP mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit juga menilai laporan keuangan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditentukan. Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) juga memberikan jasa diagnostik Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) sesuai penugasannya dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Hasil Penilaian

Hasil audit keuangan oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi PT PUSRI Palembang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja baik keuangan maupun operasional. Manajemen PUSRI telah berupaya menindaklanjuti setiap temuan audit oleh Kantor Akuntan Publik sehingga secara efektif pelaksanaan audit berjalan dengan lancar.

Main Duties of External Audit

The Public Accounting Firm (KAP) has the primary duty as a public accountant to conduct audits in accordance with the auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). These standards require public accountants to plan and perform audits to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements. The audit also assesses the overall financial statements to ensure compliance with the applicable accounting principles. In addition to auditing the Financial Statements, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) also provides Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) diagnostic services as assigned from PT Pupuk Indonesia (Persero).

Assessment Results

The financial audit conducted by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) concluded that the consolidated financial statements of PT PUSRI Palembang were fairly presented in all material respects, including the Group's consolidated financial position as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Effectiveness of Audit Execution by the Public Accountant

The Audit Committee, in coordination with Internal Audit, conducts an assessment of the effectiveness of the external audit to ensure that all findings can be followed up in accordance with established authorities to improve both financial and operational performance. PUSRI's management has made efforts to address each audit finding from the Public Accounting Firm, ensuring that the audit process runs smoothly and effectively.



Tata Kelola & Manajemen Risiko

Corporate Governance & Risk Management



Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*), PUSRI, terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko sebagai salah satu fungsi pengendali atas terjadinya beragam risiko insiden yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan. Untuk itu PUSRI menjalankan proses identifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi seluruh potensi risiko yang ada, dan menjadikannya sebagai *early warning system* dalam memastikan tercapainya sasaran kinerja dan tujuan jangka panjang Perusahaan.

Setiap unit di Perusahaan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan atas risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang berkualitas dapat meningkatkan Shareholder value, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholders* maupun pengelola Perusahaan mengenai terdapatnya potensi peluang yang dapat diraih maupun potensi kerugian yang dapat dihindari, sehingga dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, serta memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

To improve the quality of implementing Good Corporate Governance (GCG), PUSRI continues to strive to enhance the application of Risk Management as a key control function to prevent various risk incidents that may affect the Company's performance. To this end, PUSRI undertakes the processes of identifying, measuring, monitoring, and mitigating all potential risks, utilizing them as an early warning system to ensure the achievement of performance targets and the Company's long-term objectives.

Each unit within the Company conducts identification, measurement, monitoring, and reporting of risks that may potentially prevent the achievement of the Company's objectives. The implementation of high-quality risk management can enhance shareholder value while also providing a comprehensive overview to stakeholders and company managers about potential opportunities that can be seized and potential losses that can be avoided. As a result, decision-makers and internal policy makers have access to data and information regarding the Company's performance, allowing for more effective and efficient decision-making.

DASAR PELAKSANAAN DAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:

1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) Nomor: SK/DIR/419/2024 tanggal 01 Oktober 2024.
2. Pedoman Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/ BCMS Nomor: PSP- STK-PD-025 tanggal 25 Maret 2024.
3. Prosedur Business Continuity Plan (BCP) No. PSP-STK-PR-013 tanggal 08 Januari 2024.
4. Prosedur Risk Opportunity Assessment Sisman Terintegrasi Nomor: PSP-IMS-PR-003 tanggal 13 Februari 2023.
5. Prosedur Penyusunan Risiko Utama Perusahaan/ RTM, BTR & KRI Nomor: SK/DIR/227/2021 tanggal 19 April 2022.
6. Pedoman Risk Control Assessment Nomor : PSP-STK-PD-077 tanggal 29 Oktober 2021.
7. Surat Keputusan Direksi tentang Komite Penerapan Manajemen Risiko Nomor: SK/ DIR/480/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
8. Surat Keputusan Direksi tentang POB Penyusunan Kajian Risiko Aksi Korporasi Nomor: SK/ DIR/429/2021 tanggal 29 September 2021.
9. Prosedur Risk Based Budgeting Nomor: PSP- TKMPR-056 tanggal 13 Agustus 2021.
10. Surat Keputusan Direksi tentang Tim Penyusunan Risiko Utama Perusahaan (RTM), BTR & KRI Nomor: SK/ DIR/352/2021 tanggal 23 Juli 2021.

ORGANISASI TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

PUSRI membentuk Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang sejalan dengan semangat akuntabilitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

BASIS FOR IMPLEMENTATION AND RISK MANAGEMENT GUIDELINES

The implementation of Risk Management is based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 regarding the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

1. Guideline for the Implementation of Integrated Risk Management (IRM) No. SK/DIR/419/2024 dated October 1, 2024.
2. Business Continuity Management System (BCMS) Guideline No. PSP-STK-PD-025 dated March 25, 2024.
3. Business Continuity Plan (BCP) Procedure No. PSP-STK-PR-013 dated January 8, 2024.
4. Integrated System Risk Opportunity Assessment Procedure No. PSP-IMS-PR-003 dated February 13, 2023.
5. Procedure for the Preparation of the Company's Key Risks / RTM, BTR & KRI No. SK/DIR/227/2021 dated April 19, 2022.
6. Risk Control Assessment Guideline No. PSP-STK-PD-077 dated October 29, 2021.
7. Board of Directors Decree on the Risk Management Implementation Committee No. SK/DIR/480/2021 dated October 26, 2021.
8. Board of Directors Decree on the SOP for Corporate Action Risk Assessment Preparation No. SK/DIR/429/2021 dated September 29, 2021.
9. Risk-Based Budgeting Procedure No. PSP-TKMPR-056 dated August 13, 2021.
10. Board of Directors Decree on the Team for the Preparation of the Company's Key Risks (RTM), BTR & KRI No. SK/ DIR/352/2021 dated July 23, 2021.

RISK GOVERNANCE & MANAGEMENT ORGANIZATION

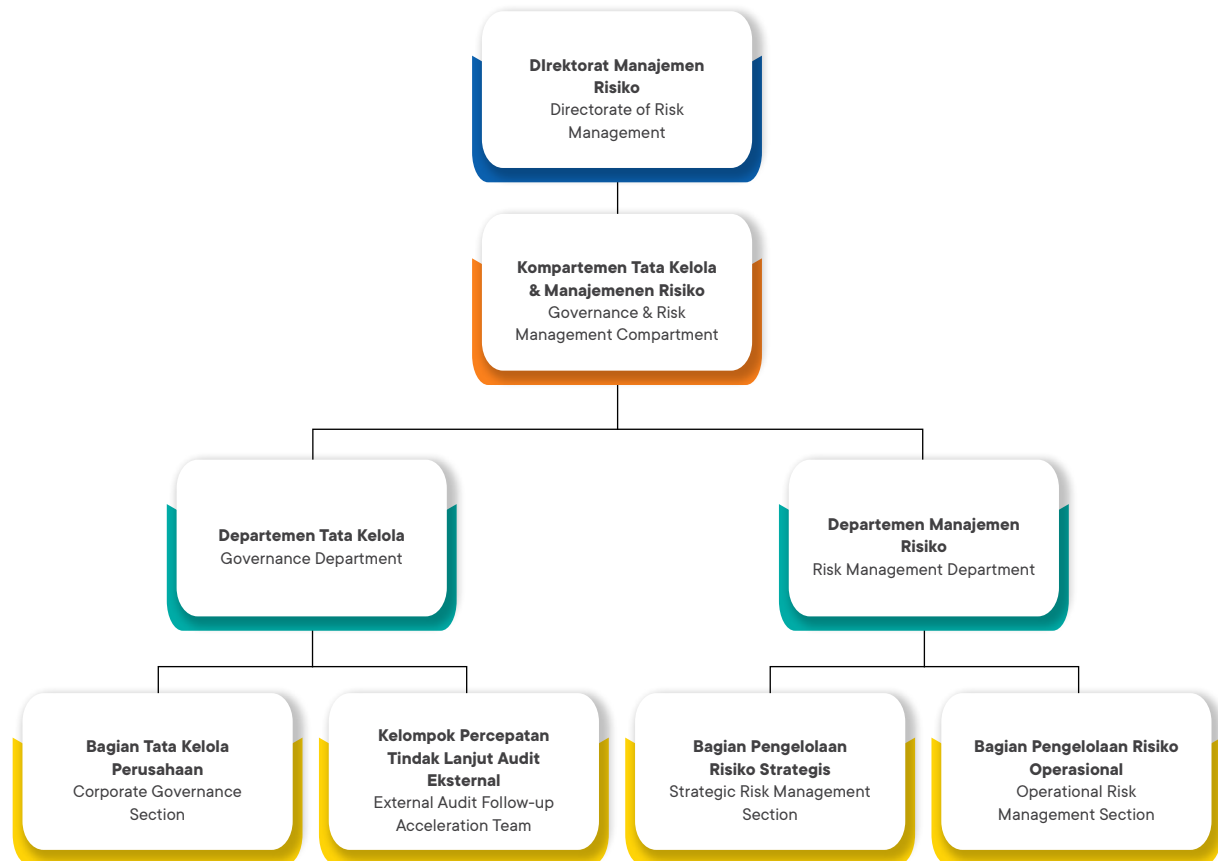
PUSRI established the Governance & Risk Management Division as a demonstration of its commitment to implementing risk management in alignment with the spirit of accountability and in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

Perusahaan kemudian menunjuk Junaedi sebagai SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko. Adapun struktur organisasi Kompartemen Tata Kelola dan Manajemen Risiko digambarkan dalam bagan di bawah ini.

The Company subsequently appointed Junaedi as Senior Vice President of Governance & Risk Management. The organizational structure of the Governance & Risk Management Division is illustrated in the chart below.

Struktur Organisasi Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko

Organizational Structure of the Governance & Risk Management Compartment



TUGAS DAN FUNGSI TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah mengatur tugas dan fungsi dari Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko, sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan, Pedoman, Prosedur Penerapan Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Mengelola dan memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penandatanganan Pakta Integritas Insan PUSRI.
3. Menjalankan program pengendalian gratifikasi.
4. Mengelola sistem pengaduan karyawan & *stakeholder* (*Whistleblowing System*) bersama dengan Tim Pengelola WBS.
5. Mengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan *Fraud Control System*.
6. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan asesmen penilaian penerapan GCG.
7. Penentuan Ambang Batas Risiko Perusahaan..
8. Melakukan identifikasi risiko utama Perusahaan berdasarkan perhitungan kontributor laba per sektor RKAP.
9. Melaksanakan proses asesmen risiko dengan cara melakukan proses identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.
10. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) dan Pengelolaan Risiko Utama Perusahaan (Risk That Matters/RTM) dan pencatatan kerugian yang terjadi di Perusahaan, telah digunakan fitur Loss Event Database (LED) pada sistem informasi PRISMA yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
11. Pelaporan pemantauan risiko tinggi dan strategis Perusahaan.
12. Pelaksanaan Klinik Risiko dengan unit kerja.
13. Melakukan penyusunan Kajian Analisis Risiko Aksi Korporasi Perusahaan.
14. Melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko Perusahaan.

DUTIES AND FUNCTIONS OF GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

The Company has outlined the duties and functions of the Governance & Risk Management Compartment as follows:

1. Develop policies, guidelines, procedures for the implementation of Risk Management, and Corporate Governance.
2. Manage and monitor compliance with the submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) and the signing of the Integrity Pact by PUSRI personnel.
3. Implement the anti-gratification control program.
4. Manage the employee and stakeholder complaint system (Whistleblowing System) together with the WBS Management Team.
5. Manage the Anti-Bribery Management System and Fraud Control System.
6. Prepare and coordinate the assessment of GCG implementation.
7. Determination of the Company's Risk Tolerance Threshold
8. Identify the Company's main risks based on the profit contributor calculation per sector in the RKAP.
9. Conduct risk assessments by identifying, managing, and controlling risks.
10. Managing the Risk Management Information System (SIMANIS), the Company's Key Risk Management (Risk That Matters/RTM), and the recording of losses incurred by the Company is carried out using the Loss Event Database (LED) feature within the PRISMA information system managed by PT Pupuk Indonesia (Persero).
11. Report on the monitoring of the Company's high and strategic risks.
12. Conduct Risk Clinics with work units.
13. Prepare the Corporate Action Risk Analysis Study.
14. Conduct socialization and training on corporate risk management.

PROFIL SENIOR VICE PRESIDENT TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO

PROFILE OF THE SENIOR VICE PRESIDENT OF GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT





Junaedi

Senior Vice President Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Senior Vice President of Governance and Risk Management

Kelahiran | Birth: Demak, 23 Maret 1975 / Demak, March 23, 1975

Usia | Age: 50 Tahun / 50 Years Old

Kewarganegaraan | Nationality: Warga Negara Indonesia

Domisili	Palembang, Sumatera Selatan
<i>Residence</i>	<i>Palembang, South Sumatera</i>
Riwayat Penunjukan	Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/292/2024 tanggal 08 Juli 2024
<i>Appointment History</i>	<i>Appointed based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/292/2024 dated July 08, 2024</i>
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1998, S1. Teknik Kimia, Universitas Diponegoro 2. 2017, S2. Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung
<i>Education History</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1998, Bachelor's Degree in Chemical Engineering, Universitas Diponegoro 2. 2017, Master's Degree in Chemical Engineering, Institut Teknologi Bandung
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko, 2024 - sekarang 2. SVP Rantai Pasok, 2023-2024 3. SVP Teknik & Rantai Pasok, 2022-2023 4. SVP Pengembangan, 2021-2022
<i>Work Experience</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SVP of Governance & Risk Management, 2024 - Present 2. SVP of Supply Chain, 2023 - 2024 3. SVP of Engineering & Supply Chain, 2022 - 2023 4. SVP of Development, 2021 - 2022

SERTIFIKASI DAN KUALIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya peningkatan kompetensi manajemen risiko, PUSRI melakukan program pengembangan kompetensi melalui sertifikasi profesi manajemen risiko. Daftar karyawan Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AND QUALIFICATION

As part of its efforts to enhance risk management competencies, PUSRI implements a competency development program through professional risk management certification. The list of employees from the Governance & Risk Management Compartment who have participated in the certification program is as follows:

No.	Nama Karyawan Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificates	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period
1	Junaedi	SVP Tata Kelola & Manrisk SVP of Governance & Risk Management	QCRO	s.d Desember 2027 Until December 2027
2	Amir Hamzah	VP Manajemen Risiko VP of Risk Management	QCRO	s.d Februari 2027 Until February 2027
			QRMA	s.d Juli 2026 Until July 2026
			CGRCP	s.d Desember 2025 Until December 2025
3	M. Reza Pahlevi	AVP Pengel. Risiko Operasional AVP, Operational Risk Management.	ERMCP	s.d Agustus 2025 Until August 2025
			QRMP	s.d Juli 2026 Until July 2026
4	Ade Lia D. Safitri	AVP Pengel. Risiko Strategis AVP of Strategic Risk Management.	ERMCP	s.d Agustus 2025 Until August 2025
			QRMP	s.d Desember 2026 Until December 2026
			CGRCP	s.d Desember 2025 Until December 2025
5	Heru Prasetyo	Sr Administrator Pengel. Risiko Operasional Sr. Administrator, Operational Risk Management.	QRMA	s.d Mei 2027 Until May 2027
6	Septy Handayani	AVP Tata Kelola Perusahaan AVP of Corporate Governance	QRMA	s.d April 2026 until. April 2026
Jumlah Total			11	

Jumlah karyawan Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko adalah sebanyak 6 orang.

The number of employees in the Governance & Risk Management Division who hold professional certifications in risk management is 6 people.

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan level sertifikasi manajemen risiko mulai dari SVP dan juga VP yang merupakan *risk owner* serta *risk officer*. Secara bertahap, sertifikasi akan dilakukan untuk seluruh *risk owner* (SVP/VP) dan *risk officer* unit kerja yang melakukan pengelolaan risiko utama Perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian laba. Hingga akhir tahun 2024 terdapat 32 Personil yang telah tersertifikasi sebagai berikut:

The company is committed to continually improving the risk management certification level, starting with SVP and VP, who serve as risk owners and risk officers. Gradually, certifications will be carried out for all risk owners (SVP/VP) and risk officers in work units that manage the company's key risks, which have a direct impact on profit achievement. By the end of 2024, 32 personnel have been certified, as follows:

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2024

Certified Personnel as of 2024

No.	Nama Karyawan Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period
1	Marviansyah	SVP SBU Manajemen Aset SVP of Asset Management SBU	CGRCEO	s.d Desember 2025 Until December 2025
2	Alfa Widyawan	SVP Teknologi SVP of Technology	CGRCEO	s.d Desember 2025 Until December 2025
3	Sholikin	PM P-IIIB PM P-IIIB	CGRCEO	s.d Desember 2025 Until December 2025
4	Andri Azmi	SVP Operasi SVP of Operations	CGRCEO	s.d Desember 2025 Until December 2025
5	Dian Permatasari	SVP SPI SVP of SPI	QRMP	s.d November 2026 Until November 2026
			CGRCEO	s.d Desember 2025 Until December 2025
6	Agung Prasetyo Nugroho	VP Operasi & Pemeliharaan II VP of Operations & Maintenance II	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2024

Certified Personnel as of 2024

No.	Nama Karyawan Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period
7	Novan Apriadi	VP Adm. Umum Aset VP of General Administration & Assets	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
8	Arma Wijaya	VP Keuangan VP of Finance	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
9	Niekla Dwi A.	SPM Manajemen Piutang SPM of Accounts Receivable Management	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
10	Nurni Astuti	VP Pengawasan Operasional VP of Operational Supervision	QRMP	s.d September 2025 Until September 2025
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
11	Hadi Suyono	VP Pengawasan Keuangan VP of Finance Supervision	QRMP	s.d September 2025 Until September 2025
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
12	Livia Sarita	Sr Officer Pengendali Teknis Was Keuangan Senior Officer of Technical Control in Financial Supervision	QRMA	s.d April 2024 Until April 2024
13	Firman Aji	Officer Peng. Teknis Was Operasional Officer of Technical Control in Operational Supervision	QRMP	s.d September 2025 Until September 2025
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
14	Abdul Hakim	Officer Pengendali Teknis Was Operasional Senior Officer of Technical Control in Operational Supervision	CGRCP	s.d November 2027 Until November 2027
15	Nyoman Pramesti	Officer Pengawasan Perencanaan & Analisa Officer of Planning & Analysis Supervision	QRMA	s.d September 2025 Until September 2025
			CGRCP	s.d November 2027 Until November 2027
16	Rosmaida	Officer Pengawasan Pemasaran Officer of Marketing Supervision	QRMA	s.d Februari 2026 Until February 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
			ERMAP	s.d Februari 2025 Until February 2025
17	M. Iqbal Hakim	Officer Pengawasan Riksus Officer of Risk and Compliance Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
18	Rully Nugraha	Officer Pengawasan Keuangan Officer of Finance Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
19	R. Zakky Rahman	Officer Pengawasan Produksi Officer of Production Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
20	Ginta Ryan S	Associate Officer Pengawasan operasional Associate Officer of operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
21	Mutia Lamora	Jr Officer Pengawasan Keuangan Junior Officer of Finance Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d Desember 2026 Until December 2026

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2024

Certified Personnel as of 2024

No.	Nama Karyawan Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period
22	Chandra Herdiputra	Jr Officer Pengawasan Unit Penunjang Junior Officer of Supporting Unit Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
23	M. Ridho Adrianz	Sr Administrator Pengawasan Operasional Senior Administrator of Operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d Desember 2026 Until October 2026
24	Achmad Alba Anjany	Sr Administrator Pengawasan Operasional Senior Administrator of Operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until October 2026
25	Agung Gunawan	Jr. Officer Pengawasan Keuangan Junior Officer of Financial Supervision	CGRCP	s.d September 2026 Until October 2026
26	Agus	Ass. Off.Pengawasan Keuangan Assistant Officer of Financial Supervision	CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
27	M. Natsir Hakiki	Engineer Koord Pengend. Mat. Produksi Engineer Coordinator of Production Material Control	QRMA	s.d Juli 2025 Until July 2025
28	Inggit Inaheirtika	Jr Officer Kawalan Teknologi Sumbagsel Junior Officer of Technology Control for South Sumatra Region	QRMA	s.d Juli 2025 Until July 2025
29	Amancik	AVP Kesekretariatan & Pelaporan AVP of Secretariat & Reporting	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026
30	Putra Zaman	Jr Engineer Pengembangan Sistem Junior Engineer of System Development	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026
31	Wily Priya Adi	Jr Engineer Planner Junior Engineer Planner	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026
32	Andri Sutendi	Sr. Adm. Peng. Premarket Produk Riset & Inovasi Senior Administrator, Product Premarket Management, Research & Innovation.	QRMA	s.d November 2027 Until November 2027
Jumlah				47
Total				

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko telah menjadi bagian dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan pada saat penentuan rencana kerja ke depan. PUSRI telah merancang *framework* dalam menganalisis dan pengelolaan risiko Perusahaan, sehingga manajemen risiko PUSRI lebih terstruktur dan efektif.



Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya sejak 2006 guna mendukung terwujudnya tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). PUSRI telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 pada 2020.



Selain itu dalam menyusun anggaran investasi, Perusahaan juga menerapkan *risk-based budgeting* dan menggunakan *quantitative risk analysis*.



Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan kerangka strategis proses Manajemen Risiko PUSRI yang mengacu pada SNI ISO 31000:2018.



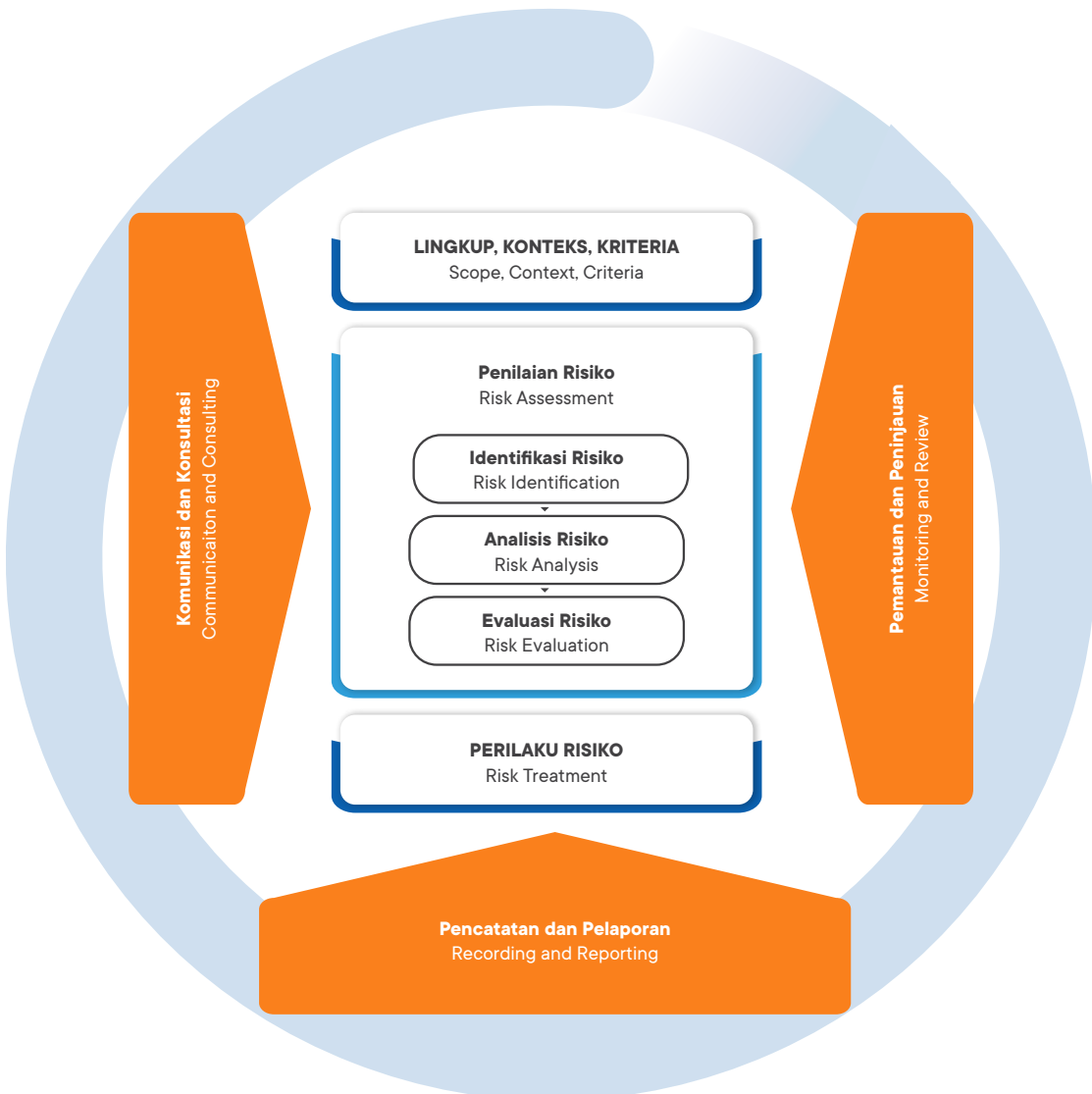
RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process has become an integral part of the strategic planning process, carried out when determining the work plan for the future. PUSRI has designed a framework for analyzing and managing the Company's risks, ensuring that PUSRI's risk management is more structured and effective.

The Company has been implementing an integrated Risk Management system alongside other management systems since 2006 to support the realization of good corporate governance (*Good Corporate Governance/GCG*). PUSRI adopted Risk Management based on SNI ISO 31000:2018 in 2020.

In addition, when preparing investment budgets, the Company also applies risk-based budgeting and uses quantitative risk analysis.

The following is a diagram illustrating the strategic framework of PUSRI's Risk Management process, which refers to SNI ISO 31000:2018.



ROADMAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PUSRI menyusun Roadmap Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021-2025 yang menggambarkan milestone menuju pengelolaan Manajemen Risiko yang konsisten sebagai langkah strategis dalam menunjang pengelolaan risiko PUSRI. Roadmap tersebut merupakan serangkaian tahapan proses dan target dalam pengelolaan risiko yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Perusahaan.

Ke depan, PUSRI berupaya memantapkan infrastruktur manajemen risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan mendorong budaya sadar dan peduli akan pengelolaan risiko Perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan terhadap upaya pencapaian tujuan Perusahaan secara menyeluruh.

ROADMAP FOR RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION AT PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PUSRI has developed a Risk Management Implementation Roadmap for 2021-2025, which outlines the milestones toward consistent risk management as a strategic step in supporting PUSRI's risk management practices. This roadmap consists of a series of process stages and targets in risk management that are part of the Company's operational activities.

Moving forward, PUSRI aims to strengthen the risk management infrastructure to support the Company's Internal Control System and promote a culture of awareness and concern for risk management, ensuring better assurance in achieving the Company's overall objectives.

Tahun Year	Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management
2021	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi risiko dalam SMPP, ISO 9001, ISO 14001. Penyesuaian Pedoman MRT untuk menyikapi Visi, Misi baru - Integrasi dashboard risk management dengan Dashboard Bisnis Perusahaan. Pelatihan internal dan sertifikasi ERM Fundamental ISO 31000 untuk Risk Officer tahap 1. Implementasi Risk Based Budgeting secara best practice. Penentuan Risk Appetite & BTR RKAP 2021 - Pembangunan awal Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR). Identifikasi risiko IFA Protect & Sustain - Identifikasi Peluang (Opportunity) pada aplikasi Simrisk. Pelaksanaan PMPMR tahun 2021 (target Advance-Managed). <ol style="list-style-type: none"> Implementation of risk in SMPP, ISO 9001, ISO 14001. Adjustment of MRT Guidelines to address the new Vision and Mission - Integration of risk management dashboard with the Company's Business Dashboard. Internal training and ERM Fundamental ISO 31000 certification for Risk Officers, phase 1. Implementation of Risk-Based Budgeting as a best practice. Determination of Risk Appetite & BTR RKAP 2021 - Initial development of the Early Warning Risk Detection System (SDDR). Identification of IFA Protect & Sustain Risks - Identification of Opportunities on the Simrisk application. Implementation of PMPMR 2021 (target Advanced-Managed).
2022	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR). Penentuan Risk Appetite & BTR RKAP 2022. Dashboard risk management telah menjadi tools Early Warning System dan pengambilan keputusan - Pelatihan internal dan sertifikasi ERM Fundamental ISO 31000 untuk Risk Officer tahap 2. Penetapan KPI Individu pengelolaan risiko. Pembangunan Mobile Application Risk Management. Menindaklanjuti rekomendasi PMPMR tahun 2021. <ol style="list-style-type: none"> Implementation of the Early Warning Risk Detection System (SDDR). Determination of Risk Appetite & BTR RKAP 2022. Risk management dashboard has become an Early Warning System tool and decision-making tool - Internal training and ERM Fundamental ISO 31000 certification for Risk Officers, phase 2. Establishment of individual risk management KPIs. Development of Mobile Application Risk Management. Follow-up on recommendations from PMPMR 2021.
2023	<ol style="list-style-type: none"> Terbangunnya Risk Culture di seluruh bidang bisnis. Risk management telah terintegrasi di seluruh proses bisnis baik audit maupun proses. Implementasi Mobile Application Risk Management. Pembangunan infrastruktur (Basis Data) Loss Event Management (LEM) Database - Menindaklanjuti rekomendasi PMPMR tahun 2023. Pelaksanaan PMPMR tahun 2023 (target Advance- optimized). <ol style="list-style-type: none"> Establishment of a Risk Culture across all business areas. Risk management has been integrated into all business processes, including audits and operations. Implementation of the Mobile Application Risk Management. Development of infrastructure (Database) for Loss Event Management (LEM) Database - Follow-up on PMPMR 2023 recommendations. Implementation of PMPMR 2023 (target: Advanced-optimized).

Tahun Year	Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya Risk Culture sampai ke tingkat Individu. 2. Menindaklanjuti rekomendasi PMPMR Tahun 2023. 3. Penentuan Risk Appetite & BTRRKAP 2024. 4. Optimalisasi integrasi Manajemen Risiko untuk seluruh proses bisnis baik audit maupun proses. 5. Implementasi Loss Event Mangement (LEM). <ol style="list-style-type: none"> 1. The establishment of a Risk Culture at the individual level. 2. Follow-up on PMPMR 2023 recommendations. 3. Determination of Risk Appetite & BTR RKAP 2024. 4. Optimization of risk management integration across all business processes, including audits and operations. 5. Implementation of Loss Event Management (LEM).
2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya Risk Culture dengan membangun pemahaman untuk seluruh stakeholder. 2. Evaluasi Pedoman MRT untuk menyikapi kondisi bisnis terkini. 3. Optimalisasi Loss Event Management. 4. Pelaksanaan PMPMR tahun 2025 (target mempertahankan kategori maturitas advanced optimized). <ol style="list-style-type: none"> 1. The establishment of a Risk Culture by building understanding among all stakeholders. 2. Evaluation of the MRT Guidelines to address current business conditions. 3. Optimization of Loss Event Management. 4. Implementation of PMPMR 2025 (target to maintain the advanced optimized maturity category).

STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN

Berikut merupakan Risk Appetite Statement atau Pernyataan Selera Risiko Perusahaan tahun 2024 yang diselaraskan dengan Risk Appetite Statement PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni:

COMPANY RISK STRATEGY

The following is the 2024 Risk Appetite Statement of the Company, aligned with the Risk Appetite Statement of PT Pupuk Indonesia (Persero), which is:

Tabel 5 Risk Appetite Statement (RAS)

Table 5 Risk Appetite Statement (RAS)

No	Kategori Risiko Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS)	Sikap Approach
1	Pengadaan Strategis Strategic Procurement	Perusahaan akan meminimalisir terjadinya risiko terkait pengadaan strategis yang berdampak langsung terhadap penyediaan bahan baku dan berupaya untuk mengoptimalkan pengendalian guna memitigasi risikonya. The Company will minimize the occurrence of risks related to strategic procurement that directly impact the supply of raw materials and will strive to optimize control measures to mitigate such risks.	Konservatif Conservative
2	Operasional Operations	Perusahaan akan meminimalisir terjadinya downtime pabrik Amonia dan Urea yang diakibatkan oleh menurunnya keandalan peralatan dan berupaya mengoptimalkan reliability pabrik guna memitigasi risikonya. The Company will minimize the occurrence of downtime in the Ammonia and Urea plants caused by declining equipment reliability and will strive to optimize plant reliability to mitigate the associated risks.	Konservatif Conservative
3	Lingkungan Hidup Environment	Perusahaan berkomitmen menjalankan usaha dengan menerapkan tata kelola pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan tidak mentolerir adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berlaku umum, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The Company is committed to conducting its business by implementing sound environmental management governance. It does not tolerate any violations of environmental laws and regulations, or breaches of generally accepted environmental management principles. The Company also ensures full compliance with all applicable laws and regulations.	Tidak Toleran Intolerant

Tabel 5 Risk Appetite Statement (RAS)

Table 5 Risk Appetite Statement (RAS)

No	Kategori Risiko Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS)	Sikap Approach
4	Perubahan Lingkungan Bisnis Changes in Business Environment	Perusahaan secara aktif menjalankan seluruh inisiatif strategis serta bersedia mengambil keputusan strategis yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat jangka panjang yang lebih besar dari risikonya. The Company actively implements all strategic initiatives and is willing to make strategic decisions necessary to achieve long-term benefits that outweigh the associated risks.	Agresif Aggressive
5	Eksekusi Proyek Pengembangan Project Development Execution	Perusahaan memberikan minimum toleransi terhadap permasalahan proyek pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan dan berupaya untuk mengoptimalkan pengendalian guna memitigasi risiko terkait keterlambatan pengerjaan, kelebihan dalam penggunaan anggaran, maupun kualitas pekerjaan. The Company applies minimal tolerance to issues arising in business development projects and strives to optimize control measures to mitigate risks related to delays in execution, budget overruns, and the quality of work.	Konservatif Conservative
6	Keuangan Finance	Perusahaan meminimalisir timbulnya risiko yang berkaitan dengan pendanaan dan permodalan guna menghindari penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efektif dan timbulnya risiko likuiditas, kredit, dan pendanaan yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. The Company minimizes risks related to financing and capital to avoid inefficient use of corporate resources and to prevent liquidity, credit, and funding risks that could threaten the Company's business continuity.	Konservatif Conservative
7	Pasar dan Makroekonomi Market and Macroeconomy	Perusahaan menyeimbangkan pelaksanaan kegiatan usaha dan inisiatif strategis dengan stabilitas makroekonomi seperti nilai tukar Rupiah, tingkat suku bunga, inflasi, harga komoditas, dan potensi resesi ekonomi, melalui pertimbangan yang terukur dan justifikasi yang memadai sesuai dengan kondisi makro. The Company balances the execution of business activities and strategic initiatives with macroeconomic stability, such as exchange rate fluctuations, interest rates, inflation, commodity prices, and potential economic recessions, through measured considerations and adequate justifications aligned with prevailing macroeconomic conditions.	Moderat Moderate
8	Tata Kelola, Hukum dan Kepatuhan Governance, Legal, and Compliance	Perusahaan berkomitmen menjalankan usaha dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tidak mentolerir adanya fraud, pelanggaran integritas, kode etik, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku umum, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The Company is committed to conducting its business by implementing good corporate governance and does not tolerate fraud, breaches of integrity, violations of the code of ethics, or infringements of generally accepted governance principles, while ensuring full compliance with all applicable laws and regulations.	Tidak Toleran Intolerant

Keterangan:

- 1.RAS PT Pusri Palembang disusun berdasarkan Kategori Risiko pada Taksonomi Risiko PT Pusri Palembang dengan memerhatikan RAS PTPI sesuai APS RKAP 2024.
2. 2RAS PT Pusri Palembang beserta Sikap terhadap Risiko telah melalui pembahasan bersama Direksi dan SVP terkait

Note:

1. PT Pusri Palembang's Risk Appetite Statement (RAS) is prepared based on the Risk Categories in its Risk Taxonomy, taking into account the RAS of PT Pupuk Indonesia (PTPI) in accordance with the APS RKAP 2024.
2. PT Pusri Palembang's Risk Appetite Statement (RAS), along with its Risk Attitudes, has been discussed and agreed upon with the Board of Directors and the relevant Senior Vice Presidents (SVPs).

SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Untuk menimbulkan budaya sadar risiko dilakukan dengan sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi manajemen risiko, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan lokakarya baik di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

Selain kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang dalam rangka evaluasi Manajemen Risiko serta meningkatkan mutu dan kompetensi personel Manajemen Risiko melalui kegiatan sebagai berikut:

SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT COMPETENCY

To foster a risk-aware culture, Risk Management socialization is conducted regularly and continuously within the Company. To enhance competencies and obtain risk management certifications, efforts are made through participation in training, workshops, seminars, and forums, both internally and externally to the Company.

In addition to the aforementioned activities, in 2023 several supporting activities were carried out to evaluate Risk Management and improve the quality and competency of Risk Management personnel through the following activities:

No	Nama Kegiatan Event	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Pelaksanaan Venue	Peserta Participant	Jumlah Peserta Total Participant	Pemateri Presenter
1	Sosialisasi Penerapan GCG & Manajemen Risiko Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Socialization of the Implementation of GCG & Risk Management for PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's Subsidiaries.	26 April 2024 April 26, 2024	Kantor PT Pusri Agro Lestari	PT Pusri Agro Lestari	16 Orang People	Tim Manrisk
2	Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko kepada Tim Proyek P-IIIB. Socialization of Risk Management Implementation to the P-IIIB Project Team.	10 Juni 2024 June 10, 2024	Proyek P-IIIB P-IIIB Project	Tim Proyek P-IIIB P-IIIB Project Team	8 Orang People	Tim Manrisk
3	Sosialisasi Penerapan GCG & Manajemen Risiko ke Dana Pensiun PPIP Pusri. Socialization of GCG & Risk Management Implementation to the PPIP Pusri Pension Fund.	28 Mei 2024 May 28, 2024	Kantor Dana Pensiun PPIP Pusri	Dana Pensiun PPIP Pusri	14 Orang People	Tim Manrisk
4	Risk Culture Campaign & Peringatan Hakordia 2024 dengan tema "Teguhkan Budaya Risiko dan Komitmen Anti Korupsi untuk Pusri Tangguh dan Berintegritas" The Risk Culture Campaign & Hakordia 2024 with the theme "Strengthen Risk Culture and Anti-Corruption Commitment for a Resilient and Integrity-driven Pusri."	27 Desember 2024 December 27, 2024	Gedung Graha Pupuk Sriwidjaja (GPS) lantai 1 Graha Pupuk Sriwidjaja (GPS) Building, 1st floor.	Seluruh karyawan/karyawati PT Pusri Palembang All employees of PT Pusri Palembang	Seluruh karyawan/karyawati PT Pusri Palembang All employees of PT Pusri Palembang	Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Risk Resolution The Governance & Risk Management compartment collaborates with the Corruption Eradication Commission (KPK) and Risk Resolution.
5	ERM Fundamental ISO 31000 Batch 1 2024	2-3 Mei 2024 May 2-3, 2024	Gedung Diklat	Risk Officer Unit Kerja	19 Orang People	Tim Manrisk
6	ERM Fundamental ISO 31000 Batch 2 2024	12-13 November 2024 November 12-13, 2024	Gedung Diklat	Risk Officer Unit Kerja	42 Orang People	Tim Manrisk
7	Workshop Penyusunan RTM RKAP 2025	2 Desember 2024 December 2, 2024	Gedung Diklat	Risk Officer Unit Kerja	15 Orang People	Tim Manrisk

PROFIL DAN MITIGASI RISIKO

Laporan Profil Risiko PUSRI memuat gambaran tentang tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis (*inherent risk*) dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Perusahaan telah melaksanakan *risk assessment* di beberapa proses bisnis untuk menggali potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan risikonya serta merancang upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis di masa yang akan datang.

Pada awal tahun 2024 telah diidentifikasi sebanyak 9 Risiko Utama/Risk That Matters (RTM) yang merupakan RTM Konsolidasi dengan rincian 5 High Risk, 2 Moderate to High Risk dan 2 Moderate Risk.

Risiko-risiko yang dihadapi PUSRI berdasarkan pengelompokannya, dampak dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut:

RISK PROFILE AND MITIGATION

The PUSRI Risk Profile Report provides an overview of the level of inherent risk associated with all business activities and the adequacy of the risk control system. The company has conducted a risk assessment in several business processes to identify potential risks, classify them based on their risk levels, and design risk mitigation measures as a form of anticipation against possible risks that may arise in future business processes.

At the beginning of 2024, a total of 9 Key Risks/Risks That Matter (RTM) were identified, which are the Consolidated RTMs, with the following breakdown: 5 High Risks, 2 Moderate to High Risks, and 2 Moderate Risks.

The risks faced by PUSRI, based on their classification, impacts, and mitigation efforts, are as follows:

No.	Risiko Risk	Pengendalian/Mitigasi Control/Mitigation
RTM-01	Risiko bahan baku (Feedstock Security) Feedstock Risk (Feedstock Security)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengadaan bahan baku NPK sesuai kebutuhan operasional, baik internal maupun melalui Pengadaan PI Koordinasi dengan S&OP PI terkait rencana produksi Monitoring kinerja pemasok clay Perpanjangan PJBG dengan Pertamina EP Telah ada pengaliran gas dari PHE Jambi Merang mulai 11 September 2024 Koordinasi dengan supplier gas terkait pemenuhan nominasi gas melalui (Gas Coordination Meeting) GCM secara rutin <ol style="list-style-type: none"> Procure NPK raw materials in accordance with operational needs, both internal and through PI Procurement. Coordinate with PI S\&OP regarding the production plan. Monitor the performance of clay suppliers. Extend the PJBG agreement with Pertamina EP. Gas flow from PHE Jambi Merang has been initiated since September 11, 2024. Regular coordination with gas suppliers to ensure the fulfillment of gas nominations through the Gas Coordination Meeting (GCM).
RTM-02	Downtime di luar rencana Unplanned Downtime	<ol style="list-style-type: none"> Penggantian peralatan kritis pabrik melalui TA pabrik PIIB, PIB, dan PIIBB. Impelementasi Maintenance excellence. Melaksanakan workshop dalam rangka inisiasi penerapan Asset management. Percepatan penerbitan PR IR di triwulan I 2024. Melaksanakan Project Harmonisasi Material Stock. Upgrade control GTG Pusri III Permintaan percepatan pengadaan item kritis Pengaturan moda operasional pabrik menyesuaikan kondisi peralatan kritis <ol style="list-style-type: none"> Replacement of critical plant equipment through TA for PIIB, PIB, and PIIBB plants. Implementation of Maintenance Excellence. Conducting workshops to initiate the implementation of Asset Management. Accelerating the issuance of PR IR in the first quarter of 2024. Implementing the Material Stock Harmonization Project. Upgrading the GTG control for Pusri III. Requesting acceleration for the procurement of critical items. Adjusting the operational modes of the plant according to the condition of critical equipment.
RTM-03	Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Keselamatan Proses Health, Occupational Accidents, and Process Safety	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan peremajaan dan perbaikan fasilitas emergency. Implementasi Process Safety Management dengan TL temuan process safety inspection dengan progres 100% closed <ol style="list-style-type: none"> Conducting the rejuvenation and repair of emergency facilities. Implementing Process Safety Management with the TL of process safety inspection findings, with 100% progress closed.

No.	Risiko Risk	Pengendalian/Mitigasi Control/Mitigation
RTM-04	Terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan saluran <i>blowdown</i> dengan saluran drainase sedang dalam proses pengadaan. 2. Pekerjaan pemisahan saluran limbah cair sudah selesai dilakukan dan sekarang masih masa pemeliharaan oleh rekanan. 3. Telah dilakukan pengadaan jasa pengelola LB3 jenis insulasi (A103d) dengan pemenang PT Semen Baturaja. 4. Telah tersedianya kontrak pemanfaatan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> dengan PT Semen Baturaja.
	Occurrence of Environmental Pollution	<ol style="list-style-type: none"> 1. The separation of the blowdown line from the drainage line is in the procurement process. 2. The separation of the wastewater drainage line has been completed and is currently in the maintenance phase by the contractor. 3. The procurement of LB3 management services for insulation type (A103d) has been completed, with PT Semen Baturaja as the winning bidder. 4. A contract for the utilization of fly ash and bottom ash with PT Semen Baturaja has been finalized.
RTM-05	Penjualan Produk Komersil di Bawah Rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program CRP 2. Digitalisasi penjualan pupuk ritel komersial dalam negeri dengan penggunaan aplikasi retail management system 3. Melakukan pendampingan kawalan teknologi (<i>on farm</i> & <i>off farm</i>) dan melakukan promosi 4. Melakukan pembinaan rantai pasok retail
	Commercial Product Sales Below Plan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implement the CRP program. 2. Digitize domestic commercial retail fertilizer sales through the use of a retail management system application. 3. Provide technology support (<i>on-farm</i> & <i>off-farm</i>) and conduct promotions. 4. Develop the retail supply chain.
RTM-06	Keterlambatan Progres Pelaksanaan Proyek Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring progress proyek dengan mengacu pada <i>project timeline</i>, untuk menghindari keterlambatan pada tahap selanjutnya 2. Melakukan <i>engineering collaboration</i> dengan kontraktor 3. Melakukan <i>pre-engineering</i> untuk <i>long lead item</i> 4. Monitoring pekerjaan konstruksi di lapangan
	Delay in the Progress of Development Project Implementation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor project progress by referring to the project timeline to avoid delays in subsequent stages. 2. Collaborate with contractors on engineering aspects. 3. Conduct pre-engineering for long lead items. 4. Monitor construction work on-site.
RTM-07	Gangguan Likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan arus kas perusahaan dengan cermat yang realisasinya dimonitor secara berkala 2. <i>Monitoring</i> penagihan piutang subsidi 3. Melakukan monitoring tingkat suku bunga pinjaman secara berkala dan mencari skema pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah/kompetitif 4. <i>Monitoring</i> kebutuhan ekuitas untuk proyek Pusri III-B 5. Pembayaran kebutuhan operasional ke vendor dioptimalkan sampai dengan batas jatuh tempo maksimal pembayaran sesuai dengan POB yang berlaku di Pusri (30 hari kalender)
	Liquidity Disruption	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare the company's cash flow plan carefully, with its realization monitored periodically. 2. Monitor the collection of subsidy receivables. 3. Conduct periodic monitoring of loan interest rates and seek loan schemes with lower/competitive interest rates. 4. Monitor equity requirements for the Pusri III-B project. 5. Optimize the payment of operational needs to vendors up to the maximum payment due date according to the applicable POB in Pusri (30 calendar days).
RTM-08	Timbulnya Beban Tambahan PSL pada Dapensri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan perubahan PDP ke OJK telah disetujui 2. Sosialisasi perubahan PDP pada pihak terkait 3. Kajian atas rencana penerapan Program Manfaat Lain Iuran Pasti sebagai kompensasi atas dilakukan penyesuaian kenaikan Manfaat Pensiun Peserta Dapensri
	Emergence of Additional PSL Expenses at Dapensri	<ol style="list-style-type: none"> 1. The submission for changes to the PDP to the OJK has been approved. 2. Socialization of the PDP changes to the relevant parties. 3. A study on the implementation plan of the Defined Contribution Other Benefits Program as compensation for the adjustment of the pension benefits increase for Dapensri participants.
RTM-09	Rugi Selisih Kurs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>Forward Hedging</i> bulanan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan valas untuk pembayaran Gas & <i>Letter of Credit</i> (LC) bahan baku 2. Pemanfaatan forex intra group belum/tidak dilakukan sd. November 2024 dikarenakan biayanya lebih besar daripada Konversi Valas dengan pihak Perbankan 3. Telah mengikuti program training "<i>Refreshment Rate Treasury and Economic Outlook</i>"
	Loss on Foreign Exchange Differences	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting monthly forward hedging based on the availability and currency requirements for gas payments & Letter of Credit (LC) for raw materials. 2. Intra-group forex utilization has not been carried out until November 2024, as the cost is higher than converting foreign currency with banking institutions. 3. Participated in the "Refreshment Rate Treasury and Economic Outlook" training program.

PENGELOLAAN RISIKO PERUSAHAAN

Proses pengelolaan risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu. PUSRI melakukan pengelolaan risiko seluruh unit kerja yang dikelompokkan dalam empat klasifikasi, yaitu Risiko Strategis, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan dan Hukum.

Adapun profil dan peta risiko awal tahun 2024 sebelum tindak lanjut pengendalian risiko yakni sebagai berikut :

CORPORATE RISK MANAGEMENT

The risk management process is a breakdown of the risk management framework to facilitate the implementation of risk management principles, both at the corporate level, within work units, and at the individual level. PUSRI manages risks across all work units, which are categorized into four classifications: Strategic Risks, Financial Risks, Operational Risks, and Compliance and Legal Risks.

The risk profile and risk map at the beginning of 2024, before the follow-up on risk controls, are as follows:

No.	Fungsi/Bidang Function/Area	Jumlah & Tingkat Risiko Risk Total and Level						Tingkat Risiko Rata-rata Average Risk Level			
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	Total	L	C	S	TR
1	Operasional Operations	0	93	137	93	9	332	3,10	3,07	9,55	M
2	Keuangan Finance	0	6	7	3	1	17	2,88	3,06	9,00	M
3	Strategis Strategic	0	5	4	3	0	12	2,83	3,25	9,33	M
4	Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance	1	2	2	6	0	11	3,18	3,18	9,64	M
Total Jumlah & Tingkat Risiko Rata-rata Total and Average Risk Level		1	106	150	105	10	372	3,08	3,08	9,52	M

Peta Risiko Awal Tahun 2024 Sebelum Tindak Lanjut Pengendalian

Risk Map at the Beginning of 2024 Before Control Follow-up

Likelihood / Kemungkinan	Almost Certain / Sangat Tinggi	5	1	4	1	1	
	Likely / Tinggi	4	1	13	46	17	3
	Possible / Sedang	3		42	100	78	3
	Unlikely / Rendah	2		31	19	9	3
	Almost Never / Sangat Rendah	1					1
Jumlah Risiko : 372 Total Risk: 372			1	2	3	4	5
			Minor / Sangat Rendah	Moderate / Rendah	Severe / Sedang	Major / Tinggi	Catastrophe / Sangat Tinggi
		Dampak Consequence					

Sampai dengan akhir periode Semester-II terdapat penambahan 37 risiko baru sehingga total risiko yang teridentifikasi di tahun 2024 adalah sebanyak 409 risiko. Atas seluruh risiko tersebut telah dilakukan pengendalian sehingga rincian risiko pada akhir periode Semester-II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 4 High Risk
- 67 Moderate to High Risk
- 88 Moderate Risk
- 70 Low to Moderate Risk
- 180 Low Risk

As of the end of the second semester, 37 new risks were identified, bringing the total number of risks identified in 2024 to 409. All of these risks have been controlled, and the details of the risks at the end of the second semester of 2024 are as follows:

- 4 High Risk
- 67 Moderate to High Risk
- 88 Moderate Risk
- 70 Low to Moderate Risk
- 180 Low Risk

Adapun profil dan peta risiko sesudah tindak lanjut pengendalian risiko Semester II tahun 2024 sebagai berikut:

The risk profile and risk map after the implementation of risk control measures for the second semester of 2024 are as follows:

No.	Fungsi/Bidang Function/Area	Jumlah & Tingkat Risiko Risk Total and Level						Tingkat Risiko Rata-rata Average Risk Level			
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	Total	L	C	S	TR
1	Operasional Operations	153	60	82	64	4	363	2,21	2,61	6,31	LM
2	Keuangan Finance	9	6	4	1	0	20	2,15	2,30	5,15	LM
3	Strategis Strategic	10	2	1	0	0	13	1,31	2,15	3,00	L
4	Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance	8	2	1	2	0	13	2,31	2,15	5,15	LM
Total Jumlah & Tingkat Risiko Rata-rata Total and Average Risk Level		180	70	88	67	4	409	2,18	2,56	6,11	LM

Peta Risiko Semester II setelah Tindak Lanjut Pengendalian

Risk Map for the Second Semester after Follow-up Control

Kemungkinan Likelihood	Hampir Pasti Terjadi Almost Certain to Occur	5	1	3	1		
	Sangat Mungkin Terjadi Very Likely to Occur	4	2	10	29	10	1
	Bisa Terjadi Possible to Occur	3	2	18	56	52	1
	Jarang Terjadi Rarely Occurs	2	11	21	12	4	1
	Sangat Jarang Terjadi Very Rarely Occurs	1	3	162	8		1
Jumlah risiko: 409 Total Risk: 409			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah / Minor	Rendah / Moderate	Sedang / Severe	Tinggi / Major	Sangat Tinggi / Catastrophe
		Dampak Consequence					

Sehingga tingkat risiko pada akhir periode Semester II tahun 2024 sebesar 6,11 (Low to Moderate) dengan penurunan tingkat risiko Perusahaan sebesar 35,8% dari awal tahun dengan rincian rata-rata *Likelihood* sebesar 2,18 dan rata-rata *Consequences* sebesar 2,56.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan PUSRI, maka setiap tahun dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko.

Tujuan pengukuran tersebut untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan PUSRI, serta untuk mengetahui kualitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan PUSRI sehingga dapat digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan manajemen risiko Perusahaan di masa mendatang.

Pengukuran maturitas manajemen risiko rutin dilakukan mulai dari tahun 2013. Pengukuran maturitas terakhir yang diadakan PUSRI pada tahun 2024 adalah untuk penilaian tahun buku 2023. Pelaksanaan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun Buku 2023 telah dilaksanakan pada bulan Agustus s.d Oktober 2024 oleh pihak Konsultan Deloitte yang dikoordinir PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dari hasil pelaksanaan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun Buku 2023 tersebut telah dilaporkan bahwa hasil penilaian untuk skor aspek dimensi maturitas PT Pusri Palembang sebesar 2,6 yakni Berkembang (+) dari indeks dimensi 5.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di PUSRI berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai *road map* Manajemen Risiko PUSRI. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan *self assessment* risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional Perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai. Terdapat 409 risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.
5. Transparansi pengelolaan risiko yang dihadapi dan kecepatan dalam merespon diharapkan juga dapat ditingkatkan yang didukung oleh mekanisme pelaporan dan monitoring di seluruh level organisasi.

Therefore, the risk level at the end of the second semester of 2024 stands at 6.11 (Low to Moderate), reflecting a reduction in the Company's risk level by 35.8% from the beginning of the year. The details include an average Likelihood of 2.18 and an average Consequences of 2.56.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2024

To ensure the sustainability of risk management implementation within PUSRI, an annual review and evaluation of risk management practices are conducted through the measurement of risk management maturity.

The objective of this measurement is to assess and map the effectiveness of risk management implementation within PUSRI, as well as to evaluate its quality. The results serve as a basis for management in formulating strategies and development programs for the Company's risk management in the future.

The measurement of risk management maturity has been routinely conducted since 2013. The most recent maturity measurement held by PUSRI in 2024 was for the assessment of the 2023 fiscal year. The Risk Maturity Index (RMI) Assessment for the 2023 fiscal year was carried out from August to October 2024 by the consultant Deloitte, coordinated by PT Pupuk Indonesia (Persero).

Based on the results of the Risk Maturity Index (RMI) Assessment for the 2023 fiscal year, it has been reported that the maturity dimension score for PT Pusri Palembang was 2.6, which is categorized as Developing (+) from the dimension index of 5.

Based on the above measurement results, the Risk Management System at PUSRI operates effectively and continues to be developed in accordance with the PUSRI Risk Management Roadmap. This is evidenced by the following:

1. Risk owners' awareness of conducting self-assessments of risks.
2. A well-established risk awareness culture among risk owners, as indicated by their efforts to conduct risk assessments in the Company's operational activities.
3. Risk Management stakeholders are considered capable of effectively conducting risk assessments, including the use of analytical methods.
4. Available resources are adequate. A total of 409 risks have been identified across all work units, evaluated, and measured based on likelihood and impact values, resulting in a prioritized list of risks that require control.
5. Transparency in risk management and response speed is expected to improve, supported by reporting and monitoring mechanisms at all organizational levels.

Sedangkan untuk pengukuran maturitas manajemen risiko atau *Risk Maturity Index* (RMI) untuk kinerja tahun 2024, sesuai arahan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Juknis Kementerian BUMN, maka pelaksanaan pengukuran maturitas manajemen risiko akan dilaksanakan pada semester II tahun 2025 setelah terbit laporan kinerja audited.



PENILAIAN KINERJA OLEH DIREKSI



Pelaksanaan tugas SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko selama tahun 2024 telah mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya KPI SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko sebesar 100,32%.



PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO (BUKAN RMI)



Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, Manajemen berkomitmen dalam implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Investasi & Manajemen Risiko, secara periodik melakukan pembahasan dengan Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko. Pembahasan yang dilakukan diantaranya mengenai perkembangan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan, baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis Perusahaan, beserta mitigasi- mitigasi yang perlu dilakukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.



As for the measurement of risk management maturity or the Risk Maturity Index (RMI) for the 2024 performance year, in accordance with the direction of PT Pupuk Indonesia (Persero) and the guidelines from the Ministry of SOEs, the implementation of the risk management maturity measurement will be carried out in the second semester of 2025, after the issuance of the audited performance report.

PERFORMANCE ASSESSMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS

The implementation of duties by the SVP of Governance & Risk Management throughout 2024 has met the planned targets. This is evidenced by the achievement of the SVP of Governance & Risk Management's KPI, which reached 100.32%.

STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT (NON-RMI)

In order to achieve the Company's established objectives, Management is committed to implementing risk management within the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners, through the Investment & Risk Management Committee, periodically hold discussions with the Governance & Risk Management Division. These discussions cover developments in the Company's internal and external issues, key risks faced by the Company—both at the corporate level and in strategic projects—along with necessary mitigation measures, as well as the planning and realization of the Risk Management work program.



Kepatuhan dan Perkara Hukum yang Dihadapi

Compliance and Legal Cases Faced



KEPATUHAN PADA HUKUM

PUSRI senantiasa menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkara hukum adalah permasalahan hukum yang dihadapi PUSRI selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum di pengadilan.



Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2024 dibanding tahun 2023 adalah sebagai berikut.



LEGAL COMPLIANCE

PUSRI consistently adheres to the prevailing laws and regulations in Indonesia. Legal cases refer to legal issues faced by PUSRI during the reporting period that have been formally submitted for legal proceedings in court.

Legal Issues

The legal issues faced by the Company in 2024 compared to 2023 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Punishment	Perdata Civil	Pidana Punishment
PUSRI				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved and Legally Binding	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	3	Nihil	1	Nihil
Jumlah Subtotal	3	Nihil	1	Nihil
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved and Legally Binding	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Subtotal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved and Legally Binding	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Subtotal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Keseluruhan Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Selama tahun 2024 terdapat 3 perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian diantaranya gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Palembang, gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum dan gugatan perlawanan (*derden verzet*) di Pengadilan Negeri Banjar, dimana pada saat penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2024 ini perkara-perkara hukum tersebut sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Throughout 2024, there were three legal cases still in the process of resolution, including a breach of contract lawsuit at the Palembang District Court, a civil lawsuit for unlawful conduct, and a third-party opposition lawsuit (*derden verzet*) at the Banjar District Court. As of the preparation of this 2024 Annual Report, these legal cases are currently undergoing the cassation process at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2024, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Informasi tentang Sanksi Administratif

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh Kementerian BUMN ataupun otoritas lainnya kepada PUSRI, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

Legal Cases Involving Members of the Board of Commissioners and Directors

Throughout 2024, there were no legal cases involving any current members of the Board of Commissioners and Directors.

Information on Administrative Sanctions

Throughout 2024, no administrative sanctions were imposed by the Ministry of State-Owned Enterprises or any other authorities on PUSRI, its Board of Commissioners, or the Board of Directors.

Kebijakan Insider Trading

Insider Trading Policy

Sebagai Perusahaan tertutup yang tidak memperjual belikan sahamnya di Bursa Efek, PUSRI tidak memiliki risiko insider trading yang akan berdampak pada penjualan saham. Saham Perusahaan dimiliki oleh 3 (tiga) entitas yaitu Negara Republik Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI meskipun demikian, PUSRI menetapkan larangan penyalahgunaan jabatan dan pekerjaan Insan PUSRI untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi material. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak merugikan Perusahaan.

Dengan demikian, PUSRI tidak memiliki kebijakan insider trading dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tidak pernah terjadi transaksi orang dalam yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, manajemen yang berada di bawah Direksi, dan Karyawan Perusahaan.

As a Non-public company that does not trade its shares on the Stock Exchange, PUSRI is not exposed to insider trading risks that could impact share sales. The Company's shares are owned by three entities: the Government of the Republic of Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), and the PT PUSRI Employee Welfare Foundation. Nevertheless, PUSRI enforces a prohibition on the misuse of position and duties by PUSRI personnel to disclose material information that could influence decisions involving such information. Material information refers to information that has not been widely disclosed and could prompt someone to take actions that may harm the Company.

Therefore, PUSRI has not had an insider trading policy in the past three years, from 2022 to 2024. During this period, no insider transactions occurred involving the Board of Commissioners, Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, management under the Board of Directors, or Company employees.



Keterbukaan Informasi dan Akses Data Perusahaan

Information Disclosure and Access to Company Data



KOMUNIKASI INTERNAL

Majalah Internal

Sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif dan mendukung pencapaian kinerja, Pusri senantiasa membangun komunikasi dua arah melalui berbagai media, salah satunya adalah majalah internal (Buletin Pusri) yang kini hadir dalam format digital atau e-magazine. Majalah internal ini menjadi salah satu sarana komunikasi penting untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan perusahaan, termasuk program, kebijakan manajemen, serta berbagai pencapaian strategis. Karyawan juga didorong untuk berkontribusi aktif melalui pengiriman artikel, saran, dan opini yang membangun kepada tim redaksi.

INTERNAL COMMUNICATION

Internal Magazine

As part of efforts to create a conducive internal communication climate that supports performance achievement, Pusri consistently fosters two-way communication through various media, one of which is the internal magazine (Buletin Pusri), now available in digital format as an e-magazine. This internal magazine serves as an important communication channel to disseminate information about company activities, including programs, management policies, and various strategic achievements. Employees are also encouraged to actively contribute by submitting articles, suggestions, and constructive opinions to the editorial team.

Event Internal Perusahaan

PUSRI menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi pekerja dengan pihak Manajemen. Acara ini digelar secara berkala oleh masing-masing unit kerja baik melalui *family gathering*, rapat kerja, *town hall* maupun dalam bentuk-bentuk kompetisi olahraga dan *event-event* lain yang diselenggarakan Perusahaan.

Komunikasi dengan Pemegang Saham

Keterbukaan informasi serta memberikan informasi yang tepat kepada Pemegang Saham juga menjadi fokus Perusahaan. PUSRI menyediakan media komunikasi dengan Pemegang Saham melalui RUPS, baik yang dilakukan secara sirkuler maupun fisik (pertemuan langsung).

Media komunikasi lain adalah melalui laporan Perusahaan yang disampaikan kepada Pemegang Saham seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Manajemen bulanan. Selain itu, Pemegang Saham juga rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja bulanan, *video conference* dengan PUSRI guna mengkomunikasikan kebijakan atau informasi penting terkait kegiatan usaha Perusahaan.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Website

Website resmi PUSRI berada pada alamat www.pusri.co.id. *Website* tersebut menyediakan informasi dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Melalui *website* resmi Perusahaan, pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi penting mengenai Perusahaan.

Laporan Tahunan

PUSRI setiap tahunnya menyediakan informasi mengenai pencapaian Perusahaan melalui Laporan Tahunan. Laporan tersebut disusun dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan dipublikasikan untuk Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Publikasi kepada Pemegang Saham diberikan saat pelaksanaan RUPS Tahunan, sedangkan untuk pemangku kepentingan melalui media *website*. Laporan Tahunan PUSRI memuat informasi mengenai Ikhtisar Data Keuangan dan Operasi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Sumber Daya Manusia, Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP pada tahun buku terkait.

Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan adalah laporan Perusahaan atas program tanggung jawab sosial Perusahaan baik dari sisi ekonomi, tata kelola Perusahaan yang baik, lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta program CSR yang dilakukan selama setahun di PUSRI. Laporan Keberlanjutan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui media *website*.

Internal Company Events

PUSRI provides communication channels that serve as discussion forums for employees and Management. These events are held periodically by each work unit, including family gatherings, work meetings, town halls, as well as various sports competitions and other events organized by the Company.

Communication with Shareholders

Transparency and providing accurate information to Shareholders are also a key focus of the Company. PUSRI provides communication channels with Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), both in circular form and physical meetings (face-to-face).

Other communication channels include the Company's reports provided to Shareholders, such as the Annual Report, Sustainability Report, and Monthly Management Reports. Additionally, Shareholders regularly hold monthly performance evaluation meeting, conducted via video conference with PUSRI to communicate policies or important information related to the Company's business activities.

EXTERNAL COMMUNICATION

Website

PUSRI's official website can be accessed at www.pusri.co.id. The website provides information in two languages, Indonesian and English. Through the Company's official website, stakeholders can find various important information about the Company.

Annual Report

Every year, PUSRI provides information regarding the Company's achievements through its Annual Report. The report is prepared in two languages, Indonesian and English. The Annual Report is published for Shareholders and other stakeholders. Shareholders receive the publication during the Annual General Meeting (AGM), while stakeholders can access it via the website. PUSRI's Annual Report includes information on Financial and Operational Data Summary, the Board of Commissioners' Report, the Directors' Report, Company Profile, Human Resources, Management's Discussion and Analysis of the Company's Performance, Corporate Governance, Social Responsibility, and the Financial Statements audited by a Public Accounting Firm for the relevant financial year.

Sustainability Report

The Sustainability Report is the Company's report on its corporate social responsibility programs, covering aspects such as economic performance, good corporate governance, the environment, labor, occupational health and safety, as well as CSR programs conducted throughout the year at PUSRI. The Sustainability Report is provided to stakeholders through the Company's website.

Siaran Pers

PUSRI secara aktif mempublikasikan berbagai kegiatan dan peristiwa penting perusahaan kepada media massa melalui siaran pers resmi. Publikasi ini disampaikan kepada media cetak maupun media online sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik serta pemangku kepentingan.



Media Visit

Guna mengoptimalkan pemberitaan mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan PUSRI rutin mengundang media massa untuk mengunjungi dan meliput kegiatan di lokasi operasi dan proyek Perusahaan. Serta manajemen PUSRI juga melaksanakan media visit ke kantor media masa yang ada di Sumatera Selatan. Melalui liputan tersebut diharapkan akan meningkatkan publikasi positif Perusahaan.



Pemberitaan di Media Cetak & Online

Dari seluruh kegiatan publikasi yang dilakukan Perusahaan di berbagai media massa, PUSRI melakukan monitoring pemberitaan seputar kegiatan Perusahaan. Jumlah dan jenis hasil pemberitaan di media cetak dan online sepanjang 2024 adalah sebagai berikut:



Press Releases

PUSRI actively publishes various company activities and significant events to the media through official press releases. These publications are distributed to both print and online media as part of the company's efforts to ensure transparency and disseminate information to the public and stakeholders.

Media Visits

To optimize coverage of the Company's activities and performance, PUSRI regularly invites the media to visit and cover activities at the Company's operational sites and projects. Additionally, PUSRI management also conducts media visits to media offices in South Sumatra. Through this coverage, it is expected to enhance the positive publicity of the Company.

Coverage in Print & Online Media

From all the publicity activities carried out by the Company in various media outlets, PUSRI monitors news coverage related to the Company's activities. The quantity and types of media coverage in print and online throughout 2024 are as follows:

No.	Jenis Pemberitahuan Notification Type	Total	Persentase (%) Percentage (%)
1	Positive	1.681	95,72
2	Netral Neutral	57	3,25
3	Negative	18	1,03
Total		1.756	100

Pemanfaatan Media Sosial

PUSRI menggunakan sarana media sosial Twitter @pusripalembang, Facebook PUSRI Palembang, dan Instagram @pusripalembang. Sebagai salah satu media komunikasi dengan publik.

Social Media

PUSRI utilizes social media platforms such as Twitter @pusripalembang, Facebook PUSRI Palembang, and Instagram @pusripalembang as one of the communication channels with the public.

Media Sosial Social Media	Konten Content	
	2024	2023
Twitter	540	422
Instagram	217	238
Facebook	176	197
Tiktok	103	-

Kode Etik dan Pakta Integritas

Code of Ethics and Integrity Pact

Bagi PUSRI, Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas yang tinggi merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki, yang diyakini mampu memastikan tercapainya target kinerja dan tujuan jangka panjang Perusahaan. Agar insan PUSRI dapat memiliki integritas yang tinggi dan mencerminkan Nilai-nilai korporasi yang dimiliki Perusahaan, PUSRI mengeluarkan Pedoman Kode Etik Perusahaan atau Code of Conduct yang ditandatangani pada bulan 10 November 2022 oleh Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan.

Penetapan Kode Etik Perusahaan ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika usaha PUSRI yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan PUSRI dalam menjalin hubungan dengan sesama insan PUSRI, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kode Etik Perusahaan tersebut berlaku bagi seluruh insan PUSRI mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman Perilaku dikembangkan berdasarkan filosofi bisnis dan budaya kerja PUSRI, peraturan perundang-undangan, praktik umum (common practices) dalam dunia usaha serta peraturan internal PUSRI yang terkait, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja serta pedoman tata tertib kerja karyawan.

Kode Etik Perusahaan tidak dimaksudkan untuk mengganti Pedoman tata tertib kerja karyawan ataupun peraturan/pedoman sejenis lainnya, tetapi lebih ditujukan untuk menyempurnakan, sehingga bersifat saling melengkapi antara satu dan lainnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tetap mengacu pada pedoman tata tertib kerja karyawan serta berdasarkan kebijakan Direksi.

ISI KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan menjelaskan kebijakan berperilaku di PUSRI, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, individu jajaran PUSRI maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan PUSRI.

Isi materi Kode Etik Perusahaan terdiri dari 2 (dua) elemen penting, yaitu Etika Kerja dan Etika Usaha. Etika Kerja menjelaskan sikap dan perilaku antar insan PUSRI, baik sebagai atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Sedangkan Etika Usaha menjelaskan bagaimana insan PUSRI beretika, bersikap dan bertindak dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

For PUSRI, human resources with high integrity are invaluable assets that ensure the achievement of performance targets and the Company's long-term goals. To foster high integrity among PUSRI personnel and reflect the Company's corporate values, PUSRI has issued the Corporate Code of Ethics or Code of Conduct, which was signed on November 10, 2022, by the Board of Commissioners and the Directors of the Company.

The establishment of this Corporate Code of Ethics serves as a written general statement outlining the ethical business standards that must be upheld by all PUSRI personnel in their interactions with colleagues, customers, suppliers, shareholders, the government, the public, and other stakeholders.








The Corporate Code of Ethics applies to all PUSRI personnel, including the Board of Commissioners, Directors, and all employees. The Code of Conduct was developed based on PUSRI's business philosophy, corporate culture, applicable laws and regulations, general business practices, as well as PUSRI's internal policies, including the Collective Labor Agreement (CLA) between the Board of Directors and the Workers' Union, and the employee code of conduct guidelines.

The Corporate Code of Ethics is not intended to replace employee regulations or similar guidelines but rather to complement them. The enforcement of sanctions for violations of the Code of Conduct remains subject to the employee code of conduct guidelines and the policies of the Board of Directors.









CONTENTS OF THE CORPORATE CODE OF ETHICS

The Corporate Code of Ethics outlines PUSRI's behavioral policies, types of violations, mechanisms for reporting violations, and sanctions for any infractions. The Code of Conduct governs responsibilities at the corporate level, individual employees, and third parties engaging in business relationships with PUSRI.










The Corporate Code of Ethics consists of two key elements: Work Ethics defines the attitudes and behaviors expected among PUSRI personnel, including relationships between superiors, colleagues, and subordinates. Meanwhile, Business Ethics establishes guidelines on how PUSRI personnel should conduct themselves in business interactions and relationships with stakeholders.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
 <p>Etika Perusahaan dengan Karyawan Corporate Ethics with Employees</p>  	<p>Perusahaan menyadari peran penting karyawan sebagai pelaku dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan serta dalam menghadapi tantangan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berupaya untuk menajamkan fokus dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia serta senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan dinamis antara Perusahaan dan karyawan. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan menerapkan praktik-praktik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bisa karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran. 2. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman. 3. Karyawan dibebaskan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. 4. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif. 5. Karyawan berhak untuk menikmati keuntungan riil karena peningkatan kinerja sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku. 6. Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha Perusahaan. 7. Karyawan didorong dan memperoleh peluang untuk dan dalam mengembangkan jiwa kreatif dan dalam berinovasi. 8. Karyawan diberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk setiap karya, kreasi dan inovasi yang telah diciptakan dan memberi kontribusi terhadap kemajuan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Corporate Ethics with Employees</p>   	<p>The Company recognizes the important role of employees as key players in achieving the Company's vision and mission, as well as in facing increasingly competitive challenges. Therefore, the Company consistently strives to sharpen its focus on human resource development while maintaining harmony and balance in the dynamic relationship between the Company and its employees. In implementing this ethical commitment, the Company applies the following practices:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Employees are treated fairly and are free from discrimination based on ethnicity, origin, gender, religion, and place of birth. 2. Employees are provided with good and safe working conditions. 3. Employees are protected from all potential hazards to ensure their safety and health in the workplace. 4. Employees have the right to choose whether to be collectively represented by a recognized labor union or not. 5. Employees have the right to benefit from real advantages resulting from performance improvements in accordance with the applicable remuneration scheme. 6. Employees are given equal opportunities for employment, promotion, education, training, and further development in line with their competencies and the Company's business needs. 7. Employees are encouraged and given opportunities to develop their creativity and innovation skills. 8. Employees are granted protection for their Intellectual Property Rights (IPR) for any works, creations, and innovations they develop that contribute to the Company's progress, in accordance with applicable laws and regulations.
<p>Etika Perusahaan dengan Pelanggan</p>  <p>Corporate Ethics with Customers</p>	<p>Perseroan mengutamakan kepuasan pelanggan secara profesional dengan meningkatkan standar kualitas produk dan layanan sesuai dengan Prinsip Enam Presisi: Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Lokasi, dan Tepat Jenis. PUSRI berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan yang telah disepakati untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui upaya-upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan pelanggan. 2. Senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai. 3. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan/kontrak yang jelas dan adil. 4. Memperhatikan asas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing. 5. Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi. <p>The Company prioritizes customer satisfaction professionally by improving product and service quality standards in accordance with the Six Precision Principles: Precision in Time, Quality, Price, Quantity, Location, and Type. PUSRI is committed to fulfilling all agreed-upon provisions to enhance customer satisfaction through the following efforts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Always providing excellent and high-quality service while upholding professional service standards to ensure customer satisfaction. 2. Continuously addressing customer needs and consistently monitoring and improving service products by enhancing work standards, supported by adequate systems and technology. 3. Respecting the interests of all parties through clear and fair terms/contracts. 4. Ensuring the principle of usefulness and efficiency to enhance service quality, work convenience, and competitiveness. 5. Provide easily accessible complaint/information services for customers without discrimination.








Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Pesaing	<p>Perusahaan mendukung sepenuhnya pemberlakuan struktur pasar industri pupuk dan petrokimia yang dicirikan dengan adanya multi-buyers dan multi-sellers atau pasar yang sepenuhnya kompetitif untuk mendorong terciptanya daya saing Perusahaan, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senantiasa melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing. 3. Mendefinisikan posisi pesaing dan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja Perusahaan. 4. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. 5. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. <p>Corporate Ethics with Competitors</p> <p>The company fully supports the implementation of the fertilizer and petrochemical industry market structure, characterized by the presence of multiple buyers and multiple sellers, or a fully competitive market, to encourage the creation of the company's competitiveness, by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Always conduct business by adhering to the principles of fair and ethical competition in accordance with applicable laws and regulations. 2. Continuously respect and maintain relationships with competitors. 3. Define the position of competitors and view them as a driving force for improving the Company's performance. 4. Engage in healthy competition by prioritizing product and service quality. 5. Do not violate laws related to monopolies and unfair business competition.
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa	<p>Prinsip hubungan Perusahaan dengan penyedia barang dan jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang memenuhi QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan akan menjalankan proses kompetisi secara <i>fair</i>, terbuka, dan profesional dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penyedia barang dan jasa tidak hanya berdasarkan pertimbangan harga, tetapi juga kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, waktu yang tepat sesuai kesepakatan, dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang. 2. Memperhatikan kelaziman berusaha yang saling menguntungkan semua pihak serta pemberlakuan sanksi dan penyelesaian perselisihan berdasarkan surat perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku. 3. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Membangun komunikasi dan membina hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari market dan competitor intelligence. 5. Menerapkan teknologi informasi pengadaan barang dan jasa untuk meminimalisasi tindak kecurangan (<i>fraud</i>). <p>Corporate Ethics with Suppliers of Goods and Services</p> <p>The principle of the company's relations with suppliers of goods and services is to achieve the procurement of goods and services in an efficient, effective, transparent, competitive, and fair manner, ensuring that the goods and services meet the QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) standards in accordance with the expected technical requirements. To achieve this, in the procurement process, the company will conduct a fair, open, and professional competitive process by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecting suppliers of goods and services based not only on price considerations but also on quality that meets the needs, timely delivery as agreed, and the sustainability of long-term business relationships. 2. Considering the standard business practices that are mutually beneficial to all parties, as well as the imposition of sanctions and resolution of disputes based on contracts and in accordance with the company's applicable regulations. 3. Implementing the procurement process transparently, competitively, and fairly to obtain suppliers of goods/services that meet the qualifications of the job requirements and provide accountable pricing. 4. Establishing communication and fostering good relationships with suppliers of goods and services as part of market and competitor intelligence. 5. Implementing procurement information technology to minimize fraud.
Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja	<p>Perusahaan senantiasa memandang mitra kerja sebagai partner strategis, oleh karena itu pengelolaan kerja sama tidak terlepas dari prinsip GCG dan dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, terpenuhinya hak & kewajiban semua pihak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati serta menjaga citra atau <i>brand image</i> Perusahaan. 2. Mengusahakan tercapainya hasil terbaik dan optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Membangun komunikasi yang intensif dengan mitra kerja dalam rangka koordinasi dan pencapaian solusi terbaik untuk penyelesaian perselisihan. 4. Bertindak adil terhadap semua mitra kerja, tanpa memihak pada seseorang, golongan atau pihak tertentu. <p>Corporate Ethics with Business Partners</p> <p>The company consistently views its business partners as strategic partners. Therefore, the management of partnerships is always aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and is carried out in accordance with prevailing business practices, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establish mutually beneficial partnerships, ensuring that the rights and obligations of all parties are fulfilled according to the agreed-upon terms while maintaining the company's image and brand. 2. Strive to achieve the best and optimal results in accordance with the applicable procedures. 3. Build intensive communication with business partners for coordination and achieving the best solutions for dispute resolution. 4. Act fairly toward all business partners, without favoritism toward any individual, group, or particular party.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
    <p>Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor</p> <p>Corporate Ethics with Creditors/Investors</p>	<p>Perusahaan melakukan kerja sama dengan kreditur/investor hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian dan memberikan laporan tentang penggunaan dana kreditur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan informasi yang aktual, prospektif, transparan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman. 3. Covenant yaitu Perusahaan menjamin untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. 4. Membuat perjanjian yang sah atas pinjaman/ penanaman modal dengan mengedepankan prinsip kewajaran (<i>fairness</i>). 5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur/ investor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan yang didasarkan pada peraturan perundangan dan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. 6. Mengedepankan aspek kredibilitas dan bonafiditas serta legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemilihan kreditur/investor <p>The company collaborates with creditors/investors solely for the purpose of business interests and enhancing the added value of the company by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fulfilling obligations to creditors in accordance with agreements and providing reports on the use of creditor funds in compliance with applicable regulations. 2. Providing current, prospective, transparent, accurate, timely, and accountable information both at the time of request and during the use of loans. 3. Covenants: The company guarantees to take certain actions or refrain from actions to protect the interests of creditors. 4. Entering into valid agreements for loans/investments with a focus on the principle of fairness. 5. Exploring business opportunities with creditors/investors to enhance the company's growth, based on legal regulations and the principles of integrity and accountability. 6. Prioritizing aspects of credibility, financial strength, and legal accountability in selecting creditors/investors.
  <p>Etika Perusahaan dengan Pemerintah</p> <p>Corporate Ethics with the Government</p>	<p>Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah, mempunyai kebijakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan usaha dan status Perusahaan. 2. Mengembangkan hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran pemerintah dalam batas toleransi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan hukum yang berlaku, dan memelihara hubungan tersebut sebagai hubungan yang bersifat <i>arms-length</i> dan harus dihindari terjadinya penyelewengan. <p>In establishing relations with the government, the company follows policies that include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upholding compliance with applicable laws, regulations, and legislation related to the company's operations and status. 2. Developing good relationships and effective communication with government officials at all levels, within the limits of tolerance according to company regulations and applicable laws, and maintaining these relationships as arms-length, avoiding any form of misconduct.
  <p>Etika Perusahaan dengan Masyarakat</p> <p>Corporate Ethics with the Society</p>	<p>Perusahaan menyadari peran penting masyarakat terhadap kelangsungan proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa mewujudkan sinergi dengan jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saling menghormati hak dan kewajiban serta menjalin hubungan baik berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan. 2. Meminimalkan potensi konflik melalui dialog dengan wakil masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama serta tercipta hubungan yang kondusif. 3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat sekitar. 4. Mengupayakan komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional Perusahaan di tempat tersebut dan sesudahnya. 5. Mengembangkan sensitivitas, kepekaan Perusahaan terhadap kondisi masyarakat dalam rangka fungsi PSO Perusahaan. <p>The company acknowledges the important role of the community in the continuity of its business processes. Therefore, the company consistently strives to create synergy by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respecting each other's rights and obligations, and fostering good relationships based on the principles of coexistence and mutual benefit. 2. Minimizing potential conflicts through dialogue with society representatives to reach mutual understanding and create a conducive relationship. 3. Always being able to adapt to the evolving values and cultural norms of the surrounding society. 4. Striving for long-term commitment to the local community so that the social and economic structure will be protected and, if possible, improved throughout the company's operational presence and beyond. 5. Developing sensitivity and awareness of the company's role in the society in line with the company's PSO (Public Service Obligation) function.





Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Media Massa	<p>Perusahaan bermitra dengan media massa untuk membangun citra Perusahaan dengan jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi melalui media massa. 2. Mengundang media massa untuk meliput acara Perusahaan jika diperlukan. 3. Menindaklanjuti kritik-kritik yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko. 4. Membina hubungan baik dan sekaligus menyampaikan informasi perkembangan Perusahaan dengan media massa melalui silaturahmi ke kantor media massa, press release dan dapat menyelenggarakan ajang penghargaan jurnalistik. 5. Memperhatikan catatan-catatan dan saran media yang sejauh mungkin relevan dengan perlunya langkah penyesuaian oleh Perusahaan. 6. Memperhatikan kebijakan nasional untuk kebebasan informasi publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaannya dan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Perusahaan.
Corporate Ethics with Mass Media	<p>The Company partners with mass media to build its corporate image by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoting the Company through mass media. 2. Inviting mass media to cover Company events when necessary. 3. Addressing criticisms conveyed through mass media while considering risk aspects. 4. Maintaining good relations and sharing updates on the Company's developments with the mass media through visits to media offices, press releases, and organizing journalism award events. 5. Taking into account media notes and suggestions that are relevant to necessary Company adjustments. 6. Considering national policies on public information freedom in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure, as stipulated in its implementing regulations and adapted to the Company's situation and conditions.
Etika Perusahaan dengan Asosiasi Profesi	<p>Perusahaan menjalin sinergi berkelanjutan dengan asosiasi profesi untuk kepentingan pengembangan usaha dan peluang bisnis, serta penyelesaian masalah yang terjadi dengan tetap memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar-standar yang ditetapkan asosiasi profesi. 2. Kesetaraan perlakuan terhadap asosiasi profesi. 3. Memperhatikan dan mempelajari pengembangan sistem baru baik sistem industri maupun sistem bisnis yang dapat menjadi referensi bagi Perusahaan.
Corporate Ethics with Professional Associations	<p>The Company establishes continuous synergy with professional associations to support business development, explore new business opportunities, and resolve arising issues while adhering to the following principles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compliance with standards set by professional associations. 2. Equal treatment of all professional associations. 3. Observing and studying the development of new systems, whether in industry or business, as a reference for the Company.
Etika Kerja Sesama Insan PUSRI	<p>Dalam bersikap dan bertindak insan PUSRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh pada ketentuan hukum dan perundangan serta peraturan Perusahaan. 2. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap. 3. Menghindari segala bentuk dan jenis benturan kepentingan. 4. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah terkait. 5. Menghindari tindakan ilegal, serta persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak fair atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba. 6. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. <p>Dalam hubungan dengan etika kerja sesama Insan PUSRI, dilandasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 2. Jujur dan sopan. 3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. 5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan. 6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas. 7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun. 8. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
  	<p>In their conduct and actions, PUSRI personnel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comply with legal regulations, laws, and corporate policies. 2. Are prohibited from receiving benefits derived from power, position, function, or duties, whether directly or indirectly, including promises, payments, offers, or acceptance of bribes. 3. Avoid all forms and types of conflicts of interest. 4. Support fair business competition principles in line with competition laws and relevant government regulations. 5. Refrain from engaging in illegal activities, excessive competition without economic justification, unfair practices, or unethical behavior in pursuit of profit. 6. Obtain information through lawful means and store and use it in accordance with applicable business ethics principles. <p>In maintaining ethical work relations among PUSRI personnel, the following principles are upheld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Working professionally to achieve optimal performance. 2. Being honest and respectful. 3. Valuing each other, being open to criticism and suggestions, and resolving issues through consensus. 4. Supporting, motivating, and collaborating to complete tasks. 5. Communicating new ideas and sharing knowledge and skills. 6. Taking initiative and developing competencies in carrying out duties. 7. Having the courage to discuss inappropriate policies to provide constructive corrections respectfully. 8. Respecting differences in gender, ethnicity, religion, race, and social groups.
 	<p>Insan PUSRI memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah dan pengambilan keputusan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan yang akurat dan andal harus dipelihara setiap waktu. 2. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian pelayanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. 3. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan Auditor Internal dan Eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. 4. Kebijakan Perusahaan melarang insan PUSRI untuk mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan ke luar Perusahaan baik selama masa kerja atau sesudahnya. 5. Perusahaan juga menjaga data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan
 	<p>PUSRI personnel utilize company data and information to enhance value creation and decision-making by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintaining accurate and reliable records at all times. 2. Ensuring that every monetary payment, transfer of ownership, service provision, and other transactions are fully and accurately reflected in the company's accounting system and business records. 3. Requiring all parties to disclose relevant information and fully cooperate with Internal and External Auditors during compliance audits or other investigations. 4. Enforcing a company policy that prohibits PUSRI personnel from disclosing confidential information about the company or its customers to external parties, both during and after their tenure with the company. 5. Protecting specific data belonging to customers, business partners, and joint venture partners.
	<p>Perusahaan mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan. 2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. 3. Melakukan penghematan pemakaian energi.
	<p>The Company optimizes the use of its assets by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Being responsible for the management of the Company's assets and preventing their use for purposes outside the interests of the Company. 2. Securing the Company's assets from damage and loss. 3. Implementing energy-saving measures.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
<p>Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup</p> <p>Maintaining Security and Safety, Occupational Health, and Environmental Protection</p>	<p>Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari tata nilai yang perlu diwujudkan. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan bertekad untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dan pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela. 2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan. 3. Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan best practices yang tepat pada situasi setempat. 4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan. 5. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan laporan tahunan. 6. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan. <p>Security and Safety, Occupational Health, and Environmental Protection are integral parts of the values that need to be realized. To achieve this goal, the Company is committed to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Building a foundation of compliance in line with occupational health and safety (OHS) laws and regulations, environmental preservation, and voluntary commitments. 2. Striving for continuous improvement in various aspects related to OHS performance and environmental preservation. 3. Setting and reviewing objectives, assessments, and reporting on OHS performance and environmental preservation by applying best practices that are suitable for the local situation. 4. Fostering a better understanding of OHS issues and environmental preservation related to the Company's business activities. 5. Integrating OHS and environmental preservation as inseparable components of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and annual reports. 6. Involving employee participation as part of efforts to enhance the implementation of Occupational Health and Safety and environmental preservation.
<p>Mencatat Data Pelaporan</p> <p>Recording Reporting Data</p>	<p>Perusahaan mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja. 3. Mengedepankan integritas penyajian laporan dengan tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan. 4. Membiasakan untuk melakukan pencatatan kegiatan dalam rangka pengembangan dan penerapan penilaian kinerja perorangan di lingkungan Perusahaan. <p>The company manages data in an orderly, systematic, meticulous, accurate, and prompt manner by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recording data and preparing reports based on valid and accountable sources. 2. Presenting reports in a concise, clear, accurate, and communicative manner to support decision-making and provide feedback for performance improvement. 3. Prioritizing the integrity of report presentation by not concealing data and reports that should be disclosed. 4. Habitually recording activities as part of the development and implementation of individual performance evaluations within the company.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
   <p>Menerapkan Perilaku Anti Fraud</p>   <p>Implementing Anti-Fraud Behavior</p>	<p>Dalam bersikap dan bertindak, Insan PUSRI menerapkan perilaku anti terhadap Fraud (Kecurangan) yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang termasuk Kategori Fraud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi (<i>Corruption</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) b. Penyuapan (<i>Bribery</i>) c. Gratifikasi Ilegal (<i>Gratuities</i>) d. Pemerasan Ekonomi (<i>Economic Extortion</i>) 2. Penyalahgunaan Aset <ol style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan Kas: <ul style="list-style-type: none"> • Pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (<i>Larceny</i>) • Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat (<i>Skimming</i>) • Kecurangan Pengeluaran Kas (<i>Fraudulent Disbursement</i>) b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lainnya yang dimiliki Perusahaan 3. Kecurangan Laporan <ol style="list-style-type: none"> a. Kecurangan Laporan Keuangan b. Kecurangan Laporan Non Keuangan <p>In terms of behavior and actions, PUSRI employees apply anti-fraud conduct by refraining from engaging in activities categorized as Fraud, including the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corruption <ol style="list-style-type: none"> a. Conflict of Interest b. Bribery c. Illegal Gratuities d. Economic Extortion 2. Misuse of Assets <ol style="list-style-type: none"> a. Misuse of Cash: <ol style="list-style-type: none"> b. Theft of recorded cash receipts (<i>Larceny</i>) c. Theft of unrecorded cash receipts (<i>Skimming</i>) d. Fraudulent disbursements e. Misuse of Inventory and Other Assets Owned by the Company 3. Fraudulent Reporting <ol style="list-style-type: none"> a. Financial Statement Fraud b. Non-financial Reporting Fraud
  <p>Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja</p> <p>Health, Security, and Work Safety</p>	<p>Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aset tak ternilai bagi Perusahaan, oleh karena itu Perusahaan senantiasa mengelola kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja secara optimal yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko pekerjaan demi keberhasilan usaha jangka panjang. Perusahaan selalu berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan selalu memastikan lokasi usaha, fasilitas, sarana, dan prasarana Perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Perusahaan mengelola Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja karyawan dengan cara antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3). 2. Mempertahankan penghargaan zero accident. 3. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari implementasi SMK3. 4. Membentuk sistem pengamanan yang dijalankan oleh Biro Pengamanan agar tercipta kondisi kerja yang aman, nyaman, dan terhindar dari gangguan/ ancaman dari luar sehingga karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. <p>The Company recognizes that employees are invaluable assets, and therefore, the Company consistently manages health, safety, and work security in an optimal manner to protect employees from work-related risks, ensuring long-term business success. The Company always strives to provide a safe and healthy working environment by ensuring that business locations, facilities, equipment, and infrastructure meet applicable laws and occupational safety standards. The Company manages employee health, safety, and work security through the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3). 2. Maintaining the zero-accident award. 3. Involving employee participation as part of SMK3 implementation. 4. Establishing a security system managed by the Security Bureau to create a safe, comfortable work environment, free from external threats, so employees can perform their tasks effectively.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
<p>Menghindari Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dan Penyalahgunaan Jabatan</p> <p>Avoiding Conflicts of Interest and Abuse of Position</p>	<p>Insan PUSRI menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan. 2. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait. 3. Tidak melakukan aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan. 4. Tidak ada kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh insan PUSRI beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam Perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan. 5. Insan PUSRI tidak terlibat dalam jual beli aset Perusahaan (insider trading). 6. Tidak memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 7. Tidak memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 8. Tidak melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam pengelolaan Perusahaan pesaing. 9. Senantiasa menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap langkah kerja. <p>PUSRI employees avoid situations, conditions, or any appearance of conflicts of interest and abuse of position by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Always adhering to the rules, systems, and procedures established by the Company. 2. Not using their position for personal gain or for the benefit of others with whom they have a relationship. 3. Not engaging in outside activities that could negatively affect their independence and objectivity in decision-making; such activities may conflict with their job responsibilities or harm the Company. 4. Not having direct or indirect ownership of shares, whether individually or together with their family members, in any other company that conducts transactions with the Company. 5. PUSRI employees are not involved in insider trading or the buying and selling of Company assets. 6. Not using Company assets for personal or third-party benefit. 7. Not using confidential information for personal gain or for the benefit of others. 8. Not working outside the Company or being involved in managing a competing company. 9. Consistently maintaining integrity and accountability in all actions.
<p>Menerima Hadiah/ Cinderamata/ Gratifikasi dan Entertainment</p> <p>Receiving Gifts/ Souvenirs/ Gratification and Entertainment</p>	<p>Insan PUSRI tidak menerima hadiah/cinderamata/ gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hadiah karena adanya hubungan baik antara Perusahaan dengan pihak lain, tanpa keterikatan perjanjian hingga tidak berdampak merugikan Perusahaan atau sebaliknya tidak merugikan pihak lain. 2. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan yang wajar. 3. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi. <p>PUSRI employees shall not accept gifts/souvenirs/gratifications in any form related to their position and work, except for the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gifts given due to a good relationship between the Company and another party, without any binding agreements, and that do not negatively impact the Company or the other party. 2. Accepting entertainment in the form of reasonable meals or gatherings. 3. Accepting promotional items that bear the logo/name of the company providing them.
<p>Memberi Hadiah/ Cinderamata dan Entertainment</p> <p>Giving Gifts/ Souvenirs and Entertainment</p>	<p>Insan PUSRI dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang kepentingan Perusahaan. 2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap. 3. Telah dianggarkan oleh Perusahaan. 4. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka bernilai wajar dan tidak melanggar ketentuan yang tertulis dan harus mencantumkan logo/nama Perusahaan. 5. Hadiah tidak dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak lain agar menguntungkan kepentingan insan PUSRI. <p>PUSRI employees may give gifts/souvenirs and entertainment to other parties under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It supports the interests of the Company. 2. It is not intended as a bribe. 3. It has been budgeted by the Company. 4. If the gift/souvenir is a physical item, it is of reasonable value and does not violate written regulations, and must include the Company's logo/name. 5. The gift is not intended to influence the decision of the other party in a way that benefits the interests of PUSRI employees.
<p>Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)</p> <p>Abuse of Narcotics, Illegal Drugs, and Alcoholic Beverages (Narcotics and Alcohol)</p>	<p>Insan PUSRI bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan miras</p> <p>PUSRI personnel are free from any form of drug and alcohol abuse.</p>

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
 Aktivitas Politik	Insan PUSRI bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu. 2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif. 3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
 Political Activities	PUSRI employees maintain neutrality towards all political parties by: <ol style="list-style-type: none"> 1. Not using company facilities for the benefit of any particular political group/party. 2. Not holding dual positions as political party officials and/or legislative members. 3. Not bringing, displaying, posting, or distributing political party symbols, images, or ornaments within the company premises.
 Etika Penggunaan Media Sosial	Insan PUSRI memanfaatkan media sosial bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan Perusahaan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, dengan cara menggunakan pemilihan kata (bahasa) yang tepat, sopan dan layak. 2. Tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan Suku, Agama, dan Ras (SARA). 3. Tidak membuat dan menyebarkan berita bohong (hoax), tidak melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian. 4. Tidak melanggar ketentuan dan Undang-undang Pornografi serta Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU-ITE).
 Social Media Usage Etiquette	PUSRI employees utilize social media for both personal and company interests in a responsible manner, taking into consideration the following points: <ol style="list-style-type: none"> 1. Upholding ethics in communication by using appropriate, polite, and proper language. 2. Not spreading information related to ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA). 3. Not creating or disseminating false information (hoaxes), engaging in defamation, insults, or hate speech. 4. Not violating the provisions of the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Law (UU-ITE).

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik berlaku untuk seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap kode etik setiap tahun oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan sebagai bentuk pemberlakuan dan komitmen pelaksanaan kode etik.

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik PUSRI disebarakan kepada semua insan Perusahaan melalui berbagai media. Media sosialisasi penyebaran kode etik antara lain melalui:

1. Website
2. Buku saku
3. Banner & Spanduk

Untuk mewujudkan perilaku yang berlandaskan kode etik tersebut, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan Perusahaan, antara lain melalui:

1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta pekerja untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap langkah Perusahaan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbarui setiap awal tahun.

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS FOR ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Ethics applies to all employees with a direct employment relationship, both permanent and contractual employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. Additionally, an annual signing of the Compliance Statement to the Code of Ethics is conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees as a form of implementation and commitment to upholding the Code of Ethics.

SOCIALIZATION OF THE CODE OF ETHICS GUIDELINES

The PUSRI Code of Ethics is disseminated to all employees through various media. The media used for the socialization of the Code of Ethics include:

1. Website
2. Pocket Guide
3. Banners & Billboards

To promote behavior based on this Code of Ethics, several strategic initiatives are implemented by the Company, including:

1. The commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to apply good corporate governance in every step of the Company, as outlined in the Integrity Pact, which is updated at the beginning of each year.

2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pekerja Perusahaan yang diperbarui setiap tahun.

2. Leadership by example, demonstrating attitudes and behaviors that align with the Company's policies and regulations regarding Good Corporate Governance.
3. The signing of the Integrity Pact by all employees of the Company, which is updated annually.

UPAYA PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Perusahaan mengatur konsekuensi dari pelanggaran terhadap Pedoman Etika & Perilaku akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/ DIR/217/2023 tentang Pemberian Sanksi. Jenis sanksi dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Sanksi Ringan, penetapan sanksi:
 - a. Teguran lisan, bersifat internal dari atasan langsung pekerja.
 - b. Teguran tertulis, berlaku untuk seluruh lingkungan unit kerja dan juga mempengaruhi konduite Perusahaan karena merupakan sanksi minimal yang dicatatkan di sistem administratif kepegawaian.
2. Sanksi Sedang, penetapan sanksi:
 - a. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) A, berlaku selama 2 bulan
 - b. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) B, berlaku selama 4 bulan
 - c. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) C, berlaku selama 6 bulan
3. Sanksi Berat, penetapan sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

ENFORCEMENT EFFORTS AND SANCTIONS FOR CODE OF ETHICS VIOLATIONS

The Company establishes the consequences for violations of the Ethics & Conduct Guidelines, which may result in sanctions up to and including termination of employment. This is based on the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/217/2023 regarding the Imposition of Sanctions. The types of sanctions are categorized into 3 (three) levels as follows:

1. Minor Sanctions, including:
 - a. Verbal warning, issued internally by the direct supervisor.
 - b. Written warning, applicable across the entire work unit and impacting the Company's conduct, as it is the minimal sanction recorded in the employee administrative system.
2. Moderate Sanctions, including:
 - a. Written warning (Warning Slip) A, valid for 2 months.
 - b. Written warning (Warning Slip) B, valid for 4 months.
 - c. Written warning (Warning Slip) C, valid for 6 months.
3. Severe Sanctions, including: Termination of Employment.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2024

Berikut uraian jumlah sanksi atas pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023.

NUMBER OF CODE OF ETHICS VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED IN 2024

The following is a summary of the sanctions imposed for Code of Ethics violations in 2024 and a comparison with 2023.

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2024	2023
Sanksi Ringan Minor Sanctions	-	-
Teguran Lisan Verbal Warning	-	-
Teguran Tertulis Written Warning	10	-
Sanksi Sedang Moderate Sanctions	-	-

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2024	2023
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) A Written Warning (Warning Slip) A	-	-
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) B Written Warning (Warning Slip) B	-	-
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) C Written Warning (Warning Slip) C	2	-
Sanksi Berat (PHK) Severe Sanctions (Termination of Employment)	-	-
Jumlah Total	12	

EVALUASI PEDOMAN ETIKA DAN TATA PERILAKU

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap Kode Etik untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Kode Etik dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi Kode Etik yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Kode Etik Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Kode Etik ini diharapkan dapat menjamin Perusahaan melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.

Perubahan Kode Etik Perusahaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perusahaan.

Komitmen dan dukungan seluruh Pekerja, Pelanggan dan Mitra Kerja merupakan kunci keberhasilan implementasi Kode Etik dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Oleh karenanya, Perusahaan menerima berbagai masukan, kritik dan saran dari pemangku kepentingan terkait.

EVALUATION OF THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT GUIDELINES

The Company conducts evaluations of the Code of Ethics to assess its alignment with the Company's needs and to measure the effectiveness of the Code of Ethics implementation program. Based on the results of these evaluations, continuous development of the Company's Code of Ethics and improvements to its implementation program will be carried out.

The implementation of this Code of Ethics is expected to ensure that the Company ethically conducts its business activities, both in principle and practice.

Any changes to the Company's Code of Ethics will be made in accordance with applicable laws and regulations, social life, customs, norms, and the changes and developments in the Company's business.

The commitment and support of all employees, customers, and business partners are key to the successful implementation of the Code of Ethics in the Company's daily operations. Therefore, the Company welcomes feedback, criticism, and suggestions from relevant stakeholders.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaan

Policy on Disclosure of Shareholding Information of the Board of Commissioners and Board of Directors and Implementation

PUSRI memiliki kebijakan pelaporan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Peraturan ini menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan entitas usaha lain, termasuk setiap perubahannya. Kebijakan yang sama berlaku bagi Direksi dan/atau keluarganya.

Mengingat PUSRI bukanlah perusahaan publik dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), tidak ada yang harus dilaporkan mengenai perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.



PUSRI has a policy for reporting the Company's share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors, which refers to the Ministry of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. This regulation stipulates that the Board of Commissioners is required to report to the SOE regarding their share ownership and/or that of their family members in the Company and other business entities, including any changes. The same policy applies to the Board of Directors and/or their family members.

Considering that PUSRI is not a public company and the majority of its shares are owned by PT Pupuk Indonesia (Persero), there is no requirement to report any changes in the share ownership of the Company by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System



PUSRI memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.



Keberadaan WBS merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Keberadaan WBS bagi PUSRI diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.



PUSRI telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Pengaduan Pelanggaran/WBS melalui aturan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Management System*) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penerapan sistem tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.



RUANG LINGKUP WBS

PUSRI telah mengatur ruang lingkup pengaduan yang ditangani oleh mekanisme WBS, mencakup:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan
 - a. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/perilaku dan peraturan relevan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - b. Pelanggaran kebijakan/peraturan Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan/ peraturan Perusahaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian material dan tidak material bagi Perusahaan.
 - c. Perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- a. Bertindak diluar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan & merusak/memperburuk citra Perusahaan.
- b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;

2. Penipuan.

Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



PUSRI has established provisions regarding the reporting of violations through the Whistleblowing System (WBS). These provisions outline the mechanism for reporting violations. Additionally, the stages of report receipt, investigation, and decision-making, as well as the sanctions to be imposed if the reported violation is proven, are also covered.

The existence of the WBS is part of the Company's Internal Control System, aimed at preventing fraudulent practices. For PUSRI, the WBS is expected to be an effective system in uncovering various forms of misconduct and resolving them promptly.

PUSRI has developed and implemented the Whistleblowing System through internal regulations outlined in the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/422/2023 dated November 2, 2023, regarding the Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines on the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The implementation of this system aims to create a conducive environment and encourage reporting on matters that could lead to financial or non-financial losses, including issues that could damage the organization's reputation.

SCOPE OF WBS

PUSRI has defined the scope of complaints handled by the WBS mechanism, which includes:

1. Violations of the Code of Ethics/Conduct and Company Regulations
 - a. Violations of the Code of Ethics/Conduct refer to actions that violate the ethics/conduct code and other relevant regulations established by the Company.
 - b. Violations of Company policies/regulations refer to breaches of Company policies/regulations carried out intentionally, resulting in both material and non-material losses to the Company.
 - c. Actions that, based on individual beliefs and social norms, are considered wrong or harmful.

Examples of such actions include, but are not limited to:

- a. Acting beyond one's authority to benefit oneself or others, which may harm or damage the Company's reputation.
- b. Actions that violate the systems and procedures set out in the Company's Guidelines/Procedures, causing harm to the Company.

2. Fraud

An act intended to benefit oneself or others illegally, by using a false identity or false dignity, through deception, or a series of lies, in order to persuade someone to surrender goods or property to them, or to incur debt or forgive a debt.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan penipuan kepada pihak eksternal dan/atau internal dengan mengatasnamakan Perusahaan, dimana secara riil hal yang disampaikan tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang yang ditipu;

3. Korupsi

Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan mark-up pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan;

4. Penyuapan

Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan suap dan/atau memberi suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pemerasan

Tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan pungutan tidak sah dengan unsur paksaan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;

6. Gratifikasi yang tidak sah (ilegal)

Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Examples of such acts include, but are not limited to: committing fraud against external and/or internal parties by impersonating the Company, where the information conveyed is false or fictitious, with the intent to benefit oneself or others, resulting in losses to the Company or to the deceived party.

3. Corruption

An illegal act of enriching oneself, others, or a corporation, which can harm the state's finances or the country's economy.

Examples of such acts include, but are not limited to: mark-up in the procurement of goods and services, sales, purchases, and other activities intended to benefit oneself or others, resulting in losses to the Company.

4. Bribery

An act of giving or promising something to someone to persuade them to do or refrain from doing something in their duties, which is contrary to their authority or obligations concerning the public interest. It also includes accepting something or a promise, knowing or reasonably suspecting that the gift or promise is intended to influence the individual to do or not do something in their duties, which is against their authority or obligations concerning the public interest.

Examples of such acts include, but are not limited to: offering or giving a bribe to another party, where the action violates applicable laws and regulations.

5. Extortion

An act of illegally benefiting oneself or others by using force or threats of force to compel someone to give goods, in whole or in part, that belong to that person or another, or to incur debt or forgive a debt, which is punishable as extortion.

Examples of such acts include, but are not limited to: making unlawful demands under duress in any form while performing duties for personal, group, or third-party interests.

6. Illegal Gratification

An act of giving and/or receiving in a broad sense, including the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, leisure travel, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or internationally, and conducted through electronic means or without electronic means, by Company personnel in connection with their authority/position within the Company. This can create a conflict of interest that affects the independence, objectivity, or professionalism of the individual.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.
- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan;



7. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan dan menguntungkan diri sendiri/kelompok;

8. Pelanggaran Hukum

Tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang lain;

9. Pencurian

Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: mengambil aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

10. Penggelapan

Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya;

11. Kelalaian yang Berdampak Besar

Jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan seseorang kurang berhati-hati dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: kelalaian yang dilakukan oleh Insan Perusahaan atas pelaksanaan proses bisnis sehingga memberikan dampak pada terhentinya proses operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian Perusahaan baik kerugian finansial dan non finansial;

Examples of such acts include, but are not limited to:

- a. Accepting gifts/rewards from service providers as a token of appreciation that violates the Company's Gratification Control Guidelines.
- b. Accepting promises/gifts/rewards from third parties to influence a decision that could harm the Company, in violation of the Company's Gratification Control Guidelines.

7. Deception

Dishonest or deceptive acts, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports, creation and use of false documents, carried out by an individual or a group of individuals, resulting in potential or actual losses to the Company or other parties.

Examples of such acts include, but are not limited to: creating and/or using and/or providing and/or altering and/or copying and/or duplicating data and/or information that does not reflect the actual conditions, thereby harming the Company and benefiting oneself/group.

8. Violation of Law

An action by an individual or group that violates rules not in accordance with applicable laws.

Examples of such acts include, but are not limited to: engaging in activities that break the law with the intent to benefit oneself or others, resulting in losses to the Company or others.

9. Burglary

An act of taking goods, in whole or in part, that belong to someone else, with the intent to unlawfully possess them.

Examples of such acts include, but are not limited to: taking Company assets and/or the property of others/employees for personal or third-party benefit.

10. Embezzlement

Dishonest actions involving the concealment of Company property or assets by one or more individuals without the Company's knowledge, with the intent to transfer ownership, take control of, or use them for other purposes.

Examples of such acts include, but are not limited to: misusing or taking, without justification, money, goods, data, documents, or other valuable items belonging to the Company and/or others entrusted to them.

11. Significant Negligence

A type of mistake that occurs due to an individual's lack of caution in their actions, which can result in losses for the Company.

Examples of such acts include, but are not limited to: negligence by Company personnel in carrying out business processes, leading to disruptions in the Company's operations and causing both financial and non-financial losses to the Company.

12. Diskriminasi

Setiap perbedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau perbedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi di lingkungan kerja.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi dalam hal proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh atasan dengan bawahan, pekerja dengan pekerja, atau kelompok dengan kelompok lain berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau karakteristik lainnya;

13. Intimidasi

Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, atau ancaman.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbuatan pemaksaan dari atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas yang melanggar Peraturan Perusahaan atau hukum;

14. Kekerasan

Setiap tindakan termasuk ancaman yang dilakukan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik maupun privat, sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: penganiayaan secara fisik/non fisik yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual di lingkungan tempat kerja;

15. Pelecehan

Segala perbuatan di tempat kerja maupun media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi, merendahkan, menghina, memperlakukan seseorang.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada pelecehan fisik, verbal, nonverbal, dan visual serta bentuk pelecehan lainnya;

16. Penggunaan Dana atau Sumber Daya Publik yang Tidak Sah

Penggunaan dana atau sumber daya publik yang tidak sah oleh Insan Perusahaan sehingga dapat memberikan kerugian bagi internal dan eksternal perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: penggunaan dana/sumbangan dari partai/pihak eksternal lainnya dalam melaksanakan program kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan;

12. Discrimination

Any differentiation, marginalization, restriction, and/or exclusion, whether direct or indirect, based on religion, ethnicity, race, ethnic group, social class, marital status, economic status, gender, language, political preference, disability, or other characteristics, that impacts or aims to reduce or eliminate the recognition, exercise, or enjoyment of human rights and fundamental freedoms. This leads to inequality of opportunity or differential treatment of an individual or group in Company activities and in workplace interactions.

Examples of such acts include, but are not limited to: differential treatment, exclusion, or preference in recruitment and selection processes, performance evaluations, training and development, compensation and benefits, promotions/demotions, termination of employment (layoffs) carried out by supervisors towards subordinates, workers towards other workers, or groups towards other groups based on ethnicity, race, nationality, skin color, religion, gender, age, disability, or other characteristics.

13. Intimidation

An act of frightening (especially to force someone or another party to do something), coercion, or threatening behavior.

Examples of such acts include, but are not limited to: acts of coercion by a supervisor towards a subordinate to perform tasks that violate Company policies or laws.

14. Violence

Any act, including threats, carried out arbitrarily against others in the workplace, whether in public or private, that results in physical, psychological, or sexual harm.

Examples of such acts include, but are not limited to: physical/non-physical abuse that causes physical, psychological, or sexual harm in the workplace.

15. Harassment

Any act in the workplace or through communication media that is inconsistent with the law or human rights regulations, intended to intimidate, degrade, insult, or embarrass someone.

Examples of such acts include, but are not limited to: physical, verbal, non-verbal, and visual harassment, as well as other forms of harassment.

16. Misuse of Public Funds or Resources

The unauthorized use of public funds or resources by Company personnel may result in losses for both the internal and external stakeholders of the Company.

Examples of such acts include, but are not limited to: the use of funds/contributions from political parties or other external parties in carrying out the Company's work programs that do not comply with the Company's established regulations.

17. Penyalahgunaan Wewenang

Insan Perusahaan dengan kekuasaan/jabatan yang dimilikinya melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara merugikan Negara dan/atau Perusahaan.



Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: Penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia;



18. Benturan kepentingan

Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.



Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan; dan



19. Mis-manajemen

Suatu kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pemberian bimbingan atau fasilitas-fasilitas manajerial itu berlangsung, atau mismanajemen terjadi karena adanya kesalahan tindakan pada saat proses pencapaian tujuan sedang berlangsung.



Contoh perbuatan ini adalah namun tidak terbatas pada: kesalahan pengambilan keputusan dalam aktivitas bisnis dikarenakan kesalahan/kekeliruan tindakan tanpa ada dasar yang jelas sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

17. Abuse of Authority

Company personnel, by their power or position, abuse their authority for personal gain or for the benefit of others or a corporation, in ways that harm the State and/or the Company.

Examples of such acts include, but are not limited to: Abuse of authority that may occur in various forms, such as the misuse of decision-making power, financial management, and human resource management.

18. Conflict of Interest

A situation or condition in which Company personnel, who hold power and authority, have or are suspected of having personal or group interests related to the use of their power and authority, which could influence the quality and performance that should be expected.

Examples of such acts include, but are not limited to:

- Making a decision to appoint a specific party as a supplier of goods/services without following the proper procedures, where the individual has an economic interest in the appointed party.
- Taking an action or making a decision that benefits oneself or others by violating Company procedures.

19. Mismanagement

A mistake or error in action during the process of providing guidance or managerial facilities, or mismanagement, occurs due to incorrect actions during the process of achieving goals.

Examples of such acts include, but are not limited to: poor decision-making in business activities due to errors or actions taken without a clear basis, resulting in losses for the Company.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

PUSRI telah mengatur cara penyampaian laporan pelanggaran dengan mengintegrasikan penerapan WBS Perusahaan dengan situs web WBS terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak tahun 2023. Hal ini sejalan dengan implementasi GCG menuju proses bisnis yang bersih dan transparan, bebas dari kecurangan (*fraud*), dan melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam mencegah kecurangan. Meski pengelolaan WBS masih dilakukan secara internal, Perusahaan memiliki Tim WBS yang bertugas menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi dan klarifikasi masalah. Pengaduan melalui WBS data dilakukan oleh karyawan atau pemangku kepentingan lainnya yang ditujukan kepada Kesekretariatan WBS Perusahaan.

WHISTLEBLOWING MECHANISM

PUSRI has established a procedure for submitting violation reports by integrating the Company's Whistleblowing System (WBS) with the integrated WBS website of PT Pupuk Indonesia (Persero) since 2023. This aligns with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) toward a clean and transparent business process, free from fraud, and encourages active employee participation in fraud prevention. Although the management of the WBS is still conducted internally, the Company has a dedicated WBS Team responsible for following up on reports through investigations and issuing clarifications. Reports through the WBS can be submitted by employees or other stakeholders and are directed to the Company's WBS Secretariat.

ALUR PELAPORAN WBS PUSRI

Guna memastikan tindak lanjut atas pengaduan dilakukan dengan baik, proses pemantauan dilakukan Perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui update data di unit terlapor, pertemuan dengan penanggung jawab tindak lanjut, dan wawancara dengan tim yang menangani. Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan komunikasi elektronik dan surat menyurat dengan pihak terkait.

Adapun alur penanganan pengaduan karyawan dan pihak berkepentingan digambarkan dalam bagan berikut ini.

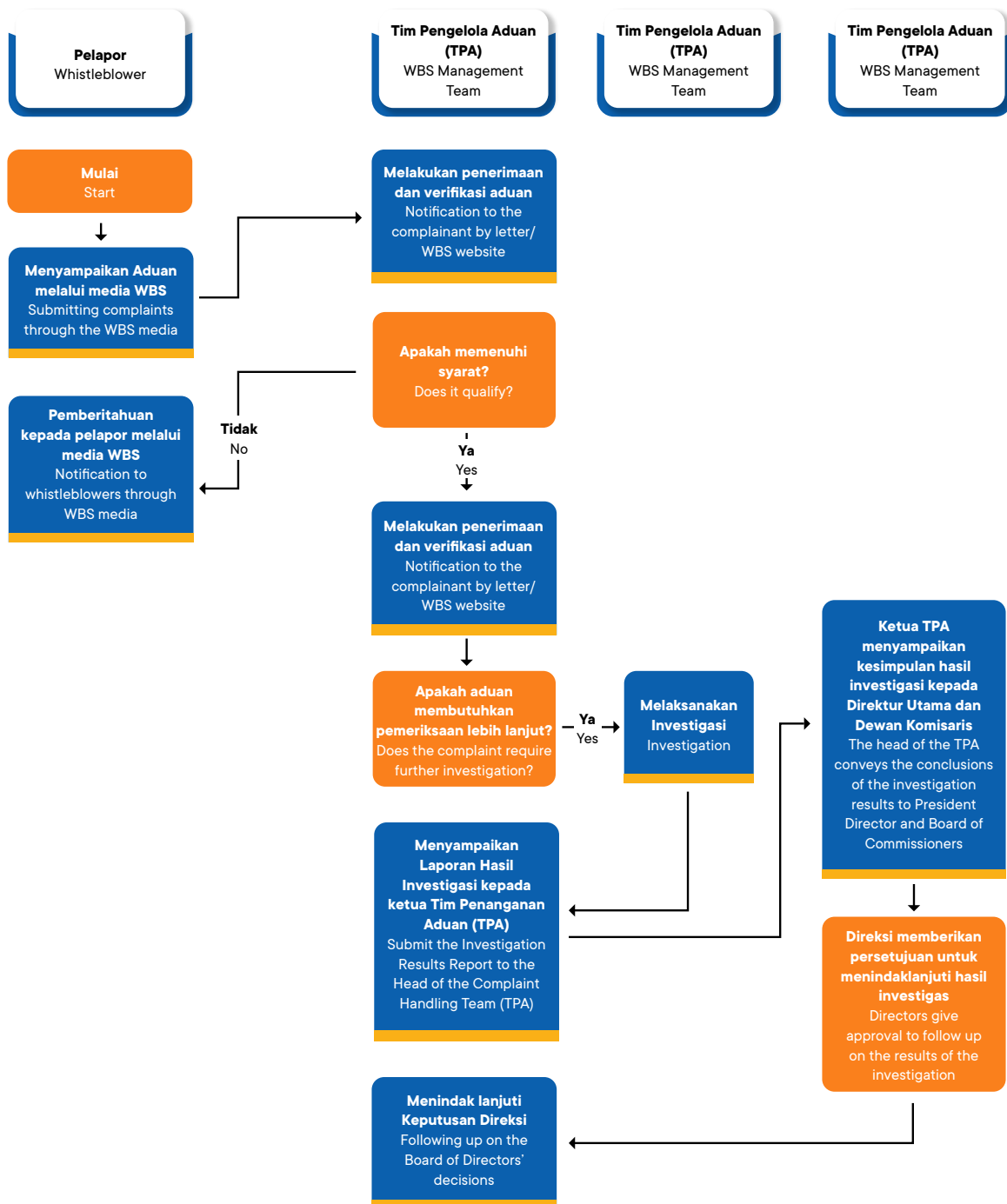
PUSRI WBS REPORTING FLOW

To ensure proper follow-up on complaints, the Company conducts both direct and indirect monitoring of the process. Direct monitoring is carried out through data updates at the reported unit, meetings with those responsible for follow-ups, and interviews with the handling team. Indirect monitoring is conducted via electronic communication and correspondence with relevant parties.

The handling process for employee and stakeholder complaints is illustrated in the following flowchart:

Bagan Alur Penanganan Pengaduan Karyawan dan Pihak Berkepentingan

Flowchart of Employee and Stakeholder Complaint Handling Process



PERLINDUNGAN BAGI BERBAGAI PIHAK TERKAIT

Perusahaan juga memberikan jaminan perlindungan bagi para pelapor, terlapor, petugas terkait, dan pihak berkepentingan lainnya.



1. Perlindungan yang diberikan kepada Pelapor dan Petugas Terkait dalam bentuk:

- a. Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan
- b. Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/kepegawaian Perusahaan.
- c. Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari Terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan.
- d. Perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pelapor dalam kondisi Pelapor mendabat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan
- e. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
- f. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan melibatkan pengambilan langkah/upaya untuk mencegah potensi terjadinya kejadian yang merugikan untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan terjadi lebih lanjut.
- g. Dukungan praktis kepada Pelapor dapat berupa dorongan dan meyakinkan Pelapor tentang nilai-nilai pelaporan Pengaduan dan mengambil langkah-langkah untuk membantu kesejahteraan mereka.
- h. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan secara emosional, finansial, hukum, atau reputasi.

2. Perlindungan yang diberikan kepada Terlapor yaitu dalam bentuk:

- a. Melindungi identitas:
- b. Melakukan investigasi dengan cara meniaga kerahasiaan dan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa pihak Terlapor tidak terekspos kemungkinan rusaknya reputasi (informasi dibagikan berdasarkan *need to know basis*)
- c. Memastikan proses penanganan pelaporan termasuk investigasi dan asistensi/pendampingan dilakukan tepat waktu, adil tidak memihak dan rahasia
- d. Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi secara reguler;
- e. Jika tidak terdapat bukti kesalahan yang ditemukan, tindakan perbaikan dapat dipertimbangkan, misal perbaikan reputasi, keuangan, status pekerjaan.

PROTECTION FOR INVOLVED PARTIES

The Company also guarantees protection for whistleblowers, reported parties, relevant officers, and other stakeholders.

1. Protection provided to Whistleblowers and Relevant Officers:

- a. Protection of the confidentiality of the information provided.
- b. Protection from Company administrative or employment sanctions.
- c. Protection from discrimination or threats from the reported party and other parties related to the reported violation.
- d. Legal assistance for whistleblowers if they face legal action from the reported party.
- e. The form of protection provided is adjusted based on the nature of the threats or retaliatory actions received. Protection is granted while maintaining confidentiality and adhering to the applicable regulations within the Company.
- f. The Company takes proactive measures to prevent potential harmful incidents and mitigate further risks.

- g. Practical support for whistleblowers, including encouragement and reassurance regarding the value of filing complaints, as well as steps to support their well-being.
- h. This support may include emotional, financial, legal, or reputational assistance.

2. Protection provided to the Reported Party

- a. Protection of identity.
- b. Conducting investigations while maintaining confidentiality and taking appropriate actions to ensure that the reported party is not exposed to potential reputational damage (information is shared on a need-to-know basis).
- c. Ensuring that the handling of reports, including investigations and assistance/accompaniment, is conducted in a prompt, fair, impartial, and confidential manner.
- d. Providing support throughout the process, including regular communication.
- e. If no evidence of wrongdoing is found, corrective actions may be considered, such as reputation restoration, financial compensation, or employment status adjustments.

PENANGANAN PENGADUAN DAN PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

PUSRI telah menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Karyawan & Stakeholder (Whistleblowing System) yang selanjutnya disebut "Tim Penanganan Aduan" sebagai pihak yang mengelola pengaduan sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Tim Penanganan Aduan terdiri dari:

1. Penanggung Jawab : Direktur Pembina
2. Ketua TPA: SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
3. Tim Administrasi Verifikasi : VP Tata Kelola & Tim
4. Tim Investigasi : Satuan Pengawasan Intern

Pengelolaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut:

1. Tim pengelola WBS menerima aduan dan memverifikasi terkait pemenuhan persyaratan dan analisis kecukupan bukti aduan.
2. Apabila syarat administratif terpenuhi atau tidak terpenuhi namun dapat diperkaya dengan informasi lebih lanjut maka akan dilakukan penilaian aduan.
3. Apabila syarat administratif tidak terpenuhi dan tidak dapat diperkaya informasinya maka pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dan diarsipkan.
4. Hasil verifikasi aduan dilaporkan kepada Direktur Utama secara periodik.
5. Jika aduan bukan termasuk tindak pidana korupsi (TPK) maka ditindaklanjuti oleh internal Perusahaan, namun jika termasuk TPK maka dikoordinasikan dengan KPK.

Saluran Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran

Reporting Channels for Alleged Violations

MEDIA PELAPORAN WBS

(Media Pelaporan Whistleblowing System)

Email: wbs@pusri.co.id
Website: wbs.pupuk-indonesia.com

Surat / Mail:
SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
SVP of Governance & Risk Management
Lantai II (Gedung Utama)
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Jl. Mayor Zen, Palembang 30118

HANDLING OF COMPLAINTS AND COMPLAINT MANAGEMENT PARTIES

PUSRI has appointed the Employee & Stakeholder Complaint Management Team (Whistleblowing System), hereinafter referred to as the "Complaint Handling Team," as the party responsible for managing complaints. This appointment is based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/422/2023 dated November 2, 2023, regarding the Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines on the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The Complaint Handling Team consists of:

1. Person in Charge: Supervising Director
2. Head of the Complaint Handling Team (TPA): SVP of Governance & Risk Management
3. Verification Administration Team: VP of Governance & Team
4. Investigation Team: Internal Audit Unit

The management and follow-up of received complaints/disclosures are carried out as follows:

1. The WBS management team receives complaints and verifies their compliance with requirements and the sufficiency of supporting evidence.
2. If the administrative requirements are met, or if they are not met but can be supplemented with additional information, the complaint will be assessed.
3. If the administrative requirements are not met and cannot be supplemented with further information, the complaint cannot be processed and will be archived.
4. The results of the complaint verification are reported to the President Director periodically.
5. If the complaint does not fall under the category of a criminal act of corruption (TPK), it will be handled internally by the Company. However, if it is classified as TPK, coordination will be carried out with the Corruption Eradication Commission (KPK).



HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Tindak Lanjutnya sepanjang tahun 2024, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS sebanyak 5 (lima) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:



RESULTS OF COMPLAINT HANDLING

The number of complaints received and their follow-up actions throughout 2024, a total of 5 (five) violation complaints were submitted through the WBS mechanism, with the following details:

No	Status	Jumlah Aduan Berdasarkan Saluran Number of Complaints by Channel						Jumlah Aduan Number of Complaints			
		Website		Email		Telepon Phone		2024		2023	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	Total	%	Total	%
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Complaints of Alleged Violations	1	-	-	-	-	-	1	20	-	0
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Not a Complaint of Alleged Violation	4	1	-	-	-	-	4	80	1	100
Total		5	1	-	-	-	-	5	100	1	100

EVALUASI EFEKTIVITAS WBS

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan sendiri oleh Direksi atau menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem Pelaporan Pelanggaran maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

EVALUATION OF WBS EFFECTIVENESS

To ensure the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS), regular monitoring and evaluation of the system must be conducted at least once a year. This is done to meet the goals set at the beginning and to ensure that the achievements align with the company's business demands and applicable laws and regulations. Monitoring and evaluation can be carried out by the Board of Directors themselves or by an independent external party. The monitoring and evaluation process aims to generate recommendations for improving the Whistleblowing System and to monitor the implementation of these improvement recommendations. The results of the monitoring and evaluation are presented in a report to the Board of Directors.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Hal yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari dalam aktivitas suatu bisnis adalah pemberian dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan bisnis yang tidak bertentangan dengan etika usaha dirasa sangat perlu dibuat aturan mengenai gratifikasi dan tata cara/mekanisme pelaporannya di PUSRI. PUSRI Bertekad untuk senantiasa berusaha menjalin hubungan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan menyusun dan memberlakukan kebijakan pengendalian gratifikasi.

Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh Insan PUSRI terhadap ketentuan gratifikasi, membentuk lingkungan PUSRI yang sadar dan paham dalam menangani/mengendalikan segala bentuk gratifikasi, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* di lingkungan PUSRI.

A common and unavoidable aspect of business activities is the giving and receiving of gratification. Therefore, to maintain business relationships that are consistent with business ethics, it is deemed essential to establish rules regarding gratification and the procedures/mechanisms for reporting it at PUSRI. PUSRI is committed to fostering business relationships free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) by developing and implementing a gratification control policy.

The goal of the gratification control policy is to enhance the compliance of all PUSRI employees with the provisions regarding gratification, to create an environment at PUSRI that is aware of and understands how to handle/control all forms of gratification, and to establish a transparent and accountable environment to support the creation of *Good Corporate* within PUSRI.

Seluruh Insan PUSRI yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan/ atau keluarga inti (suami/ istri, anak) dilarang untuk menerima, meminta, ataupun memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan PUSRI.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk mendukung kebijakan gratifikasi, Perusahaan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai dengan SK Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/ DIR/525/2021 tanggal 12 November 2021. Berdasarkan dokumen tersebut susunan organisasi UPG PUSRI yakni:

Ketua I Chairperson
Sekretaris I Secretary
Anggota I Members

Sekretaris Perusahaan I SVP Corporate Secretary
VP Manajemen Risiko I VP Risk Management

1. SVP SPI
2. Kepala Hukum Perusahaan
3. AVP Tata Kelola Perusahaan

1. SVP SPI
2. Head of Corporate Legal
3. AVP Corporate Governance

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan PUSRI.
2. Menerima, melakukan revidu, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dari Insan PUSRI.
3. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK.
4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi.
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Satuan Pengawasan Intern jika terjadi pelanggaran atas peraturan ini oleh Insan PUSRI.
6. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan PUSRI.
7. Melakukan koordinasi kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal PUSRI.
8. UPG dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan gratifikasi berbasis teknologi informasi.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Pengendalian atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Seluruh wajib lapor gratifikasi wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan ini dan kebijakan tentang penyampaian laporan terkait gratifikasi di lingkungan PUSRI.

Sepanjang tahun 2024, PUSRI tidak menerima laporan mengenai gratifikasi.

All PUSRI employees, due to their position and contrary to their duties and responsibilities, and/or their immediate family members (spouse/partner, children), are prohibited from accepting, requesting, or giving gifts in the form of money, hampers, facilities, or any other form of gratification, either directly or indirectly, from any stakeholders of PUSRI.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

To support the gratification policy, the Company has established the Gratification Control Unit (UPG) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/525/2021 dated November 12, 2021. Based on this document, the organizational structure of PUSRI's UPG is as follows:

The duties and responsibilities of the Gratification Control Unit (UPG) are as follows:

1. Prepare regulatory frameworks related to the implementation and control of gratification practices within PUSRI.
2. Receive, review, and administer reports on the acceptance, rejection, and giving of gratification by PUSRI personnel.
3. Forward reports on the acceptance, rejection, and giving of gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK) for analysis and determination of gratification ownership status.
4. Submit gratification report management results and proposals for the Gratification Control Guidelines to the Board of Directors.
5. Provide recommendations for follow-up actions to the Internal Audit Unit (SPI) in cases of violations of these regulations by PUSRI personnel.
6. Conduct assessments to identify potential risk points for gratification within PUSRI.
7. Coordinate dissemination activities on gratification ethics regulations to internal and external parties of PUSRI.
8. In carrying out its duties, UPG may propose and develop an information technology-based gratification management system.

2024 GRATIFICATION REPORT

The control over the rejection, acceptance, giving, and requesting of gratification is fundamentally carried out by the Gratification Control Unit (UPG). All individuals required to report gratification must submit reports on rejection, acceptance, giving, and requests in accordance with the provisions set forth in this policy and the policy on reporting gratification within PUSRI.

Throughout 2024, PUSRI did not receive any reports related to gratification.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy



Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Secara khusus, pengendalian gratifikasi merupakan upaya Perusahaan untuk melindungi insan PUSRI terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap. Dengan demikian, Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan PUSRI.

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi, mencegah tindakan korupsi, khususnya mencegah tindakan penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PUSRI menerapkan beberapa hal, mencakup:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Memperkuat penerapan tata kelola yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan di lingkup perusahaan;
5. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada seluruh jajaran terkait.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang bebas dari KKN, PUSRI bekerja sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program dan kebijakan anti korupsi yang rutin dilakukan setiap tahunnya pada hari anti korupsi sedunia (HAKORDIA).

In accordance with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, corruption includes unlawful acts that enrich individuals or entities at the expense of state finances or the national economy (Article 2); abuse of authority due to position or office that may harm state finances or the national economy (Article 3); bribery offenses (Articles 5, 6, and 11); embezzlement in office (Articles 8, 9, and 10); extortion in office (Article 12); offenses related to procurement (Article 7); and gratification offenses (Articles 12B and 12C).

Specifically, gratification control is a corporate effort to protect PUSRI personnel from potential accusations of bribery offenses. Thus, the Company is strongly committed to upholding anti-corruption measures, both in the management of its operations and business activities and in the use of authority by PUSRI personnel in their respective positions.

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

To support the Gratification Control Program and prevent corruption, particularly ensuring the continuous prevention of bribery in alignment with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards, PUSRI implements several measures, including:

1. Prohibiting bribery and similar practices within the company environment;
2. Complying with applicable laws and regulations related to anti-bribery;
3. Aligning the anti-bribery policy with the company's objectives;
4. Strengthening governance practices that support the achievement of anti-bribery goals within the company;
5. Encouraging increased awareness of anti-bribery measures across all relevant levels.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

To realize a company free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), PUSRI collaborates with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) to organize regular socialization programs and anti-corruption policy awareness activities. These sessions are conducted annually in conjunction with International Anti-Corruption Day.

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

PUSRI mengatur proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan harus memenuhi prinsip-prinsip GCG dan menggunakan cara yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan akuntabel untuk mendapatkan barang dan atau manfaat/hasil pekerjaan jasa yang tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat waktu kedatangan/ penyelesaian, tepat ruang lingkup (scope), dan harga yang wajar.

Proses pengadaan barang dan jasa tidak dibenarkan dipecah-pecah menjadi beberapa paket yang besaran nilainya menjadi lebih kecil dengan maksud menghindari proses tender.

Pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin memanfaatkan penyedia barang & jasa dalam negeri, dengan memperhatikan usaha kecil, koperasi, anak-anak Perusahaan yang terafiliasi, Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan institusi usaha yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan.

Penyedia jasa yang diundang dalam suatu proses tender/lelang pemilihan penyedia jasa diambil dari vendor database dalam sistem ERP SAP Perusahaan yang disesuaikan dengan kualifikasi kompetensi dan kemampuan finansial dengan mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi jasa terkait atau lembaga sertifikasi serta mempunyai catatan kinerja yang baik dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan proses prakualifikasi. Untuk mencegah terjadinya Kolusi, Korupsi & Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang & jasa, maka calon rekanan yang ikut dalam proses pengadaan diminta untuk menandatangani Pakta integritas.

PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK KARYAWAN DAN KETERLIBATAN PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN POLITIK

PUSRI memberikan kebebasan kepada Insan PUSRI untuk menyatakan hak-hak politiknya. Namun Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan insan PUSRI menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan melarang Insan PUSRI terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan melarang Insan PUSRI menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/ partai politik tertentu.
2. Perusahaan melarang Insan PUSRI merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legislatif.
3. Perusahaan melarang Insan PUSRI membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

PUSRI regulates the procurement process for goods and services to ensure compliance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) while using methods that are efficient, effective, competitive, transparent, fair, and accountable. The goal is to acquire goods and/or services that meet the correct specifications, quantity, timely delivery/completion, scope, and reasonable prices.

The procurement process must not be fragmented into smaller packages to avoid a tender process.

PUSRI aims to utilize domestic suppliers for goods and services, with attention to small businesses, cooperatives, affiliated subsidiaries, subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero), and business institutions that possess the competencies required by the Company.

Service providers invited to participate in a tender or selection process are chosen from the vendor database in the Company's ERP SAP system, based on their qualifications, competencies, and financial capacity, and are referenced from certificates issued by the relevant service associations or certification bodies. Providers must also have a good performance record, and if necessary, a prequalification process may be conducted. To prevent Collusion, Corruption, and Nepotism (KKN) in the procurement process, prospective partners participating in the procurement process are required to sign an Integrity Pact.

FULFILLMENT OF EMPLOYEES' POLITICAL RIGHTS AND COMPANY INVOLVEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

PUSRI provides its employees the freedom to express their political rights. However, the Company has a policy prohibiting individuals from participating in political activities on behalf of the Company, including making donations for political purposes. The Company strictly forbids PUSRI employees from using any facilities or resources for political campaigns, fundraising, or political participation, as outlined in the Company's Code of Ethics.

The Company's Code of Ethics prohibits PUSRI employees from engaging in the following:

1. The Company prohibits PUSRI employees from using Company facilities for the benefit of any specific political party or group.
2. The Company prohibits PUSRI employees from holding dual positions as political party officials and/or legislative members.
3. The Company prohibits PUSRI employees from bringing, displaying, installing, or distributing political party symbols, images, or ornaments within the Company premises.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Officials' Asset Report

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA



Sebagai entitas anak dari BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, PUSRI wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).



LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.



Selain itu, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

DASAR HUKUM LHKPN

Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BASIC PRINCIPLES OF THE STATE OFFICIALS' ASSET REPORTING

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN) fully owned by the State through the Government of Indonesia, PUSRI is obligated to comply with applicable laws and regulations. One of these regulations, grounded in the spirit of eradicating corruption and addressing internal misconduct, is the requirement to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN).

The LHKPN is a list of all assets owned by State Officials, which must be documented in the LHKPN form set by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning the Procedures for Registration, Examination, and Announcement of the State Officials' Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission affirms the authority of the KPK to take preventive measures against corruption, including through the registration and examination of LHKPN.

Moreover, Law No. 28 of 1999 on State Officials Free from Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every state official must report and publicly disclose their assets before and after holding office, and agree to have their wealth examined both before and after their tenure. Law No. 28 of 1999, Article 2 (7) and its explanation, clarifies that other officials with strategic functions in relation to state officials, including the Board of Commissioners, Directors, and other structural officials of State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD), are also included.

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to ensure that state officials adhere to the general principles of public officeholders who are free from corruption, collusion, nepotism, and other immoral acts. Every state official is required to report their assets through the LHKPN form provided by the KPK, to be filled out truthfully, correctly, and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the total amount, type, and value of the reported assets accurately, promptly, and responsibly.

LEGAL BASIS FOR LHKPN

The Company considers several legal foundations and regulations as the basis for the implementation of LHKPN within the Company:

1. Law No. 28 of 1999 on State Organizers Clean from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Surat edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 10/A/KK/A24/ SE/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang penyampaian pedoman pelaporan harta kekayaan pejabat, nomor dokumen PI- SEK-PD-010, Rev.2.
5. Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai dengan SK Direksi No. SK/DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024

3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/BUMN/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments.
4. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 10/A/KK/A24/SE/2022 dated June 8, 2022, regarding the submission of guidelines for the wealth report of officials, document number PI-SEK-PD-010, Rev.2.
5. Wealth Reporting Guidelines for Officials of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang according to the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024.

KEBIJAKAN LHKPN PUSRI

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, PUSRI menerapkan kebijakan kepatuhan pelaporan kekayaan pejabat PUSRI yang harus ditaati oleh seluruh pejabat wajib lapor. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai dengan SK Direksi No. SK/ DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Pejabat wajib lapor berkomitmen memenuhi segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaporan kekayaan, serta menyampaikan segala informasi dan data mengenai kekayaan pribadi secara transparan, akuntabel, dan sebenar- benarnya. Adapun yang termasuk pejabat wajib lapor dalam kebijakan LHKPN dimaksud adalah seluruh pejabat di lingkungan Perusahaan yakni Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan, Pejabat Eselon I, II dan III.

Sementara itu, pejabat wajib lapor yang wajib membuat dan menyampaikan laporan kekayaan kepada KPK yaitu pada saat:

1. Pengangkatan sebagai pejabat PUSRI pada saat pertama kali menjabat;
2. Pejabat aktif pada periode per 31 Desember;
3. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat PUSRI,

Laporan kekayaan disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; dan bagi wajib lapor yang lalai dalam menyampaikan laporan kekayaan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:
 - a. pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan sejenisnya bagi pejabat aktif, atau
 - b. pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan, atau
 - c. pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun.

Sanksi penundaan hak dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian laporan kekayaan telah dilaksanakan. Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh Unit Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat PUSRI, yang terdiri dari SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko, VP Tata Kelola, AVP Tata Kelola Perusahaan serta administrasi Perusahaan. Administrasi Perusahaan merupakan karyawan yang ditunjuk oleh VP Tata Kelola.

LHKPN POLICY OF PUSRI

As part of implementing good corporate governance, PUSRI enforces a compliance policy for the wealth reporting of its officials, which must be adhered to by all required officials. This policy is outlined in the Wealth Reporting Guidelines for Officials of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, according to the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024. The required officials are committed to complying with all applicable laws and regulations related to wealth reporting and to submitting all information and data regarding their wealth transparently, accountably, and truthfully. The officials required to report under this LHKPN policy include all officials within the Company, such as the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Echelon I, II, and III officials.

Meanwhile, the required officials who must prepare and submit their wealth reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) are those who are in the following situations:

1. Upon their appointment as PUSRI officials when first taking office;
2. Active officials as of December 31 of each year;
3. Upon the end of their term of office or retirement as PUSRI officials.

Wealth reports are submitted through the e-LHKPN application at www.elhkpn.kpk.go.id. For officials who fail to submit their wealth reports, the following sanctions will be imposed:

1. Verbal reprimand;
2. Written reprimand;
3. Suspension of rights on:
 - a. payment of operational services/annual leave assistance or similar benefits for active officials; or
 - b. definitive appointment for officials who are promoted; or
 - c. severance payment or similar benefits for retiring officials.

The suspension of rights may be revoked once the obligation to submit the wealth report has been fulfilled. The management of LHKPN is carried out by the LHKPN Report Management Unit at PUSRI, consisting of the SVP of Governance & Risk Management, VP of Governance, AVP of Corporate Governance, and company administration. The company administration consists of employees appointed by the VP of Governance.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN PELAPORAN 2024

TRANSPARENCY OF LHKPN REPORTS FOR COMPANY OFFICIALS IN THE 2024 REPORTING YEAR

Berikut adalah transparansi penyampaian LHKPN pejabat PUSRI tahun pelaporan 2024.

The transparency of the submission of LHKPN reports for PUSRI officials in the 2024 reporting year.



No.	Pejabat Officials	Jumlah Wajib Laporan Total Mandatory Report	Sudah Laporan Reports Submitted	
			Jumlah Total	%
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	100
2	Direksi Board of Directors	3	3	100
3	Pejabat Eselon I Echelon I Officials	19	19	100
4	Pejabat Eselon II Echelon II Officials	87	87	100
5	Pejabat Eselon III Echelon III Officials	416	416	100
Total		531	531	100

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia



Sejak akhir tahun 2021 Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang khusus mensosialisasikan dan mengembangkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di Indonesia, telah mengeluarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, pemutakhiran dari PUGKI yang diterbitkan tahun 2019. Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur, dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

PUGKI ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap korporasi dalam menyusun ketentuan internal governansi korporat dan menerapkannya. Korporasi dapat mengadopsi praktik governansi yang sesuai dengan kebutuhannya, menerapkan praktik dengan

Since the end of 2021, the National Committee on Governance Policy (KNKG), as the official institution in Indonesia that specializes in socializing and developing practices of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia, has issued the 2021 General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia (PUGKI), an update of the 2019 PUGKI. These guidelines are intended to establish globally standard corporate governance practices, especially recommended for corporations listed on the stock exchange and those managing public funds, in order to protect the interests and meet the expectations of shareholders, creditors, debtors, and other stakeholders, thus achieving sustainable long-term corporate value creation.

The PUGKI is expected to serve as a guide for every corporation in formulating its internal corporate governance provisions and implementing them. Corporations can adopt governance practices that suit their needs, taking into account the environment in which



mempertimbangkan lingkungan tempat korporasi beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi. PUGKI 2021, mencakup penyempurnaan berdasarkan perkembangan praktik governansi terkini, mengacu ke global Corporate Governance (CG) Principles, CG Codes dari berbagai negara, termasuk diantaranya G20/OECD Corporate Governance Principles, serta ASEAN Corporate Governance Scorecard.



Secara umum PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Selanjutnya, PUGKI terdiri dari prinsip, rekomendasi dan panduan yang mendorong praktik governansi korporat yang baik.



Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Keempatnya merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.



ADOPSI PUGKI 2021 OLEH PUSRI

Sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang menjunjung tinggi penerapan praktik terbaik GCG, PUSRI bertekad menyesuaikan praktik penerapan governansi di lingkup operasionalnya dengan mengadopsi perkembangan terakhir praktik GCG di tingkat Nasional maupun Global sebagaimana disampaikan oleh KNKG tersebut. Secara gradual, PUSRI bertekad menyesuaikan garis besar nilai dasar prinsip-prinsip GCG dari sebelumnya adalah TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) menjadi prinsip-prinsip GCG terakhir sebagaimana disebutkan dalam PUGKI 2021 tersebut.

Untuk maksud tersebut, sejak dua tahun terakhir, PUSRI telah mulai menjalankan program adopsi penerapan prinsip-prinsip GCG terbaru tersebut melalui serangkaian kegiatan, yakni "Internalisasi Integrated Mindset Dalam Governansi PUSRI" dan "Internalisasi Integrated Mindset Dan Keberlanjutan Dalam Strategi Perusahaan". Pada tahap-tahap selanjutnya PUSRI akan menjalankan program *self assesment* secara berkala atas penerapan PUGKI 2021 yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tersebut.

the corporation operates, the size and complexity of the business, and the nature of the risks and challenges faced. The 2021 PUGKI includes improvements based on the latest developments in governance practices, referencing global Corporate Governance (CG) Principles, CG Codes from various countries, including the G20/OECD Corporate Governance Principles, as well as the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

In general, the 2021 PUGKI consists of eight principles divided into three groups: (1) the first group of principles that regulates the functions of corporate management and supervision, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, (2) the second group that regulates the processes and outcomes produced by the Board of Directors and the Board of Commissioners, (3) the third group that regulates the owners of resources, who will primarily benefit from the implementation of corporate governance. Furthermore, the PUGKI consists of principles, recommendations, and guidelines that encourage good corporate governance practices.

The principles in the PUGKI, along with the recommendations and guidelines within, are underpinned by four pillars of corporate governance: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability. These are further developed in line with the latest updates to the basic values of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness), which were previously used in the 2019 PUGKI.

ADOPTION OF PUGKI 2021 BY PUSRI

As one of the subsidiaries state-owned enterprises (SOEs) that upholds the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG), PUSRI is committed to aligning its governance practices within its operations by adopting the latest developments in GCG practices at both the national and global levels, as outlined by the National Committee on Governance Policy (KNKG). Gradually, PUSRI is determined to align the core values of the GCG principles, previously based on TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness), with the latest GCG principles as stated in PUGKI 2021.

To this end, over the past two years, PUSRI has begun implementing the adoption of these updated GCG principles through a series of activities, "Internalizing the Integrated Mindset in PUSRI Governance" and "Internalizing the Integrated Mindset and Sustainability in Corporate Strategy." In the subsequent stages, PUSRI will conduct periodic self-assessments of the implementation of PUGKI 2021 as published by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Internalisasi Integrated Mindset dalam Governansi Pusri

Ringkasan Eksekutif | Executive Summary



PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) menerapkan integrated mindset untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini mengintegrasikan keberlanjutan dalam model bisnis, etika, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), dan keuangan berkelanjutan.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) applies an integrated mindset to create long-term, sustainable value. This comprehensive approach integrates sustainability into the business model, ethics, Good Corporate Governance (GCG), and sustainable finance.

Model Bisnis Berkelanjutan | Sustainable Business Model

PUSRI mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari operasi mereka, berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan manajemen limbah yang bertanggung jawab. Inovasi produk dan layanan yang menguntungkan secara ekonomis sekaligus mendukung keberlanjutan menjadi prioritas. Perusahaan juga mengutamakan dialog terbuka dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan.

PUSRI evaluates the environmental, social, and economic impacts of its operations, focusing on resource efficiency, greenhouse gas emissions reduction, and responsible waste management. Product and service innovations that are economically beneficial while supporting sustainability are prioritized. The company also emphasizes open dialogue and strategic partnerships with stakeholders.



Etika Bisnis | Business Ethics



Implementasi etika yang baik melalui kode etik yang komprehensif, pelatihan rutin, komunikasi internal, dan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, memastikan integritas, tanggung jawab, dan transparansi. Ini mendukung reputasi positif dan nilai jangka panjang perusahaan.

The implementation of good ethics through a comprehensive code of conduct, regular training, internal communication, and a secure violation reporting system ensures integrity, accountability, and transparency. This supports the company's positive reputation and long-term value.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) | Good Corporate Governance (GCG)

PUSRI membentuk struktur tata kelola yang kuat dan transparan dengan dukungan komite seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Kebijakan GCG jelas dikembangkan dan transparansi informasi ditingkatkan melalui laporan keberlanjutan yang komprehensif. Audit internal dan eksternal memastikan kepatuhan dan konsistensi praktik GCG.

PUSRI has established a strong and transparent governance structure, supported by committees such as the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. Clear GCG policies are developed, and information transparency is enhanced through comprehensive sustainability reports. Both internal and external audits ensure compliance and consistency with GCG practices.



Keuangan Berkelanjutan | Sustainable Finance



PUSRI mengintegrasikan keberlanjutan dalam manajemen keuangan dan investasi, termasuk proyek-proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, dan teknologi yang dapat meminimalkan dampak pada lingkungan.

Dengan internalisasi integrated mindset dalam keberlanjutan bisnis, PUSRI berkomitmen pada keberlanjutan di seluruh aspek bisnis, mendukung pertumbuhan perusahaan, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini menjadikan PUSRI sebagai pemimpin dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PUSRI integrates sustainability into financial management and investments, including environmentally friendly projects, renewable energy, and environmentally low-impact technology.

With the internalization of an integrated mindset in business sustainability, PUSRI is committed to sustainability across all aspects of its business, supporting company growth, and making a positive contribution to the environment and society. This positions PUSRI as a leader in responsible and sustainable business practices.

Proses Governansi Pusri
Pusri Governance Process



Perilaku Etis
Ethical Behavior

Perilaku etis dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) adalah elemen kunci untuk menjalankan PUSRI dengan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap standar moral dan hukum yang berlaku. Dengan mengintegrasikan perilaku etis, PUSRI tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Ethical behavior within the framework of Good Corporate Governance (GCG) is a key element in operating PUSRI with integrity, honesty, and adherence to applicable moral and legal standards. By integrating ethical behavior, PUSRI not only enhances its reputation and stakeholder trust but also contributes to the company's long-term sustainability and success.

Aspek penting dari perilaku etis dalam kerangka GCG PUSRI meliputi: komitmen terhadap integritas dan kejujuran, transparansi dan keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, keadilan, respek dan kepedulian, pengelolaan potensi konflik kepentingan, anti-korupsi dan anti-pemerasaan, pemberdayaan dan pengembangan karyawan, serta inovasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Key aspects of ethical behavior within PUSRI's GCG framework include: commitment to integrity and honesty, transparency and openness, responsibility and accountability, compliance with laws and regulations, fairness, respect and care, management of potential conflicts of interest, anti-corruption and anti-bribery measures, employee empowerment and development, as well as continuous innovation and learning.



Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, Kepatuhan, Integritas, dan Keberlanjutan
Risk Management, Internal Control, Compliance, Integrity, and Sustainability

Manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan adalah pilar penting dalam kerangka GCG. Ketiganya berfungsi untuk memastikan perusahaan beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

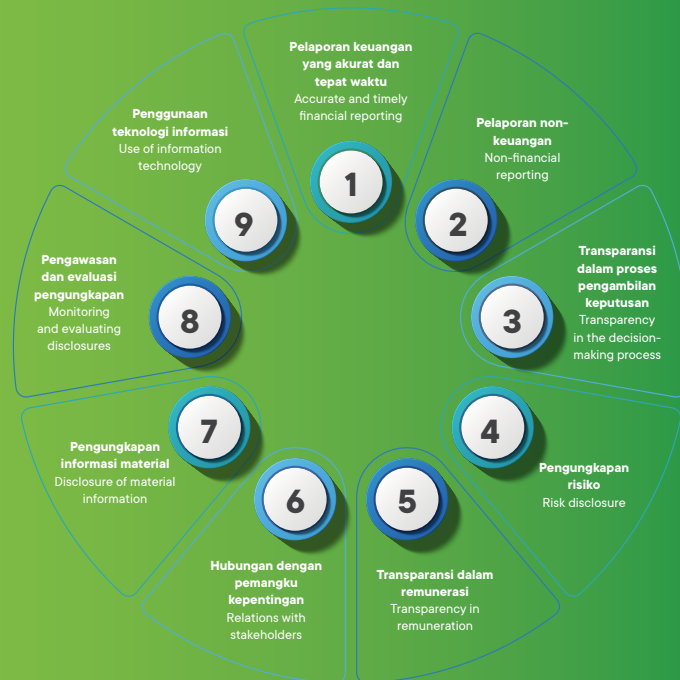
Risk management, internal control, and compliance are essential pillars within the GCG framework. These three functions ensure that the company operates efficiently, effectively, and in accordance with applicable regulations.



Pengungkapan dan Transparansi
Disclosure and Transparency

Pengungkapan dan transparansi adalah komponen krusial dalam kerangka GCG. Mereka memastikan bahwa informasi penting tentang operasional, kinerja, dan tata kelola perusahaan tersedia bagi pemangku kepentingan secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan. Elemen utama pengungkapan dan transparansi mencakup:

Disclosure and transparency are crucial components of the GCG framework. They ensure that key information about the company's operations, performance, and governance is available to stakeholders in a prompt, accurate, and reliable manner. The key elements of disclosure and transparency include:



Penerapan prinsip-prinsip pengungkapan dan transparansi yang baik memungkinkan perusahaan membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, meningkatkan akuntabilitas, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

The implementation of good disclosure and transparency principles enables the company to build trust and credibility with stakeholders, enhance accountability, and support the achievement of long-term objectives.

Hasil Governansi Governance Results

PUSRI berfokus pada penciptaan nilai berkelanjutan dengan mencapai hasil governansi sebagai berikut:
PUSRI focuses on creating sustainable value by achieving the following governance results:



**Berdaya Saing dan Fokus
pada Kinerja Jangka Panjang**
Competitiveness and Focus
on Long-Term Performance



**Beretika dan Bertanggung Jawab
dalam Bisnis**
Ethical and Responsible in Business



**Berkontribusi Positif Terhadap
Masyarakat dan Lingkungan**
Making a Positive Contribution
to Society and The Environment



**Mampu Bertahan dan Bertumbuh
(Corporate Resilience)**
Able To Sustain and Grow
(Corporate Resilience)

INTERNALISASI INTEGRATED MINDSET DAN KEBERLANJUTAN DALAM STRATEGI PERUSAHAAN

Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam strategi Perusahaan, PUSRI dapat mengembangkan model bisnis yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga kompetitif di pasar global yang semakin sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini membantu PUSRI mencapai kinerja jangka panjang yang stabil dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan



INTERNALIZATION OF INTEGRATED MINDSET AND SUSTAINABILITY IN THE COMPANY'S STRATEGY

By integrating sustainability aspects into the Company's strategy, PUSRI is able to develop a business model that is not only sustainable but also competitive in an increasingly global market that is aware of the importance of social and environmental responsibility. This helps PUSRI achieve stable long-term performance and create value for all stakeholders.

Operasi Berkelanjutan Sustainable Operations

01

Efisiensi Energi dan Pengelolaan Sumber Daya | Energy Efficiency and Resource Management

Meningkatkan efisiensi energi melalui teknologi dan praktik manajemen energi
Improving energy efficiency through technology and energy management practices

Mengadopsi energi terbarukan seperti tenaga surya, dan biomassa untuk mengurangi emisi
Adopting renewable energy sources such as solar, and biomass to reduce emissions

Menerapkan praktik pengelolaan air dan limbah untuk mengurangi konsumsi dan meminimalkan limbah
Implementing water and waste management practices to reduce consumption and minimize waste

02

Desain dan Produk Berkelanjutan | Sustainable Design and Products

Mengembangkan produk dengan eco-design untuk mengurangi dampak lingkungan
Developing products with eco-design to reduce environmental impact

Menerapkan konsep daur ulang dan penggunaan ulang dalam desain produk
Implementing the concepts of recycling and reuse in product design

03

Rantai Pasok Berkelanjutan | Sustainable Supply Chain

Bekerja sama dengan pemasok yang memiliki praktik berkelanjutan dan standar lingkungan serta sosial
Collaborating with suppliers that adhere to sustainable practices and environmental and social standards

Meningkatkan transparansi rantai pasok untuk memastikan bahan baku diperoleh secara etis dan berkelanjutan
Increasing supply chain transparency to ensure that raw materials are sourced ethically and sustainably

Langkah Pusri Pusri's Actions

01

Penggantian Pabrik Pusri-III & Pusri-IV menjadi Pabrik Pusri-IIIB yang lebih efisien tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk, tetapi juga untuk mempromosikan industri hijau dan berkelanjutan. Dengan konsumsi energi yang lebih rendah per ton urea, pabrik yang lebih efisien ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan dan handal, serta berkontribusi pada keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Operating profit is derived from the gross profit account accumulated with selling expenses, general and administrative expenses, as well as other net income/(expenses). PUSRI recorded an operating profit of Rp1.65 trillion in 2024. Compared to 2023, which amounted to Rp1.89 trillion, the operating profit decreased by 12.67%. This was mainly because it was in line with the decline in gross profit.

02

Pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pada proses pembakaran (co-firing) pada pembangkit listrik batu bara yang juga menghasilkan steam. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dengan menambahkan biomassa sebagai bahan yang lebih ramah lingkungan.

The utilization of biomass as a fuel in the combustion process (co-firing) at coal-fired power plants, which also generate steam, aims to reduce carbon emissions produced from coal combustion by incorporating biomass as a more environmentally friendly fuel alternative.

03

Pemasangan Solar PV sebesar 100 & 500 KWP di area PUSRI dan mengganti kendaraan operasional yang sebelumnya menggunakan Bahan Bakar Solar/Bensin menjadi listrik.

Installation of 100 and 500 KWP Solar PV systems within the PUSRI area and the replacement of operational vehicles previously powered by diesel/gasoline with electric vehicles.

04

Melaksanakan program Community Forest yaitu program penanaman pohon baik di lokasi PUSRI maupun di luar area perusahaan. Tujuannya adalah memperbesar serapan CO₂ dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca

Implementation of the Community Forest program, which involves tree planting both within PUSRI's premises and outside the company's area. The objective is to increase CO₂ absorption as part of efforts to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions.

05

Menciptakan produk pupuk spesifik sesuai dengan jenis tanaman. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari pemakaian pupuk yang berlebihan. Beberapa produk pupuk spesifik yaitu NPK Singkong dan NPK Kopi.

Developing crop-specific fertilizer products tailored to different plant types. This initiative aims to minimize the environmental impact caused by excessive fertilizer use. Examples of such crop-specific fertilizers include NPK for Cassava and NPK for Coffee.

Investasi Berkelanjutan Sustainable Investment

01

Investasi dalam Teknologi Hijau | Investment in Green Technology

Menerbitkan *green bonds* untuk proyek dengan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan
Issuing green bonds for projects with environmental benefits, such as renewable energy

Menerbitkan *sustainability bonds* untuk mendukung proyek keberlanjutan sosial dan lingkungan
Issuing green bonds for projects with environmental benefits, such as renewable energy

02

Investasi Berdampak | Impactful Investment

Mengalokasikan investasi untuk proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial
Allocating investments to projects that provide social and environmental benefits in addition to financial gains

Berpartisipasi dalam dana investasi yang fokus pada proyek dan perusahaan berkelanjutan
Participating in investment funds that focus on sustainable projects and companies

03

Keterlibatan dalam ESG (*Environmental, Social, Governance*) Involvement in ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Integrasi ESG: Memasukkan kriteria ESG dalam keputusan investasi untuk mendukung keberlanjutan
ESG Integration: Incorporating ESG criteria into investment decisions to support sustainability

Pelaporan ESG: Menyediakan pelaporan ESG yang transparan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan
ESG Reporting: Providing transparent ESG reporting to shareholders and stakeholders

Langkah Pusri

Pusri's Actions

92.10

PUSRI melaksanakan survei mengenai Kepuasan Lingkungan Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap perusahaan. Hasil survei menunjukkan nilai meningkat dari 90,11 di tahun 2023 menjadi 92,10 di tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan citra perusahaan di mata masyarakat serta apresiasi terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan. PUSRI conducted a survey on Environmental Satisfaction for the year 2024, which showed an increase in public satisfaction with the company. The survey results indicated an improvement in the score, rising from 90,11 in 2023 to 92.10 in 2024. This reflects the company's improved image in the eyes of the public as well as appreciation for the Corporate Social Responsibility (CSR) programs implemented.

Peningkatan kepuasan ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 terkait kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan tujuan ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Peningkatan citra perusahaan dan kepuasan masyarakat juga berkontribusi pada tujuan ke-3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik, serta tujuan ke-13 terkait aksi iklim, dengan secara aktif mendukung program TJSL yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

This increase in satisfaction aligns with the company's efforts in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 11 related to sustainable cities and communities, and Goal 12 regarding responsible consumption and production. The improvement in the company's image and public satisfaction also contributes to Goal 3, which focuses on good health and well-being, as well as Goal 13 related to climate action, by actively supporting environmentally friendly and sustainability-oriented CSR programs.

Pendanaan Berkelanjutan Sustainable Funding

01

Green Bonds dan Sustainability Bonds | Green Bonds and Sustainability Bonds

Menerbitkan green bonds untuk proyek dengan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan
Issuing green bonds for projects with environmental benefits, such as renewable energy

Menerbitkan sustainability bonds untuk mendukung proyek keberlanjutan sosial dan lingkungan
Issuing sustainability bonds to support social and environmental sustainability projects

02

Pembiayaan Proyek Berkelanjutan | Sustainable Project Financing

Bekerja sama dengan lembaga keuangan hijau yang menawarkan pembiayaan hijau
Partnering with green financial institutions that offer green financing

Mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti pay-for-performance untuk proyek berkelanjutan
Developing innovative financing schemes, such as pay-for-performance for sustainable projects

03

Kebijakan Keuangan yang Berkelanjutan | Sustainable Financial Policies

Mengelola risiko keuangan terkait perubahan iklim dengan strategi mitigasi
Managing financial risks related to climate change with mitigation strategies

Menyediakan pelaporan keuangan yang transparan terkait risiko iklim dan keberlanjutan
Providing transparent financial reporting related to climate risks and sustainability

Langkah Pusri Pusri's Actions

PUSRI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan internal mengenai praktik-praktik keuangan berkelanjutan serta akan mengembangkan rencana aksi yang terukur untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut
PUSRI is committed to enhancing internal capacity and knowledge regarding sustainable finance practices and will develop a measurable action plan to implement these steps

Budaya Perusahaan dan Keterlibatan Karyawan

Corporate Culture and Employee Engagement

01



Pendidikan dan Pelatihan: Melatih karyawan tentang pentingnya keberlanjutan dan kontribusi mereka

Education and Training: Training employees on the importance of sustainability and their contributions

02



Inisiatif Karyawan: Mendorong karyawan mengembangkan proyek dan ide yang mendukung keberlanjutan

Employee Initiatives: Encouraging employees to develop projects and ideas that support sustainability

03



Dialog dan Kolaborasi: Melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog terbuka dan kerja sama untuk tujuan keberlanjutan.

Dialogue and Collaboration: Engaging stakeholders in open dialogue and collaboration for sustainability goals

04



Pelaporan dan Transparansi: Menyediakan informasi yang transparan tentang kinerja keberlanjutan kepada semua pihak

Reporting and Transparency: Providing transparent information about sustainability performance to all stakeholders

05



Sumberdaya Manusia yang mengedepankan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi

Human Resources that prioritize sustainability and the long-term interests of the corporation

Langkah Pusri

Pusri's Actions

Surat Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja No. 70540/F/SM/HI200/IT/2022 mengenai Himbauan Employee Green Behavior adalah langkah penting dalam mewujudkan Green Human Resources Management (Green HRM) di perusahaan. Melalui himbauan ini, karyawan diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam upaya mengembangkan proyek dan ide-ide yang mendukung keberlanjutan. Dukungan ini tidak hanya akan mendorong inovasi dan kreativitas karyawan, tetapi juga akan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

The letter from the President Director of PT Pupuk Sriwidjaja No. 70540/F/SM/HI200/IT/2022 regarding the Encouragement of Employee Green Behavior represents a significant step toward realizing Green Human Resources Management (Green HRM) within the company. Through this directive, employees are expected to actively participate in developing projects and ideas that support sustainability efforts. This support will not only foster employee innovation and creativity but also contribute to creating an environmentally friendly and sustainable work environment.

01

Program Talent Mobility/Fast Track di PT PUSRI mempercepat karier karyawan berprestasi dengan menghargai inovasi mereka. Karyawan yang menciptakan solusi kreatif dan efektif atau mengembangkan produk bernilai tambah akan mendapatkan kesempatan istimewa dalam program ini.

The Talent Mobility/Fast Track Program at PT PUSRI accelerates the careers of high-performing employees by recognizing their innovations. Employees who create creative and effective solutions or develop value-added products are granted special opportunities through this program.

02

Penerapan kebijakan donasi bibit pohon bagi karyawan yang mendapat promosi

Implementation of a tree seedling donation policy for employees who receive a promotion.

04

Program pembinaan bagi karyawan yang mempunyai masalah dengan berat badan (obesitas).

Development program for employees dealing with weight issues (obesity).

03

Penyediaan fasilitas olahraga dan daycare di lingkungan perusahaan untuk menunjang kesehatan fisik dan mental karyawan

Provision of sports and daycare facilities within the company environment to support employees' physical and mental well-being.

05

Penyediaan lokasi kerja praktek, penelitian dan magang bagi pelajar dan mahasiswa

Provision of facilities for internships, research, and practical training for students and university scholars.

06

Pemberian kesempatan belajar dan pemberian beasiswa bagi karyawan/ti yang berminat melanjutkan pendidikan.

Opportunities for further education and scholarships for employees interested in pursuing higher education.



Kesesuaian Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Compliance with the Implementation of the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI)








Untuk meningkatkan peningkatan penerapan GCG berbasis praktik terbaik, PUSRI berupaya melakukan penilaian mandiri atau self assessment atas penerapan Penerapan PUGKI 2021 yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam PUGKI 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

To enhance the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on best practices, PUSRI has undertaken a self-assessment of the implementation of the 2021 Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI), as published by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The following presents the recommendations and guidelines outlined in the 2021 PUGKI along with the Company's implementation thereof.





Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris					
Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners					
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi					
Roles and Responsibilities of the Board of Directors					
	1.1.1	<p>Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) <p>To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to attain the following governance outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> competitiveness and a focus on long-term performance; ethical and responsible business conduct; positive contribution to society and the environment; and resilience and capacity for sustainable growth (corporate resilience) 		✓	
		1.1.1.1	<p>Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas.</p> <p>The Board of Directors upholds high standards of business ethics and ensures the implementation of the code of ethics that fosters a corporate culture of integrity.</p>	✓	
		1.1.1.2	<p>Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai- nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi.</p> <p>The Board of Directors cultivates a corporate culture that ensures employees understand their responsibility to act in accordance with corporate values and high standards of business ethics.</p>	✓	
		1.1.1.3	<p>Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.</p> <p>The Board of Directors ensures the fulfillment of the company's social and environmental responsibilities. The Board has a clear strategic plan for implementing the company's corporate social and environmental responsibilities.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	✓	
	1.1.2		Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate's mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and medium-term plans are aligned with its long-term objectives, while effectively leveraging innovation and technology.	✓	
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of cutting-edge technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	✓	
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and champions a corporate culture that embraces innovation, integrating it into corporate strategy, operational development planning, and operational oversight.	✓	
		1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors encourages innovation that enhances the creation of long-term value for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products, and services, promoting research, improving production and operational processes, and collaborating with partners.	✓	
					
					
	1.1.3		Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with its vision, mission, goals, objectives, and strategies and comply with applicable laws, regulations, and standards.	✓	
	1.1.4		Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information concerning the corporation.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.1.4.1	<p>Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai.</p> <p>The Board of Directors ensures that everyone involved in the preparation and disclosure of corporate information possesses the relevant knowledge, skills, and experience, as evidenced, among other things, by relevant professional certifications issued by reputable institutions. Additionally, the Board also ensures the availability of adequate resources (including personnel).</p>	✓	
		1.1.4.2	<p>Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; 2. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; 3. Pendapat Komite Audit; 4. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. <p>When approving information disclosures (including periodic financial disclosures), the Board of Directors considers all of the following factors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Results of the evaluation of the design adequacy and effectiveness of the internal control system; 2. External auditor's opinion on the financial statements, observations on the internal control system, and other observations from various sources; 3. Recommendations from the Audit Committee; 4. Consistency with the company's objectives, strategies, and policies. 	✓	
		1.1.4.3	<p>Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi.</p> <p>The Board of Directors submits a commentary report on the Quarterly Financial Statements, which is published together with the Quarterly Financial Statements to provide valuable insights for investors and analysts reviewing the company's fundamentals and financial performance.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
      	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is properly prepared.		✓	
	1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. The sustainability report is prepared based on a reporting framework that aligns with the size and complexity of the corporation and complies with national and/or global standards.		✓	
	1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation's sustainability reporting reflects corporate practices that support the creation of sustainable value.		✓	
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with the corporation's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the corporation's goals and strategies.		✓	
	1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that guarantees adequate and optimal investment and allocation of IT resources.		✓	
	1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that the corporation's risk management includes IT risk management.		✓	
	1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures in place, including measures to protect data security and confidentiality.		✓	
	1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure the authority and availability of adequate supporting resources to enable the Sharia Supervisory Board to carry out its role effectively.		✗	PUSRI bukan perusahaan yang menerapkan prinsip Syariah PUSRI is not a company that operates based on Sharia principles
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is reviewed periodically. The Charter includes, among other things, the division of roles among individual Directors, which may be stipulated in the Board Charter or through a Board of Directors' resolution.		✓	








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.2 Penilaian Kinerja-Direksi dan Anggotanya					
Performance Evaluation of the Board of Directors and Its Members					
	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation in an objective and independent manner to assess the effectiveness of the Board of Directors as a whole and each individual Director.		✓	
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to evaluate their own performance. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners for review and, if necessary, adjusted in accordance with the Board of Commissioners' evaluation.	✗	Penilaian Direksi dilakukan berdasarkan KPI The assessment of the Board of Directors is conducted based on KPIs
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other evaluation policies are based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks, aligned with those established by the Board of Commissioners upon the consideration of the Nomination and Remuneration Committee. These serve as the basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the Corporation's success in achieving performance targets. The selected benchmarks are incorporated into the employment agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✗	Sebagai bagian dari Pupuk Indonesia, KPI kolegal Direksi ditetapkan oleh Holding sebagai bentuk harmonisasi strategi korporasi secara menyeluruh. Tolak ukur tersebut selanjutnya dicantumkan dalam kontrak kinerja yang disepakati bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dasar penilaian atas akuntabilitas dan keberhasilan Direksi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. As part of Pupuk Indonesia Group, the collegial KPIs of the Board of Directors are established by the Holding Company to ensure strategic alignment across the corporate group. These benchmarks are subsequently incorporated into the performance agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners, serving as the foundation for evaluating the accountability and success of the Board of Directors in achieving the agreed-upon performance targets."
		1.2.1.3.	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. The remuneration scheme in the form of shares granted to Directors, Commissioners, and employees must obtain approval from the shareholders.	✗	PUSRI bukan Perusahaan Terbuka PUSRI is not a publicly listed company

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on a satisfactory performance evaluation of their contributions.	✓	
	1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		✗	Evaluasi kinerja Direksi ditentukan oleh KPI yang telah ditentukan oleh Holding The performance evaluation of the Board of Directors is determined based on Key Performance Indicators (KPIs) established by the Holding Company
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on predetermined criteria that have been communicated to him in advance. The criteria or performance evaluation must provide incentives for the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate goals and the creation of sustainable value.	✓	
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chair of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board communicates the results (including development areas) of the performance evaluation to the President Director.	✓	
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of the other Directors objectively and accurately based on the predetermined performance evaluation criteria.	✓	
					
					
					









1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners







Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises on, and approves the corporation's long-term and short-term business and financial plans. They provide guidance and monitor the implementation management by the Board of Directors. Both the Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions of significant importance to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	✓	
	1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	Types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	✓	
	1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the General Meeting of Shareholders (GMS) the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for decision. In making these proposals, the Board of Commissioners considers diversity, nondiscriminatory factors, and ensures equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, group, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election processes for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are formal and transparent.	✓	
	1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function formulates succession policies in the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	✓	
	1.3.5	Dewan Komisaris: 1. Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; 2. Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Board of Commissioners: 1. Proposes to the GMS, which may be preceded by recommendations from the Committee performing the remuneration function, the remuneration amounts for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, aligned with the corporation's sustainable development and the long-term interests of the corporation and its shareholders; 2. Periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.3.6		<p>Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.</p> <p>The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation, and proposes changes when necessary.</p>	✓	
		1.3.6.1	<p>Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen.</p> <p>The Board of Commissioners ensures that periodic evaluations of the implementation of corporate governance policies are conducted, either independently or by using an independent external consultant.</p>	✓	
					
	1.3.7		<p>Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.</p> <p>The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's objectives, goals, and strategies, and comply with applicable laws, regulations, codes of conduct, and standards.</p>	✓	
		1.3.7.1	<p>Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (risk appetite) korporasi.</p> <p>The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's key risks and periodically reviews and approves the corporation's risk appetite.</p>	✓	
		1.3.7.2	<p>Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (risk appetite) korporasi; 2. Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (early warning signals) atas risiko material; 3. Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. <p>The Board of Commissioners monitors and provides feedback to ensure that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The establishment and implementation of risk management policies are consistent with the corporation's objectives, goals, strategies, and risk appetite; 2. The risk management policies can provide early warning signals of material risks; 3. The risk management policies are reviewed periodically, for example, annually. 	✓	
		1.3.7.3	<p>Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.</p> <p>The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that key risks are identified by taking into account both internal and external factors.</p>	✓	
		1.3.7.4	<p>Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat.</p> <p>The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks have been assessed and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		13.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the company's risk management and internal control systems.	✓	
	1.3.8		Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs to ensure the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	✓	
		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial statements, the Board of Commissioners receives a statement from the President Director and the Finance Director of the company, affirming that, in their opinion, the entity's financial records have been properly maintained and the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards and fairly present the company's financial position and performance. Their opinion is formed based on a risk management and internal control system that has been properly designed and effectively implemented.	✓	
	1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the corporation's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and oversees the corporation's disclosure and communication processes.	✓	
	1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is reviewed periodically.	✓	
	1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of its members in the event of involvement in financial crimes or proven misconduct.	✓	
	1.3.12		Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions during Board of Commissioners meetings.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.3.12.1	<p>Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; 2. Dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; 3. Mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. <p>If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the Board of Commissioners shall appoint an Independent Commissioner or the most senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to assume the role of President Commissioner for duties that may involve potential conflicts of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ability to express opinions/arguments constructively to the President Commissioner; 2. Possession of greater knowledge about the company—its performance, market, and stakeholders—compared to other commissioners; 3. Ability to provide balanced perspectives and insights on issues and concerns raised by the majority shareholders. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
					
					
					
					
		1.3.12.2	<p>Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; 3. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. <p>In carrying out their role as members of the Board of Commissioners, Independent Commissioners shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Act in the best interest of the corporation; 2. Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholders; 3. Independently consider the views of minority shareholders and other stakeholders; and 4. Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
					
					
		1.3.12.3	<p>Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas Komisaris Independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir.</p> <p>The corporation discloses the reasons for the early termination of an Independent Commissioner's tenure before the end of their term of office.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.3.13		<p>Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.</p> <p>The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows diverse views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Additionally, opportunities must be provided for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.</p>	✓	
		1.3.13.1	<p>Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi.</p> <p>The details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and on the corporation's website.</p>	✓	
		1.3.13.2	<p>Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.</p> <p>The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners, and represents the Board of Commissioners in matters involving external parties.</p>	✓	
		1.3.13.3	<p>Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>A former President Director or member of the Board of Directors who is appointed as a member of the Board of Commissioners cannot be immediately designated as the President Commissioner. A two (2) year cooling-off period is required before they can be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director or Director needs to serve as President Commissioner, the Board must provide the rationale and explanation in the Annual Report.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.4 Pembentukan Komite Establishment of Committees				
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	<p>The corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.</p>	✓	
	1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.	<p>For Committees not mandated by regulations, if the corporation does not have such Committees, it discloses this fact and explains the process used to ensure that the functions of those Committees are properly carried out by the Board of Commissioners.</p>	✓	
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	<p>The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent, and that other committees established by the Board of Commissioners have a majority of independent members. Additionally, all committee members possess the competence, commitment, and adequate authority to perform their roles effectively and independently.</p>	✓	
	1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan.	<p>The Committee has a charter that clearly defines its role and grants it all the necessary authority to perform its duties. This authority includes, among others, the right to obtain information, meet with relevant parties concerning its tasks (with or without management present), and seek advice from independent external consultants or experts if the Committee deems it necessary.</p>	✓	
	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	<p>To ensure that the monitoring of the Audit Committee's duties is conducted objectively and independently, the President Commissioner must not serve as the Chair of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be disclosed in the annual report.</p>	✓	
					












Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.5	Penilaian Kinerja-Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Its Members			
	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.		✓	
	1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have a self-assessment policy to evaluate its performance as a whole Board.		✓	
	1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other evaluation policies are based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or criteria, in accordance with those established by the Board of Commissioners.		✓	
	1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Commissioner's term of office is based on a satisfactory performance evaluation of their contributions.		✓	
	1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners engages an independent external consultant periodically, at least once during the term of office, to facilitate an objective and honest evaluation of the Board of Commissioners' performance.		✓	
	1.6.	Benturan Kepentingan Conflict of Interest			
	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nomination function before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed company, other directorships, or positions with significant time commitments.		✓	
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who currently serve or intend to serve as directors or commissioners in other corporations. These policies must specify the permitted appointments and the allowed number of corporations in which they may concurrently hold positions as directors or commissioners.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.6.2		<p>Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including the misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in the monitoring and decision-making concerning potential conflicts of interest involving the concerned Commissioner or their affiliates.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1.6.2.1	<p>Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut.</p> <p>The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have conflicts of interest abstain from participating in related decision-making.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1.6.2.2	<p>Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya.</p> <p>Each member of the Board of Commissioners promptly informs the Board of Directors and the Board of Commissioners of any potential conflicts of interest, including those arising from their position as a consultant or officer in a customer company, supplier, creditor, or other business partner.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1.6.2.3	<p>Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.</p> <p>All members of the Board of Directors promptly disclose any potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and the other members of the Board of Directors, and refrain from participating in decision-making whenever they have a conflict of interest.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1.6.2.4	<p>Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan.</p> <p>In its report, the Board of Commissioners informs the General Meeting of Shareholders (GMS) of any material conflicts of interest that have occurred, along with the actions taken. Material conflicts of interest that are not merely temporary may result in termination of the member's position on the board.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					


Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Enhancement of Competence for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	1.71		<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.</p> <p>The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations, applicable standards, and other obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge necessary to perform their roles on the Board.</p>	☑	
		1.71.1	<p>Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.</p> <p>The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate orientation program along with all relevant information pertaining to their roles and responsibilities.</p>	☑	
		1.71.2	<p>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.</p> <p>Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate, and ongoing training and knowledge development programs.</p>	☑	
		1.71.3	<p>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi.</p> <p>Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely, and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations, applicable obligations, risk factors, and the corporate business environment.</p>	☑	
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	2.1 Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors				
	2.1.1		<p>Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>In selecting candidates for the Board of Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates.</p>	☑	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	2.1.2		<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners ensures that the selection criteria for members of the Board of Directors include, at a minimum, the knowledge, capabilities, and expertise required to effectively fulfill the roles of the Board of Directors, while also considering the importance of diversity within the Board.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
     		2.1.2.1	<p>Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/ pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. lama masa jabatan; 6. kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan 7. setiap kepemilikan saham dalam korporasi. <p>Information about candidates for the Board of Directors must be disclosed during the election/re-election process and must be available from the date the General Meeting of Shareholders (GMS) is convened until the GMS is held. This information should also be downloadable through the Public Company's website and/or the e-GMS platform, and includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Candidate's identity and reason for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions in other corporations, as well as significant roles in nonprofit/charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Length of term of office; 6. Attendance in Board of Directors meetings (except for new Directors); and 7. Any share ownership in the corporation. 	<input type="checkbox"/>	<p>PUSRI bukan Perusahaan terbuka sehingga informasi calon Direksi tidak disampaikan dalam situs web</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company; therefore, information on candidates for the Board of Directors is not disclosed on the website.</p>
		2.1.2.2	<p>Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi.</p> <p>The composition of the Board of Directors is structured in such a way that its members collectively reflect diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender, as required to effectively fulfill the roles of the Board of Directors.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.1.2.3	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>The determination of the number of Board of Directors members takes into account the corporation's condition as well as the effectiveness of decision-making.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.1.2.4	<p>Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi.</p> <p>There is at least one director with prior experience in the main sector where the corporation operates.</p>	✓	
		2.1.2.5	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut.</p> <p>Directors overseeing the accounting or finance function possess expertise and/or knowledge in accounting, as evidenced, among other things, by professional certifications issued by government-recognized accounting professional associations and their membership registration in such associations.</p>	✓	
	2.1.3		<p>Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>The corporation's policy on diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.</p>	✓	
		2.1.3.1	<p>Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>The corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets, and the progress made toward achieving those targets. The information should include references to how diversity is achieved through appropriate succession planning within the Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	✓	
	2.1.4		<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent, enabling the formation of a desired Board composition. The Board of Commissioners utilizes independent sources to identify qualified candidates.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
      		2.1.4.1	<p>Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. lama masa jabatan; 6. kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan 7. setiap kepemilikan saham dalam korporasi <p>Information about candidates for the Board of Commissioners must be disclosed during the election/re-election process and must be available from the date of the General Meeting of Shareholders (GMS) summons until the GMS is held. This information should also be downloadable via the Public Company's website and/or e-GMS platform, and includes: The candidate's identity and the reason for their appointment; Core competencies, qualifications, and professional background; Current positions in other corporations, as well as significant roles in non-profit/charitable organizations; Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; Length of tenure; Attendance at Board of Commissioners and committee meetings (except for new Commissioners); and Any share ownership in the corporation.</p>		<p>PUSRI bukan Perusahaan terbuka sehingga informasi calon Dewan Komisaris tidak disampaikan dalam situs web</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company; therefore, information on candidates for the Board of Directors is not disclosed on the website.</p>
		2.1.4.2	<p>Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.</p> <p>If the Board of Commissioners engages an independent external consultant in the nomination process, relevant information about the independent external consultant shall be disclosed in the annual report, including information regarding their independence and any conflicts of interest.</p>		<p>Dalam proses nominasi tidak menggunakan konsultan eksternal</p> <p>The nomination process does not involve the use of an external consultant.</p>
	2.1.5		<p>Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p> <p>The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' approved skills matrix and ensures that candidate profiles meet the requirements outlined in the skills matrix and nomination criteria.</p>		
	2.1.6		<p>Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p> <p>The composition of the Board of Commissioners must be structured in such a way that, as a group, its members reflect diversity in terms of competencies, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender necessary to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.</p>		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.1.6.1	<p>Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi.</p> <p>At least one Commissioner has prior experience in the main sector where the corporation operates.</p>	✓	
		2.1.6.2	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi.</p> <p>The determination of the number of Board of Commissioners members takes into account the condition of the corporation.</p>	✓	
	2.1.7		<p>Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p> <p>To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors, particularly in roles where potential conflicts of interest may arise, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners. Their terms of office are limited, and the tenure of the Board of Commissioners and their independence from the corporate perspective are disclosed.</p>	✓	
		2.1.7.1	<p>Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.</p> <p>A former President Director/member of the Board of Directors may join the Board of Commissioners as an Independent Commissioner only under exceptional circumstances and there must be a cooling-off period of at least two (2) years between these positions.</p>	✓	
		2.1.7.2	<p>Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.</p> <p>A former Independent Commissioner may be reappointed as an Independent Commissioner only under exceptional circumstances and there must be a cooling-off period of at least two (2) years between the terms.</p>	✗	<p>Jika telah melalui 1x masa perpanjangan (dua periode)</p> <p>If you have gone through 1 extension period (two periods)</p>
		2.1.7.3	<p>Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/ sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris.</p> <p>The term of office for an Independent Commissioner shall not exceed a limit of 9 (nine) years. For corporations with a 5 (five)-year term of office, the limit shall not exceed 10 (ten) years. After nine or ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as a Commissioner (non-independent).</p>	✓	
	2.1.8		<p>Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that a formal, rigorous, and transparent process is in place for the nomination and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>	✓	








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.1.8.1	<p>Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; Dalam penunjukan anggota Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultasi. 	<input checked="" type="checkbox"/>	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			<p>The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include, but are not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Developing guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to effectively carry out their responsibilities. These guidelines include, among others: <ol style="list-style-type: none"> a. In the appointment of the chief commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a job specification description, including time commitment requirements that also consider the need for time commitment during crises. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners and the impact explained in the following annual report; b. In the appointment of members of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee sets the terms and conditions for the appointment of commissioners. These terms and conditions are available for review. The expected time commitment is included in the appointment letter to commissioners, and members must have sufficient time to fulfill the expected time commitment. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before the appointment, along with an indication of the required time commitment, and the Board must be informed if there are any changes to these commitments; 2. Proactively leading and being responsible for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and Board of Commissioners; 3. Upholding the principle of independence in managing conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in the performance of the Committee's duties; 4. Considering and being responsible for appointing independent nomination consultants, including selecting and setting terms of engagement, and disclosing the identity and fees of the consulting services. 		
	2.18	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners</p>					
	2.2.1	<p>Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p> <p>The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration for the Board of Directors must be proposed, potentially through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account each Director's role, the economic situation, and the company's performance.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.2.1.1	<p>Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.</p> <p>The remuneration policy is fair and reasonable, both in structure and amount, and is determined within the context of corporate values, internal reward structures, and encouraging competitiveness while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.2.1.2	<p>Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback).</p> <p>The corporation has a performance-based remuneration policy for Board of Directors members that aligns with the achievement of the corporation's long-term interests, including performance measures such as stock ownership options, deferred bonuses, and provisions for the partial or full return of bonuses/incentives already paid (clawback).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.2.1.3	<p>Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi.</p> <p>The Board of Directors does not receive any facilities beyond those already provided based on the corporation's General Meeting of Shareholders.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.2.2	<p>Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p> <p>The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and promotes the achievement of long-term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders (GMS) is determined by taking into account each Commissioner's role, the economic situation, and the company's performance. In addition, consideration must also be given to their position as President Commissioner, as well as their role as chairperson or member of any committees.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.2.2.1	<p>Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi.</p> <p>Remuneration for the Board of Commissioners must be in the form of fixed remuneration. If Board members are given performance-related remuneration, the basis for such remuneration must be linked to the corporation's long-term development and must differ from that of the Board of Directors.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2.2.2.2	<p>Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.</p> <p>Independent Commissioners must not receive stock options, performance-linked shares, or bonuses.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>









Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	2.2.3		<p>Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>To ensure that remuneration packages are determined based on the performance, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that fair and transparent procedures are in place to establish the remuneration policies for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>	✓	
		2.2.3.1	<p>Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; 2. Mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/ atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; 3. Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/ Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; 4. Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; 5. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; 6. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultasi. 	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			<p>In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> Determines the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, as well as between remuneration paid immediately and deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, must be relevant and designed to support the achievement of the corporation's long-term performance. Remuneration incentives must align with the corporation's risk policy. Additionally, remuneration caps are set and disclosed in the annual report; Considers whether directors and commissioners are eligible for annual bonuses and/or allowances under a long-term incentive scheme; Carefully considers the compensation obligations (including pension contributions and all other components) due to Directors/Commissioners in the event of early termination. The goal is to avoid rewarding poor performance; Assesses the implications of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners on the corporation, including the impact of increased employee benefits and other changes, particularly for Directors and Commissioners nearing retirement; Upholds the principle of independence in managing conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in the execution of their duties; Considers and is responsible for appointing independent remuneration consultants, including the selection process and terms of engagement, and discloses the identity and fees of such consulting services. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
					
					
					
					
3 Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Professional Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners					
3.1 Sifat Hubungan Kerja Nature of the Professional Relationship					
	3.1.1	<p>Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.</p> <p>There is open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it remains important to maintain the confidentiality of information to prevent any leakage of confidential information.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	3.1.2	<p>Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.</p> <p>In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy, and regularly discusses its implementation.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	3.1.3	<p>Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		3.1.3.1	<p>Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitennya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; Memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/ anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/ Komisaris/ anggota komite; Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/ investor, baik lokal maupun asing. <p>The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ensuring effective information flow between the Board of Commissioners and its committees, and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; Monitoring developments in corporate governance, including ensuring the full implementation of the charters of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the committees, as well as assisting and advising the Board of Directors and the Board of Commissioners in applying corporate governance practices to meet stakeholder expectations; Managing all meeting-related matters for the Board of Commissioners, the Board of Directors, joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, and committees established by the Board of Commissioners; attending and recording minutes of all meetings, and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions of Board meetings are accurately recorded in the minutes; Organizing and facilitating orientation programs for newly appointed Directors/Commissioners/committee members and supporting the professional development of Directors/ Commissioners/committee members; Managing investor relations activities to maintain and enhance communication between the corporation and its shareholders/investors, both domestic and international. 	☑	
		3.1.3.2	<p>Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya.</p> <p>Each Director and Commissioner may communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.</p>	☑	
		3.1.3.3	<p>Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi.</p> <p>The Board of Commissioners provides input to the Board of Directors regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.</p>	☑	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			3.2 Akses informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners		
	3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners receives accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request additional information from the Board of Directors at any time.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process in place that allows its members, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and relevant senior management.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or the Corporate Secretary shall promptly inform the Board of Commissioners of any major material events concerning the condition, performance, and management of the corporation. If necessary, a meeting of the Board of Commissioners shall be convened to discuss the matter.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3.2.1.3	Diantara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners maintains regular communication with the Board of Directors to stay informed of developments within the corporation that require the attention of the Board of Commissioners, thereby enabling the Board to carry out its duties more effectively.	<input checked="" type="checkbox"/>	
					



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi					
Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners Regarding the Impact of Ownership Structure on the Corporation					
3.3.1		Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Impact of Ownership Structure on the Corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities within the context of the corporation's share ownership structure and the relationships among shareholders that may affect the management and operations of the corporation.	✘	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
	3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis di mana korporasi merupakan bagiannya.	The Board of Directors and the Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and the relationships among the corporation's shareholders, and take into account their impact on the control of the corporation, including written and unwritten agreements among family members as controlling shareholders, shareholder agreements, or group business policies in which the corporation belongs to the part.	✘	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
	3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi.	The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and the relationships among the corporation's shareholders do not influence the execution of the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners (including with respect to succession planning for the Board of Directors), in order to serve the best interests of the corporation.	✘	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
	3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.	The Board of Commissioners monitors, and the Board of Directors ensures, that information is accurately disclosed when there are conditions affecting control over the corporation.	✔	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
4 Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and Responsible Behavior					
4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct					
      	4.1.1	<p>Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. <p>This statement is articulated in the Code of Business Ethics and Conduct, which must clearly express the corporation's expectations that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees will:</p> <ol style="list-style-type: none"> Act in the best interests of the corporation; Act honestly and with the highest standards of integrity; Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence; Comply with the laws and regulations applicable to the corporation and its operations; Avoid actions that violate laws or are unethical according to the corporation's ethical guidelines; Not engage or participate in any activities that create conflicts of interest with the best interests of the corporation or that may negatively impact the corporation's reputation; Not derive benefits from the corporation's property, information, asset ownership, or customers for personal gain or in a way that harms the corporation and its customers; Not exploit their position or opportunities arising from their position for personal benefit; Avoid soliciting or accepting payments, gratuities, or other benefits from third parties for themselves or others that cause conflicts of interest or unlawfully benefit third parties; Respect differing opinions and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; Ensure full, fair, accurate, timely, and understandable disclosures in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications. 			








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	4.12		<p>Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.</p> <p>The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards related to anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.</p>	✓	
	4.1.2.1		<p>Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.</p> <p>The Board of Directors develops and establishes systems to be used as efforts to prevent money laundering and terrorism financing, anti-corruption, the offering or acceptance of bribes, as well as other payments or inducements to commit acts that violate laws and regulations or are unethical.</p>	✓	
	4.1.2.2		<p>Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan anti korupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan anti korupsi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>The Board of Directors communicates the anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption policies by providing training to staff and striving to extend anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption efforts to stakeholders.</p>	✓	
	4.1.2.3		<p>Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris.</p> <p>Any material violation of the anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption policies must be reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Board Committee.</p>	✓	
	4.1.2.4		<p>Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political involvement, which includes lobbying and donations for political purposes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the adopted approach are understood, monitored, and regularly reviewed by the Board of Commissioners.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture				
	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, cultivates, and discloses its corporate culture and values.		✓	
	4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The corporation fosters a corporate culture that ensures all members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and all employees understand and are committed to fulfilling their responsibilities by acting in accordance with the code of ethics and conduct.		✓	
	4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi There is adequate training and socialization at the level of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all corporate employees mentioned above, covering all aspects related to corporate culture, values, and ethics.		✓	
	4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There are assessment and monitoring programs to ensure that all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all corporate employees understand the relevant code of ethics and effectively apply it to avoid the corporation's involvement in improper conduct.		✓	







Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya					
Communication and Enforcement of the Code of Ethics, Values, and Culture					
4.3.1		<p>Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.</p> <p>The code of conduct and corporate code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees. They are integrated into the corporate strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and are strictly enforced.</p>		✓	
4.3.1.1		<p>Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik.</p> <p>The corporation has a violation reporting guideline that encourages the reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical. This guideline also includes provisions on how the corporation protects whistleblowers with a good attitude.</p>		✓	
4.3.1.2		<p>Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku.</p> <p>The corporation ensures that the Board of Commissioners and its committees are promptly informed of any material violations of the code of ethics and conduct.</p>		✓	
4.3.1.3		<p>Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.</p> <p>The corporation ensures that the Board of Commissioners and its Committees are promptly notified of any material incidents reported under the whistleblowing policy.</p>		✓	
4.3.1.4		<p>Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.</p> <p>The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary actions, including dismissal. In the event of a violation, the Board of Directors is obligated to take preventive measures to ensure that the violation does not recur.</p>		✓	
5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan					
Risk Management, Internal Control, and Compliance					
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan				
	Internal Control and Compliance				
5.1.1		<p>Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.</p> <p>The Board of Directors conducts periodic reviews of the adequacy of the design and operational effectiveness of the corporate governance system, risk management, internal control, and compliance, and reports the implementation and results of these reviews to the shareholders through the Corporation's annual report.</p>		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
      		5.1.1.1	<p>Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespon perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asuransi lainnya; Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Periodic reviews conducted by the Board of Directors specifically consider:</p> <ol style="list-style-type: none"> Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, including the role of the internal audit function and other insurance service providers; The coverage and frequency of communication of the monitoring results to the Board of Commissioners (or the Audit Committee), enabling the Board of Commissioners to comprehensively assess the condition of internal controls and their effectiveness in risk management; Occurrences of failures or deficiencies in internal controls identified during the review period and the extent of contingent impacts that have occurred, may occur, or could occur in the future, materially affecting the corporation's financial condition or performance; and The effectiveness of internal controls related to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations. 	✓	
		5.1.1.2	<p>Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi.</p> <p>The Board of Directors ensures that the corporation has a function dedicated to continuously monitoring changes in applicable laws and regulations related to its business and regulations in general, as well as a system to ensure the corporation's compliance with applicable laws, regulations, and internal corporate policies.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	5.2 Manajemen Risiko Risk Management				
	5.2.1		<p>Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>Strategy and risk are integrated as a unified whole, disclosed transparently, embedded in the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and form part of discussions in joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</p>	✓	
		5.2.1.1	<p>Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif.</p> <p>The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and serving as a role model in controlling and managing risks in business and operational activities. This aims to instill, strengthen, and develop a risk-aware culture based on compliance and effective internal controls.</p>	✓	
		5.2.1.2	<p>Direksi mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan 2. apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. <p>The Board of Directors discloses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the principal risks faced by the corporation and how they are managed; and 2. whether there is any material exposure to environmental or social risks and, if so, how those risks are managed or the intention to manage them. 	✓	
		5.2.1.3	<p>Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.</p> <p>The Board of Directors ensures that the internal control system and risk management framework are aligned with the characteristics, needs, and business processes of the corporation, so that the internal control and risk management processes for all types of risks faced by the corporation—including communication and reporting on risks, risk management, its audit, and effectiveness—can be effectively implemented in accordance with stakeholder expectations.</p>	✓	
		5.2.1.4	<p>Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Directors ensures that the risk governance process in Information Technology—including disruptions, cybersecurity, and disaster recovery—is in place to ensure that all major risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.</p>		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	5.2.2		<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.</p> <p>The Risk Management Monitoring Committee supports the Board of Commissioners in carrying out its duties by establishing a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the corporation's risk management.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
     		5.2.2.1	<p>Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (fraud risk); mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. <p>The role of the Risk Management Monitoring Committee includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring corporate performance against the risk management framework, including ensuring that the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; Monitoring controls over key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; Reviewing any material incidents involving fraud or significant weaknesses in the corporation's risk controls, as well as lessons learned to prevent recurrence; Receiving reports from internal auditors on the adequacy of the corporation's risk management processes; Receiving reports from management on new and emerging risk sources, as well as risk controls and mitigation measures undertaken by the Board of Directors to address these risks; Preparing recommendations to the Board of Commissioners regarding changes that should be made to the entity's risk management framework or the risk appetite approved by the Board of Commissioners; and Overseeing the corporation's insurance program, taking into account the corporation's business and insurable risks. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
		5.2.2.2.	<p>Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif.</p> <p>The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; among its members, there is the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates to effectively carry out the committee's mandate.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan					
Integration of Governance, Risk Management, and Compliance					
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	The Board of Directors establishes an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by addressing various uncertainties in a coordinated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	✓	
	5.3.1.3	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.	The Board of Directors ensures coordination and capacity building across the core GRC systems—comprising governance, strategy management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems—to keep the corporation on course toward achieving its goals.	✓	
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	The Board of Directors ensures that the unit responsible for the compliance function does not concurrently perform any functions that could potentially create a conflict of interest.	✓	
5.4 Audit Internal					
Internal Audit					
	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function supports the corporation in achieving its objectives by providing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	✓	
	5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi.	Internal audit is conducted objectively and independently from corporate management and the functions being audited. Therefore, the Internal Audit function is functionally accountable to and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and may communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		5.4.1.2	<p>Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif.</p> <p>The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the internal audit function has the authority, resources, and adequate access to information to effectively carry out its role.</p>	✓	
		5.4.1.3	<p>Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal.</p> <p>The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, the scope of work, and the budget for the Internal Audit function.</p>	✓	
		5.4.1.4	<p>Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal.</p> <p>The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates the performance of the Internal Audit function annually, and submits the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, The Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.</p>	✓	
		5.4.1.5	<p>Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Internal Audit prepares an audit plan, involving the President Director and the Board of Commissioners, with input from the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.</p>	✓	<p>Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal.</p> <p>The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates the performance of the Internal Audit annually, reporting the results to the Board of Commissioners. Every three years, based on the Audit Committee's recommendations, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.</p>
					
					

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		5.4.1.6	<p>Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi.</p> <p>The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is conducted in accordance with applicable professional internal auditing standards and upholds both the professional code of ethics and the organization's code of conduct.</p>	✓	

6. Pengungkapan dan Transparansi
Disclosure and Transparency

		6.1 Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy			
	6.1	<p>Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.</p> <p>The Corporation has disclosure and transparency policies and procedures to ensure the disclosure of material information while safeguarding sensitive and confidential corporate information.</p>	✓		
	6.1.2	<p>Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.</p> <p>Shareholders' rights to receive relevant material information about the corporation regularly and promptly must be fulfilled.</p>	✓		
	6.1.2.1	<p>Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.</p> <p>The Corporation maintains and discloses a written policy governing its continuous disclosure obligations and information transparency, in compliance with prevailing regulations.</p>	✓		
		6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports			
	6.2.1	<p>Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.</p> <p>The Corporation discloses the system and procedures to ensure that interim financial reports, which are unaudited or not reviewed by external auditors, are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.</p>	✓		
	6.2.1.1	<p>Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim;</p> <ol style="list-style-type: none"> peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. <p>Disclosure of the systems and procedures shall, at a minimum, cover: internal control over financial reporting, including interim financial statements;</p> <ol style="list-style-type: none"> the role of the risk management/compliance/management oversight functions and internal audit function in ensuring the integrity of interim financial statements; the role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements prior to publication. 	✓		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	6.2.2		<p>Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.</p> <p>The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audits conducted by the external auditor. This includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of the external auditor.</p>	✓	
		6.2.2.1	<p>Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya.</p> <p>The selection process for the external auditor through a tender is conducted transparently, allowing shareholders to observe and monitor the process should they wish to do so.</p>	✓	
		6.2.2.2	<p>Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan.</p> <p>The Audit Committee ensures that the contract with the auditor contains no clauses that could impair the auditor's independence or competence in conducting the financial statement audit.</p>	✓	
		6.2.2.3	<p>Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen;</p> <p>The Audit Committee engages in adequate dialogue with the external auditor without management present and monitors the interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter issued by the external auditor and overseeing management's responses.</p>	✓	
		6.2.2.4	<p>Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit.</p> <p>The Board of Commissioners, or the Audit Committee, ensures that the external auditor promptly reports all significant findings and issues identified during the audit process.</p>	✓	
		6.2.2.5	<p>Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor.</p> <p>The Audit Committee reviews all non-audit services provided by the external auditor and its affiliates, along with the related fees, to ensure that such services do not compromise the auditor's independence.</p>	✓	
		6.2.3	<p>Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.</p> <p>Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and under national or international sustainability reporting frameworks.</p>	✓	
		6.2.3.1	<p>Laporan keberlanjutan diberikan asuransi oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.</p> <p>The sustainability report is assured by an independent and competent external party.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	6.2.4		<p>Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.</p> <p>The Company has published a Sustainability Report as an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report presents the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in a three-year comparison. This is intended to assist shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.</p>	✓	
	6.3 Diseminasi Informasi Information Dissemination				
	6.3.1		<p>Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.</p> <p>Information dissemination channels must provide equal, prompt, and cost-effective access to relevant information for users.</p>	✓	
		6.3.1.1	<p>Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan.</p> <p>The corporation regularly holds meetings with financial analysts.</p>	✓	
		6.3.1.2	<p>Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>The corporation leverages information technology extensively and effectively, using platforms beyond just its website to facilitate information transparency.</p>	✓	
		6.3.1.3	<p>Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan dijaga dan terproteksi keamanannya.</p> <p>The corporation ensures that the information disseminated is securely protected.</p>	✓	
	6.3.2		<p>Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.</p> <p>The Corporation ensures that the annual statement on the implementation of the Indonesian Corporate Governance General Guidelines, including explanations on the application of each Recommendation and Guideline, is available on the website for a minimum of five years.</p>	✗	<p>Rekomendasi dan panduan penerapan PUGKI belum disampaikan dalam situs web PUSRI</p> <p>The recommendations and guidelines for implementing the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) have not yet been published on the PUSRI website.</p>
	6.3.3		<p>Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.</p> <p>For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the primary listing, must be transparent and well-documented.</p>	✗	<p>PUSRI tidak terdaftar dalam pasar modal</p> <p>PUSRI is not listed on the capital market.</p>

7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham







Protection of Shareholders' Rights

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			7.1 Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights		
		7.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Corporation has a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders or investors.	✓	
		7.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with one another regarding issues related to the fundamental rights of shareholders as set forth in these Principles; however, such matters must not be misused.	✓	
		7.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The corporation encourages constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. It responds to shareholders' requests to engage in dialogue to support sustainable growth and enhance corporate value in the medium to long term.	✓	
		7.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The corporation provides a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	✓	
		7.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The corporation promptly discloses to the public all new material facts available to financial analysts and other similar parties.	✓	
		7.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses its corporate communication policy with shareholders or investors on its website and in its reports.	✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka dan belum mengungkapkan kebijakan komunikasi dalam situs web. PUSRI is not a publicly listed company and has not disclosed a communication policy on its website.
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependangali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The Corporation, as the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the Corporation's investment is significant.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		7.1.2.1	<p>Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; 2. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; 3. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya; dan 4. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. <p>The corporate governance framework and policies at subsidiaries include written policies covering, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiaries, the Board of Commissioners should be involved in the appointment of management at the subsidiary. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to carry out the appointment; 2. The effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; 3. Timely and accurate disclosure of material information of the subsidiary, including financial information, related party transactions, and other material information; and 4. If the corporation owns or establishes legal entities other than limited liability companies, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to those entities, adjusted to the context of the type of legal entity. 	✓	
		7.1.2.2	<p>Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak.</p> <p>For investments in significant subsidiaries where ownership is less than majority (such as ownership between 20 percent and 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there are shareholder agreements or other arrangements that enable the corporation to monitor the subsidiary's performance and participate in its management, including approval of significant transactions and decisions. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation receives adequate, accurate, and timely information from the subsidiary.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
   	7.1.3		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	✓	
			The Corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and the sale of substantial corporate assets to ensure that these transactions are conducted transparently and on fair terms, while protecting the rights of all shareholders according to their respective classes.		
	7.1.3.1		Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi.	✓	
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambil alihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas.		
			Anti-takeover tactics must not be used to shield management and the Board of Commissioners from accountability.		
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders					
  	7.2.1		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
			The Corporation has rules and procedures that ensure: All shareholders of the same series within a class of shares are treated equally; Disclosure of these rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that enable certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their share ownership.		
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham.	✓	
			To ensure transparency of shareholders' rights to receive a share of the profits, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as a target dividend payout ratio or dividend per share.		
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif.	✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
			Investors receive information about the rights attached to all series and classes of shares before purchasing them. Any changes in the economic value of the shares or voting rights require approval from the classes of shares negatively affected.		








Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		7.2.13	<p>Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (beneficial owner) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen).</p> <p>To enable shareholders to identify the corporation's ultimate beneficial owners with significant ownership, the corporation discloses the ultimate beneficial owners through major shareholders and controllers, as well as ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of the shares.</p>	✘	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>
		7.2.14	<p>Korporasi mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perjanjian antar pemegang saham; 2. voting cap; 3. multiple voting rights; 4. perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. <p>The corporation discloses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shareholder agreements; 2. voting caps; 3. multiple voting rights; 4. other arrangements that enable certain shareholders to have voting rights exceeding their ownership in the corporation. 	✘	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>
		7.2.15	<p>Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan.</p> <p>The corporation provides mechanisms/procedures that enable shareholders to effectively obtain compensation for violations of their rights in accordance with applicable laws, at reasonable costs and without undue delay.</p>	✔	
	7.2.2		<p>Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.</p> <p>The Corporation has rules and procedures in place to ensure that related party transactions are approved and conducted in a manner that properly manages conflicts of interest and protects the interests of the Corporation and its shareholders.</p>	✔	
		7.2.2.1	<p>Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (arm's length transaction).</p> <p>The corporation has established standard policies and operational procedures to ensure that transactions with related parties are conducted fairly and at arm's length (arm's length transactions).</p>	✔	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
  		7.2.2.2	<p>Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan.</p> <p>Material related party transactions, including consulting service agreements and other services or work between directors/commissioners and their affiliates with the corporation, must obtain approval in accordance with the applicable laws and regulations. In addition to those transactions whose approval is already regulated by law, material related party transactions require approval from the Board of Commissioners. Commissioners with conflicts of interest do not participate in granting such approval.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
  		7.2.2.3	<p>Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; walaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. <p>The corporation has a policy that transactions which definitively harm public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions include: Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at interest rates below fair market value; if loans are granted, they must be at reasonable interest rates and terms and receive approval from the Board of Commissioners; Financial assistance/subsidies to entities other than those wholly owned by the corporation.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		7.2.2.4	<p>Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.</p> <p>The Board of Commissioners discloses the policy and process for approving, reviewing, and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		7.2.2.5	<p>Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi.</p> <p>The Audit Committee's conclusions on the review of significant related party transactions and conflicts of interest are disclosed in the company's Annual Report.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7.2.3	<p>Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.</p> <p>The Corporation has and discloses a policy to prevent insider trading. It also has clear rules regarding any trading of the Corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one may directly or indirectly benefit from information that is not yet publicly available in the market.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>PUSRI belum memiliki kebijakan insider trading tersendiri, namun terdapat dalam Kode Etik Perusahaan</p> <p>PUSRI does not have a standalone insider trading policy; however, provisions related to insider trading are included in the Company's Code of Ethics.</p>	

7.3 Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	7.3.1		<p>Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.</p> <p>The Corporation issues a notice for the General Meeting of Shareholders (GMS) along with the complete agenda and meeting materials as early as possible, and no later than 28 days before the GMS, to provide shareholders with sufficient time and information to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all related GMS information are disclosed through electronic means, such as the Corporation's website.</p>	✘	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka sehingga panggilan RUPS paling lambat 14 hari sebelum RUPS</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company; therefore, the notice for the GMS is issued no later than 14 days prior to the meeting.</p>
		7.3.1.1	<p>Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (rationale) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS.</p> <p>In the materials for the GMS agenda, the company provides complete and relevant information necessary for decision-making, including explanations and justifications (rationale) for the proposed resolutions to be approved at the GMS.</p>	✔	
	7.3.2		<p>Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.</p> <p>The Corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' effective participation and voting at the GMS.</p>	✔	
		7.3.2.1	<p>Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS.</p> <p>The Corporate provides the necessary infrastructure to facilitate the participation of all shareholders, both domestic and foreign, including institutional investors, in the GMS.</p>	✔	
		7.3.2.2	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were present at the Annual GMS.</p>	✔	
		7.3.2.3	<p>Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS.</p> <p>The Chairpersons of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and other relevant committees are prepared to provide meaningful responses to questions addressed to them during the GMS.</p>	✔	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
 		7.3.2.4	<p>Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan Mengajukan usulan resolusi. <p>Shareholders are given the opportunity, within reasonable limits, to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Raise questions during the General Meeting of Shareholders (GMS), including those related to the results of the annual external audit; Propose an item to be included in the agenda of the GMS; and Submit proposed resolutions. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
    		7.3.2.5	<p>Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan (show of hands); memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat <p>The Company has voting mechanisms or technical procedures that prioritize independence and the interests of shareholders, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Holding the General Meeting of Shareholders (GMS) at a location that is easily accessible to the majority of shareholders; Conducting voting through closed (poll) voting rather than by a show of hands; Ensuring that there are no requirements or procedures for the GMS that hinder shareholder participation. 	<input type="checkbox"/>	<p>PUSRI bukan perusahaan publik</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>
		7.3.2.6	<p>Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara.</p> <p>The Company strives to implement electronic voting procedures and takes steps to develop the necessary infrastructure to enable electronic voting or to utilize existing infrastructure available within the ecosystem for voting purposes.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>
		7.3.2.7	<p>Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (bundling).</p> <p>Each voting item at the General Meeting of Shareholders (GMS) pertains to a single decision; there is no bundling of multiple decisions into a single resolution.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		7.3.2.8	<p>Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS.</p> <p>The company appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or validate the votes at the GMS and discloses this in the minutes of the meeting.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		7.3.2.9	<p>Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali.</p> <p>If a resolution approved by the controlling shareholders contradicts the majority vote of the non-controlling shareholders, then after the GMS, the corporation discloses the actions taken to understand and address the concerns of the non-controlling shareholders that led them to vote differently from the controlling shareholders.</p>	✓	
	7.3.3	<p>Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Shareholders participate effectively in the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>		✓	
		7.3.3.1	<p>Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi.</p> <p>The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough evaluation of candidates for Directors and Commissioners and discloses all relevant material information about the candidates to shareholders during the board member election process. The disclosed information includes details about the candidates' positions as Directors or Commissioners in other corporations and whether they are considered independent from the corporation's perspective.</p>	✓	
		7.3.3.2	<p>Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali.</p> <p>Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years, or every five years for corporations subject to five-year term regulations. Ideally, nominations should be held annually.</p>	✓	
		7.3.3.3	<p>Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris.</p> <p>Shareholders conduct separate voting for each candidate for Director and Commissioner.</p>	✗	<p>PUSRI bukan perusahaan terbuka</p> <p>PUSRI is not a publicly listed company</p>







Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
  	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.		✓	
		The Corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.			
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS.		✓
			In the notice of the GMS, the corporation identifies and informs the external auditor candidate to be appointed or reappointed at the GMS.		
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan.	✓	
			The corporation ensures that the external auditor attends the GMS and is obligated to respond to shareholders' questions related to the audit of the financial statements.		
   	7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.		✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka
		The announcement of the voting results and the complete summary of the minutes of the GMS are made public on the next business day.			PUSRI is not a publicly listed company
	7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.		✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka
		The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 working days after the meeting.			PUSRI is not a publicly listed company
	7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab.			
	The minutes of the GMS include questions raised by shareholders and the answers provided by the meeting chairperson or the responding party.				
7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun.		✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka	
	The organization of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents, including the annual report, voting results, and the relevant meeting agenda, are published on the corporation's official website or digital communication media and remain accessible for at least 10 (ten) years.			PUSRI is not a publicly listed company	

8. Pemangku Kepentingan Lainnya








Other Stakeholders

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)					
Key Stakeholder Engagement					
	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.		✓	
		The Corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations, concerns, and the Corporation's impact on them.			
	8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan.		✓	
		The corporation discloses the process of identifying and selecting key stakeholders to be engaged.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.1.1.2	<p>Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci.</p> <p>The corporation discloses the approaches and activities undertaken to manage engagement with key stakeholders, including the frequency of such engagement based on the types and groups of key stakeholders.</p>	✓	
		8.1.1.3	<p>Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyoroti keluhan dan/ atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.</p> <p>The corporation provides channels that key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) can use to express their opinions and feedback, as well as to voice complaints and/or report possible violations of their rights.</p>	✓	
		8.1.1.4	<p>Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. respon korporasi; dan 2. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. <p>The corporation discloses significant views, feedback, and complaints received from key stakeholders through stakeholder engagement, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the corporation's response; and 2. the groups of key stakeholders who provided the views and feedback. 	✓	
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis					
Integration of Sustainability into the Business Model					
	8.2.1		<p>Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.</p> <p>The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including setting the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, key action plans, and risk management.</p>	✓	
		8.2.1.1	<p>Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>The Board of Directors ensures that the corporate sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders.</p>	✓	
		8.2.1.2	<p>Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya.</p> <p>The Board of Directors and the Board of Commissioners consistently monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.2.1.3	<p>Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi.</p> <p>The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their effectiveness in overseeing and addressing significant risks and opportunities related to the corporation's sustainability.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		8.2.1.4	<p>Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi.</p> <p>The Board of Directors appoints an individual within management who has a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders				
		8.3.1	<p>Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.</p> <p>The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the implementation of high standards of ethics, social responsibility, and environmental stewardship throughout the corporation, and ensures that appropriate policies and procedures are applied to respect and comply with the rights of stakeholders</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		8.3.1.1	<p>Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi.</p> <p>The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility toward customers, which include considerations of customer information security, sales ethics and conduct, after-sales service in accordance with the product's lifespan/service period, and following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations must promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.3.1.2	<p>Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.</p> <p>The corporation implements and discloses policies covering criteria for supplier selection, transparent procurement mechanisms, efforts to enhance supplier capabilities, and the fulfillment of supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, uphold social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and value-based business policies and procedures.</p>	✓	
		8.3.1.3	<p>Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat.</p> <p>The corporation carries out and discloses its social responsibility by applying its business knowledge and experience to develop and implement social responsibility activities that concretely provide added value to the community, including promoting community self-reliance.</p>	✓	
		8.3.1.4	<p>Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku; 2. Energi; 3. Penggunaan air; 4. Pemanfaatan sumber daya terbarukan; 5. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. <p>The corporation implements and discloses its environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative environmental impacts from all aspects of its operations, including in the use of:</p> <p>Raw materials;</p> <p>Energy;</p> <p>Water usage;</p> <p>Utilization of renewable resources;</p> <p>Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reducing greenhouse gas impacts and carbon emissions.</p>	✓	
		8.3.1.5	<p>Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar.</p> <p>The corporation implements and discloses policies on fair competition by promoting ethical business conduct and refraining from anti-competitive practices to gain or protect its market position.</p>	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.3.1.6	<p>Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditor.</p> <p>1. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi.</p> <p>2. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin.</p> <p>The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors.</p> <p>The Board of Commissioners oversees, and the Board of Directors monitors, the corporation's financial liquidity and solvency.</p> <p>The Board of Directors ensures that risks to the financial position or potential financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors how the Board of Directors addresses such risks or financial difficulties and receives regular reports.</p>	✓	
					
					
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	The Board of Directors encourages employees to work in the long-term interest of the corporation and prioritize sustainability.	✓	
		8.3.2.1	<p>Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.</p> <p>The corporation has a long-term incentive policy for employees that encourages the creation of sustainable value.</p>	✗	<p>Belum terdapat kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan</p> <p>There is currently no policy in place for providing long-term incentives to employees</p>
		8.3.2.2	<p>Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted return), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.</p> <p>Performance-based remuneration for employees must take into account risk factors, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undertaking undesirable risks.</p>	✓	
					

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.3.2.3	<p>Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun.</p> <p>The Board of Directors effectively manages potential conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of the pension fund and the corporation as the pension fund manager.</p>	☑	
		8.3.2.4	<p>Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman.</p> <p>The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resource development and management program to ensure the corporation has an adequate number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.</p>	☑	
		8.3.2.5	<p>Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur.</p> <p>In filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers elements of diversity, applies a non-discriminatory approach, and provides equal opportunities to all candidates regardless of ethnicity, religion, race, social group, or gender. This diversity policy is accompanied by measurable objectives.</p>	☑	



PUPUK INDONESIA

PUPUK BERBARANG DITRUSMI

Makmur
PUPUK BERBARANG DITRUSMI

PUPUK BERBARANG DITRUSMI
BARANG DITRUSMI
NOMOR PENGANTARAN

UREA

N (NITROGEN)



Diproduksi oleh

PT PUPUK INDONESIA

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)







PUSRI telah memenuhi hampir seluruh butir-butir ketentuan dalam ACGS, seperti tampak pada tabel berikut ini.

PUSRI has complied with almost all the provisions of the ACGS, as shown in the following table.

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
A	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	
A.1	Hak-hak Dasar Pemegang Saham Basic Rights of Shareholders	306
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan Pembayaran Dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu,yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final. Does the company make dividend payments (interim and final/annual) fairly and timely, meaning all shareholders are treated equally and dividends are paid within 30 days after (i) the declaration of interim dividends and (ii) the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) approves the distribution of final dividends?	245
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan The Right to Participate in Decisions Regarding Fundamental Changes to the Company Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: Do Shareholders have the right to participate in:	305-306
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan? Amendments to the Company's Articles of Association?	306
A.2.2	Otorisasi penambahan modal? Authorization of Capital Increase?	306
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan? Transfer of all or part of the assets resulting in the sale of the company?	306
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara The Right to Effective Participation and Voting in the GMS and to Receive Information on the Rules of Procedure of the GMS, including Voting Procedures	
A.3.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif? Do shareholders have the opportunity, as evidenced by the agenda, to approve the remuneration (salary, allowances, benefits in kind, and other honoraria) or any increase in remuneration for non-Executive Directors/Commissioners?	306
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris? Does the company grant minority shareholders the right to nominate candidates for the Board of Directors/Board of Commissioners?	306
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to vote for Directors/Commissioners individually?	306
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai? Does the company inform shareholders of the voting procedures to be used before the meeting begins?	306
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan? Does the minutes of the last Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) state that shareholders were given the opportunity to ask questions, and are the questions posed by shareholders and the answers provided by the company recorded?	310-312
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir? Does the company disclose the voting results, including votes in favor, against, and abstentions for all decisions/ each agenda item of the most recent AGMS?	N.A, PUSRI Bukan perusahaan publik N.A PUSRI is not a publicly listed company
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose the members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the most recent AGMS?	313

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose whether all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the CEO (if not a member of the Board), attended the most recent AGMS?	313
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)? Does the company allow voting in absentia?	N.A
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir? Does the company conduct voting by poll (rather than a show of hands) for all resolutions at the most recent AGMS?	N.A
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/ atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST? Does the company disclose the appointment of a third party (Observer) to count and/or validate the vote counting at the AGMS?	N.A
A.3.12	Apakah perusahaan memublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan? Does the company publish the voting results of all resolutions from the most recent AGMS/EGMS within one working day after the meeting is held?	N.A
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya? Does the company issue the notice for the AGMS and EGMS at least 21 days in advance?	N.A
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item requiring shareholder approval in the AGMS notice/circular and/or company statement?	N.A
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST? Does the company provide shareholders with the opportunity to propose agenda items for the AGMS?	N.A
A.4	Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan The market must be allowed to monitor the company efficiently and transparently.	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi? In the case of a merger, acquisition, and/or takeover that requires Shareholder approval, does the Company's Board of Directors/Board of Commissioners appoint an Independent Party to evaluate the fairness of the transaction value?	N.A
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi The implementation of ownership rights by shareholders, including institutional investors, must be facilitated.	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST? Does the company disclose the practices it implements to encourage shareholders to engage with the company beyond the AGMS?	N.A
B	Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders	
B.1	Saham dan Hak Voting Shares and Voting Rights	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting? Does each ordinary share of the company carry one (1) voting right?	N.A
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan memublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs Web Bank/situs Web Bursa Efek/situs Web Regulator)? If the company has more than one class of shares, does the company publish the voting rights for each class of shares (for example, through the Bank's website, Stock Exchange website, or Regulator's website)?	N.A
B.2	Panggilan RUPST Notice of the AGMS	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan? In the most recent AGMS, were all decisions made on a single issue only, meaning that no multiple issues were combined into one decision?	310-312
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal? Was the notice for the most recent Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) translated into English and published on the same day as the local language version?	N.A
	Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut: Does the notice of the AGMS contain the following details:	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali? Is there profile information of the Directors/Commissioners (at minimum: age, educational qualifications, date of appointment, experience, and positions in other public companies) who are to be elected or re-elected?	N.A
B.2.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas? Is the auditor to be appointed or reappointed clearly identified?	N.A
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat? Are the proxy documents available and easily accessible?	N.A
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang Trading by insiders and any trading that violates regulations must be prohibited	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum? Does the company have a policy and/or regulations prohibiting Directors, Commissioners, and employees from exploiting information that is not yet publicly available?	N.A
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja? Are the company's Directors and Commissioners required to report their transactions involving the company's shares within 3 (three) working days?	N.A
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen Related party transactions by the Directors and Senior Management	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya? Does the company have a policy requiring Directors/Commissioners to disclose their interests in any Transaction and other Conflicts of Interest?	334, 335 345-348
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham? Does the company have a policy requiring a Committee of Independent Directors/Commissioners to review Material Related Party Transactions to determine whether such transactions are in the company's and its Shareholders' best interest?	N.A
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan? Does the company have a policy that requires members of the Board of Directors/Board of Commissioners to refrain from participating in meeting agenda discussions in which they have a vested interest?	288
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar? Does the company have a policy regarding the provision of loans to the Board of Directors and Board of Commissioners, either by prohibiting such loans or ensuring that any loans are granted on an arm's length basis and at market interest rates?	N.A
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai Peraturan Protecting minority shareholders from non-compliant actions	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length? Does the company disclose that related party transactions are conducted fairly and on an arm's length basis?	249
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan? In the event of a related party transaction requiring shareholder approval, is the decision made by shareholders who do not have a vested interest?	N.A
C	Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan Respecting stakeholders' rights as mandated by laws or established agreements	286, SR: 98-101
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah? The existence and scope of the company's efforts to ensure customer welfare	N.A
C.1.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor? Supplier/Contractor selection procedures	SR: 71-72

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or aligned with promoting sustainable development	SR: 70-72
 C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi? The company's initiatives to engage with the communities in which it operates	SR: 158-164
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan? The company's anti-corruption programs and procedures	303-304, 508
 C.1.6	Bagaimana hak-hak Kreditor terlindungi? How are creditors' rights protected?	N.A
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section outlining its efforts on environmental, economic, and social issues?	592-596
 C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka In cases where stakeholders' interests are protected by law, stakeholders must be given the opportunity to obtain effective remedies for violations of their rights	
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detail melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka? Does the company provide detailed contact information through its website or Annual Report, enabling stakeholders (such as customers, suppliers, communities, etc.) to submit issues and/or complaints regarding potential violations of their rights?	84, 498-504
 C.3	Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan Mechanisms for employee participation should be developed	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerjanya? Does the company explicitly disclose policies and practices related to the health, safety, and welfare of its employees?	SR: 174-178, 198-206
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerjanya? Does the company disclose policies and practices regarding employee training and development programs?	SR: 174, 180-184
 C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek? Does the company have a remuneration/compensation policy that takes into account not only short-term corporate performance?	SR: 185, 186-188, 190-191
 C.4	Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut Stakeholders, including employees both individually and through their representatives, must be able to freely communicate concerns about illegal or unethical practices to the Board of Directors, and their rights must not be compromised for doing so	SR: 191-192
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan? Does the company have a whistleblowing policy that includes complaint procedures for employees and other stakeholders regarding alleged illegal and unethical conduct, and provides contact details via the company website or Annual Report?	498-505
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan? Does the company have policies or procedures to protect employees who report illegal or unethical behavior from retaliation?	504
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	482-485
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan Ownership Structure Transparency	39

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? Does the ownership information disclose the identity of beneficial owners holding 5% or more of shares?	39, 147-148
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas? Does the company disclose direct and indirect ownership by majority shareholders?	39, 147-148
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/ tidak langsung? Does the company disclose share ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners, both direct and indirect?	148
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/ tidak langsung? Does the company disclose share ownership by Senior Management, both direct and indirect?	148
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (joint ventures) dan special purpose enterprises? Does the company disclose details of the parent company, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose entities?	120-121
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Annual Report Quality	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini Does the company's Annual Report disclose the following:	
D.2.1	Tujuan perusahaan The company's objectives	87, 92-93
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	30-35
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	36-37
D.2.4	Kebijakan Dividen Dividend policy	244-245
D.2.5	Detail biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Biographical details (minimum age, educational qualifications, date of first appointment, relevant experience, and positions in other public companies) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners	121-127, 128-130
D.2.6	Detail kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Attendance details of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners at Board meetings and/ or Board of Commissioners meetings	337-338, 363
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Total remuneration of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners	383-385, 386 386,387
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Governance Confirmation Statement	
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah? Does the Annual Report include a statement confirming the company's compliance with corporate governance, and if there are any violations, have these been identified and explanations provided for each issue?	284-290
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait Related Party Transaction Disclosures	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material? Does the company disclose its policy regarding the review and approval of material related party transactions?	249
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material? Does the company disclose the name, relationship, nature, and value of each material related party transaction?	250-252
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan Directors and Commissioners conducting transactions in the company's shares	N.A
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan transaksi saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose share transactions conducted by insiders?	N.A
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor External Auditor and Auditor's Report	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit If the company appoints the same Public Accounting Firm for both audit and non-audit services	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	456-458
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Do the non-audit fees exceed the audit fees?	456-458
D.6	Media Komunikasi Communication Media	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi? Does the company use the following media for communication?	
D.6.1	Laporan Triwulan Quarterly Reports	482-484
D.6.2	Situs Web perusahaan Company Website	157, 482-484
D.6.3	Analyst meeting	N.A
D.6.4	Media briefings	482-484
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan Schedule for Issuance of Annual/Financial Reports	
D.7.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? Is the audited Annual Financial Report issued within 120 days from the end of the fiscal year?	N.A
D.7.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? Is the Annual Report issued within 120 days from the end of the fiscal year?	N.A
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan. Has a statement confirming that the Annual Financial Report has been presented fairly and accurately been affirmed by the Board of Commissioners or Directors and/or relevant company officials?	80 & 81
D.8	Situs Web perusahaan Company Website	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the company have a website that discloses up-to-date information on the following:	
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir) Financial Reports (latest quarterly)	483
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media Materials presented in analyst and media briefings	483
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh Downloadable Annual Reports	483
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB Notices of AGM and/or EGM	483
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of the AGM and/or EGM	N.A
D.8.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan) Company constitution (laws, articles, and bylaws)	N.A
D.9	Hubungan Investor Investor Relations	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer/institution responsible for investor relations?	84-85
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas Clear Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners and Corporate Governance	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/Dewan Komisaris? Does the company disclose its Corporate Governance policies/Charter of the Board of Directors/Board of Commissioners?	157, 332, 348
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring approval from the Board of Directors/Board of Commissioners disclosed?	361-362
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan? Are the roles and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners clearly stated?	333-334, 349-360
	Visi/Misi perusahaan Company Vision/Mission	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan? Does the company have an updated Vision and Mission statement?	92-93
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun? Does the Board of Directors play a key role in the process of developing and reviewing the company's strategy on an annual basis?	69-70 166-168
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? Does the Board of Directors have a process in place to review, monitor, and oversee the implementation of the company's strategy?	70
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Structure of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku Code of Ethics or Code of Conduct	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	485-494
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik? Are all Directors/Commissioners, Senior Management, and employees required to comply with the code of ethics?	494
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process in place to implement and monitor compliance with the code of ethics or conduct?	494-495
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Structure and Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners	
E.2.4	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris? Does the composition of Independent Directors/Commissioners constitute at least 50% of the total members of the Board of Directors/Board of Commissioners?	331-332
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya? Does the company have a term limit of nine years or less, or a maximum of two five-year terms for its Independent Directors/Commissioners?	332
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris independen/non-Eksekutif? Has the company set a limit of five concurrent directorships/commissioner roles in public companies for any Independent/Non-Executive Director or Commissioner?	N.A
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain? Does the company have any Executive Director serving in more than two positions as Director or Commissioner in other public companies?	N.A
	Komite Nominasi Nomination Committee	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nomination Committee?	399
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? Is the Nomination Committee comprised mostly of Independent Directors/Commissioners?	402
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris Independen? Is the Chairperson of the Nomination Committee an Independent Director/Commissioner?	402
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nomination Committee?	400-402

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the attendance record of Nomination Committee meetings disclosed, and if so, did the Nomination Committee meet at least twice during the year?	408
	Komite Remunerasi Remuneration Committee	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	399
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? Is the Remuneration Committee comprised mostly of Independent Directors/Commissioners?	402
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen Is the Chairperson of the Remuneration Committee an Independent Director/Commissioner?	402
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	400-402
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the attendance record of Remuneration Committee meetings disclosed, and if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	408
	Komite Audit Audit Committee	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the Audit Committee composed entirely of Non-Executive Directors/Commissioners, with a majority being Independent Directors/Commissioners?	389
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the Chairperson of the Audit Committee an Independent Director/Commissioner?	392
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	390
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one Independent Director/Commissioner on the committee have accounting expertise (qualifications or experience in accounting)?	392-394
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun? Is the attendance record of Audit Committee meetings disclosed, and if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	396
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal? Is the Audit Committee primarily responsible for recommending the appointment and removal of the External Auditor?	390-391
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris Board of Directors / Board of Commissioners Processes	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Meetings and Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku? Are Board of Directors meetings scheduled before the start of the financial year?	336-337, 362-363
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun? Do the Board of Directors and/or Board of Commissioners hold meetings at least six times a year?	336, 362-363
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun? Does each Director/Commissioner attend at least 75% of all Board meetings held during the year?	337, 363
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris? Does the company require a minimum quorum of at least two-thirds of the members present for decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners to be valid?	336, 362

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif? Do the company's Non-Executive Directors/Commissioners hold separate meetings at least once a year without the presence of Executive Directors?	N.A
	Akses ke Informasi Access to Information	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat? Are Board meeting materials provided to Board members no later than five working days before the meeting?	N.A
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the Corporate Secretary play an important role in supporting the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out their responsibilities?	428, 431-433
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan? Is the Corporate Secretary trained in legal practice, accounting, or corporate secretarial duties and does the secretary stay up to date with relevant developments?	136, 434
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Appointment and Reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new Directors/Commissioners?	329-330, 346
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? Does the company outline the process followed in appointing new Directors/Commissioners?	330, 346-347
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing- masing 5 tahun ? Are all Directors/Commissioners subject to reappointment every three years, or every five years for companies listed in jurisdictions with regulations setting a five-year term? Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011 A five-year term has been required under laws applicable since the launch of ACGS in 2011	330, 347
	Perihal Remunerasi Remuneration	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration policy/practices (including salary, benefits, allowances, and other compensation) (e.g., the use of short-term and long-term incentives and performance metrics) for Executive Directors and the CEO?	N.A
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif? 388-389 Is the remuneration structure for Non-Executive Directors/Commissioners disclosed?	383-384
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior? Are Executive Directors' and/or Senior Executives' remuneration approved by shareholders or the Board of Directors?	N.A
E.3.10	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan? Does the company apply measurable standards to align performance-based remuneration of Executive Directors and Senior Executives with the company's long-term interests, such as clawback provisions and deferred bonuses?	N.A
	Audit Internal Internal Audit	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah? Does the company have a separate Internal Audit function?	439, 441-442
E.3.17	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di outsource, apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan? Is the Head of Internal Audit identified or, if outsourced, is the name of the external provider disclosed?	440
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and dismissal of the Internal Auditor require the approval of the Audit Committee?	439
	Pemantauan Risiko Risk Monitoring	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut? Does the company establish sound internal control procedures/a risk management framework and review the effectiveness of the framework periodically?	468, 473-474, 476-477
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko? Does the Annual Report/Corporate Governance Report disclose that the Board of Directors/Board of Commissioners has reviewed the company's material controls (including operational, financial, and compliance controls) and risk management systems?	448-453, 468
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)? Does the company disclose its material risk exposures (e.g., financial, operational including IT, environmental, social, and economic risks)?	473-475
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/ Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan? Does the Annual Report/Corporate Governance Report include a statement by the Board of Directors/Board of Commissioners or Audit Committee on the adequacy of the company's internal control and risk management systems?	477-478
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris President Director and Board of Commissioners	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? Are the positions of President Commissioner and CEO held by different individuals?	N.A
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen? Is the President Commissioner an Independent Commissioner?	331
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any member of the Board of Directors a former CEO of the company within the past two years?	N.A
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the President Commissioner disclosed?	333, 334
	Direktur Independen Senior Senior Independent Director	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the President Commissioner is not independent, has the Board of Directors and Board of Commissioners appointed a Senior Independent Director, and has the role been defined?	N.A
	Keahlian dan Kompetensi Skills and Competence	
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan? Does at least one Non-Executive Director/Commissioner have prior work experience in the company's primary industry of operations?	375-376
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Performance of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	Pengembangan Direksi Board Development	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru? Does the company have an orientation program for new Directors/Commissioners?	339-340, 364
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Does the company have a policy encouraging Directors/Commissioners to participate in ongoing or continuous professional education programs?	339, 363
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif Appointment and Performance of the CEO/Executive Management	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.5.3	<p>Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/Managing Director/Presiden Direktur dan Manajemen Senior?</p> <p>Does the company disclose the process by which the Board of Directors/Board of Commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President Director and Senior Management?</p>	N.A
E.5.4	<p>Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/ Presiden Direktur?</p> <p>Does the Board of Commissioners/Board of Directors conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President Director?</p>	N.A
<p>Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners</p>		
E.5.5	<p>Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?</p> <p>Does the company conduct an annual performance evaluation of the Board of Directors and Board of Commissioners and disclose the criteria and assessment process used?</p>	340-342 364-366
<p>Penilaian Direksi Assessment of Individual Directors and Commissioners</p>		
E.5.6	<p>Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/ Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?</p> <p>Does the company conduct an annual performance evaluation of each Director/Commissioner and disclose the criteria and assessment process used?</p>	342 366-373
<p>Penilaian Komite Assessment of Committees</p>		
E.5.7	<p>Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?</p> <p>Does the company conduct an annual performance evaluation of the Committees under the Board of Directors and Board of Commissioners and disclose the criteria and assessment process applied?</p>	398, 410, 423

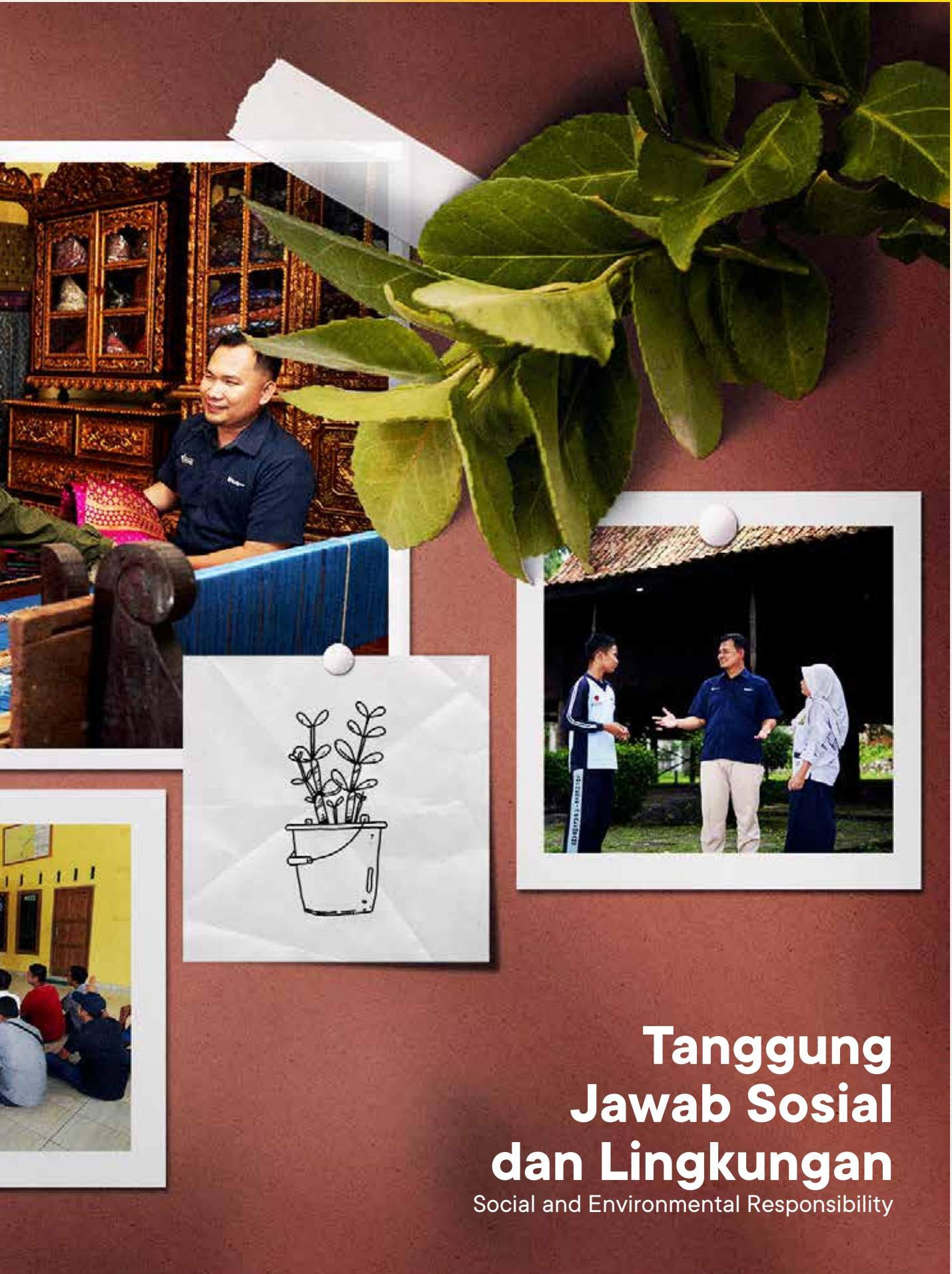
07



Dal
Pa
ent
tetapi juga memberi warna bagi masa dep
Warna di sini bukan sekadar simbol, tetap
mencerminkan peran aktif perusahaan dal
menciptakan perubahan positif, membangun
dan melahirkan generasi penerus yang siap
tantangan pertanian masa depan.



Social and Environmental



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud nyata dari komitmen Perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan, yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip GCG terkini sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat pada ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dampaknya dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis PUSRI dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs sekaligus menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sebagai pelaku manufaktur dalam industri pupuk dan kimia, kami menyadari bahwa kegiatan yang dijalankan memiliki dampak yang besar terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk bagi lingkungan hidup baik di sekitar lokasi pabrik maupun lingkungan hidup. Oleh karenanya, PUSRI menjalankan kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan dan mempersiapkan dengan seksama langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak operasional Perusahaan terhadap kondisi sosial maupun lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itu,

The Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program is a tangible manifestation of the Company's commitment to delivering added value to all stakeholders. It is implemented by upholding the latest Good Corporate Governance (GCG) principles, aiming to optimize benefits in the economic, social, and environmental sectors, with accountable impacts. This program is an integral part of PUSRI's business approach in supporting the achievement of sustainability goals aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), while also ensuring long-term business continuity.

As a manufacturing entity in the fertilizer and chemical industry, we are fully aware that our operations have significant impacts on all stakeholders, including the environment—both around the plant site and the broader ecosystem. Therefore, PUSRI carries out its operational activities with great care and preparation, particularly in implementing mitigation measures to address the Company's impact on surrounding social and environmental conditions. In line with this, PUSRI runs its TJSL program based on current best practices, applying an Environmental, Social, and



PUSRI menjalankan program TJSI dengan mengacu pada kaidah praktik terkini, yakni menerapkan pendekatan mitigasi lingkungan sosial dan tata kelola (Environment, Sosial & Government), dan melaporkan pada aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara berimbang dalam Laporan Keberlanjutan.

Informasi kegiatan PUSRI mengenai pelaksanaan program dan kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSI) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan 2024, yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan SEOJK 16/SEOJK.04/2021.

Penyajian secara terpisah tersebut dilakukan, selain dalam memenuhi ketentuan peraturan OJK tersebut, juga dimaksudkan agar masing-masing laporan dapat disajikan secara lebih ringkas, sehingga pembaca dapat lebih fokus pada masing-masing subjek bahasan yang disampaikan pada masing-masing Laporan. Namun demikian, perlu disampaikan bahwa informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan ini dan dalam Laporan Keberlanjutan 2024 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

Governance (ESG) approach, and provides balanced reporting on economic, environmental, and social aspects through its Sustainability Report.

Information regarding PUSRI's activities, implementation, and performance of the Social and Environmental Responsibility (TJSI) program is presented in the 2024 Sustainability Report, which is published as a separate document concurrently with this Annual Report, in accordance with the provisions of SEOJK 16/SEOJK.04/2021.

This separate presentation is intended not only to comply with the relevant OJK regulations but also to ensure that each report can be presented more concisely, allowing readers to focus more clearly on the respective topics covered. Nevertheless, it is important to note that the information presented in this Annual Report and the 2024 Sustainability Report are integral, interconnected, and mutually complementary.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Dalam rangka memberi gambaran ringkas mengenai kinerja dari berbagai program yang dijalankan dalam memitigasi dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial dari program-program yang diuraikan dalam Laporan Keberlanjutan, berikut disampaikan Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan.



SUSTAINABILITY PERFORMANCE SUMMARY

To provide a concise overview of the performance of various programs implemented to mitigate the economic, environmental, and social impacts described in the Sustainability Report, the following presents the Sustainability Performance Summary.

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Table of Economic Performance Highlights

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Total Volume Produksi Pupuk Urea Total Urea Fertilizer Production Volume	Ribu Ton Thousand Tons	1.857,83	2.010,28	1.993,68
Total Volume Produksi Pupuk NPK Total NPK Fertilizer Production Volume	Ribu Ton Thousand Tons	363,38	328,34	346,87
Total Volume Produksi Amoniak Total Ammonia Production Volume	Ribu Ton Thousand Tons	1.284,49	1.333,79	1.361,02
Total Volume Penjualan Pupuk Urea Total Urea Fertilizer Sales Volume	Ribu Ton Thousand Tons	1.883,78	1.874,15	1.952,45
Total Volume Penjualan Pupuk NPK Total NPK Fertilizer Sales Volume	Ribu Ton Thousand Tons	401,21	314,40	328,75
Total Volume Penjualan Amoniak Total Ammonia Sales Volume	Ribu Ton Thousand Tons	129,77	105,72	145,92
Total Pendapatan Usaha Total Operating Revenue	Rp Miliar Rp Billion	13.532,87	13.371,67	15.787,49
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp Miliar Rp Billion	1.068,54	1.199,86	2.654,64
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	Rp Miliar Rp Billion	711,73	1.149,82	2.923,43
Total Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Total Economic Value Generated	Rp Miliar Rp Billion	13.993,23	13.813,03	15.867,41
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Total Economic Value Distributed	Rp Miliar Rp Billion	12.115,11	12.523,03	11.819,24
Total Nilai Ekonomi yang Ditahan Total Economic Value Retained	Rp Miliar Rp Billion	1.878,12	1.290,00	4.048,17



Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan

Environmental Performance Highlights

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Penggunaan Gas Alam (Bahan baku dan bahan bakar) Use of Natural Gas (Raw material and fuel)	MMBTU	60.680.281,24	60.931.877,46	60.684.053,00
Penggunaan Air Water Consumption	M3	33.095.864,6	31.459.959,70	32.777.444,10
Penggunaan Batubara Coal Consumption	MMBTU	9.179.681,54	10.118.898,05	9.019.484,79
Intensitas energi rerata untuk produksi per ton amonia Average Energy Intensity per Ton of Ammonia Production	MMBTU/ton	36,71	36,19	35,69
	GJ/ton	38,73	38,18	37,66
Intensitas energi rerata untuk produksi per ton pupuk urea Average Energy Intensity per Ton of Urea Fertilizer Production	MMBTU/ton	31,07	29,84	28,88
	GJ/ton	32,78	31,48	30,47
Emisi GRK Cakupan 1 - Tier 2 GHG Emissions Scope 1 - Tier 2	Ton CO2 eq	1.700.079,44	1.772.946,47	1.694.059,20
Volume pembuangan air limbah Wastewater Discharge Volume	M3	1.281.905,00	1.091.142	1.080.196
Volume limbah B3 Hazardous Waste (B3) Volume	Ton	1.130,58	807,02	485,44
Penggunaan listrik Electricity Consumption	kWh	342.389.811,00	354.509.837,00	350.385.852,00
	GJ/ton	1.232.603,32	1.276.235,00	1.262.389,00
Penggunaan Bahan Bakar Gas Gas Fuel Consumption	MMBTU	14.745.056,53	13.569.485,10	13.337.881,13
	GJ	15.556.860,36	14.316.566,67	14.072.211,51
Reduksi emisi (cakupan 1) dari penggunaan BBM Emission Reduction (Scope 1) from Fuel Consumption	Ton CO2 eq	(155,72)	460,71	422,02
Penanganan dan Pengelolaan limbah B3 Hazardous Waste (B3) Handling and Management	Ton	(1.130,58)	(807,02)	(485,44)
Penambahan/(Pengurangan) Air Limbah Increase/(Decrease) in Wastewater Volume	M3	190.763	10.964	(35.291)
Pengaduan Masalah Lingkungan Environmental Complaints	Kasus/ Laporan Cases / Reports	10	12	13
Biaya Tanggung Jawab Sosial Aspek Lingkungan Hidup Environmental Responsibility Expenditures	Rp Juta Rp Million	8.444,00	7.175,00	8.401,00



Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Social Performance Highlights

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang Person	1.790	1.803	1.818
Tingkat turnover Turnover Rate	Persen Percent	1,62	0,89	1,65
Biaya Pendidikan dan Pelatih Education and Training Costs	Rp Miliar Rp Billion	25,47	23,28	18,87
Total Jam Pelatihan Total Training Hours	Jam Kerja Working Hours	130.624	133.104	147.560
Program Pendidikan dan pelatihan Education and Training Programs	Mandays	16.328	16.638	18.445
Jam Kerja Aman Safe Working Hours	Jam Hour	105.838.233	97.396.433,50	89.985.516,10
Biaya kegiatan TJSL BUMN State-Owned Enterprise TJSL Program Expenditures	Rp Miliar Rp Billion	28,60	29,00	18,21
Mitra Binaan Fostered Partners	Mitra Partner	301	322	379
Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	Rerata Skor Average Score	97,25	94,63	97,95
Fatalitas kerja Work-related Fatalities		Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil





SE OJK No. 16/SEOJK/04/2021 untuk Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

SE OJK No. 16/SEOJK/04/2021 for Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
UMUM General		
	<p>Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris</p> <p>The annual report is presented in proper and correct Indonesian and is also recommended to be provided in English</p>	✓
	<p>Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca</p> <p>The annual report is printed with good quality and uses a font type and size that are easy to read.</p>	✓
	<p>Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf</p> <p>The Annual Report presented in the form of an electronic document copy is the Annual Report converted into PDF format.</p>	✓
	<p>Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas</p> <p>The annual report clearly states the company's identity.</p> <p>Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:</p> <p>The company name and annual report year are displayed in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampul muka Front cover 2. Samping Spine 3. Sampul belakang Back cover 4. Setiap halaman Each page 	✓
	<p>Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir</p> <p>The annual report is displayed on the company's website, including the most recent annual report and at least the past four years.</p>	✓

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
----------------------	---------------------------	-----------------

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Summary of Key Financial Data

<p>Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:</p> <p>The Summary of Key Financial Data contains financial information presented in a comparative format over 3 (three) fiscal years or since the commencement of its business operations if the Issuer or Public Company has been operating for less than 3 (three) years, and must include at least the following:</p>	Informasi paling sedikit memuat antara lain: The information must include, at a minimum, the following:	30
	1) Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	30
	2) Laba bruto; Gross profit;	30
	3) Laba (rugi); Profit (loss);	30
	4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	30
	5) total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	30
	6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	30
	7) laba (rugi) per saham; Earnings (loss) per share;	30
	8) jumlah aset; Total assets;	33
	9) jumlah liabilitas; Total Liabilities;	33
	10) jumlah ekuitas; Total Equity;	33
	11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; Profit (loss) to total assets ratio;	35
	12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; Profit (loss) to equity ratio;	35
	13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; Profit (loss) to revenue/sales ratio;	35
	14) rasio lancar; Current ratio;	35
	15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; Liabilities to equity ratio;	35
	16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Liabilities to total assets ratio; and	35
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya; Other financial information and ratios relevant to the Issuer or Public Company and its industry type.	35	





INFORMASI SAHAM

Share Information








	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain:	
	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:	39
	Jumlah saham yang beredar; Number of outstanding shares;	39
	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed;	39
	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	39
	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	39
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	39

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding:	39
	Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; The date of implementation of the corporate action;	39
	Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	39
	Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; Number of outstanding shares before and after the corporate action;	39
	Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan Number of conversion effects executed (if any); and	39
	Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; Share prices before and after corporate actions;	39
	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained; and	39
	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting).	39
	Informasi memuat: Information contained:	
	Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;	40
	Tingkat bunga/imbalan; Interest rate/yield;	40
	Tanggal jatuh tempo; dan Due date; and	40
	Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.	40
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on bonds, sukuk or convertible bonds that were still outstanding in the last 2 (two) financial years.	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. Note: if the company did not have bonds/sukuk/convertible bonds, it had to be disclosed.	40







Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The report of the Board of Commissioners should at least contain a brief description about:	
	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	55
	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	59-61
	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	57
	Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.	59
Laporan Direksi Board of Directors' Report	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:	
	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:	
	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies;	69-70
	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	70
	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	69-70
	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and	71-72
	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; Constraints faced by Issuers or Public Companies;	72
	Perkembangan perekonomian dan target pasar; Economic development and target market;	66-68
	Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.	75-76, 140-146
	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan Description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	77-78
Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	73-75	
Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.	76	

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Memuat hal-hal sebagai berikut: Contains the following:	
	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; Signatures are written on a separate sheet;	✓
 Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; Statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully accountable for the validity of the contents of the annual report;	80-81
	Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by mentioning their names and positions; and	80-81
	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. A written explanation in a separate letter from the concerned person in the event that there are members of the Board of Commissioners or Board of Directors who do not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from other members in the event that there is no written explanation from the concerned person.	N.A
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
 Nama dan alamat lengkap perusahaan Company name and full address	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	85
	Alamat; Address;	85
	Nomor telepon; Telephone number;	85
	Alamat surat elektronik; dan Electronic mail address; and	85
	Alamat situs web; Website address;	85
 Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Brief history of the Issuer or Public Company	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.	87-91
	Catatan Note: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan if the company had never changed its name, it should be disclosed.	84
 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: It included:	
	Visi perusahaan; Company vision;	92
	Misi perusahaan; Company mission;	92
	Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan Information that the vision and mission had been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners for the financial year; and	93
	Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan. A statement regarding the corporate culture of the Company.	93
Bidang usaha Business fields	Uraian mengenai antara lain: It described:	
	Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; The company's business activities according to the latest articles of association;	97-99
	Kegiatan usaha yang dijalankan; dan Business activities carried out; and	99
	Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Products and/or services produced.	100-110
Wilayah Operasional Operational Area	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area was the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	112-115










Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Struktur Organisasi Organizational structure	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	118-119
Keanggotaan Asosiasi Association Member	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	121
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least contained:	
	Nama dan jabatan; Name and position;	122-127
	Foto terbaru; Recent photos;	122-127
	Usia; Age;	122-127
	Kewarganegaraan; Citizenship;	122-127
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational history and/or certification;	122-127
	Riwayat jabatan, meliputi informasi; Position history, including information on:	122-127
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	122-127
	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	122-127
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed;	122-127
Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	122-127	
Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter;	122-127	
Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and	334	
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed;	59, 121	


Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
       Profil Direksi Board of Directors Profile	Profil Direksi, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Directors, at least contained:	128-130
	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; Name and position in accordance with the duties and responsibilities;	128-130
	Foto terbaru; Recent photos;	128-130
	Usia; Age;	128-130
	Kewarganegaraan; Citizenship;	128-130
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational history and/or certification;	128-130
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	128-130
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	128-130
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and	128-130
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	128-130
	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and	128-130
	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed;	76, 128
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan Number of employees and data on employee competency development.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contracted) in the financial year;	140-147
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information could be presented in tabular form.	✔

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding:	
	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	148
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed;	148
	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	148
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	148
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	148
	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:	
	Kepemilikan institusi lokal; Ownership of local institutions;	148
	Kepemilikan institusi asing; Ownership of foreign institutions;	148
	Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and	148
	Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	148
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel The above information could be presented in tabular form.	148	
Pemegang saham utama dan pengendali Major and controlling shareholders	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	148
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiaries and/or associated entities	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company.	149-150
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	85
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of the subsidiary and/or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: It contained information including:	
	Nama dan alamat entitas anak; dan Name and address of the subsidiary; and	149-150
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Name and address of branch/representative office.	85
	Catatan: Note: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. if the company did not have a subsidiary, branch office, and representative office, it should be disclosed.	149-150

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Struktur grup perusahaan Company group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV) Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	120
 Kronologi pencatatan saham Share listing chronology	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	156
 Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of the financial year.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbil hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information that had not matured in the financial year at least included the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	156
 Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included:		
	Nama dan alamat; Name and address;	156
	Periode penugasan; Assignment period;	156
 Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided;	156
	Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and	156
	Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. In the event that AP and KAP and their networks/ associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed.	156
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.	156
 Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang Name and address of supporting institutions and/or professions	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	156
 Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/ atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards received in the last financial year and/or certifications that are still valid in the last financial year both on a national and international scale	Informasi memuat antara lain: It contained nformation in the following:	
	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; Name of award and/or certification;	12-23
	Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; Year of award and/or certification;	12-23
	Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan The awarding and/or certification body; and	12-23
	Masa berlaku (untuk sertifikasi) Validity period (for certification).	20-23

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE		
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
	Penjelasan masing-masing segmen usaha. Explanation of each business segment.	190, 201, 205
	Kinerja per segmen usaha, antara lain: Performance per business segment, including:	
	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, which includes the process, capacity, and development;	187, 186, 191, 201
	Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Increase/decrease in production capacity;	186, 191, 201
	Penjualan/pendapatan usaha; dan Sales/operating income; and	196, 202
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance	Profitabilitas Profitability	200, 204
	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: Financial performance analysis which included a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of an increase/ decrease in an account (in the form of narratives and tables), including regarding:	
	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets;	207-212
	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;	212-216
	Ekuitas; Equity;	216-217
	Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; Sales/operating income, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period;	218-227
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis of abilities To pay debts and the collectibility level of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry	Arus kas; Cash flow;	228-234
	Penjelasan tentang: Explanation of:	
	Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan Ability to pay debts, both short term and long term and	235-236
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and management of capital structure policy	Tingkat kolektibilitas piutang. The level of collectibility of receivables	235
	Penjelasan atas: The explanation consisted of:	
	Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan Details of the capital structure consisting of interest-based debt/ sukuk and equity; and	237
	Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan Management policies on capital structure (capital structure policies); and	237
	Dasar pemilihan kebijakan manajemen Basis for selecting management policy	237

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
 Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year  	Penjelasan tentang: It explained:	
	Nama pihak yang melakukan ikatan; The name of the party making the bond;	238-240
	Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of the bond;	238-240
	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut; The expected source of funds to fulfill these commitments;	238-240
	Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency to be denominated; and	238-240
	Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position.	238-240
	Catatan Note: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. if the company did not have a commitment related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.	
 Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year 	Penjelasan tentang: It explained:	
	Jenis investasi barang modal; Types of investment in capital goods;	240
	Tujuan investasi barang modal; dan The purpose of investment in capital goods; and	240
	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. The investment value of capital goods issued in the last financial year.	240
	Catatan Note: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. if there was no realization of capital goods investment, it should be disclosed.	
 Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year. 	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding:	
	Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	242
	Laba (rugi); Profit (loss);	242
	Struktur modal (capital structure); Capital structure;	237
	Pemasaran; Marketing;	242
	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	243
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/ projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year.	
	Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	243
	Laba (rugi); Profit (loss);	243
	Struktur modal (capital structure); Capital structure;	243
	Kebijakan dividen; Dividend Policy;	244-245
	Pemasaran; Marketing;	242
Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	245	
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts occurring after the date of the accountant's report	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.	240
	Catatan Note: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan. if there was no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.	
Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description of the company's business prospects	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	178-183

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian tentang aspek pemasaran Description of the marketing aspect	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	169-177
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) financial years	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least:	245
	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income;	244-245
	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	245
	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); Total dividends per share (cash and/or non-cash);	245
	Jumlah dividen per tahun yang dibayar. The amount of dividends per year paid	245
	Catatan Note: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. if there was no dividend payment in last two consecutive years, the reasons should be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company was still required to submit a report on the realization of the use of funds)	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	
	Total perolehan dana; Total proceeds;	247
	Rencana penggunaan dana; Plan for the use of funds;	247
	Rincian penggunaan dana; Details of the use of funds;	247
	Saldo dana; dan Fund balance; and	247
	Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).	247
	Catatan Note: dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. if the company did not have information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.	247








Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
      	Memuat uraian mengenai: Contains a description of:	
	Tanggal, nilai, dan objek transaksi; Transaction date, value, and object;	N.A
	Nama pihak yang melakukan transaksi; Name of the party conducting the transaction;	250-251
	Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any);	N.A
	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction;	248
	Pemenuhan ketentuan terkait; Fulfillment of related provisions;	248-249
	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi; In the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number 1) to number 5), the Issuer or Public Company also disclosed information:	248
	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and	248
	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle;	248
	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku	Material information (if any), including but not limited to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions that occurred during the fiscal year.
Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. For affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added.	248	
Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	248	
Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that there was no affiliated transaction and/ or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.	248	

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	
	Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan The name of the legislation undergoing changes; and	252-254
	Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.	252-254
	Catatan Note: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. if there were no changes to the laws and regulations in the last financial year, the matters should be disclosed.	✔
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir A description of the changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	
	Perubahan kebijakan akuntansi; Changes in accounting policies;	254
	Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan Reasons for changes in accounting policies; and	254
	Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Quantitative impact on financial statement	254








TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE








Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included:	
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and	310-319
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	319-326
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed	308

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
   Direksi Directors    	<p>Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors</p> <p>Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.</p>	352-360
	<p>Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; A statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors;</p>	348-349
	<p>Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form</p>	362-363
	<p>Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors:</p>	131, 132-134, 363
	<p>Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and</p>	363-364
	<p>Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);</p>	132-134
	<p>Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:</p>	N.A
	<p>prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and</p>	N.A
	<p>kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and</p>	N.A
	<p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.</p>	374






Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	333
	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners;	332
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	336-338
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners;	131-132
	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	339-340
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);	131-132
	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat; Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
	prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; performance appraisal implementation procedures;	340, 373
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	341, 365-373
	pihak yang melakukan penilaian; dan the party conducting the assessment; and	341, 364
	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi; The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:	
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	342- 343, 398, 410,423
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	342- 343, 398,410, 423
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat; At least it contained:	
	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	378-379
	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain; Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:	
	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	380-381
	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	383-385
	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	383
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	✓

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
       Komite audit Audit committee	Paling sedikit memuat: At least it contained:	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	392-394
	Usia; Age;	392-394
	Kewarganegaraan; Nationality;	392-394
	Riwayat pendidikan; Educational history;	392-394
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	392-394
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	392-394
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	392-394
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	392-394
	Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and term of office of audit committee members;	392-394
	Pernyataan independensi komite audit; Statement of independence of the audit committee;	395
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	135
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and	396
	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; Implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	396-398

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Komite SDM, Nominasi dan Remunerasi Committee HRD Nomination and Remuneration	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	121-127,403-406
	Usia; Age;	121-127,403-406
	Kewarganegaraan; Nationality;	121-127,403-406
	Riwayat pendidikan; Educational history;	121-127,403-406
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	121-127,403-406
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	121-127,403-406
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	121-127,403-406
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	121-127,403-406
	Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of audit committee members;	121-127,403-406
	Pernyataan independensi komite; Statement of independence of the audit committee;	399-400
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	131-132, 408
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	400-402
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); A statement of having a guideline or charter (charter);	400
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of meeting frequency and attendance rate of members at such meetings;	408
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan A brief description of the implementation of activities in the financial year; and	409
dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 9) sampai dengan huruf 12) dan mengungkapkan: Brief description of activities carried out during the fiscal year; and in the event that a nomination and remuneration committee is not established, the Issuer or Public Company must disclose the information referred to in items 9) through 12) and include the following:	N.A	
alasan tidak dibentuknya komite; dan the reason for not establishing the committee; and	N.A	
pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi the party responsible for carrying out the nomination and remuneration functions.	N.A	

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
      	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	125, 416-418
	Usia; Age;	125, 416-418
	Kewarganegaraan; Nationality;	125, 416-418
	Riwayat pendidikan; Educational history;	125, 416-418
	Riwayat jabatan, meliputi informasi; Position history, including information on:	125, 416-418
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	125, 416-418
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	125, 416-418
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	125, 416-418
	Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of audit committee members;	125, 416-418
	Pernyataan independensi komite; Statement of independence of the audit committee;	419
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	136, 420
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	414-415
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); A statement of having a guideline or charter (charter);	413-414
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	420
Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	420-422	
Komite Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama; Name;	434
	Domisili; Domicile;	434
	Riwayat jabatan, meliputi; Position history, including;	434
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as company secretary; and	434
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	434
	Riwayat pendidikan; Educational history;	434
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and	136, . 435
	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;	435-438
	Sekretaris perusahaan Company secretary	

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama kepala unit audit internal; Name of the head of the internal audit unit;	440
	Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	440
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as company secretary; and	440
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	440
	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Qualification or certification as an internal audit profession (if any);	443-444
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement that was followed in the financial year;	137, 443-444
	Struktur dan kedudukan unit audit internal; The structure and position of the internal audit unit;	441-442
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	440-441
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan A statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and	440-441
Akuntan Publik Public Accountant	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;	446-447
	Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years	457-458
	Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Name and year of the Public Accounting Firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;	457-458
	Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and	457-458
	Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants other than auditing services for annual financial statements in the last financial year.	457-458
Catatan Note: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. if there was no other service, it should be disclosed	N.A	
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik, A description of the internal control system implemented by the issuer or public company,	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	448-449
	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an Review of the effectiveness of the internal control system; and	449-450
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	452

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
 Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik The risk management system implemented by the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan; At least explained	
	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	468
	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Types of risks and how to manage them;	473-477
	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan Overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and	477-478
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	478
 Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada); Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any).	Pokok perkara/gugatan; Principal case/lawsuit;	480
	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan Status of settlement of cases/claims; and	480
 Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; The effect on the condition of the issuer or public company;		480
 Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada) Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		480-481
 Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		482-484





Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan; At least explained	
	Pokok-pokok kode etik; The points of the code of ethic	486-494
	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; Disclosure that the code of ethics applied to all levels of the organization;	494
	Penyebarluasan kode etik; Dissemination of the code of ethics;	494-495
	Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan Sanctions for each type of violation stipulated in the code of ethics (normative); and	486-494, 495
	Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.	495-496
	Catatan Note: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed.	N.A
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen management stock ownership program/msop) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop);	Paling sedikit menjelaskan; At least explained	
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/ MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ESOP), maka dijelaskan A brief description of the policy of providing long-term performance- based compensation to management and/ or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP), then explained:	386, 388
	Jumlah saham dan/atau opsi; Number of shares and/or options;	N.A
	Jangka waktu pelaksanaan; Exercise period;	N.A
	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Eligibility requirements for employees and/or management; and	N.A
Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. Exercise price or the basis for determining the exercise price.	N.A	
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi Brief description of Information disclosure policy	Paling sedikit menjelaskan; At least explained	
	Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and	481
	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the policy;	481, 482-484

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
 <p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company</p>	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Cara penyampaian laporan pelanggaran; How to submit a violation report;	502-503
	Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistleblowers;	503
	Penanganan pengaduan; Handling of complaints;	505
	Pihak yang mengelola pengaduan; dan The party managing the complaint; and	505-506
	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: The results of the handling of complaints, at least:	
	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed in the financial year; and	506
	Tindak lanjut pengaduan; Follow-up on complaints;	506
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.	N.A
 <p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy</p>	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and	507-508
	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies;	508
 <p>Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies</p>	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement of recommendations that had been implemented; and/or	N.A
	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	N.A
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	N.A
 <p>Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Implementation Assessment for the financial year 2020 which included at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors</p>	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian Criteria used in the assessment	295-297
	Pihak yang melakukan penilaian The party conducting the assessment	296
	Skor penilaian masing-masing kriteria The assessment score of each criterion	297-302
	Rekomendasi hasil penilaian Recommended assessment results	297-302
	Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Reasons for not yet/not implemented recommendations.	297-302

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
<p>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF THE ISSUER OR PUBLIC COMPANY</p>		
	<p>1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; <p>1. The information disclosed under the section on social and environmental responsibility constitutes the Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and must at least include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) an explanation of the sustainability strategy; b) a summary of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c) a brief profile of the Issuer or Public Company; d) a statement from the Board of Directors; e) sustainability governance; f) sustainability performance; g) a written verification from an independent party, if any; h) a feedback sheet for readers, if any; and i) the Issuer's or Public Company's response to the previous year's report feedback. 	592-593
	<p>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;</p> <p>The Sustainability Report as referred to in point 1), must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority;</p>	✓
	<p>Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;</p> <p>The Sustainability Report referred to in point 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies, as set forth in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</p>	✓
	<p>Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.</p> <p>The Sustainability Report as referred to in point 1) is an integral part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report. If the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed therein must: contain all information as referred to in point 1); and be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies, as set forth in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter; state in the social and environmental responsibility section that the information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and be submitted simultaneously with the submission of the Annual Report.</p>	✓

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Informasi Keuangan Financial Information		
 Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.	670
 Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on financial statements		671-673
 Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor in Opinion	Deskripsi memuat tentang: The description contained about:	
	Nama dan tanda tangan; Name and signature;	673
	Tanggal Laporan Audit; dan Date of the Audit Report;	
 Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. KAP license number and Public Accountant license number.	671
	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: It completely contained the elements of the financial statements:	
 Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Laporan posisi keuangan; Statement of financial position;	674-676
	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; Statement of profit or loss and other comprehensive income;	677
	Laporan perubahan ekuitas; Statement of changes in equity;	678
	Laporan arus kas; Cash flow statement;	679
	Catatan atas laporan keuangan; Notes to financial statements;	680-760
 Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability level comparison	Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan Comparative information about the previous period; and	N.A
	Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membunyikan kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	N.A
 Laporan Arus Kas Cash flow statement	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	N.A
	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: It should meet the following conditions:	
	Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing;	679
	Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; Using the direct method to report cash flows from operating activities;	683
	Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and	683
	Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Disclosure of non- cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	759

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Overview	Meliputi sekurang-kurangnya: It included at least:	
	Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; Statement of compliance with SAK;	682
	Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; Basis of measurement and preparation of financial statements;	682-683
	Pajak penghasilan; Income tax;	708-709
	Imbalan kerja; dan Work benefits; and	699-701
	Instrumen Keuangan. Financial Instruments.	689-692
Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:	
	Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; Name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party	745
	Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan Transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses; and	746-748
	Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.	250-251, 746-748
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosures related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	
	Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden;	730
	Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;	730
	Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; A statement that the reconciled Taxable Profit (LKP) was used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return;	730
	Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount was not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of position. finance; and	731
	Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.	732
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosures relating to fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	
	Metode penyusutan yang digunakan; The depreciation method used;	696-698
	Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya; A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model;	715
	Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model); and	696, 715
	Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangandan reklasifikasi. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.	723-725

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
 Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosures relating to operating segments	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	
	Informasi umum meliputi faktor-faktor penetapan segmen usaha General information covering the factors used to identify the reported segments;	N.A
	Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; Information on the reported segment's profit or loss, assets and liabilities;	N.A
	Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment elements to the related amounts within the entity; and	N.A
	Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Disclosure at the entity level, which included information about products and/or services, geographic areas and key customers.	N.A
	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	N.A
 Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures relating to Financial Instruments	Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; Details of financial instruments owned based on their classification;	N.A
	Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments;	N.A
	Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;	N.A
	Kebijakan manajemen risiko; dan Risk management policy; and	751
	Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively	755-756
 Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan The date on which the financial statements were authorized for issue; and	760
	Pihak yang memerintahkan penerbitan dan penanda tangan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian The party that authorized the issuance and signing of the Consolidated Audited Financial Statements	760





Indeks ARA – 2023 – 2024 – Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2024

ARA Index – 2023–2024 – PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Annual Report 2024



No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
1.	A.1.1	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Content	3, 10-596	
2.	A.1.1.1	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Audited Annual Financial Statements	669-766	
3.	A.1.1.2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statement Letter from the Board of Directors and Board of Commissioners Regarding Responsibility for the Annual Report	80-81	
4.	A.1.2.0	INFORMASI KEUANGAN yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3(tiga) tahun FINANCIAL INFORMATION presented in a comparative format for the last 3 (three) financial years, or since the commencement of business operations if the Company has been operating for less than 3 (three) years	30-33	
5.	A.1.2.1	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Return on Assets (ROA)	35	
6.	A.1.2.2	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Return on Equity (ROE)	35	
7.	A.1.2.3	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Net Profit Margin	35	Imbal Hasil Aktiva (ROA), Imbal Hasil Ekuitas (ROE), dan Margin Bunga Bersih (NIM) (Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan lazim digunakan pada perusahaan non keuangan, tetapi tidak lazim digunakan di perusahaan keuangan seperti perbankan. Di perbankan mengukurnya melihat dari ROA, ROE, dan atau Net interest margin (NIM)). Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM) (The Profit (Loss) to Revenue/Sales Ratio is commonly used for non-financial companies but is not typically used for financial institutions such as banks. In the banking sector, performance is generally measured using ROA, ROE, and/or Net Interest Margin (NIM).)
8.	A.1.2.4	Rasio lancar Current Ratio	35	Liquid Coverage Ratio (LCR)

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
9.	A.1.2.5	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liabilities to Equity Ratio	35	
10.	A.1.2.6	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Liabilities to Total Assets Ratio	35	
11.	A.1.2.7	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Other financial information and ratios relevant to the Company and its industry.	35	
12.	A.1.3	INFORMASI SAHAM (Jika ada) STOCK INFORMATION (If applicable)	39	
13.	A.1.3.1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2(dua) tahun buku terakhir. Shares issued for each quarterly period, presented in a comparative format for the last 2 (two) financial years.	39	
14.	A.1.3.1.a	Jumlah saham yang beredar Total Outstanding Shares	39	
15.	A.1.3.1.b	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Market capitalization based on the share price on the stock exchange where the shares are listed.	39	
16.	A.1.3.1.c	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Highest, lowest, and closing share prices based on the prices on the stock exchange where the shares are listed.	39	
17.	A.1.3.1.d	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	39	
18.	A.1.3.2	Dalam hal terjadi AKSI KORPORASI yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal In the event of a corporate action resulting in changes to shares, such as stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, changes in par value, issuance of convertible securities, as well as capital increases or reductions.	39	
19.	A.1.3.3	Dalam hal terjadi PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PEMBATALAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham(suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares during the financial year, the reasons for the suspension and/or delisting must be disclosed.	39	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
20	A.1.3.4	<p>Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham(suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension)dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut</p> <p>If the temporary suspension of share trading (suspension) as referred to in point 3) and/or the delisting process is still ongoing at the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the suspension and/or delisting must be disclosed.</p>	39	
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT				
A.1.4.1		<p>Kinerja Perusahaan</p> <p>Company Performance</p>	71-72	
A.1.4.1. a		<p>Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan</p> <p>Company Strategy and Strategic Policies</p>	69-70	
A.1.4.1. b		<p>Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan</p> <p>The Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategy and Strategic Policies</p>	70	
A.1.4.1.c		<p>Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi</p> <p>Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation</p>	69-70	
A.1.4.1.d		<p>Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan</p> <p>Comparison Between Actual Results and the Company's Targets</p>	71-72	
A.1.4.1.e		<p>Kendala yang dihadapi</p> <p>Challenges Faced</p>	72	
A.1.4.2		<p>Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan</p> <p>Overview of the Company's Business Outlook</p>	77-78	
A.1.4.3		<p>Penerapan governansi Perusahaan</p> <p>Implementation of Corporate Governance</p>	73-75	
A.1.5 LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT				
A.1.5.1		<p>Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan</p> <p>Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Company, including the Board of Commissioners' oversight of the formulation and implementation of the Company's strategy</p>	55	
A.1.5.2		<p>Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi</p> <p>Views on the Company's business outlook as prepared by the Board of Directors</p>	59-61	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.5.3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan Views on the implementation of the Company's corporate governance	27	
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE				
	A.1.6.1	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Access to the Company, including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Company	85	
	A.1.6.1.a	Alamat Address	85	
	A.1.6.1. b	Nomor telepon Telephone number	85	
	A.1.6.1.c	Alamat surat elektronik Email address	85	
	A.1.6.1. d	Alamat situs web Website address	85	
	A.1.6.2	Riwayat singkat Perusahaan Brief Company history	87-91	
	A.1.6.3	VISI DAN MISI Perusahaan serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; VISION AND MISSION of the Company, as well as corporate culture or company values;	92	
	A.1.6.4	KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION, business activities conducted during the financial year, and types of goods and/or services produced;	97-99, 100-110	
	A.1.6.5	WILAYAH OPERASIONAL Perusahaan. wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan COMPANY OPERATIONAL AREAS. Operational areas refer to the regions or locations where the Company's operational activities are conducted or the scope of the Company's operations;	112-115	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.6.6	<p>STRUKTUR ORGANISASI Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan</p> <p>COMPANY ORGANIZATIONAL STRUCTURE presented in a chart form, at least down to one level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, along with names and positions;</p>	118-119	
	A.1.6.7	<p>DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan</p> <p>LIST OF INDUSTRY ASSOCIATION MEMBERSHIPS, both national and international, related to the implementation of sustainable finance;</p>	121	
	A.1.6.8	<p>JUMLAH KARYAWAN menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel</p> <p>NUMBER OF EMPLOYEES categorized by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) during the financial year; disclosure can be presented in table format;</p>	140-147	
	A.1.6.9	<p>INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) beserta jaringan / asosiasi / aliansinya meliputi:</p> <p>Information on the Use of Public Accountant Services (PA) and Public Accounting Firms (PAFs) including their networks/associations/alliances, covering:</p>		
	A.1.6.9.a	<p>Nama dan alamat</p> <p>Name and address</p>	156	
	A.1.6.9.b	<p>Periode penugasan</p> <p>Assignment period</p>	156	
	A.1.6.9.c	<p>Informasi jasa audit yang diberikan</p> <p>Information on audit services provided</p>	156	
	A.1.6.9.d	<p>Biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku</p> <p>Audit fees for each assignment provided during the financial year</p>	156	
	A.1.6.9.e	<p>Informasi jasa non audit yang diberikan</p> <p>Information on non-audit services provided</p>	156	
	A.1.6.9.f	<p>Biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku</p> <p>Non-audit fees for each assignment provided during the financial year</p>	156	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.6.9.g	Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e& f) Note: In the event that the PA and PAF along with their networks/associations/alliances do not provide non-audit services, this information must be disclosed (for points A.1.6.9.e & f).	156	
	A.1.6.10	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of institutions and/or capital market supporting professions other than the PA and PAF	156	
	A.1.7	PROFIL DIREKSI PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS	128-130	
	A.1.7.1	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Name and position corresponding to duties and responsibilities	128-130	
	A.1.7.2	Usia Age	128-130	
	A.1.7.3	Kewarganegaraan Nationality	128-130	
	A.1.7.4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Educational background and/or certifications	128-130	
	A.1.7.5	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Employment history, including:	128-130	
	A.1.7.5.a	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors in the relevant Company	128-130	
	A.1.7.5.b	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent positions, whether as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committees, as well as other positions inside or outside the Company	128-130	
	A.1.7.5.c	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) Note: If a Director holds no concurrent positions, this must be disclosed (refer to point A.1.7.5.b)	N.A	Ada Direksi yang merangkap jabatan di lingkup internal PUSRI
	A.1.7.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience along with the periods, both inside and outside the Company	128-130	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.7.6	<p>Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi.</p> <p>Affiliation relationships with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, directly or indirectly, up to individual owners, including the names of affiliated parties</p>	128-130	
	A.1.7.7	<p>Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6)</p> <p>Note: If a Director has no affiliation relationships, the Company must disclose this (refer to point A.1.7.6)</p>	128-130	
	A.1.7.8	<p>Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya.</p> <p>Changes in the composition of the Board of Directors and reasons for the changes</p>	76, 128	
	A.1.7.9	<p>Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.8).</p> <p>If no changes occurred, this must be disclosed (refer to point A.1.7.8)</p>	76, 128	
	A.1.8	<p>PROFIL DEWAN KOMISARIS</p> <p>PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</p>	122-127	
	A.1.8.1	<p>Nama dan jabatan</p> <p>Name and position</p>	122-127	
	A.1.8.2	<p>Usia</p> <p>Age</p>	122-127	
	A.1.8.3	<p>Kewarganegaraan</p> <p>Nationality</p>	122-127	
	A.1.8.4	<p>Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi</p> <p>Educational background and/or certifications</p>	122-127	
	A.1.8.5	<p>Riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>Career history, including:</p>	122-127	
	A.1.8.5. a	<p>Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris</p> <p>Legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners</p>	122-127	
	A.1.8.5.b	<p>Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan</p> <p>Legal basis for initial appointment as an Independent Commissioner in the Company</p>	122-127	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.8.5.c	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent positions, whether as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or committees, as well as other roles both within and outside the Company	122-127	
	A.1.8.5.c1	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c1). Note: If a member of the Board of Commissioners does not hold any concurrent positions, this must be disclosed (refer to point A.1.8.5.c1)	122-127	Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Ketua Komite di PUSRI dan beberapa jabatan lain di luar PUSRI. Members of the Board of Commissioners concurrently hold the position of Committee Chair at PUSRI and several other positions outside PUSRI
	A.1.8.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience along with time periods, both within and outside the Company	122-127	
	A.1.8.6.a	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly up to the individual ultimate owners, including the names of affiliated parties	122-127	
	A.1.8.6.b	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6.a). If a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Company must disclose this (refer to point A.1.8.6.a)	122-127	
	A.1.8.7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Independence statement from Independent Commissioners in the event they have served for more than 2 (two) terms	334	
	A.1.8.8.a	PERUBAHAN KOMPOSISI anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. CHANGES IN THE COMPOSITION of the Board of Commissioners and the reasons for the changes.	59, 121	
	A.1.8.8.b	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.8.a) If there are no changes in the composition of the Board of Commissioners, this must be disclosed (as referred to in point A.1.8.8.a).	59, 121	
	A.1.9.1	Nama PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: NAMES OF SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGES at the beginning and end of the financial year, consisting of the following information:		

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.9.1.a	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Shareholders who own 5% (five percent) or more of the Company's shares	148	
	A.1.9.1.b1	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who own shares in the Company	148	
	A.1.9.1.b2	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris TIDAK memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b.1). If none of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners own shares, this must be disclosed (as referred to in point A.1.9.1.b.1)	148	
	A.1.9.1.c	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Public shareholder group, i.e., shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company	148	
	A.1.9.2.a	PERSENTASE KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG ATAS SAHAM PERUSAHAAN OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA AWAL DAN AKHIR TAHUN BUKU, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; PERCENTAGE OF INDIRECT OWNERSHIP OF THE COMPANY'S SHARES BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS AT THE BEGINNING AND END OF THE FINANCIAL YEAR, including information on shareholders listed in the shareholders register for the purpose of indirect ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	148	
	A.1.9.2.b	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris TIDAK memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2.a). If none of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners have indirect ownership of the Company's shares, this must be disclosed (as referred to in point A.1.9.2.a).	148	
	A.1.9.3	Klasifikasi kepemilikan yang dimiliki perusahaan Ownership Classification Held by the Company	148	
	A.1.9.3.a	JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI NUMBER OF SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGE BY CLASSIFICATION	148	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.9.4	<p>INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;</p> <p>INFORMATION ON THE COMPANY'S MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS, both direct and indirect, up to the ultimate individual owners, presented in the form of a diagram or chart.</p>	148	
	A.1.9.5	<p>Apakah perusahaan memiliki pengendalian dan/ atau pengendalian bersama atas:</p> <p>Whether the Company has control and/or joint control over:</p>		
	A.1.9.5.a	<p>Nama ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA di mana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut</p> <p>THE NAMES OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, AND JOINT VENTURES in which the Company has joint control (if any), along with information on share ownership percentage, line of business, total assets, and operational status of the subsidiaries, associates, and joint ventures. For subsidiaries, additional information must include the address of the subsidiary.</p>	149-150	
	A.1.9.6	<p>Apakah perusahaan pernah melakukan aksi korporasi berikut ini:</p> <p>Has the Company ever conducted the following corporate actions:</p>		
	A.1.9.6.a	<p>KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada)</p> <p>A CHRONOLOGICAL RECORD OF SHARE LISTINGS, including the number of shares, nominal value, and offering price from the initial listing to the end of the financial year, as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed. This includes stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, changes in nominal value, execution of convertible securities, and capital increases or reductions (if any).</p>	156	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.9.7	<p>INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga / imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).</p> <p>INFORMATION ON THE LISTING OF OTHER SECURITIES, aside from those mentioned above, that have not yet matured during the fiscal year. This must include at minimum: the name of the security, year of issuance, interest/yield rate, maturity date, offering value, and credit rating (if any).</p>	156	
		MDNA		
	A.1.10.1	<p>TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA sesuai dengan jenis industri Perusahaan</p> <p>OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT in accordance with the Company's industry type:</p>	190, 201, 205	
	A.1.10.1.a	<p>Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya</p> <p>Production, including processes, capacity, and developments</p>	186-187, 190, 201	
	A.1.10.1.b	<p>Pendapatan/penjualan</p> <p>Revenue/Sales</p>	196, 202	
	A.1.10.1.c	<p>Profitabilitas</p> <p>Profitability</p>	200, 204	
	A.1.10.2	<p>KINERJA KEUANGAN komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut.</p> <p>Comprehensive FINANCIAL PERFORMANCE, including a comparison of financial performance over the last two financial years, along with an explanation of the causes and impacts of any changes:</p>	207-234	
	A.1.10.2.a	<p>Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset</p> <p>Current assets, non-current assets, and total assets</p>	207-212	
	A.1.10.2.b	<p>Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas</p> <p>Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities</p>	212-216	
	A.1.10.2.c	<p>Ekuitas</p> <p>Equity</p>	216-217	
	A.1.10.2.d	<p>Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan</p> <p>Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss)</p>	228-234	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.2.e	Arus kas Cash flows	228-234	
	A.1.10.3	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan DEBT PAYMENT CAPACITY or obligation settlement ability, presented with the calculation of relevant financial ratios	235-236	
	A.1.10.4	TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE of the company, presented with the calculation of relevant financial ratios	236	
	A.1.10.5	STRUKTUR MODAL (CAPITAL STRUCTURE) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud CAPITAL STRUCTURE and the Company's management policy regarding the capital structure, including the basis for determining said policy	237	
	A.1.10.6	Bahasan mengenai IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL dengan penjelasan Discussion regarding MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT, including explanations of:	238-240	
	A.1.10.6.a	Tujuan dari ikatan tersebut The purpose of the commitment	238-240	
	A.1.10.6.b	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut The expected source of funds to fulfill the commitment	238-240	
	A.1.10.6.c	Mata uang yang menjadi denominasi The currency denomination involved	238-240	
	A.1.10.6.d	Langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait The Company's planned measures to mitigate risks related to foreign currency positions	238-240	
	A.1.10.7	Bahasan mengenai INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN BUKU TERAKHIR: Discussion regarding CAPITAL INVESTMENTS REALIZED IN THE MOST RECENT FINANCIAL YEAR:	240	
	A.1.10.7.a	Jenis investasi barang modal Types of capital investments	240	
	A.1.10.7.b	Tujuan investasi barang modal Purpose of the capital investments	240	
	A.1.10.7.c	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan Amount of capital investment expenditure	240	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.8	<p>PROSPEK USAHA dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya</p> <p>BUSINESS PROSPECTS of the Company in relation to industry conditions, the overall economy, and the international market, accompanied by supporting quantitative data from reliable sources.</p>	178-183	
	A.1.10.9	<p>PERBANDINGAN ANTARA TARGET/PROYEKSI pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi)</p> <p>COMPARISON BETWEEN TARGETS/ PROJECTIONS at the Beginning of the Financial Year and Actual Results Achieved:</p>	242-243	
	A.1.10.9.a	<p>Pendapatan/penjualan</p> <p>Revenue/Sales</p>	242	NIM/Net Interest Margin, Fee Based Income, Total Kredit
	A.1.10.9.b	<p>Laba (rugi)</p> <p>Profit (Loss)</p>	242	NIM, CIR, BOPO, Laba Bersih, ROA, ROE
	A.1.10.9.c	<p>Struktur modal (capital structure)</p> <p>Capital Structure</p>	237	Modal Inti, KPMM
	A.1.10.9.d	<p>Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan</p> <p>Other matters considered important to the Company</p>	243	
	A.1.10.10	<p>TARGET/PROYEKSI yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang,</p> <p>TARGETS/PROJECTIONS the Company Aims to Achieve for the Upcoming Year:</p>	243	
	A.1.10.10.a	<p>Pendapatan / penjualan</p> <p>Revenue / Sales</p>	243	Kredit, DPK, NIM, Cost of Credit
	A.1.10.10.b	<p>Laba (rugi)</p> <p>Profit (Loss)</p>	243	NIM, Cost of Credit, Net Income, Operating Expense, Cost to Income Ratio
	A.1.10.10.c	<p>Struktur modal (capital structure)</p> <p>Capital Structure</p>	243	
	A.1.10.10.d	<p>KEBIJAKAN DIVIDEN</p> <p>DIVIDEND POLICY</p>	244-245	
	A.1.10.10.e	<p>Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan</p> <p>Other matters considered important to the Company</p>	245-247	
	A.1.10.11	<p>ASPEK PEMASARAN atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar</p> <p>THE MARKETING ASPECTS of the Company's goods and/or services include, at a minimum, the marketing strategies implemented and the Company's market share.</p>	169-177	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.12	Uraian mengenai DIVIDEN selama 2 (dua) tahun buku terakhir DIVIDEND Overview for the Last 2 (two) Financial Years	245	
	A.1.10.12.a	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, including the percentage of dividends distributed relative to net income	245	
	A.1.10.12.b	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas Dates of cash dividend payments and/or non-cash dividend distributions	245	
	A.1.10.12.c	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) Dividend amount per share (cash and/or non-cash)	245	
	A.1.10.12.d	Jumlah dividen per tahun yang dibayar Total dividends paid per year	245	
	A.1.10.12.d1	Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: In the event that the Issuer or Public Company did not distribute dividends in the last two fiscal years, such information must be disclosed.	N.A	
	A.1.10.13	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM, DENGAN KETENTUAN REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING, WITH THE FOLLOWING PROVISIONS:	247	
	A.1.10.13.a	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku In the event that during the financial year the Issuer is required to submit a report on the realization of the use of proceeds, the cumulative realization of the use of proceeds from the public offering shall be disclosed up to the end of the financial year.	247	Penawaran umum baik efek saham maupun obligasi ini telah selesai dan seluruh dana hasil penawaran umum telah dipergunakan dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. The public offering, both for equity securities and bonds, has been completed, and all proceeds from the public offering have been fully utilized and reported in accordance with the prevailing regulations.
	A.1.10.13.b	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut If there is any change in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the report on the realization of the use of proceeds from the public offering, the Issuer must provide an explanation regarding the change.	247	Tidak terdapat perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum There were no changes in the use of proceeds from the public offering.

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.14	<p>INFORMASI MATERIAL (jika ada), antara lain MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN, yang terjadi pada tahun buku</p> <p>MATERIAL INFORMATION (if any), including matters related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions that occurred during the financial year</p>	248-251	
	A.1.10.14..	<p>Apakah perusahaan mengalami transaksi berikut ini selama tahun buku</p> <p>Whether the Company conducted any of the aforementioned transactions during the financial year.</p>	250-251	
	A.1.10.14.a	<p>Tanggal, nilai, dan obyek transaksi</p> <p>The date, value, and object of the transaction.</p>	N.A	
	A.1.10.14.b	<p>Nama pihak yang melakukan transaksi</p> <p>The name of the party involved in the transaction.</p>	250-251	
	A.1.10.14.c	<p>Sifat hubungan afiliasi (jika ada)</p> <p>The nature of any affiliated relationship (if applicable).</p>	N.A	
	A.1.10.14.d	<p>Penjelasan mengenai kewajaran transaksi</p> <p>An explanation regarding the fairness of the transaction.</p>	248	
	A.1.10.14.e	<p>Pemenuhan ketentuan terkait</p> <p>Compliance with relevant regulations.</p>	248-249	
	A.1.10.14.f	<p>Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi</p> <p>In the event of an affiliated relationship, in addition to disclosing information from points a) to e), the Company also discloses:</p>	248	
	A.1.10.14.f1	<p>Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);</p> <p>A statement from the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that it was conducted in accordance with prevailing business practices, including the application of the arm's-length principle;</p>	248	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.14.f2	<p>Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);</p> <p>The role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in performing adequate procedures to ensure that the affiliated transaction was conducted in accordance with prevailing business practices, including adherence to the arm's-length principle.</p>	248	
	A.1.10.14.g	<p>Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;</p> <p>For affiliated or material transactions that constitute ordinary course of business activities conducted routinely, repeatedly, and/or continuously, an additional explanation is provided stating that such transactions are part of the Company's regular business operations.</p>	248	
	A.1.10.14.h	<p>Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g)</p> <p>Note: If such affiliated or material transactions have already been disclosed in the annual financial statements, additional information must be provided regarding the reference to the disclosure in those financial statements (as per point A.1.10.14.g).</p>	248	
	A.1.10.14.i	<p>Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut</p> <p>For the disclosure of affiliated transactions and/ or conflict of interest transactions that result from transactions previously approved by independent shareholders, additional information must include the date of the GMS approving such transaction.</p>	248	
	A.1.10.14.j	<p>Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i)</p> <p>Note: If no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions occurred, such fact must be clearly disclosed (as per point A.1.10.14.i).</p>	248	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.10.15	<p>PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)</p> <p>CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT HAVE A SIGNIFICANT IMPACT on the Company and their impact on the financial statements (if any).</p>	252-254	
		TATA KELOLA PERUSAHAAN – GCG		
		CORPORATE GOVERNANCE – GCG		
		RUPS	308-326	
		GMS		
	A.1.11.1.a	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku</p> <p>Information regarding the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) during the financial year and 1 (one) year prior to the financial year.</p>	310-319	
	A.1.11.1.a1a	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku</p> <p>Information regarding the resolutions of the GMS during the financial year and 1 (one) year prior to the financial year.</p>	310-319	
	A.1.11.1.a1	<p>Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku</p> <p>GMS resolutions during the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have been implemented during the financial year.</p>	319-326	
	A.1.11.1.a2	<p>Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan</p> <p>GMS resolutions during the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not yet been implemented, along with the reasons for non-implementation.</p>	319-326	
	A.1.11.1.b	<p>Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p> <p>In the event the Company engages an independent party to conduct vote counting during the GMS, such engagement shall be disclosed.</p>	308	
	A.1.11.2	<p>Pengungkapan terkait DIREKSI</p> <p>Disclosure related to the BOARD OF DIRECTORS</p>		
	A.1.11.2.a	<p>Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi</p> <p>Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors</p>	352-360	
	A.1.11.2.b	<p>Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam(charter) Direksi</p> <p>Statement confirming that the Board of Directors has guidelines or a Board Charter</p>	348-349	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.2.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policy and implementation regarding the frequency of BoD meetings, BoD meetings with the BoC, and attendance rates of Board members in these meetings, including attendance at the GMS	362-363	
	A.1.11.2.c1	Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Policy concerning the frequency of BoD meetings and joint meetings with the BoC	362-363	
	A.1.11.2.c2	Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Actual frequency of BoD meetings and joint meetings with the BoC	362-363	
	A.1.11.2.c3	Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS Information on attendance rates of Board members in Board meetings, joint BoD-BoC meetings, and GMS	362-363	
	A.1.11.2.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi Training and/or competency improvement of Board members	131, 132-134, 363	
	A.1.11.2.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada) Policy on training and/or competency improvement for Board members, including orientation programs for newly appointed members (if any)	363-364	
	A.1.11.2.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement programs attended by Board members during the financial year (if any)	132-134	
	A.1.11.2.e	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku The Board of Directors' assessment of the performance of committees supporting the Board's duties during the financial year	N.A	
	A.1.11.2.e1	Prosedur penilaian kinerja Performance assessment procedures	N.A	
	A.1.11.2.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat Criteria used such as performance achievements during the financial year, competencies, and attendance at meetings	N.A	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.2.f	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2) Note: In the event the Company does not have committees supporting the Board of Directors' duties, this fact shall be disclosed (referring to points A.1.11.2.e1 & e2)	374	
	A.1.11.3	Pengungkapan terkait DEWAN KOMISARIS Disclosure related to the BOARD OF COMMISSIONERS		
	A.1.11.3.a	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners	333	
	A.1.11.3.b	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris Statement confirming that the Board of Commissioners has guidelines or a Board Charter	332	
	A.1.11.3.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policy and implementation regarding the frequency of BoC meetings, BoC meetings with the BoD, and attendance rates of Board members in these meetings, including attendance at the GMS	336-338	
	A.1.11.3.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris Training and/or competency improvement of Board of Commissioners members	131-132	
	A.1.11.3.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat Policy on training and/or competency improvement for Board of Commissioners members, including orientation programs for newly appointed members	339-340	
	A.1.11.3.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement programs attended by Board of Commissioners members during the financial year (if any)	131-132	
	A.1.11.3.e	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Performance assessment of the BoD and BoC, as well as of individual members of both boards	340, 373	
	A.1.11.3.e1	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Procedures for conducting performance assessments	340, 373	







No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.3.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat Criteria used, such as performance achievements during the financial year, competencies, and attendance at meetings	341, 365-373	
	A.1.11.3.e3	Pihak yang melakukan penilaian Parties responsible for conducting the assessments	341, 364	
	A.1.11.3.f	Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi Assessment by the Board of Commissioners of the performance of committees supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties during the financial year, including:		
	A.1.11.3.f1	Prosedur penilaian kinerja Performance assessment procedures	342-343, 398, 410, 423	
	A.1.11.3.f2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat Criteria used, such as performance achievements during the financial year, competencies, and attendance at meetings	342-343, 398, 410, 423	
	A.1.11.4	Pengungkapan terkait NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Disclosure Related to the NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOD AND BOC		
	A.1.11.4.a	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Nomination procedures, including a brief description of the policy and process for nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners	378-379	
	A.1.11.4.b	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:		
	A.1.11.4.b1	Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Procedures for determining the remuneration of the BoD and BoC	380-381	
	A.1.11.4.b2	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya Remuneration structure for the BoD and BoC, such as salaries, allowances, tantiem/bonuses, and other benefits	383-385	
	A.1.11.4.b3	Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Amount of remuneration for each member of the BoD and BoC	383	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.5	<p>Pengungkapan terkait DEWAN PENGAWAS SYARIAH, bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar</p> <p>Disclosure Related to THE SHARIA SUPERVISORY BOARD, for companies conducting business activities based on Sharia principles as stipulated in the Articles of Association:</p>	N.A	<p>PUSRI tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah</p> <p>PUSRI does not have a Sharia Supervisory Board</p>
	A.1.11.5.a	Nama Name	N.A	
	A.1.11.5.b	<p>Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas Syariah</p> <p>Legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board</p>	N.A	
	A.1.11.5.c	<p>Periode penugasan dewan pengawas Syariah</p> <p>Term of assignment of the Sharia Supervisory Board</p>	N.A	
	A.1.11.5.d	<p>Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah</p> <p>Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board</p>	N.A	
	A.1.11.5.e	<p>Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan</p> <p>Frequency and method of providing advice and recommendations as well as supervision of the Company's compliance with Sharia principles in the capital market</p>	N.A	
	A.1.11.6	<p>Pengungkapan terkait KOMITE AUDIT</p> <p>Disclosure Related to the AUDIT COMMITTEE</p>		
	A.1.11.6.a	<p>Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite</p> <p>Name and position within the committee membership</p>	392-394	
	A.1.11.6.b	<p>Usia</p> <p>Age</p>	392-394	
	A.1.11.6.c	<p>Kewarganegaraan</p> <p>Nationality</p>	392-394	
	A.1.11.6.d	<p>Riwayat Pendidikan</p> <p>Educational background</p>	392-394	
	A.1.11.6.e	<p>Riwayat jabatan</p> <p>Career history</p>	392-394	
	A.1.11.6.e1	<p>Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite</p> <p>Legal basis for appointment as a committee member</p>	392-394	
	A.1.11.6.e2	<p>Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)</p> <p>Concurrent positions, including roles as members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or other committees or positions (if any)</p>	392-394	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.6.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) Note: If there are no concurrent positions, this should be disclosed accordingly (related to point A.1.11.6.e2)	392-394	
	A.1.11.6.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience along with time periods, both within and outside the Company	392-394	
	A.1.11.6.f	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Term and duration of service as an audit committee member	392-394	
	A.1.11.6.g	Pernyataan independensi komite audit Statement of audit committee independence	395	
	A.1.11.6.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency development undertaken during the financial year (if any)	135	
	A.1.11.6.i	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut Policy and implementation of audit committee meeting frequency and attendance level of committee members in the meetings	396	
	A.1.11.6.j	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku Implementation of audit committee activities during the financial year	396-398	
	A.1.11.7A	Pengungkapan terkait KOMITE ATAU FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN Disclosure Related to the COMPANY'S NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OR FUNCTION		
	A.1.11.7.a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position within the committee	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.b	Usia Age	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.c	Kewarganegaraan Nationality	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.d	Riwayat Pendidikan Educational background	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.e	Riwayat jabatan Career history	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, whether as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or other committees or roles (if any)	121-127, 403-406	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.7.a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7.a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this must be disclosed (related to A.1.11.7.a.e2)	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time periods, both within and outside the Company	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite Term and duration of service as a committee member	121-127, 403-406	
	A.1.11.7.a.g	Pernyataan independensi komite Statement of the committee's independence	399-400	
	A.1.11.7.a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency development attended during the financial year (if any)	131-132, 408	
	A.1.11.7.a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	400-402	
	A.1.11.7.a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement confirming the existence of a guideline or charter	400	
	A.1.11.7.a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan Tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of meeting frequency and attendance level of committee members	408	
	A.1.11.7.a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku Brief description of activities carried out during the financial year	409	
	A.1.11.7.a.m	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: In the event that a committee is not established:	N.A	
	A.1.11.7.a.m1	Alasan tidak dibentuknya komite Reason for not establishing the committee	N.A	
	A.1.11.7.a.m2	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Parties responsible for the nomination and remuneration functions	N.A	
	A.1.11.7B	Pengungkapan terkait KOMITE ATAU FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN Disclosure Related to the COMPANY'S NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OR FUNCTION		
	A.1.11.7.b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the committee membership	121-127, 403-406	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.7b.b	Usia Age	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.c	Kewarganegaraan Nationality	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.d	Riwayat Pendidikan Educational background	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.e	Riwayat jabatan Career history	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, whether as members of the BoC, BoD, other committees, or other roles (if any)	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.7b.e2) Note: If there are no concurrent positions, this must be disclosed (as referred to in A.1.11.7b.e2)	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience along with the duration, both within and outside the Company	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite Term and period of service as a committee member	121-127, 403-406	
	A.1.11.7b.g	Pernyataan independensi komite Statement of the committee's independence	399-400	
	A.1.11.7b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency development attended during the financial year (if any)	131-132, 408	
	A.1.11.7b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	400-402	
	A.1.11.7b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam(charter) Statement confirming the existence of a guideline or charter	400	
	A.1.11.7b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan Tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of meeting frequency and attendance level of members in the meetings	408	
	A.1.11.7b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku Brief description of activities carried out during the financial year	409	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.8A	Pengungkapan terkait KOMITE MANAJEMEN RISIKO Disclosure Related to the RISK MANAGEMENT COMMITTEE		
	A.1.11.8a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the committee membership	125, 416-418	
	A.1.11.8a.b	Usia Age	125, 416-418	
	A.1.11.8a.c	Kewarganegaraan Nationality	125, 416-418	
	A.1.11.8a.d	Riwayat pendidikan Educational background	125, 416-418	
	A.1.11.8a.e	Riwayat jabatan Career history	125, 416-418	
	A.1.11.8a.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	125, 416-418	
	A.1.11.8a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, including as a member of the BoC, BoD, other committees, and/or other positions (if any)	125, 416-418	
	A.1.11.8a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.8a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this must be disclosed (as referred to in point A.1.11.8a.e2)	125, 416-418	
	A.1.11.8a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and its duration, both within and outside the Company	125, 416-418	
	A.1.11.8a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko Term and period of service as a Risk Management Committee member	125, 416-418	
	A.1.11.8a.g	Pernyataan independensi komite Statement of the committee's independence	419	
	A.1.11.8a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency development undertaken during the financial year (if any)	136, 420	
	A.1.11.8a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	414-415	
	A.1.11.8a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement confirming the existence of a guideline or charter	413-414	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.8a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of meeting frequency and attendance level of committee members	420	
	A.1.11.8a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku Brief description of activities carried out during the financial year	420-422	
	A.1.11.8B	Pengungkapan terkait KOMITE LAIN yang dimiliki perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas dewan komisaris: Disclosure Related to OTHER COMMITTEES owned by the company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees supporting the functions and duties of the Board of Commissioners:	N.A	
	A.1.11.8b..	Apakah perusahaan memiliki komite lain dalam mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris? Does the company have other committees to support the functions and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners?	N.A	PUSRI tidak memiliki komite lain
	A.1.11.8b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the committee membership	N.A	
	A.1.11.8b.b	Usia Age	N.A	
	A.1.11.8b.c	Kewarganegaraan Nationality	N.A	
	A.1.11.8b.d	Riwayat Pendidikan Educational background	N.A	
	A.1.11.8b.e	Riwayat jabatan Career history	N.A	
	A.1.11.8b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	N.A	
	A.1.11.8b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, including as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or committee member, as well as other positions (if any)	N.A	
	A.1.11.8b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If there are no concurrent positions, this must be disclosed	N.A	
	A.1.11.8b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and its duration, both within and outside the Company	N.A	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.8b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite lain Term and period of office of other committee members	N.A	
	A.1.11.8b.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	N.A	
	A.1.11.8b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency development undertaken during the financial year (if any)	N.A	
	A.1.11.8b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	N.A	
	A.1.11.8b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement confirming the existence of guidelines or charter	N.A	
	A.1.11.8b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of meeting frequency and attendance level of members in those meetings	N.A	
	A.1.11.8b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku Brief description of activities carried out during the financial year	N.A	
	A.1.11.9	Pengungkapan terkait SEKRETARIS PERUSAHAAN Disclosure Related to CORPORATE SECRETARY		
	A.1.11.9.a	Nama Name	434	
	A.1.11.9.b	Domisili Domicile	434	
	A.1.11.9.c	Riwayat jabatan Career history	434	
	A.1.11.9.c1	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan Legal basis for appointment as corporate secretary	434	
	A.1.11.9.c2	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and its duration, both within and outside the Company	434	
	A.1.11.9.d	Riwayat Pendidikan Educational background	434	
	A.1.11.9.e	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competency development undertaken during the financial year	136, 435	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.9.f	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku Brief description of the corporate secretary's duties performed during the financial year	435-438	
	A.1.11.10	Pengungkapan terkait UNIT AUDIT INTERNAL, paling sedikit memuat Disclosure Related to the INTERNAL AUDIT UNIT, at minimum including:		
	A.1.11.10.a	Nama kepala unit audit internal Name of the head of the internal audit unit	440	
	A.1.11.10.b	Riwayat jabatan Career history	440	
	A.1.11.10.b1a	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal Legal basis for appointment as head of the internal audit unit	440	
	A.1.11.10.b1	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and its duration, both within and outside the Company	440	
	A.1.11.10.c	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada) Qualifications or certifications as an internal audit professional (if any)	443-444	
	A.1.11.10.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competency development undertaken during the financial year	137, 443-444	
	A.1.11.10.e	Struktur dan kedudukan unit audit internal Structure and position of the internal audit unit	441-442	
	A.1.11.10.f	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	440-441	
	A.1.11.10.g	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal Statement confirming the existence of guidelines or charter for the internal audit unit	440-441	
	A.1.11.10.h	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; Brief description of the internal audit unit's activities during the financial year, including policies and implementation of the frequency of meetings with the BoD, BoC, and/or audit committee	446-447	
	A.1.11.11	Uraian mengenai SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL) yang diterapkan oleh perusahaan Description of the INTERNAL CONTROL SYSTEM implemented by the company	448-452	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.1.a	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya Financial and operational controls, as well as compliance with other applicable laws and regulations	448-449	
	A.1.11.1.b	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Review of the effectiveness of the internal control system	449-450	
	A.1.11.1.c	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal Statement from the BoD and/or BoC regarding the adequacy of the internal control system	452	
	A.1.11.12	Uraian mengenai SISTEM MANAJEMEN RISIKO yang diterapkan oleh perusahaan Description of the RISK MANAGEMENT SYSTEM implemented by the company	468-478	
	A.1.11.12.a	Gambaran umum mengenai sistem manajemen Risiko Perusahaan Overview of the Company's Risk Management System	468	
	A.1.11.12.b	Jenis risiko dan cara pengelolaannya Types of risks and their management methods	473-477	
	A.1.11.12.c	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan Review of the effectiveness of the Company's risk management system	477-478	
	A.1.11.12.d	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko Statement from the BoD and/or BoC or audit committee regarding the adequacy of the risk management system	478	
	A.1.11.14	Informasi tentang SANKSI ADMINISTRATIF/sanksi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku Information on ADMINISTRATIVE SANCTIONS/sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors by the Financial Services Authority and other authorities during the financial year.	480-481	
	A.1.11.15	Informasi mengenai KODE ETIK perusahaan Information regarding the company's CODE OF ETHICS	486-496	
	A.1.11.15.a	Pokok-pokok kode etik Main principles of the code of ethics	486-494	
	A.1.11.15.b	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Methods of disseminating the code of ethics and enforcement efforts	494-495	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.15.c	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Statement that the code of ethics applies to members of the BoD, BoC, and employees of the company	494	
	A.1.11.16	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCKOWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ ATAU PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas Point A.1.11.16) In the event that compensation is provided in the form of a MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP) and/or an EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP), the disclosed information shall at minimum include the following:	386, 388	
	A.1.11.16.a	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP) A brief description of the Company's policy on long-term performance-based compensation granted to management and/or employees (if any), including programs such as the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).	386, 388	
	A.1.11.16.b	Apakah terdapat pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan dalam tahun buku Whether long-term performance-based compensation was granted to management and/ or employees during the financial year.	386, 388	
	A.1.11.16.c	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: If compensation is granted in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the disclosed information shall at minimum include:	386, 388	
	A.1.11.16.c1	jumlah saham dan/atau opsi Number of shares and/or options	N.A	
	A.1.11.16.c2	jangka waktu pelaksanaan Duration of implementation	N.A	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.16.c3	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak Eligibility criteria for employees and/or management	N.A	
	A.1.11.16.c4	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan Exercise price or the basis for determining the exercise price	N.A	
	A.1.11.17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai A brief description of the policy regarding the disclosure of information about:		
	A.1.11.17.A	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH TERJADINYA KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA; SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, to be disclosed NO LATER THAN 3 (THREE) BUSINESS DAYS AFTER THE OCCURRENCE OF OWNERSHIP OR ANY CHANGE IN OWNERSHIP OF SHARES IN A PUBLIC COMPANY;	481	
	A.1.11.17.b	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud Implementation of the aforementioned policy.	481, 482-484	
	A.1.11.18	Uraian mengenai SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di perusahaan: Description of the WHISTLEBLOWING SYSTEM in the company:	502-506	
	A.1.11.18.a	Cara penyampaian laporan pelanggaran Methods for submitting violation reports	502-503	
	A.1.11.18.b	Perlindungan bagi pelapor Protection for whistleblowers	503	
	A.1.11.18.c	Penanganan pengaduan Handling of complaints	505	
	A.1.11.18.d	Pihak yang mengelola pengaduan Parties responsible for managing complaints	505-506	
	A.1.11.18.e	Hasil dari penanganan pengaduan: Results of complaint handling:	506	
	A.1.11.18.e2	Tindak lanjut pengaduan Follow-up actions on complaints	506	
	A.1.11.18.e3	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Note: In the event the Company does not have a whistleblowing system, this fact must be disclosed. (referring to point A.1.11.18)	N.A	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.19	Uraian mengenai kebijakan ANTI KORUPSI perusahaan Description of the Company's ANTI-CORRUPTION POLICY	507-508	
	A.1.11.19.a	Program dan prosedur yang dilakukan Programs and procedures implemented	507-508	
	A.1.11.19.b	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan; Anti-corruption training/socialization provided to the Company's employees	508	
	A.1.11.19.c	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Note: In the event the Company does not have an anti-corruption policy, an explanation must be provided stating the reason for its absence (as referred to in point A.1.11.19)	N.A	
	A.1.11.20A	PENERAPAN ATAS PEDOMAN GOVERNANSI PERUSAHAAN TERBUKA BAGI EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU PERUSAHAAN PUBLIK, meliputi: IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES THAT ISSUE EQUITY SECURITIES OR ARE PUBLICLY LISTED COMPANIES, covering:	N.A	
	A.1.11.20a.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding the recommendations that have been implemented	N.A	
	A.1.11.20a.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation demonstrating that the company has implemented the recommendations	N.A	
	A.1.11.20a.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of recommendations that have not been implemented, including the reasons and alternatives	N.A	
	A.1.11.20B	Pengungkapan terkait PENERAPAN ATAS PEDOMAN GOVERNANSI PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN "COMPLY OR EXPLAIN" ATAU "APPLY OR EXPLAIN", MELIPUTI: Disclosure related to the IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES USING THE "COMPLY OR EXPLAIN" OR "APPLY OR EXPLAIN" APPROACH, covering:	N.A	
	A.1.11.20b.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding the recommendations that have been implemented	N.A	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.1.11.20b.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation demonstrating that the company has implemented the recommendations	N.A	
	A.1.11.20b.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of recommendations that have not been implemented, including the reasons and alternatives	N.A	
	A.2.1	STRATEGI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY STRATEGY	SR: 94-99	SR PUSRI Disajikan terpisah ddari AR SR PUSRI Served separately from AR
	A.2.1.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation of the Sustainability Strategy	SR: 96-97	
	A.2.2.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: Economic Aspects, at a minimum to include:		
	A.2.2.1.a	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual Quantity of products or services sold	SR: 112-115	
	A.2.2.1.b	Produk ramah lingkungan Environmentally friendly products	N.A	
	A.2.2.1.c	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business processes	SR: 71-72	
	A.2.2.2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: Environmental Aspects, at a minimum to include:		
	A.2.2.2.a	Penggunaan energi Energy usage	SR: 138-139	
	A.2.2.2.b	Pengurangan emisi yang dihasilkan Reduction of emissions produced	SR: 141	
	A.2.2.2.c	Pengurangan limbah dan efluen Reduction of waste and effluents	SR: 143-146	
	A.2.2.2.d	Pelestarian keanekaragaman hayati Biodiversity conservation	SR: 150-152	
	A.2.2.3	Aspek Sosial Social Aspects	SR: 158-172	
	A.2.3	Profil Perusahaan Company Profile		
	A.2.3.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Sustainability Values	SR: 62-63	
	A.2.3.2	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities Conducted	SR: 54	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.2.3.3	Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan Significant Changes to the Company	SR: 80	
	A.2.4	Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation	SR: 36-48	
	A.2.4.1	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Policies to Address Challenges in Achieving the Sustainability Strategy	SR: 40	
	A.2.4.2	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Implementation of Sustainable Finance	SR: 40-43	
	A.2.4.3	Strategi pencapaian target Target Achievement Strategy	SR: 45	
	A.2.5	Governansi Berkelanjutan Sustainable Governance		
	A.2.5.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge of Implementing Sustainable Finance	SR: 104-105	
	A.2.5.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	SR: 105-106	
	A.2.5.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation	SR: 255-262	PUSRI tidak menjalankan Keuangan Berkelanjutan, melainkan Program-program Keberlanjutan PUSRI does not implement Sustainable Finance, but rather Sustainability Programs
	A.2.5.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	SR: 99-101	
	A.2.5.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues in the Implementation of Sustainable Finance	SR: 278-279	
	A.2.6.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Foster a Sustainability Culture	SR: 105, 224	
	A.2.6.1.a	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Foster a Sustainability Culture	SR: 105, 224	
	A.2.6.2	Kinerja Ekonomi Economic Performance		
	A.2.6.2.a	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Targets and Actual Performance in Production, Portfolio, Financing or Investment Targets, Revenue, and Profit and Loss	SR: 113-115	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.2.6.2.b	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Targets and Actual Performance in Portfolio, Financing or Investment Targets in Financial Instruments or Projects Aligned with Sustainable Finance	N.A	
				
	A.2.6.3.a	Aspek Umum – Lingkungan General Aspect – Environment		
	A.2.6.3.a1	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	SR: 155	
	A.2.6.3.b	Aspek Material Material Aspects	SR: 136-137	
	A.2.6.3.b1	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	N.A	
	A.2.6.3.c	Aspek Energi Energy Aspects	SR: 137-140	
	A.2.6.3.c1	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Quantity and Intensity of Energy Used	SR: 139	
	A.2.6.3.c2	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements in Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	SR: 137	
	A.2.6.3.d	Aspek Air Water Aspects	SR: 148-150	
	A.2.6.3.d1	Penggunaan air Water Usage	SR: 150	
	A.2.6.3.e	Aspek Keragaman Hayati Biodiversity Aspects	SR: 150-152	
	A.2.6.3.e1	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas Near or Within Conservation or Biodiversity Areas	N.A	
	A.2.6.3.e2	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	SR: 150-151	
	A.2.6.3.f	Aspek Emisi Emission Aspects	SR: 140-142	
	A.2.6.3.f1	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Quantity and Intensity of Emissions Produced by Type	SR: 141	
	A.2.6.3.f2	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievements in Emission Reduction	SR: 141-142	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.2.6.3.g	Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects	SR: 141-146	
	A.2.6.3.g1	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Quantity of Waste and Effluent Produced by Type	SR: 144-148	
	A.2.6.3.g2	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanisms	SR: 143-144, 146, 147	
	A.2.6.3.h	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaints Aspects	SR: 153-154	
	A.2.6.3.h1	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Subject of Environmental Complaints Received and Resolved	SR: 153	
	A.2.6.4	Kinerja Sosial Social Performance	SR: 158-216	
	A.2.6.4.a	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Services for Products and/or Services to Consumers	SR: 108-109	
	A.2.6.4.b	Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects	SR: 174-197	
	A.2.6.4.b1	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	SR: 179	
	A.2.6.4.b2	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	SR: 180	
	A.2.6.4.b3	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	SR: 188	
	A.2.6.4.b4	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	SR: 200	
	A.2.6.4.b5	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Capacity Development	SR: 180-182	
	A.2.6.4.c	Aspek Masyarakat Community Aspects	SR: 158-172	
	A.2.6.4.c1	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	SR: 160	
	A.2.6.4.c2	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	SR: 153	
	A.2.6.4.c3	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities (TJSL)	SR: 42-43, 159-171	

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	A.2.6.4.d	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development	N.A	
	A.2.6.4.d1	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	N.A	
	A.2.6.4.d2	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services Evaluated for Customer Safety	SR: 137, 214	
	A.2.6.4.d3	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	SR: 214	
	A.2.6.4.d4	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	SR: 137, 219	
	A.2.4.6.e	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey Regarding Sustainable Financial Products and/or Services	SR: 100, 220	
	A.2.7	Lain-lain Other Matters	SR: 280-293	
	A.2.7.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification from an Independent Party	SR: 84, 276	ASSURANCE
	A.2.7.2	Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada Feedback Form for Readers, if any	SR: 283	FORM
	A.2.7.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback from the Previous Year's Sustainability Report	N.A	TEXT
	A.2.7.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Disclosure List in Accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies	SR: 286-290	INDEKS SEOJK16, ACGS, GRI SEOJK 16 INDEX, ACGS, GRI
	B.A	PERTANYAAN BONUS BONUS QUESTIONS		
	B.A.1	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2) Types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners (PUGKI 1.3.2)	361	GCG – BOC – SUB TERPISAH KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS GCG – BOC – SEPARATE DECISIONS REQUIRING BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	B.A.2	Rincian tugas Komisaris Utama (PUGKI 1.3.13.1) Details of the duties of the President Commissioner (PUGKI 1.3.13.1)	333, 334	GCG – BOC – TUGAS KOMISARIS UTAMA TERPISAH GCG – BOC – SEPARATE DUTIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER
	B.A.3	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG Score Card E.2.24) Responsibilities of the Audit Committee in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG Scorecard E.2.24)	390	GCG – KOMITE AUDIT – TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GCG – AUDIT COMMITTEE – DUTIES AND RESPONSIBILITIES
	B.A.4	Sertifikasi profesi (misalnya dalam bidang Risiko, Akuntansi, Perpajakan, IT, Hukum) yang dimiliki oleh (Kriteria tambahan ARA 2019) Professional certifications (e.g., in Risk, Accounting, Taxation, IT, Law) held by (Additional Criteria ARA 2019)	443-444 465-467	GCG – SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO, INTERNAL AUDIT GCG – RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT CERTIFICATIONS
	B.A.4.a	Komite Audit Audit Committee	389-398	
	B.A.4.b	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	399-412	
	B.A.4.c	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	413-423	
	B.A.4.d	Komite Lainnya Other Committees	N.A	
	B.A.5	Deskripsi proses governansi terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), cyber security (keamanan dunia maya), dan disaster recovery (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (ASEAN CG Score Card B.E.5.1) Description of governance processes related to IT issues including disruption, cybersecurity, and disaster recovery to ensure all major risks have been identified, managed, and reported to the Board of Directors (ASEAN CG Scorecard B.E.5.1)	278	INFORMATION TECHNOLOGY
	B.A.6	Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. (Aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar) (PUKGI 7.2.3) Policy to prevent insider trading (Clear rules regarding any trading of corporate shares by directors, commissioners, and insiders to ensure no one gains directly or indirectly from information not yet publicly available) (PUKGI 7.2.3)	N.A	GCG – INSIDER TRADING PUSRI bukan perusahaan publik PUSRI is not a publicly listed company
	B.A.7	Kebijakan penghargaan / kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (ASEAN CG Score Card C.3.3) Compensation/reward policy that takes into account long-term company performance (ASEAN CG Scorecard C.3.3)	388	GCG – KEBIJAKAN REMUNERASI BOC BOD SDM – KEBIJAKAN REMUNERASI PERUSAHAAN GCG – REMUNERATION POLICY FOR BOC AND BOD HR – CORPORATE REMUNERATION POLICY

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	B.A.8	<p>Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/signifikan (ASEAN CG Score Card D.3.1)</p> <p>Policy for review and approval of material/significant related party transactions (ASEAN CG Scorecard D.3.1)</p>	249	<p>MDNA – TRANSAKSI PIHAK BERELASI</p> <p>MDNA – RELATED PARTY TRANSACTIONS</p>
	B.A.9	<p>Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan manajemen kunci (ASEAN CG Score Card E.5.3)</p> <p>Policy related to succession planning for members of the Board of Directors and key management (ASEAN CG Scorecard E.5.3)</p>	379	<p>GCG – KOMITE REMUNERASI & NOMINASI – SUKSESI DIREKSI</p> <p>GCG – REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE – BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION</p>
	B.A.10.a	<p>Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, Integrated Reporting, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan</p> <p>Internationally recognized sustainability reporting framework adopted by the Company (examples: GRI, Integrated Reporting, SASB)</p>	SR: 83-84	GRI, SASB, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure), MSCI (Morgan Stanley Capital International)
	B.B.0	<p>Pertanyaan Tambahan</p> <p>Additional Questions</p>		
	B.B.1	<p>Apakah korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan? Uraikan dengan singkat (PUKGI 6.2.4)</p> <p>Does the corporation issue an integrated annual report that places historical performance in context and presents the corporation's risks, opportunities, and future outlook, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value? Please provide a brief explanation. (PUKGI 6.2.4)</p>		<p>AR SR DIPUBLISH BERSAMAAN STRATEGI PERUSAHAAN MANAJEMEN RISIKO</p> <p>AR & SR PUBLISHED SIMULTANEOUSLY CORPORATE STRATEGY RISK MANAGEMENT</p> <p>PUSRI menyusun Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan. Seluruh aspek dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan tersebut.</p> <p>PUSRI prepares a Sustainability Report separately from the Annual Report. All aspects of support for achieving sustainability goals are conveyed in the Sustainability Report.</p>
	B.B.2	<p>Pengungkapan kerangka governansi, pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan di perusahaan (GRI)</p> <p>Disclosure of governance, management, and control framework relating to taxation aspects within the company. (GRI)</p>	SR: 123-124	<p>SR – TATA KELOLA BERKELANJUTAN</p> <p>SR – SUSTAINABLE GOVERNANCE</p>
	B.C	<p>PERTANYAAN PENALTI</p> <p>PENALTY QUESTIONS</p>		
	B.C.1	<p>Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK)</p> <p>Date of publication of the Annual Financial Statements (ASEAN CG Scorecard B.D.1.1 & OJK Regulation)</p>	760	<p>TANGGAL DI SURAT BOC BOD HALAMAN LK</p> <p>DATE ON THE BOC AND BOD LETTER IN THE FINANCIAL STATEMENTS SECTION</p>
	B.C.2	<p>Tanggal penerbitan Laporan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK)</p> <p>Date of publication of the Annual Report (ASEAN CG Scorecard B.D.1.1 & OJK Regulation)</p>	81	<p>TANGGAL DI LAPORAN BOC BOD</p> <p>DATE ON THE BOC AND BOD REPORT</p>

No Urut No.	Indeks ARA ARA Index	Kriteria Criteria	Halaman Page	Keterangan Remarks
	B.C.3	Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan Opinion of the independent auditor on the company's financial statements	671-673	LK AUDITED AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
	B.C.4	Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi / komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1) Has there been any insider trading involving the Board of Directors, Board of Commissioners, management, or employees in the past three years? (ASEAN CG Scorecard P.B.1.1)	N.A	GCG – INSIDER TRADING PUSRI bukan perusahaan publik PUSRI is not a publicly listed company
	B.C.5	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1) Have there been any cases of non-compliance with laws, rules, or regulations related to significant or material related party transactions in the past three years? (ASEAN CG Scorecard P.B.2.1)	N.A	GCG – LITIGASI GCG – LITIGATION
	B.C.6	Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan / ketenagakerjaan / konsumen / kepailitan / komersial / persaingan atau lingkungan (P.C.1.1) Has the company been involved in any violations of laws related to labor, employment, consumer protection, bankruptcy, commercial practices, competition, or environmental issues? (P.C.1.1)	N.A	GCG – LITIGASI GCG – LITIGATION
	B.C.7	Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1) Has the company been sanctioned by regulators for failing to make disclosures within the specified time frame for any material events? (ASEAN CG Scorecard P.C.2.1)	N.A	GCG – SANKSI ADMINISTRASI GCG – ADMINISTRATIVE SANCTIONS
	B.C.8	Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama tiga tahun terakhir Has the company received a guilty verdict from the highest tax court regarding any taxation matter in the past three years?	N.A	GCG – PAJAK GCG – TAXATION
	B.C.9	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1) Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules (excluding disclosure rules) during the past year? (P.E.1.1)	N.A	GCG – COMPLIANCE

08

Dalam semangat Sinergi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, PT Pupuk Sriwidjaja hadir sebagai entitas yang tidak hanya menyediakan pupuk, tetapi juga memberi warna bagi kehidupan petani di sini bukan sekadar



Laporan Keuangan

Financial Reports



...k Mewujudkan
..., PT Pupuk Sriwidjaja
tidak hanya menyediakan
memberi warna bagi
di sini bukan sekadar
peran aktif perusahaan
in positif, membangun
inovasi, dan melahirkan generasi penerus yang siap
menghadapi tantangan pertanian masa depan.

**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2024



**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN
ENTITAS ANAK ("Grup")**

**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG AND
SUBSIDIARY ("The Group")**

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

Atas nama Dewan Direksi,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of the Board of Directors,
we the undersigned:

Nama	:	Daconi Khotob	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 - Indonesia	:	Office Address
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain)	:	Jl. Ridwan Rais No. 21 LK.II RT 009 RW 000, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung	:	Residential Address (as in identity card or other qualifier)
Nomor Telepon	:	+62711 712222	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama/President Director	:	Position
Nama	:	Saifullah Lasindrang	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 -Indonesia	:	Office Address
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain)	:	Jl. Alamanda 2 Nomor 9, Perumahan Pondok Hijau 1 RT 004 RW 010, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	:	Residential Address (as in identity card or other qualifier)
Nomor Telepon	:	+62711 712222	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Umum/ Finance and General Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup; 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements; 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements have been fully and correctly disclosed; and
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts and do not omit material information or facts; 4. Responsible for the Group's internal control system. |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Palembang, 7 Mei/May 2025

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Umum/
Finance and General Director

Daconi Khotob

Saifullah Lasindrang



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
7 Mei/May 2025

Heryanto, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License No. AP.1784*



Pupuk Sriwidjaja Palembang
00851/2.1457/AU.1/04/1784-1/1/V-2025

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	703,733	1,454,006	Cash and cash equivalents
Piutang usaha:	5			Trade receivables:
- Pihak berelasi		108,630	46,777	Related parties -
- Pihak ketiga		89,437	171,987	Third parties -
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	6a	-	1,011,204	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	6b	108,612	127,903	Unbilled subsidy receivables
Pajak dibayar di muka:	18a			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan		185,779	-	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		100,787	73,089	Other taxes -
Persediaan	7	1,507,888	2,129,087	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8	74,202	78,767	Advances and prepayments
Piutang lainnya:	9			Other receivables:
- Pihak berelasi		64,490	185,449	Related parties -
- Pihak ketiga		9,423	11,468	Third parties -
Aset lancar lainnya	29	7,625	1,753,296	Other current assets
Jumlah aset lancar		2,960,606	7,043,033	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	6a	43,205	43,205	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Pajak dibayar di muka:	18a			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan		54,019	183,708	Corporate income tax -
Investasi pada entitas asosiasi	10	101,939	142,165	Investment in associate
Aset keuangan tidak lancar lainnya		45,440	50,446	Other non-current financial assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8	643,459	927,926	Advances and prepayments
Properti investasi		884,944	815,958	Investment properties
Aset tetap	11	20,780,186	17,944,706	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	12	21,522	29,083	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		22,574,714	20,137,197	Total non-current assets
JUMLAH ASET		25,535,320	27,180,230	TOTAL ASSETS

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	13	-	600,000	Short-term loans
Utang usaha:	14			Trade payables:
- Pihak berelasi		52,287	49,366	Related parties -
- Pihak ketiga		82,439	85,712	Third parties -
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	6a	31,921	-	Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Utang lainnya:	15			Other payables:
- Pihak berelasi		2,958	46,388	Related parties -
- Pihak ketiga		97,810	108,794	Third parties -
Liabilitas yang masih harus dibayar	16	2,178,985	1,782,056	Accrued liabilities
Utang pajak:	18b			Taxes payable:
- Pajak penghasilan badan		11,142	115	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		84,586	52,018	Other taxes -
Bagian jangka pendek atas:				Current portion of:
- Liabilitas sewa		7,529	22,505	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	17	2,804	2,935,644	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	19a	244,367	455,044	Employee benefits liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>2,796,828</u>	<u>6,137,642</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	18d	303,974	272,106	Deferred tax liabilities
Bagian jangka panjang atas:				Non-current portion of:
- Liabilitas sewa		3,559	4,358	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	17	3,168,146	1,864,271	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	19a	4,281	-	Employee benefits liabilities -
Liabilitas imbalan pascakerja	19c	476,459	621,752	Post-employment benefits liabilities
Utang retensi:				Retention payables:
- Pihak berelasi		15,926	-	Related party -
- Pihak ketiga		117,460	-	Third party -
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>4,089,805</u>	<u>2,762,487</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>6,886,633</u>	<u>8,900,129</u>	TOTAL LIABILITIES

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham – modal dasar				
15.000.000 lembar saham; ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 saham biasa Seri B (2023: 5.800.000 saham biasa) dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	20	5,800,000	5,800,000	<i>Share capital – authorised 15,000,000 shares; issued and fully paid 1 Class A Dwiwarna share and 5,799,999 Class B shares (2023: 5,800,000 common shares) at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per shares</i>
Tambahan modal disetor	21	(333,876)	(333,876)	<i>Additional paid-in-capital</i>
Saldo laba:				<i>Retained earnings:</i>
- Ditentukan penggunaannya		5,788,537	4,932,660	<i>Appropriated -</i>
- Belum ditentukan penggunaannya		1,068,450	1,199,016	<i>Unappropriated -</i>
Penghasilan komprehensif lain		<u>6,303,773</u>	<u>6,660,583</u>	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		18,626,884	18,258,383	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		<u>21,803</u>	<u>21,718</u>	<i>Non-controlling interest</i>
JUMLAH EKUITAS		<u>18,648,687</u>	<u>18,280,101</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>25,535,320</u>	<u>27,180,230</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan	23	13,532,865	13,371,676	Revenue
Beban pokok pendapatan	24	(11,686,789)	(11,017,724)	Cost of revenues
LABA BRUTO		1,846,076	2,353,952	GROSS PROFIT
Beban penjualan	25	(321,732)	(376,411)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	26	(299,305)	(463,318)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan		61,198	71,505	Finance income
Biaya keuangan	27	(269,817)	(421,244)	Finance costs
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi	10	(40,226)	(5,306)	Shares of net loss of associate
Pendapatan lainnya – bersih	28	423,475	373,496	Other income – net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,399,669	1,532,674	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	18c	(331,134)	(332,815)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		1,068,535	1,199,859	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Kerugian pengukuran kembali imbalan pascakerja	19c	(461,365)	(64,148)	Remeasurement loss on post-employment benefits
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		3,055	-	Changes in the fair value equity investment at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	18d	101,500	14,112	Related income tax
Rugi komprehensif lain, setelah pajak		(356,810)	(50,036)	Other comprehensive loss, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		711,725	1,149,823	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,068,450	1,199,016	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		85	843	Non-controlling interest
		1,068,535	1,199,859	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		711,640	1,148,980	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		85	843	Non-controlling interest
		711,725	1,149,823	

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/LAND SUBSIDIARY

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo laba/ Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income				Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as at 1 January 2023
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disisor/ Additional paid-in-capital	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset/ Assets revaluation surplus	Pengkukuran kembali imbalan pascakerja/ Remeasurement on post- employment benefits				
Saldo pada 1 Januari 2023	5.800.000	(333.876)	2.662.127	2.655.533	7.339.211	(617.381)	(11.211)	17.484.403	20.875	17.505.278
Dividen tunai	-	-	-	(375.000)	-	-	-	(375.000)	-	(375.000)
Cadangan umum	-	-	2.280.533	(2.280.533)	-	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.199.016	-	(50.036)	-	1.148.980	843	1.149.823
Saldo pada 31 Desember 2023	5.800.000	(333.876)	4.932.660	1.199.016	7.339.211	(667.417)	(11.211)	18.258.383	21.718	18.280.101
Dividen tunai	-	-	-	(343.139)	-	-	-	(343.139)	-	(343.139)
Cadangan umum	-	-	855.877	(855.877)	-	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.068.450	-	(359.865)	3.055	711.640	85	711.725
Saldo pada 31 Desember 2024	5.800.000	(333.876)	5.788.537	1.068.450	7.339.211	(1.027.282)	(8.156)	18.626.884	21.803	18.648.687

Balance as at
31 December 2024

Balance as at
31 December 2023

Cash dividends
General reserves
Total comprehensive
income for the year

Cash dividends
General reserves
Total comprehensive
income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6,977,591	6,777,534	Receipts from customers
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	7,504,869	6,937,979	Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia
Pembayaran kepada pemasok	(9,573,764)	(9,115,525)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(1,050,529)	(1,273,100)	Payment to employees
Penerimaan pendapatan keuangan	66,047	68,182	Receipts of finance income
Pembayaran biaya keuangan	(329,427)	(418,988)	Payment of finance costs
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(1,454)	(6,121)	Placement of restricted cash and cash equivalents
Pembayaran pajak penghasilan badan	<u>(242,828)</u>	<u>(839,579)</u>	Payment of corporate income taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>3,350,505</u>	<u>2,130,382</u>	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan properti investasi	-	347,311	Proceeds from sale of investment properties
Penerimaan penjualan aset tetap	44,665	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan dividen	2,323	160	Proceeds of dividends
Pembelian aset tetap	(3,181,258)	(488,316)	Purchase of fixed assets
Penempatan deposito berjangka	-	(1,751,000)	Placement of time deposits
Penarikan deposito berjangka	1,751,000	-	Withdrawal of time deposits
Pembayaran uang muka untuk aset dalam penyelesaian	<u>-</u>	<u>(906,941)</u>	Advance payment for assets under construction
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1,383,270)</u>	<u>(2,798,786)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	5,480,000	1,628,500	Proceeds of short-term bank loans
Penerimaan pinjaman bank dan lainnya jangka panjang	2,381,101	2,064,437	Proceeds of long-term bank and other loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(6,080,000)	(1,653,500)	Repayments of short-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank dan lainnya jangka panjang	(4,118,417)	(1,600,000)	Repayments of long-term bank and other loans
Pembayaran liabilitas sewa	(31,834)	(61,699)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen	<u>(343,139)</u>	<u>(375,000)</u>	Payment of dividends
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(2,712,289)</u>	<u>2,738</u>	Net cash flows (used in)/ generated from financing activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(745,054)	(665,666)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	<u>(5,219)</u>	<u>(3,986)</u>	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>1,454,006</u>	<u>2,123,658</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>703,733</u>	<u>1,454,006</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 33.

Additional information of non-cash activities is presented in Note 33.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (“Perusahaan”) didirikan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No.14 tanggal 12 November 2010. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 13 Desember 2010 No. AHU-57993.AH.01.01 tahun 2010. Pendirian Perusahaan merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) dari PT Pupuk Indonesia (Persero) (dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Desember 2010. Pengalihan hak dan kewajiban sehubungan dengan *spin-off* berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 11 tanggal 27 Oktober 2020 oleh Notaris Lumassia, S.H., tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan persetujuan No. AHU-AH.01.03.0405621 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 4 Desember 2024 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham atas 1 lembar saham Perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berupa saham Dwiwarna. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan persetujuan No. AHU-AH.01.03-0224489 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri, perdagangan, jasa dan angkutan.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen, Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini Perusahaan mempunyai kegiatan operasi utama yaitu memproduksi pupuk urea, amoniak, NPK, utilitas maupun produk sampingan. Perusahaan mempunyai empat unit pabrik pupuk urea dan amoniak, yaitu pabrik IB, IIB, III, IV serta dua pabrik NPK yaitu NPK Fusion I dan NPK Fusion II.

1. GENERAL

a. The Company’s establishment

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (the “Company”) was established by notarial deed Fathiah Helmi, S.H., No. 14 dated 12 November 2010. The Company’s Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter dated 13 December 2010 No. AHU-57993.AH.01.01 year 2010. The establishment of the Company is a result of the separation (spin-off) of PT Pupuk Indonesia (Persero) (formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)) based on General Meeting of Extraordinary Shareholders dated 24 December 2010. The transfer of rights and obligations with respect to the spin-off became effective starting on 1 January 2011.

The Company’s Articles of Association has been amended several times, based on Deed Statements of Shareholders Resolution No. 11 dated 27 October 2020 by Notary Lumassia, S.H., concerning change of Article 3 of the Company’s Articles of Association of Purposes and Objectives and Business Activities. The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through an approval letter No. AHU-AH.01.03.0405621 year 2020 dated 27 October 2020.

Based on Notarial Deed No. 5 dated 4 December 2024 by Notary Lumassia, SH, concerning the change in ownership and composition of shareholders of 1 shares of the Company previously owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) to Government of Indonesia in the form of Dwiwarna share. The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through an approval letter No. AHU-AH.01.03-0224489 year 2024 dated 19 December 2024.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities comprises executing and supporting the Government’s policies and programmes in the areas of economy and national development in general, especially in industry, trading, services and transportation.

The Company and its head office is located in Jalan Mayor Zen, Palembang, South Sumatera. Currently, the Company’s main activities are producing urea fertiliser, ammonia, NPK, utilities and by-product. The Company has four ammonia and urea plants, namely, the IB, IIB, III, and IV and two NPK plants, namely NPK Fusion I and NPK Fusion II.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), perusahaan yang didirikan di Indonesia dan pemegang saham utama adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

The Company's parent entity is PT Pupuk Indonesia (Persero), a company that is incorporated in Indonesia and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember/December 2024

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Siti Nurizka Puteri Jaya
Bambang Supriyambodo
Pahoro Yulijanto Nurtjahyo
Ali Jamil Harahap
Sally Salamah
Fadjar Judisiawan

Board of Commissioners

President Commissioner and
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi dan Produksi
Direktur Keuangan dan Umum
Direktur Manajemen Risiko

Daconi Khotob
Filius Yuliandi
Saifullah Lasindrang
Saifullah Lasindrang (Plt.)^{*)}

Board of Directors

President Director
Production and Operation Director
Finance and General Director
Risk Management Director

*) Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan telah resmi tertuang pada Akta No. 3 oleh Notaris Lumassia S.H. tanggal 10 Juni 2024.

*) Appointed as Acting Director as officially stated in Notarial Deed No. 3 by Notary Lumassia S.H. dated 10 June 2024.

31 Desember/December 2023

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Setya Utama
Bambang Supriyambodo
Pahoro Yulijanto Nurtjahyo
Ali Jamil Harahap
Sally Salamah
Amiruddin Nahrawi

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi dan Produksi
Direktur Keuangan dan Umum

Daconi Khotob
Filius Yuliandi
Saifullah Lasindrang

Board of Directors

President Director
Production and Operation Director
Finance and General Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee as of 31 December 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember/December 2024

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Sally Salamah
Eddie Sulistiady
Bagas Putranto

Audit Committee

Chairman
Member
Member

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a. The Company's establishment (continued)

31 Desember/December 2023

Komite Audit

Ketua	Sally Salamah
Anggota	Eddie Sulistiady
Anggota	Bagas Putranto

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing 1.790 dan 1.803 karyawan tetap (tidak diaudit).

As at 31 December 2024 and 2023, the number of employees of the Company were 1,790 and 1,803 permanent employees (unaudited), respectively.

b. Struktur Grup

b. Group structure

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, struktur Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the structure of the Company and its subsidiary (collectively referred to as the "Group") were as follows:

<u>Entitas/ Entity</u>	<u>Kegiatan usaha/ Nature of business</u>	<u>Kedudukan/ Domicile</u>	<u>Persentase kepemilikan saham/ Percentage of ownership</u>		<u>Jumlah aset (sebelum eliminasi)/Total assets (before elimination)</u>	
			<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>

Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company

PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Perdagangan pestisida dan bahan senyawa nitrogen/Trading of pesticide and nitrogen compound material	Jakarta	51.00%	51.00%	55,480	57,851
-------------------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi terkait revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, as modified for revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan dari standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar;
- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amandemen PSAK 116: Sewa – Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik;
- Amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan;
- Amandemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amandemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

Changes to the SFAS and IFAS

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS have been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2024 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- Amendment of SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current;
- Amendment of SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendment of SFAS 116: Leases – Lease liability in Sale and Leaseback;
- Amendment of SFAS 212: Income Taxes;
- Amendment of SFAS 207: Statement of Cash Flow and amendment of SFAS 107: Financial Instrument: Disclosure - Supplier Finance Agreements.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui pengendalian atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS (continued)

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted.

- *SFAS 117: Insurance Contracts;*
- *Amendment of SFAS 221: Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability.*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiary

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. The subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. It is deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by the subsidiary have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi atas pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 109, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with SFAS 338: Business Combination of Entities Under Common Control. The difference between transfer price paid and carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had been occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net profit of associates and joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure the consistency with the policies adopted by the Group.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224: Pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 29.

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Untuk tujuan konsolidasi, untuk entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates (continued)

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's consolidated financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

c. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 224: Related party disclosures.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 29.

d. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

For consolidation purposes, for the Group's subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Dollar Amerika Serikat ("USD")	16,162	15,416	United States Dollar ("USD")

e. Aset keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- (ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Foreign currency translation (continued)

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

e. Financial assets

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:

- (i) Financial assets at amortised cost; and
- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification that is made after initial recognition.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Aset keuangan (lanjutan)

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

- (i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam pendapatan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam pendapatan/(beban) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Financial assets (continued)

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had financial assets measured at amortised cost and FVOCI.

Debt instruments

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- (i) Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Aset keuangan (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lainnya. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam pendapatan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- (iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih di dalam pendapatan/(beban) lainnya dalam periode keterjadiannya.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Financial assets (continued)

Debt instruments (continued)

- (ii) *FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.*
- (iii) *FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it occurs.*

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

f. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE").

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Financial assets (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of assets ownership.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

f. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL").

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**f. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk saldo piutang usaha. Selain untuk seluruh piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur KKE terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Piutang**(i) Piutang usaha dan piutang lainnya**

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**f. Impairment of financial assets (continued)**

The Group applies the "simplified approach" to measure the ECL which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables. Other than the trade receivables, the Group applies a general model to measure ECL.

The Group assesses on a forward-looking basis the ECL associated with its debt instruments carried at FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or not restricted.

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose, or which cannot be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

Time deposits with original maturity of more than three months and not exceed one year at the time of placement and which are not used as collateral nor restricted are presented as "other current assets" in the consolidated statement of financial position.

h. Receivables**(i) Trade and other receivables**

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Piutang (lanjutan)

**(i) Piutang usaha dan piutang lainnya
(lanjutan)**

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi piutang digunakan untuk mencatat dampak KKE, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi". Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukkan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukkan, diakui sebagai "Pendapatan lainnya – bersih" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea dan NPK yang bersubsidi.

Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia diakui berdasarkan berita acara verifikasi bulanan yang divalidasi oleh Kementerian Pertanian yang pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI").

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Receivables (continued)

(i) Trade and other receivables (continued)

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any reserve for impairment.

Collectibility of trade and other receivables are reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used to record impact from ECL, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses". When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other income – net" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised urea and NPK.

Subsidy receivables from the Government of Indonesia are recognised based on monthly verification minutes validated by the Ministry of Agriculture, at the end of the year needs to be audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK-RI").

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers.

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan pada akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

j. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 20 tahun.

Masa manfaat ekonomis dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business less applicable selling expense.

Impairment for obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of inventory expenses in the period in which the recovery occurs.

j. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also include property that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in form of land is presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment property is recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which is 20 years.

The estimated useful lives and depreciation method are reviewed at each year-end and the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

j. Properti investasi (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

j. Investment properties (continued)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extend the useful lives of the property or result in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, are capitalised. When the property is unused or otherwise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment property are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to ensure whether there is a material permanent impairment.

k. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

Valuation of land performed by external independent appraisers which are registered at Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Valuations are performed regularly (once in 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Cadangan revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Cadangan revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	10 - 20
Mesin dan peralatan pabrik	8 - 20
Kapal dan sarana	10 - 35
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Perlengkapan kantor	4
Aset penyangga	8 - 20

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "Pendapatan lainnya - bersih" di laba rugi.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: Aset tetap.

Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

k. Fixed assets (continued)

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Asset revaluation reserve" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Asset revaluation reserve" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Depreciation on other fixed assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

10 - 20	<i>Buildings</i>
8 - 20	<i>Machinery and plant</i>
10 - 35	<i>Ships and facilities</i>
4 - 8	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
4	<i>Office supplies</i>
8 - 20	<i>Supporting assets</i>

Land rights are recognised at cost.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other income - net" in profit or loss.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116: Leases. If land rights are substantially similar with land purchases, the Group applies SFAS 216: Fixed assets.

The asset's useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat terpulihkan (Catatan 2n).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

l. Aset tak berwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset tak berwujud.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun.

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

k. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2n).

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

l. Intangible asset

Computer software

The costs that are associated with the maintenance of computer software program are recognised as expenses when they are incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products that are controlled by the Group are recognised as intangible asset.

Other development expenditures that does not meet these criteria is recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over the estimated useful lives, which does not exceed four years.

m. Prepayments

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

n. Impairment of non-financial assets

Fixed assets and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

o. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

n. Impairment of non-financial assets (continued)

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

o. Employees benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount at pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensations.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms to the related pension obligation.

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Imbalan kerja (lanjutan)

**(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja
lainnya dan imbalan jangka panjang
lainnya (lanjutan)**

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Employees benefits (continued)

**(ii) Pension benefits, other post-employment
benefits and other long-term benefits
(continued)**

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company Regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- (i) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- (ii) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

p. Leases

Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- (i) *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- (ii) *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
 - *The Group has the right to operate the asset; or*
 - *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- (i) pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- (ii) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- (iii) harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- (iv) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

p. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- (i) fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- (ii) variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- (iii) the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- (iv) penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dalam "aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban.

q. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri atas utang kepada karyawan, utang pembelian aset tetap dan lain-lain. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

p. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets in the "fixed assets" and lease liabilities in the consolidated statement of financial position.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Low-value assets leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense.

q. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of payable to employees, payable for purchase of fixed assets and others. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**r. Provisi**

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

s. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**r. Provision**

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

s. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- (i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- (ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- (iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

t. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

u. Revenue and expense recognition

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:

- (i) Identify contract(s) with a customer;*
- (ii) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- (iii) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;*

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

- (iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- (v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- (i) Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- (ii) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

(i) Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang (pupuk subsidi, pupuk non-subsidi dan amonia) diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

u. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows: (continued)

- (iv) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin;
- (v) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied:

- (i) At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- (ii) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

(i) Sales of goods

Revenue from the sale of goods (subsidised fertiliser, non-subsidised fertiliser and ammonia) is recognised when all of the following conditions are fulfilled:

- the Group has transferred control of the goods to the buyer;
- the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;
- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- the costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(i) Penjualan barang (lanjutan)

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

(ii) Subsidi pupuk Pemerintah

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan dengan dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

(iii) Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi pendapatan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

u. Revenue and expense recognition (continued)

(i) Sales of goods (continued)

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customer when the title and risk are transferred.

(ii) Government's fertiliser subsidy

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the provisions that are stipulated in the Decrees of the Minister of Finance, the Minister of Agriculture and the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

(iii) Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;
- the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
- the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the recognised expenses that are recoverable.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan final disajikan terpisah dari beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiary operate and generate taxable income.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns ("SPT") in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Final income tax is presented separately from income tax expenses in profit or loss.

The difference between the carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**v. Pajak penghasilan kini dan tangguhan
(lanjutan)**

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan – kini" dalam laba rugi.

w. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

x. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

v. Current and deferred income tax (continued)

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities and where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expense – current" in profit or loss.

w. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

x. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

a. Estimated the useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**a. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi (lanjutan)**

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi 4 sampai dengan 35 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tetap dan properti investasi.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 11.

b. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 19.

c. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lainnya

Grup menghitung KKE, piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**a. Estimated the useful lives of fixed assets and investment properties (continued)**

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these fixed assets and investment properties to be within 4 to 35 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these fixed assets and investment properties.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 11.

b. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefit liabilities are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 19.

c. Provision for expected credit losses of trade and other receivables

The Group calculates ECLs for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**c. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)**

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

d. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ("Permendag") No. 4 tahun 2023. Subsidi pupuk diberikan untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea dan NPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Tata cara perhitungan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 10 Tahun 2022 yang mengubah jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK dan diperbaharui dalam Permentan No. 1 Tahun 2024 dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Keputusan Menteri Pertanian ("Kepmentan") No. 249 Tahun 2024.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**c. Provision for expected credit losses of trade
and other receivables (continued)**

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. Further details are disclosed in Note 5.

**d. Revenue and receivable recognition of
subsidy**

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Ministry of Trading ("Permendag") Regulation No. 4 of 2023. Fertiliser subsidies are given in accordance with the needs of farmers groups and/or farmers in the agricultural sector, including fertiliser type urea and NPK as stipulated by the Ministry of Agriculture.

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by the Ministry of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between cost of goods sold and the highest retail price.

Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price of Subsidised Fertilisers in the Agricultural Sector are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture ("Permentan") No. 10 of 2022 which changed the type of subsidised fertiliser to Urea and NPK and updated in the Permentan No. 1 of 2024, with its implementation further governed by the Decree of the Minister of Agriculture ("Kepmentan") No. 249 of 2024.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

d. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi
(lanjutan)

Pendapatan subsidi dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan estimasi kuantitas penyaluran pupuk yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut yang didasarkan pada kuantitas tersalur bulanan yang telah diverifikasi Kementerian Pertanian. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

Klasifikasi piutang subsidi antara porsi lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen selama setahun ke depan berdasarkan ketersediaan sisa *budget* Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") dan pos anggaran lainnya tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk penagihan piutang subsidi dan konfirmasi dari Kementerian Pertanian per tanggal neraca.

Selain itu, klasifikasi bagian lancar dan tidak lancar atas piutang subsidi didukung oleh tren pembayaran historis dari Pemerintah Indonesia.

e. Provisi atas penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

f. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Revenue and receivable recognition of
subsidy (continued)

Revenue from the Government subsidy is recorded based on subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result and estimates of distributed quantity as stated in Minutes of Audit Result which is based on monthly distributed quantity that has been verified by the Ministry of Agriculture. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

The classification of current and non-current portion of subsidy receivables is determined based on management's estimation and judgement for a year using the availability of the remaining budget of Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") and other budget items for the following year that available for collection of subsidy receivables and confirmation from the Ministry of Agriculture as of balance sheet date.

In addition, the classification of the current and non-current portions of subsidy receivables is supported by historical payment trends from the Government of Indonesia.

e. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision for impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

f. Uncertain tax exposures

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)****f. Ketidakpastian eksposur perpajakan (lanjutan)**

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

g. Pajak penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

h. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 116: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**f. Uncertain tax exposures (continued)**

All judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

g. Income taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits is heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices, etc; which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

h. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on SFAS 116: Leases, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**h. Sewa (lanjutan)**

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

i. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**h. Leases (continued)**

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the year ended 31 December 2024, there was no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

i. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	<u>1,450</u>	<u>1,396</u>	Rupiah
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 29)	251,758	23,808	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	447,362	26,151	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	1,095	8,621	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")	440	337	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")
PT Bank Panin Tbk	216	6	PT Bank Panin Tbk
Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank")	119	119	Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank")
Lainnya	103	59	Others
Pihak ketiga			Third parties
USD			USD
Bank BJB	1,002	2,711	Bank BJB
Lainnya	<u>188</u>	<u>152</u>	Others
Jumlah	<u>702,283</u>	<u>61,964</u>	Total
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 29)	-	1,360,646	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")	-	10,000	PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")
Bank Sumsel Babel	-	10,000	Bank Sumsel Babel
PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	<u>-</u>	<u>10,000</u>	PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")
Jumlah	<u>-</u>	<u>1,390,646</u>	Total
Jumlah kas dan setara kas	<u><u>703,733</u></u>	<u><u>1,454,006</u></u>	Total cash and cash equivalents

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka per tahun sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Tingkat suku bunga	-	4.00% - 7.10%	Interest rate
Jangka waktu	-	1 bulan/month	Time period

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29)	108,633	46,779	Related parties (Note 29)
Provisi penurunan nilai	<u>(3)</u>	<u>(2)</u>	Provision for impairment
	<u>108,630</u>	<u>46,777</u>	
Pihak ketiga	187,242	260,470	Third parties
Provisi penurunan nilai	<u>(97,805)</u>	<u>(88,483)</u>	Provision for impairment
	<u>89,437</u>	<u>171,987</u>	
Jumlah – bersih	<u>198,067</u>	<u>218,764</u>	Total – net

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of these trade receivables is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Lancar	168,131	205,926	Current
Sudah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	29,665	4,241	1 - 90 days
91 - 120 hari	27	639	91 - 120 days
121 - 365 hari	744	1,458	121 - 365 days
>365 hari	<u>97,308</u>	<u>94,985</u>	>365 days
	295,875	307,249	
Provisi penurunan nilai	<u>(97,808)</u>	<u>(88,485)</u>	Provision for impairment
Jumlah – bersih	<u>198,067</u>	<u>218,764</u>	Total – net

Perubahan provisi kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the provision for impairment losses are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	88,485	89,563	Beginning balance
Penambahan	12,019	367	Addition
Pemulihan	<u>(2,696)</u>	<u>(1,445)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u>97,808</u>	<u>88,485</u>	Ending balance

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

a. Piutang/(utang) subsidi

Saldo piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia atas penyaluran pupuk urea dan NPK bersubsidi oleh Perusahaan. Berikut rincian piutang subsidi:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tahun:		
2023	-	1,122,556
2022	34,775	34,775
2020	<u>13,063</u>	<u>13,063</u>
	<u>47,838</u>	<u>1,170,394</u>
Dikurangi:		
Utang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	<u>(4,633)</u>	<u>(115,985)</u>
Jumlah	<u>43,205</u>	<u>1,054,409</u>
Dikurangi:		
Bagian lancar	<u>-</u>	<u>(1,011,204)</u>
Bagian tidak lancar	<u>43,205</u>	<u>43,205</u>

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Allowance for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their carrying amount.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

See Note 29 for related parties information.

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

a. Subsidy receivables/(payables)

The balance of the subsidy receivables is the balance of the subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia for distributing urea and NPK subsidised fertiliser performed by the Company. The details of the subsidy receivables are as follows:

	Year:
	2023
	2022
	2020
Less:	
Value Added Tax ("VAT") out payable from unpaid subsidy receivables	
Total	
Less:	
Current portion	
Non-current portion	

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI DARI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA (lanjutan)

a. Piutang/(utang) subsidi (lanjutan)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Utang Subsidi") Tahun 2024	(31,921)	-
Piutang subsidi - bersih	<u>11,284</u>	<u>1,054,409</u>

Estimasi utang subsidi ke Pemerintah Republik Indonesia merupakan estimasi kelebihan bayar subsidi atas penyaluran pupuk untuk tahun 2024. Lihat Catatan 2u dan 3d mengenai pengakuan pendapatan dan piutang subsidi.

(Utang)/piutang subsidi ke/dari Pemerintah Republik Indonesia per 31 Desember 2024 merupakan piutang subsidi atas penyaluran pupuk subsidi untuk tahun 2024, 2022 dan 2020 berdasarkan hasil audit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 5 Mei 2025 (untuk tahun 2024), Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 27 Februari 2023 (untuk tahun 2022) dan 28 Mei 2021 (untuk tahun 2020) dikurangi jumlah subsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah.

Mutasi saldo neto piutang/(utang) subsidi Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	1,170,394	1,567,261
Penyesuaian Subsidi Pemerintah (Catatan 23)	(887)	(9,921)
PPN subsidi tahun berjalan	6,576,723	6,650,568
Penerimaan dari Pemerintah	723,440	731,562
Penerimaan dari PPN subsidi	(7,504,869)	(6,937,979)
	(838,107)	(769,908)
PPh 22 atas penerimaan	(114,288)	(61,189)
	12,406	1,170,394
Dikurangi: Utang PPN keluaran atas piutang subsidi belum dibayarkan	(1,122)	(115,985)
Saldo akhir	<u>11,284</u>	<u>1,054,409</u>

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN dari pelunasan piutang subsidi.

Secara umum, tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak debitur merupakan Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi ini.

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) FROM THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(continued)

a. Subsidy receivables/(payables) (continued)

Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia ("Subsidy Payables") Year 2024

Subsidy receivables - net

Estimated subsidy payables to the Government of Republic Indonesia represent estimated overpayment from fertiliser distribution in 2024. Refer to Notes 2u and 3d regarding subsidy revenue and receivable recognition.

Subsidy (payables)/receivables to/from the Government of Republic Indonesia as of 31 December 2024 represent subsidy receivables from subsidised fertiliser distribution in 2024, 2022 and 2020 determined based on the audit result by BPK-RI as stated on the Minutes of Audit Result dated 5 May 2025 (for the year 2024), Laporan Hasil Pemeriksaan dated 27 February 2023 (for the year 2022) and 28 May 2021 (for the year 2020), deducted with the amount of subsidy paid by the Government.

The movements of the net subsidy receivables/(payables) of the Group are as follows:

Beginning balance
Adjustment
Government subsidy (Note 23)
Current year subsidy VAT Receipt from the Government Receipt from VAT subsidy Income tax article 22 related to settlements

Less:
VAT out payable from unpaid subsidy receivables

Ending balance

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales which settlement will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

In substance, no impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. The credit risk on receivables from the fertiliser subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Republic of Indonesia and the Company is compensated with interest reimbursement as a result of late payment of subsidy's receivables.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI DARI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA (lanjutan)

b. Piutang subsidi yang belum ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang subsidi belum ditagih	120,559	141,972
Dikurangi: Utang PPN keluaran atas piutang subsidi belum ditagih	<u>(11,947)</u>	<u>(14,069)</u>
Jumlah	<u>108,612</u>	<u>127,903</u>

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk bersubsidi ke distributor namun belum tersalur ke petani. Piutang ini akan diakui sebagai pendapatan pupuk bersubsidi pada periode dimana pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani.

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) FROM THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(continued)

b. Unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Unbilled subsidy receivables	120,559	141,972
Less: VAT out payable from unbilled subsidy receivables	<u>(11,947)</u>	<u>(14,069)</u>
Total	<u>108,612</u>	<u>127,903</u>

Unbilled subsidy receivables represent sales to distributors of subsidised fertilisers which have not yet been distributed to farmers. These receivables will be recognised as sales from subsidised fertiliser in period when the subsidised fertilisers are being distributed to farmers.

7. PERSEDIAAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Barang jadi	1,063,920	1,669,476
Suku cadang	387,695	338,569
Bahan pembantu	163,748	138,204
Bahan baku	104,281	195,905
Barang dalam proses	<u>57,151</u>	<u>53,266</u>
	<u>1,776,795</u>	<u>2,395,420</u>
Provisi penurunan nilai	<u>(268,907)</u>	<u>(266,333)</u>
Jumlah	<u>1,507,888</u>	<u>2,129,087</u>

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	266,333	285,477
Penambahan	22,518	9,859
Pemulihan	<u>(19,944)</u>	<u>(29,003)</u>
Saldo akhir	<u>268,907</u>	<u>266,333</u>

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (*all risks*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.988.305 (2023: Rp1.511.547).

7. INVENTORIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Finished goods	1,063,920	1,669,476
Spare parts	387,695	338,569
Supporting materials	163,748	138,204
Raw materials	104,281	195,905
Work in process	<u>57,151</u>	<u>53,266</u>
	<u>1,776,795</u>	<u>2,395,420</u>
Provision for impairment	<u>(268,907)</u>	<u>(266,333)</u>
Total	<u>1,507,888</u>	<u>2,129,087</u>

Movements of provision for impairment of inventories is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beginning balance	266,333	285,477
Addition	22,518	9,859
Recovery	<u>(19,944)</u>	<u>(29,003)</u>
Ending balance	<u>268,907</u>	<u>266,333</u>

Based on a review at the reporting date, the Group's management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

As at 31 December 2024, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (*all risks*) with total sum insured of Rp1,988,305 (2023: Rp1,511,547).

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Uang muka			Advances
Uang muka pembayaran proyek	603,049	893,425	Advances for project payment
Uang muka pembelian:			Purchases advances
- Suku cadang	58,104	33,017	Spare parts -
- Bahan baku	-	9,486	Raw materials -
Uang muka operasional	<u>18,710</u>	<u>38,095</u>	Advances for operation
	<u>679,863</u>	<u>974,023</u>	
Biaya dibayar di muka			Prepayments
Sewa	17,468	24,660	Rental
Asuransi	15,027	7,154	Insurance
Lainnya	<u>5,303</u>	<u>856</u>	Others
	<u>37,798</u>	<u>32,670</u>	
Jumlah	<u>717,661</u>	<u>1,006,693</u>	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar	<u>(74,202)</u>	<u>(78,767)</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>643,459</u>	<u>927,926</u>	Non-current portion

Uang muka pembelian merupakan akun atas uang muka terkait pembelian bahan baku dan pembelian lainnya. Sedangkan uang muka pembayaran proyek merupakan uang muka pembayaran atas proyek Pabrik Pusri IIIB.

Purchases advance is an account advances used in purchasing raw materials and others. While advance payment represent advances for Pusri IIIB Plant project.

9. PIUTANG LAINNYA

9. OTHER RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29)	65,519	185,854	Related parties (Note 29)
Provisi penurunan nilai	<u>(1,029)</u>	<u>(405)</u>	Provision for impairment
	<u>64,490</u>	<u>185,449</u>	
Pihak ketiga	49,846	26,424	Third parties
Provisi penurunan nilai	<u>(40,423)</u>	<u>(14,956)</u>	Provision for impairment
	<u>9,423</u>	<u>11,468</u>	
Jumlah	<u>73,913</u>	<u>196,917</u>	Total

Mutasi provisi penurunan nilai piutang lainnya adalah sebagai berikut:

Changes in provision for impairment of other receivables are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	15,361	14,833	Beginning balance
Penambahan	26,117	528	Addition
Pemulihan	<u>(26)</u>	<u>-</u>	Recovery
Saldo akhir	<u>41,452</u>	<u>15,361</u>	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang lainnya adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

10. INVESTMENT IN ASSOCIATE

<u>Nama perusahaan/ Name of company</u>	<u>Nilai tercatat awal tahun /Carrying value at the beginning of the year</u>	<u>Bagian atas rugi bersih/ Share of net loss</u>	<u>Nilai tercatat akhir tahun/ Carrying value at the end of the year</u>
31 Desember/December 2024 PT Pupuk Indonesia Logistik	142,165	(40,226)	101,939
31 Desember/December 2023 PT Pupuk Indonesia Logistik	147,471	(5,306)	142,165

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, dimana entitas asosiasi tersebut merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya adalah sebagai berikut:

The summary of the associate's entity financial information, which the associate is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares is as follows:

<u>Nama perusahaan/ Name of company</u>	<u>Negara domisili/ Country of domicile</u>	<u>Aset lancar/ Current assets</u>	<u>Aset tidak lancar/ Non-current assets</u>	<u>Liabilitas jangka pendek/ Current liabilities</u>	<u>Liabilitas jangka panjang/ Non-current liabilities</u>	<u>Pendapatan/ Revenues</u>	<u>Rugi bersih/ Net loss</u>	<u>Rugi komprehensif lain/ Other comprehensive loss</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>
31 Desember/ December 2024 PT Pupuk Indonesia Logistik	Indonesia	219,843	408,948	264,500	204,243	594,451	(90,948)	427	44,23%
31 Desember/ December 2023 PT Pupuk Indonesia Logistik	Indonesia	237,664	433,846	215,263	205,679	481,080	(11,997)	(61)	44,23%

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amounts of the interests in associate is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Aset bersih			Net assets
Pada awal tahun	321,422	333,419	At the beginning of the year
Rugi tahun berjalan	(90,948)	(11,997)	Loss for the year
Pada akhir tahun	230,474	321,422	At the end of the year
Bagian atas aset bersih entitas asosiasi	101,939	142,165	Share in net assets of associate

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas investasi di PT Pupuk Indonesia Logistik.

As at 31 December 2024, there were no other indicators of investment impairment in PT Pupuk Indonesia Logistik.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

31 Desember/December 2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi						Revaluation value
Tanah	6,869,522	-	-	(67,334)	6,802,188	Land
Biaya perolehan						Acquisition cost
Bangunan	924,185	3,181	-	44,384	971,750	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	14,276,841	312,551	-	256,145	14,845,537	Machinery and plant equipments
Kapal dan sarana	1,519	-	-	-	1,519	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	41,247	4,333	-	-	45,580	Vehicle and heavy equipments
Perlengkapan kantor	260,734	22,262	-	1,755	284,751	Office supplies
Aset penyangga	268,511	37,480	-	(240)	305,751	Supporting assets
Aset dalam penyelesaian	1,022,905	3,585,165	-	(303,944)	4,304,126	Assets under construction
Aset hak-guna	92,201	14,670	(34,631)	-	72,240	Right-of-use assets
Jumlah	23,757,665	3,979,642	(34,631)	(69,234)	27,633,442	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(308,813)	(47,243)	-	-	(356,056)	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	(5,053,280)	(935,527)	-	-	(5,988,807)	Machinery and plant equipments
Kapal dan sarana	(597)	(66)	-	-	(663)	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	(32,571)	(2,282)	-	-	(34,853)	Vehicle and heavy equipments
Perlengkapan kantor	(226,234)	(17,226)	-	-	(243,460)	Office supplies
Aset penyangga	(153,828)	(25,247)	-	-	(179,075)	Supporting assets
Aset hak-guna	(37,636)	(36,831)	34,631	-	(39,836)	Right-of-use assets
Jumlah	(5,812,959)	(1,064,422)	34,631	-	(6,842,750)	Total
Penyisihan penurunan nilai						Provision for impairment
Mesin dan peralatan Pabrik	-	(10,506)	-	-	(10,506)	Machinery and plant
Jumlah	-	(10,506)	-	-	(10,506)	Total
Nilai tercatat	17,944,706				20,780,186	Carrying value
31 Desember/December 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi						Revaluation value
Tanah	6,941,894	-	-	(72,372)	6,869,522	Land
Biaya perolehan						Acquisition cost
Bangunan	902,369	3,246	(1,558)	20,128	924,185	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	14,016,053	41,007	-	219,781	14,276,841	Machinery and plant equipments
Kapal dan sarana	1,519	-	-	-	1,519	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	39,468	3,330	(1,551)	-	41,247	Vehicle and heavy equipments
Perlengkapan kantor	247,321	19,590	(6,662)	485	260,734	Office supplies
Aset penyangga	249,366	17,084	-	2,061	268,511	Supporting assets
Aset dalam penyelesaian	82,240	1,191,588	-	(250,923)	1,022,905	Assets under construction
Aset hak-guna	24,032	73,468	(5,299)	-	92,201	Right-of-use assets
Jumlah	22,504,262	1,349,313	(15,070)	(80,840)	23,757,665	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(264,385)	(45,368)	940	-	(308,813)	Buildings
Mesin dan peralatan Pabrik	(4,207,567)	(845,713)	-	-	(5,053,280)	Machinery and plant equipments
Kapal dan sarana	(531)	(66)	-	-	(597)	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	(31,823)	(2,299)	1,551	-	(32,571)	Vehicle and heavy equipments
Perlengkapan kantor	(214,591)	(17,902)	6,259	-	(226,234)	Office supplies
Aset penyangga	(126,160)	(27,668)	-	-	(153,828)	Supporting assets
Aset hak-guna	(10,045)	(32,890)	5,299	-	(37,636)	Right-of-use assets
Jumlah	(4,855,102)	(971,906)	14,049	-	(5,812,959)	Total
Nilai tercatat	17,649,160				17,944,706	Carrying value

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2024, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan harga perolehan sebesar Rp109.058 dan reklasifikasi dari properti investasi ke aset tetap sebesar Rp39.824.

Pada tahun 2023, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan harga perolehan sebesar Rp81.324 dan reklasifikasi persediaan suku cadang ke suku cadang penyangga sebesar Rp484.

Pembebanan penyusutan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	1,017,916	930,518	Cost of revenues (Note 24)
Beban penjualan (Catatan 25)	32,772	29,811	Selling expenses (Note 25)
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	<u>13,734</u>	<u>11,577</u>	General and administrative expenses (Note 26)
Jumlah	<u><u>1,064,422</u></u>	<u><u>971,906</u></u>	Total

Aset tetap dan properti investasi Grup diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD785.153.129 dan Rp1.880.549 (2023: USD785.153.129 dan Rp1.903.845).

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai aset dalam penyelesaian sebagian besar merupakan proyek pembangunan Pabrik Pusri IIIB dengan tahapan penyelesaian sebesar 40,3% (2023: 8,74%) dan diperkirakan selesai pada tahun 2027.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Bunga pinjaman	140,028	8,652	Interest expense

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum dan spesifik adalah sebesar 8,25% pada tahun 2024 (2023: 8,78%).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat kenaikan signifikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelompok aset yang direvaluasi yang dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dibandingkan tahun 2022.

11. FIXED ASSETS (continued)

In 2024, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties with acquisition cost amounting to Rp109,058 and reclassification from investment properties to fixed assets amounting to Rp39,824.

In 2023, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties with acquisition cost amounting to Rp81,324 and reclassified from inventory to spare part amounting to Rp484.

Depreciation of fixed assets were allocated as follows:

The fixed assets and investment properties of the Group are insured against fire and other risks under insurance package policies coverage as of 31 December 2024 amounting to USD785,153,129 and Rp1,880,549 (2023: USD785,153,129 and Rp1,903,845).

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

As of 31 December 2024, the balance of assets under construction primarily consists of the construction project of Pusri IIIB Plant, with a completion stage of 40.3% (2023: 8.74%) and is expected to be completed in 2027.

Borrowing costs which were capitalised to assets under construction as follows:

Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general and specific borrowings of 8.25% in 2024 (2023: 8.78%).

As at 31 December 2024 and 2023, there were no significant increases in the carrying amounts of the class of revaluated assets which has been recorded as the "Assets revaluation surplus" compared to 2022.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Keuntungan/(kerugian) atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Nilai jual	44,665	-	Selling price
Nilai buku	<u>(485)</u>	<u>(1,021)</u>	Book value
Keuntungan/(kerugian) bersih	<u><u>44,180</u></u>	<u><u>(1,021)</u></u>	Net gain/(loss)

Aset tetap berupa tanah dan pabrik dalam konstruksi Pusri IIIB digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 17).

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset tetap milik Grup, selain penurunan nilai aset tetap sebesar Rp10.506 terkait pabrik Pusri II.

11. FIXED ASSETS (continued)

Gain/(loss) on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Nilai jual	44,665	-	Selling price
Nilai buku	<u>(485)</u>	<u>(1,021)</u>	Book value
Keuntungan/(kerugian) bersih	<u><u>44,180</u></u>	<u><u>(1,021)</u></u>	Net gain/(loss)

Fixed assets such as land and Pusri IIIB plant in construction are used as collateral for long-term loans (Note 17).

Based on management's evaluation at the end of the year, there was no impairment indicator identified on fixed assets of the Group, other than impairment of fixed assets amounting to Rp10,506 for Pusri II plant.

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Aset takberwujud, setelah amortisasi	16,200	24,517	Intangible assets, net amortisation
Kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash
porsi tidak lancar	4,414	4,081	non-current portion
Lainnya	<u>908</u>	<u>485</u>	Others
Jumlah	<u><u>21,522</u></u>	<u><u>29,083</u></u>	Total

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

13. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kredit modal kerja			Working capital loan
PT Bank SMBC Indonesia Tbk			PT Bank SMBC Indonesia Tbk
("SMBC") sebelumnya			("SMBC") previously Bank
Bank Tabungan Pensiunan Nasional			Tabungan Pensiunan Nasional
("BTPN")	<u>-</u>	<u>600,000</u>	("BTPN")
Jumlah	<u><u>-</u></u>	<u><u>600,000</u></u>	Total

13. SHORT-TERM LOANS

Berikut adalah tambahan informasi terkait dengan fasilitas pinjaman jangka pendek yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024:

The following is additional information related to short-term loan facilities which were available as of 31 December 2024:

<u>Kreditur/</u>	<u>Jenis</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Periode</u>	<u>Tingkat suku</u>	<u>Jaminan/</u>
<u>Creditors</u>	<u>fasilitas/</u>	<u>fasilitas/</u>	<u>fasilitas/</u>	<u>bunga per tahun/</u>	<u>Collateral</u>
	<u>Facilities type</u>	<u>Facilities amount</u>	<u>Facility period</u>	<u>Annual interest rates</u>	
SMBC	- Kredit modal kerja/Working capital loan	Rp3,990,000	30 Oktober/ October 2025	JIBOR + 1,60%	Negative pledge
BNI	- Kredit modal kerja/Working capital loan	Rp500,000	20 September/ September 2025	JIBOR 3 bulan +1,8%/ JIBOR 3 months +1,8%	Negative pledge
BCA	- Kredit modal kerja/Working capital loan	Rp2,600,000	28 November/ November 2025	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Berikut adalah tambahan informasi terkait dengan fasilitas pinjaman jangka pendek yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024: (lanjutan)

13. SHORT-TERM LOANS (continued)

The following is additional information related to short-term loan facilities which were available as of 31 December 2024: (continued)

Kreditur/ Creditors	Jenis fasilitas/ Facilities type	Jumlah fasilitas/ Facilities amount	Periode fasilitas/ Facility period	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	Jaminan/ Collateral
Bank Mandiri	- Non-cash loan	USD 117,000,000	17 November/ November 2025	0.25% - 0.50%	Negative pledge
Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/Working capital loan	Rp1,250,000	17 November/ November 2025	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge
Deutsche Bank	- Kredit modal kerja/Working capital loan	USD 108,000,000	31 Oktober/ October 2025	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge

Jumlah biaya keuangan dari pinjaman jangka pendek selama tahun 2024 adalah sebesar Rp63.524 (2023: Rp41.101).

Total finance costs from short-term loans during the year 2024 was amounting to Rp63,524 (2023: Rp41,101).

14. UTANG USAHA

14. TRADE PAYABLES

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 29)	52,287	49,366	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga	82,439	85,712	Third parties
Jumlah	134,726	135,078	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payable by currency are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	134,726	134,359	Rupiah
USD	-	719	USD
Jumlah	134,726	135,078	Total

15. UTANG LAINNYA

15. OTHER PAYABLES

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 29)	2,958	46,388	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga	97,810	108,794	Third parties
Jumlah	100,768	155,182	Total

Utang lainnya sebagian besar merupakan uang muka dari pelanggan sebesar Rp75.883 (2023: Rp82.776) dan sisanya merupakan utang kepada karyawan dan utang lainnya.

Other payables mainly consist of advances from customers amounting to Rp75,883 (2023: Rp82,776) and the remaining are payable to employees and other liabilities.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED LIABILITIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Akrual proyek	1,230,095	839,556	Accrual project
Gas bumi	524,918	441,252	Natural gas
Distribusi	213,529	204,840	Distribution
Batu bara	45,467	35,657	Coal
Bahan pembantu	21,109	5,876	Supporting material
Bunga pinjaman	15,460	44,783	Interest from loan
Bahan baku NPK	7,870	39,870	NPK raw material
Lainnya	<u>120,537</u>	<u>170,222</u>	Others
Jumlah	<u>2,178,985</u>	<u>1,782,056</u>	Total

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG

17. LONG-TERM LOANS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29):			Related parties (Note 29):
PT Pupuk Indonesia (Persero)	775,000	3,460,000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	569,347	165,011	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	546,873	798,497	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	254,710	73,821	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	254,232	77,196	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
PT Bank Tabungan Negara Tbk ("BTN")	229,227	66,436	PT Bank Tabungan Negara Tbk ("BTN")
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")	<u>2,804</u>	<u>2,809</u>	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")
Jumlah	<u>2,632,193</u>	<u>4,643,770</u>	Total
Pihak ketiga:			Third parties:
BCA	254,710	73,821	BCA
Bank BJB	164,797	47,762	Bank BJB
Bank Sumsel Babel	<u>119,250</u>	<u>34,562</u>	Bank Sumsel Babel
	<u>538,757</u>	<u>156,145</u>	
Jumlah pinjaman	<u>3,170,950</u>	<u>4,799,915</u>	Total loan
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(2,804)</u>	<u>(2,935,644)</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>3,168,146</u>	<u>1,864,271</u>	Non-current portion

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi mengenai pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

17. LONG-TERM LOANS (continued)

Information related to long-term loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ Creditors	Jenis fasilitas/ Facilities type	Jumlah fasilitas/ Facilities amount	Periode jatuh tempo/ Maturity period	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	Jaminan/ Collateral
BRI	- Kredit modal kerja/Working capital loan	Rp1,500,000	31 Maret/ March 2026	JIBOR 3 bulan +4,5%/ JIBOR 3 months +4,5%	Negative pledge
PT Pupuk Indonesia (Persero)	- Pinjaman pemegang saham/ Shareholder loan	Rp800,000	12 Desember/ December 2026	JIBOR 3 bulan + 1%/ JIBOR 3 months + 1%	-
YKKP	- Pinjaman pemegang saham/ Shareholder loan	Rp7,000	30 Juni/ June 2023 (dalam proses perpanjangan/ extension)	12.00%	Tanah/ Land

Pinjaman sindikasi

Informasi mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Syndicated loans

Information related to syndicated loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ Creditors	Jenis fasilitas/ Facilities type	Jumlah fasilitas/ Facilities amount	Periode jatuh tempo/ Maturity period	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	Jaminan/ Collateral
Bank Mandiri	- Kredit investasi/Investment loan	Rp1,825,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- Investment During Contract ("IDC")	Rp325,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BNI	- Kredit investasi/Investment loan	Rp1,900,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp350,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BCA	- Kredit investasi/Investment loan	Rp850,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BRI	- Kredit investasi/Investment loan	Rp850,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BTN	- Kredit investasi/Investment loan	Rp765,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp135,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BSI	- Kredit investasi/Investment loan	Rp900,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
BJB	- Kredit investasi/Investment loan	Rp550,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp100,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
Bank Sumsel Babel	- Kredit investasi/Investment loan	Rp398,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant
	- IDC	Rp69,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIIB/ Pusri IIIIB Plant

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 13 October 2023, Perusahaan sebagai peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank ("Pemberi Pinjaman"), yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, BSI, BJB dan Bank Sumsel Babel. Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan fasilitas untuk membiayai pembangunan pabrik Pusri IIIB. Beban keuangan atas pinjaman ini dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, Grup diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2024. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Grup telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

Jumlah biaya keuangan dari pinjaman jangka panjang selama tahun 2024 yang dibebankan di laba rugi adalah sebesar Rp198.590 (2023: Rp371.336) (Catatan 27).

17. LONG-TERM LOANS (continued)

On 13 October 2023, the Company as the borrower entered into a syndicated loan facility agreement with several banks ("the Lenders") which consist of Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, BSI, BJB and Bank Sumsel Babel. The Lenders agreed to provide an investment credit facility which was used to finance the construction of Pusri IIIB plant. The finance costs of these loans are capitalised to assets under construction.

In accordance with the loan agreements, the Group is required to maintain certain financial ratios, which the Group was in compliance as at 31 December 2024. The Group is also required to comply with certain terms and conditions in relation to its Articles of Association, the nature of its business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. The Group has complied with the relevant terms and conditions.

Total finance costs from long-term loans during the year 2024 charged to profit or loss was amounting to Rp198,590 (2023: Rp371,336) (Note 27).

18. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pajak penghasilan badan:		
2024	54,019	-
2023	88,144	86,073
2019	<u>97,635</u>	<u>97,635</u>
	<u>239,798</u>	<u>183,708</u>
Pajak lainnya:		
PPN	<u>100,787</u>	<u>73,089</u>
	<u>100,787</u>	<u>73,089</u>
Jumlah	<u><u>340,585</u></u>	<u><u>256,797</u></u>
Dikurangi:		
Bagian lancar	<u>(286,566)</u>	<u>(73,089)</u>
Bagian tidak lancar	<u><u>54,019</u></u>	<u><u>183,708</u></u>

18. TAXATION

a. Prepaid taxes

<i>Corporate income taxes:</i>
2024
2023
2019
<i>Other taxes:</i>
VAT
<i>Total</i>
<i>Less:</i>
<i>Current portion</i>
<i>Non-current portion</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Pasal 25/29	11,142	115	Article 25/29
Pajak lainnya:			Other taxes:
PPN WAPU	71,901	16,270	VAT WAPU
Pasal 21	7,818	31,326	Article 21
Pasal 23	2,202	1,819	Article 23
Pasal 22	1,502	1,307	Article 22
Pasal 15	718	1,158	Article 15
Pasal 4(2)	445	138	Article 4(2)
Jumlah	<u>84,586</u>	<u>52,018</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Perusahaan:			The Company:
Pajak kini	187,735	215,892	Current tax
Pajak tangguhan	133,368	43,223	Deferred tax
Penyesuaian tahun lalu	9,982	73,040	Prior year adjustment
	<u>331,085</u>	<u>332,155</u>	
Entitas anak:			Subsidiary:
Pajak kini	49	660	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
	<u>49</u>	<u>660</u>	
Konsolidasian:			Consolidated:
Pajak kini	187,784	216,552	Current tax
Pajak tangguhan	133,368	43,223	Deferred tax
Penyesuaian tahun lalu	9,982	73,040	Prior year adjustment
	<u>331,134</u>	<u>332,815</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan jumlah pajak teoritis atas laba Grup sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's profit before income tax is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,399,669	1,532,674	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	307,927	337,188	Income tax calculated at applicable tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan	26,689	5,119	Non-deductible expenses
Pendapatan dikenakan pajak final	(13,464)	(82,532)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun lalu	9,982	73,040	Prior year adjustment
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>331,134</u>	<u>332,815</u>	Consolidated income tax expenses

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/52 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda waktu antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas. Rincian aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of the total assets and liabilities recorded on the financial statements and the tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

31 Desember/December 2024					
Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets/(liabilities)
Liabilitas imbalan pascakerja	148,477	(134,726)	101,500	115,251	Post-employment benefits liabilities
Cadangan atas penurunan nilai persediaan	58,593	566	-	59,159	Allowance for impairment of inventories
Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	22,846	9,762	-	32,608	Allowance for impairment of trade receivables and other receivables
Penyusutan aset tetap	(579,330)	17,363	-	(561,967)	Depreciation of fixed assets
Bonus, insentif dan tantiem	71,316	(29,075)	-	42,241	Bonus, incentives and tantiem
Provisi penurunan nilai aset tetap	-	2,311	-	2,311	Provision for impairment of fixed assets
Lainnya	5,992	431	-	6,423	Others
Jumlah	(272,106)	(133,368)	101,500	(303,974)	Total
31 Desember/December 2023					
Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credit to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets/(liabilities)
Liabilitas imbalan pascakerja	132,925	1,440	14,112	148,477	Post-employment benefits liabilities
Cadangan atas penurunan nilai persediaan	62,805	(4,212)	-	58,593	Allowance for impairment of inventories
Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	22,967	(121)	-	22,846	Allowance for impairment of trade receivables and other receivables
Beban penyusutan	(565,510)	(13,820)	-	(579,330)	Depreciation expense
Bonus, insentif dan tantiem	105,322	(34,006)	-	71,316	Bonus, incentives and tantiem
Lainnya	(1,504)	7,496	-	5,992	Others
Jumlah	(242,995)	(43,223)	14,112	(272,106)	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak ("SKP")

Entitas/ Entity	Jenis pajak/ Type of taxes	Tahun pajak dan status pada 31 Desember 2024 /Fiscal year and status as at 31 December 2024	Nilai sengketa/ Amount of disputes	Pajak dibayar di muka/ Prepaid tax	Pengembalian dana pajak/ Tax refund	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit or loss
Perusahaan/ The Company	PPH badan/Corporate income tax	2019 (Banding/ Appeal)	97,635	97,635	-	-

Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas pajak penghasilan badan tahun 2019 pada November 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sengketa pajak masih dalam proses banding oleh pengadilan pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa sengketa pajak tersebut tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Perusahaan.

g. Tarif pajak

Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU No. 7/2021 memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan antara lain membatalkan penurunan tarif PPh Badan sebelumnya dari 22% ke 20% di tahun pajak 2022, sehingga tarif PPh Badan tetap di 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, kenaikan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% dengan penghasilan kena pajak diatas Rp5.000 berlaku mulai tahun pajak 2022, kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Pada 1 Januari 2025, Pemerintah mengesahkan PMK No. 113/2024 yang mengatur tentang mekanisme dasar penerapan PPN 12%.

18. TAXATION (continued)

e. Tax administration

Under the Indonesian taxation laws, the Company and subsidiary, which are domiciled in Indonesia, calculate and pay tax on the basis of self assessment. DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax become due.

f. Tax assessment letters ("SKP")

The Company has submitted appeal to Tax Court on corporate income tax for fiscal year 2019 in November 2022. As at 31 December 2024, the tax dispute is still in appeal process by the tax court. Management is of the opinion that the ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the Company's financial position and cash flows.

g. Tax rates

Law No. 7/2021

On 29 October 2021, the Government agreed on Law No. 7/2021 related to Harmonisation of Tax Regulations. Law No. 7/2021 contains a number of changes to tax rules, including repealing the previous reduction in CIT rate from 22% to 20% in fiscal year 2022, so that the CIT rate remains at 22% for fiscal year 2022 onwards, an increase in the highest Personal Income Tax rate to 35% for taxable income above Rp5,000 from the 2022 fiscal year, a gradual increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and 12% no later than 1 January 2025 and a taxpayer voluntary disclosure programme.

On 1 January 2025, the Government ratified PMK No. 113/2024 which regulates the basic mechanism for implementing 12% VAT.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

a. Liabilitas imbalan kerja

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Gaji, insentif dan bonus	199,883	324,167
Liabilitas imbalan kerja	47,634	53,370
Lainnya	<u>1,131</u>	<u>77,507</u>
Jumlah	<u>248,648</u>	<u>455,044</u>
Dikurangi:		
Bagian lancar	<u>244,367</u>	<u>455,044</u>
Bagian tidak lancar	<u>4,281</u>	<u>-</u>

b. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup menyelenggarakan program imbalan pasca kerja ("IPK") dan imbalan kerja jangka panjang lainnya ("IJPL"), sebagai berikut:

1. Program imbalan pascakerja

i. Program pensiun

Grup memberikan Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") kepada karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun PPIP-Pusri. Pendirian Dana Pensiun telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui KEP-3077/NB.1/2014 pada tanggal 17 September 2014.

Grup juga menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") untuk karyawan yang bekerja sebelum periode tahun 2007, dimana peserta dijamin dengan manfaat panjang bulanan seumur hidup dengan kenaikan otomatis sebesar 6% setiap tahun. Iuran program ini seluruhnya ditanggung oleh Grup.

Pada Juni 2024, terdapat perubahan atas kenaikan manfaat pensiun. Kenaikan yang sebelumnya sebesar 6% setiap tahun untuk periode 2003 hingga 2024 berubah menjadi 2% per tahun untuk periode 2025 hingga 2027. Perubahan ini menyebabkan pengurangan biaya jasa masa lalu pada tahun 2024 sebesar Rp535.784.

ii. Imbalan pascakerja lainnya

Grup memberikan imbalan kerja lainnya dalam bentuk manfaat pesangon.

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

a. Employee benefits liabilities

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Gaji, insentif dan bonus	199,883	324,167	Salaries, incentives and bonuses
Liabilitas imbalan kerja	47,634	53,370	Employee benefit liabilities
Lainnya	<u>1,131</u>	<u>77,507</u>	Others
Jumlah	<u>248,648</u>	<u>455,044</u>	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar	<u>244,367</u>	<u>455,044</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>4,281</u>	<u>-</u>	Non-current portion

b. Post-employment benefit plans and other long-term employee benefits

The Group provides post-employment benefits ("PEB") and other long-term employee benefits ("OLTEB") plans as follows:

1. Post-employment benefit plans

i. Pension plan

The Group provides a Defined Contribution Pension Plan ("DCPP") to its employees managed by the Dana Pensiun DCPD-Pusri. The establishment of the Pension Fund has been approved by the Financial Services Authority through KEP-3077/NB.1/2014 dated 17 September 2014.

The Group also provides a Defined Benefit Pension Program ("DBPP") for employees who work before the period of 2007. Under this plan, participants are guaranteed a lifetime pension benefit with 6% automatic increase every year. The total contribution of this program is borne by the Group.

In June 2024, there was change in the increase of pension benefits. The increase, which was previously 6% annually for the period from 2003 to 2024, was changed to 2% annually for the period from 2025 to 2027. The change resulted in a reduction of past service costs in 2024 amounting to Rp535,784.

ii. Other post-employment benefits

The Group provides other employee benefits in the form of terminations benefits.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan cuti besar dan penghargaan bakti kerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Grup dan serikat pekerja.

c. Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan pascakerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Other long-term employee benefits (continued)

2. Other long-term employee benefits

The Group provides long service leave and long service award in accordance with Collective Labour Agreement ("CLA") between the Group and the labor union.

c. Post-employment benefits liabilities

The employee benefits liabilities are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the post-employment benefits liabilities reported in the consolidated statement of financial position:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Perusahaan			The Company
IPK	2,647,597	2,795,906	PEB
IJPL	83,191	71,866	OLTEB
	<u>2,730,788</u>	<u>2,867,772</u>	
Nilai wajar aset program	<u>(2,206,920)</u>	<u>(2,192,875)</u>	<i>Fair value of plan assets</i>
Jumlah – Perusahaan	<u>523,868</u>	<u>674,897</u>	<i>Total – the Company</i>
Imbalan pascakerja – entitas anak	<u>225</u>	<u>225</u>	<i>Post-employment benefit liability – subsidiary</i>
Jumlah liabilitas imbalan pascakerja	<u>524,093</u>	<u>675,122</u>	<i>Total post-employment benefits liabilities</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Liabilitas imbalan pascakerja bagian jangka pendek (Catatan 19a)	<u>(47,634)</u>	<u>(53,370)</u>	<i>Short-term portion of post-employment benefits liabilities (Note 19a)</i>
Liabilitas imbalan pascakerja bagian jangka panjang	<u>476,459</u>	<u>621,752</u>	<i>Long-term portion of post-employment benefits liabilities</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

c. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

c. Post-employment benefits liabilities (continued)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movement of Company's post-employment benefits liabilities were as follows:

	31 Desember/December 2024				
	IPK/PEB	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	IJPL/OLTEB	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	
Pada 1 Januari 2024	(2,795,906)	2,192,875	(71,866)	(674,897)	As at 1 January 2024
Biaya jasa kini	(39,925)	-	(29,153)	(69,078)	Current service cost
Biaya jasa lalu	535,784	-	-	535,784	Past service cost
Biaya bunga bersih	(178,504)	-	(3,939)	(182,443)	Net interest cost
Pendapatan bunga	(4,712)	143,002	-	138,290	Interest income
Imbalan di luar provisi	(732)	-	-	(732)	Excess benefit
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	(9,119)	(9,119)	Net actuarial loss
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	311,911	143,002	(42,211)	412,702	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga – bersih	-	(11,920)	-	(11,920)	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income – net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(136,393)	-	-	(136,393)	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(163,457)	-	-	(163,457)	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	(83,975)	-	-	(83,975)	Actuarial loss from experience adjustment
Perubahan dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga atas dampak batas asset)	(65,620)	-	-	(65,620)	Change in effect of asset ceiling excluding interest
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(449,445)	(11,920)	-	(461,365)	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:					Payments from plans:
Pembayaran iuran	-	145,383	-	145,383	Contribution payments
Imbalan yang dibayar	285,843	(262,420)	30,886	54,309	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2024	(2,647,597)	2,206,920	(83,191)	(523,868)	Post-employment benefit liabilities as at 31 December 2024

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

c. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Post-employment benefits liabilities (continued)

The movement of Company's post-employment benefits liabilities were as follows: (continued)

	31 Desember/December 2023				
	IPK/PEB		IJPL/OLTEB		
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Jumlah/ Total	
Pada 1 Januari 2023	(2,751,502)	2,222,970	(75,673)	(604,205)	As at 1 January 2023
Biaya jasa kini	(33,273)	-	(31,394)	(64,667)	Current service cost
Biaya jasa lalu	(24,165)	-	304	(23,861)	Past service cost
Biaya bunga bersih	(184,415)	-	(3,575)	(187,990)	Net interest cost
Pendapatan bunga	-	150,666	-	150,666	Interest income
Imbalan di luar provisi	(1,425)	-	-	(1,425)	Excess benefit
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	(2,477)	(2,477)	Net actuarial loss
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(243,278)	150,666	(37,142)	(129,754)	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga – bersih	-	6,737	-	6,737	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income – net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(15,843)	-	-	(15,843)	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	-	-	-	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	(55,042)	-	-	(55,042)	Actuarial loss from experience adjustment
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(70,885)	6,737	-	(64,148)	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:					Payments from plans:
Pembayaran iuran	-	67,504	-	67,504	Contribution payments
Imbalan yang dibayar	269,759	(255,002)	40,949	55,706	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2023	(2,795,906)	2,192,875	(71,866)	(674,897)	Post-employment benefit liabilities as at 31 December 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada Dana Pensiun Pusri adalah sebesar Rp2.206.920 (2023: Rp2.192.875).

Sebagian besar aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan obligasi yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip.

As at 31 December 2024, the fair value of plan assets in Dana Pensiun Pusri were amounting to Rp2,206,920 (2023: Rp2,192,875).

These plan assets were mainly placed in the form of investments in time deposits and bonds, which did not have quoted market prices.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

d. Asumsi-asumsi aktuarial

d. Actuarial assumptions

Provisi imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits, aktuaris independen.

Provision for employee benefits as of 31 December 2024 and 2023 were calculated by Actuarial Consulting Office ("KKA") Steven & Mourits, an independent actuary.

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Grup adalah sebagai berikut:

Significant actuarial assumptions applied in the calculation of post-employment benefit obligations and other long-term employment benefits for the Group are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Tingkat diskonto per tahun	6.95% - 7.15%	6.50% - 6.85%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji:			<i>Salary growth rate:</i>
Penghasilan dana pensiun	1.00%	1.00%	<i>Pension fund</i>
Manfaat pensiun	6.00%	6.00%	<i>Pension benefit</i>
Imbalan pascakerja lainnya	6.00%	6.00%	<i>Other post-employment benefits</i>
Program pensiun	7.00%	6.70%	<i>Pension program</i>
Tabel mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	<i>Normal retirement age (in years)</i>

Melalui program pensiun manfaat pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti risiko volatilitas aset, risiko tingkat diskonto, risiko gaji dan perubahan imbal hasil obligasi sebagai berikut:

Though its defined benefits pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as assets volatility, discount rate risk, salary risk and changes in bond yields as follows:

i. Volatilitas aset

i. Assets volatility

Asumsi yang berhubungan dengan tingkat pengembalian aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan data historis dan ekspektasi manajemen terhadap pengembangan investasi di masa yang akan datang. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Assumptions regarding the expected return on plan assets are based on the historical data and management's expectation of the future investment development. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

ii. Risiko tingkat diskonto

ii. Discount rate risk

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada obligasi Pemerintah Indonesia jangka panjang. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determined by reference to yields on Indonesian Government long-term bonds. Decrease in bonds interest rate would increase the liability program.

iii. Risiko gaji

iii. Salary risk

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase of program participants will increase the liability program.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

iv. Perubahan imbal hasil obligasi

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Grup memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Diasumsikan bahwa tingkat tren diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat tren akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1.00%	Penurunan sebesar/ Decrease by 6.00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 5.97%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 1.80%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.24%	Salary growth rate

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

d. Actuarial assumptions (continued)

iv. Changes in bond yields

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit program.

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

The Group ensures that the investment positions are managed within an *asset-liability matching* ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates optimum risk-adjusted returns, and considering the risk level.

Investment across the plans is well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall group assets.

Management believes that the estimated liabilities and employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability stated by the Job Creation Law.

An assumption has been made that discount rate and salary growth rates have a significant effect on the amounts recognised in profit or loss. One percent of change in the assumption of trend rates will have the following impact:

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

d. Actuarial assumptions (continued)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2024				Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	Antara 1 sampai 2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2 sampai 5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years		
IPK	263,943	243,983	611,379	1,076,412	2,195,717	PEB
IJPL	47,634	57,480	197,525	3,590,941	3,893,580	OLTEB
	<u>311,577</u>	<u>301,463</u>	<u>808,904</u>	<u>4,667,353</u>	<u>6,089,297</u>	

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the shareholders were as follows:

31 Desember/December 2024				
Pemegang saham	Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Number of share issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia	1	-	1	Class A Dwiwarna share The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP	5,799,985 14	99.9998 0.0002	5,799,985 14	Class B shares PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP
Jumlah	<u>5,800,000</u>	<u>100</u>	<u>5,800,000</u>	Total
31 Desember/December 2023				
Pemegang saham	Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Number of share issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP	5,799,986 14	99.9998 0.0002	5,799,986 14	PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP
Jumlah	<u>5,800,000</u>	<u>100</u>	<u>5,800,000</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 4 Desember 2024 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham atas satu lembar saham Perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berupa saham Dwiwarna. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan persetujuan No. AHU-AH.01.03-0224489 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan dan pengambil alihan Perusahaan dan semua hak-hak lainnya yang tidak dimiliki pemegang saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

20. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 5 dated 4 December 2024 by Notary Lumassia, SH, concerning the change in ownership and composition of shareholders of one share of the Company previously owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) to Government of Indonesia in the form of Dwiwarna share. The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through an approval letter No. AHU-AH.01.03-0224489 year 2024 dated 19 December 2024.

The Class A Dwiwarna share is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of the Company and all other rights not owned by the holder of Class B shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Selisih nilai transaksi <i>spin-off</i> dengan PT Pupuk Indonesia (Persero)	(404,668)	(404,668)
Perbedaan jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi pada PT Pupuk Indonesia Logistik	<u>70,792</u>	<u>70,792</u>
	<u>(333,876)</u>	<u>(333,876)</u>

Berdasarkan laporan konsultan independen, saldo awal *spin-off* laporan posisi keuangan Grup per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp77.817.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Grup di luar Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tentang tindak lanjut atas keputusan RUPS pemisahan (*spin-off*) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan RUPS PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan berita acara rekonsiliasi liabilitas perpajakan antara PI dengan Grup tertanggal 29 Desember 2011, uang muka dividen sebesar Rp126.098, *pooling of funds* sebesar Rp54.967, Pendanaan Program Usaha Mikro dan Kecil ("PPUMK") sebesar Rp8.890 serta pajak sebelum *spin-off* sebesar Rp111.127 merupakan liabilitas yang dibebankan kepada Grup.

21. ADDITIONAL PAID-IN-CAPITAL

The additional paid-in-capital as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Excess of proceeds <i>spin-off</i> with PT Pupuk Indonesia (Persero)	(404,668)	(404,668)
Difference between the purchase consideration and the carrying value of investment in PT Pupuk Indonesia Logistik	<u>70,792</u>	<u>70,792</u>
	<u>(333,876)</u>	<u>(333,876)</u>

Based on independent consultant report, the *spin-off* opening balance on the statement of financial position of the Group as of 1 January 2011 was amounting to Rp77,817.

Based on the decision of the Group's shareholders outside the General Meeting of Shareholders ("GMS"), regarding the GMS decision about *spin-off* of PT Pupuk Indonesia (Persero) and GMS of PT Pupuk Indonesia (Persero) on the approval of annual reports and ratification of the 2010 financial statements dated 28 June 2010 and the minutes of tax liability reconciliation between PI and the Group dated 29 December 2011, the advance of dividend amounted to Rp126,098, *pooling of funds* amounted to Rp54,967, Funding of the Partnership Program Micro and Small Business ("PPUMK") amounted to Rp8,890 and taxes before *spin-off* amounting to Rp111,127 were obligations charged to the Group.

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Aset pajak tangguhan sebelum spin-off sebesar Rp25.769 timbul sebagai akibat dari penyerahan aset dari PI kepada Perusahaan yang memakai nilai buku dari aset tersebut sehingga saldo pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aset tetap antara akuntansi dan perpajakan (komersial dan fiskal) harus dihapuskan karena nilai aset yang diserahkan ke Perusahaan merupakan nilai perolehan awal aset Perusahaan sehingga tidak ada akumulasi penyusutan dari aset tersebut.

Pada tahun 2015, Grup melakukan transaksi dengan entitas sepengendali PT Pupuk Indonesia Logistik sehingga terdapat perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" sejumlah Rp70.792.

22. PENCADANGAN SALDO LABA DAN DIVIDEN

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 22 Juli 2024 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2022 tanggal 8 Juni 2023, Perusahaan mencadangkan saldo laba masing-masing sebesar Rp855.877 dan Rp2.280.533 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 11 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp343.139.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2022 berdasarkan Akta Notaris No. 7 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 8 Juni 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp375.000.

21. ADDITIONAL PAID-IN-CAPITAL (continued)

Deferred tax assets before spin-off amounting to Rp25,769 were incurred as a result of assets transfer from PI to the Company using book value of the assets thus the deferred tax balances which are derived from the difference between accounting and taxation depreciation method (commercial and fiscal) should be eliminated because the value of the assets given to the Company is an acquisition value of the Company's assets so there were no accumulated depreciation of the assets.

In 2015, the Group entered into a transaction with an entity under common control PT Pupuk Indonesia Logistik so there was a difference between the purchases consideration and the carrying value of investments obtained from this transaction which was recorded in "additional paid-in-capital" amounting to Rp70,792.

22. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DIVIDEND

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the GMS for the Financial Year 2023 dated 22 July 2024 and GMS for the Financial Year 2022 dated 8 June 2023, the Company had appropriated retained earnings of Rp855,877 and Rp2,280,533 for the years ended 31 December 2024 and 2023, respectively. The reserves that have been designated for specific use (appropriated) include reserves related to fulfilling obligation in accordance with the Indonesian Limited Company Law and other general reserves.

As resolved during the GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2023 based on Notarial Deed No. 11 by notary Lumassia S.H. dated 22 July 2024, the shareholders approved cash dividend of Rp343.139.

As resolved during the GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2022 based on Notarial Deed No. 7 by notary Lumassia S.H. dated 8 June 2023, the shareholders approved cash dividend of Rp375.000.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/63 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN

23. REVENUE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Penjualan pupuk			Fertiliser sales
Subsidi			Subsidy
Urea sektor pangan	2,398,770	2,479,005	Urea food sector
Non-urea sektor pangan	690,090	542,265	Nonurea food sector
Subsidi Pemerintah (Catatan 6a)	6,576,723	6,650,568	Government subsidy (Note 6a)
Mutasi penjualan subsidi yang belum ditagih (Catatan 6b)	<u>(19,291)</u>	<u>(10,904)</u>	Movement of unbilled subsidy (Note 6b)
	<u>9,646,292</u>	<u>9,660,934</u>	
Non-subsidi			Non-subsidy
Urea sektor perkebunan	1,298,640	1,514,123	Urea plantation sector
Non-urea sektor perkebunan	1,988	3,426	Non-urea plantation sector
Urea sektor industri	953,454	836,158	Urea industry sector
Non-urea sektor industri	-	70	Non-urea industry sector
Urea sektor retail	670,320	497,303	Urea retail sector
Non-urea sektor retail	<u>39,910</u>	<u>32,138</u>	Non-urea retail sector
	<u>2,964,312</u>	<u>2,883,218</u>	
Pendapatan non-pupuk			Non-fertiliser revenue
Amonia	784,773	689,041	Ammonia
Lainnya	<u>137,488</u>	<u>138,483</u>	Others
	<u>922,261</u>	<u>827,524</u>	
Jumlah	<u><u>13,532,865</u></u>	<u><u>13,371,676</u></u>	Total
Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:			Details of the sales, based on the customers were as follows:
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pemerintah Republik Indonesia (Catatan 29)	<u>6,557,432</u>	<u>6,639,664</u>	Government of the Republic of Indonesia (Note 29)
Pihak berelasi (Catatan 29)			Related parties (Note 29)
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	190,973	153,943	Subsidy -
- Non-subsidi	292,229	103,172	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	379,010	274,247	Non-fertiliser sales
Lainnya	<u>93,246</u>	<u>80,102</u>	Others
	<u>955,458</u>	<u>611,464</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	2,897,887	2,867,328	Subsidy -
- Non-subsidi	2,672,083	2,780,045	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	426,486	446,929	Non-fertiliser sales
Lainnya	<u>23,519</u>	<u>26,246</u>	Others
	<u>6,019,975</u>	<u>6,120,548</u>	
Jumlah	<u><u>13,532,865</u></u>	<u><u>13,371,676</u></u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/64 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 5 Mei 2025 dan 15 Maret 2024. Per tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, volume penyaluran subsidi masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk bersubsidi yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda secara signifikan.

23. REVENUE (continued)

Revenue from the Government subsidy for the years 2024 and 2023 were recorded according to the subsidised fertiliser prices as audited by BPK-RI and as stated in the Minutes of the Audit Results dated 5 May 2025 and 15 March 2024. As at the issuance date of these consolidated financial statements, the subsidy distributed volume are still being audited by BPK-RI. Historically, the actual approved distributed quantity of fertiliser subsidy and estimates of distributed quantity are not significantly different.

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan kegiatan operasi Grup adalah sebagai berikut:

24. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues based on the Group's operations are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban produksi			Cost of production
Bahan baku dan bahan pembantu	7,835,774	8,096,263	Raw materials and supporting materials
Beban penyusutan (Catatan 11)	1,017,916	930,518	Depreciation expenses (Note 11)
Biaya pengangkutan	832,770	809,214	Transportation expenses
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	841,766	907,811	Salaries, wages and employees welfare
Biaya pemeliharaan	317,599	285,039	Maintenance expenses
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(331,567)	-	Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost
Lainnya	<u>318,909</u>	<u>242,848</u>	Others
	<u>10,833,167</u>	<u>11,271,693</u>	
Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			Finished goods and work in process inventories:
Awal tahun	1,722,742	1,468,773	Beginning of the year
Pembelian pupuk NPK	251,951	-	Purchase of NPK fertiliser
Akhir tahun	<u>(1,121,071)</u>	<u>(1,722,742)</u>	End of the year
Jumlah	<u><u>11,686,789</u></u>	<u><u>11,017,724</u></u>	Total

25. BEBAN PENJUALAN

25. SELLING EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban pelayanan	125,830	103,655	Services expenses
Distribusi	83,245	92,256	Distribution
Gaji dan kesejahteraan karyawan	55,396	86,564	Salaries and employees welfare
Beban penyusutan (Catatan 11)	32,772	29,811	Depreciation expenses (Note 11)
Beban pemeliharaan	22,302	14,149	Maintenance expenses
Beban sewa	5,548	8,110	Rent expenses
Beban perjalanan dinas	2,182	3,368	Travel expenses
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(29,000)	-	Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost
Lainnya	<u>23,457</u>	<u>38,498</u>	Others
Jumlah	<u><u>321,732</u></u>	<u><u>376,411</u></u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	262,728	282,149	<i>Salaries and employees welfare</i>
Jasa konsultan	48,629	44,138	<i>Consulting services</i>
Beban penyuluhan	29,649	35,937	<i>Counselling expenses</i>
Listrik, air dan utilitas	24,066	30,185	<i>Electricity, water and utilities</i>
Beban penyusutan (Catatan 11)	13,734	11,577	<i>Depreciation expenses (Note 11)</i>
Beban perjalanan dinas	9,036	9,078	<i>Travel expenses</i>
Beban pemeliharaan	6,827	8,675	<i>Maintenance expenses</i>
Beban pajak	3,944	5,863	<i>Tax expenses</i>
Asuransi	1,392	1,274	<i>Insurance</i>
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(164,275)	-	<i>Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost</i>
Lainnya	<u>63,575</u>	<u>34,442</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>299,305</u>	<u>463,318</u>	<i>Total</i>

27. BIAYA KEUANGAN

27. FINANCE COSTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban bunga pinjaman			<i>Interest expense from borrowings</i>
- Pinjaman jangka pendek	63,524	41,101	<i>Short-term loans -</i>
- Pinjaman jangka panjang	198,590	371,336	<i>Long-term loans -</i>
Biaya keuangan lainnya	<u>7,703</u>	<u>8,807</u>	<i>Other financing costs</i>
Jumlah	<u>269,817</u>	<u>421,244</u>	<i>Total</i>

28. PENDAPATAN LAINNYA – BERSIH

28. OTHER INCOME – NET

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan denda dan klaim	270,171	30,364	<i>Penalty and claim income</i>
Keuntungan/(kerugian) atas penjualan aset tetap	44,180	(1,021)	<i>Gain/(loss) on the sales of fixed assets</i>
Selisih kurs – bersih	(15,918)	(1,659)	<i>Foreign exchange – net</i>
Keuntungan atas penjualan properti investasi	-	298,326	<i>Gain on sales of investment properties</i>
Lainnya – bersih	<u>125,042</u>	<u>47,486</u>	<i>Others – net</i>
Jumlah	<u>423,475</u>	<u>373,496</u>	<i>Total</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties.

Nature of relationship and accounts/transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/Relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemegang saham utama/ <i>Ultimate parent</i>	Pendapatan subsidi pupuk dan piutang subsidi/ <i>Subsidy fertiliser revenue and subsidy receivables</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas induk/ <i>Parent entity</i>	Sewa, joint cost dan pinjaman jangka panjang/ <i>Lease, joint cost and long-term loan</i>
YKKP	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Pinjaman jangka panjang/ <i>Long-term loan</i>
PT Perkebunan Nusantara IX, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pertamina Patra Niaga, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT BGR Logistik Indonesia, PT Perkebunan Nusantara I, PT Semen Baturaja (Persero) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu PT Telekomunikasi Selular PT Sang Hyang Seri PT Pertamina EP, dan/ <i>and</i> PT Pertamina Gas	Entitas di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Entities under control by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penjualan pupuk, penempatan giro dan deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, pembelian bahan baku, kontrak asuransi, penyedia jasa pergudangan dan logistik/ <i>Sales of fertiliser, placement of current accounts and time deposits, investment credit facility, working capital loans facility, purchase of raw material, insurance contract, warehousing provider and logistics service</i>
PT Pupuk Indonesia Niaga PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Puspetindo Gresik, PT Kaltim Industrial Estate PT Sigma Utama PT Tracon Industri PT Graha Sarana Gresik, PT Petrosida Gresik, dan/ <i>and</i> PT Clariant Kujang Catalysts	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Penjualan dan pembelian pupuk, pembelian bahan baku, jasa pengangkutan pupuk, jasa konstruksi, pendapatan denda/ <i>Sales and purchase of fertiliser, purchase of raw material, fertiliser delivery services, construction services, penalty income.</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Gaji dan imbalan kerja/ <i>Salaries and employee benefits</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/67 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)			29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)
Rincian transaksi dan saldo			Details of transaction and balances
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	241,005	14,136	Bank Mandiri
BNI	6,281	5,306	BNI
BRI	3,260	2,669	BRI
BSI	86	7	BSI
BTN	13	916	BTN
USD			USD
Bank Mandiri	854	666	Bank Mandiri
BNI	119	32	BNI
BTN	97	3	BTN
BRI	25	72	BRI
BSI	18	1	BSI
	<u>251,758</u>	<u>23,808</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
BTN	-	751,000	BTN
BSI	-	500,000	BSI
BRI	-	75,196	BRI
BNI	-	34,450	BNI
	<u>-</u>	<u>1,360,646</u>	
Jumlah	<u>251,758</u>	<u>1,384,454</u>	Total
Aset lancar lainnya			Other current assets
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year
Rupiah			Rupiah
BSI	-	800,000	BSI
Bank Mandiri	-	500,000	Bank Mandiri
BNI	-	451,000	BNI
Kas yang dibatasi penggunaannya porsi lancar			Restricted cash current portion
Rupiah			Rupiah
Mandiri	3,161	2,041	Mandiri
Lainnya	4,464	255	Others
Jumlah	<u>7,625</u>	<u>1,753,296</u>	Total
Piutang usaha			Trade receivables
PT Petrokimia Gresik	57,695	32,198	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Indonesia Niaga	46,954	8,780	PT Pupuk Indonesia Niaga
Lainnya	3,984	5,801	Others
Jumlah	<u>108,633</u>	<u>46,779</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/68 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)			29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)
Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)			Details of transaction and balances (continued)
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Piutang subsidi			Subsidy receivables
Pemerintah Republik Indonesia	43,205	1,054,409	Government of the Republic of Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih			Unbilled subsidy receivables
Pemerintah Republik Indonesia	108,612	127,903	Government of the Republic of Indonesia
Piutang lainnya			Other receivables
PT Petrokimia Gresik	15,399	4,983	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kujang	10,183	3,989	PT Pupuk Kujang
PT Rekayasa Industri	9,702	139,155	PT Rekayasa Industri
PT Pupuk Kalimantan Timur	7,027	1,027	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Iskandar Muda	1,659	183	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Indonesia (Persero)	280	8,986	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Logistik	13	3,047	PT Pupuk Indonesia Logistik
Lainnya	21,256	24,484	Others
Jumlah	<u>65,519</u>	<u>185,854</u>	Total
Utang usaha			Trade payables
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	37,962	30,737	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT BGR Logistik Indonesia	3,546	1,133	PT BGR Logistik Indonesia
PT Perkebunan Nusantara I	2,506	-	PT Perkebunan Nusantara I
PT Semen Baturaja (Persero)	1,331	8,151	PT Semen Baturaja (Persero)
Lainnya	6,942	9,345	Others
Jumlah	<u>52,287</u>	<u>49,366</u>	Total
Utang subsidi			Subsidy payables
Pemerintah Republik Indonesia	31,921	-	Government of the Republic of Indonesia
Utang lainnya			Other payables
PT Rekayasa Industri	-	44,331	PT Rekayasa Industri
Lainnya	2,958	2,057	Others
Jumlah	<u>2,958</u>	<u>46,388</u>	Total
Utang retensi			Retention payables
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	15,926	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Pinjaman pemegang saham			Shareholder loan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	775,000	3,460,000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Pinjaman jangka panjang			Long-term loans
BNI	569,347	165,011	BNI
Bank Mandiri	546,873	798,497	Bank Mandiri
BRI	254,710	73,821	BRI
BSI	254,232	77,196	BSI
BTN	229,227	66,436	BTN
YKKP	2,804	2,809	YKKP
Jumlah	<u>1,857,193</u>	<u>1,183,770</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

Details of transaction and balances (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan			Revenue
			<i>Government of the Republic of Indonesia</i>
Pemerintah Republik Indonesia	6,557,432	6,639,664	
PT Petrokimia Gresik	420,523	298,077	<i>PT Petrokimia Gresik</i>
PT Pupuk Indonesia Niaga	385,042	174,289	<i>PT Pupuk Indonesia Niaga</i>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	48,367	35,149	<i>PT Perusahaan Perdagangan Indonesia</i>
PT Petrosida Gresik	35,230	29,471	<i>PT Petrosida Gresik</i>
PT Pupuk Kujang	13,570	11,562	<i>PT Pupuk Kujang</i>
PT Sang Hyang Seri (Persero)	13,202	7,218	<i>PT Sang Hyang Seri (Persero)</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	8,041	15,096	<i>PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>
PT Pupuk Kalimantan Timur	1,944	10,029	<i>PT Pupuk Kalimantan Timur</i>
Lainnya	29,539	30,573	<i>Others</i>
Jumlah	<u>7,512,890</u>	<u>7,251,128</u>	Total
Pendapatan denda dan klaim			Penalty and claim income
PT ReKayasa Industri	246,565	-	<i>PT ReKayasa Industri</i>
Lainnya	3,660	13,886	<i>Others</i>
Jumlah	<u>250,225</u>	<u>13,886</u>	Total
Pembelian			Purchases
PT Pertamina EP	2,695,179	2,346,527	<i>PT Pertamina EP</i>
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	571,293	628,289	<i>PT Bukit Asam (Persero) Tbk</i>
PT Petrokimia Gresik	364,196	131,672	<i>PT Petrokimia Gresik</i>
PT Pertamina Gas	360,739	417,285	<i>PT Pertamina Gas</i>
PT Pupuk Indonesia Logistik	317,242	456,140	<i>PT Pupuk Indonesia Logistik</i>
PT Pupuk Kujang	160,425	-	<i>PT Pupuk Kujang</i>
PT BGR Logistik Indonesia	45,436	39,988	<i>PT BGR Logistik Indonesia</i>
Lainnya	6,182	4,819	<i>Others</i>
Jumlah	<u>4,520,692</u>	<u>4,024,720</u>	Total

Kompensasi manajemen kunci

Key management compensation

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

The Boards of Commissioners and Directors of the Company are considered as key management personnel.

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Remunerasi	38,527	43,568	<i>Remuneration</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/70 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

<u>31 Desember/December 2024</u>			
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Measured at amortised cost</u>	<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Measured at fair value through other comprehensive income</u>
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	703,733	703,733	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	198,067	198,067	- Trade receivables
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	43,205	43,205	- Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	108,612	108,612	- Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya	73,913	73,913	- Other receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya	45,440	-	- Other non-current financial assets
Jumlah	<u>1,172,970</u>	<u>1,127,530</u>	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	134,726	134,726	- Trade payables
Utang lainnya	24,885	24,885	- Other payables
Utang subsidi	31,921	31,921	- Subsidy payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,179,985	2,179,985	- Accrued liabilities
Pinjaman jangka panjang	3,170,950	3,170,950	- Long-term loans
Utang retensi	133,386	133,386	- Retention payables
Liabilitas sewa	11,088	11,088	- Lease liabilities
Jumlah	<u>5,686,941</u>	<u>5,686,941</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

<u>31 Desember/December 2023</u>			
<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Measured at amortised cost</u>	<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Measured at fair value through other comprehensive income</u>	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	1,454,006	1,454,006	-
Piutang usaha	218,764	218,764	-
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	1,054,409	1,054,409	-
Piutang subsidi yang belum ditagih	127,903	127,903	-
Piutang lainnya	196,917	196,917	-
Aset keuangan lancar lainnya	1,751,000	1,751,000	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya	50,446	8,058	42,388
Jumlah	<u>4,853,445</u>	<u>4,811,057</u>	<u>42,388</u>
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	135,078	135,078	-
Utang lainnya	72,406	72,406	-
Liabilitas yang masih harus dibayar	1,782,056	1,782,056	-
Pinjaman jangka pendek	600,000	600,000	-
Pinjaman jangka panjang	4,799,915	4,799,915	-
Liabilitas sewa	26,863	26,863	-
Jumlah	<u>7,416,318</u>	<u>7,416,318</u>	<u>-</u>

Lampiran 5/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

a. Risiko pasar

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap usaha dan arus kas Grup. Beberapa belanja modal dan pembelian bahan baku berupa gas alam diperkirakan akan terus didenominasi dengan mata uang USD.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika Rupiah melemah/menguat 1% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak tahun berjalan berkurang/bertambah Rp64.052 pada tahun 2024 (2023: Rp33.623) terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko harga

Harga komoditas seperti pupuk dan amonia tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Walaupun basis pelanggan Grup terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Grup tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk, commodity prices risk and interest rates risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, analyse, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange, other price risks and aging analysis for credit risk.

a. Market risk

Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Group's operations and cash flows. Some of the Group's capital expenditures and purchases of raw material in the form of natural gas are expected to continue to be denominated in the USD.

As of 31 December 2024, if the Rupiah had weakened/strengthened by 1% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the year would have been lower/higher by Rp64,052 in 2024 (2023: Rp33,623) mainly as a result of foreign exchange losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in a foreign currency.

Price risk

Commodity prices such as fertiliser and ammonia are unstable due to changes in supply and demand from customers. Although the Group has diverse customers and does not depend on a specific market or country, the Group revenue could be negatively affected by the decrease in commodity prices.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, beban keuangan untuk tahun berjalan akan menjadi lebih tinggi/lebih rendah sebesar Rp95.658 (2023: Rp65.380).

c. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp1.171.520 (2023: Rp4.852.049). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia, piutang subsidi yang belum ditagih, piutang lainnya, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Semua kas di bank dan deposito ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Lihat Catatan 5 dan 6 untuk pembahasan mengenai risiko kredit piutang usaha dan piutang subsidi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo dari piutang usaha dan piutang lainnya adalah sebagai berikut:

	2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Provisi penurunan nilai/ <i>Provision for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kolektif	271,980	42,824	314,804	Collective
Individual	-	96,436	96,436	Individual
Jumlah	271,980	139,260	411,240	Total

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

b. Interest risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

As of 31 December 2024, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, the finance costs for the year would have been Rp95,658 higher/lower (2023: Rp65,380).

c. Credit risk

As at 31 December 2024, the total maximum exposure from credit risk was Rp1,171,520 (2023: Rp4,852,049). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia, unbilled subsidy receivables, other receivables, other current financial assets and other non-current financial assets.

All the cash in banks and deposits are placed in reputable foreign and local banks.

Refer to Notes 5 and 6 for explanation related to the credit risk from trade receivables and subsidy receivables.

As of 31 December 2024 and 2023, the outstanding balances from trade receivables and other receivables were as follows:

Lampiran 5/74 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Credit risk (continued)

	2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Provisi penurunan nilai/ <i>Provision for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kolektif	415,681	5,212	420,893	Collective
Individual	-	98,634	98,634	Individual
Jumlah	415,681	103,846	519,527	Total

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Untuk mengukur KKE, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2024 atau 31 Desember 2024 serta kerugian kredit historis yang dialami, bila ada. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah mencadangkan nilai piutang usaha dan piutang lainnya yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk dan non-pupuk, dan jasa lainnya yang telah dilakukan.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2024 or 31 December 2024 and historical credit losses, if any. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had provided the provision for the balance of trade receivables and other receivables which have been past due and impaired.

The entire balances of trade receivables and other receivables are mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and are spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/75 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- (i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- (ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan
- (iii) meminta pembayaran di muka untuk penjualan pupuk dan non-pupuk untuk pelanggan lama dan baru.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengatur risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Credit risk (continued)

The Group's general policies for sale of fertiliser, non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

- (i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;
- (ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and
- (iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow for short-term expenditures. To manage its liquidity risk, the Group monitors its level of cash and cash equivalents and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in the cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

The following table analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2024			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and less than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	134,726	-	-	134,726	Trade payables
Utang lainnya	24,885	-	-	24,885	Other payables
Utang subsidi	31,921	-	-	31,921	Subsidy payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,178,985	-	-	2,178,985	Accrued liabilities
Liabilitas sewa Pinjaman	8,019	3,828	-	11,847	Lease liabilities
jangka panjang	476,686	2,434,953	2,601,963	5,513,602	Long-term loans
Jumlah	2,855,222	2,438,781	2,601,963	7,895,966	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/76 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

d. Liquidity risk (continued)

	2023			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and less than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	135,078	-	-	135,078	Trade payables
Utang lainnya	72,406	-	-	72,406	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	1,782,056	-	-	1,782,056	Accrued liabilities
Liabilitas sewa	24,080	4,619	-	28,699	Lease liabilities
Pinjaman					
jangka pendek	618,000	-	-	618,000	Short-term loans
Pinjaman					
jangka panjang	3,141,139	1,833,745	216,953	5,191,837	Long-term loans
Jumlah	5,772,759	1,838,364	216,953	7,828,076	Total

e. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek dari instrumen keuangan. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang, sudah menggunakan tingkat suku bunga sesuai dengan pasar kecuali untuk pinjaman dari pemegang saham.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hierarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1).
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2).
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

e. Fair value estimation

As at 31 December 2024 and 2023, the carrying amounts of the other financial assets and liabilities approximated their fair values because of the short-term nature of the financial instruments. While for long-term borrowing, the market-driven interest rate has been applied except for long-term loan from shareholder.

Financial instruments that are measured at fair value at consolidated statement of financial position date and the corresponding fair value are disclosed by level of the following fair value measurement hierarchy:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2).
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

Lampiran 5/77 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

e. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajar.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap diestimasi menggunakan *input* tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

e. Fair value estimation (continued)

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value.

The fair value of long-term loan with fixed interest rate is estimated using the inputs within level 2 of the fair value hierarchy as at 31 December 2024.

	2024		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Pinjaman jangka panjang – PT Pupuk Indonesia (Persero)	775,000	799,913	Long-term loans – PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nilai wajar pinjaman jangka panjang dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada fasilitas pinjaman jangka panjang terakhir yang didapat oleh Grup.

The fair value of the long-term loan from PT Pupuk Indonesia (Persero) is measured using the discounted cash flows based on the interest rate of the latest long-term loan that has been obtained by the Group.

f. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

f. Capital risk management

In managing capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

i. Penugasan dari Pemerintah

i. Public service obligation

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

Supply and distribution of subsidised fertiliser

Permendag No. 4 tahun 2023 menggantikan Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, disebutkan bahwa wilayah tanggung jawab atau wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I, lini II, lini III, sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Permendag No. 4 year 2023 replaced Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 on Procurement and Distribution of Subsidised Fertiliser to the agricultural sector, stated that the responsibility or the procurement and distribution of subsidised fertiliser to farmers' groups and/or farmers starting from line I, line II, line III, up to the line IV determined by PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pada tanggal 5 Januari 2023 dan 14 Maret 2024, PT Pupuk Indonesia (Persero) menerbitkan surat No. 00265/A/PJ/C31ET/2023 dan No. 07060/A/HM/C31ET/2024 perihal pembagian wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku masing-masing terhitung sejak 1 Maret 2023 dan 1 April 2024.

On 5 January 2023 and 14 March 2024, PT Pupuk Indonesia (Persero) issued letter No. 00265/A/PJ/C31ET/2023 and No. 07060/A/HM/C31ET/2024 regarding the segregation of responsibility area for procurement and distribution of subsidised fertiliser effective starting from 1 March 2023 and 1 April 2024, respectively.

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

The highest retail prices of subsidised fertilisers are as follows:

Peraturan Menteri Pertanian/ Decree of the Minister of Agricultural	Tanggal terbit/ Date of issuance	Masa berlaku/ Effective period	Urea per Kilogram/ Urea per Kilogram	NPK per Kilogram/ NPK per Kilogram
Kepmentan No. 734 Tahun 2022	24 September/ September 2022	2023	2,250	2,300
Kepmentan No. 744 Tahun 2023	20 Desember/ December 2023	2024	2,250	2,300
Kepmentan No. 249 Tahun 2024	27 April/ April 2024	2024	2,250	2,300

ii. Pengadaan gas bumi

ii. Procurement of natural gas

Pada tanggal 8 Juli 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang menetapkan mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa pengguna dengan rekanannya, termasuk didalamnya Perusahaan.

On 8 July 2024, the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") of the Republic of Indonesia issued a decree No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 regarding Certain Natural Gas Users in the Industrial Sector which stipulates certain users and prices of natural gas for several users and their partners, including the Company.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/79 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)

ii. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

Perusahaan dan pemasok gas menandatangani perubahan perjanjian sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM dengan rincian sebagai berikut:

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)

ii. Procurement of natural gas (continued)

The Company and gas suppliers entered into amendment of the agreement in accordance with the provisions of the Minister of ESDM with the following details:

Pemasok/ Supplier	Jenis kontrak/Contract type	Kuantitas/ Volume	Periode/ Period
PT Pertamina EP	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Pertamina EP dan Perusahaan No.374A/SP/DIR/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan penambahan terakhir No.487A/SP/DIR/2024 tanggal 21 Juni 2024/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Pertamina EP and the Company No.374A/SP/DIR/2012 dated 20 Desember 2012 with the latest addition No.487A/SP/DIR/2024 dated 21 June 2024.	95 BBTUD	1 Januari/ January 2024 - 31 Desember/ December 2028
PT Pertamina Gas	Perjanjian pengangkutan gas bumi antara PT Pertamina Gas dan Perusahaan No.850A/SP/DIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan penambahan terakhir No.532/SP/DIR/2024 tanggal 23 Juli 2024/Freight of natural gas agreement between PT Pertamina Gas and the Company No.850A/SP/DIR/2015 dated 30 Desember 2015 with the latest addition No.532/SP/DIR/2024 dated 23 July 2024.	40.35 – 95 MMSCFD	1 Januari/ January 2019 - 31 Desember/ December 2034
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Perusahaan No.588/SP/DIR/2024 tanggal 14 Agustus 2024/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang and the Company No.588/SP/DIR/2024 dated 14 August 2024.	11 – 29 BBTUD	11 September/ September 2024 - 31 Desember/ December 2028
PT Tropik Energi Pandan	Kesepakatan Bersama Implementasi Kepmen ESDM 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 19 Juni 2023/Joint Decree on the Implementation of Minister of Energy and Mineral Resources 91.K/MG.01/MEM.M/2023 dated 19 June 2023	1 – 10 BBTUD	1 September/ September 2019 - 31 Desember/ December 2027
PT Medco E&P Grissik	Perubahan terhadap Surat Perjanjian untuk implementasi atas penyesuaian harga gas bumi tanggal 1 Desember 2021 dan perubahannya pada tanggal 20 Desember 2023/Amendments to the Letter of Agreement for the implementation of natural gas prices adjustments dated 1 December 2021 and amendments dated 20 December 2023	73 BBTUD	20 Desember/ December 2023 - 31 Desember/ December 2028
PT Medco E&P Indonesia	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Medco E&P Indonesia dan Perusahaan No.598/SP/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 dengan penambahan terakhir No.592A/SP/DIR/2022 tanggal 25 November 2022/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Medco E&P Indonesia and the Company No.598/SP/DIR/2021 dated 1 December 2021 with the latest addition No.592A/SP/DIR/2022 dated 25 November 2022	5 - 15 BBTUD	1 Agustus/ August 2021 - 27 November/ November 2033
PT Medco E&P Indonesia dan/and PT Medco E&P Lematang	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Lematang dan Perusahaan No.492A/SP/DIR/2023 tanggal 20 September 2023/ Sale and Purchase Agreement on Natural Gas between PT Medco E&P Indonesia and PT Medco E&P Lematang and the Company No.492A/SP/DIR/2023 dated 20 September 2023	5 – 17.63 BBTUD	1 Januari/ January 2023 - 27 November/ November 2033
PT Bukit Asam Tbk	Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bukit Asam Tbk dan Perusahaan No. 029/SP/DIR/2023 tanggal 17 Januari 2023/Coal Sale and Purchase Agreement between PT Bukit Asam Tbk and the Company No. 029/SP/DIR/2023 dated 17 January 2023	1.500.000 ton untuk 3 tahun dengan deviasi 10%/tons for 3 years with 10% deviation	1 Januari/ January 2023 – 31 Desember/ December 2025

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/80 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

iii. Perjanjian kontrak konstruksi

Pada tanggal 13 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak konstruksi dengan Wuhuan Engineering Co, Ltd dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait proyek pembangunan Pabrik Pusri-IIIB Amonia dan Urea yang diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2027. Nilai kontrak dengan Wuhuan Engineering Co, Ltd sebesar USD456.255.000 dan Rp1.171.673 dan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1.445.857.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

iii. Construction contracts agreements

On 13 October 2023, the Company entered into construction contract with Wuhuan Engineering Co, Ltd and PT Adhi Karya (Persero) Tbk related to the construction of the Ammonia and Urea Pusri-IIIB Plant, which estimated to be completed in March 2027. The contract price with Wuhuan Engineering Co, Ltd amounting to USD456,255,000 and Rp1,171,673 and with PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp1,445,857.

33. TRANSAKSI NON KAS

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam laporan arus kas konsolidasian:

33. NON CASH TRANSACTIONS

Below are the investing and financing activities that do not require the use of cash and cash equivalents, which are not presented in the consolidated statement of cash flows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Aktivitas investasi			Investing activities
Penambahan aset tetap melalui akrual	1,230,095	765,617	Acquisition of fixed assets through accrual
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	14,670	73,468	Acquisition of fixed assets through lease liabilities
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui kapitalisasi biaya pinjaman	140,028	8,652	Acquisition of assets under construction through capitalisation of borrowing cost
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui uang muka	172,313	6,895	Acquisition of asset under construction through advance settlement
Penambahan aset tetap melalui persediaan	17,524	6,365	Acquisition of fixed assets through inventories

34. REKONSILIASI UTANG BERSIH

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

34. NET DEBT RECONCILIATION

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 and 2023:

	<u>Liabilitas sewa/ Lease liabilities</u>	<u>Pinjaman jangka pendek/ Short-term loans</u>	<u>Pinjaman jangka panjang/ Long-term loans</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo pada 1 Januari 2023	<u>12,382</u>	<u>625,000</u>	<u>4,327,072</u>	<u>4,964,454</u>	Balance as at 1 January 2023
Arus kas masuk	-	1,628,500	2,064,437	3,692,937	Cash in flows
Arus kas keluar	(61,699)	(1,653,500)	(1,600,000)	(3,315,199)	Cash out flows
Penambahan di tahun berjalan	73,468	-	-	73,468	Addition in current year
Beban bunga	2,712	-	-	2,712	Interest expense
Transaksi non kas lainnya	-	-	8,406	8,406	Other non-cash transactions
Saldo pada 31 Desember 2023	<u>26,863</u>	<u>600,000</u>	<u>4,799,915</u>	<u>5,426,778</u>	Balance as at 31 December 2023
Arus kas masuk	-	5,480,000	2,381,101	7,861,101	Cash in flows
Arus kas keluar	(31,834)	(6,080,000)	(4,118,417)	(10,230,251)	Cash out flows
Penambahan di tahun berjalan	14,670	-	-	14,670	Addition in current year
Beban bunga	1,389	-	-	1,389	Interest expense
Transaksi non kas lainnya	-	-	108,351	108,351	Other non-cash transactions
Saldo pada 31 Desember 2024	<u>11,088</u>	<u>-</u>	<u>3,170,950</u>	<u>3,182,038</u>	Balance as at 31 December 2024

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2025.

**35. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Group's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorised to be issued by the Board of Directors on 7 May 2025.

36. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pinjaman bank jangka pendek

Selama bulan Januari sampai April 2025, Grup melakukan penarikan atas pinjaman bank jangka pendek kepada SMBC dan BNI masing-masing sebesar Rp2.090.000 dan Rp500.000.

Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek

Pada bulan Maret 2025, Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek kepada SMBC sebesar Rp400.000.

36. SUBSEQUENT EVENTS

Short-term bank loans

During January up to April 2025, the Group made withdrawals on short-term bank loans to SMBC and BNI amounting to Rp2,090,000 and Rp500,000, respectively.

Payment of short-term bank loans

In March 2025, the Group made payment of short-term bank loan to SMBC amounting to Rp400,000.

37. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan pada Lampiran 6/1 sampai dengan Lampiran 6/6 adalah informasi keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (entitas induk saja) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas.

37. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The supplementary financial information on Schedule 6/1 up to Schedule 6/6 represents financial information of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (parent entity only) for the years ended 31 December 2024 and 2023 which present the Company's investments in subsidiary under the cost method, as opposed to the consolidation method and investment in associate accounted under the equity method.

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY****Lampiran 6/1 Schedule****INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION OF
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	703,485	1,453,410	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha:			<i>Trade receivables:</i>
- Pihak berelasi	108,630	46,777	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	89,437	160,154	<i>Third parties -</i>
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia		1,011,204	<i>Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia</i>
Piutang subsidi yang belum ditagih	108,612	127,903	<i>Unbilled subsidy receivables</i>
Pajak dibayar di muka:			<i>Prepaid taxes:</i>
- Pajak penghasilan badan	185,779	-	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya	100,787	73,089	<i>Other taxes -</i>
Persediaan	1,497,689	2,116,543	<i>Inventories</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian lancar	73,672	78,291	<i>Advances and prepayments, current portion</i>
Piutang lainnya:			<i>Other receivables:</i>
- Pihak berelasi	64,490	185,449	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	9,423	11,468	<i>Third parties -</i>
Aset lancar lainnya	<u>7,625</u>	<u>1,753,296</u>	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset lancar	<u>2,949,629</u>	<u>7,017,584</u>	<i>Total current assets</i>
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	43,205	43,205	<i>Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia</i>
Pajak dibayar di muka			<i>Prepaid taxes</i>
- Pajak penghasilan badan	54,019	183,708	<i>Corporate income taxes -</i>
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	128,719	168,944	<i>Investment in subsidiary and associate</i>
Aset keuangan tidak lancar lainnya	45,440	42,390	<i>Other non-current financial assets</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka bagian tidak lancar	643,459	927,926	<i>Advances and prepayments, non-current portion</i>
Properti investasi	884,944	815,958	<i>Investment properties</i>
Aset tetap	20,755,051	17,920,638	<i>Fixed assets</i>
Aset tidak lancar lainnya	<u>21,262</u>	<u>28,803</u>	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>22,576,099</u>	<u>20,131,572</u>	<i>Total non-current assets</i>
JUMLAH ASET	<u>25,525,728</u>	<u>27,149,156</u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 6/2 Schedule

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION OF
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	-	600,000	Short-term loans
Utang usaha			Trade payables
- Pihak berelasi	52,291	49,370	Related parties -
- Pihak ketiga	75,226	76,144	Third parties -
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	31,921	-	Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Utang lainnya:			Other payables:
- Pihak berelasi	2,958	46,388	Related parties -
- Pihak ketiga	97,804	108,552	Third parties -
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,178,985	1,782,056	Accrued liabilities
Utang pajak:			Taxes payable:
- Pajak penghasilan badan	11,142	-	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	83,866	51,461	Other taxes -
Bagian jangka pendek atas:			Current portion of:
- Liabilitas sewa	7,529	22,505	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	-	2,932,835	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	244,349	455,025	Employee benefits liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>2,786,071</u>	<u>6,124,336</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	303,974	272,106	Deferred tax liabilities
Bagian jangka panjang atas:			Non-current portion of:
- Liabilitas sewa	3,559	4,358	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	3,168,146	1,864,271	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	4,281	-	Employee benefits liabilities -
Liabilitas imbalan pascakerja	476,234	621,528	Post-employment benefits liabilities
Utang retensi:			Retention payable:
- Pihak berelasi	15,926	-	Related party -
- Pihak ketiga	117,460	-	Third party -
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>4,089,580</u>	<u>2,762,263</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>6,875,651</u>	<u>8,886,599</u>	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 6/3 Schedule

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to owner of the parent entity
Modal saham – modal dasar			
15.000.000 lembar saham; ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 saham biasa Seri B (2023: 5.800.000 saham biasa) dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	5,800,000	5,800,000	<i>Share capital – authorised 15,000,000 shares; issued and fully paid 1 Class A Dwiwarna shares and 5,799,999 Class B (2023: 5,800,000 common shares) shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per shares</i>
Tambahan modal disetor	(333,876)	(333,876)	<i>Additional paid-in-capital</i>
Saldo laba:			<i>Retained earnings:</i>
- Ditentukan penggunaannya	5,792,711	4,937,714	<i>Appropriated -</i>
- Belum ditentukan penggunaannya	1,087,469	1,198,136	<i>Unappropriated -</i>
Penghasilan komprehensif lain	6,303,773	6,660,583	<i>Other comprehensive income</i>
JUMLAH EKUITAS	18,650,077	18,262,557	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	25,525,728	27,149,156	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 6/4 Schedule

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan	13,493,283	13,333,116	Revenue
Beban pokok pendapatan	(11,650,120)	(10,986,200)	Cost of revenues
LABA BRUTO	1,843,163	2,346,916	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(321,728)	(376,144)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(277,511)	(458,384)	General and administrative expenses
Pendapatan lainnya – bersih	423,475	372,910	Other income – net
Pendapatan keuangan	61,198	71,506	Finance income
Biaya keuangan	(269,817)	(421,206)	Finance costs
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	(40,226)	(5,307)	Shares of net income of associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,418,554	1,530,291	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(331,085)	(332,155)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN	1,087,469	1,198,136	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Kerugian pengukuran kembali imbalan pascakerja	(461,365)	(64,148)	Remeasurement loss on post-employment benefits
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,055	-	Changes in the fair value equity investment at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	101,500	14,112	Related income tax
	(356,810)	(50,036)	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	730,659	1,148,100	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 6/5 Schedule

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo laba/ Retained earnings		Komponen ekuitas lainnya/ Other components of equity				Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as at 1 January 2023
	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum determined penggunaannya/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset/ Assets revaluation surplus	Pengukuran kembali imbalan pascakerja/ Remeasurement on post- employment benefits	Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Financial assets available for sale			
Saldo pada 1 Januari 2023	5,800,000	2,656,254	7,339,211	(617,381)	(11,211)	17,489,457	Balance as at 1 January 2023	
Dividen	-	(375,000)	-	-	-	(375,000)	Dividends	
Cadangan umum	-	(2,281,460)	-	-	-	-	General reserves	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1,198,136	-	(50,036)	-	1,148,100	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada 31 Desember 2023	5,800,000	1,198,136	7,339,211	(667,417)	(11,211)	18,262,557	Balance as at 31 December 2023	
Dividen	-	(343,139)	-	-	-	(343,139)	Dividends	
Cadangan umum	-	(854,997)	-	-	-	-	General reserves	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1,087,469	-	(359,865)	3,055	730,659	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada 31 Desember 2024	5,800,000	1,087,469	7,339,211	(1,027,282)	(8,156)	18,550,077	Balance as at 31 December 2024	

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 6/6 Schedule

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6,938,515	6,738,204	Receipts from customers
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Republik Indonesia	7,504,869	6,937,979	Receipts of fertiliser subsidy from the Government of the Republic of Indonesia
Pembayaran kepada pemasok	(9,536,135)	(9,080,106)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(1,048,782)	(1,269,950)	Payment to employees
Penerimaan pendapatan keuangan	66,047	68,182	Receipts of finance income
Pembayaran biaya keuangan	(329,427)	(418,950)	Payment of finance costs
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(1,454)	(6,121)	Placement of restricted cash and cash equivalents
Pembayaran pajak penghasilan badan	(242,780)	(839,034)	Payment of corporate income taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>3,350,853</u>	<u>2,130,204</u>	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan properti investasi	-	347,311	Proceeds from sale of investment properties
Penerimaan penjualan aset tetap	44,665	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan dividen	2,323	160	Proceeds of dividends
Pembelian aset tetap	(3,181,258)	(488,316)	Purchase of fixed assets
Penempatan deposito berjangka	-	(1,751,000)	Placement of time deposits
Penarikan deposito berjangka	1,751,000	-	Withdrawal of time deposits
Pembayaran uang muka untuk aset dalam penyelesaian	-	(906,941)	Advance payment for asset under construction
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1,383,270)</u>	<u>(2,798,786)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			CASH FLOWS FROM
PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	5,480,000	1,628,500	Proceeds of short-term bank loans
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	2,381,101	2,064,437	Proceeds of long-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(6,080,000)	(1,653,500)	Repayments of short-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(4,118,417)	(1,600,000)	Repayments of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	(31,834)	(61,699)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen	(343,139)	(375,000)	Payment of dividends
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(2,712,289)</u>	<u>2,738</u>	Net cash flows (used in)/generated from financing activities
PENURUNAN BERSIH			NET DECREASE IN
KAS DAN SETARA KAS	(744,706)	(665,844)	CASH AND CASH EQUIVALENTS
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(5,219)	(3,986)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>1,453,410</u>	<u>2,123,240</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>703,485</u></u>	<u><u>1,453,410</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR



**PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**

Kantor Pusat

Head Office

Jl. Mayor Zen Palembang 30118, Indonesia

Tel. : +62 711 712222/712111

Fax. : +62 711 712100/712020

E-mail : info@pusri.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Jakarta Representative Office

Wisma 101

Jl. Letjen S Parman Kav 101
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta, 11410, Indonesia

Layanan Pengaduan

Complaints Service

Hallo PUSRI 08001200011

Situs WEB

Website

www.pusri.co.id

